



Tahun
2025
2029

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Bima



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BIMA TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam visi dan misi kepala daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pembangunan di daerah yang efektif, efisien dan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil pembangunan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan arah dan landasan pengaturan dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan sejalan dengan pembangunan jangka Panjang dan pembangunan nasional, diperlukan pengaturan perencanaan pembangunan jangka menengah di daerah;
 - d. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7017);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Bima Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA,
Dan
BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BIMA TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bima;
4. Bupati adalah Bupati Bima.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima;
7. Kepala Badan adalah Kepala Bappeda Kabupaten Bima.
8. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,

dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional serta RPJPD Provinsi NTB dan RPJMD Provinsi NTB;

11. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun;
12. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB-PD adalah rencana strategis bisnis lima tahunan PD yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan mengacu kepada RPJMD;
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bima adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Bima;
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bima untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja-PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun;
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
20. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada

suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;

23. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh satu sub unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;
24. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima;
26. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan. (pindahan dari angka 6);

Pasal 2

- (1). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- (2). RPJMD disusun dengan berpedoman pada :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD provinsi ; dan
 - c. RPJMN;
- (3). RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman :
 - a. bagi PD dalam menyusun Renstra-PD dan Renja-PD;

- b. bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
- c. bagi BLUD dalam menyusun strategi bisnis;
- d. dalam pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil RPJMD; dan
- e. sebagai acuan untuk seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
- f. bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1). RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dengan sistematika yang paling sedikit memuat;
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
 - d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2). Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen RPJMD yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1). Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah jangka menengah.
- (2). Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.

- (3). Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan
- (4). Tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1). Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2). Perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan dalam hal sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3(tiga) Tahun.

Pasal 6

Program RPJMD yang masih berjalan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI BIMA,

ttd

ADY MAHYUDI

Diundangkan di Bima
pada tanggal 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

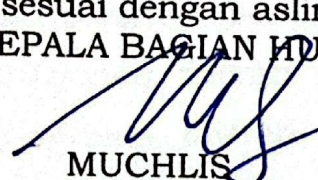
ttd

ADEL LINGGI ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN ...²⁰²⁵ NOMOR...²

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT ²² TAHUN ..²⁰²⁵

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUCHLIS

NIP. 19850817201101016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BIMA TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang yang menjadi milik seluruh rakyat Kabupaten Bima. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, disusun perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara berdaulat, adil dan makmur untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan

rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMD Kabupaten Bima adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025-2029, RPJMD Kabupaten Bima memuat visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung. RPJMD Kabupaten Bima dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Bima. RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang mencakup gambaran perekonomian Kabupaten Bima secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Perangkat Daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029 merupakan kelanjutan untuk mencapai visi dan mewujudkan misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2025-2045. Untuk itu periode 5 (lima) tahun mendatang merupakan periode peningkatan pembangunan Kabupaten Bima yang sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama meningkatk ketersediaan dan kapasitas sarana dan prasarana wilayah, perekonomian yang kuat dan berkualitas, serta ketahanan sosial dan budaya didukung oleh kapasitas pemerintahan yang baik serta daya inovasi dan kreasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan sumber daya alam.

RPJMD diwujudkan dalam visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran cita-cita masyarakat Kabupaten Bima untuk pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yaitu Mewujudkan Kabupaten Bima Bermartabat yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh dan Berkelanjutan Tahap I, dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan misi pembangunan jangka menengah yaitu: (a) Membangun Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan, Makmur Tangguh dan Berkelanjutan, (b) Membangun Kemandirian Daerah untuk

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, (c) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel, (d) Membangun Kapasitas Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Berahlaq, Aman dan Harmonis, (e) Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Pendukung yang Merata dan Berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2025-2029 dilakukan secara teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2025-2029, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima pada setiap tahun anggaran mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. yang dimaksud pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD adalah sebagaimana yang diuraikan dalam BAB II lampiran Peraturan Daerah ini.
- b. yang dimaksud pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD adalah pelaksanaan dari program

yang tertuang dalam BAB IV lampiran Peraturan Daerah ini.

- e. yang dimaksud evaluasi terhadap hasil RPJMD adalah capaian dari pelaksanaan indikator kinerja daerah yang telah tertuang dalam BAB III dan BAB IV lampiran Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG ...



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya.....	I-6
1.3.1. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Bima tahun 2025-2045	I-7
1.3.2. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 dan RPJMN tahun 2025-2029.....	I-7
1.3.3. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2029	I-8
1.3.4. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 dan KLHS RPJMD tahun 2025-2029	I-8
1.3.5. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Bima tahun 2025-2044.....	I-9
1.3.6. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 dan Dokumen Pembangunan Sektor Lain lainnya	I-9
1.3.7. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 dan RKPDP	I-9
1.3.8. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah.....	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan	I-11
1.5. Sistematika	I-11

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-2
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-2
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam	II-8
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.....	II-32
2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II-49
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas	II-51
2.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-55
2.1.7. Demografi	II-63
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-68
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	II-68
2.2.2. Kesehatan Untuk Semua	II-82
2.2.3. Pendidikan Berkualitas Merata	II-87
2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-93
2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-96
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif.....	II-98
2.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-110
2.3.1. Sumber Daya Manusia (SDM)	II-110
2.3.2. IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.....	II-110
2.3.3. Transformasi Digital	II-115
2.3.4. Integrasi Ekonomi dan Global	II-115
2.3.5. Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.....	II-118
2.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro	II-120
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II-123
2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas & Adaptif	II-123



2.4.2. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	II-124
2.4.3. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah	II-125
2.5. Kondisi Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	II-177
2.5.1. TPB 1 Tanpa Kemiskinan	II-178
2.5.2. TPB 2 Tanpa Kelaparan	II-180
2.5.3. TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	II-181
2.5.4. TPB 4 Pendidikan Berkualitas	II-183
2.5.5. TPB 5 Kesenjangan Gender	II-185
2.5.6. TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	II-186
2.5.7. TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	II-187
2.5.8. TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	II-189
2.5.9. TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan	II-190
2.5.10. TPB 11 Kota dan Komunitas Berkelanjutan	II-191
2.5.11. TPB 12 Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab	II-192
2.5.12. TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim	II-193
2.5.13. TPB 14 Ekosistem Laut	II-193
2.5.14. TPB 15 Ekosistem Daratan	II-194
2.5.15. TPB 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh	II-195
2.5.16. TPB 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan	II-196
2.5.17. Kondisi Umum Capaian TPB Kabupaten Bima	II-197
2.6. Gambaran Keuangan Daerah	II-199
2.6.1. Realisasi APBD	II-199
2.6.2. Neraca Daerah	II-202
2.6.3. Proyeksi Keuangan Daerah 2026-2030	II-203
2.7. Permasalahan dan Isu Strategis	II-206
2.7.1. Permasalahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima	II-206
2.7.2. Isu Strategis Kabupaten Bima	II-208

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	III-2
3.1.1. Visi dan Misi	III-2
3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III-8
3.1.3. Keselarasan Sasaran Utama Pembangunan Kabupaten Bima dengan Provinsi NTB Tahun 2025-2029	III-16
3.1.4. Manajemen Risiko Pencapaian Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029	III-17
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-21
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan	III-21
3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-38

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah	IV-2
4.1.1. Daftar Program Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan	IV-2
4.1.2. Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah	IV-30
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-131
3.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-131
3.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)	IV-132

BAB V PENUTUP



RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bima Tahun 2025-2029

Bab 1

PENDAHULUAN





1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Pemerintah Daerah menindaklanjuti hal tersebut dengan melaksanakan pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik wilayahnya. Pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan demokratis dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Merujuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bahwa, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional ini bertujuan untuk: 1) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, ruang, waktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Daerah harus melaksanakan urusan konkuren tersebut dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Untuk menjamin pembangunan daerah dilaksanakan secara sistematis, efisien, efektif, dan tepat sasaran diperlukan perencanaan pembangunan daerah.



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Tujuan perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses, dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah pada periode tertentu. RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Kepala Daerah Kabupaten Bima untuk tahun 2025-2029 telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima wajib menyusun RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bima tahun 2025-2045, RPJMN tahun 2025-2029, KLHS RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029, dan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 juga harus memerhatikan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029.

RPJPD Kabupaten Bima tahun 2025-2045 memiliki visi ***"Kabupaten Bima yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Berkelanjutan"***. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam delapan misi yaitu: 1) Manusia Bima Berkarakter; 2) Kemandirian Ekonomi; 3) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel; 4) Masyarakat yang Aman dan Harmonis; 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Pelestarian Lingkungan; 6) Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; 7) Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Adaptif; serta 8) Pembangunan Berkelanjutan. Pada tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bima adalah ***"Memperkuat Fondasi Transformasi Pembangunan"***. Pada tahap ini, Kabupaten Bima fokus untuk memperkuat fondasi atau dasar pembangunan dalam rangka mencapai visi dan misi. Penguatan fondasi bertujuan untuk menciptakan landasan yang kuat dan berkelanjutan bagi perkembangan wilayah, mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, kemandirian keuangan, ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, dan ekologi.

RPJMN tahun 2025-2029 memiliki visi ***"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas"***. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam delapan prioritas pembangunan nasional yaitu: 1) Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,



narkoba, judi, dan penyelundupan; dan 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sasaran utama RPJMN 2025-2025 adalah: 1) Penurunan kemiskinan; 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3) Pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan; serta 4) Diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Dokumen RPJMN tahun 2025-2025 mengarahkan Kabupaten Bima sebagai **kawasan komoditas unggulan** dan **kawasan swasembada pangan, air, dan energi**. Terdapat empat kawasan komoditas unggulan berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029 yaitu: 1) Kawasan peternakan; 2) Kawasan sentra garam; 3) Kawasan perikanan dan sentra rumput laut; serta 4) Sentra akuakultur komoditas udang. Kawasan swasembada pangan, air, dan energi mengarahkan Kabupaten Bima sebagai kawasan pangan lokal.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2029 memiliki visi ***"Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia"***. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam tujuh misi pembangunan: 1) Membangun manusia yang berkarakter unggul, produktif dan kompetitif; 2) Memperkuat ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, daya saing dan pendapatan perkapita masyarakat sebagai fondasi mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan; 3) Membangun ekosistem industri komoditas unggulan sektor pertanian, peternakan dan kelautan perikanan menuju terwujudnya industri agromaritim yang berkelanjutan; 4) Membangun sektor pariwisata berkualitas, industri kreatif serta mengembangkan seni budaya daerah dan prestasi olahraga; 5) Memperkuat sistem mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan investasi berkelanjutan; 6) Memantapkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan serta memastikan penegakan tata ruang yang berkelanjutan; serta 7) Mempercepat transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif serta kepemimpinan yang kolaboratif dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota sebagai fondasi percepatan pembangunan daerah.

Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 telah merumuskan empat isu strategis prioritas yaitu: 1) Masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat; 2) Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan air limbah; 3) Belum optimalnya upaya mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim; serta 4) Menurunnya kualitas lingkungan hidup. Isu strategis tersebut harus menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029. Hal tersebut penting untuk menjamin tidak terjadinya tumpang-tindih antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan lingkungan.

Berbagai dokumen di atas merupakan pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Bahwa, penyusunan RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 juga harus memperhatikan dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID). Pemerintah Kabupaten Bima belum memiliki dokumen tersebut saat ini, namun Pemerintah Kabupaten Bima akan melakukan penyusunan dokumen RIPJPID ke depan. Sikronisasi dan integrasi antar berbagai dokumen tersebut penting dilakukan untuk menjamin efisiensi serta efektivitas pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bima tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang



berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Pendekatan penyusunan RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik, dan integratif, serta pendekatan spasial. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 dapat menjadi pedoman dan rujukan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan, karakteristik, serta inovasi untuk mewujudkan pembangunan yang demokratis serta berkeadilan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

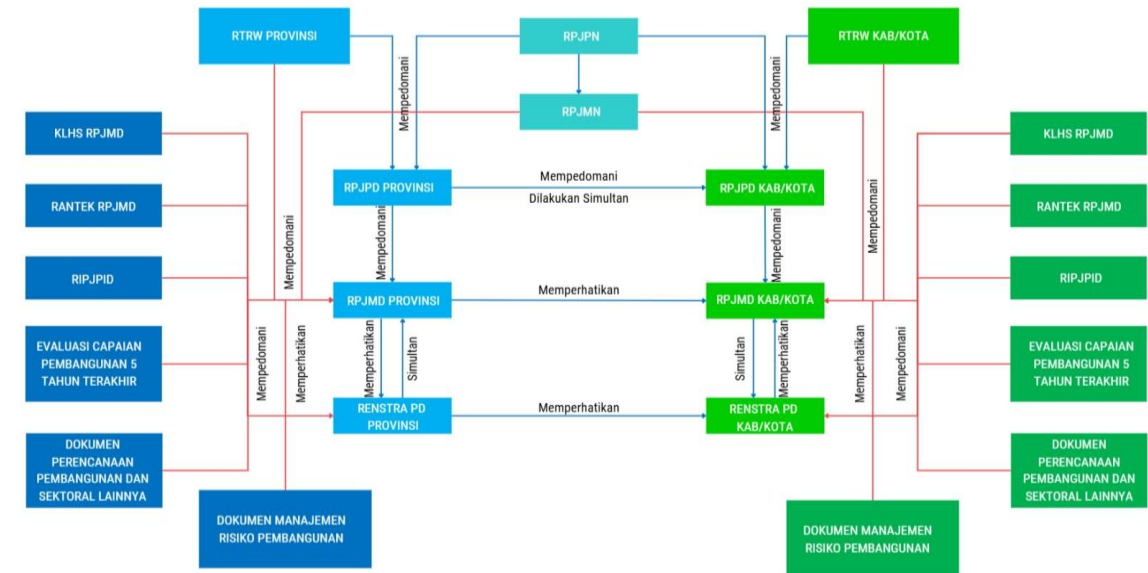
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7017);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 205);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 207);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 213); dan
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 115).

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

RPJMD Kabupaten Bima merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan daerah berpedoman dan mengacu pada kebijakan perencanaan pembangunan di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bima, dokumen yang menjadi acuan adalah RPJMD Provinsi NTB, RPJMN, RPJPD, RTRW Kabupaten, KLHS RPJMD, Rantek RPJMD, RIPJPD, hasil evaluasi capaian pembangunan 5 tahun terakhir, serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.



Gambar 1.1.

Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya
Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

1.3.1. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Bima tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 disusun dengan memedomani RPJPD Kabupaten Bima tahun 2025-2024. Hal ini untuk menjamin sinkronisasi, konsistensi, dan pengintegrasian antara rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Bima. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 harus berpedoman pada tahap I pembangunan RPJPD Kabupaten Bima tahun 2025-2045. Tahapan 1 RPJPD Kabupaten Bima tahun 2025-2045 adalah **"Perkuat Pondasi"**. Arah kebijakan untuk tahap 1 adalah: 1) Peningkatan pemenuhan pelayanan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; 2) Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan penguatan fondasi perekonomian Kabupaten Bima; 3) Peningkatan kualitas SDM aparatur yang berdaya saing dan inovatif; 4) Peningkatan keamanan daerah yang bersih dari konflik sosial, politik, dan agama; 5) Pelestarian budaya dan tradisi serta peningkatan kepedulian terhadap lingkungan; 6) Percepatan dan penguatan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; 7) Penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar yang merata; dan 8) Peningkatan pembangunan berkelanjutan pada pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan.

1.3.2. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 dan RPJMN tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 disusun dengan memedomani RPJMN tahun 2025-2029. RPJMN memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan arah pembangunan kewilayahan, terdapat dua arah pengembangan yaitu **Kawasan Komoditas Unggulan** dan **Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi**. Kawasan komoditas unggulan diarahkan pada: 1) Kawasan peternakan; 2) Kawasan sentra garam; 3) Kawasan perikanan dan sentra



rumput laut; dan 4) Sentra akuakultur-komoditas udang. Kawasan swasembada pangan, air, energi diarahkan pada kawasan pangan lokal.

1.3.3. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 juga harus memerhatikan dokumen RPJMD Provinsi NTB tahun 2025-2029 yang disusun secara simultan dan terkoordinasi. Misi pada RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 yaitu: (1) Membangun Manusia yang berkarakter unggul, produktif dan kompetitif; (2) Memperkuat ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, daya saing dan pendapatan per kapita masyarakat sebagai fondasi mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan; (3) Membangun ekosistem industri komoditas unggulan sektor pertanian, peternakan dan kelautan perikanan menuju terwujudnya industri agromaritim yang berkelanjutan; (4) Membangun sektor pariwisata berkualitas, industri kreatif serta mengembangkan seni budaya daerah dan prestasi olahraga; (5) Memperkuat sistem mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan investasi berkelanjutan; (6) Memantapkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah yang berwawasan lingkungan serta memastikan penegakan tata ruang yang berkelanjutan; dan (7) Mempercepat transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif serta kepemimpinan yang kolaboratif dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota sebagai fondasi percepatan pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 diselaraskan dengan RPJMD Provinsi NTB agar tercipta sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan Pemerintah Provinsi NTB.

1.3.4. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 dan KLHS RPJMD tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 juga disusun dengan memedomani KLHS RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029. Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 memberikan rekomendasi terhadap visi dan misi RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bima Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati Bima terpilih serta menjadi dasar perumusan berdampak pembangunan Kabupaten Bima. Pernyataan visi Kabupaten Bima periode 2025-2029 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bima sampai dengan tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan visi. Penetapan Visi Kabupaten Bima Tahun 2025-2029 perlu memerhatikan kondisi Kabupaten Bima saat ini khususnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kondisi lingkungan hidup dirasa penting dari berkembangnya Kabupaten Bima dari tahun ke tahun. Seperti diketahui perubahan penggunaan lahan dan munculnya isu-isu lingkungan yang menjadi permasalahan perlu untuk menjadi perhatian. Adapun rekomendasi terhadap perumusan Visi RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 yaitu terkait **lingkungan hidup** dan **pembangunan berkelanjutan**. Rekomendasi misi pembangunan RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 berdasarkan KLHS Kabupaten Bima tahun 2025-2029 adalah: 1) Penurunan tingkat kemiskinan; 2) Peningkatan kehidupan sehat dan sejahtera; 3) Peningkatan pendidikan berkualitas; 4) Optimalisasi penyediaan sarana dan



prasarana pendukung kota dan permukiman berkelanjutan; 5) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; 6) Pengelolaan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan; serta 7) Penyelesaian penanganan perubahan iklim dan penguatan mitigasi bencana.

1.3.5. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Bima tahun 2025-2044

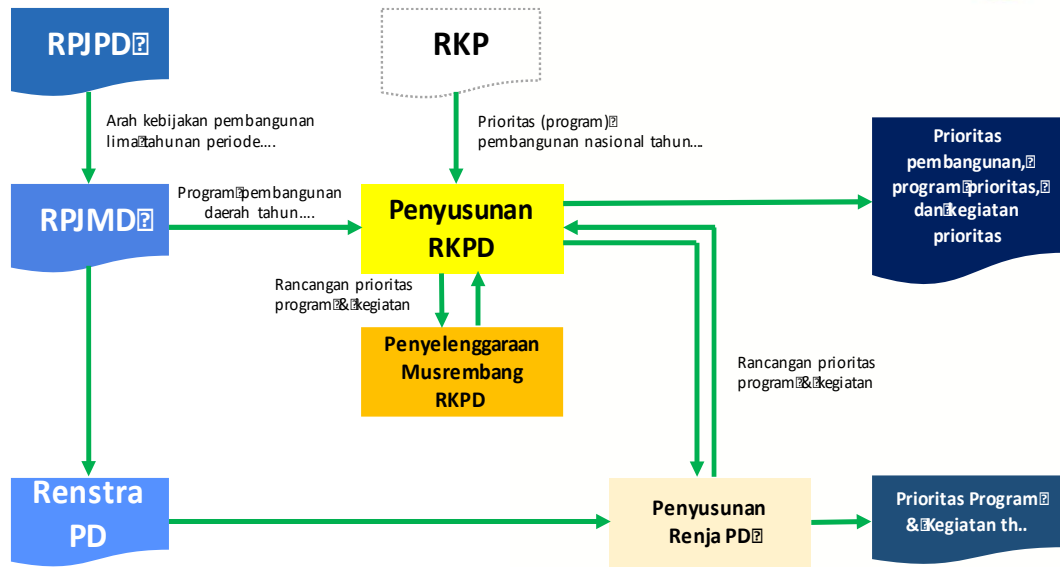
RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 disusun dengan memedomani RTRW Kabupaten Bima tahun 2025-2044. Hal ini untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bima adalah mewujudkan ruang yang berwawasan lingkungan guna mendorong tumbuhnya ekonomi hijau pada sektor-sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya harus mengintegrasikan RTRW dengan rencana pembangunan daerah.

1.3.6. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 dan Dokumen Pembangunan Sektorial Lainnya

RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya. Beberapa dokumen perencanaan sektoral yang perlu menjadi pedoman adalah *RAD Sustainable Development Goals (SDG's)* Kabupaten Bima, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bima, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bima tahun 2015-2035, *Grand Design* Pembangunan Kependudukan tahun 2023-2045, *Masterplan Integrated Area Development* Mitigasi Bencana Kabupaten Bima tahun 2024-2030, Kajian Resiko Bencana Kabupaten Bima, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, serta Rencana Kontijensi Kabupaten Bima, Dokumen RISPAM dan Dokumen PRKBI Kabupaten Bima.

1.3.7. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 dan RKPD

RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; serta rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen RKPD ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah.



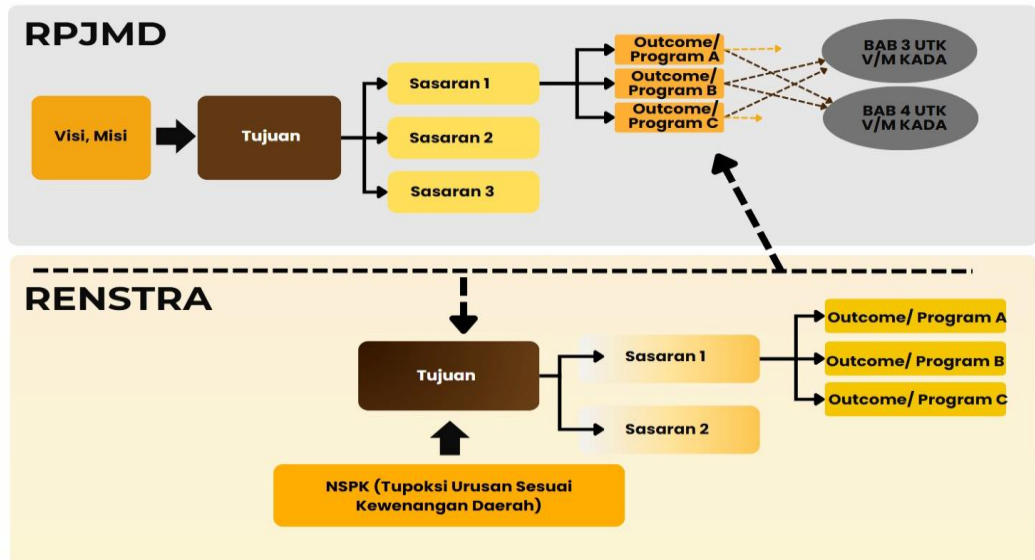
Gambar 1.2.

Keterkaitan RPJMD dan RKP

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.3.8. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sasaran pada dokumen RPJMD akan menjadi acuan penyusunan tujuan perangkat daerah. Tujuan perangkat daerah tersebut akan dirumuskan ke dalam sasaran dan *outcome* perangkat daerah. Capaian *outcome* pada masing-masing Rencana Strategis Perangkat Daerah akan mendukung capaian *outcome* sasaran RPJMD tahun 2025-2029.



Gambar 1.3.

Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sumber: Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Bima sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan Kepala Daerah terpilih masa bakti 2025-2029. Agar seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi dalam meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat;
2. Menetapkan dan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bima ke dalam kebijakan, program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas serta indikator kinerja capaian pembangunan daerah secara berkala;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan sektoral lainnya dalam mewujudkan daerah lebih sistematis, holistik, efektif, dan efisien; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk penguatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang mensejahterakan masyarakat.

1.5. Sistematika

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini menjelaskan terkait visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Bima hingga tahun 2029. Bab ini juga menguraikan strategi dan arah kebijakan serta program prioritas daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029.

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini berisi tentang program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah yang dilengkapi dengan indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah tahun 2025-2029. Bab ini juga menguraikan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), serta target penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bagian ini menyampaikan secara singkat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, proses pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dalam dokumen RPJMD sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.



RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bima Tahun 2025-2029

Bab 2

GAMBARAN UMUM DAERAH





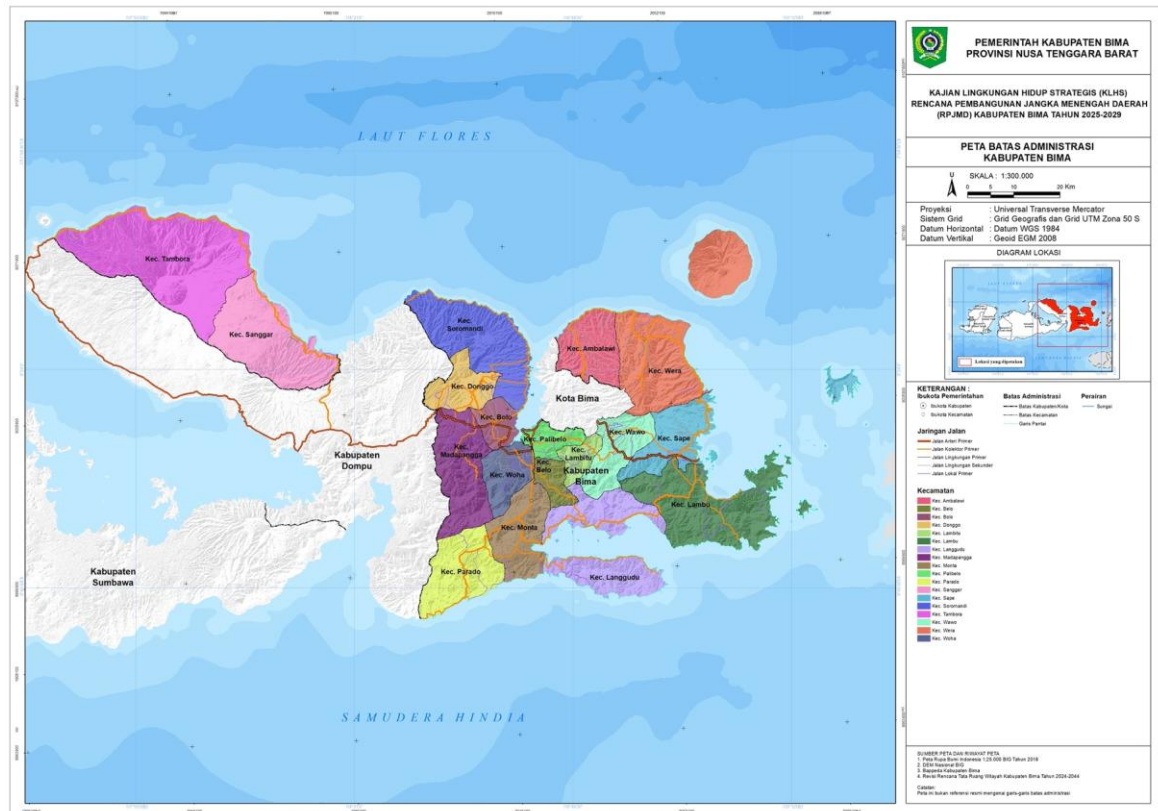
Gambaran umum daerah merupakan tinjauan komprehensif yang menyajikan potret keseluruhan situasi dan perkembangan daerah melalui berbagai indikator dan aspek pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bagian gambaran umum kondisi daerah dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan daerah selama periode lima tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, gambaran umum kondisi daerah dalam RPJMD yang paling mendasar terdiri dari aspek geografi dan demografi, potensi daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Merujuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, bahwa gambaran umum daerah mencakup tiga subbab. Subbab pertama adalah gambaran umum kondisi daerah paling sedikit memuat empat aspek yaitu aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek daya saing daerah; dan aspek pelayanan umum. Subbab kedua adalah gambaran keuangan daerah yang memuat penjelasan realisasi APBD tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun 2025-2029. Subbab ketiga adalah permasalahan dan isu strategis.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Bima merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan berada pada bagian paling timur Pulau Sumbawa, diapit oleh Kabupaten Dompu di sebelah Barat, Selat Sape di sebelah Timur, dan Laut Flores di sebelah Utara serta Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Bima berada pada posisi strategis yang dilalui jalan nasional lintas Provinsi NTB-Provinsi NTT. Menurut letak astronominya, Kabupaten Bima berada pada 1180 44' – 1190 22' BT dan 080 08' – 08 057' LS. Selain itu, Kabupaten Bima memiliki 98 pulau yang tersebar di sepanjang wilayah Kabupaten Bima. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2 - 2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, luas wilayah Kabupaten Bima yaitu **4.208,861 km²** yang terbagi menjadi 18 kecamatan dengan luas wilayah yang bervariasi.

Kecamatan Tambora merupakan kecamatan terluas dengan luas mencapai 627,82 km² atau 14,3 persen dari luas Kabupaten Bima, diikuti Kecamatan Sanggar dan Kecamatan Wera. Sementara itu kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Belo yang hanya memiliki luas sebesar 44,76 km². Jika diukur berdasarkan jarak ke Ibukota Kabupaten Bima. Kecamatan Tambora dan Kecamatan Sanggar merupakan kecamatan dengan jarak terjauh dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bima, jarak masing-masing sekitar 250 km dan 130 km.



Gambar 2.1.

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bima

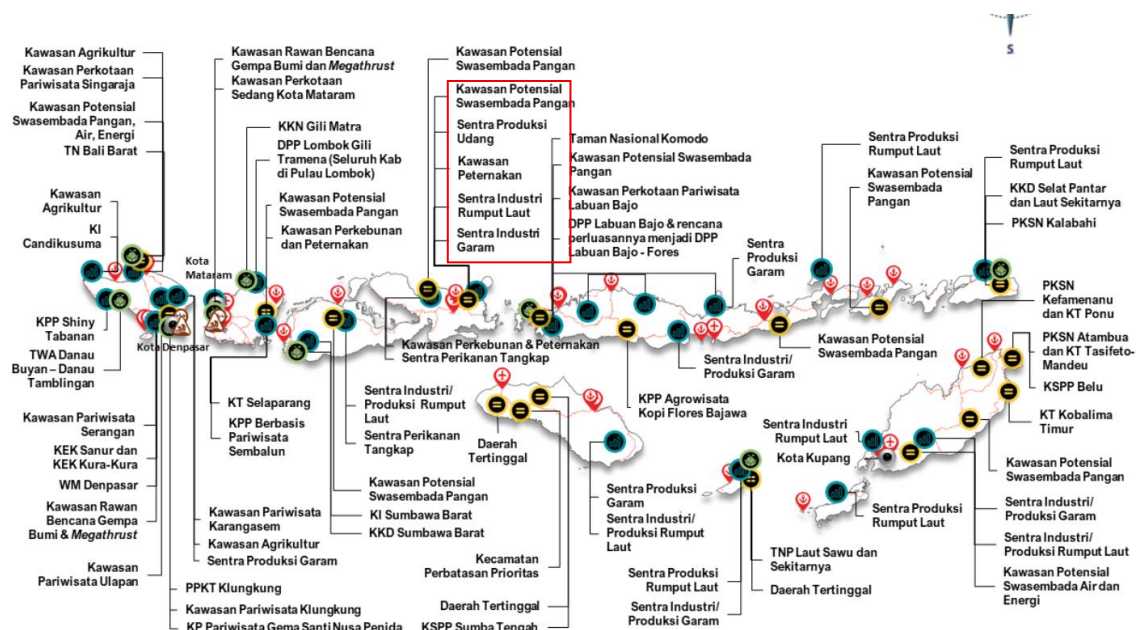
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029

Kabupaten Bima, sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki sejumlah potensi yang mendukung peran tersebut. Secara ekonomi, Kabupaten Bima dikenal dengan sektor unggulan di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan yang menjadi penopang utama pendapatan masyarakat. Komoditas seperti jagung, sapi, dan ikan laut memiliki daya saing yang tinggi di pasar regional maupun nasional. Pada sektor pariwisata, keberadaan destinasi alam seperti Pantai Wane, Kalaki, serta keindahan pesisir Teluk Bima memberikan peluang besar untuk pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan di Kabupaten Bima.

Dari sisi infrastruktur, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan dan perbaikan jaringan jalan, pelabuhan, dan sarana telekomunikasi guna mendukung kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang. Dalam aspek lingkungan hidup, Kabupaten Bima menghadapi tantangan rawan bencana seperti banjir dan kekeringan, sehingga diperlukan strategi mitigasi dan adaptasi berbasis ekosistem guna menjaga daya dukung lingkungan. Sementara itu, kekayaan budaya lokal seperti tradisi Mbolo Weki dan seni bela diri Mpa'a terus dijaga dan dikembangkan sebagai bagian dari identitas daerah yang memperkuat jati diri masyarakat Bima. Dengan mempertimbangkan posisi geografis dan potensi sumber daya yang dimiliki, peran strategis Kabupaten Bima akan ditelaah lebih lanjut melalui keterkaitannya dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional.



Kabupaten Bima memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Penempatan Kabupaten Bima sebagai salah satu lokasi prioritas nasional menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi unggulan yang berperan besar dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan perekonomian daerah berbasis sumber daya lokal. Secara geografis dan sosiokultural, Kabupaten Bima memiliki sumber daya yang melimpah dan masyarakat yang adaptif terhadap berbagai kegiatan ekonomi produktif. Potensi ini diperkuat oleh penempatan beberapa sektor prioritas dalam RPJMN yang menjadikan Kabupaten Bima sebagai salah satu lokasi prioritas pengembangan kawasan unggulan nasional. Dokumen RPJMN tahun 2025-2025 mengarahkan Kabupaten Bima sebagai **kawasan komoditas unggulan** dan **kawasan swasembada pangan, air, dan energi**. Terdapat empat kawasan komoditas unggulan berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029 yaitu: 1) **Kawasan peternakan**; 2) **Kawasan sentra garam**; 3) **Kawasan perikanan dan sentra rumput laut**; serta 4) **Sentra akuakultur komoditas udang**. Kawasan swasembada pangan, air, dan energi mengarahkan Kabupaten Bima sebagai **kawasan pangan lokal**.



Gambar 2.2.

Kabupaten Bima Sebagai Salah Satu Lokasi Prioritas Pembangunan 2025–2029

Sumber: Lampiran 1-6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

1) Pusat Pengembangan Kawasan Peternakan

Kabupaten Bima ditetapkan sebagai lokasi prioritas pengembangan kawasan peternakan nasional bersama beberapa kabupaten lainnya di Pulau Sumbawa dan Lombok. Pemerintah pusat mendorong pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani melalui penyediaan benih ternak unggul, sarana perbibitan, prasarana pengolahan, layanan kesehatan hewan, serta penguatan pemasaran hasil peternakan. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kualitas dan



kuantitas hasil peternakan melalui bantuan pakan, bibit, sertifikasi mutu, alat dan mesin peternakan, serta optimalisasi reproduksi ternak. Potensi wilayah yang luas, tersedianya lahan penggembalaan, serta budaya beternak masyarakat menjadikan Kabupaten Bima sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sentra produksi protein hewani nasional. Potensi geografis yang luas, ketersediaan lahan, serta kultur masyarakat yang kuat terhadap kegiatan peternakan menjadikan daerah ini strategis dalam menyediakan sumber protein hewani nasional. Dukungan terhadap pengembangan benih ternak unggul, prasarana perbibitan, hingga layanan kesehatan hewan memperkuat ekosistem hulu hingga hilir peternakan. Ini memberikan *multiplier effect* terhadap kesejahteraan peternak, pengurangan angka kemiskinan di pedesaan, dan stabilisasi ketahanan pangan. Komoditas peternakan unggulan di Kabupaten Bima diantaranya adalah sapi, ayam pedaging dan ayam petelur. Lokasi prioritas pada pola peternakan sapi kandang yaitu di Kecamatan Monta, Belo, Palibelo, Madapangga, dan Bolo. Pola peternakan sapi lepas yaitu di Kecamatan Wera, Sanggar, dan Tambora. Lokasi produksi ayam pedaging tersebar di beberapa kecamatan namun masih didominasi oleh produksi ayam pedaging yang difasilitasi oleh Perusahaan. Lokasi potensial ayam petelur yaitu di Kecamatan Tambora, Donggo, Lambitu, dan Wawo.

2) Kawasan Sentra Garam Rakyat

Kabupaten Bima menjadi bagian dari pengembangan Kawasan Sentra Garam Rakyat bersama beberapa Kabupaten pesisir lainnya. Karakteristik iklim dan garis pantai yang panjang serta kadar salinitas yang tinggi, Kabupaten Bima sangat cocok untuk produksi garam berkualitas tinggi. Program pengembangan ini mencakup pengembangan garam industri terintegrasi, pembentukan korporasi petambak garam, peningkatan kualitas garam agar sesuai standar industri (pangan, farmasi, kosmetik), serta penguatan sarana prasarana niaga dan produksi. Pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas dan kelembagaan petambak melalui fasilitasi bantuan dan pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk membangun daya saing petambak garam lokal sekaligus mengurangi ketergantungan pada garam impor. Kabupaten Bima memiliki garis pantai yang panjang dengan potensi salinitas tinggi, menjadikannya sebagai lokasi ideal dalam pengembangan garam rakyat. Strategi nasional menempatkan Bima sebagai salah satu simpul utama dalam penguatan industri garam nasional, tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas untuk memenuhi spesifikasi industri farmasi dan pangan. Penguatan kelembagaan petambak, pengembangan korporasi, serta fasilitasi sarana dan prasarana produksi dan distribusi akan mendorong transformasi ekonomi masyarakat pesisir. Lokasi prioritas pengembangan kawasan sentra garam berada di Kecamatan Bolo, Woha, Lambu, dan Palibelo.

3) Sentra Budidaya dan Hilirisasi Rumput Laut

Program sentra budidaya dan hilirisasi rumput laut mencakup jaminan ketersediaan bahan baku industri, peningkatan kualitas dan produktivitas budidaya, pengembangan klaster berbasis masyarakat, serta penguatan teknologi pembibitan. Selain itu, pemerintah juga mendorong hilirisasi produk rumput laut melalui pengembangan biostimulan, pangan olahan, hingga nutrasetikal dan pakan ternak. Penekanan pada fasilitasi pembiayaan, peningkatan kewirausahaan, dan penguatan koperasi turut menjadi bagian integral dari strategi pengembangan. Adanya



dukungan terhadap pengembangan infrastruktur di sekitar sentra produksi memperkuat posisi Kabupaten Bima sebagai simpul penting dalam rantai nilai industri rumput laut nasional. Letak geografis Kabupaten Bima yang berada di kawasan perairan tropis mendukung potensi besar untuk pengembangan rumput laut. Keberadaan Bima dalam prioritas kawasan hilirisasi rumput laut menempatkannya sebagai simpul penting dalam rantai pasok industri bioteknologi laut (bioindustri). Arah hilirisasi, penguatan SDM pembudidaya, dukungan infrastruktur dan investasi akan mendorong munculnya industri baru berbasis bahan baku lokal yang berorientasi ekspor dan berkelanjutan. Lokasi prioritas pengembangan komoditas rumput laut yaitu Kecamatan Langgudu, Sape, dan Monta

4) **Sentra Akuakultur – Komoditas Udang**

Pengembangan sentra akuakultur udang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi tambak rakyat melalui pendekatan klaster kawasan budidaya. Program revitalisasi ini mencakup penyediaan benih udang unggul, pembangunan sarana pengolahan hasil kelautan dan perikanan (KP), penguatan fasilitas penyimpanan produk, serta pengadaan sarana distribusi logistik yang mampu mempercepat akses pasar hasil perikanan budidaya. Lebih lanjut, pengembangan akuakultur komoditas udang juga diarahkan pada peningkatan mutu genetik melalui program *breeding* induk unggul, serta penataan infrastruktur irigasi tambak yang selama ini menjadi kendala dalam optimalisasi produksi. Penanganan persoalan sedimentasi melalui pengerukan muara sungai, terutama di kawasan pesisir yang menjadi jalur irigasi alami tambak, merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas lingkungan perairan tambak. Dalam konteks tata kelola, Pemerintah Pusat juga mendorong penyederhanaan perizinan lintas sektor, sehingga pelaku usaha tambak udang di daerah dapat menjalankan usahanya dengan kepastian hukum dan prosedur yang lebih efisien. Di sisi hilir, perhatian juga diberikan pada peningkatan mutu produk udang agar mampu menembus pasar ekspor dengan standar yang tinggi, melalui sertifikasi, sistem jaminan mutu, dan penguatan daya saing produk perikanan Indonesia secara global.

Dari perspektif pembangunan daerah, Kabupaten Bima dapat memainkan peran strategis sebagai daerah pendukung (*supporting region*) terhadap pengembangan kawasan sentra udang di Sumbawa. Peran ini dapat diwujudkan melalui penguatan sistem logistik, konektivitas antarwilayah pesisir, dan penyediaan SDM terampil di bidang perikanan budidaya, termasuk pendidikan vokasi dan pelatihan teknis untuk pembudidaya. Dengan mengembangkan simpul distribusi dan layanan teknis di kawasan timur Sumbawa, Kabupaten Bima berpotensi menjadi bagian dari ekosistem rantai pasok udang nasional, terutama dalam pemenuhan kebutuhan benih, pakan, bahan pendukung budidaya, serta distribusi produk ke pasar domestik dan ekspor. Secara strategis, pengembangan sektor akuakultur udang di sekitar wilayah Bima juga selaras dengan agenda nasional untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi biru (*blue economy*) yang berkelanjutan dan inklusif. Peran Kabupaten Bima dalam sektor ini tidak hanya mendukung diversifikasi ekonomi lokal, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan laut, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir. Lokasi prioritas pengembangan udang vaname rakyat yaitu di Kecamatan Langgudu, Woha, Bolo, dan Soromandi. Komoditas udang vaname (perusahaan) potensial dilakukan di



Kecamatan Sape, Langgudu, Lambu, Wera, Soromandi, Parado, Tambora, dan Sanggar.

5) Pengembangan Kawasan Lokal Terintegrasi

Pada sektor pengembangan kawasan lokal, Kabupaten Bima berperan dalam mendukung kemandirian pangan lokal Sumbawa. Program ini melibatkan penguatan pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan, sertifikasi produk dan benih, serta pengembangan lahan pertanian produktif. Pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan tani, jaringan irigasi, serta pengembangan kawasan padi dan jagung diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Di samping itu, pengembangan pangan hewani, penguatan koperasi sektor produksi, dan pembangunan industri pakan ternak berbasis jagung dan sorgum menjadi bagian penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan petani serta peternak. Unit usaha peternakan yang dibina melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan jaminan mutu produk hewani. Kabupaten Bima juga memiliki peran penting dalam penguatan kawasan lokal melalui diversifikasi pangan dan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat. Pendekatan integratif antara subsektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan menjadikan Bima sebagai miniatur ketahanan pangan berbasis lokal. Pembangunan infrastruktur jalan tani, irigasi, serta pengembangan industri pakan ternak berbasis jagung dan sorgum memberi peluang bagi daerah untuk membangun sistem pangan tangguh dan mandiri.

6) Penguatan Ketahanan Pesisir dan Konservasi Laut

Program penguatan ketahanan pesisir dan laut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekosistem perairan melalui pengamanan wilayah pesisir, khususnya pada kawasan konservasi laut dan pesisir. Ini penting mengingat Bima memiliki wilayah pesisir yang luas dengan fungsi ekologis yang tinggi sebagai penyangga ekosistem dan kawasan perikanan tangkap serta budidaya. Arahkan pengamanan pesisir, restorasi muara, dan konservasi terumbu karang menunjukkan pentingnya peran ekologis Bima sebagai penjaga keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir di Nusa Tenggara Barat.

7) Kawasan Swasembada Pangan dan Energi

Kabupaten Bima juga termasuk dalam kawasan swasembada pangan, air, dan energi, khususnya dalam pengembangan pangan lokal. Program ini mendorong optimalisasi potensi pertanian lokal untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi dan pangan berbasis sumber daya terbarukan. Peningkatan kapasitas petani dan kelompok tani hutan (KTH), sertifikasi benih, dan penguatan kelembagaan usaha koperasi menjadi bagian penting dari strategi pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Melalui keseluruhan strategi dan program tersebut, jelas bahwa peran strategis Kabupaten Bima bukan hanya sekadar penopang kawasan timur Indonesia, tetapi juga sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi hijau berbasis komoditas unggulan lokal. Transformasi struktural dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier dilakukan melalui pendekatan integratif: mulai dari penguatan hulu, penyediaan sarana prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi produk, hingga penguatan kelembagaan dan akses pasar. Komoditas unggulan pangan lokal di Kabupaten Bima, yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, tembakau, kopi, kemiri, dan tebu. Lokasi prioritas pengembangan masing-masing



komoditas yaitu: (a) Padi di Kecamatan Monta (pela, sie, simpasai), Kecamatan Ambalawi (Rite, Kole, Tolowata, Talapiti), Kecamatan Madapngga (Ndano, Bolo, Dena, Tonda), Kecamatan Bolo (Darusalam, Tambe, Sondosia, Bontokape); (b) Jagung potensial dilakukan di seluruh Kecamatan, namun sentranya terdapat di Kecamatan sanggar, tambora, donggo, madapangga, soromandi; (c) Kedelai di Kecamatan Palibelo dan Bolo; (d) Bawang Merah di Kecamatan Lambu, Sape, Wera, Belo, Monta, Woha, Soromandi, dan Sanggar; (e) Tembakau di Kecamatan Woha, Madapangga, Tambora (sudah bermitra dengan perusahaan), dan Kecamatan Sape (mandiri/belum bermitra); (f) Kopi di Kecamatan Wawo, Tambora, Langgudu, dan Donggo; (g) Kemiri di Kecamatan Parado, Wawo, Tambora, dan Donggo; dan (f) Tebu di Kecamatan Sanggar (sudah bermitra dengan PT. SMS)

8) Bima dalam kawasan super strategis BOPLF (Badan Otorita pengelola Kawasan Pariwisata Kabuan Bajo Flores)

Berdasarkan Peraturan Presiden 32 tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, Kabupaten Bima berada pada wilayah pengembangan dan pembangunan kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. Adanya BOPLF ini diharapkan dapat berdampak positif pada percepatan pembangunan daerah Kabupaten Bima.

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Bima memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan beragam. Secara topografi, Kabupaten Bima memiliki karakteristik dominan berupa dataran rendah hingga perbukitan landai dengan kemiringan sedang. Hal ini tecermin dari data ketinggian yang menunjukkan bahwa sekitar 40,34% wilayah kabupaten berada pada elevasi 0-200 meter, sementara area dengan ketinggian 1500-3000 meter sangat terbatas, hanya mencakup sekitar 3,23% dari total luas wilayah. Selaras dengan kondisi ketinggian tersebut, data kemiringan lereng juga mengindikasikan bahwa mayoritas wilayah memiliki kemiringan sedang, dengan kategori 5-15% menjadi yang paling dominan, mencakup 288.393,17 hektar. Lereng datar (0-2%) dan landai (2-5%) juga cukup signifikan tersebar di beberapa kecamatan, namun area dengan kemiringan curam (15-40%) sangat minim dan terpusat di beberapa lokasi saja. Dengan demikian, kondisi topografi Kabupaten Bima secara keseluruhan dicirikan oleh relief yang bervariasi dari datar hingga bergelombang sedang, dengan proporsi area dataran rendah dan lereng sedang yang paling luas. Karakteristik ini memberikan potensi untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan, namun juga memerlukan pertimbangan mitigasi risiko, khususnya di area dengan kemiringan lereng yang lebih curam, meskipun persentasenya kecil.

Kondisi klimatologi di Kabupaten Bima berdasarkan data curah hujan menunjukkan adanya dua musim yang kontras. Musim penghujan berlangsung efektif dari November hingga Maret dengan curah hujan di atas 100 milimeter, yang optimal untuk mendukung aktivitas pertanian dan pengisian ulang sumber air. Sebaliknya, musim kemarau yang membentang dari Mei hingga Oktober dicirikan oleh curah hujan yang sangat minim bahkan mencapai nol. Kondisi ini memerlukan strategi pengelolaan air yang efektif dan adaptasi pertanian yang resilient untuk menghadapi periode kering yang panjang. Kabupaten Bima memiliki banyak daerah aliran sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil dengan panjang aliran antara 4 sampai 77 km. Kondisi ini menjadi potensi pertanian karena adanya sumber irigasi dari daerah aliran sungai. Sungai-sungai yang sudah dimanfaatkan untuk



irigasi pada daerah Irigasi dengan luas baku sawah pada tahun 2024 secara rinci seperti pada tabel 2.1. berikut.

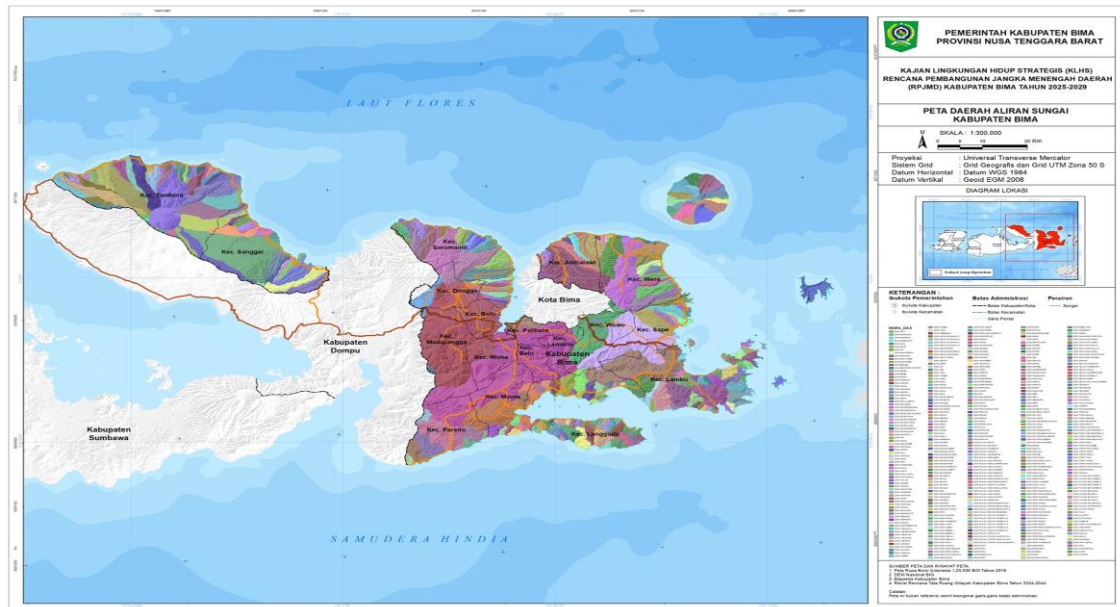
Tabel 2.1.
Sungai-Sungai yang Mengairi Daerah Irigasi di Kabupaten Bima

No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)	Daerah Irigasi	Kecamatan	Luas Baku (Ha)
1	Sori Lamoti	22,37	Lebo	Madapangga	623
			Keru Woro	Madapangga	120
2	Sori Bamba	6,14	Embung Woro	Madapangga	452
3	Sori Seli	15,27	Mori Rade	Madapangga	307
4	Sori Dena	4,81	La Keda	Madapangga	75
5	Sori Pangga	5,15	Madapangga	Madapangga	459
			Madapangga II		2.000
			Ncangakai Ncoha		1.672
6	Sori Lante	7,09	Mboda	Bolo	125
			mpungga	Bolo	75
7	Sori Mboda	15,93	Salampe	Bolo	82
8	Sori Campa	4,151	Bendung Bontokape	Bolo	505
9	Sori Lantule	9,28	Mada Palama	Donggo	100
10	Sori Keraku	12,86	Rora Kecil	Donggo	601
11	Sori Nae	15,84	Sori Monca	Donggo	300
12	Sori Ndano Rangga	7,73	Ndano Rangga	Donggo	520
13	Sori Diwujarah	7,03	Diwu Tangiri	Soromandi	500
			Pelaparado	Parado	4.815
14	Sori Ncanga	8,11	Sori Ncanga Parado	Parado	100
15	Sori Madokambo	8,11	Tolotangga	Parado	485
16	Sori Nae	6,29	Bendung So Nae	Monta	275
17	Sori Nari	8,82	Bendung Ina Kece	Monta	165
18	Sori Peto	3,31	Bendung Peto	Monta	300
19	Sori Nae	8,93	Embung Waworada	Langgudu	125
20	Sori Nganco	4,7	Diwu Sadundu	Langgudu	900
21	Sori Rabakalo	5,97	La Kalo	Langgudu	160
22	Sori Nggira	7,54	Embung Nggira I	Langgudu	25
			Embung Nggira II	Langgudu	35
			Ompu Sao	Langgudu	160
23	Sori Na'e	19,626	Potu	Lambu	75
24	Sori Ta'alapa	60,66	Lati	Sape	150
25	Sori Pai	10,43	Sari	Sape	622
26	Sori Pai	10,43	Kakumi	Sape	150
27	Sori Jangka	73,91	Rababou	Sape	368
28	Sori Jangka	73,91	Wuwu	Sape	346
29	Sori Ntimu	77,28	E. Kowo	Sape	220
			Sumi Sape	Sape	2.650
30	Sori Oi Wobo	7,64	Sambu	Wawo	100
31	Sori Bombo	10,31	Leka	Palibelo	350
			Karanu Ntonggu	Palibelo	566
32	Sori Lewindede	6,87	So Wuwu	Palibelo	150
33	Sori Teke	5,16	La Fanda	Palibelo	75
34	Sori Lapasariuru	7,13	Embung Roi	Belo	782
			Cenggu	Belo	50
35	Sori Nae	7,046	Tonggondoa Ngali	Belo	750
			Embung Ncera	Belo	329
36	Sori Keli	7,16	Nggaro Rangga	Ambalawi	150
37	Sori Bonto	8,521	Lumba	Ambalawi	150
38	Sori Nae	19,343	Nggeru Wera	Wera	128
			Nae Wera	Wera	600



No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)	Daerah Irigasi	Kecamatan	Luas Baku (Ha)
			Tolokanda Wera	Wera	130
39	Sori Kanahi	6,48	Embung Oi Tui	Wera	228
			Tolokanda Wera	Wera	130
40	Sori Wora	9,028	Mpungga	Wera	75
41	Sori Nae	8	Sori Kenanga	Tambora	500
42	Sori Saro	7,186	Bendung Oi Saro	Sanggar	90
43	Sori Towan	4,1	Bendung Oi Kawa	Sanggar	300
44	Sori Balambon	13,54	Embung Kore	Sanggar	125
45	Sori Kedi	1,201	Taloko	Sanggar	341
46	Sori Mbaju	8,57	Tuta Rasa	Woha	63
47	Sori Keli	12,711	Doro Lopi	Woha	253
			Samampi	Woha	150
			Amakari	Woha	150

Sumber: Dinas PU Kab. Bima, 2025



Gambar 2.3.

Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029

Luas areal daerah irigasi Kabupaten Bima adalah 35.466 Ha yang terdiri dari luas baku sawah 18.096 Ha dan luas sawah irigasi 17.370 Ha. Sementara areal irigasi terluas ada di Kecamatan Madapangga dengan luas baku sawah seluas 2.286 Ha dan sawah irigasi 2.286 Ha, sedangkan daerah irigasi dengan luas terkecil di Kecamatan Wawo dengan luas baku sawah seluas 100 Ha dan luas sawah irigasi yaitu 100 Ha.



Tabel 2.2.
Luas Areal Daerah Irigasi Kabupaten Bima

No	Pengamat/Daerah Irigasi Desa	Baku Sawah (Ha)	Sawah Irigasi (Ha)
I	Kecamatan Sape		
1	DI. Embung Kowo	220	220
2	DI. Sari	622	622
3	DI. Wuwu	346	346
4	DI. Rababou	368	368
5	DI. Kakumi	150	150
6	DI. Lati	150	150
JUMLAH		1856	1856
II	Kecamatan Wera		
1	DI. Embung Oi Tui	228	228
2	DI. Embung Wera I	75	75
3	DI. Embung Wera II	200	200
4	DI. Embung Wora	200	200
5	DI. Mpunga	75	75
6	DI. Nggeru Wera	128	128
7	DI. Tolo Kanda Wera	130	130
8	DI. NaE Wera	600	600
JUMLAH		1636	1636
III	Kecamatan Lambu		
1	DI. Potu	125	125
JUMLAH		125	125
IV	Kecamatan Wawo		
1	DI. Sambu	100	100
JUMLAH		100	100
V	Kecamatan Parado		
1	DI. Sori Ncanga Parado	300	100
2	DI. Meku Parado	110	110
JUMLAH		410	210
VI	Kecamatan Woha		
1	DI. Samampi	150	150
2	DI. Dorolopi	253	253
3	DI. Amakari	150	150
4	DI. Tuta Rasa	263	63
JUMLAH		816	616
VII	Kecamatan Langgudu		
1	DI. Diwu Sadundu	900	900
2	DI. Embung Wawo Rada	125	125
3	DI. Embung Nggira I	25	25
4	DI. Embung Nggira II	35	35
5	DI. Ompu Sao	350	160
6	DI. La Kalo	200	160
JUMLAH		1635	1405
VIII	Kecamatan Belo		
1	DI. Embung Roi – Roka	803	782
2	DI. Embung Ncera	329	329
3	DI. Tonggondoa Ngali	750	750
4	DI. Cenggu	50	50
JUMLAH		1932	1911
IX	Kecamatan PALIBELO		
1	Karanu Ntonggu	566	566
2	Leka	350	350
3	Samili Teke	75	75
4	So Wuwu	200	200
5	La Fanda	75	75
6	Lewi Ruma	170	170
JUMLAH		1436	1436
X	Kecamatan Monta		



No	Pengamat/Daerah Irigasi Desa	Baku Sawah (Ha)	Sawah Irigasi (Ha)
1	DI. Tolotangga	485	485
2	DI. Wacakudi	100	75
3	DI. Sera Tawoa	100	100
4	DI. Ina Kece	165	165
5	DI. Peto	300	300
6	DI. So NaE	275	275
JUMLAH		1425	1400
XI	Kecamatan Bolo		
1	DI. Bontokape	505	505
2	DI. Salampe	82	82
3	DI. Mboda	125	125
JUMLAH		712	712
XII	Kecamatan Madapangga		
1	DI. Embung Woro	452	452
2	DI. Lebo	623	623
3	DI. Madapangga	459	459
4	DI. Mori Rade	307	307
5	DI. Woro	250	250
6	DI. La Keda	75	75
7	DI. Keru Woro	120	120
JUMLAH		2286	2286
XIII	Kecamatan Donggo		
1	DI. Diwu Tangiri	500	500
2	DI. Ndano Ranga	520	520
3	DI. Rora Kecil	601	601
4	DI. Sori Monca	300	300
5	DI. Mada palama	100	100
JUMLAH		2021	2021
XIV	Kecamatan Sanggar		
1	DI. Embung Kore	125	125
2	DI. Oikawa	300	300
3	DI. Taloko	341	341
4	DI. Oi Saro	90	90
JUMLAH		856	856
XV	Kecamatan Tambora		
1	DI. Sori Kananga	500	500
JUMLAH		500	500
XVI	Kecamatan Ambalawi		
1	DI. Lumba	200	150
2	DI. Nggaro Ranga	150	150
JUMLAH		350	300
JUMLAH TOTAL		18.096	17.370

Sumber: DPUPR Kab. Bima, 2025

Kabupaten Bima juga terdapat 60 mata air, dengan debit terbesar adalah Sori Keli dengan debit 138 L/dtk. Mata air tersebut tidak semuanya dipergunakan untuk kebutuhan lahan pertanian tetapi juga untuk kebutuhan air minum. Mata air yang terdapat di Kecamatan Ambalawi memiliki debit air yang besar, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga mikro hidro.



Tabel 2.3.
Sebaran Lokasi Sumber Mata Air, Debit Air

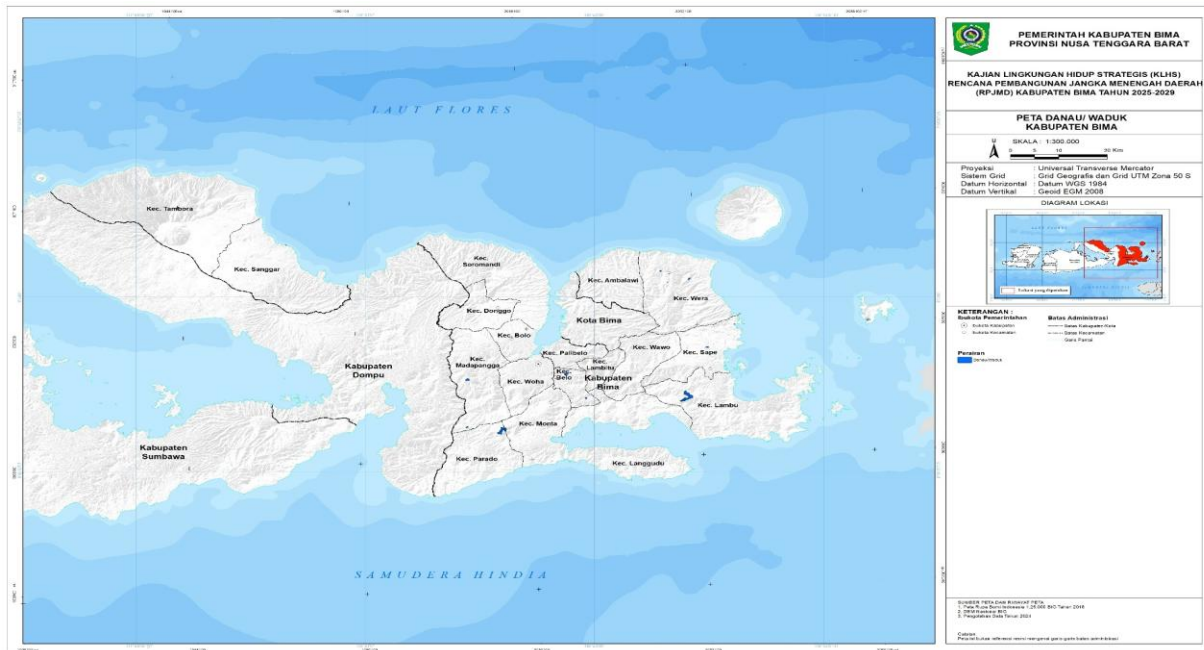
No.	Mata Air	Debit (L/dtk)	Desa	Kecamatan	Jarak Dari Permukiman (Meter)
1	Sori Keli	138	Talapiti	Ambalawi	2.180
2	Sori Kole	130	Kole	Ambalawi	5.242
3	So Mada Oi Keli	14	Rite	Ambalawi	998
4	Oi Lanco	17	Rite	Ambalawi	3.121
5	So Sorilimbi	20	Kole	Ambalawi	2.090
6	Mada Oi Sori Ntonggu	0,2	Lido	Belo	1.702
7	Mada Oi Seli	1,2	Lido	Belo	2.228
8	Mada Oi Pamoti	0,3	Kala	Donggo	431
9	Mada Oi Seramada	0,1	Kala	Donggo	928
10	Mada Oi Mboha	5,7	Kala	Donggo	780
11	Mada Oi Busi	45,4	Kala	Donggo	637
12	Mada Oi La Hila	0,2	Kala	Donggo	186
13	Mada Oi La Kango	0,1	Mbawa	Donggo	130
14	Mada Oi Wua	0,3	Mpili	Donggo	251
15	Ntuda Ncora	3	Mpili	Donggo	8.300
16	Ntuda Ncora	3	O'o	Donggo	7.500
17	Mada Oi Kunde	9,6	Teta	Lambitu	204
18	Mada Oi Moti	40,5	Teta	Lambitu	585
19	Mada Oi Ndano	0,1	Teta	Lambitu	83
20	Mada Oi Sorikaleli	0,2	Kuta	Lambitu	913
21	Mada Oi Serawodi	32,1	Kuta	Lambitu	74
22	Mada oi Mbou	15,7	Kuta	Lambitu	Dalam Perkampungan
23	Mada Oi Diwusadundu	8,5	Kalodu	Langgudu	631
24	Mada Oi Telagabusi	0,1	Karumbu	Langgudu	Dalam Perkampungan
25	Mada Oi Pana	0,1	Dumu	Langgudu	234
26	Mada Oi Diwumone	7,3	Dumu	Langgudu	1.336
27	Oi Doro Lampi	5	Kawuwu	Langgudu	5.400
28	Oi Doro Kala	1,5	Waworada	Langgudu	2.500
29	Mada Oi Rana	25	Waro	Monta	339
30	Mada Oi Adewaro	4,3	Waro	Monta	223
31	Mada Oi Langawu	0,1	Sie	Monta	626
32	Mada oi Nggaro ncuhi	41,1	Sie	Monta	1.065
33	Mada Oi Kalate Mbira	6,9	Sie	Monta	433
34	Oi Roko	2	Tangga	Monta	1.100
35	Oi Ncimi	1,5	Nontotera	Monta	Dalam Perkampungan
36	Mada Oi saja	0,1	Nata	Palibelo	53
37	Mada Oi Ncure	0,5	Ntonggu	Palibelo	1.183
38	Mada Oi Parafu	0,1	Ntonggu	Palibelo	1.040
39	Sori Mbombo Ntonggu	25	Ntonggu	Palibelo	1.968
40	Mada Oi Kompon	18,7	Kore	Sanggar	2.035
41	Mada Oi Kawa So Loka	38,6	Boro	Sanggar	2.102
42	Mada Oi Ina Sai	2	Kore	Sanggar	Dalam Perkampungan
43	Mada Oi sa	0,8	Sari	Sape	1.737
44	Mada Oi Kawinda	1,5	Sari	Sape	120
45	Mada Oi Masa	1,2	Sari	Sape	3.112
46	Mada Oi Lanco	29,5	Jia	Sape	903
47	Sori Sumba	15	Labuan Kananga	Tambora	5.100



No.	Mata Air	Debit (L/dtk)	Desa	Kecamatan	Jarak Dari Permukiman (Meter)
48	Mada Oi Caba	2,5	Radu	Wera	521
49	Mada Oi Caba	2,5	Pai	Wera	29
50	Mada Oi Sabae	5	Pai	Wera	6.400
51	Mada Oi So Ro	4	Ntoke	Wera	5.600
52	Sori Soga	3	Mandala	Wera	5.100
53	Oi Wontu	3	Kambilo	Wawo	3.100
54	Oi Seli	4	Raba	Wawo	5.200
55	Oi Seli	4	Kombo	Wawo	6.500
56	Oi Wobo	3	Maria	Wawo	Dalam Perkampungan
57	Oi Taba	3	Campa	Madapangga	3.500
58	Mada Oi Mombu	3	Woro	Madapangga	3.500
59	Mada Oi Rida	3	Sampungu	Soromandi	Dalam Perkampungan
60	Lanco Salo	2	Wadukopa	Soromandi	2.100

Sumber: Dinas PU Kab. Bima, 2025

Terdapat 13 Danau/Waduk di Kabupaten Bima dengan total luasan yaitu 330,23 Ha. Bendungan Sumi (Diwu Moro) merupakan waduk terbesar yaitu 160,58 Ha yang berada di Kecamatan Lambu, dan yang terkecil yaitu Wera 1 di Kecamatan Wera yaitu sebesar 0,05 Ha.



Gambar 2.4.
Peta Danau/Waduk Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029

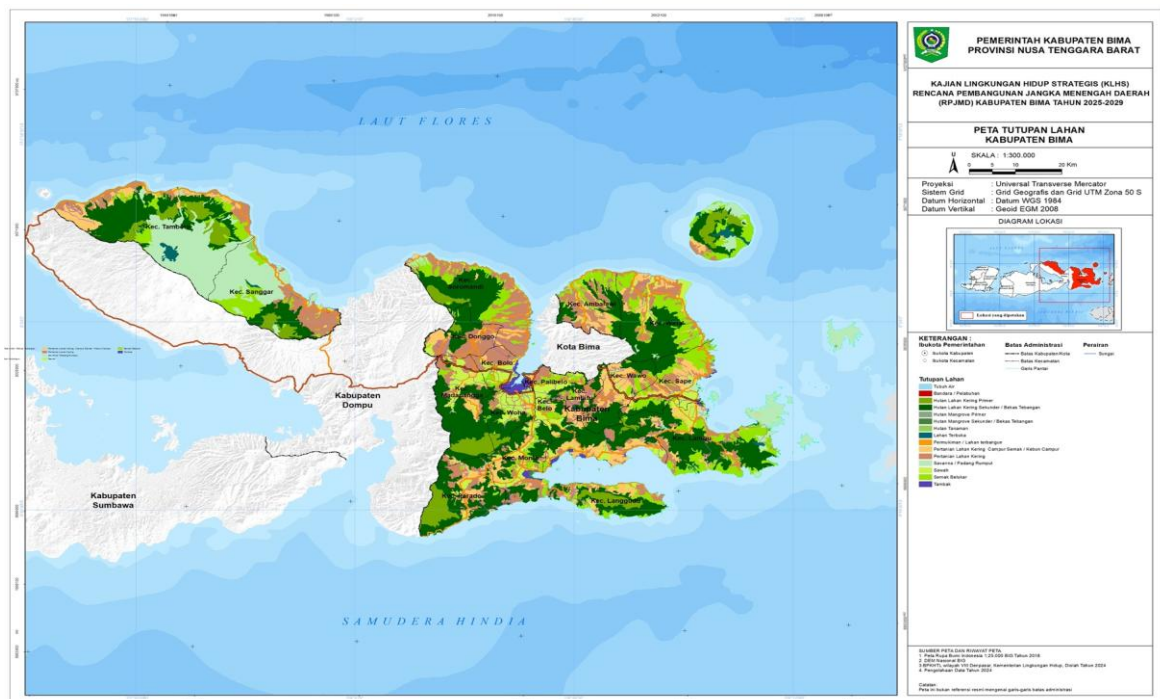
Penggunaan lahan di Kabupaten Bima pada tahun 2024 didominasi oleh berbagai jenis tutupan lahan yang mencerminkan kondisi ekosistem dan aktivitas manusia di wilayah tersebut. Luas lahan terbesar adalah semak belukar 1.949,248 km² atau 46,31% dari total luas lahan dan hutan rimba seluas 1.067,308 km² (25,36%), yang menunjukkan keberadaan vegetasi alami yang cukup luas. Secara keseluruhan, penggunaan lahan di Kabupaten Bima menunjukkan dominasi lahan kering sekunder dan vegetasi alami, dengan pengaruh signifikan dari aktivitas pertanian serta adanya area permukiman dan lahan terbuka yang mencerminkan perkembangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.



Tabel 2.4.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Bima Tahun 2024

Tutupan Lahan	Luas (Km ²)	Persentase
Bandar Udara	0,413	0,01
Danau/Situ	1,590	0,04
Hutan Bakau/Mangrove	6,078	0,14
Hutan Rimba	1.067,308	25,36
Padang Rumput	420,315	9,99
Pasir/Bukit Pasir Laut	0,914	0,02
Pelabuhan	0,029	0,00
Penggaraman	15,485	0,37
Perkebunan/Kebun	66,138	1,57
Permukiman dan Tempat Kegiatan	33,696	0,80
Rawa	2,892	0,07
Sawah	142,761	3,39
Sawah Tadah Hujan	127,539	3,03
Semak Belukar	1.949,248	46,31
Sungai	5,243	0,12
Tambak	8,736	0,21
Tegalan/Ladang	324,735	7,72
Vegetasi Non Budidaya Lainnya	35,742	0,85
Total	4.208,861	100,00

Sumber: Peta RBI Skala 25.000, BIG 2025 (Akses: <https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web/> per 14 Juli 2025)



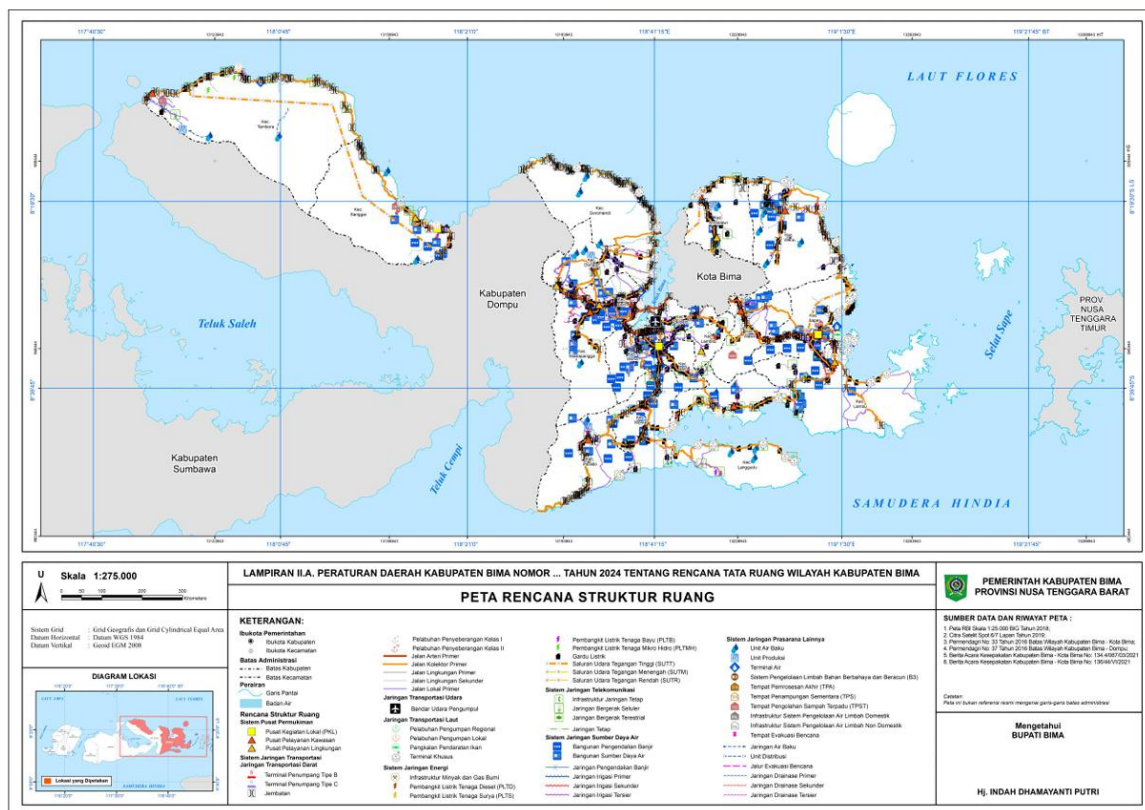
Gambar 2.5.
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Bima
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029

Peta Rencana Struktur Ruang merupakan representasi grafis dari tata ruang wilayah yang menggambarkan perencanaan dan pengelolaan berbagai fungsi pemanfaatan lahan



secara terintegrasi di Kabupaten Bima. Peta ini memperlihatkan jaringan utama seperti jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal yang menghubungkan berbagai kawasan strategis, sekaligus menunjukkan infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik, jaringan perpipaan, fasilitas air bersih, dan sistem pembuangan limbah. Selain itu, peta tersebut juga mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan zona-zona penggunaan lahan yang dikelompokkan berdasarkan kelas perlindungan dan kawasan budidaya dalam Kabupaten Bima.

Melalui peta ini, dapat dipahami bagaimana pola perencanaan ruang disusun untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan pembagian zona yang mengakomodasi kawasan lindung, kawasan pertanian, kawasan industri, serta permukiman. Peta tersebut juga membantu dalam mitigasi risiko lingkungan dan mendukung pengelolaan bencana melalui penempatan zona rawan bencana. Dengan demikian, peta rencana struktur ruang menjadi salah satu alat strategis dalam pengambilan keputusan pembangunan, konservasi sumber daya alam, dan pengaturan tata ruang yang mendukung keseimbangan ekologi serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima secara menyeluruh. Adapun peta rencana struktur ruang Kabupaten Bima sebagai berikut.



Gambar 2.6.

Peta Rencana Struktur Ruang

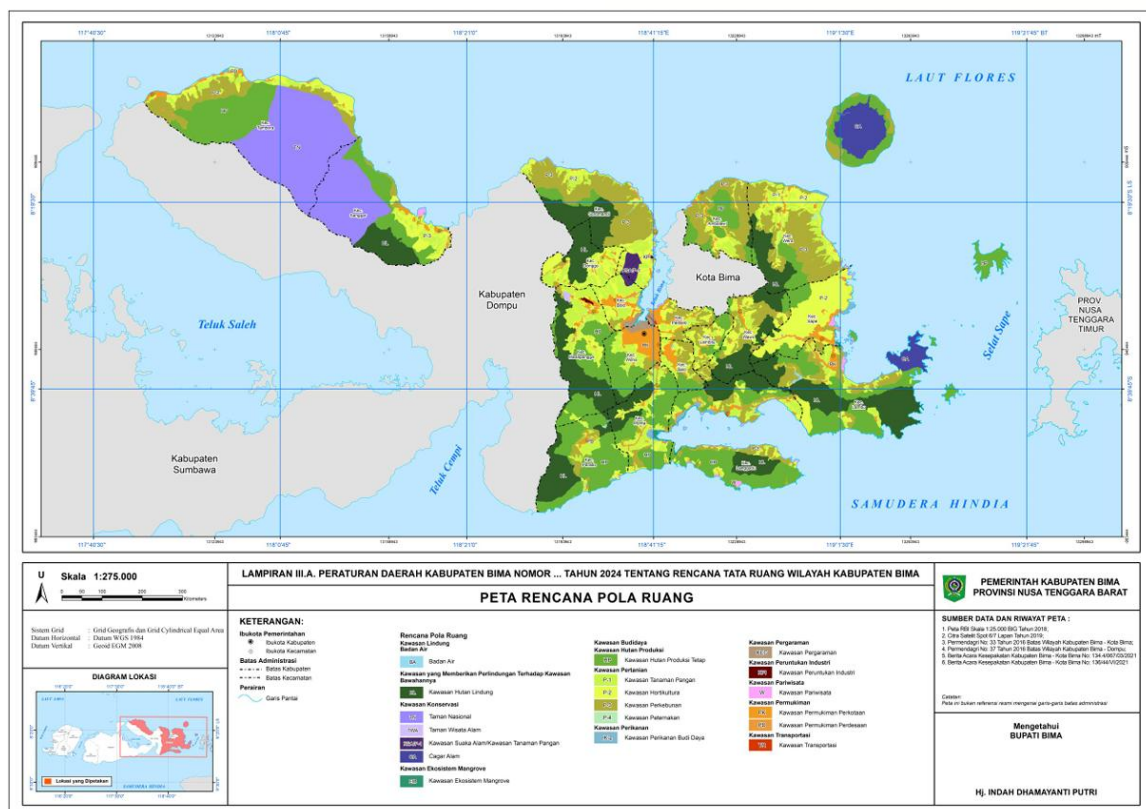
Sumber: Dokumen RAPERDA RTRW 2025-2044

Peta Rencana Pola Ruang merupakan representasi visual dari tata guna lahan yang direncanakan untuk berbagai fungsi di wilayah Kabupaten Bima. Peta ini menggambarkan pembagian zona-zona fungsional seperti kawasan lindung, yang meliputi hutan lindung, taman nasional, kawasan suaka alam, dan cagar alam, sebagai upaya perlindungan terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati. Selain itu, peta ini juga menunjukkan kawasan



budidaya yang meliputi kawasan pertanian, perkebunan, perikanan budidaya, serta kawasan peternakan yang menjadi basis utama pengembangan sektor agribisnis di daerah ini.

Peta Rencana Pola Ruang memberikan gambaran komprehensif mengenai alokasi ruang yang mendukung pengelolaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek konservasi dan pemanfaatan. Melalui pemetaan ini, pemerintah daerah dapat mengarahkan pembangunan dan pengembangan wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, memastikan pemanfaatan lahan yang optimal, serta mengantisipasi konflik penggunaan lahan antar sektor. Dengan demikian, peta ini menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan potensi sumber daya alam Kabupaten Bima untuk mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Adapun peta rencana pola ruang Kabupaten Bima sebagai berikut.



Gambar 2.7.
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bima
Sumber: Dokumen RAPERDA RTRW 2025-2044

Rencana Pola Ruang Kabupaten Bima menyajikan data komprehensif tentang penggunaan dan pengelolaan lahan di wilayah Kabupaten Bima yang terbagi dalam dua kategori utama, yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya. Penyajian rencana pola ruang dalam dokumen RTRW menggunakan luas Kabupaten Bima sebesar 422.261,92 Ha. Hal ini dikarenakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2 - 2138 Tahun 2025 yang menetapkan luas wilayah Kabupaten Bima sebesar 420.886,1 Ha baru ditetapkan pada tanggal 25 April 2025. Kawasan Lindung mencakup berbagai zona perlindungan alam seperti badan air, hutan lindung, suaka alam, cagar alam, taman nasional, taman wisata alam, dan kawasan ekosistem mangrove, yang secara bersama-sama meliputi sekitar 31,88% dari total luas wilayah atau 133.365 hektar. Kawasan ini difokuskan untuk menjaga kelestarian



lingkungan dan keanekaragaman hayati yang menjadi fondasi penting bagi sumber daya alam wilayah ini.

Kawasan Budi Daya merupakan wilayah dengan berbagai fungsi pemanfaatan yang mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan ini terbagi atas beberapa zona utama, meliputi Kawasan Hutan Produksi yang berfungsi sebagai sumber bahan baku kayu dan ekosistem penting, Kawasan Pertanian yang diprioritaskan untuk kegiatan bercocok tanam dan produksi pangan, Kawasan Perikanan yang mendukung aktivitas budidaya dan penangkapan ikan, serta Kawasan Pergaraman yang merupakan area penting untuk produksi garam. Selain itu, Kawasan Peruntukan Industri di dalamnya mendukung berbagai aktivitas industri yang ramah lingkungan, Kawasan Pariwisata yang dikembangkan sebagai destinasi wisata alam dan budaya, Kawasan Permukiman yang menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat, serta Kawasan Transportasi yang menjadi sarana mobilitas dan aksesibilitas dalam kawasan. Keseluruhan kawasan ini dikelola secara terintegrasi untuk mencapai pemanfaatan lahan yang optimal dan berkelanjutan. Berikut rincian kawasan budidaya menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima.

- 1) **Kawasan Hutan Produksi** Kawasan Hutan Produksi berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap memiliki luas sekitar 103.030 hektare. Kawasan ini tersebar di 17 kecamatan, yaitu Ambalawi, Belo, Donggo, Lambitu, Lambu, Langgudu, Madapangga, Monta, Palibelo, Parado, Sanggar, Sape, Soromandi, Tambora, Wawo, Wera, dan Wohu. Kawasan ini berperan penting sebagai sumber bahan baku kayu dan pelestarian ekosistem hutan.
- 2) **Kawasan Pertanian** Kawasan Pertanian memiliki luas kira-kira 162.831 hektare, terdiri dari jenis kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kawasan tanaman pangan seluas 41.072 hektare tersebar di seluruh kecamatan, dengan 38.458,37 hektare merupakan KP2B. Kawasan hortikultura seluas 49.017 hektare dan perkebunan seluas 72.643 hektare juga berada di seluruh kecamatan. Kawasan peternakan hanya seluas 99 hektare dan berada di Kecamatan Wera, dengan kemungkinan penetapan di kecamatan lain sesuai RTRW.
- 3) **Kawasan Perikanan** Kawasan Perikanan budi daya seluas 1.885 hektare tersebar di 10 kecamatan, yaitu Bolo, Lambu, Langgudu, Monta, Parado, Sanggar, Sape, Soromandi, Tambora, dan Wera. Kawasan ini mendukung aktivitas budidaya ikan sebagai sumber ekonomi masyarakat.
- 4) **Kawasan Pergaraman** Kawasan pergaraman dengan luas 1.932 hektare terdapat di Kecamatan Bolo, Palibelo, Wohu, Sape, dan Lambu. Kawasan ini penting bagi produksi garam sebagai komoditas lokal.
- 5) **Kawasan Peruntukan Industri** Kawasan Peruntukan Industri dengan luas sekitar 72 hektare terletak di Kecamatan Soromandi. Kawasan ini mendukung aktivitas industri yang berkembang di wilayah tersebut.
- 6) **Kawasan Pariwisata** Kawasan Pariwisata yang luasnya mencapai 2.776 hektare berada di berbagai kecamatan, yaitu Ambalawi, Lambu, Langgudu, Monta, Palibelo, Parado, Sanggar, Sape, Soromandi, Tambora, dan Wera. Kawasan ini dikembangkan untuk mendukung potensi wisata alam dan budaya.
- 7) **Kawasan Permukiman** Kawasan Permukiman seluas 14.683 hektare terdiri atas Kawasan permukiman perkotaan seluas 8.250 hektare dan perkotaan seluas 6.433 hektare. Kedua jenis permukiman ini tersebar di seluruh kecamatan, menyediakan tempat tinggal yang memadai bagi masyarakat.



- 8) **Kawasan Transportasi** Kawasan transportasi mempunyai luas kurang lebih 67 hektare dan berada di Kecamatan Langgudu, Palibelo, dan Sape. Kawasan ini berfungsi sebagai sarana mobilitas dan aksesibilitas untuk seluruh kawasan.

Melalui Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bima, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Bima telah mengupayakan pengelolaan sumber daya alam yang terencana dan berkelanjutan dengan pembagian fungsi ruang yang jelas, menyelaraskan kebutuhan konservasi dengan pengembangan sektor ekonomi. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bima juga menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan lingkungan, dan mitigasi potensi konflik pemanfaatan lahan sehingga Kabupaten Bima dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya secara berimbang dan berwawasan lingkungan.

Tabel 2.5.
Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bima

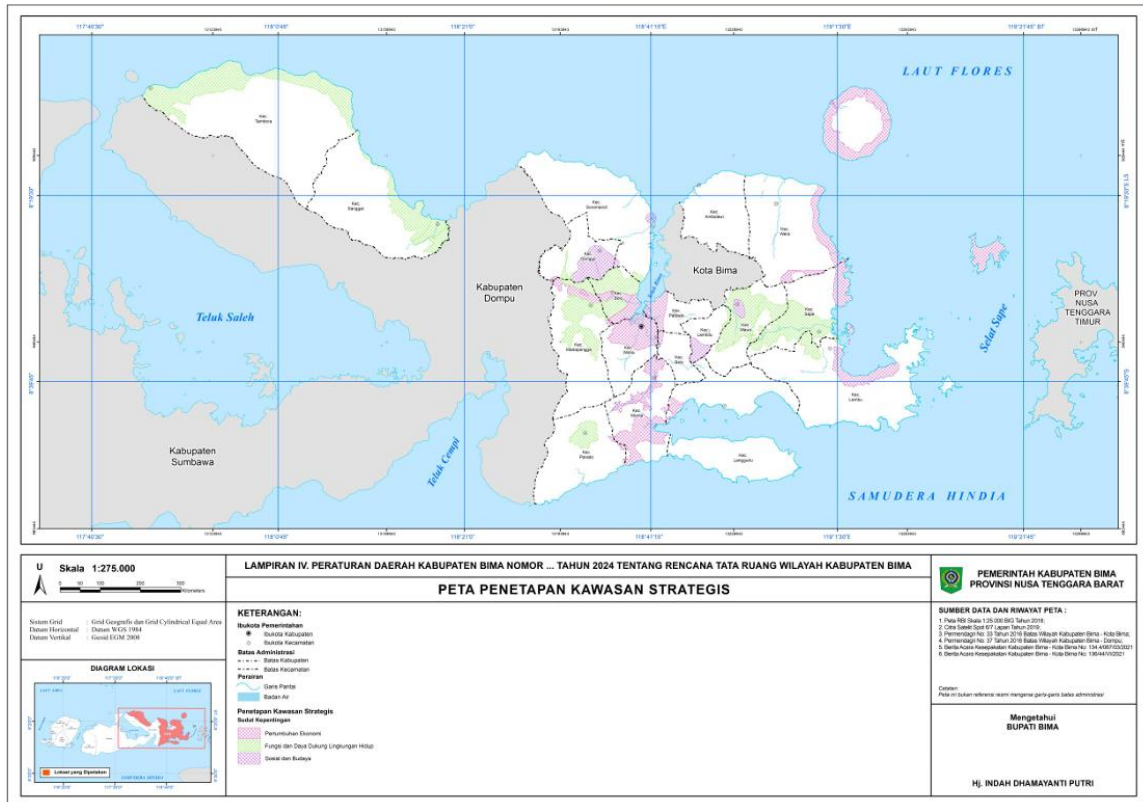
NO	POLA RUANG	KODE	LUAS (± HA)	PERSENTASE (%)	PENANGANAN
A. KAWASAN LINDUNG					
1	Badan Air	BA	751,11	0,18	IA/IB
2	Kawasan Hutan Lindung	HL	71.499,47	16,93	IA/IB/IIB
3	Kawasan Suaka Alam	KSA	1.784,36	0,42	IA/IB/IIB
4	Cagar Alam	CA	11.346,29	2,69	IA/IB/IIB
5	Taman Nasional	TN	48.533,96	11,49	IA/IB/IIB
6	Taman Wisata Alam	TWA	244,48	0,06	IA/IB/IIB
7	Kawasan Ekosistem Mangrove	EM	759,81	0,18	IA/IB/IIB
B. KAWASAN BUDI DAYA					
1	Kawasan Hutan Produksi Tetap	HP	103.115,68	24,42	IA/IB/IIB
2	Kawasan Tanaman Pangan	P-1	38.458,14	9,11	IB/IIA/IIB
3	Kawasan Hortikultura	P-2	48.628,66	11,52	IB/IIA/IIB
4	Kawasan Perkebunan	P-3	71.875,66	17,02	IB/IIA/IIB
5	Kawasan Peternakan	P-4	99,54	0,02	IB/IIA/IIB
6	Kawasan Perikanan Budidaya	IK-2	1.860,57	0,44	IB/IIA/IIB
7	Kawasan Pergaraman	KEG	1.383,38	0,33	IB/IIA/IIB/III
8	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	208,06	0,05	IB/IIA/IIB/III
9	Kawasan Pariwisata	W	3.436,10	0,81	IB/IIA/IIB/III
10	Kawasan Permukiman Perkotaan	PK	11.781,91	2,79	IB/IIA/IIB/III
11	Kawasan Permukiman Perdesaan	PD	6.414,98	1,62	IB/IIA/IIB/III
12	Kawasan Transportasi	TR	81,18	0,02	IB/IIA/IIB/III
TOTAL			422.261,92	100	

Sumber: Sumber: Dokumen RAPERDA RTRW 2025-2044

Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Bima merupakan representasi spasial yang mengidentifikasi dan menandai zona-zona strategis berdasarkan fungsi utama serta nilai penting kawasan dari perspektif pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, serta pelestarian sosial dan budaya. Peta ini memuat sejumlah zona strategis yang berperan sebagai titik fokus dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah, sehingga dapat menjadi acuan penting dalam pengambilan kebijakan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Penetapan kawasan strategis ini mencakup wilayah yang berpotensi tinggi untuk pertumbuhan ekonomi dengan dukungan infrastruktur dan aktivitas produktif, serta kawasan yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem. Dengan demikian, peta ini berfungsi sebagai alat bantu perencanaan yang mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan wilayah,



termasuk mitigasi konflik penggunaan lahan dan perlindungan terhadap potensi sumber daya alam yang rentan. Melalui peta penetapan kawasan strategis, pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bima difokuskan pada prioritas kawasan yang memiliki nilai strategis tinggi, sehingga pengembangan wilayah dapat diarahkan secara tepat guna dan efisien, memberikan manfaat maksimal. Adapun peta penetapan kawasan strategis Kabupaten Bima sebagai berikut.

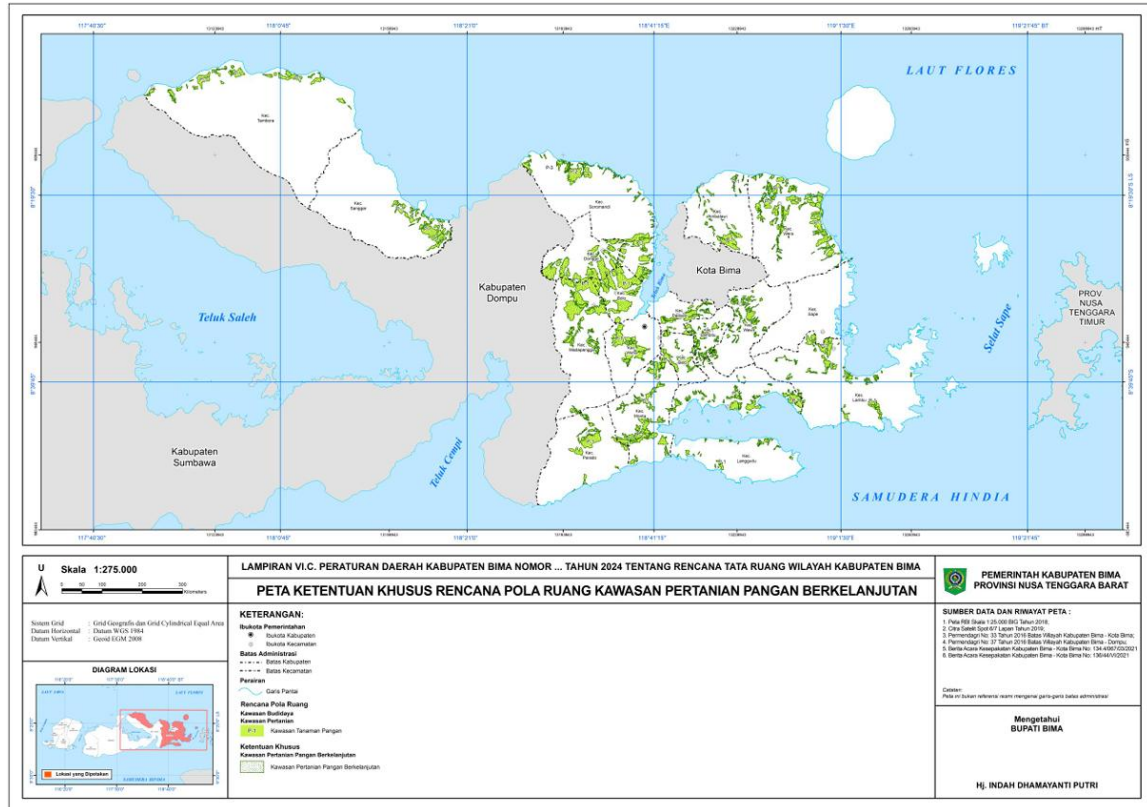


Gambar 2.8.

Peta Penetapan Kawasan Strategis

Sumber: Dokumen RAPERDA RTRW 2025-2044

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bima menggambarkan area khusus yang diatur secara ketat dalam tata ruang dengan tujuan utama menjaga keberlanjutan produksi pangan di wilayah tersebut. Peta ini menandai kawasan-kawasan pertanian pangan yang menjadi fokus utama untuk pengembangan pertanian yang produktif, dan berkelanjutan, serta mendukung ketahanan pangan daerah. Dalam peta ini, lahan yang dialokasikan sebagai Kawasan Pertanian Pangan ditandai secara jelas dengan warna hijau, menunjukkan wilayah yang memiliki potensi dan prioritas tinggi untuk dilestarikan sebagai area pertanian pangan yang berkelanjutan. Ketentuan khusus pada kawasan ini mengatur penggunaan lahan agar tetap mendukung aktivitas pertanian tanpa merusak kualitas lingkungan, termasuk regulasi terkait pengelolaan lahan, pemanfaatan sumber daya air, dan konservasi tanah. Adapun peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Bima sebagai berikut.

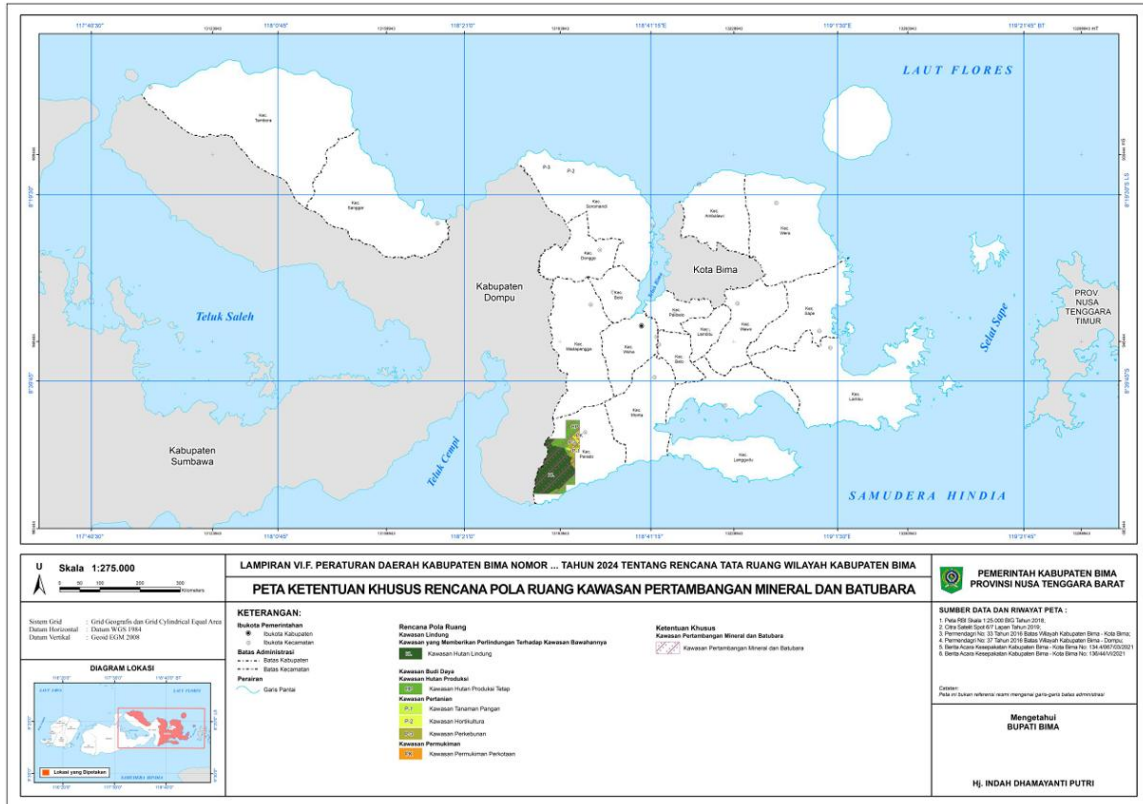


Gambar 2.9.

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sumber: Dokumen RAPERDA RTRW 2025-2044

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Bima merupakan peta tematik yang menggambarkan alokasi ruang khusus yang diperuntukkan bagi kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara. Peta ini menjadi acuan penting dalam perencanaan tata ruang yang mengarahkan pemanfaatan lahan agar kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara terencana, terkendali, dan berkelanjutan, sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Peta ini menandai kawasan pertambangan mineral dan batubara, serta memperlihatkan hubungan kawasan tersebut dengan zona tata ruang lain seperti kawasan lindung, kawasan budidaya, serta area permukiman dan pertanian. Dengan penetapan ketentuan khusus ini, pemerintah daerah dapat mengatur dan mengawasi aktivitas pertambangan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari tumpang tindih penggunaan lahan yang berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, peta ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan perizinan pertambangan dan pengelolaan dampak lingkungan. Hal ini penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan sumber daya mineral secara optimal dan bertanggung jawab.



Gambar 2.10.

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Sumber: Dokumen RAPERDA RTRW 2025-2044

1) Potensi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Bima merupakan salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang mendukung pengembangan sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Luas panen pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bima pada tahun 2024 menunjukkan distribusi yang beragam di berbagai kecamatan. Secara total, luas panen padi sawah mencapai 48.934 hektar, sementara padi ladang hanya seluas 577 hektar. Jagung menjadi komoditas terbesar dengan luas panen mencapai 83.088 hektar yang tersebar merata di seluruh kecamatan. Komoditas kedelai dan kacang tanah juga turut memberikan kontribusi, masing-masing seluas 2.208 hektar dan 7.707 hektar. Selain itu, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar juga menjadi tanaman pangan yang dibudidayakan meskipun dengan luas panen yang lebih kecil, yaitu masing-masing 132 hektar, 111 hektar, dan 5 hektar. Kecamatan dengan luas panen jagung terbesar antara lain Soromandi, Sanggar, dan Donggo, sedangkan padi sawah dominan di Monta dan Bolo. Data ini menggambarkan potensi yang signifikan di sektor tanaman pangan yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan pertanian Kabupaten Bima, serta peluang pengembangan hortikultura dengan diversifikasi tanaman untuk mendukung ketahanan pangan dan perekonomian lokal. Berikut rincian data mengenai luas panen dan produksi tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Bima:



Tabel 2.6.
Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Bima Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)							
		Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kedelai	kacang tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	Monta	6,854	-	3,411	137	1	-	-	-
2	Parado	2,625	-	2,396	13	32	-	-	-
3	Bolo	3,309	-	4,269	687	6	29	-	5
4	Madapangga	4,45	-	6,728	191	-	49	-	-
5	Woha	4,96	-	1,387	5	5	35	-	-
6	Belo	2,326	-	151	314	16	-	-	-
7	Palibelo	2,406	-	3,49	353	417	19	45	-
8	Wawo	1,843	-	6,505	-	15	-	16	-
9	Langgudu	2,529	-	1,658	-	-	-	-	-
10	Lambitu	1,184	308	3,003	-	19	-	-	-
11	Sape	2,639	-	5,324	-	129	-	-	-
12	Lambu	2,545	-	2,951	-	-	-	-	-
13	Wera	3,802	-	7,331	-	6,132	-	-	-
14	Ambalawi	1,98	269	3,695	-	597	-	40	-
15	Donggo	1,307	-	7,552	-	34	-	-	-
16	Soromandi	986	-	10,941	50	-	-	10	-
17	Sanggar	1,364	-	10,119	-	53	-	-	-
18	Tambora	1,825	-	2,177	458	251	-	-	-
Kab. Bima		48,934	577	83,088	2,208	7,707	132	111	5

Sumber: BPS Kabupaten Bima, 2025

Luas panen sayur-sayuran di Kabupaten Bima pada tahun 2024 menunjukkan variasi signifikan di setiap kecamatan dengan beberapa komoditas utama. Bawang merah menjadi tanaman sayur yang paling dominan dengan luas panen total mencapai 9.501,5 hektar, tersebar merata di berbagai wilayah. Kecamatan Sape dan Lambu tercatat memiliki luas panen bawang merah terbesar, masing-masing 1.245,5 hektar dan 1.734 hektar. Untuk cabai, luas panen mencapai 253,38 hektar dengan tambora sebagai salah satu daerah penghasil utama. Bawang putih, meskipun tidak sebesar bawang merah, memiliki total luas panen 315 hektar dengan konsentrasi di Kecamatan Lambitu sebanyak 205 hektar. Kubis, kacang panjang, tomat, dan ketimun juga dikembangkan dalam skala yang lebih kecil, dengan luas panen masing-masing 69 hektar, 8 hektar, 132,92 hektar, dan 5 hektar. Data ini menggambarkan potensi pengembangan hortikultura yang cukup menjanjikan di Kabupaten Bima, khususnya pada komoditas bawang merah dan cabai, yang dapat menjadi sumber pendapatan penting dan mendukung ketahanan pangan lokal.

Tabel 2.7.
Luas Panen Sayur-Sayuran di Kabupaten Bima Perkecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)						
		Bawang Merah	Cabai	Bawang Putih	Kubis	Kacang Panjang	Tomat	Ketimun
1	Monta	1.311	21	-	-	-	4	-
2	Parado	217	7	-	-	2	2	-
3	Bolo	59	4	-	-	-	-	-



No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)						
		Bawang Merah	Cabai	Bawang Putih	Kubis	Kacang Panjang	Tomat	Ketimun
4	Madapangga	13	11,38	-	-	-	7,42	-
5	Woha	823	22	-	-	-	35	-
6	Belo	607	10	-	-	-	7	-
7	Palibelo	105	14	-	69	-	60	-
8	Wawo	5	-	-	-	-	-	-
9	Langgudu	14	17	110	-	-	-	-
10	Lambitu	-	25	205	-	-	-	-
11	Sape	1.245,5	12	-	-	6	4,5	-
12	Lambu	1.734	10	-	-	-	-	-
13	Wera	1,08	-	-	-	-	-	-
14	Ambalawi	194	-	-	-	-	-	-
15	Donggo	-	16	-	-	-	-	-
16	Soromandi	1,511	20	-	-	-	-	-
17	Sanggar	398	20	-	-	-	5	-
18	Tambora	185	38	-	-	-	8	5
Kabupaten Bima		9.501,5	253,38	315	69	8	132,92	5

Sumber Data: BPS, Kabupaten Bima dalam Angka 2025

Produksi sayur-sayuran di Kabupaten Bima tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan di setiap kecamatan dengan beberapa komoditas utama yang menonjol. Total produksi bawang merah mencapai 1.072.268 kuintal, dengan Lambu, Soromandi, dan Lamba sebagai daerah penghasil terbesar, masing-masing menghasilkan 208.080, 181.320, dan 181.242 kuintal. Untuk cabai, produksi total tercatat sebesar 40.976 kuintal, yang signifikan diproduksi di Woha dan Donggo dengan masing-masing 7.275 dan 5.565 kuintal. Bawang putih memiliki produksi total 33.550 kuintal, dengan konsentrasi terbesar di Kecamatan Lambitu (22.550 kuintal) dan Langgudu (11.000 kuintal). Kubis, kacang panjang, tomat, dan ketimun juga diproduksi, meskipun dalam jumlah yang relatif lebih kecil, yaitu masing-masing 4.791, 640, 19.176,2, dan 300 kuintal. Kecamatan Palibelo dan Langgudu adalah salah satu daerah penghasil utama untuk kubis dan tomat. Data ini menegaskan potensi besar pengembangan hortikultura di Kabupaten Bima, yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian wilayah.

Tabel 2.8.
Produksi Sayur-Sayuran di Kabupaten Bima Perkecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Produksi (Kuintal)						
		Bawang Merah	Cabai	Bawang Putih	Kubis	Kacang Panjang	Tomat	Ketimun
1	Monta	141.040	4.875	-	-	-	260	-
2	Parado	23.860	495	-	-	175	210	-
3	Bolo	6.730	560	-	-	-	-	-
4	Madapangga	1.390	1.028	-	-	-	962,2	-
5	Woha	90.510	7.275	-	-	-	7.260	-
6	Belo	72.840	2.110	-	-	-	850	-



No	Kecamatan	Jumlah Produksi (Kuintal)						
		Bawang Merah	Cabai	Bawang Putih	Kubis	Kacang Panjang	Tomat	Ketimun
7	Palibelo	11.960	1.120	-	4.791	-	7.792	-
8	Wawo	560	-	-	-	-	-	-
9	Langgudu	1.540	2.395	11.000	-	-	-	-
10	Lambitu	-	4.125	22.550	-	-	-	-
11	Sape	141.242	1.453	-	-	465	368	-
12	Lambu	208.080	1.425	-	-	-	-	-
13	Wera	104.120	-	-	-	-	-	-
14	Ambalawi	19.450	-	-	-	-	-	-
15	Donggo	-	5.565	-	-	-	-	-
16	Soromandi	181.320	4.125	-	-	-	-	-
17	Sanggar	46.260	1.575	-	-	-	520	-
18	Tambora	21.366	2.850	-	-	-	990	300
Kabupaten Bima		1.072.268	40.976	33.550	4.791	640	19.176,2	300

Sumber Data: BPS, Kabupaten Bima dalam Angka 2025

2) Potensi Perkebunan

Kabupaten Bima memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, khususnya pada sektor perkebunan dan peternakan. Pada sektor perkebunan komoditas utama di Kabupaten Bima didominasi oleh tiga jenis tanaman perkebunan yaitu kelapa, kopi dan tembakau yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Bima. Luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Bima pada tahun 2024 menunjukkan distribusi yang bervariasi menurut jenis tanaman dan kecamatan. Kelapa menjadi tanaman perkebunan dengan luas areal terpanen terbesar, mencapai total 2.222,38 hektar, dengan konsentrasi utama di Kecamatan Lambu seluas 742,83 hektar, Langgudu 426 hektar, dan Sape 158,5 hektar. Kopi juga memiliki peranan penting dengan luas panen mencapai 1.434,70 hektar, dimana Kecamatan Wawo dan Tambora menjadi lokasi prioritas dengan luas masing-masing 582,3 dan 783,5 hektar. Sedangkan tanaman tembakau memiliki luas panen yang relatif lebih kecil yaitu 132,5 hektar, tersebar terutama di Kecamatan Madapangga seluas 44,5 hektar, Sape 50 hektar, serta Tambora 15 hektar. Data ini mencerminkan potensi perkebunan yang cukup beragam dan strategis di Kabupaten Bima, yang bisa menjadi basis ekonomi sekaligus peluang pengembangan sektor pertanian daerah.

Tabel 2.9.
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman
Kabupaten Bima Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)		
		Kelapa	Kopi	Tembakau
1	Monta	82,00	-	-
2	Parado	71,50	18,90	-
3	Bolo	17,00	-	-
4	Madapangga	21,00	-	44,50
5	Woha	137,00	-	10,00



No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)		
		Kelapa	Kopi	Tembakau
6	Belo	35,00	-	-
7	Palibelo	48,00	-	-
8	Wawo	30,00	582,30	-
9	Langgudu	426,00	-	-
10	Lambitu	7,00	20,00	-
11	Sape	158,50	30,00	50,00
12	Lambu	742,83	-	3,00
13	Wera	199,00	-	-
14	Ambalawi	66,00	-	-
15	Donggo	11,00	-	-
16	Soromandi	9,80	-	-
17	Sanggar	71,75	-	-
18	Tambora	79,00	783,50	15,00
Kabupaten Bima		2.222,38	1.434,70	132,50

Sumber Data: BPS, Kabupaten Bima dalam Angka 2025

Distribusi luas lahan menunjukkan adanya spesialisasi geografis tanaman perkebunan di Kabupaten Bima. Kecamatan Tambora dan Wawo sangat potensial dikembangkan sebagai kawasan agrowisata berbasis kopi yang didukung oleh luas lahan signifikan. Laju produksi perkebunan di Kabupaten Bima tahun 2024 menunjukkan keberagaman dan sebaran yang berbeda-beda berdasarkan jenis tanaman dan kecamatan. Produksi kelapa mencapai total 817,32 ton, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kecamatan Lambu sebanyak 201,49 ton, Sape 128,53 ton, dan Langgudu 100,8 ton. Tanaman kopi menghasilkan 353,76 ton, yang sebagian besar berasal dari Kecamatan Tambora dengan produksi 202,5 ton, diikuti oleh Wawo 107 ton dan Donggo 27 ton. Sementara itu, produksi tembakau mencapai 104,3 ton, yang didominasi oleh Kecamatan Sape dengan 66 ton, Madapangga 13,3 ton, dan Tambora 15 ton. Data tersebut menggambarkan potensi sektoral perkebunan di Kabupaten Bima yang beragam dan memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.10.
Jumlah Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman
di Kabupaten Bima (ton) Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Produksi (Ton)		
		Kelapa	Kopi	Tembakau
1	Monta	46,32	-	-
2	Parado	25,30	12,00	-
3	Bolo	6,12	-	-
4	Madapangga	14,48	-	13,30
5	Woha	44,50	-	10,00
6	Belo	28,46	-	-
7	Palibelo	23,25	-	-
8	Wawo	15,24	107,00	-
9	Langgudu	100,80	4,26	-
10	Lambitu	4,90	1,00	-
11	Sape	128,53	-	66,00



No	Kecamatan	Jumlah Produksi (Ton)		
		Kelapa	Kopi	Tembakau
12	Lambu	201,49	-	-
13	Wera	90,29	-	-
14	Ambalawi	34,88	-	-
15	Donggo	5,94	27,00	-
16	Soromandi	5,52	-	-
17	Sanggar	25,50	-	-
18	Tambora	25,80	202,50	15,00
Kabupaten Bima		817,32	353,76	104,30

Sumber Data: BPS, Kabupaten Bima dalam Angka 2025

Kinerja produksi yang tinggi dan sejalan dengan luas areal tanam di beberapa kecamatan menunjukkan efektivitas pemanfaatan lahan yang optimal. Namun demikian, di beberapa kecamatan lainnya, terlihat bahwa luasan lahan tidak selalu berbanding lurus dengan hasil produksi, yang mengindikasikan masih adanya peluang peningkatan produktivitas. Dengan penguatan program penyuluhan pertanian, peningkatan akses terhadap bibit unggul, dan pengembangan pengolahan pascapanen, sektor perkebunan ini memiliki potensi besar untuk ditingkatkan guna mendukung ekspor dan pengembangan industri kecil-menengah yang berbasis perkebunan.

3) Potensi Peternakan

Potensi sumber daya alam pada sektor peternakan di Kabupaten Bima menunjukkan kapasitas yang besar dan beragam untuk pembangunan ekonomi daerah. Hal ini dapat terlihat dari populasi ternak yang signifikan dan sebaran yang luas di berbagai kecamatan. Populasi ternak di Kabupaten Bima tahun 2024 menunjukkan keberagaman jenis ternak dengan distribusi yang bervariasi antar kecamatan. Jumlah sapi mendominasi dengan populasi mencapai 239.714 ekor, tersebar luas terutama di kecamatan Sanggar (29.547 ekor), Wera (23.149 ekor), dan Lambu (19.961 ekor). Kerbau memiliki populasi sebanyak 19.142 ekor, dengan konsentrasi tinggi di Wera (4.559 ekor), Madapangga (2.451 ekor), dan Wawo (2.174 ekor). Kuda berjumlah 3.338 ekor, dengan jumlah terbanyak di Sape (635 ekor) dan Madapangga (502 ekor). Sementara kambing mencapai angka 112.816 ekor, dengan angka terbesar di Kecamatan Woha (19.867 ekor) dan Soromandi (14.053 ekor). Domba berjumlah 2.818 ekor, tersebar variatif dengan jumlah signifikan di Kecamatan Donggo (251 ekor) dan Sanggar (200 ekor). Populasi babi relatif kecil dengan total 84 ekor, yang paling banyak di Tambora (77 ekor). Kelinci juga tercatat dengan jumlah 243 ekor, tersebar terutama di Madapangga dan Donggo. Data ini menggambarkan potensi besar di sektor peternakan Kabupaten Bima, dengan keanekaragaman jenis ternak yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan ketahanan pangan di daerah ini.



Tabel 2.11.

Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Bima Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Populasi (Ekor)						
		Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Kelinci
1	Monta	13.213	69	103	1.624	109	-	11
2	Parado	12.318	760		1.423	56	-	-
3	Bolo	15.429	52	101	8.056	-	-	2
4	Madapangga	12.699	2.451	502	9.031	31	-	77
5	Woha	11.349	196	292	19.867	820	-	26
6	Belo	8.291	249	174	10.240	600	-	48
7	Palibelo	3.058	46	89	1.891	147	-	6
8	Wawo	8.108	2.174	91	1.679	-	-	2
9	Langgudu	15.430	1.005	238	3.694	216	-	-
10	Lambitu	4.746	1.641	40	1.930	78	-	18
11	Sape	10.735	660	635	8.561	138	-	-
12	Lambu	19.961	535	288	5.980	60	-	-
13	Wera	23.149	4.559	203	8.380	75	-	-
14	Ambalawi	14.217	1.878	24	7.830	-	-	-
15	Donggo	10.541	128	219	1.875	251	7	28
16	Soromandi	12.219	577	112	14.053	37	-	25
17	Sanggar	29.547	1.511	149	1.489	200	-	-
18	Tambora	14.704	651	78	5.213	-	77	-
Kabupaten Bima		239.714	19.142	3.338	112.816	2.818	84	243

Sumber: BPS Kabupaten Bima, 2025

Kabupaten Bima memiliki basis peternakan yang kuat, khususnya pada komoditas sapi dan kambing. Keberadaan padang penggembalaan yang luas serta ketersediaan limbah pertanian sebagai pakan ternak menciptakan sinergi potensial antara sektor pertanian dan peternakan. Wilayah seperti Sanggar, Wera, dan Woha sangat potensial untuk diarahkan sebagai kawasan peternakan terpadu yang mengintegrasikan berbagai aspek budidaya dan pengolahan. Sementara itu, ternak non-ruminansia seperti kelinci dan babi, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil, masih perlu didorong pengembangannya melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dan penguatan usaha kecil, yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Populasi unggas di Kabupaten Bima tahun 2024 menunjukkan keberagaman jenis yang cukup luas dengan distribusi yang bervariasi di tiap kecamatan. Ayam pedaging menjadi jenis unggas yang paling dominan dengan jumlah mencapai 4.265.566 ekor, terutama tersebar di Kecamatan Monta dengan populasi sangat besar sebanyak 1.126.000 ekor, diikuti oleh Bolo dengan 1.077.234 ekor, dan Wawo sebanyak 546.875 ekor. Ayam buras juga memiliki populasi yang signifikan, yaitu sebanyak 333.861 ekor, dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Woha (45.162 ekor) dan Sape (38.862 ekor). Ayam petelur berjumlah 17.951 ekor dengan penyebaran utama di Donggo (15.300 ekor) dan Soromandi (1.200 ekor). Itik juga cukup banyak, berjumlah 25.477 ekor, dengan jumlah terbesar di Sanggar (650 ekor) dan Palibelo (677 ekor). Merpati memiliki populasi sebanyak 5.896 ekor, tersebar di berbagai kecamatan dengan konsentrasi tinggi di Madapangga (595 ekor).



dan Sape (376 ekor). Kemudian puyuh berjumlah 3.422 ekor, dengan populasi terbesar terdapat di Kecamatan Langgudu (593 ekor) dan Monta (333 ekor). Data ini menunjukkan bahwa sektor peternakan unggas di Kabupaten Bima memiliki potensi besar dengan berbagai jenis unggas yang mendukung keberagaman dan ketahanan pangan di daerah tersebut.

Tabel 2.12.

Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Bima Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Populasi (Ekor)					
		Ayam Buras	Ayam Pedaging	Ayam Petelur	Itik	Merpati	Puyuh
1	Monta	19.760	1.126.000	-	990	286	333
2	Parado	12.717	1.465	26	1	11	149
3	Bolo	7.477	1.077.234	-	194	370	-
4	Madapangga	20.486	330.308	359	2	595	417
5	Woha	45.162	128.647	-	5	254	51
6	Belo	9.800	-	-	1	56	107
7	Palibelo	6.484	10.760	-	677	288	7
8	Wawo	17.574	546.875	16	311	124	333
9	Langgudu	19.562	67.117	-	5	1	593
10	Lambitu	8.136	-	-	308	61	233
11	Sape	38.862	271.676	750	3	376	67
12	Lambu	11.753	-	-	593	-	-
13	Wera	35.800	41.500	300	2	355	330
14	Ambalawi	12.147	13.548	-	2	-	170
15	Donggo	32.307	270.200	15.300	1	1	340
16	Soromandi	26.100	378.114	1.200	174	182	110
17	Sanggar	3.444	2.120	-	650	75	120
18	Tambora	6.290	-	-	217	18	62
Kabupaten Bima		333.861	4.265.566	17.951	25.477	5.896	3.422

Sumber: BPS Kabupaten Bima, 2025

4) Potensi Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Bima meliputi lahan budidaya seluas 6.814,9 Ha, terdiri dari budidaya perairan umum, perairan payau/tambak, perairan tawar dan perairan laut. Sementara potensi areal pesisir mencakup pantai sepanjang ± 640 Km. Jumlah produksi ikan basah laut di Kabupaten Bima dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan di setiap kecamatan. Total produksi tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah mencapai 115.910,66 ton, kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 menjadi 70.271,42 ton. Pada tahun 2023 produksi sedikit meningkat menjadi 71.240,98 ton dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 72.267,81 ton. Beberapa kecamatan seperti Sape, Lambu, Monta, dan Wera menjadi kontributor utama produksi ikan laut di wilayah ini, sementara beberapa kecamatan lainnya menunjukkan data yang tidak lengkap atau produksi yang semakin menurun. Secara keseluruhan, potensi perikanan laut di



Kabupaten Bima tetap menjanjikan meskipun perlu perhatian terhadap pengelolaan sumber daya agar produksi tetap stabil dan berkelanjutan.

Tabel 2.13.
Jumlah Produksi Ikan Basah (Laut) di Kabupaten Bima Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan	Resort Perikanan (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Monta	3.934	6.153,53	2.633,88	919,47	4.625,14
2	Lambu	10.446	11.062,83	8.129,34	8.244,34	3.808,51
3	Wawo	12	12,87	-	-	-
4	Bolo	8.708	6.483,22	2.206,90	2.238,12	2.428,2
5	Madapangga	40	44,29	-	-	-
6	Sanggar	7.621	7.427,88	6.996,81	7.095,78	7.703,75
7	Tambora	4.316	4.318,62	4.071,08	4.128,67	4.480,6
8	Belo	17	18,95	-	-	-
9	Sape	44.676	46.672,53	21.546,04	21.850,31	4.625,14
10	Donggo	11	11,72	-	-	-
11	Wera	5.478	5.480,72	5.168,58	5.239,67	5.687,48
12	Langgudu	11.995	12.175,31	2.681,67	9.633,16	10.464,38
13	Ambalawi	2.600	2.997,38	2.825,58	2.865,55	3.114,74
14	Woha	5.749	6.270,60	-	-	-
15	Palibelo	1.030	1.477,79	810,44	820,02	903,35
16	Lambitu	5	5,65	-	-	-
17	Parado	726	732,33	678,18	687,77	751,59
18	Soromandi	4.621	4.564,63	4.189,49	4.248,75	4.610,68
Jumlah		111.985	115.910,66	70.271,42	71.240,98	72.267,81

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima 2025

5) Potensi Energi dan Sumberdaya Mineral

Potensi energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Bima yang telah diketahui jumlah cadangannya antara lain adalah marmer, pasir besi, emas, perak, mangan dan batu gamping. Cadangan sumber daya marmer tercatat sebesar 117.625.500 m³, cadangan pasir besi, potensi emas, potensi perak, potensi mangan, dan cadangan sumber daya batu gamping. Potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Bima adalah lahan galian B dan C berupa: emas, mangan, pasir besi, batu gamping, batu apung, gipsum, silikon, lempung kaolin dan sirtu. Kabupaten Bima memiliki potensi sumber daya alam pertambangan berupa emas yang saat ini sedang dilakukan kegiatan eksplorasi. Adapun luas dari kawasan pertambangan di Kabupaten Bima sebagai berikut:

Tabel 2.14.
Kawasan Pertambangan Logam dan Non Logam Kabupaten Bima

Kecamatan	WUP Logam	WUP Non Logam	Grand Total
Kec. Ambalawi	11.095,33	5.774,76	16.870,09
Kec. Belo	2.556,31	3.470,70	6.027,02
Kec. Bolo	4.726,83	2.028,63	6.755,46
Kec. Donggo		10.833,78	10.833,78
Kec. Lambitu	5.206,60	441,33	5.647,93
Kec. Lambu	27.436,02	8.673,13	36.109,14



Kecamatan	WUP Logam	WUP Non Logam	Grand Total
Kec. Langgudu	22.513,08	9.100,32	31.613,40
Kec. Madapangga	18.468,89	5.639,33	24.108,21
Kec. Monta	17.308,97	2.002,98	19.311,95
Kec. Palibelo	2.256,78	3.759,14	6.015,92
Kec. Parado	19.113,99	3.085,29	22.199,28
Kec. Sanggar	2.230,81	17.604,29	19.835,10
Kec. Sape	15.287,09	5.993,56	21.280,65
Kec. Soromandi	10.204,70	19.947,68	30.152,38
Kec. Tambora		29.498,42	29.498,42
Kec. Wawo	13.618,84	1.754,67	15.373,51
Kec. Wera	14.321,53	16.591,55	30.913,07
Kec. Woha	7.671,40	4.382,79	12.054,19
Grand Total	194.017,17	150.582,33	344.599,50

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB dan diolah oleh Tim Tenaga Ahli KLHS RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2024

Tabel 2.15.

Titik Lokasi Pertambangan Logam Kabupaten Bima

Jenis	Lokasi	Kecamatan					Grand Total
		Kec. Parado	Kec. Soromandi	Kec. Tambora	Kec. Wawo	Kec. Wera	
Emas Primer	Humpaleu East	1					1
	Ringin, Jambuir, ds. Pesa				1		1
Pasir Besi	Pantai Sanggar			1			1
	Pantai Saniang Darat					1	1
	Pantai Sowa, Pantai Tololai, Pantai Wisata		1				1
Tembaga	Humpaleu East	1					1
Grand Total		2	1	1	1	1	6

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB dan diolah oleh Tim Tenaga Ahli KLHS RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2024

Tabel 2.16.

Titik Lokasi Pertambangan Non Logam Kabupaten Bima

Jenis	Kecamatan																
	Kec. Ambalawi	Kec. Belo	Kec. Bolo	Kec. Lambitu	Kec. Lambu	Kec. Langgudu	Kec. Madapangga	Kec. Monta	Kec. Palibelo	Kec. Parado	Kec. Sanggar	Kec. Sape	Kec. Soromandi	Kec. Wawo	Kec. Wera	Kec. Woha	Grand Total
Andesit	1		2			1	2	1	2	2	1	1		2		1	16
Batuapung					1												1
Batugamping	2	1		2	1	1		3	1		2	2			2	1	18
Dasit					1												1
Diorit									1								1
Felspar					1												1
Kalsedon												3					3
Kaolin					1												1
Lempung								1		1			1			1	4
Marmer		2			1		1	2				2					8
Oker												2					2
Pasirkuarsa					1												1
Perlit					4												4
Pirofilit												1					1
Toseki												1					1
Grand Total	3	3	2	2	11	2	3	7	4	3	3	12	1	2	2	3	63

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB dan diolah oleh Tim Tenaga Ahli KLHS RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2024



2.1.3. Daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat dimodelkan dengan jasa ekosistem penyediaan pangan dan jasa ekosistem penyediaan air bersih. Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup harus memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

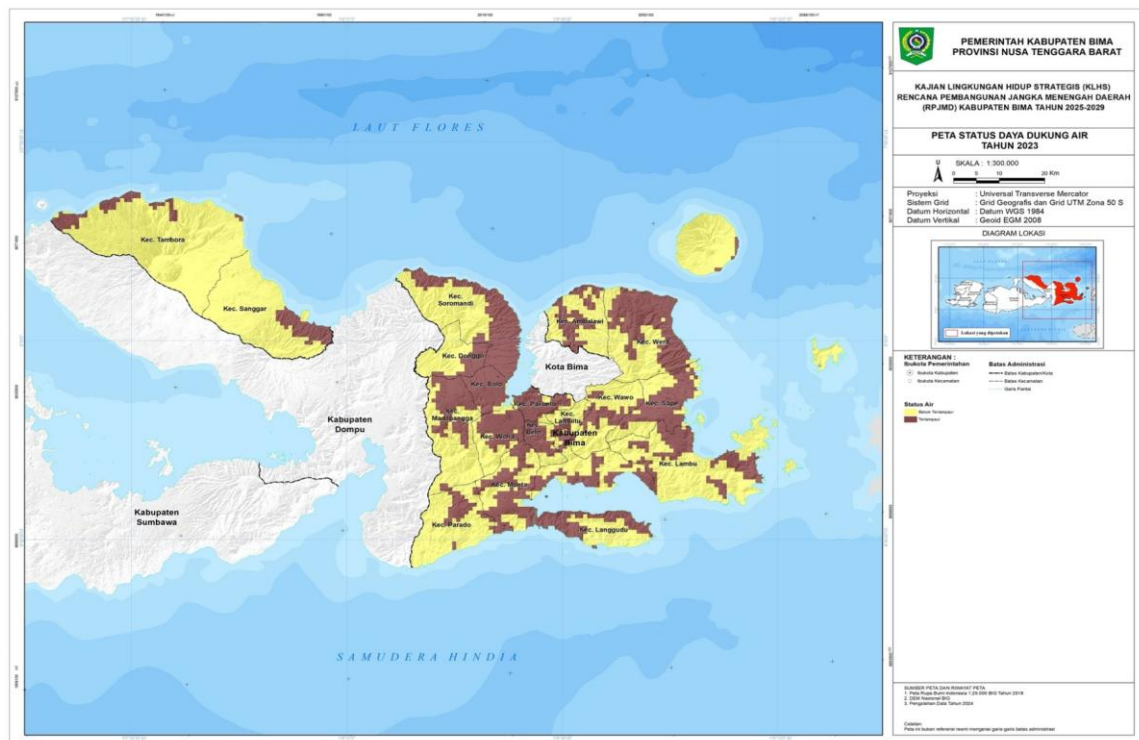
2.1.3.1. Daya Dukung Air

Ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Bima menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan terutama di hampir seluruh kecamatan. Total ketersediaan air mencapai sekitar 559,6 juta meter kubik per tahun, sementara total kebutuhan air untuk domestik dan lahan mencapai sekitar 948,45 juta meter kubik per tahun. Hal ini menghasilkan defisit atau selisih negatif sebesar sekitar 388,8 juta meter kubik per tahun, menandakan bahwa kebutuhan air jauh melebihi ketersediaan yang ada. Sebagian besar kecamatan seperti Ambalawi, Belo, Bolo, Donggo, dan lain-lain menunjukkan status "Terlampai," yang berarti kebutuhan air telah melampaui kapasitas ketersediaan. Beberapa kecamatan seperti Parado dan Sanggar relatif masih dalam status "Belum Terlampai," yakni kebutuhan airnya belum melewati batas ketersediaan. Defisit air ini mengindikasikan perlunya tindakan pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien dan berkelanjutan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan air domestik dan pertanian, serta keberlangsungan lingkungan di Kabupaten Bima.

Tabel 2.17.
Kebutuhan dan Ketersediaan Air Kabupaten Bima

No	Kecamatan	Penduduk 2023	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air (m ³ /thn)		Total Kebutuhan Air	Selisih (m ³ /tahun)	Status
			(m ³ /thn)	Kebutuhan Domestik	Kebutuhan Lahan	(m ³ /tahun)		
1	Ambalawi	21.920	23.938.246,72	1.893.888	32.546.966,08	34.440.854,08	-10.502.607,36	Terlampai
2	Belo	28.320	9.580.100,87	2.446.848	32.443.560,52	34.890.408,52	-25.310.307,65	Terlampai
3	Bolo	53.500	13.787.573,07	4.622.400	66.877.667,51	71.500.067,51	-57.712.494,43	Terlampai
4	Donggo	20.950	16.971.339,87	1.810.080	25.548.445,51	27.358.525,51	-10.387.185,63	Terlampai
5	Lambitu	6.470	7.141.199,64	559.008	13.610.639,50	14.169.647,50	-7.028.447,86	Terlampai
6	Lambu	43.820	52.127.070,37	3.786.048	69.772.176,71	73.558.224,71	-21.431.154,33	Terlampai
7	Langgudu	33.080	43.998.144,58	2.858.112	89.510.969,12	92.369.081,12	-48.370.936,54	Terlampai
8	Madapangga	32.670	31.993.592,67	2.822.688	54.802.782,21	57.625.470,21	-25.631.877,54	Terlampai
9	Monta	40.840	23.824.063,04	3.528.576	59.758.916,77	63.287.492,77	-39.463.429,73	Terlampai
10	Palibelo	29.000	9.025.954,03	2.505.600	32.892.266,04	35.397.866,04	-26.371.912,01	Terlampai
11	Parado	11.130	27.508.101,45	961.632	19.232.975,25	20.194.607,25	7.313.494,20	Belum Terlampai
12	Sanggar	14.430	47.703.696,89	1.246.752	30.624.596,62	31.871.348,62	15.832.348,27	Belum Terlampai
13	Sape	63.380	30.988.828,89	5.476.032	66.861.084,93	72.337.116,93	-41.348.288,04	Terlampai
14	Soromandi	20.060	47.481.303,06	1.733.184	104.469.903,25	106.203.087,25	-58.721.784,19	Terlampai
15	Tambora	9.170	83.828.797,77	792.288	30.414.585,33	31.206.873,33	52.621.924,44	Belum Terlampai
16	Wawo	19.620	15.672.593,82	1.695.168	14.874.557,64	16.569.725,64	-897.131,81	Terlampai
17	Wera	33.820	62.283.424,80	2.922.048	112.419.932,37	115.341.980,37	-53.058.555,57	Terlampai
18	Woha	53.360	11.779.939,99	4.610.304	45.518.765,52	50.129.069,52	-38.349.129,53	Terlampai
Jumlah		535.540	559.633.971,55	46.270.656	902.180.790,86	948.451.446,86	-388.817.475,31	Terlampai

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



Gambar 2.11.

Peta Daya Dukung Air Kabupaten Bima

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Kabupaten Bima, Tahun 2024

2.1.3.2. Daya Dukung Pangan

Perhitungan daya dukung pangan dihitung dari ketersediaan dan kebutuhan pangan. Sisi ketersediaan dengan melihat karakteristik wilayah potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah.

Perhitungan Ketersediaan Pangan

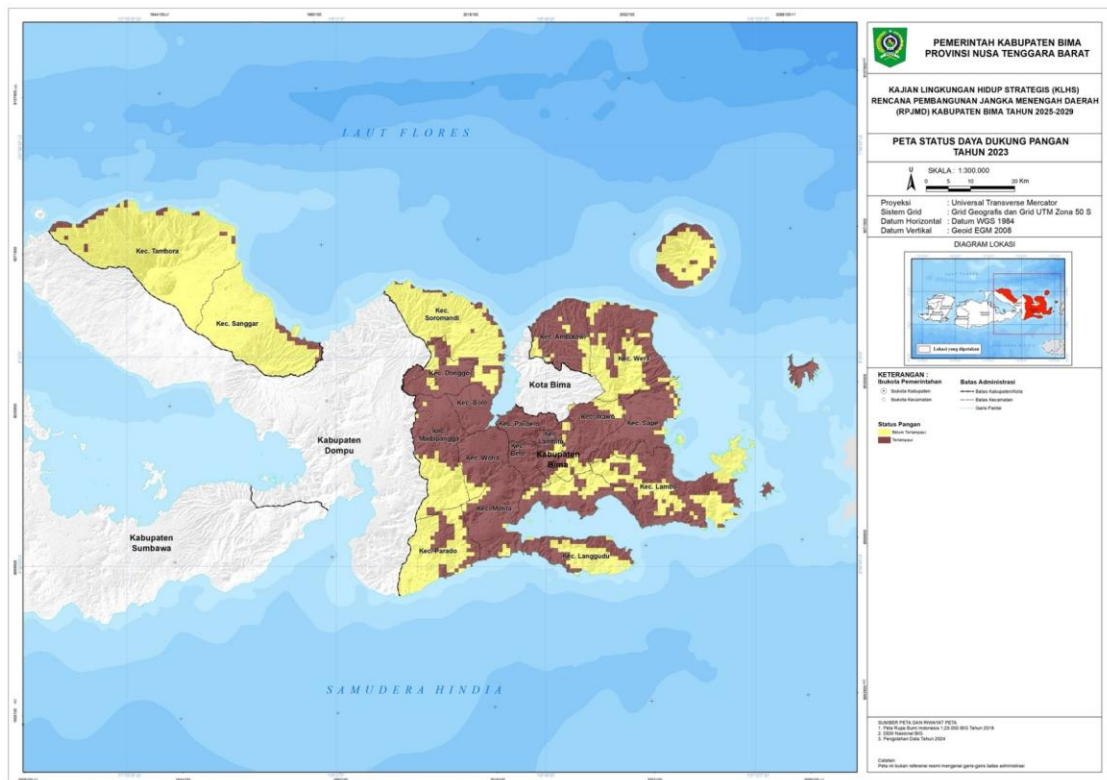
Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pangan di Kabupaten Bima dalam satu tahun, yang kemudian dikonversi ke satuan kilo-kalori (kkal). Ketersediaan pangan tersebut selanjutnya didistribusikan ke setiap grid, dengan menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia bahan pangan (IJEPPB) sebagai bobot pendistribusian. Dilihat dari jumlah kebutuhan total pangan sebesar 420.265.015.000 kkal/tahun, sedangkan jumlah ketersediaan pangan sebesar 310.134.500.000 kkal/tahun, dengan selisih -110.130.514.999 kkal/tahun. Artinya kondisi DDDTLH pangan di Kabupaten Bima Terlampaui dengan kondisi ketersediaan pangan lebih kecil dibandingkan kebutuhan. Secara umum, sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Bima memiliki status daya dukung pangan terlampaui. Namun, terdapat selisih antara kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan yang terjadi di 13 (tigas belas) kecamatan. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bima ke depan untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan pangan penduduk.



Tabel 2.18.
Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bima Tahun

No	Kecamatan	Penduduk 2023	Ketersediaan (kkal/thn)	Kebutuhan (kkal/thn)	Selisih	Status
1	Ambalawi	21.920	14.281.406.248,77	17.201.720.000	-2.920.313.751,23	Terlampai
2	Belo	28.320	5.478.406.027,07	22.224.120.000	-16.745.713.972,93	Terlampai
3	Bolo	53.500	8.039.988.195,40	41.984.125.000	-33.944.136.804,60	Terlampai
4	Donggo	20.950	9.642.899.273,81	16.440.512.500	-6.797.613.226,19	Terlampai
5	Lambitu	6.470	4.144.196.053,11	5.077.332.500	-933.136.446,89	Terlampai
6	Lambu	43.820	28.553.626.881,92	34.387.745.000	-5.834.118.118,08	Terlampai
7	Langgudu	33.080	22.636.522.522,64	25.959.530.000	-3.323.007.477,36	Terlampai
8	Madapangga	32.670	17.099.329.294,51	25.637.782.500	-8.538.453.205,49	Terlampai
9	Monta	40.840	13.247.950.825,26	32.049.190.000	-18.801.239.174,74	Terlampai
10	Palibelo	29.000	5.246.875.173,23	22.757.750.000	-17.510.874.826,77	Terlampai
11	Parado	11.130	13.663.526.650,96	8.734.267.500	4.929.259.150,96	Belum Terlampaui
12	Sanggar	14.430	29.138.957.778,50	11.323.942.500	17.815.015.278,50	Belum Terlampaui
13	Sape	63.380	17.854.513.563,12	49.737.455.000	-31.882.941.436,88	Terlampai
14	Soromandi	20.060	25.367.479.202,78	15.742.085.000	9.625.394.202,78	Belum Terlampaui
15	Tambora	9.170	46.692.144.824,64	7.196.157.500	39.495.987.324,64	Belum Terlampaui
16	Wawo	19.620	8.583.318.353,53	15.396.795.000	-6.813.476.646,47	Terlampai
17	Wera	33.820	33.614.882.951,05	26.540.245.000	7.074.637.951,05	Belum Terlampaui
18	Woha	53.360	6.848.476.180,57	41.874.260.000	-35.025.783.819,43	Terlampai
Jumlah		535.540	310.134.500.000,87	420.265.015.000	-110.130.514.999,13	Terlampai

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bima, Tahun 2024



Gambar 2.12.
Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Bima
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bima, Tahun 2024



2.1.3.3. Jasa Lingkungan Hidup

Jasa lingkungan merupakan manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) dapat direpresentasikan oleh jasa ekosistem, dengan pemahaman bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kapasitas jasa ekosistem dalam mendukung perikehidupan makhluk hidup di suatu ekoregion. Secara operasional, Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dengan pendekatan konsep Jasa Lingkungan Hidup, memiliki asumsi dasar sebagai berikut:

- a) Semakin tinggi Jasa Lingkungan Hidup suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- b) Semakin tinggi Jasa Lingkungan Hidup suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Penetapan Jasa lingkungan hidup di Kabupaten Bima dilakukan dengan menggunakan parameter yang memiliki sifat statis yaitu bentang alam atau ekoregion dan parameter yang sifatnya dinamis dengan menggunakan penggunaan lahan. Layanan penyedia, yaitu jasa/produk yang didapatkan dari ekosistem, seperti sumber daya genetika, makanan, air, dan lainnya. Layanan pengaturan, yaitu manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim, dan lainnya. Layanan kultural, yaitu manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan. Layanan pendukung, yaitu jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti produksi biomassa, produksi oksigen, nutrisi, air, dan lainnya. Kajian jasa lingkungan hidup disusun pada tahun 2024 menggunakan total luas wilayah 422.261,92 hektar. Hal ini dikarenakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2 - 2138 Tahun 2025 yang menetapkan luas wilayah Kabupaten Bima sebesar 420.886,1 Ha baru ditetapkan pada tanggal 25 April 2025.

1) Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Jasa lingkungan hidup penyedia pangan di Kabupaten Bima menunjukkan distribusi berbagai tingkatan jaminan lahan yang mendukung penyediaan pangan di tiap kecamatan. Secara keseluruhan, Kabupaten Bima memiliki total luas lahan pangan sebesar 422.261,92 hektar yang terbagi dalam beberapa kategori jaminan lahan, mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Kecamatan dengan luas lahan penyedia pangan sangat tinggi terbanyak adalah Tambora dengan 62.542,97 ha, disusul oleh Wera (46.478,32 ha) dan Soromandi (32.933,72 ha). Luas lahan yang berada pada kategori tinggi juga sangat signifikan, dengan Tambora (45.709,06 ha), Soromandi (17.221,23 ha), dan Sanggar (23.258,80 ha) sebagai kontributor utama. Kategori sedang mendominasi luas lahan penyedia pangan dengan 212.748,57 ha, Kecamatan Lambu (32.283,54 ha), Wera (23.432,59 ha), dan Sape (11.957,13 ha) memiliki areal cukup besar. Lahan pada tingkat rendah dan sangat rendah memiliki luas yang lebih kecil, menandakan sebagian besar lahan di Kabupaten Bima masih memiliki kapasitas yang baik untuk mendukung ketahanan pangan. Data ini mengindikasikan potensi pemanfaatan lahan yang cukup kuat untuk pengembangan sektor pertanian dan penyediaan pangan di Kabupaten Bima, meskipun juga



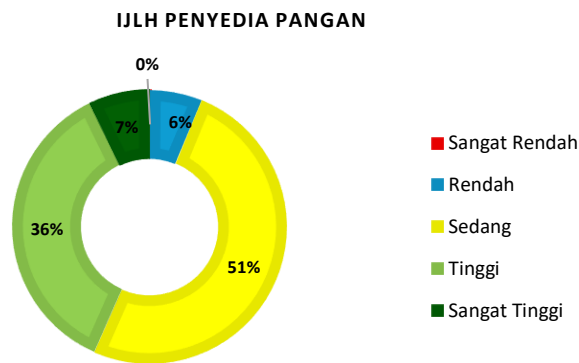
menuntut pengelolaan yang tepat untuk mempertahankan kualitas dan produktivitas lahan yang ada.

Tabel 2.19.
IJLH Penyedia Pangan Kabupaten Bima

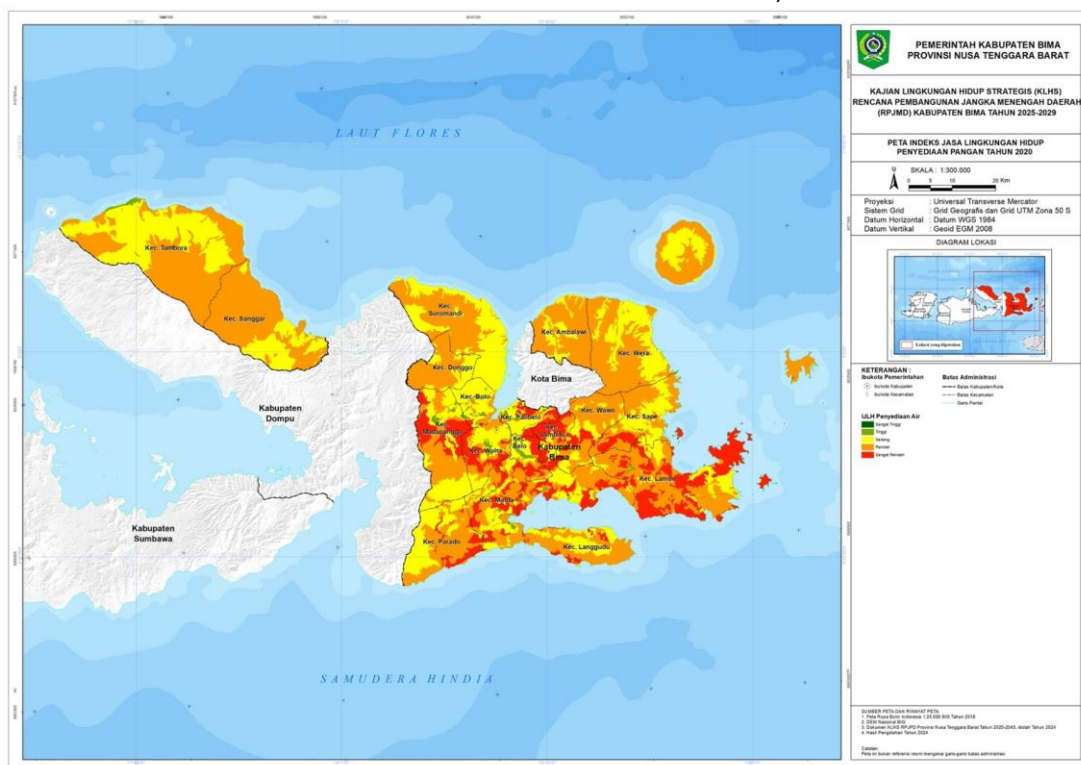
No	Kecamatan	IJLH Penyedia Pangan (Ha)					Jumlah (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Ambalawi		58,70	10.506,45	5.984,14	765,36	17.314,65
2	Belo	59,66	54,65	2658,71	1.618,00	1.451,60	5.842,61
3	Donggo			6.059,81	6.393,39	0,12	12.453,32
4	Lambu	283,85	4386,56	32.920,58	1.935,22	1.673,89	41.200,09
5	Langgudu	12,62	8255,10	17.319,67	4.459,80	876,56	30.923,75
6	Madapangga	55,78	87,42	18.952,88	3.990,48	2.160,21	25.218,90
7	Monta	38,55	29,40	13.647,65	3.268,34	2.882,56	19.866,48
8	Palibelo	3,66	108,91	2.983,50	1.111,44	2.416,27	6.626,78
9	Parado	27,84		19.575,61	2.040,91	0,94	21.645,34
10	Sape	10,09	446,27	11.225,91	6.681,50	1.983,58	20.347,34
11	Soromandi		281,63	15.184,12	17.134,22	243,35	32.843,32
12	Wawo		66,34	12.715,84	3.127,77	32,46	15.942,41
13	Wera		1.615,87	23.285,78	19.895,57	1.417,60	46.214,82
14	Bolo	19,21	174,59	903,88	3.315,35	3.013,01	7.426,04
15	Lambitu	18,88		4.457,24	1.177,14	-0,00	5.815,88
16	Sanggar		50,36	2.3252,90	23.258,80	3.020,95	36.467,05
17	Tambora		9.817,71	2.751,35	45701,52	4.176,93	62.447,51
18	Woha	128,96	104,05	6505,24	1529,89	4.022,21	12.290,35
Jumlah		659,09	25.537,54	211.934,32	152.617,54	30.137,60	420.886,10

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045, Diolah Tahun 2024

Grafik persentase luas jasa lingkungan hidup penyedia pangan di Kabupaten Bima tahun 2023 menggambarkan komposisi distribusi kualitas lahan yang mendukung penyediaan pangan di wilayah tersebut. Mayoritas lahan berada pada kategori "Sedang" dengan proporsi terbesar mencapai 51%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar lahan memiliki jaminan kualitas hidup yang cukup untuk mendukung aktivitas produksi pangan. Selanjutnya, lahan dengan kategori "Tinggi" juga mengambil porsi signifikan sebesar 36%, menandakan wilayah dengan potensi lahan yang baik dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Persentase lahan dengan tingkat jaminan "Sangat Tinggi" sebesar 7% menunjukkan adanya areal dengan kualitas sangat baik untuk penyediaan pangan, meskipun jumlahnya relatif kecil. Sementara itu, lahan yang tergolong dalam kategori "Rendah" dan "Sangat Rendah" masing-masing hanya menyumbang 6% dan kurang dari 1%, menunjukkan sebagian kecil area dengan kualitas jaminan lahan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengelolaannya agar tidak menurunkan produktivitas. Komposisi ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa Kabupaten Bima memiliki potensi lahan penyedia pangan yang dominan dalam kategori sedang hingga tinggi, memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan.



Gambar 2.13.
Grafik Persentase Luas IJLH Penyedia Pangan Kabupaten Bima Tahun 2023
Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045, Diolah Tahun 2024



2) Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

Jasa Lingkungan Hidup sebagai Penyedia Air di Kabupaten Bima tahun 2023 menunjukkan adanya variasi penyediaan layanan air berdasarkan Indeks Jaminan Lahan Hidup (IJLH) yang berkontribusi dalam menjaga ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan. Kecamatan Tambora dan Sanggar mendominasi dengan luas lahan penyedia jasa air tertinggi di kategori sedang, masing-masing mencapai 28.262,91 hektar dan 9.384,16 hektar. Kecamatan Wera, dengan luas lahan sebesar 29.017,71 hektar pada kategori rendah dan 17.460,61 hektar di kategori sedang, juga menunjukkan peran penting dalam penyediaan air. Secara umum, mayoritas wilayah



berada dalam kategori rendah dan sedang, dengan total luas lebih dari 368 ribu hektar, mengindikasikan masih banyak lahan yang memerlukan perhatian dalam pengelolaan sumber daya air agar bisa memenuhi kebutuhan domestik dan pertanian. Kecamatan-kecamatan seperti Belo, Bolo, dan Ambalawi memiliki penyediaan air pada kategori sangat rendah hingga rendah, menandakan potensi keterbatasan ketersediaan air yang mungkin menjadi kendala dalam pengembangan sektor pertanian dan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, data ini menegaskan pentingnya pengelolaan jasa lingkungan hidup yang berfokus pada peningkatan kapasitas penyediaan air di Kabupaten Bima untuk menjamin keberlanjutan sumber daya air sebagai pendukung utama kehidupan dan aktivitas ekonomi di daerah ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.20.
IJLH Penyedia Air Kabupaten Bima tahun 2023

No	Kecamatan	IJLH Penyedia Pangan (Ha)					Jumlah (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Ambalawi		13.674,76	3.639,89			17.314,65
2	Belo	1.975,11	1.290,69	2.001,10	575,71		5.842,61
3	Donggo		8.937,18	3.516,14			12.453,32
4	Lambu	16.168,12	19.059,28	5.791,25	181,43		41.200,09
5	Langgudu	5.671,29	15.675,43	9.442,96	134,07		30.923,75
6	Madapangga	5.823,41	91.88,24	9.759,77	475,35		25.246,77
7	Monta	4.823,46	8.426,00	6.193,32	381,32	42,38	19.866,48
8	Palibelo	2.020,58	1.049,41	3.183,61	373,17		6.626,78
9	Parado	2.098,05	10.949,73	8.594,04	3,48		21.645,30
10	Sape	2.099,23	11.485,55	6.714,14	48,43		20.347,34
11	Soromandi		15.867,78	16.975,54			32.843,32
12	Wawo	1.837,68	10.140,41	3.964,32			15.214,41
13	Wera		28.859,11	17.355,70			46.214,82
14	Bolo	219,05	1.070,35	5.584,74	552,90		7.426,04
15	Lambitu	3.332,66	1.323,74	1.159,4			5.815,88
16	Sanggar		27.048,28	9.390,40			36.438,68
17	Tambora		336.68,27	28.216,14	563,09		62.447,51
18	Woha	3.244,34	33.668,27	4.927,68	476,20		12.290,35
Jumlah		49.312,98	221.356,35	146.410,23	3.764,16	42,38	420.886,10

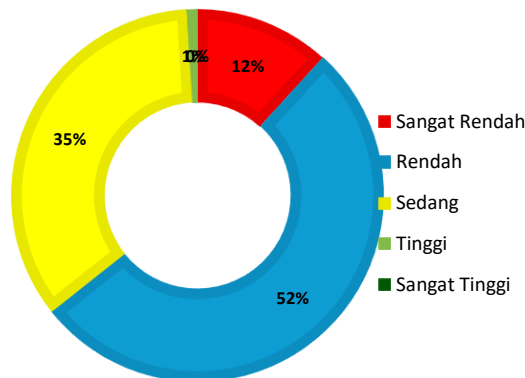
Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045, Diolah Tahun 2024

Grafik persentase luas IJLH Penyedia Air di Kabupaten Bima tahun 2023 menampilkan distribusi kualitas lahan terkait fungsi penyediaan air yang merupakan elemen penting dalam mendukung ekosistem dan kebutuhan air masyarakat. Dari grafik tersebut, sebagian besar lahan berada pada kategori "Rendah" dengan porsi terbesar mencapai 52%, yang mengindikasikan bahwa lebih dari separuh luas lahan memiliki kemampuan penyediaan air yang terbatas dan memerlukan perhatian serius dalam pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya, kategori "Sedang" mencakup 35%, menunjukkan sebaran lahan yang masih memiliki kapasitas sedang untuk menyediakan air, namun masih bisa ditingkatkan efisiensinya dengan pengelolaan yang tepat. Kategori "Sangat Rendah" menempati 12%, yang mengimplikasikan adanya area dengan kapasitas penyediaan air yang sangat minim dan berisiko meningkatkan kerentanan terhadap bencana kekeringan atau defisit air. Kategori



"Tinggi" dan "Sangat Tinggi" hanya menyumbang kurang dari 1% secara total, menunjukkan area dengan fungsi penyediaan air yang optimal, namun jumlahnya sangat kecil. Kondisi ini secara keseluruhan menggarisbawahi pentingnya upaya konservasi dan perbaikan manajemen penggunaan air di Kabupaten Bima untuk memastikan ketersediaan air yang cukup dan berkelanjutan bagi kehidupan dan pembangunan di daerah tersebut.

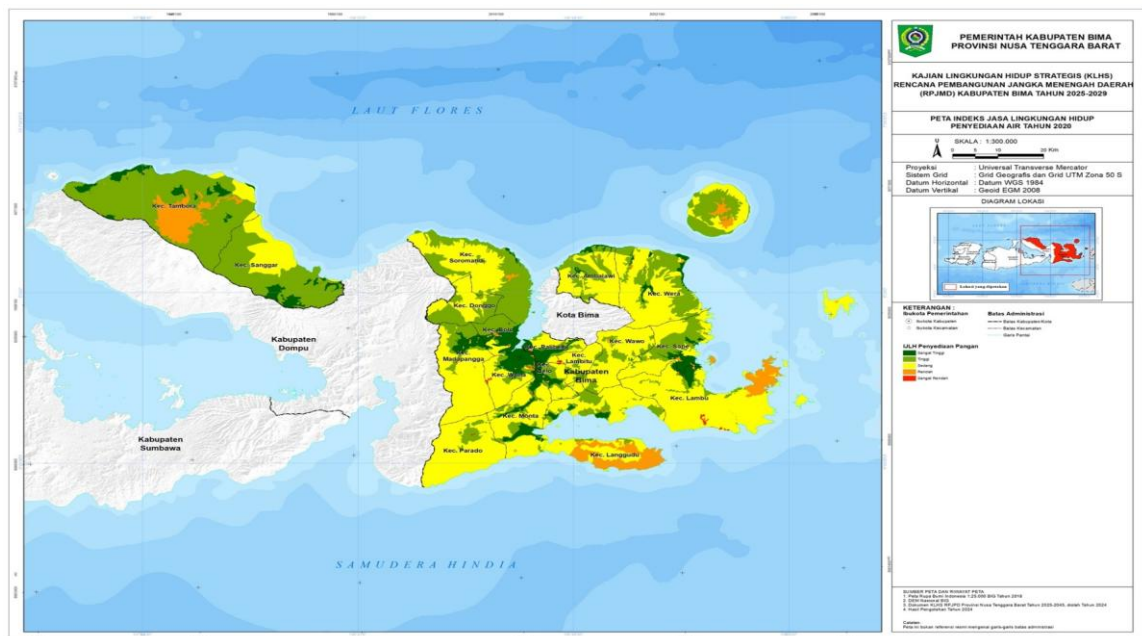
IJLH PENYEDIA AIR



Gambar 2.15.

Grafik Persentase Luas IJLH Penyedia Air Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045, Diolah Tahun 2024



Gambar 2.16.

Peta IJLH Penyedia Air Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045, Diolah Tahun 2024



3) Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Jasa lingkungan hidup pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Bima menunjukkan distribusi lahan yang berperan dalam pengelolaan aliran air dan mitigasi banjir di berbagai kecamatan. Kecamatan Tambora menempati posisi tertinggi dengan luas lahan mencapai 62.542,97 hektar, dengan sebagian besar lahan berada dalam kategori sedang (23.174,65 Ha) dan tinggi (4.623,66 Ha). Sanggar juga memiliki kontribusi signifikan pada kategori sedang (7.030,42 Ha) dan rendah (24.898,28 Ha), menandakan kapasitas yang cukup kuat untuk mengatur aliran air. Kecamatan Wera juga menunjukkan peran strategis dengan luasan lahan pada kategori sedang (12.602,74 Ha) dan rendah (22.181,83 Ha). Di sisi lain, beberapa kecamatan seperti Ambalawi, Belo, dan Bolo meskipun memiliki luas lahan yang lebih kecil, masih menyimpan potensi pengaturan aliran air dengan kategori rendah hingga sedang. Secara keseluruhan, luas lahan yang masuk dalam kategori rendah mendominasi dengan total mencapai 208.269,02 hektar, sedangkan kategori sangat rendah mencapai 3.318,18 hektar, kategori sedang 53.339,73 hektar, tinggi 114.129,62 hektar, dan sangat tinggi 43.205,37 hektar. Distribusi ini menggambarkan keberagaman kapasitas pengaturan tata aliran air yang memerlukan pemantauan dan pengelolaan terintegrasi untuk meminimalisasi risiko banjir dan mendukung kelestarian lingkungan di Kabupaten Bima.

Tabel 2.21.

IJLH Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir Kabupaten Bima

No	Kecamatan	IJLH Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir (Ha)					Jumlah (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Ambalawi		13.721,55	904,36	2.688,73		17.314,65
2	Belo	299,00	3.426,71	1.203,67	509,73	403,51	5.842,61
3	Donggo		7.072,90	26,42	4576,95	777,03	12.453,32
4	Lambu	298,77	13.947,30	10.592,52	15.241,70	1.119,79	41.200,09
5	Langgudu	309,22	6.868,31	9.714,46	8.908,41	5123,35	30.923,75
6	Madapangga	133,08	9.851,49	3.340,52	6.076,18	5.845,50	25.246,77
7	Monta	681,33	7.349,11	4.705,92	3.620,24	3.509,90	19.866,48
8	Palibelo	655,06	4.442,86	1.517,49	0,03	1,34	6.626,78
9	Parado		2.098,99	2.273,85	8782,87	8.489,60	21.645,30
10	Sape	105,93	15.225,33	2.041,84	2961,72	12,54	20.347,34
11	Soromandi		19.857,83	213,35	9.776,89	2.995,25	32.843,32
12	Wawo		7.018,86	1.816,41	5775,84	1.331,31	15.842,41
13	Wera		22.147,31	6.192,87	1.2463,53	5.411,12	46.214,82
14	Bolo	314,83	6.246,86	835,08		29,27	7.426,04
15	Lambitu	5,26	3.531,84	1.117,37	1.161,40		5.815,88
16	Sanggar		24.875,08	2.182,26	7.030,42	2.350,92	36.438,68
17	Tambora		31.750,60	2.898,59	23.174,65	4.623,66	62.447,51
18	Woha	497,98	8.127,81	1.319,26	1.246,96	1.098,34	12.290,35
Jumlah		3.310,46	207.560,72	52.896,24	113.996,25	43.122,43	420.886,10

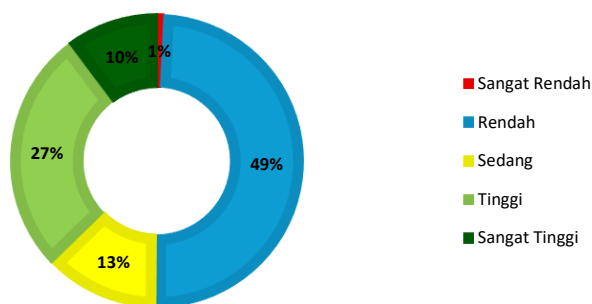
Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045, Diolah Tahun 2024

Grafik persentase luas IJLH Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Bima tahun 2023 menggambarkan distribusi kualitas lahan berdasarkan kemampuannya dalam mengelola tata aliran air dan mitigasi banjir. Dari grafik tersebut, lahan dengan kategori "Rendah" mendominasi dengan 49% dari total luas, menunjukkan bahwa hampir setengah dari lahan memiliki kapasitas terbatas dalam pengaturan tata aliran air dan rawan terhadap risiko banjir. Kategori "Sedang" menyumbang 13%, mencerminkan sebagian lahan yang memiliki daya dukung sedang dan potensi untuk peningkatan pengelolaan tata air. Kategori "Tinggi"



mencakup 27% dari luas lahan, menunjukkan peranan penting sebagian areal yang cukup efektif dalam mengendalikan aliran dan banjir. Sementara itu, kategori "Sangat Tinggi" sebesar 10% dan "Sangat Rendah" hanya 1%, menunjukkan bahwa area dengan kemampuan sangat optimal cukup signifikan walaupun kecil proporsinya, dan area dengan kemampuan sangat rendah sangat minimal. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan perlunya perhatian dan pengelolaan khusus pada lahan dengan kapasitas rendah agar fungsi pengaturan tata aliran air dan pengendalian banjir dapat terjamin guna mendukung keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat Kabupaten Bima.

IJLH PENGATURAN TAT ALIRAN AIR DAN BANJIR



Gambar 2.17.

Grafik Persentase Luas IJLH Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045, Diolah Tahun 2024

4) Jasa Lingkungan Hidup Pemeliharaan Kualitas Udara

Jasa Lingkungan Hidup untuk Pemeliharaan Kualitas Udara di Kabupaten Bima menunjukkan variasi luas lahan yang berperan dalam menjaga kebersihan dan kualitas udara di setiap kecamatan. Kecamatan Lambu menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar, memiliki total luas 40.320,53 hektar dengan lahan pada kategori sedang seluas 21.466,44 hektar dan kategori tinggi 5.042,98 hektar, menandakan peranan besar kawasan ini dalam penyediaan udara bersih. Kecamatan Wera juga menonjol dengan area yang luas hingga 46.478,32 hektar, sebagian besar masuk dalam kategori sedang dan tinggi dengan seluas 10.836,80 dan 21.614,29 hektar masing-masing, serta dukungan lahan sangat tinggi seluas 903,18 hektar, merefleksikan peran vital dalam mempertahankan kualitas udara. Selain itu, Kecamatan Tambora dan Sanggar memiliki luas lahan yang signifikan pada kategori sedang dan sangat tinggi, menambah kontribusi penting terhadap kualitas udara di daerah tersebut. Secara keseluruhan, total luas lahan yang masuk dalam kategori rendah dominan yakni 103.980,41 hektar, diikuti oleh kategori sedang (187.826,85 Ha), tinggi (89.706,57 Ha), sangat tinggi (39.440,17 Ha), serta sangat rendah (1.307,92 Ha). Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Bima memiliki tingkat pemeliharaan kualitas udara yang cukup baik, dengan beberapa daerah yang perlu diperhatikan dan didukung agar kualitas udaranya tetap terjaga demi kesehatan lingkungan dan masyarakat.



Tabel 2.22.
IJLH Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Bima

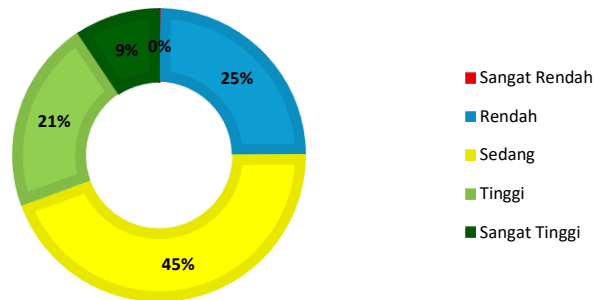
No	Kecamatan	IJLH Pemeliharaan Kualitas Udara (Ha)					Jumlah (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Ambalawi	38,87	8.995,98	4.696,75	3.583,05		17.314,65
2	Belo	59,66	1.959,45	3.459,11	185,50	178,89	5.842,61
3	Donggo		3.046,16	4.026,63	5.312,46	68,08	12.453,32
4	Lambu	75,27	13.617,43	22.449,81	5.013,79	43,79	41.200,09
5	Langgudu	126,73	7.115,08	18.097,61	5.453,42	130,91	30.923,75
6	Madapangga	32,41	4.718,91	13.274,28	6.552,57	668,60	25.246,77
7	Monta	0,45	3474,10	11.266,47	2.039,12	3.086,33	19.866,48
8	Palibelo	4,72	2.444,81	3.919,85	256,06	1,34	6.626,78
9	Parado		2387,90	10.260,53	7.343,67	1.653,20	21.645,30
10	Sape	27,03	7225,62	9.755,64	3.325,55	13,51	20.347,32
11	Soromandi	255,91	5.701,06	13.937,81	12.948,54		32.843,32
12	Wawo		3.673,30	7.589,96	4.436,36	242,78	15.942,41
13	Wera	553,71	12.555,51	10.810,60	21.391,81	903,18	46.214,82
14	Bolo	9,18	1.055,23	6.278,95	53,40	29,27	7.426,04
15	Lambitu	18,88	3.470,86	2.007,19	194,65	124,30	5.815,88
16	Sanggar		1.986,01	22.556,10	4.625,48	7.271,09	36.438,68
17	Tambora		15.840,41	15.978,16	5.748,61	24.880,32	62.447,51
18	Woha	102,40	4.214,25	6.864,40	1.049,37	59,93	12.290,35
Jumlah		1.305,23	103.482,08	187.229,86	89.513,41	39.355,52	420.886,10

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045, Diolah Tahun 2024

Grafik persentase luas IJLH Pemeliharaan Kualitas Udara di Kabupaten Bima menunjukkan distribusi variasi kualitas udara yang dipengaruhi oleh luas lahan pada berbagai kategori. Mayoritas lahan berada pada kategori "Sedang" dengan persentase sebesar 45%, menandakan hampir setengah dari wilayah memiliki kemampuan sedang dalam pemeliharaan kualitas udara. Kategori "Rendah" menduduki posisi kedua terbesar sebesar 25%, yang menunjukkan sebagian wilayah memerlukan perhatian lebih dalam hal pengelolaan kualitas udara. Selanjutnya, kategori "Tinggi" mencakup 21% dari luas wilayah, memperlihatkan bagian yang cukup signifikan dalam menjaga kualitas udara dengan baik. Sedikit lahan yang tergolong dalam kategori "Sangat Tinggi" dengan 9%, menandakan ada area dengan kualitas pemeliharaan udara yang sangat baik walaupun masih terbatas. Kategori "Sangat Rendah" tidak terlihat dalam grafik, yang menjadi indikasi positif bahwa area dengan kondisi sangat buruk hampir tidak ada atau sangat minimal. Secara keseluruhan, grafik ini memberikan gambaran bahwa Kabupaten Bima memiliki pemeliharaan kualitas udara yang bervariasi dengan mayoritas wilayah dalam kategori sedang hingga tinggi, namun ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas di area yang termasuk kategori rendah agar kesehatan lingkungan dan masyarakat tetap terjaga.



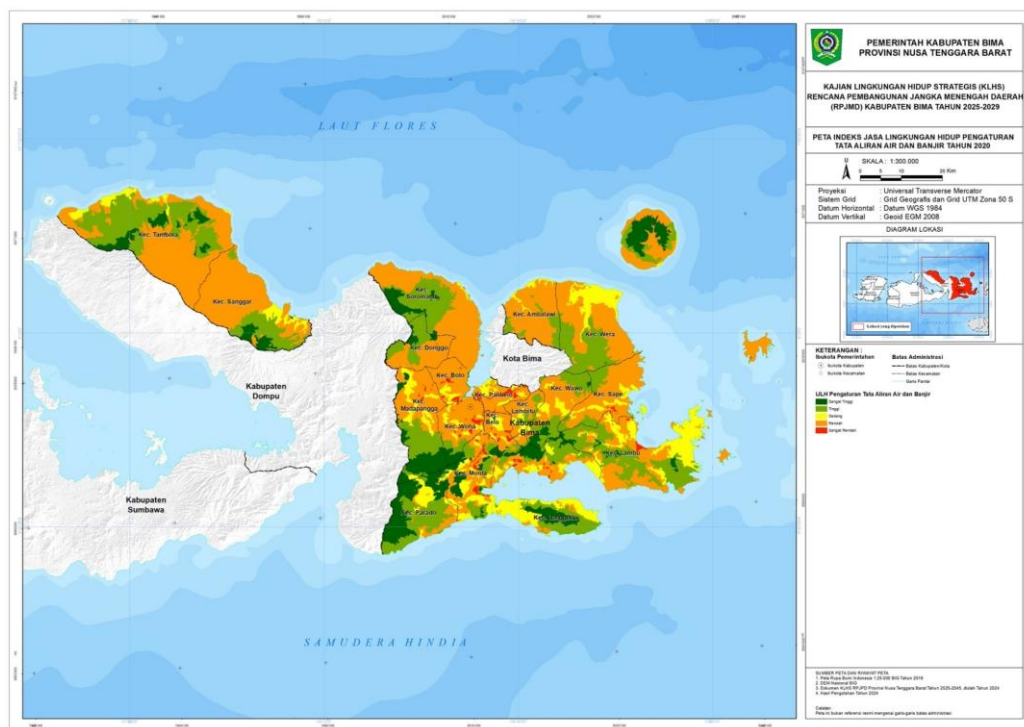
IJLH PEMELIHARAAN KUALITAS UDARA



Gambar 2.18.

Grafik Persentase Luas IJLH Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Bima

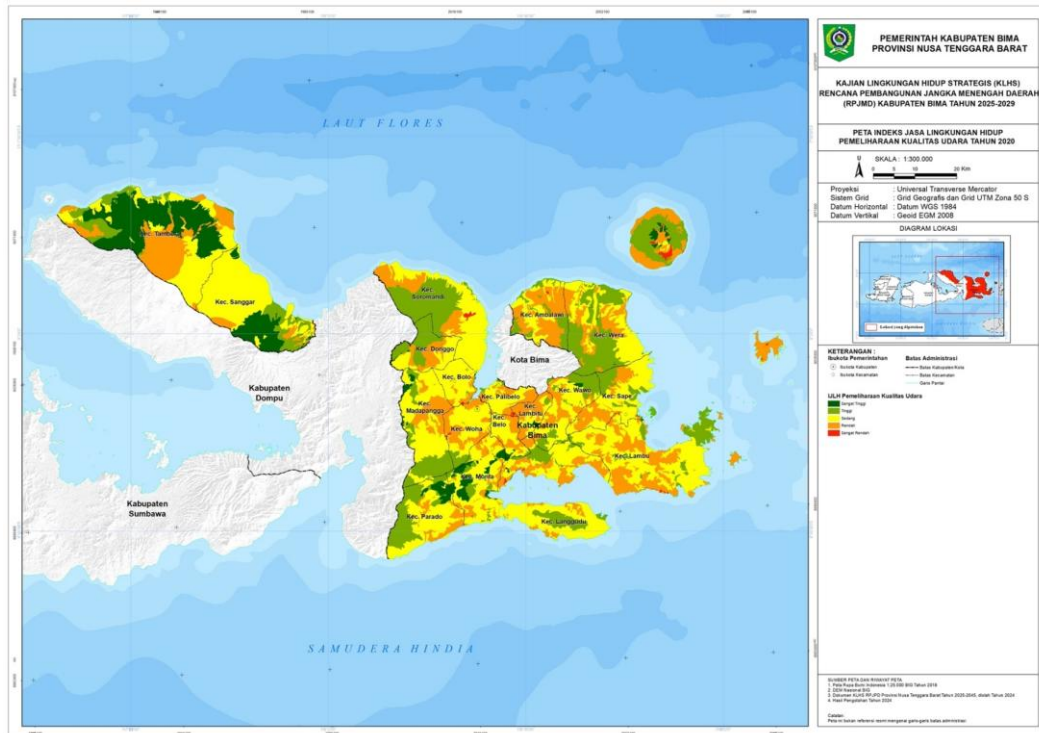
Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045, Diolah Tahun 2024



Gambar 2.19.

Peta IJLH Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045, Diolah Tahun 2024



Gambar 2.20.

Peta IJLH Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045, Diolah Tahun 2024

5) Jasa Lingkungan Hidup Pengolahan dan Penguraian Limbah

Jasa Lingkungan Hidup terkait Pengolahan dan Penguraian Limbah di Kabupaten Bima menunjukkan luas lahan yang berperan dalam penanganan limbah di setiap kecamatan yang bervariasi, mencerminkan fokus dan kapasitas pengelolaan limbah yang berbeda-beda. Kecamatan Tambora memiliki luas lahan terbesar untuk kategori sedang dengan 38.872,59 hektar, diikuti oleh Kecamatan Lambu dengan 31.229,03 hektar, dan Kecamatan Wera dengan 32.278,02 hektar, menunjukkan bahwa ketiga kecamatan ini merupakan pusat utama dalam pengolahan dan penguraian limbah. Di sisi lain, kategori sangat tinggi mendominasi di Tambora dengan luas 4.623,61 hektar dan Madapangga yang juga mencatat angka cukup besar pada kategori ini yaitu 3.290,24 hektar, menggambarkan area yang memiliki kemampuan pengolahan limbah tingkat lanjut. Luas lahan untuk kategori rendah tersebar cukup merata, dengan jumlah total mencapai 95.081,57 hektar, mencerminkan kebutuhan untuk peningkatan dalam kapasitas pengolahan limbah di area-area tersebut. Secara keseluruhan, total luas lahan yang digunakan untuk pengolahan dan penguraian limbah di Kabupaten Bima mencapai 422.261,92 hektar, dengan dominasi kategori sedang yang mencapai 262.028,57 hektar, serta kategori tinggi dan sangat tinggi yang menunjukkan adanya potensi dan kemampuan pengolahan limbah yang terus berkembang demi mendukung lingkungan hidup yang lebih bersih dan sehat.



Tabel 2.23.

IJLH Pengolahan Dan Penguraian Limbah Kabupaten Bima

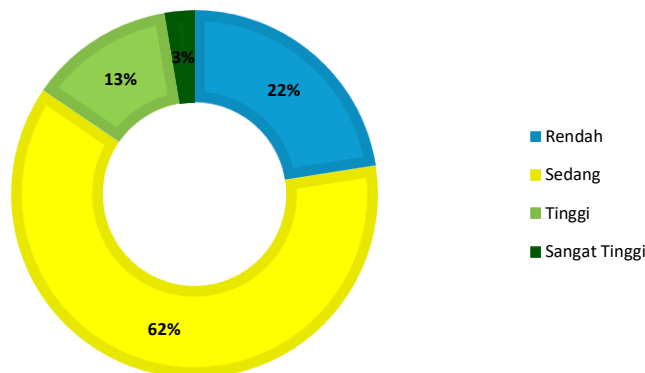
No	Kecamatan	IJLH Pengolahan dan Penguraian Limbah (Ha)				Jumlah (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Ambalawi	2.167,23	13.980,72	1.166,70		17.314,65
2	Belo	2.653,06	2.696,95	54,64	437,96	5.842,61
3	Donggo	3.240,58	8.426,19	786,54		12.453,32
4	Lambu	3.484,39	32.107,42	5.420,57	187,71	41.200,09
5	Langgudu	5.255,39	15.629,96	9.901,63	136,77	30.923,75
6	Madapangga	2.174,93	12.491,23	7.290,37	3.290,24	25.246,77
7	Monta	913,52	11.273,42	2.520,02	5.159,53	19.866,48
8	Palibelo	2.396,17	3.926,32	304,29		6.626,78
9	Parado	472,85	11.798,18	7.568,93	1.805,34	21.645,30
10	Sape	7.440,38	12.620,55	286,41		20.347,34
11	Soromandi	9.963,79	19.884,28	2.995,25		32.843,32
12	Wawo	2.492,21	12.674,20	775,99		15.942,41
13	Wera	8.015,82	32.026,71	6.172,29		46.214,82
14	Bolo	3.720,07	3.676,70	29,27		7.426,04
15	Lambitu	5.292,48	523,40			5.815,88
16	Sanggar	14.795,42	18.674,36	2.968,91		36.438,68
17	Tambora	18.993,81	38.830,08	4.623,61		62.447,51
18	Woha	1.294,65	9.897,36	1.040,48	57,86	12.290,35
Jumlah		95.081,57	262.028,57	54.075,77	11.076,01	420.886,35

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045, Diolah Tahun 2024

Grafik persentase luas IJLH Pengolahan dan Penguraian Limbah di Kabupaten Bima pada tahun 2023 menunjukkan variasi tingkat pengolahan limbah berdasarkan luas lahan yang ada. Mayoritas lahan berada pada kategori "Sedang" dengan persentase signifikan mencapai 62%, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki kapasitas pengolahan limbah pada tingkat menengah. Selanjutnya, kategori "Rendah" menyumbang 22%, yang mengindikasikan area dengan kapasitas pengolahan limbah yang masih perlu ditingkatkan. Kategori "Tinggi" mencakup 13% dari total luas lahan, menandakan adanya bagian wilayah dengan kemampuan pengolahan limbah yang cukup baik dan berkembang. Hanya sedikit wilayah yang masuk kategori "Sangat Tinggi" sekitar 3%, yang menunjukkan area dengan pengelolaan limbah paling optimal. Tidak terdapat kategori "Sangat Rendah" pada grafik ini, menandakan tidak ada atau sangat sedikit lahan dengan pengolahan limbah yang sangat buruk. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa Kabupaten Bima memiliki pengelolaan limbah yang umumnya berada pada tingkat sedang, dengan peluang untuk peningkatan kualitas pengolahan di wilayah yang masih rendah demi menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.



IJLH PENGOLAHAN DAN PENGURAIAN LIMBAH



Gambar 2.21.

Grafik Persentase Luas IJLH Pengolahan Dan Penguraian Limbah Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045, Diolah Tahun 2024

6) Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Bencana Alam

Jasa Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Mitigasi Bencana di Kabupaten Bima menunjukkan pola distribusi luas lahan berdasarkan tingkat risiko mitigasi bencana di berbagai kecamatan. Luas lahan dengan kondisi "Sangat Rendah" mencapai 2.658,90 hektar, menggambarkan area yang relatif aman dari risiko bencana. Sebagian besar luas lahan berada pada kategori "Rendah" dengan total 237.692,24 hektar, menunjukkan bahwa banyak wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana rendah, namun tetap perlu perhatian dalam pencegahan dan perlindungan. Kategori "Sedang" menempati luas sebesar 107.983,10 hektar, mencerminkan zona dengan risiko menengah yang memerlukan kesiapan dan mitigasi yang cukup intensif. Luas lahan dengan kategori "Tinggi" mencapai 65.169,61 hektar, menandakan adanya daerah yang rentan terhadap bencana dan memerlukan pengelolaan serta perlindungan yang lebih kuat. Adapun kategori "Sangat Tinggi" menutupi luas 8.758,06 hektar, yang menjadi prioritas utama untuk tindakan mitigasi bencana guna mengurangi kerugian dan peningkatan ketahanan masyarakat. Total luas lahan untuk mitigasi bencana di Kabupaten Bima mencapai 422.261,92 hektar, yang menggambarkan skala luas dan kebutuhan koordinasi berbagai pihak untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan wilayah dari ancaman bencana.

Tabel 2.24.

IJLH Mitigasi Bencana Kabupaten Bima

No	Kecamatan	IJLH Pencegahan dan Perlindungan Bencana (Ha)					Jumlah (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Ambalawi	38,87	14.521,72	2.090,81	663,25		17.314,65
2	Belo	114,31	3.245,05	2.118,87	364,39		5.842,61
3	Donggo		7.803,88	3.777,90	871,54		12.453,32
4	Lambu	164,19	31.638,26	7.755,74	1.628,05	13,86	41.200,09
5	Langgudu	216,53	20.927,48	4.451,07	5.328,68		30.923,75
6	Madapangga	127,42	12.544,66	5.391,64	6.981,64	201,41	25.246,77
7	Monta	293,13	11.229,95	3.349,75	4.672,64	321,02	19.866,48

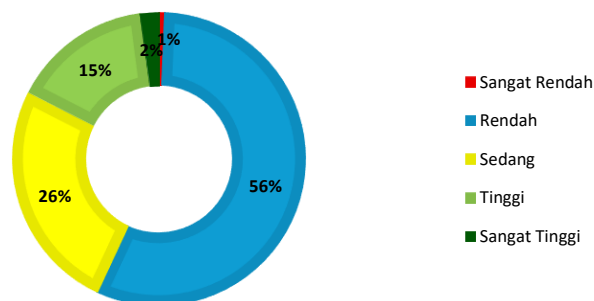


No	Kecamatan	IJLH Pencegahan dan Perlindungan Bencana (Ha)					Jumlah (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
8	Palibelo	160,74	4.466,60	1.681,13	316,97	1,34	6.626,78
9	Parado	2,54	11.750,31	902,59	8.690,94	298,93	21.645,30
10	Sape	139,84	14.950,15	5.244,68	10,93	1,75	20.347,34
11	Soromandi	278,97	20.043,51	9.354,16	3.166,69		32.843,32
12	Wawo	26,95	9.423,48	4.649,18	1.838,01	4,79	15.942,41
13	Wera	566,27	32.418,55	4.829,78	7.604,74	795,48	46.214,82
14	Bolo	293,71	2.557,90	4.545,16		29,27	7.426,04
15	Lambitu	18,88	3.721,72	1.947,42	127,85		5.815,88
16	Sanggar	16,17	11.879,06	16.329,62	5.888,73	2.325,10	36.438,68
17	Tambora	12,99	14.059,29	27.934,04	15.817,57	4.623,61	62.447,51
18	Woha	177,37	9.548,92	1.465,72	1.038,68	59,66	12.290,35
Jumlah		2.648,85	236.725,38	107.746,95	65.011,31	8.676,22	420.886,10

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045, Diolah Tahun 2024

Grafik persentase luas IJLH Mitigasi Bencana di Kabupaten Bima menunjukkan bahwa mayoritas lahan (56%) berada pada kategori "Rendah", yang menandakan wilayah ini memiliki tingkat mitigasi risiko bencana yang relatif aman namun tetap harus diperhatikan untuk pengelolaan risiko yang berkelanjutan. Kategori "Sedang" meliputi 26% dari total luas lahan, menunjukkan adanya wilayah dengan risiko mitigasi bencana yang memerlukan perhatian dan tindakan penanganan yang lebih intensif. Wilayah dengan kategori "Tinggi" mencapai 15%, yang berarti terdapat area yang cukup rentan terhadap bencana dan membutuhkan strategi mitigasi yang lebih serius dan komprehensif. Kategori "Sangat Tinggi" mencakup 2%, menjadi area prioritas utama untuk upaya mitigasi guna mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi. Kategori "Sangat Rendah" hanya sebesar 1%, menunjukkan zone yang sangat kecil dengan risiko mitigasi bencana yang paling minimal. Secara keseluruhan, grafik ini mengilustrasikan kondisi mitigasi bencana Kabupaten Bima yang sebagian besar berada dalam level aman sampai sedang, dengan fokus peningkatan pada zona rentan untuk memperkuat ketahanan wilayah.

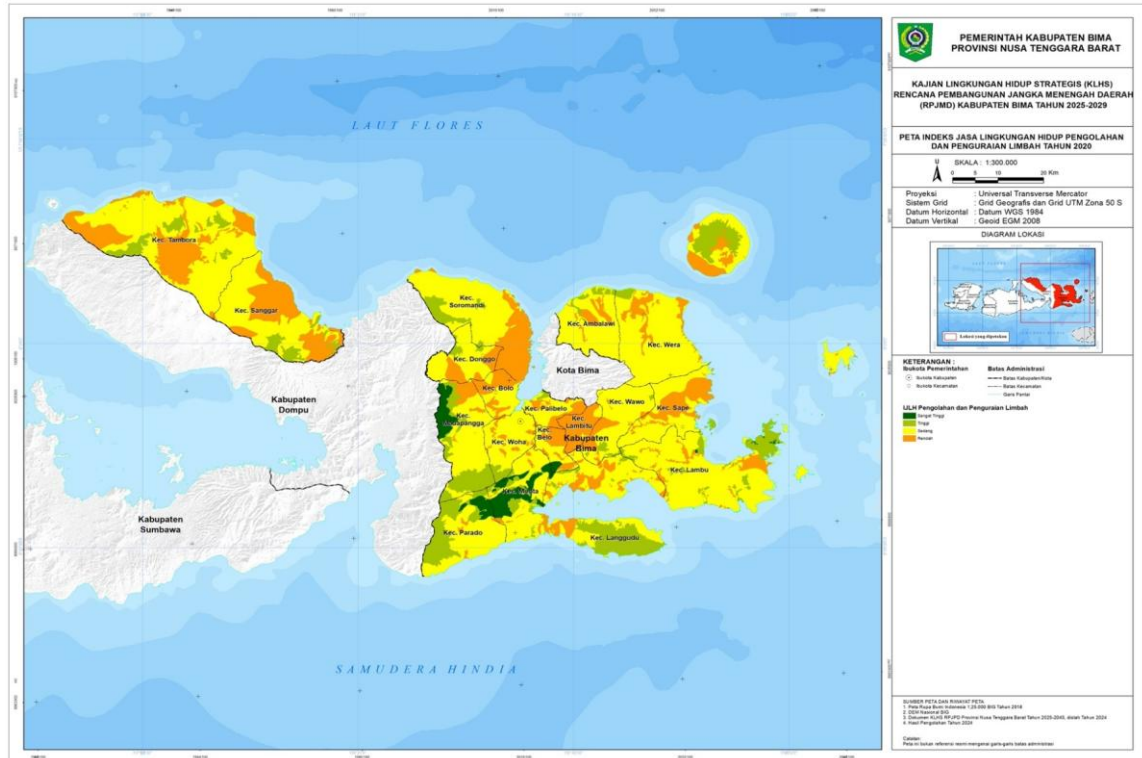
IJLH PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN BENCANA



Gambar 2.22.

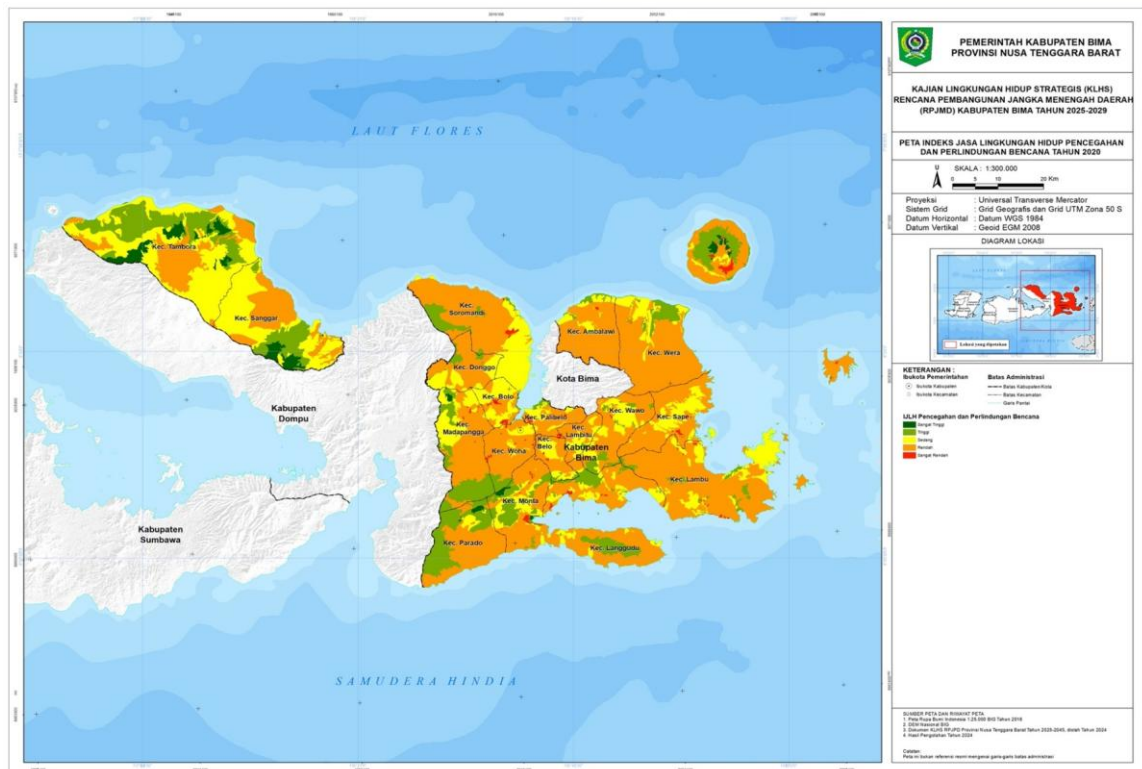
Grafik Persentase Luas IJLH Mitigasi Bencana Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045, Diolah Tahun 2024



Gambar 2.23.

Peta IJLH Pengolahan Dan Penguraian Limbah Kabupaten Bima
Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045, Diolah Tahun 2024



Gambar 2.24.

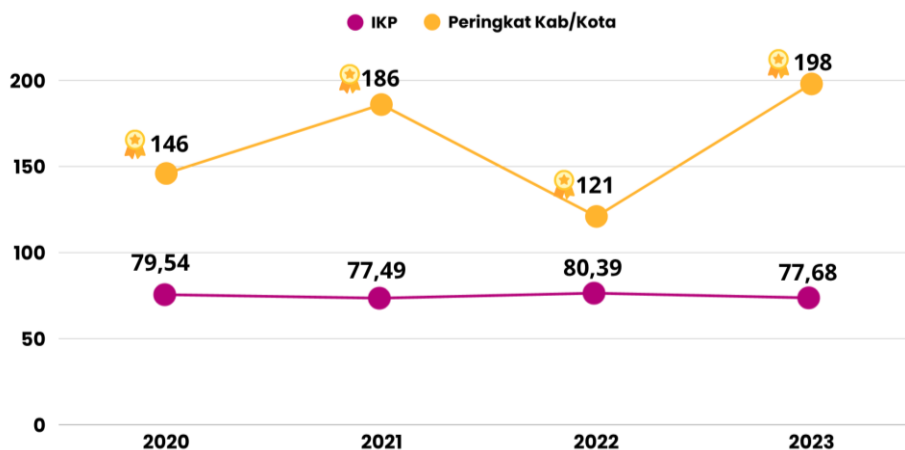
Peta IJLH Pengaturan Mitigasi Bencana Alam
Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045, Diolah Tahun 2024



2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan suatu wilayah dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan bagi seluruh penduduknya. Indeks ini juga merepresentasikan stabilitas dan keberlanjutan sistem pangan dalam jangka panjang, serta memperhatikan aspek kerentanan terhadap krisis pangan.



Gambar 2.25.

Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bima

Sumber: Satu Data Badan Pangan Nasional, 2024

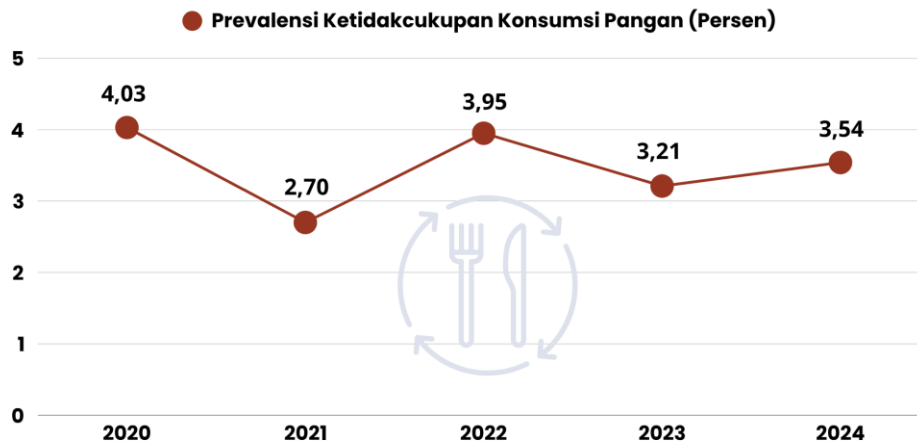
Berdasarkan grafik, nilai IKP Kabupaten Bima pada tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, IKP berada pada angka 79,54, kemudian menurun menjadi 77,49 di tahun 2021. Selanjutnya, indeks ini meningkat menjadi 80,39 pada tahun 2022, namun kembali mengalami penurunan ke angka 77,68 pada tahun 2023. Dalam hal peringkat nasional dari seluruh kabupaten/kota, Kabupaten Bima sempat mengalami perbaikan posisi pada tahun 2022 dengan peringkat 121, dibanding tahun sebelumnya (186 pada 2021). Namun, posisi ini kembali menurun ke peringkat 198 pada tahun 2023. Variasi IKP menunjukkan adanya dinamika dalam ketahanan pangan di Kabupaten Bima. Meskipun sempat mengalami perbaikan pada tahun 2022, penurunan nilai pada 2023 mengindikasikan perlunya peningkatan dalam aspek distribusi dan pemanfaatan pangan. Faktor penyebab utama dapat dikaitkan dengan keterbatasan infrastruktur logistik pangan, serta pengaruh cuaca ekstrem terhadap produksi pangan lokal. Namun demikian, potensi pertanian dan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola sumber daya pangan menjadi modal positif bagi Kabupaten Bima dalam mengembangkan strategi ketahanan pangan ke depan. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bima, karena merujuk daya dukung pangan. Terdapat beberapa wilayah kecamatan yang memiliki selisih cukup besar antara kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan. Pemerintah Kabupaten Bima perlu mengoptimalkan berbagai sumber dan potensi pangan lokal serta penguatan distribusi serta pemerataan akses penduduk terhadap sumber pangan ke depan.

2.1.4.2. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan merupakan indikator yang mengukur persentase penduduk yang konsumsi energinya tidak memenuhi kebutuhan minimal harian. Angka ini mencerminkan kondisi kerentanan gizi dan pangan masyarakat di suatu wilayah.



Pada tahun 2020, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Bima tercatat sebesar 4,03 persen. Angka ini mengalami penurunan signifikan menjadi 2,70 persen di tahun 2021. Namun, prevalensi kembali meningkat menjadi 3,95 persen pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun ke angka 3,21 persen pada 2023, dan naik kembali menjadi 3,54 persen pada tahun 2024.



Gambar 2.26.
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Bima Tahun 2020-2024
Sumber: NTB Satu Data, 2025

Fluktuasi angka prevalensi menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan signifikan pada tahun 2021, kondisi tersebut belum mampu dipertahankan secara konsisten. Faktor penyebab utama dapat dikaitkan dengan keterbatasan akses terhadap pangan bergizi dan belum meratanya distribusi program intervensi gizi. Namun, keberhasilan menurunkan angka prevalensi secara tajam pada tahun 2021 mencerminkan potensi efektifnya program penguatan ketahanan pangan rumah tangga dan intervensi gizi spesifik. Dengan penguatan program berbasis desa dan peningkatan literasi gizi masyarakat, Kabupaten Bima memiliki peluang besar untuk memperbaiki capaian ini secara berkelanjutan.

2.1.4.3. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita mencerminkan tingkat pemanfaatan energi listrik oleh masyarakat dalam suatu wilayah. Indikator ini tidak hanya menggambarkan akses energi, tetapi juga tingkat aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

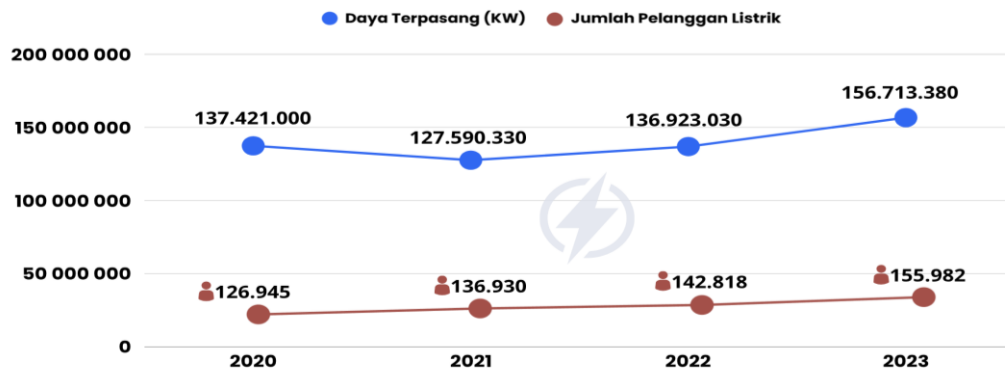
Tabel 2.25.
Jumlah Pelanggan, Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pelanggan Listrik	126.945	136.930	142.818	155.982
Daya Terpasang (KW)	137.421.000	127.590.330	136.923.030	156.713.380
Produksi Listrik (KWh)	148.304.774	172.868.382,8	171.401.137	16.544.518
Listrik Terjual (KWh)	143.354.290	163.306.904,4	153.258.706	16.544.518
Dipakai Sendiri (KWh)	14.359	1.595.919,91	3.750.189	-
Susut/Hilang	4.930.926	7.965.558,49	14.392.242	-

Sumber: BPS Kabupaten Bima, 2025



Konsumsi listrik dapat ditinjau dari jumlah pelanggan dan daya listrik terpasang di Kabupaten Bima. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Bima mengalami peningkatan dari 126.945 pelanggan pada tahun 2020 menjadi 155.982 pelanggan pada tahun 2023. Daya listrik terpasang juga meningkat dari 137.421.000 KW pada 2020 menjadi 156.713.380 KW pada 2023. Produksi listrik tercatat sebesar 148.304.774 KWh pada 2020, meningkat pada 2021 dan 2022, meskipun kembali mengalami penurunan menjadi 165.445.18 KWh pada 2023. Data juga menunjukkan adanya listrik yang digunakan sendiri (misalnya oleh PLN), dan jumlah susut atau kehilangan energi, yang relatif besar pada 2021 dan 2022.



Gambar 2.27.

Daya Terpasang (KW) dan Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Bima tahun 2020-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima

Peningkatan jumlah pelanggan dan daya terpasang menunjukkan pertumbuhan akses energi listrik di Kabupaten Bima, yang merupakan indikator positif bagi peningkatan kesejahteraan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Penurunan produksi listrik pada 2023 perlu dicermati, kemungkinan disebabkan oleh efisiensi operasional atau pergeseran pola konsumsi. Faktor lain yang memengaruhi adalah peningkatan konektivitas infrastruktur listrik ke daerah pelosok serta dorongan elektrifikasi sektor produktif. Pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi menjadi kunci strategis dalam menjaga kesinambungan ketersediaan listrik serta mendukung ketahanan energi daerah.

2.1.4.4. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum mengacu pada kemampuan suatu rumah tangga dalam memperoleh air minum yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Indikator ini tidak hanya mencakup ketersediaan sumber air, tetapi juga faktor kualitas, keterjangkauan harga, serta kontinuitas pasokan. Menurut standar WHO dan UNICEF, air minum yang layak harus memenuhi kriteria aman (bebas dari kontaminan fisik, kimia, dan biologis), terakses secara fisik (jarak dan waktu pengambilan yang wajar), dan terjangkau secara ekonomi.

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Salah satunya adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota tentang kondisi lingkungan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta dapat membantu



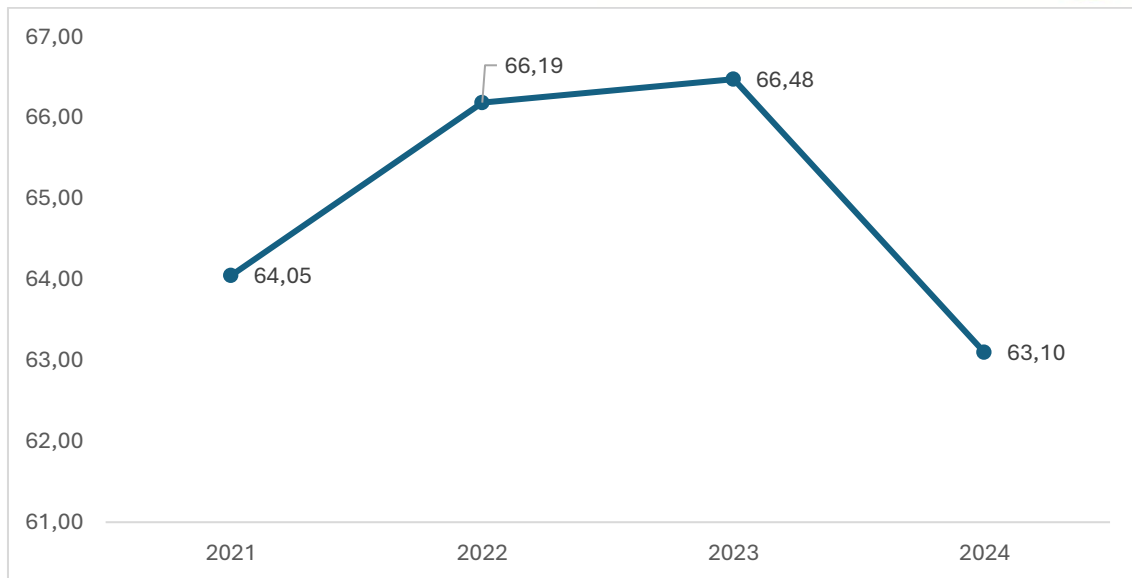
dalam penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan sebagaimana diindikasikan oleh angka indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dari data IKLH yang ada, terlihat bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup perlu diselaraskan dan disinkronisasikan serta terus ditingkatkan agar nilai IKLH mengalami peningkatan. Capaian IKLH pada tahun 2023 Kabupaten Bima sudah mencapai 66,48 yang berada pada kategori Sedang, sedangkan capaian Nasional pada tahun 2023 sebesar 72,54 dengan kategori Baik. Masih perlu upaya kerja keras pada semua kabupaten/kota karena pada dasarnya komponen IKLH pada indikator IKA, IKU dan IKL masih di bawah target.

Tabel 2.26.
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima

No	Indikator Bidang Urusan	Tahun Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	45,10	43,39	45,38	47,78
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	80,22	89,48	87,85	93,69
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	-	88,52	89,3	63,18	63,11
	IKLH Kabupaten Bima		64,05	66,19	66,48	63,10

Sumber : Sistem Informasi Statistik KLHK
- Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 98 Tahun 2024 tentang IKLH Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024
- IKPLHD Kabupaten Bima Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bima menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil dari tahun 2021 hingga 2023. Namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 63,10. Pada tahun 2021, nilai IKLH tercatat sebesar 64,05, kemudian meningkat menjadi 66,19 pada tahun 2022, dan terus bertambah sedikit menjadi 66,48 pada tahun 2023. Untuk indikator bidang urusan yang mendukung IKLH, Indeks Kualitas Air (IKA) cukup konsisten dengan nilai sekitar 45-45,38 dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan stabilitas kualitas air. Indeks Kualitas Udara (IKU) cenderung meningkat dari 80,22 di tahun 2021 ke puncaknya di 89,48 tahun 2022, kemudian sedikit menurun ke 87,85 tahun 2023, yang masih menunjukkan kualitas udara yang relatif baik. Sementara itu, Indeks Kualitas Lahan (IKL) mengalami penurunan signifikan dari 88,52 pada tahun 2021 menjadi 63,18 pada tahun 2023, menandakan adanya tantangan yang meningkat pada pengelolaan kualitas lahan. Secara Keseluruhan, Capaian IKLH pada tahun 2023 Kabupaten Bima sudah mencapai 66,48 yang berada pada kategori Sedang, sedangkan capaian Nasional pada tahun 2023 sebesar 72,54 dengan kategori Baik. Pada tahun 2024, capaian IKLH adalah 63,10 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Ini menunjukkan perlu perhatian khusus terhadap kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bima



Gambar 2.28.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima

Sumber: IKPLH Kabupaten Bima Tahun 2024

Nilai IKLH Kabupaten Bima tercatat sebesar 66,48, yang masuk dalam kategori **Sedang**. Kemudian jika dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan rata-rata Nasional, Kabupaten Bima masih berada di bawah kedua wilayah tersebut yang masing-masing memperoleh nilai IKLH 71,92 dan 72,54, keduanya masuk dalam kategori **Baik**. Dari segi indikator detail, Kabupaten Bima mencatat Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 45,38, yang lebih rendah dari nilai Provinsi NTB 47,78 dan Nasional 54,59. Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Bima 87,85 cukup dekat dengan Provinsi NTB 90,21 dan Nasional 88,67, menandakan kualitas udara yang relatif baik. Namun, untuk Indeks Kualitas Lahan (IKL), Kabupaten Bima hanya mencatat nilai 63,18, yang lebih rendah dibandingkan Provinsi NTB sebesar 66,60 dan Nasional sebesar 61,79. Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Bima masih berada di tingkat kategori **Sedang** dan belum mencapai performa **Baik** seperti provinsi dan nasional, hal ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, terutama dalam aspek kualitas air dan lahan, guna mengejar pencapaian setara atau lebih baik.

Tabel 2.27.

Perbandingan Nilai IKLH Kabupaten/Provinsi/Nasional Tahun 2023

No	Indikator Bidang Urusan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				Kategori
		IKA	IKU	IKL	IKLH	
1	IKLH Kabupaten Bima	45,38	87,85	63,18	66,48	Sedang
2	IKLH Provinsi Nusa Tenggara Barat	47,78	90,21	66,60	71,92	Baik
3	IKLH Nasional	54,59	88,67	61,79	72,54	Baik

Sumber: Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 98 Tahun 2024 tentang IKLH Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023

2.1.5.2. Ekoregion (Karakteristik Bentang Alam dan Tipe Vegetasi Alami)

1) Karakteristik Bentang Alam Kabupaten Bima

Karakteristik bentang Alam yang ada di Kabupaten Bima didominasi oleh Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik tersebar hampir di seluruh kabupaten dengan luas 121.998,91 Ha. Bentuk lahan ini mempunyai relief



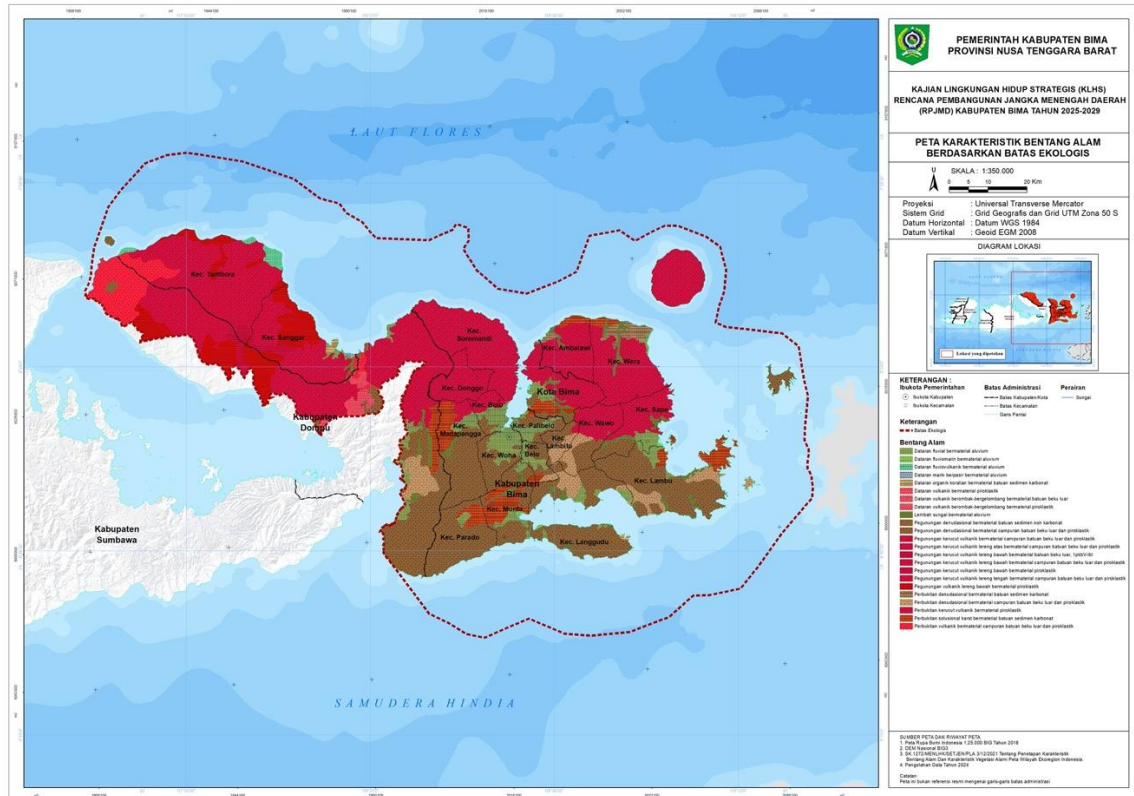
pegunungan (beda elevasi > 300 m) yang tersusun oleh perselingan batuan beku luar (aliran lava) dan piroklastik. Hal ini menunjukkan bahwa pegunungan ini awalnya merupakan kompleks gunungapi stratovulkano yang kemudian terhenti aktivitasnya. Selanjutnya proses denudasional (pelapukan, erosi, longsor) menjadi proses yang dominan terjadi di pegunungan ini yang akhirnya menghasilkan morfologi baru yang tidak meninggalkan lagi pola-pola bentuklahan asal proses vulkanik (di antaranya dicirikan oleh kerucut vulkanik).

Tabel 2.28.

Karakteristik Bentang Alam Kabupaten Bima

No	Bentang Alam	Kabupaten Bima	Kabupaten Dompu	Kota Bima	Pesisir 12 Mil	Jumlah
1	Pesisir 12 Mil				670.020,98	670.020,98
2	Dataran fluvial bermaterial aluvium	25.696,16	4073,27	1962,26		31.959,03
3	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	503,7	80,9			616,54
4	Dataran fluviiovulkanik bermaterial aluvium	2.892,81	0,51			2.916,37
5	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	249,93				256,39
6	Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat	1.028,43				1.042,06
7	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	13,4	1239,18			1.252,59
8	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik		3770,04			3.770,04
9	Lembah sungai bermaterial aluvium	8.574,50	2498,81	1396,92		12.523,26
10	Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat		711,99			711,99
11	Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	121.539,36	29817,5	1683,56		153.475,48
12	Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	73.257,92	47672,93	4916,73		125.893,30
13	Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3.420,18	1630,72	49,25		5.099,13
14	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial batuan beku luar	284,1				284,65
15	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	82.666,33	11752,18	6178,49		100.790,38
16	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	3.592,60	2256,05			5.849,55
17	Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	31.844,97	7072,48	2058,98		40.968,01
18	Pegunungan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	16.633,77	17399,64			34.110,67
19	Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat	4.392,35		130,29		4.533,93
20	Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	14.591,98	6.016,13			20.688,00
21	Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	940,4	161,24			1.101,89
22	Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	23.032,06	3.30,45	2.485,81		29.002,25
23	Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	5.731,14	17.447,72			23.183,45
Jumlah		420.886,09	153.931,74	20.862,29	670.020,98	1.261.219,07

Sumber: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 Tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam Dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000



Gambar 2.29.

Peta Batas Ekologis/ Batas Fungsional Berdasarkan Bentang Alam

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029

2) Karakteristik Vegetasi Alami Kabupaten Bima

Vegetasi yang ada di Kabupaten Bima didominasi oleh Vegetasi savana monsun pamah seluas 127.982,57 Ha. Vegetasi savana monsun pamah definisi operasionalnya adalah kelompok komunitas vegetasi yang berupa padang rumput atau semak pendek dengan pohon-pohon yang tumbuh terpencar dan jarang, tajuknya yang tidak saling bersentuhan yang tumbuh dan berkembang pada wilayah lahan kering yang beriklim monsun pada elevasi di bawah 1000 mdpl. Spesies yang mendominasi wilayah ini antara lain adalah rumput *Heteropogon contortus*. Pohon-pohon yang biasa tumbuh dan dominan di savana antara lain *Acacia leucophloea*, *Albizia chinensis*, *Borassus flabelifer*, *Casuarina junghuhniana*, *Corypha gebanga* dan *Schleichera oleosa*. Savana terdiri atas padang rumput dengan pohon terpencar jarang sampai lebat.

2.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bima telah dipetakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima 2011-2031. Wilayah Kabupaten Bima memiliki potensi terjadinya bencana seperti gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Bima memiliki 2 (dua) gunung api yang masih relatif aktif, yaitu Gunung Tambora (2.851 Mdpl) yang terletak di wilayah Kecamatan Tambora dan Sanggar, dan Gunung Sangiang (1.949 Mdpl) terletak di wilayah Kecamatan Wera. Kondisi ini menimbulkan potensi tinggi terjadinya bencana seperti letusan gunung berapi yang disertai banjir lahar dingin serta kebakaran hutan dan lahan. Kabupaten Bima juga sangat rentan terhadap gempa tektonik dan vulkanik.



Secara geologi, wilayah Kabupaten Bima termasuk daerah dengan aktivitas seismik yang tinggi, terutama karena keberadaan beberapa sesar aktif. Sesar-sesar ini tidak hanya berpotensi menyebabkan gempa, tetapi juga dapat memicu kegagalan struktur tanah yang menyebabkan likuefaksi, di mana tanah kehilangan kemampuan untuk menopang beban di atasnya. Banyak pemukiman dan aktivitas masyarakat yang berada di zona rawan gempa dan berisiko terhadap likuefaksi. Sesar-sesar utama di Kabupaten Bima meliputi Sesar Flores di wilayah selatan, Sesar Sape di sepanjang Selat Sape, Sesar Bima yang mencakup wilayah Woha, Palibelo, Belo, Monta, dan Bolo, serta Sesar Wawo di Kecamatan Wawo.

Disamping itu wilayah Kabupaten Bima terletak pada daerah pertemuan lempeng Mediterania dan Sirkum Pasifik. Disisi lain daya dukung lingkungan di Kabupaten Bima sebagai resapan air sudah mulai menurun/rusak yang diakibatkan oleh ulah dari oknum/masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Tingkat erosi tanah yang terjadi pada wilayah Kabupaten Bima relatif tinggi dan luas. Hal ini terjadi disamping kondisi geografis yang memang merupakan daerah kering juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran upaya pelestarian lingkungan dikalangan masyarakat setempat. Adapun lokasi yang potensi terjadinya bencana alam sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bima 2011-2031 dapat dilihat pada tabel berikut.

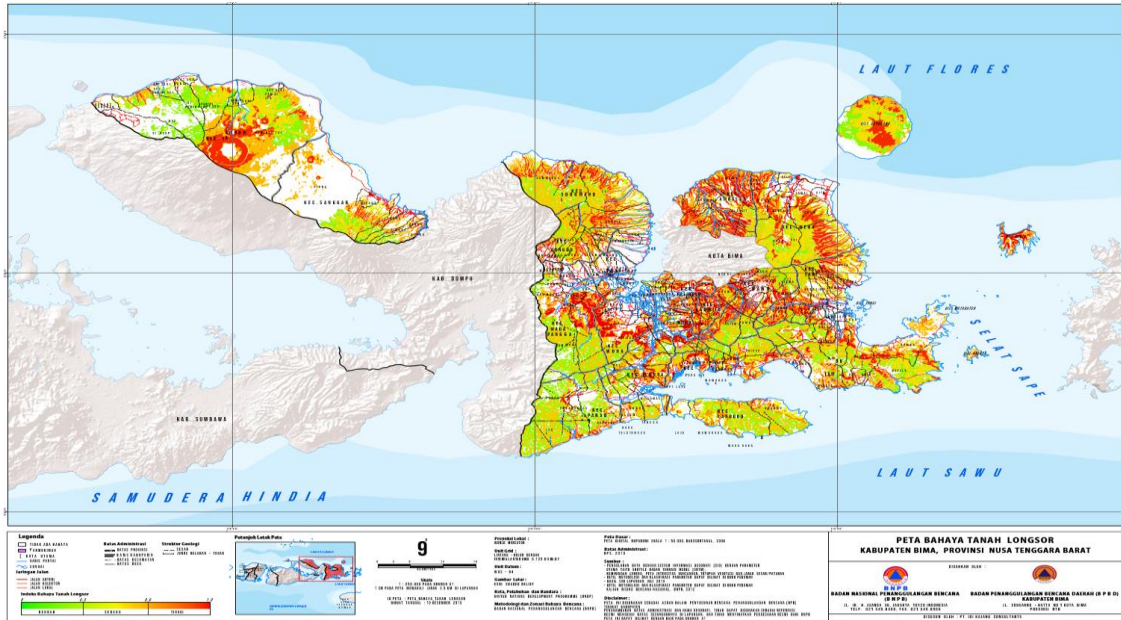
Tabel 2.29.
Lokasi Potensi Bencana Alam di Kabupaten Bima

No.	Kecamatan	Potensi Bencana
1.	Tambora	Gunung meletus, gempa bumi, Banjir dan abrasi
2.	Sanggar	Gunung meletus, gempa bumi, abrasi, dan banjir
3.	Woha	Abrasi, Banjir
4.	Wera	Gunung meletus, gempa bumi, Banjir dan abrasi
5.	Ambalawi	Gunung meletus, gempa bumi, Banjir dan abrasi
6.	Lambitu	Tanah Longsor, Banjir dan Gempa bumi
7.	Bolo	Gempa bumi, Banjir
8.	Soromandi	Banjir, Abrasi, Gempa bumi
9.	Donggo	Longgsor, Banjir, Gempa bumi
10.	Sape	Banjir dan Tanah Longsor
11.	Monta	Gempa bumi, Tanah Longsor dan Banjir
12.	Madapangga	Banjir, Gempa bumi
13.	Lambu	Banjir, Gempa bumi dan Tanah Longsor
14.	Wawo	Banjir, Tanah Longsor
15.	Belo	Gempa bumi, Banjir dan Tanah Longsor
16.	Langgudu	Gempa bumi, Banjir dan Tanah Longsor
17.	Palibelo	Banjir
18.	Parado	Banjir, Tanah Longsor

Sumber data: RTRW Kab. Bima 2011-2031

Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud meliputi:

- Kawasan rawan bencana angin topan meliputi Kecamatan Woha dsk, Monta dsk, Poja dsk, Wera dsk;
- Kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi kecamatan Kawasan sekitar Tambora bagian timur, Karumbu, dan Gunung kuta;

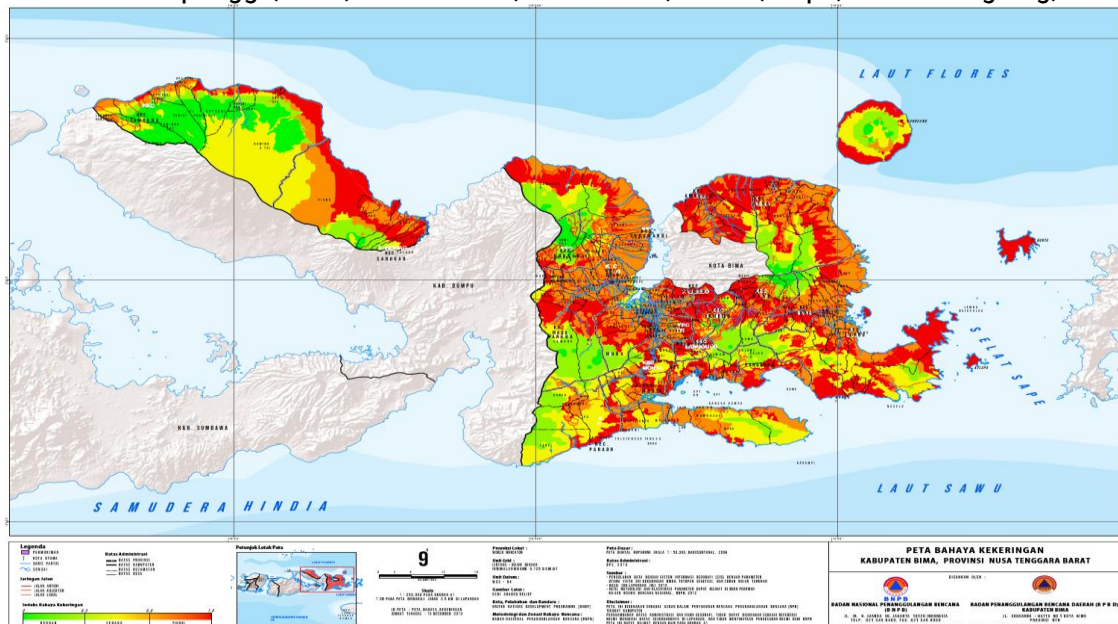


Gambar 2.30.

Peta Kawasan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bima

Sumber data: KRB BPBD dan INARISK BNPB

- c. Kawasan rawan bencana kekeringan meliputi kecamatan Tambora, Sanggar, Madapangga, Bolo; Paradowane, Paradorato, Tawali, Sape, dan P. Sangiang;

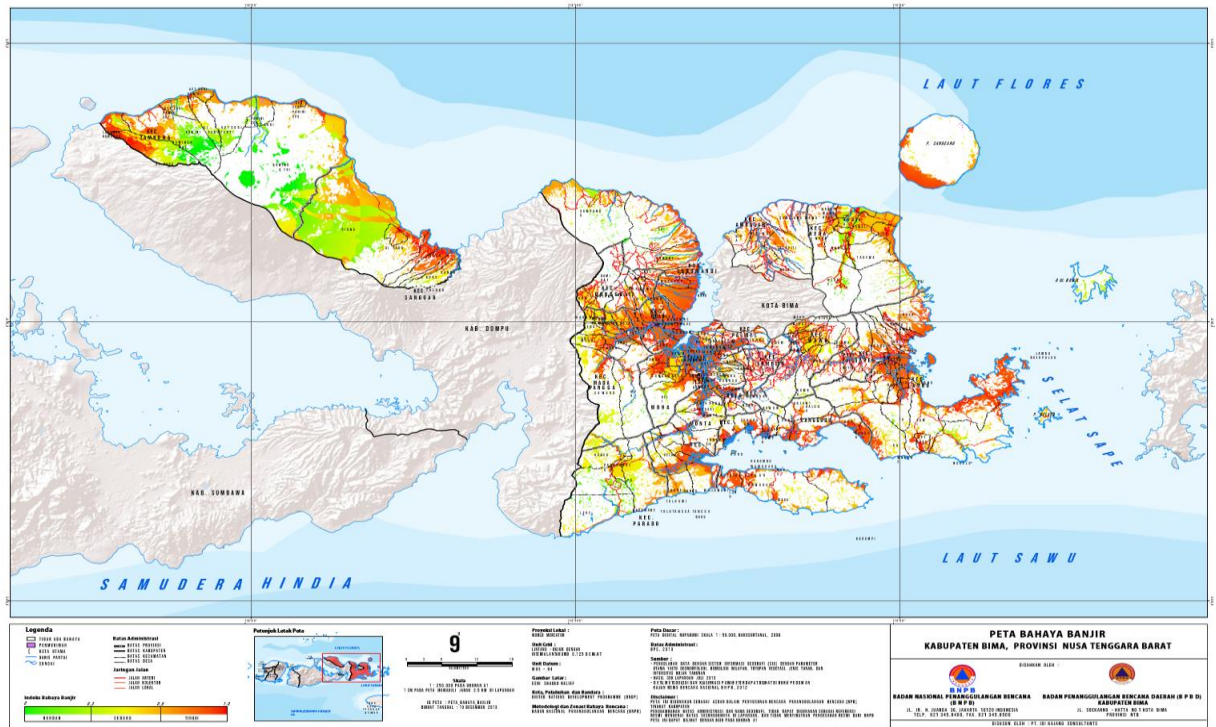


Gambar 2.31.

Peta Kawasan Bencana Kekeringan Kabupaten Bima

Sumber data: KRB BPBD dan INARISK BNPB

- d. Kawasan rawan bencana banjir meliputi Daerah di sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, Ntoketawali, Wera, Ambalawi, Palibelo, Parado, Campa dan Sori Lante-Bolo, Sori Nae Sampungu-Soromandi dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Bima, dapat dilihat pada gambar dibawah:

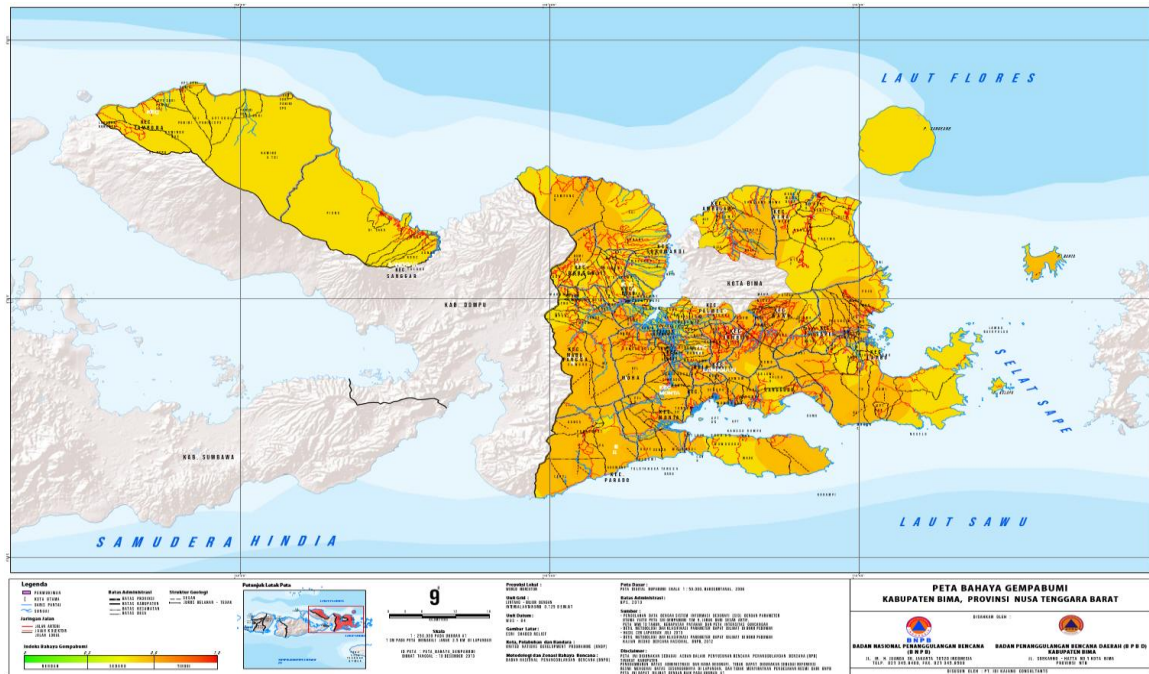


Gambar 2.32.

Peta Kawasan Bencana Banjir Kabupaten Bima

Sumber data: KRB BPBD dan INARISK BNPB

- e. kawasan rawan bencana gelombang pasang meliputi Pantai bagian utara dan timur Kabupaten Bima, yakni Soromandi dsk, Sape dan Lambu, Wera, Karumbu, Wohu, Bolo, Palibelo dan Parado;
- f. kawasan rawan tsunami meliputi Kawasan pesisir bagian timur dan selatan Kabupaten Bima, yakni Sape dan Lambu, Karumbu dan daerah sekitarnya;
- g. kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bima, zonasi kegempaan Kabupaten Bima termasuk gempa sedang dan rendah yakni Kecamatan Tambora, Kecamatan Sanggar, Kecamatan Wera; Kecamatan Langgudu, dan Kecamatan Soromandi, sedangkan untuk kawasan bencana Letusan Gunung Api meliputi Kecamatan Tambora, Kecamatan Sanggar dan Wera.



Gambar 2.33.

Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bima

Sumber: KRB BPBD dan INARISK BNPB

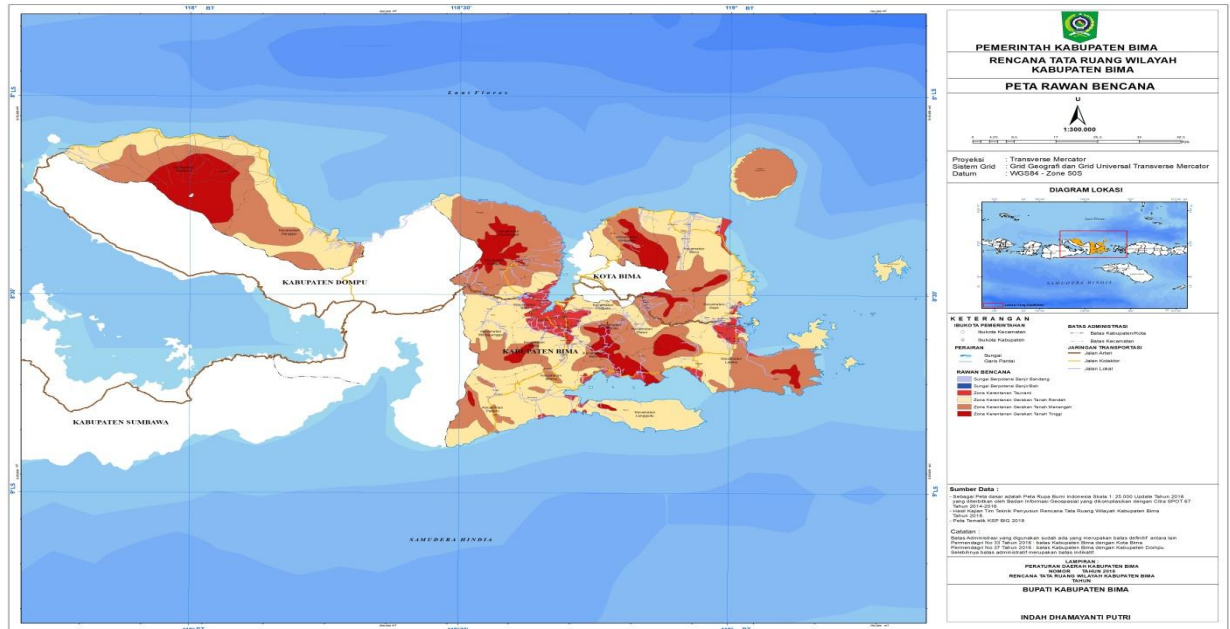


Gambar 2.34.

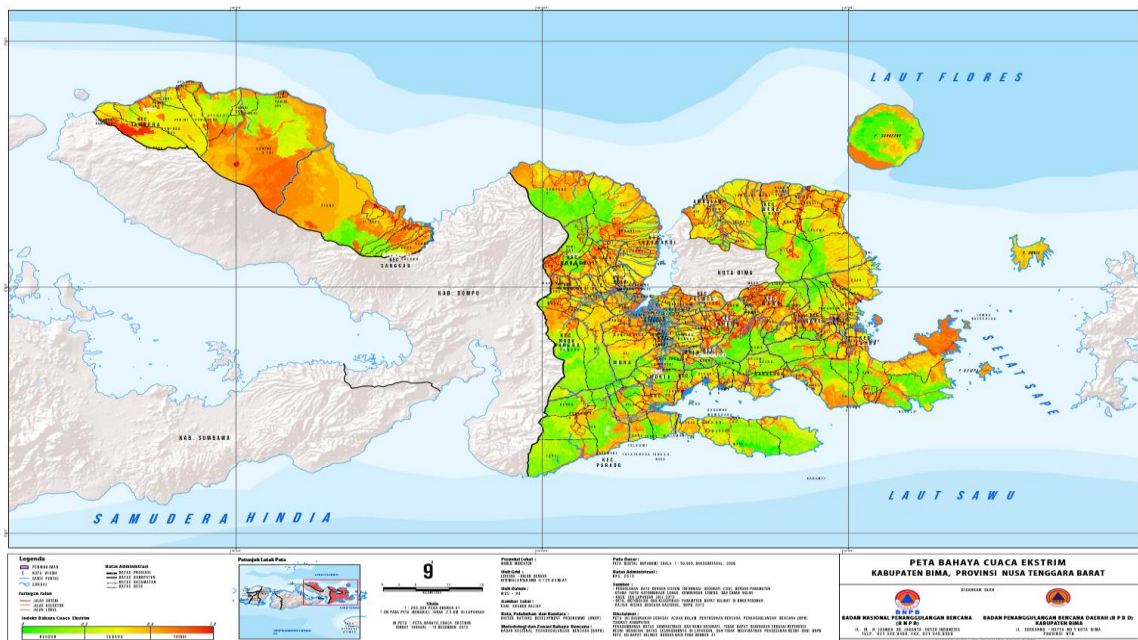
Peta Rawan Bencana Gunung Api Kabupaten Bima

Sumber: KRB BPBD dan INARISK BNPB

- h. kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk peta rawan bencana wilayah Kabupaten Bima dapat dilihat pada gambar 2.16 dan Cuaca Ekstrem dapat dilihat pada gambar 2.17:



Gambar 2.35.
Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bima
Sumber data: KRB BPBD dan INARISK BNPB



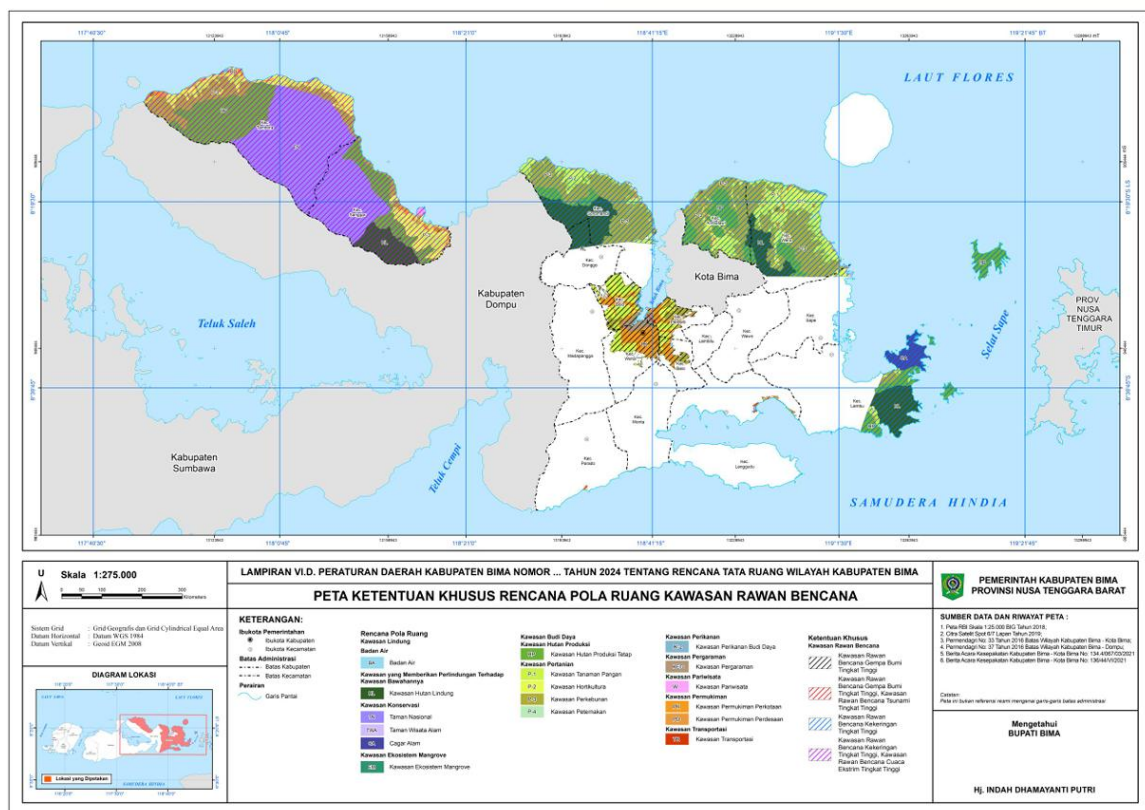
Gambar 2.36.
Peta Kawasan Cuaca Ekstrem Kabupaten Bima
Sumber data: KRB BPBD dan INARISK BNPB

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Bima merupakan peta tematik yang menggambarkan zonasi kawasan yang memiliki potensi risiko bencana alam tinggi dan perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan tata ruang wilayah. Peta ini memuat informasi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang berpotensi terkena berbagai jenis bencana, seperti bencana geologi, banjir, maupun bencana iklim lainnya yang berpengaruh pada resiliensi wilayah. Dengan adanya peta ini,



perencanaan pembangunan dan pengelolaan ruang dapat diarahkan untuk meminimalisir dampak bencana melalui pengaturan penggunaan lahan yang sesuai, penguatan infrastruktur, serta penerapan mitigasi risiko yang efektif.

Dalam peta tersebut, kawasan rawan bencana ditandai dengan warna dan pola khusus yang memudahkan identifikasi area yang memerlukan perlakuan khusus untuk peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Kawasan ini meliputi zona hutan lindung, taman nasional, cagar alam, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, serta kawasan permukiman yang harus dikenakan ketentuan peruntukan dan pengelolaan yang ketat demi meminimalisir risiko bencana. Peta ini menjadi alat penting bagi pemerintah daerah, perencana wilayah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi pembangunan berkelanjutan yang responsif terhadap tantangan bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Bima. Adapaun peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana Kabupaten Bima sebagai berikut.



Gambar 2.37.

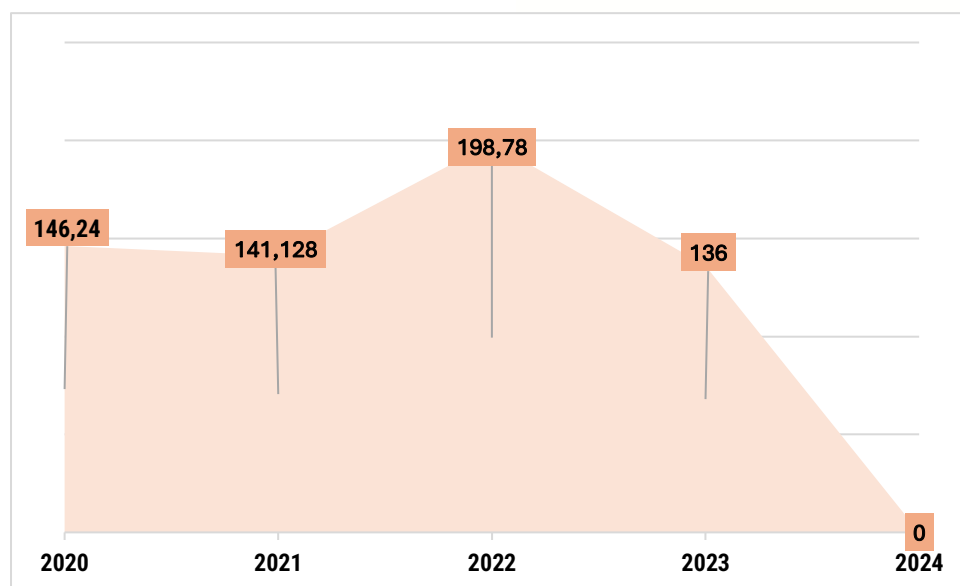
Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana

Sumber: Dokumen RAPERDA RTRW 2025-2044

Resiliensi Kabupaten Bima terhadap bencana dapat diukur dengan capaian Indeks risiko Bencana (IRB). Kabupaten Bima memiliki capaian IRB yang beragam dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 nilai indeks risiko bencana di Kabupaten Bima sebesar 146,24, nilai IRB Kabupaten Bima menurun pada tahun 2021 menjadi 141,128. IRB tertinggi di Kabupaten Bima terdapat pada tahun 2022 yaitu sebesar 198,78. Capaian nilai IRB terendah di Kabupaten Bima terdapat pada tahun 2023 yaitu sebesar 136. Nilai IRB Kabupaten Bima tahun 2024 belum di rilis, namun proyeksi pada tahun 2024 ditargetkan di



bawah nilai 136. Fluktuasi nilai IRB ini mencerminkan dinamika resiliensi Kabupaten Bima dalam menghadapi ancaman bencana. Meskipun terjadi penurunan awal pada tahun 2021, peningkatan yang signifikan di tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Bima mungkin mengalami peningkatan paparan terhadap bencana atau ketidakmampuan dalam mitigasi risiko. Namun, penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi sinyal positif, menunjukkan adanya upaya yang lebih efektif dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan infrastruktur untuk menghadapi bencana. Dengan demikian, analisis terhadap IRB Kabupaten Bima menunjukkan perlunya strategi yang berkelanjutan dalam mitigasi risiko bencana, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengembangan infrastruktur yang lebih tangguh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Kabupaten Bima tidak hanya mampu mengurangi nilai IRB, tetapi juga membangun ketahanan jangka panjang terhadap potensi bencana di masa depan.



Gambar 2.38.

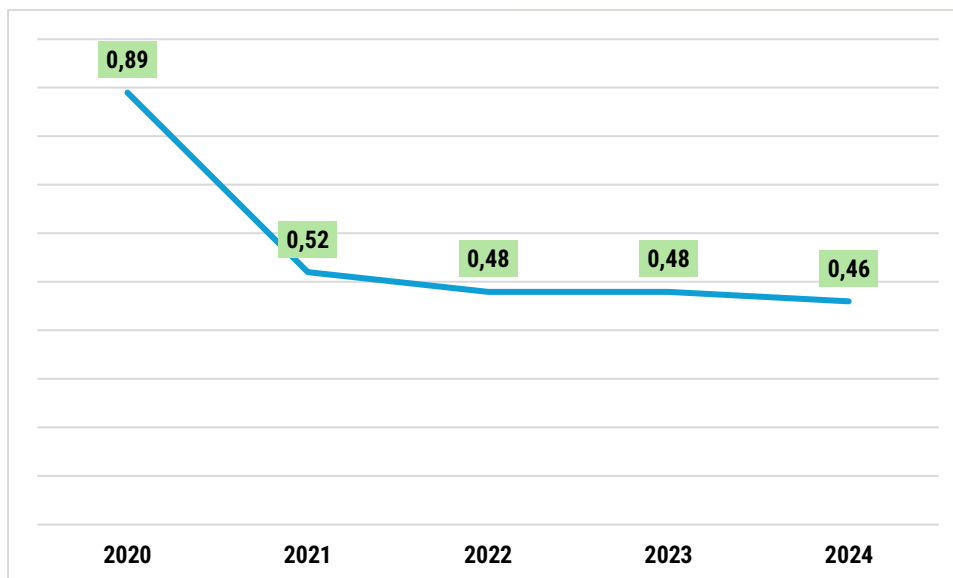
Indeks risiko Bencana Kabupaten Bima Tahun 2020-2024

Sumber: inarisk.bnpb.go.id.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan ukuran untuk mengetahui resiliensi Kabupaten Bima terhadap bencana dan perubahan iklim. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat untuk menilai kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi tantangan, seperti bencana dan krisis. IKD mencakup dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, dan tata kelola. Dimensi sosial menilai kualitas hidup dan partisipasi masyarakat, dimensi ekonomi mencakup stabilitas dan diversifikasi pendapatan. Dimensi lingkungan berfokus pada pengelolaan sumber daya, infrastruktur yang tangguh mendukung kesiapsiagaan, dan tata kelola yang baik memastikan respons yang efektif. Secara keseluruhan, IKD memberikan gambaran tentang seberapa siap suatu daerah dalam menghadapi ancaman dan tantangan yang ada. Nilai IKD tertinggi Kabupaten Bima terdapat pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,89. Nilai IKD Kabupaten Bima mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 0,52. Penurunan terhadap nilai IKD terjadi hingga tahun 2024 yaitu sebesar 0,46 yang menjadi nilai terendah sepanjang lima tahun terakhir. Penurunan nilai IKD Kabupaten Bima mengindikasikan adanya tantangan serius dalam aspek-aspek ketahanan



daerah. Penurunan nilai IKD dapat menunjukkan bahwa dimensi sosial dan ekonomi mungkin tidak berkembang dengan baik, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat serta stabilitas pendapatan. Selain itu, masalah dalam pengelolaan lingkungan dan infrastruktur yang tidak memadai dapat membatasi kesiapsiagaan terhadap bencana. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Bima untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam memperkuat ketahanan daerah, dengan fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan pengembangan infrastruktur yang tangguh.



Gambar 2.39.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaen Bima Tahun 2020-2024

Sumber: inarisk.bnppb.go.id.

2.1.7. Demografi

Demografi adalah bidang yang menelaah dinamika populasi manusia. Bidang ini meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat peristiwa kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan. Analisis kependudukan merujuk pada masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan pada kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. Data kependudukan tersedia dalam berbagai bentuk, seperti angka, grafik, atau gambar. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 1 poin 9, menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

1) Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bima dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 493.198 jiwa dengan rincian 244.401 laki-laki dan 255.422 perempuan, serta laju pertumbuhan sebesar 1,19%. Tahun 2021, jumlah penduduk meningkat menjadi 520.444 jiwa (262.323 laki-laki dan 258.121 perempuan) dengan laju pertumbuhan 1,65%.



Tahun 2022, penduduk bertambah menjadi 527.952 jiwa (266.540 laki-laki dan 261.412 perempuan) dengan laju pertumbuhan 1,44%. Tahun 2023, jumlah penduduk kembali naik menjadi 535.530 jiwa yang terdiri dari 269.048 laki-laki dan 266.482 perempuan, dengan laju pertumbuhan 1,49%. Terakhir, pada tahun 2024, penduduk Kabupaten Bima mencapai 543.582 jiwa, terdiri atas 272.459 laki-laki dan 271.123 perempuan, dan mempertahankan laju pertumbuhan sebesar 1,49%.

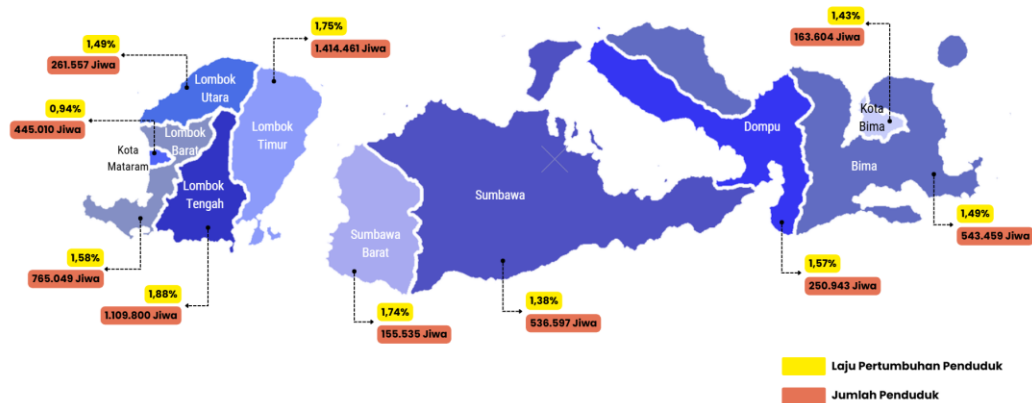
Secara umum, Kabupaten Bima mengalami pertumbuhan penduduk yang stabil dengan fluktuasi ringan pada laju pertumbuhan tahunan. Peningkatan penduduk dari tahun ke tahun ini menunjukkan adanya pertumbuhan alami yang stabil, yakni selisih antara angka kelahiran dan kematian, serta pengaruh migrasi. Laju pertumbuhan yang paling tinggi pada tahun 2021 dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas penduduk pascapandemi COVID-19, di mana aktivitas sosial dan ekonomi mulai pulih dan menyebabkan arus masuk penduduk ke Kabupaten Bima, terutama ke pusat kegiatan ekonomi seperti Kecamatan Woha dan Bolo.

Tabel 2.30.
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laju Pertumbuhan (%)
2020	244.401	255.422,0	493.198	1,19
2021	262.323	258.121,0	520.444	1,65
2022	266.540	261.412,0	527.952	1,44
2023	269.048	266.482,0	535.530	1,49
2024	272.459	271.123	543.582	1,49

Sumber: BPS Kab Bima, 2025

Peta sebaran jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2024 menunjukkan adanya variasi yang signifikan antar kabupaten di wilayah tersebut. Kabupaten Bima memiliki jumlah penduduk sebanyak 543.459 jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,49%. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain, jumlah penduduk Kabupaten Bima lebih besar daripada Kabupaten Dompu yang berjumlah 250.943 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,57%, serta Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki 155.535 jiwa dengan pertumbuhan 1,74%. Namun demikian, jumlah penduduk Kabupaten Bima masih lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Lombok Tengah yang mencapai 1.109.800 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 1,88%, serta Kabupaten Lombok Timur yang memiliki 1.414.461 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,75%. Secara umum, kabupaten-kabupaten di Pulau Lombok memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dan laju pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten di Pulau Sumbawa dan Bima. Hal ini mencerminkan perbedaan yang signifikan dalam kepadatan dan dinamika demografis antar wilayah. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bima yang sebesar 1,49% menunjukkan tingkat pertumbuhan yang moderat dan relatif stabil bila dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain, seperti Lombok Tengah dan Lombok Timur, yang memiliki laju pertumbuhan lebih tinggi.



Gambar 2.40.

Peta sebaran jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Provinsi NTB tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik diolah

2) Sebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Sebaran penduduk di Kabupaten Bima pada tahun 2024 menunjukkan adanya konsentrasi yang signifikan di beberapa kecamatan, sementara wilayah lain mempertahankan kepadatan yang lebih rendah. Pola distribusi ini mencerminkan dinamika pembangunan dan preferensi hunian masyarakat. Kecamatan Bolo, Woha, dan Belo merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi. Pada tahun 2023, Kecamatan Bolo memiliki kepadatan sebesar 798,48 jiwa per kilometer persegi dan meningkat menjadi 810,95 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024. Hal serupa terjadi di Kecamatan Woha yang padat karena menjadi pusat administrasi kabupaten, dengan kepadatan naik dari 503,42 menjadi 505,90 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Belo mengalami peningkatan dari 629,36 menjadi 651,50 jiwa per kilometer persegi, menjadikannya salah satu kawasan paling padat di wilayah tersebut.

Kecamatan seperti Tambora dan Sanggar memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah. Kecamatan Tambora misalnya, hanya memiliki 14,60 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2023 dan bahkan menurun menjadi 14,16 jiwa per kilometer persegi di tahun 2024. Pola serupa juga terlihat di Kecamatan Sanggar dengan kepadatan naik sedikit dari 30,19 menjadi 31,32 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Bima secara keseluruhan naik dari 122,02 pada tahun 2023 menjadi 123,85 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024.

Tabel 2.31.

Sebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas / Area (Km ²)	Penduduk					
			Jumlah		%		Kepadatan	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Monta	228	40,84	41,79	7,74	7,69	179,13	183,68
2	Parado	261	11,13	11,26	2,11	2,07	42,62	43,08
3	Bolo	67	53,5	54,28	10,14	9,99	798,48	810,95
4	Madapangga	238	32,67	33,01	6,19	6,07	137,26	138,93
5	Woha	106	53,36	53,41	10,11	9,83	503,42	505,9



No.	Kecamatan	Luas / Area (Km ²)	Penduduk					
			Jumlah		%		Kepadatan	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
6	Belo	45	28,32	29,16	5,37	5,36	629,36	651,5
7	Palibelo	72	29	30,61	5,5	5,63	402,82	427,63
8	Wawo	132	19,62	20	3,72	3,68	148,64	151,16
9	Langgudu	323	33,08	32,94	6,27	6,06	102,41	102
10	Lambitu	65	6,47	6,8	1,23	1,25	99,51	103,99
11	Sape	232	63,38	64,16	12,01	11,8	273,2	276,39
12	Lambu	404	43,82	43,51	8,3	8	108,47	107,63
13	Wera	465	33,82	34,75	6,41	6,39	72,73	74,67
14	Ambalawi	181	21,92	22,14	4,15	4,07	121,08	122,56
15	Donggo	124	20,95	21,11	3,97	3,88	168,92	170,51
16	Soromandi	342	20,06	20,81	3,8	3,83	58,64	60,91
17	Sanggar	478	14,43	14,97	2,73	2,75	30,19	31,32
18	Tambora	628	9,17	8,89	1,74	1,63	14,6	14,16
Jumlah		4.389	527,66	543,58	100	100	122,02	123,85

Sumber: BPS Kabupaten Bima, 2025

Pola sebaran dan tingkat kepadatan Kabupaten Bima menunjukkan bahwa penduduk cenderung terkonsentrasi di wilayah dengan infrastruktur yang memadai, akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik, serta aktivitas ekonomi yang tinggi. Sebaliknya, wilayah dengan topografi sulit dijangkau, seperti daerah pegunungan dan kawasan konservasi, cenderung memiliki kepadatan yang rendah. Fenomena ini mencerminkan adanya disparitas wilayah yang cukup tajam dan memerlukan kebijakan pemerataan pembangunan antar kecamatan.

3) Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bima juga menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk dalam kelompok usia ini mencapai 354.020 jiwa. Angka ini terus meningkat menjadi 359.948 jiwa pada tahun 2021, dan naik lagi menjadi 365.449 jiwa pada tahun 2022. Peningkatan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2023, yaitu menjadi 398.268 jiwa, dan kembali bertambah menjadi 404.713 jiwa pada tahun 2024. Dari total penduduk usia 15 tahun ke atas tersebut, mayoritas tergolong sebagai angkatan kerja. Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 255.842 jiwa dan terus meningkat setiap tahun hingga mencapai 315.680 jiwa pada tahun 2024. Sebagian besar dari mereka bekerja, yakni sebanyak 308.752 jiwa pada tahun 2024, sementara sisanya sebanyak 6.928 jiwa merupakan pengangguran terbuka. Sementara itu, penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, kelompok ini berjumlah 98.178 jiwa dan menurun menjadi 89.033 jiwa pada tahun 2024. Dari kelompok bukan angkatan kerja tersebut, yang paling dominan adalah ibu rumah tangga, disusul oleh pelajar dan lainnya.

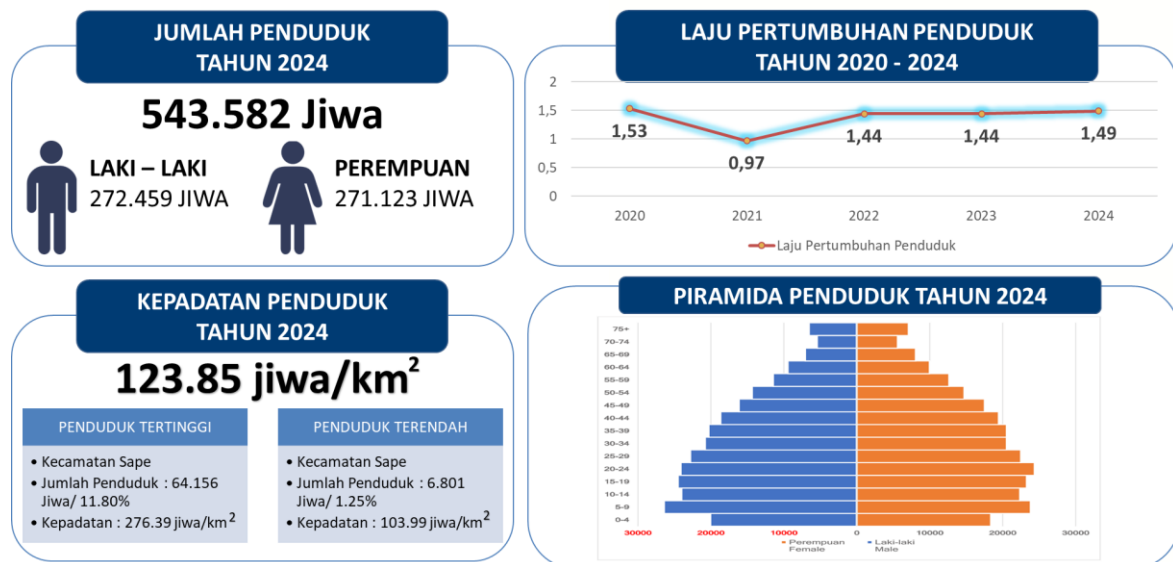


Tabel 2.32.
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Bima Tahun 2020-2024

No.	Kegiatan Utama	Jumlah Penduduk				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja		255.842	257.896	267.860	299.933	315.680
1	Bekerja	248.447	253.817	261.761	293.494	308.752
2	Pengangguran Terbuka	7.395	4.079	6.099	6.439	6.928
Bukan Angkatan Kerja		98.178	102.052	97.589	98.335	89.033
1	Sekolah	17.206	15.188	22.830	21.921	20.638
2	Mengurus Rumah Tangga	63.875	67.203	55.266	57.384	51.732
3	Lainnya	17.097	19.661	19.493	19.030	16.663
Total		354.020	359.948	365.449	398.268	404.713

Sumber: BPS Kabupaten Bima, 2025

Peningkatan jumlah angkatan kerja menunjukkan adanya dinamika ekonomi yang cukup aktif di Kabupaten Bima, baik di sektor formal maupun informal. Lonjakan pada tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pascapandemi, serta bertambahnya lapangan kerja di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan jasa.



Gambar 2.41.
Gambaran Demografi Kabupaten Bima
Sumber: BPS Kabupaten Bima Tahun 2025, di olah

Berdasarkan gambar diatas Kabupaten Bima pada tahun 2024 memiliki jumlah penduduk sebesar 543.582 jiwa, dengan komposisi hampir seimbang antara laki-laki sebanyak 272.459 jiwa dan perempuan sebanyak 271.123 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi dengan nilai rerata sekitar 1,49% pada tahun 2024, yang menunjukkan peningkatan penduduk yang relatif stabil. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bima mencapai 123,85 jiwa per km², dengan Kecamatan Sape tercatat memiliki kepadatan tertinggi yaitu 276,39 jiwa/km² dengan jumlah penduduk 64.156



jiwa (11,80% dari total penduduk), sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Sape dengan angka kepadatan 103,99 jiwa/km² dan jumlah penduduk hanya 6.801 jiwa (1,25%). Piramida penduduk 2024 menunjukkan distribusi usia yang khas dengan proporsi penduduk muda dan produktif yang besar, yang mengindikasikan potensi tenaga kerja serta kebutuhan layanan sosial dan ekonomi yang harus diperhatikan dalam pembangunan daerah.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah dalam upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: 1) aspek kesejahteraan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; 2) aspek kesejahteraan fokus kesejahteraan sosial; dan 3) aspek kesejahteraan fokus seni budaya dan olahraga. Kinerja pada masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima adalah sebagai berikut:

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Angka perkembangan ekonomi memperlihatkan kemampuan suatu daerah secara nominal dalam memproduksi karena dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi) dan perubahan jumlah produksi (*output*). Angka pertumbuhan ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah secara riil dalam memproduksi karena hanya dipengaruhi oleh perubahan output tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga. Namun pada dasarnya baik angka perkembangan maupun angka pertumbuhan. Keduanya sama-sama menunjukkan kondisi perubahan.

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah (*value added*) barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah dalam Tahun tertentu atau periode tertentu. Dengan kata lain, PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya guna menciptakan nilai tambah bagi masing-masing sektor perekonomian. Penghitungan PDRB menggunakan dua jenis harga yaitu PDRB atas dasar harga berlaku yang digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi dan PDRB atas dasar harga konstan yang dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari Tahun ke Tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

Tabel 2.33.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (miliar rupiah) Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.167,09	5.334,84	5.632,38	6.261,63	6.559,73
B	Pertambangan dan Penggalian	338,99	348,27	350,9	384,48	402,57
C	Industri Pengolahan	236,15	240,81	252,47	276,31	301,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,33	6,74	7,4	7,63	7,98



Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah, dan Daur Ulang	5,7	5,79	6,18	6,37	6,55
F	Konstruksi	659,6	720,99	728,55	808,96	834,95
G	Perdagangan Besar, dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	1.892,48	1.945,01	2.131,86	2.331,29	2.510,11
H	Transportasi dan Pergudangan	634,53	653,8	827,29	921,52	984,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38,35	39,1	48,97	53,22	57,47
J	Informasi dan Komunikasi	156,56	164,39	172,36	185,41	194,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	423,66	482,83	527,88	558,43	580,59
L	<i>Real Estate</i>	315,92	321,08	342,27	359,83	380,3
M,N	Jasa Perusahaan	10,57	10,68	11,87	13,17	14,14
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	821,91	857,06	917,99	932,76	1019,26
P	Jasa Pendidikan	434,64	449,68	480,16	523,51	557,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115,83	123,54	127,63	137,77	147,21
R,S,T,U	Jasa Lainnya	147,36	152,67	168,86	184,37	198,92
Produk Domestik Regional Bruto		11.405,66	11.857,28	12.735,03	13.946,66	14.756,77

Sumber data : BPS Kabupaten Bima, 2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bima berdasarkan harga berlaku menunjukkan tren peningkatan yang stabil tiap tahunnya dari 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, total PDRB mencatat sekitar 11.405,66 miliar rupiah dan meningkat menjadi 14.756,77 miliar rupiah pada 2024. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (Kategori A) menjadi kontributor utama dengan nilai dari 5.167,09 miliar rupiah pada 2020 naik menjadi 6.559,73 miliar rupiah di tahun 2024, mencerminkan pentingnya sektor ini dalam perekonomian Kabupaten Bima. Sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor (Kategori G) juga menunjukkan pertumbuhan signifikan dari 1.892,48 miliar rupiah di 2020 menjadi 2.510,11 miliar rupiah di 2024. Begitu pula sektor jasa keuangan dan asuransi (Kategori K) dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (Kategori O) yang meningkat konsisten sepanjang periode tersebut, menandakan dinamika ekonomi yang semakin beragam dan berkembang. Sementara itu, sektor industri pengolahan (Kategori C) juga mengalami peningkatan dari 236,15 miliar rupiah menjadi 301,15 miliar rupiah, memperlihatkan pengembangan manufaktur lokal. Secara keseluruhan, data PDRB ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima yang positif dengan dominasi sektor primer dan peningkatan sektor sekunder serta tersier yang memadai selama periode 2020 hingga 2024. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kontributor terbesar PDRB ADHB Kabupaten Bima pada tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Bima memiliki aktivitas ekonomi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lapangan usaha terbesar kedua adalah perdagangan besar, dan eceran; reparasi mobil; dan sepeda motor. Lapangan usaha terbesar ketiga adalah administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib.



Tabel 2.34.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (miliar rupiah) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha / Industri	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,661.53	3,702.26	3,772.53	3,872.16	3,900.13
B. Pertambangan dan Penggalian	253.71	257.12	246.97	257.62	263.14
C. Industri Pengolahan	194.15	196.84	201.05	206.60	214.98
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6.10	6.58	7.16	7.31	7.63
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3.69	3.69	3.73	3.73	3.80
F. Konstruksi	482.02	510.44	488.55	530.71	543.95
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,282.07	1,297.32	1,347.29	1,423.47	1,507.75
H. Transportasi dan Pergudangan	427.17	428.94	504.23	538.08	553.05
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23.15	23.29	28.00	29.69	31.35
J. Informasi dan Komunikasi	140.51	146.32	150.62	158.58	165.38
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	291.54	313.92	315.29	326.67	336.05
L. Real Estat	214.44	216.87	227.64	236.04	246.31
M,N. Jasa Perusahaan	7.39	7.4	7.87	8.46	8.91
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	461.43	471.1	487.65	487.17	523.86
P. Jasa Pendidikan	296.15	299.57	310.19	325.6	337.28
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89.06	93.36	95.35	101.41	107.08
R,S,T,U. Jasa Lainnya	109.53	110.67	120.22	127.62	133.57
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	7,943.64	8,085.70	8,314.35	8,640.92	8,884.21

Sumber data : BPS Kabupaten Bima, 2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bima atas dasar harga konstan menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, nilai PDRB meningkat dari sebesar 3.661,53 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 3.900,13 miliar rupiah pada tahun 2024. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami fluktuasi tetapi menunjukkan tren kenaikan dengan nilai mencapai 263,14 miliar rupiah pada tahun 2024. Industri pengolahan juga mengalami pertumbuhan stabil, mulai dari 194,15 miliar rupiah di tahun 2020 menjadi 214,98 miliar rupiah pada 2024. Sektor pengadaan listrik dan gas serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang mencatat peningkatan akhir yang relatif kecil namun konsisten. Sektor konstruksi mengalami pertumbuhan yang signifikan dari 482,02 miliar rupiah di tahun 2020 menjadi 543,95 miliar rupiah di tahun 2024. Perdagangan besar dan eceran turut mengalami peningkatan dari 1.282,07 miliar rupiah pada 2020 mencapai 1.507,75 miliar rupiah pada 2024.

Sektor transportasi dan pergudangan juga menunjukkan kenaikan yang terus menerus dari 427,17 miliar rupiah menjadi 553,05 miliar rupiah selama periode tersebut. Penyediaan akomodasi dan makan minum serta informasi dan komunikasi masing-masing menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun pada skala yang relatif lebih kecil dibandingkan sektor lainnya. Di bidang jasa keuangan dan asuransi serta real estat, terdapat peningkatan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib juga menunjukkan tren naik yang positif. Sektor jasa pendidikan, jasa kesehatan, kegiatan sosial, dan jasa lainnya turut berkontribusi terhadap pertumbuhan PDRB secara keseluruhan. Secara keseluruhan, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bima meningkat dari 7.943,64 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 8.884,21 miliar rupiah pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan di berbagai sektor lapangan usaha di daerah tersebut.



Tabel 2.35.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (persen) Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	45,3	44,98	44,23	44,9	44,45
B	Pertambangan dan Penggalan	2,97	2,93	2,76	2,76	2,73
C	Industri Pengolahan	2,07	2,03	1,98	1,98	2,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah, dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
F	Konstruksi	5,78	6,08	5,72	5,8	5,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,59	16,4	16,74	16,72	17,01
H	Transportasi dan Pergudangan	5,56	5,51	6,5	6,61	6,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,33	0,38	0,38	0,39
J	Informasi dan Komunikasi	1,37	1,39	1,35	1,33	1,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,71	4,07	4,15	4	3,93
L	Real Estate	2,77	2,71	2,69	2,58	2,58
M,N	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,21	7,23	7,21	6,69	6,91
P	Jasa Pendidikan	3,81	3,79	3,77	3,75	3,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,04	1	0,99	1
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,29	1,29	1,33	1,32	1,35
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber data : BPS Kabupaten Bima, 2025

Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap struktur ekonomi Kabupaten Bima. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang 45,3 persen dari total PDRB dan meskipun proporsinya sedikit menurun, masih mencatatkan 44,45 persen pada tahun 2024. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran juga stabil, bahkan mengalami peningkatan dari 16,59 persen pada tahun 2020 menjadi 17,01 persen pada tahun 2024. Sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan pergeseran positif, dengan kontribusi meningkat dari 5,56 persen menjadi 6,67 persen, menandakan meningkatnya peran distribusi dan konektivitas logistik dalam perekonomian daerah. Sebaliknya, sektor administrasi pemerintahan mengalami penurunan proporsi dari 7,21 persen pada 2020 menjadi 6,91 persen pada 2024, menandakan meningkatnya peran sektor swasta dalam PDRB. Pergeseran komposisi ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Bima perlahan-lahan mengalami transformasi menuju ekonomi berbasis jasa dan perdagangan. Penurunan dominasi sektor primer dan peningkatan sektor tersier mencerminkan diversifikasi ekonomi yang terjadi akibat pertumbuhan UMKM, peningkatan konsumsi rumah tangga, serta pengembangan sektor jasa, informasi, dan logistik yang didorong oleh kebijakan daerah.

Tabel 2.36.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (persen) Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,47	1,11	1,9	2,64	0,72
B	Pertambangan dan Penggalan	-7,99	1,35	-3,88	4,31	2,14
C	Industri Pengolahan	0,33	1,39	2,14	2,76	4,06



Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,24	7,86	8,8	2,16	4,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,18	0,08	1,05	-0,16	2
F	Konstruksi	-16,02	5,9	-4,29	8,63	2,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,71	1,19	3,85	5,65	5,92
H	Transportasi dan Pergudangan	-31,18	0,41	17,55	6,71	2,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,72	0,62	20,23	6,03	5,58
J	Informasi dan Komunikasi	11,83	4,13	2,94	5,29	4,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	16,26	7,68	0,44	3,61	2,87
L	Real Estate	1,79	1,14	4,96	3,69	4,35
M,N	Jasa Perusahaan	-0,49	0,18	6,33	7,49	5,26
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,88	2,1	3,51	-0,1	7,53
P	Jasa Pendidikan	0,87	1,15	3,55	4,97	3,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,35	4,82	2,13	6,36	5,59
R, S, T, U	Jasa Lainnya	-1,19	1,04	8,63	6,15	4,66
Produk Domestik Regional Bruto		-3,53	1,79	2,83	3,93	2,82

Sumber data: BPS Kabupaten Bima, 2025

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Bima mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional dan global, khususnya terjadinya pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, pertumbuhan PDRB mengalami kontraksi sebesar -3,53 persen, mencerminkan dampak signifikan dari pembatasan aktivitas ekonomi. Namun, pada tahun 2021 terjadi *rebound* sebesar 1,79 persen, yang terus meningkat menjadi 2,83 persen pada 2022 dan mencapai 3,93 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, pertumbuhan stabil di angka 2,82 persen. Sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi terdalam pada tahun 2020 sebesar -31,18 persen, namun mampu bangkit dan tumbuh sebesar 17,55 persen pada 2022. Sektor perdagangan juga mengalami pemulihan kuat sejak tahun 2021 dengan pertumbuhan konsisten di atas 3 persen. Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi tumbuh stabil, mencerminkan transformasi digital yang menguat. Beberapa sektor seperti konstruksi dan pengadaan air mengalami pertumbuhan yang moderat namun stabil. Pemulihan ekonomi yang terjadi dipicu oleh pelonggaran pembatasan sosial, program vaksinasi massal, peningkatan belanja pemerintah, dan penguatan konsumsi masyarakat. Sektor-sektor yang sebelumnya terdampak seperti akomodasi, perdagangan, dan transportasi kembali menunjukkan daya tumbuh yang signifikan berkat penyesuaian adaptif terhadap kondisi normal baru dan pemanfaatan digitalisasi ekonomi. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Bima tahun 2020-2024, bahwa laju pertumbuhan PDRB ADHK mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan PDRB ADHK sebesar -3,53 dan mengalami peningkatan menjadi 2,82 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi di berbagai lapangan usaha Kabupaten Bima.

2.2.1.2. Tingkat Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan Merupakan agenda penting dalam pembangunan Nasional ataupun Daerah. Untuk itu langkah strategis percepatan penanggulangan kemiskinan perlu direncanakan dan ditindak lanjuti secara bersama-sama. Persentase penduduk miskin menjadi indikator penting dalam mengukur capaian pembangunan



kesejahteraan. Tabel perbandingan antar kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari tahun 2020 hingga 2024 menggambarkan sejauh mana kemajuan daerah dalam menurunkan kemiskinan.

Tabel 2.37.
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Bima	14,49	14,88	14,5	14,39	13,88
2	Kabupaten Lombok Barat	14,28	14,47	13,39	13,67	12,07
3	Kabupaten Lombok Tengah	13,44	13,44	12,89	12,93	14,51
4	Kabupaten Lombok Timur	15,24	15,38	15,14	15,63	12,87
5	Kabupaten Sumbawa	13,65	13,91	13,5	13,91	11,59
6	Kabupaten Dompu	12,16	12,6	12,4	12,62	13,88
7	Kabupaten Sumbawa Barat	13,34	13,54	13,02	12,95	12,23
8	Kabupaten Lombok Utara	26,99	27,04	25,93	25,8	23,96
9	Kota Mataram	8,47	8,65	8,63	8,62	8
10	Kota Bima	8,35	8,88	8,8	8,67	8,12
11	Nusa Tenggara Barat	13,97	14,14	13,68	13,85	12,91

Sumber data: BPS Kabupaten Bima 2025

Angka kemiskinan di Kabupaten Bima selama periode 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi, namun menunjukkan tren penurunan secara keseluruhan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 71.320 jiwa atau sebesar 14,49% dari total penduduk. Jumlah ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 75.490 jiwa dengan persentase 14,88%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2022, angka kemiskinan mulai menurun menjadi 74.460 jiwa atau 14,50%, dan tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah 74.740 jiwa dan persentase 14,39%. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah penduduk miskin turun menjadi 72.920 jiwa atau setara dengan 13,88%. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi daerah serta kemungkinan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah. Kondisi kemiskinan Kabupaten Bima memiliki tren yang menurun sejak tahun 2020 sampai tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya komitmen serta berbagai program dan kegiatan yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Bima perlu untuk lebih meningkatkan berbagai upaya serta inovasi untuk mempercepat penurunan persentase kemiskinan.

Tabel 2.38.
Angka Kemiskinan Kabupaten Bima Tahun 2020-2024

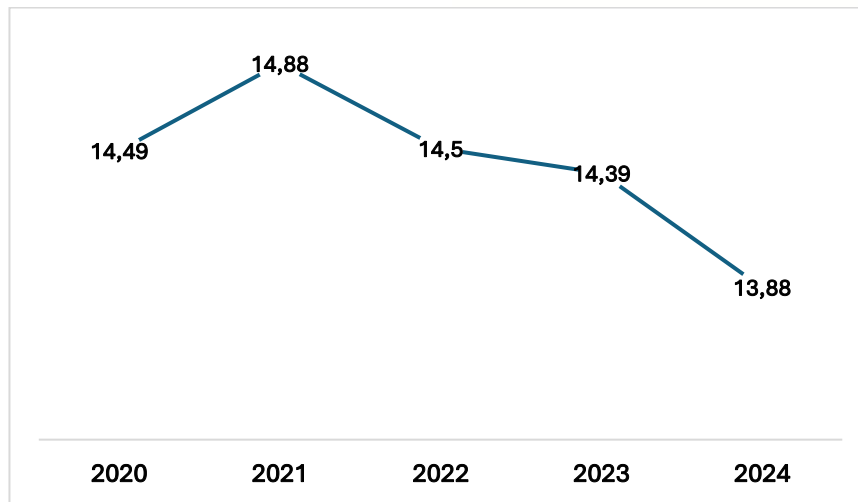
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	71.320	75.490	74.460	74.740	72.920
% Penduduk Miskin	14.49	14.88	14,50	14,39	13,88

Sumber: BPS Kabupaten Bima, 2025

Tren tingkat kemiskinan di Kabupaten Bima selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang sempat meningkat, namun kemudian mengalami penurunan secara konsisten. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan berada di angka 14,49%, lalu meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 14,88%, yang merupakan angka tertinggi selama periode lima tahun tersebut. Kenaikan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak sosial-



ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi kesejahteraan masyarakat. Namun, sejak tahun 2022 tren kemiskinan mulai membaik. Persentase penduduk miskin menurun menjadi 14,50%, kemudian turun sedikit lagi pada tahun 2023 menjadi 14,39%. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana angka kemiskinan menurun ke 13,88%, menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. Grafik ini menunjukkan bahwa setelah puncak kemiskinan di tahun 2021, Kabupaten Bima berhasil menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan, mencerminkan mulai pulihnya kondisi ekonomi serta membaiknya efektivitas program penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.



Gambar 2.42.

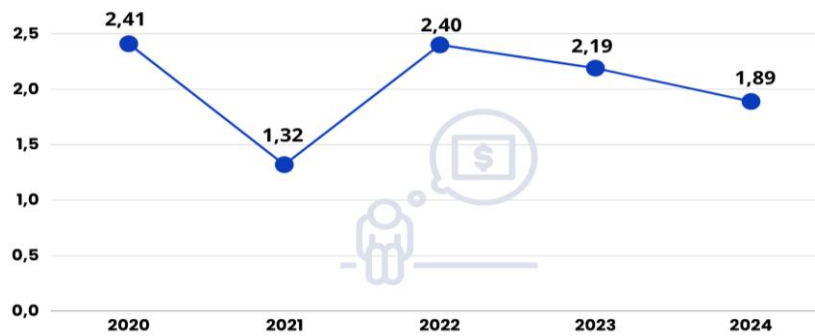
Tren tingkat kemiskinan di Kabupaten Bima Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, diolah

1) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan untuk mencerminkan intensitas kemiskinan. Pada tahun 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bima tercatat sebesar 2,41. Indeks ini kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 1,32. Namun, pada tahun 2022, indeks ini kembali meningkat menjadi 2,40, mendekati angka tahun 2020. Selanjutnya, Indeks Kedalaman Kemiskinan kembali menunjukkan tren penurunan pada tahun 2023 menjadi 2,19 dan terus menurun hingga 1,89 pada tahun 2024.

Penurunan signifikan pada tahun 2021 disebabkan oleh adanya upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang mulai memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat miskin. Peningkatan kembali pada tahun 2022 dapat mengindikasikan adanya gejolak ekonomi atau pengurangan efektivitas program bantuan, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau penyesuaian kebijakan subsidi, yang kembali memperlebar jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Tren penurunan yang berlanjut pada tahun 2023 dan 2024 mencerminkan keberlanjutan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan atau stabilitas ekonomi yang membaik, yang secara bertahap mengurangi intensitas kemiskinan di Kabupaten Bima.

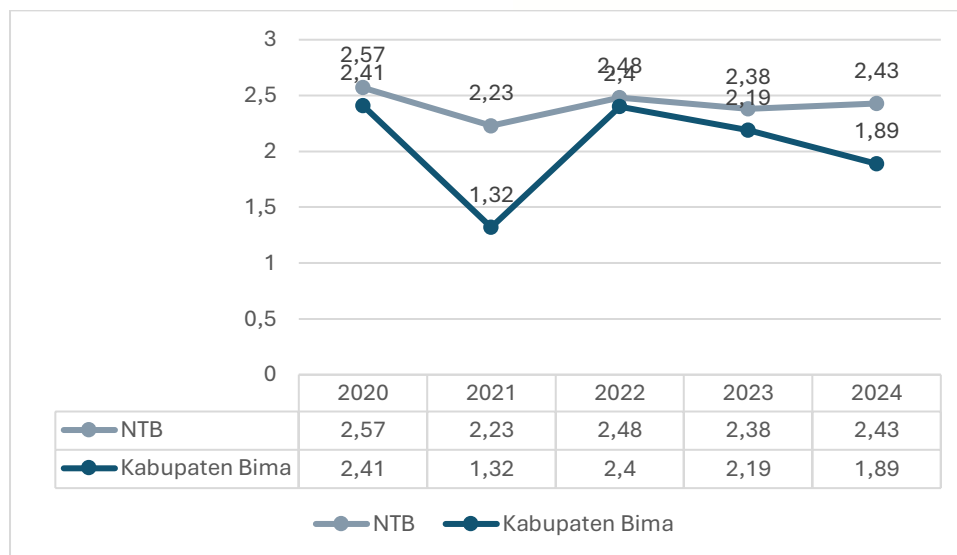


Gambar 2.43.

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Bima Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Bima, 2025 (Diolah)

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Bima dan NTB menunjukkan pola fluktuatif namun dengan tren penurunan yang cukup berarti pada Kabupaten Bima selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, Kabupaten Bima mencatat indeks sebesar 2,41 yang sedikit lebih rendah dibanding NTB yang berada di angka 2,57. Pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan untuk Kabupaten Bima menjadi 1,32, jauh di bawah angka NTB yang mencatat 2,23. Namun, pada 2022 kedua wilayah kembali mendekati nilai yang hampir sama dengan Kabupaten Bima 2,40 dan NTB 2,48. Selanjutnya, indeks di Kabupaten Bima menurun kembali secara bertahap menjadi 1,89 pada tahun 2024, sedangkan NTB relatif stabil di kisaran 2,43. Data ini menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan di Kabupaten Bima cenderung fluktuatif.



Gambar 2.44.

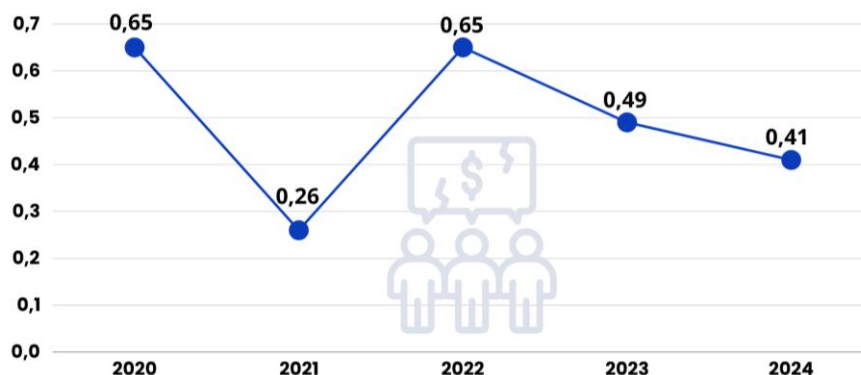
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bima dan NTB tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



2) Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan ketimpangan di antara penduduk miskin dalam hal pengeluaran. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bima pada periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, indeks ini berada di angka 0,65, menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin cukup besar. Namun, kondisi ini membaik secara drastis pada tahun 2021 ketika indeks turun menjadi 0,26, mengindikasikan bahwa jurang ketimpangan antar penduduk miskin menyempit secara signifikan. Pada tahun 2022, indeks kembali meningkat ke angka 0,65, sama seperti tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di antara penduduk miskin kembali melebar, mungkin disebabkan oleh dampak pemulihan ekonomi yang tidak merata. Setelah itu, terjadi perbaikan bertahap. Pada tahun 2023, indeks turun menjadi 0,49, dan kembali menurun pada tahun 2024 ke angka 0,41. Penurunan dua tahun terakhir mencerminkan upaya yang lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan di antara kelompok miskin. Secara keseluruhan, meskipun masih terjadi fluktuasi, tren ke arah penurunan dalam dua tahun terakhir memberikan sinyal positif bahwa kondisi keparahan kemiskinan di Kabupaten Bima mulai membaik, dengan ketimpangan di antara penduduk miskin yang semakin mengecil.



Gambar 2.45.

Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bima Tahun 2020-2024

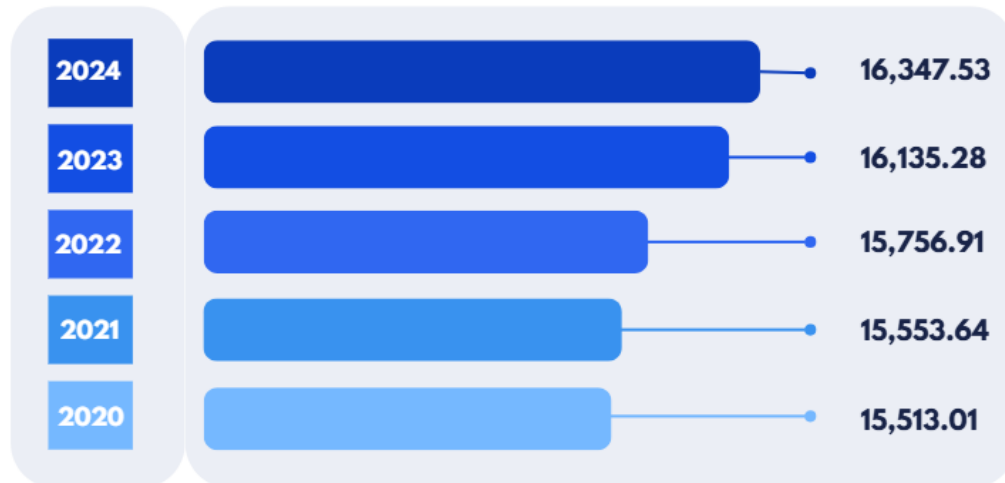
Sumber : BPS Kabupaten Bima, 2025 (Diolah)

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah hasil pembagian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut pada pertengahan tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan PDRB per kapita sebagai indikator kesejahteraan ekonomi rata-rata penduduk di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Bima berdasarkan harga konstan menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai PDRB Per Kapita tercatat sebesar 15.513,01 miliar rupiah, dan mengalami kenaikan bertahap setiap tahun, mencapai 16.347,53 miliar rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang konsisten di wilayah Kabupaten Bima selama periode tersebut. Meski kenaikan setiap tahunnya relatif kecil dan bertahap, hal ini menunjukkan stabilitas pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan PDRB Per Kapita ini dapat diartikan bahwa pendapatan rata-rata per individu di Kabupaten Bima semakin meningkat seiring dengan



jalannya waktu, yang berpotensi berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

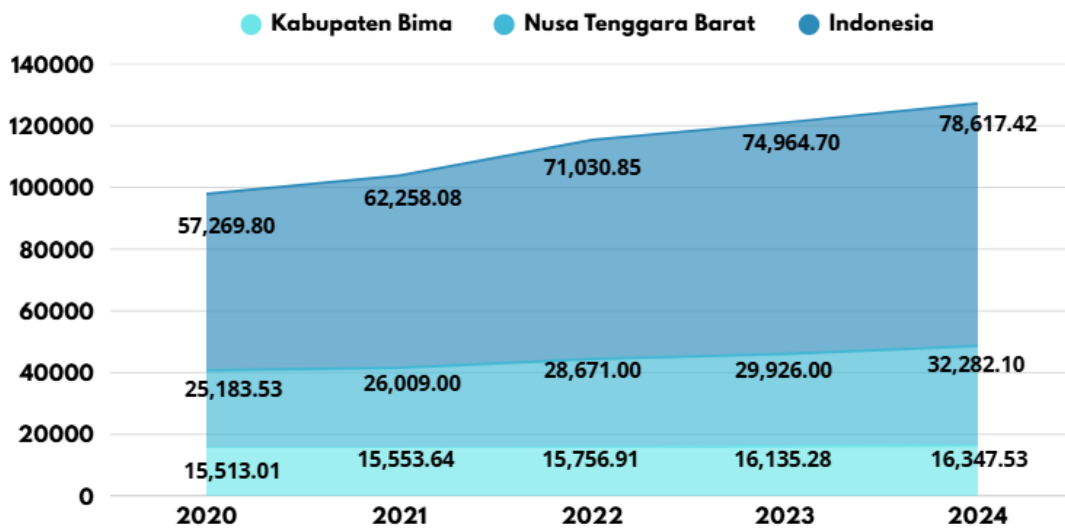


Gambar 2.46.

PDRB Per Kapita ADHK (Miliar Rupiah) Kabupaten Bima Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, diolah

Perbandingan PDRB per kapita ADHK tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Bima memiliki nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan rata-rata nasional Indonesia. Pada tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Bima tercatat sekitar 15.513,01 miliar rupiah, naik perlahan menjadi 16.347,53 miliar rupiah pada tahun 2024. Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat nilai jauh lebih tinggi yaitu dari 25.183,53 miliar rupiah di 2020 menjadi 32.282,10 miliar rupiah di 2024. Di tingkat nasional, PDRB per kapita jauh lebih tinggi dengan angka dari 57.269,80 miliar rupiah di 2020 dan meningkat secara signifikan menjadi 78.617,42 miliar rupiah pada 2024. Data ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Bima mengalami peningkatan nilai PDRB per kapita selama periode lima tahun tersebut, masih terdapat kesenjangan ekonomi yang signifikan antara Kabupaten Bima dengan tingkat provinsi dan nasional. Tren peningkatan Kabupaten Bima juga cenderung lebih stabil dan bertahap, menandakan adanya potensi pertumbuhan ekonomi yang harus didorong lebih lanjut agar mampu mengejar tingkat kesejahteraan yang lebih setara.



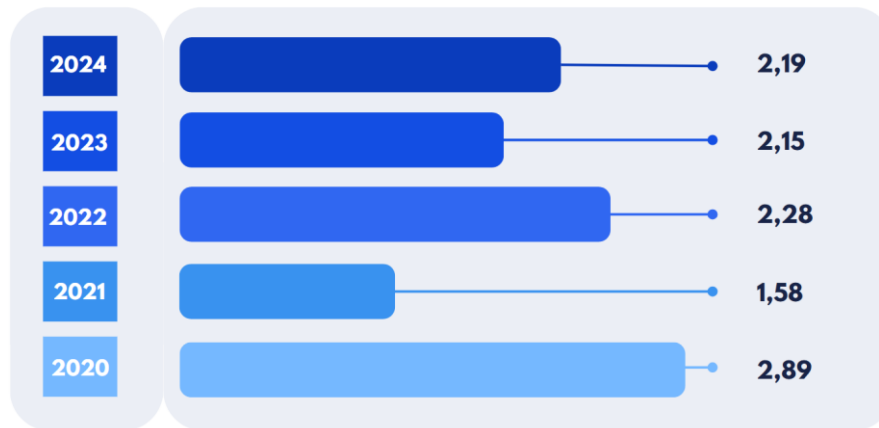
Gambar 2.47.

Perbandingan PDRB per kapita ADHK (Miliar Rp) tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, mencari pekerjaan, atau sedang bersedia menerima pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bima selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika kondisi ekonomi daerah. Pada tahun 2020, TPT tercatat sebesar 2,89%, angka yang cukup tinggi yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menekan berbagai sektor ekonomi dan mengurangi serapan tenaga kerja. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan menjadi 1,58%, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang lebih baik. Di tahun 2022, TPT kembali meningkat menjadi 2,28%, yang dapat diartikan sebagai konsekuensi dari pemulihan ekonomi yang belum merata di seluruh sektor atau meningkatnya partisipasi angkatan kerja baru. Pada tahun 2023, TPT sedikit menurun menjadi 2,15%, dan pada tahun 2024 sedikit meningkat menjadi 2,19%, menunjukkan stabilitas tingkat pengangguran yang relatif rendah dibandingkan awal periode. Secara keseluruhan, meskipun terdapat sedikit kenaikan dan penurunan selama lima tahun terakhir, kondisi pengangguran di Kabupaten Bima menunjukkan arah yang positif dengan tingkat pengangguran yang cenderung terkendali, mencerminkan respons kebijakan ketenagakerjaan dan pemulihan ekonomi yang berjalan cukup baik.

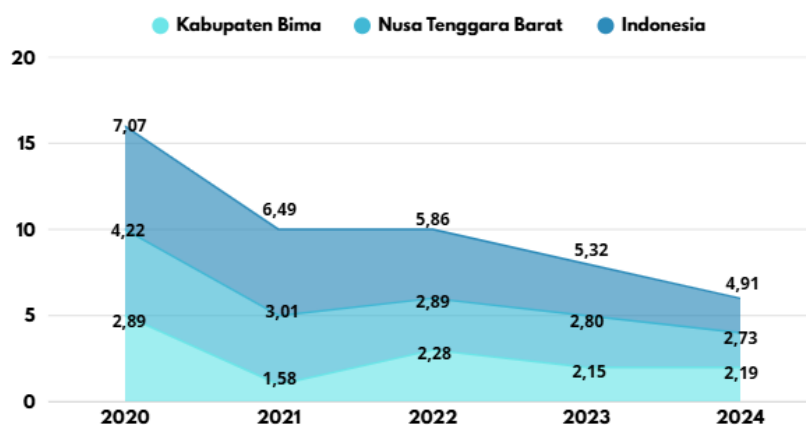


Gambar 2.48.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bima tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, diolah

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara Kabupaten Bima, NTB, dan Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran di Kabupaten Bima berada pada angka 4,22%, lebih tinggi dibandingkan NTB yang mencatat 2,89%, namun jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional yang mencapai 7,07%. Tahun berikutnya, 2021, terjadi penurunan drastis di Kabupaten Bima menjadi 1,58%, sementara NTB mengalami penurunan kecil menjadi 3,01%, dan nasional turun ke 6,49%. Selama tahun 2022 hingga 2024, tren ini terus berlanjut dengan Kabupaten Bima mempertahankan tingkat pengangguran yang terbilang rendah, yakni sekitar 2,19%-2,89%, NTB stabil di kisaran 2,15%-2,80%, dan tingkat nasional juga mengalami penurunan berkelanjutan hingga mencapai angka 4,91% pada 2024. Data ini mencerminkan bahwa Kabupaten Bima memiliki kinerja yang cukup baik dalam mengendalikan tingkat pengangguran jika dibandingkan dengan secara nasional, dengan tingkat pengangguran yang cenderung lebih rendah dan relatif stabil sepanjang periode tersebut.



Gambar 2.49.

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bima, NTB, dan Nasional 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



2.2.1.5. Indeks Gini

Gini rasio Kabupaten Bima yaitu sebesar 0,356. Kabupaten Sumbawa mencatat Gini Rasio tertinggi sebesar 0,441, diikuti oleh Kota Mataram (0,412) dan Kota Bima (0,411), yang mengindikasikan ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi di wilayah tersebut. Sementara itu, Kabupaten Lombok Utara memiliki Gini Rasio terendah sebesar 0,283, disusul oleh Kabupaten Lombok Timur (0,31) dan Kabupaten Dompu (0,331), yang mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Kabupaten Bima berada di posisi menengah dengan Gini Rasio 0,356, sejalan dengan Kabupaten Lombok Barat (0,365) dan Kabupaten Sumbawa Barat (0,354).

Faktor yang memengaruhi variasi Gini Rasio ini antara lain struktur ekonomi, tingkat urbanisasi, dan kebijakan pembangunan di masing-masing wilayah. Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram, dan Kota Bima mungkin mengalami ketimpangan yang lebih tinggi akibat konsentrasi aktivitas ekonomi di sektor tertentu, seperti pariwisata atau perdagangan, yang tidak merata manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Sementara itu, Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur yang didominasi oleh sektor pertanian tradisional cenderung memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata. Kebijakan fiskal daerah, program bantuan sosial, dan akses terhadap lapangan kerja juga turut berperan dalam menentukan tingkat ketimpangan ini. Dengan demikian, disparitas Gini Rasio antar kabupaten/kota di NTB mencerminkan kompleksitas tantangan pembangunan ekonomi dan sosial yang perlu ditangani secara holistik.

Tabel 2.39.
Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota tahun 2023

Kabupaten/Kota	Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota tahun 2023
Kabupaten Lombok Barat	0,365
Kabupaten Lombok Tengah	0,349
Kabupaten Lombok Timur	0,31
Kabupaten Sumbawa	0,441
Kabupaten Dompu	0,331
Kabupaten Bima	0,356
Kabupaten Sumbawa Barat	0,354
Kabupaten Lombok Utara	0,283
Kota Mataram	0,412
Kota Bima	0,411

Sumber: Badan Pusat Statistik

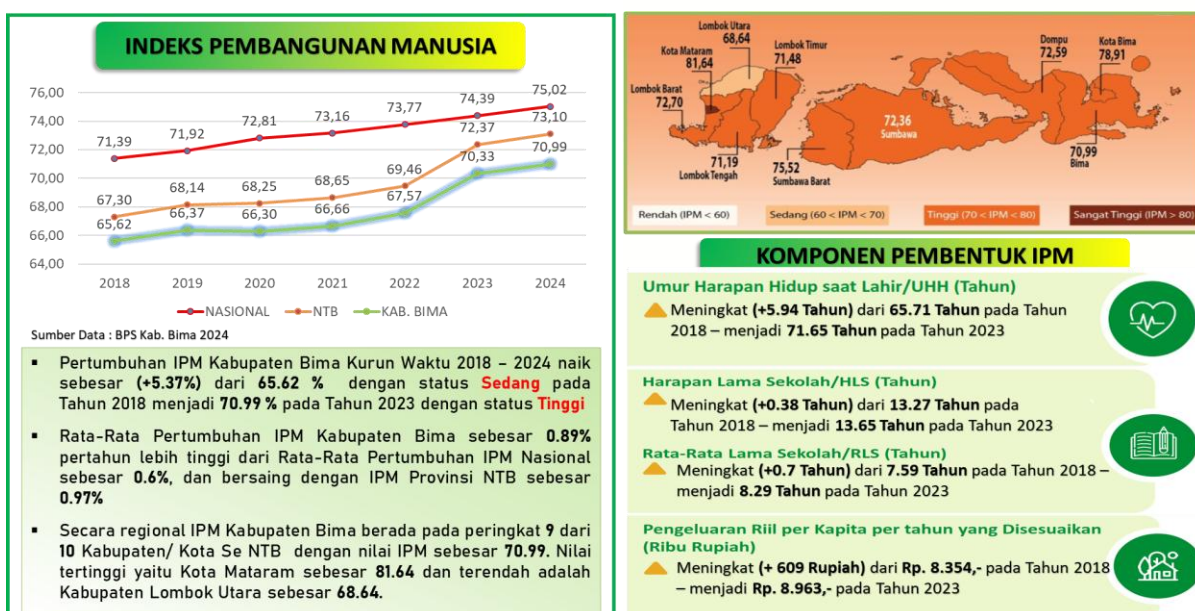
2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran pembangunan kualitas penduduk untuk dapat mengakses sumber ekonomi dan pendapatan, layanan kesehatan, serta layanan pendidikan. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bima mengalami peningkatan yang konsisten selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar



66,30, kemudian meningkat menjadi 66,66 pada tahun 2021. Kenaikan ini menandakan adanya perbaikan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Perkembangan positif tersebut berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian IPM sebesar 69,63, sebuah lonjakan signifikan yang menunjukkan peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan daya beli masyarakat. Tren peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan IPM sebesar 70,33, dan mencapai 70,99 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, IPM Kabupaten Bima mengalami peningkatan sebesar 4,69 poin selama lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan kemajuan pembangunan manusia yang cukup pesat dan mengindikasikan perbaikan kualitas hidup penduduk secara berkelanjutan. Peningkatan IPM yang konsisten ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas berbagai program pembangunan daerah, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.



Gambar 2.50.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bima tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, diolah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bima dari tahun 2018 hingga 2024, beserta komponen pembentuk IPM dan perbandingannya dengan kabupaten/kota lain di NTB. Selama periode ini, IPM Kabupaten Bima menunjukkan kenaikan yang signifikan sebesar **+5,37%**, meningkat dari **65,62% pada tahun 2018** (dengan status "Sedang") menjadi **70,99% pada tahun 2023** (dengan status "Tinggi"). Pertumbuhan IPM Kabupaten Bima rata-rata sebesar **0,89% per tahun**, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan IPM nasional yang sebesar 0,6% dan hampir setara dengan rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi NTB sebesar 0,97%.

Secara regional, IPM Kabupaten Bima menempati posisi ke-9 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB dengan nilai 70,99%, yang menunjukkan posisi menengah. Perbandingan dengan wilayah lain di NTB menunjukkan Kota Mataram sebagai wilayah dengan IPM tertinggi sebesar 81,64%, sedangkan Kabupaten Lombok Utara memiliki nilai IPM terendah sebesar 68,64%. Peta di samping kanan memperlihatkan distribusi kategori IPM dengan



warna yang menandakan tingkat rendah hingga sangat tinggi, di mana Kabupaten Bima berada pada kategori tinggi namun masih di bawah beberapa kota/kabupaten lain di NTB.

Komponen pembentuk IPM yang terdiri dari Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Riil per Kapita juga menunjukkan peningkatan positif. Umur harapan hidup saat lahir naik sebesar +5,94 tahun dari 65,71 tahun (2018) menjadi 71,65 tahun (2023). Harapan lama sekolah meningkat sekitar +0,38 tahun menjadi 13,65 tahun, semakin mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan. Rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan +0,7 tahun menjadi 8,29 tahun pada 2023. Pengeluaran riil per kapita juga meningkat Rp609 ribu, dari Rp8.354 ribu pada 2018 menjadi Rp8.963 ribu pada 2023, menggambarkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, grafik dan informasi pendukung ini menonjolkan perkembangan yang baik pada IPM Kabupaten Bima, namun masih berada pada posisi menengah jika dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di NTB, terutama Kota Mataram yang menunjukkan nilai IPM tertinggi. Ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Bima mengalami kemajuan signifikan dalam pembangunan manusia, masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut agar dapat menyamai atau melampaui wilayah lain di provinsi.

2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Pembangunan sektor kesehatan merupakan pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan sejahtera. Untuk mewujudkan Kesehatan untuk Semua, sebagai manifestasi dari hak dasar setiap warga negara untuk hidup sehat secara merata dan berkelanjutan. Pelaksanaan kinerja urusan bidang kesehatan diukur melalui indikator kinerja daerah terkait Usia Harapan Hidup, Prevelensi Stunting, Prevelensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.40.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Bima Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka usia harapan hidup	Tahun	66,33	66,5	66,87	71,65	71,88
2	Prevalensi balita gizi buruk	%	13,39	18,2	13,90	0,18	0,647
3	Angka kematian ibu melahirkan	kasus	10	12	10	9	9
4	Angka kematian bayi	kasus	70	69	71	64	88
5	Prevelensi Stunting	%	24,49	18,20	13,88	11,78	11,09

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Bima tahun 2025

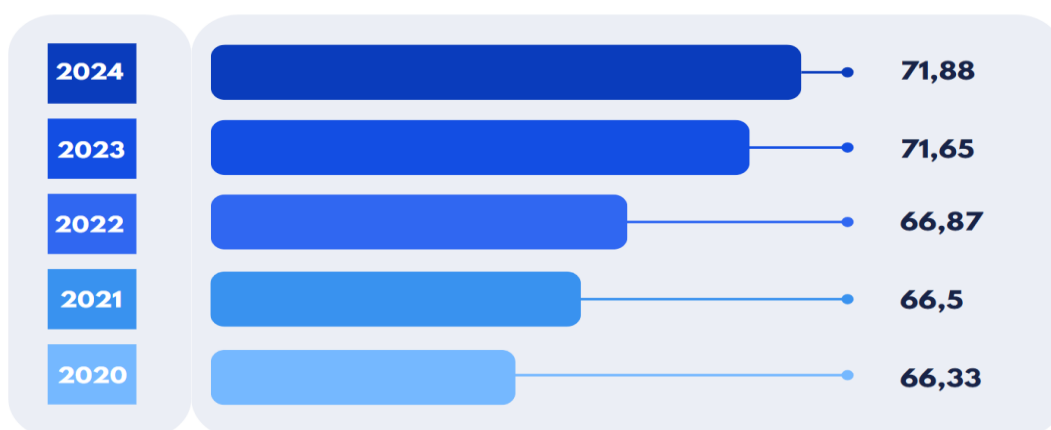
2.2.2.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia adalah rata-rata tahun yang diharapkan dapat dijalani seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup di Kabupaten Bima menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode lima tahun terakhir dari 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Bima tercatat sebesar 66,33 tahun, kemudian mengalami peningkatan moderat menjadi 66,5 tahun pada tahun 2021 dengan kenaikan sebesar 0,17 tahun. Perkembangan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana angka harapan hidup meningkat



menjadi 66,87 tahun atau naik 0,37 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Momentum positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan pencapaian usia harapan hidup sebesar 71,65 tahun, yang menunjukkan lompatan tertinggi dalam periode observasi dengan kenaikan mencapai 4,78 tahun. Tren positif ini terus terjaga hingga tahun 2024, di mana angka harapan hidup mencapai 71,88 tahun dengan penambahan 0,23 tahun dari tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun (2020-2024), Kabupaten Bima berhasil meningkatkan usia harapan hidup penduduknya sebesar 5,55 tahun, dari 66,33 tahun menjadi 71,88 tahun. Peningkatan yang paling dramatis terjadi antara tahun 2022 dan 2023, yang kemungkinan berkaitan dengan perbaikan sistem kesehatan, peningkatan akses pelayanan medis, perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta implementasi program-program pembangunan kesehatan yang lebih efektif. Capaian angka harapan hidup sebesar 71,88 tahun pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Bima telah mencapai standar yang cukup baik dalam indikator pembangunan manusia, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut guna mencapai target nasional.

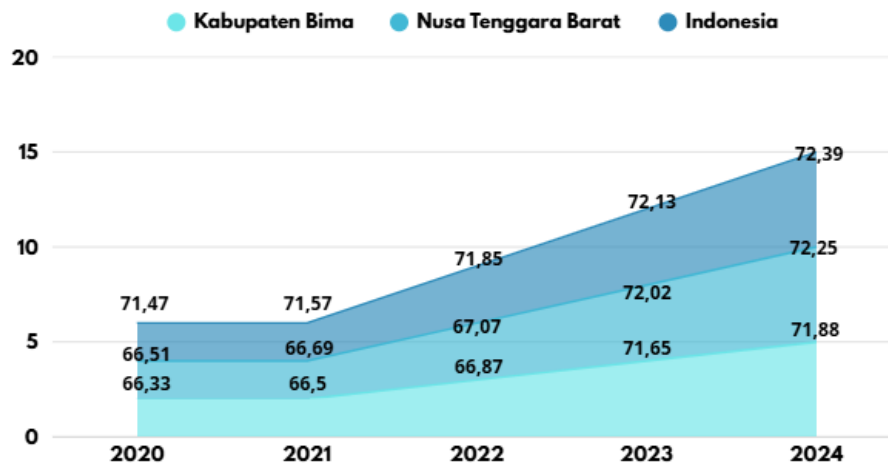


Gambar 2.51.

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bima tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, diolah

Perbandingan Usia Harapan Hidup antara Kabupaten Bima, NTB, dan Nasional menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Kabupaten Bima memiliki usia harapan hidup paling rendah dibandingkan NTB dan Nasional pada seluruh tahun yang diamati. Pada tahun 2020, usia harapan hidup Kabupaten Bima tercatat sebesar **66,33 tahun**, lebih rendah dari NTB yang sebesar **66,51 tahun** dan Nasional sebesar **71,47 tahun**. Meskipun demikian, selama lima tahun berikutnya, usia harapan hidup Kabupaten Bima mengalami peningkatan bertahap menjadi **71,88 tahun pada tahun 2024**, mengikuti tren serupa dengan NTB dan Nasional yang masing-masing naik menjadi **72,25 tahun** dan **72,39 tahun**. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bima, meskipun gap nilai dengan tingkat nasional masih ada. Secara umum, data ini mencerminkan bahwa Kabupaten Bima masih dalam tahap mengejar capaian usia harapan hidup yang lebih tinggi sebagaimana yang sudah dicapai oleh NTB secara provinsi maupun nasional.



Gambar 2.52.

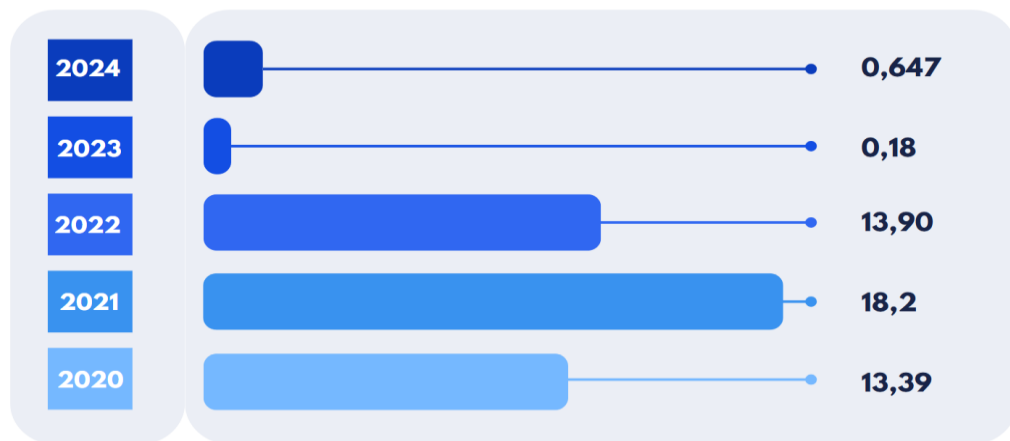
Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Bima, NTB, dan Nasional 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

2.2.2.2. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Bima selama periode 2020-2024 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2020, prevalensi balita gizi buruk berada pada angka 13,39 persen, kemudian mengalami peningkatan menjadi 18,2 persen pada tahun 2021, atau naik sebesar 4,81 poin persentase. Titik balik mulai terlihat pada tahun 2022 ketika prevalensi balita gizi buruk turun menjadi 13,90 persen, mengalami penurunan sebesar 4,3 poin persentase dari tahun sebelumnya. Tren Perbaikan signifikan pada tahun 2023, prevalensi balita gizi buruk mengalami penurunan menjadi hanya 0,18 persen, menunjukkan pengurangan sebesar 13,72 poin persentase. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan implementasi program penanggulangan gizi buruk yang komprehensif dan terkoordinasi dengan baik.

Pada tahun 2024, prevalensi balita gizi buruk tercatat sebesar 0,647 persen, yang meskipun mengalami sedikit peningkatan 0,467 poin persentase dari tahun sebelumnya, namun masih berada pada level yang sangat rendah. Transformasi yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun ini menunjukkan tren positif, di mana Kabupaten Bima berhasil menurunkan prevalensi balita gizi buruk dari 13,39 persen menjadi 0,647 persen, atau mengalami penurunan total sebesar 12,743 poin persentase. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas strategi penanggulangan gizi buruk yang dilaksanakan, termasuk kemungkinan perbaikan sistem surveilans gizi, peningkatan akses terhadap makanan bergizi, penguatan program pemberian makanan tambahan, serta peningkatan edukasi gizi kepada masyarakat, sehingga Kabupaten Bima kini berada sangat dekat dengan target eliminasi gizi buruk.



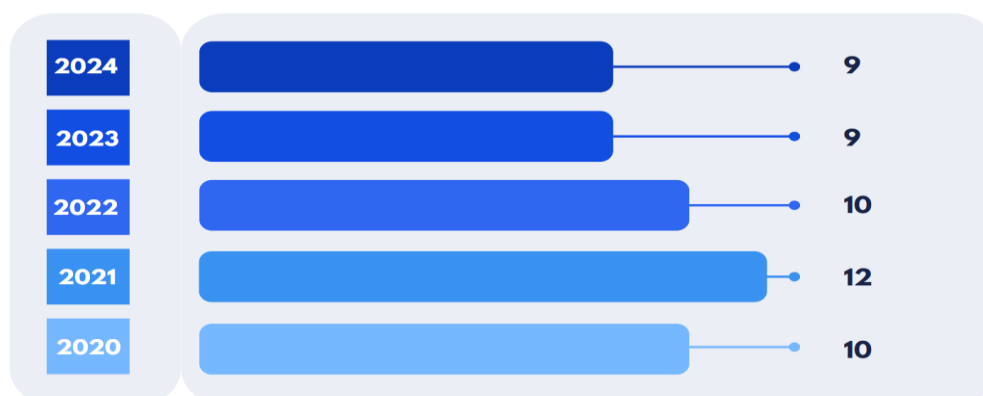
Gambar 2.53.

Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Bima tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bima tahun 2025, diolah

2.2.2.3. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Bima selama periode 2020-2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan tren penurunan yang positif pada akhir periode. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 10 kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Bima, kemudian mengalami peningkatan menjadi 12 kasus pada tahun 2021, atau bertambah 2 kasus dari tahun sebelumnya. Kondisi mulai menunjukkan perbaikan pada tahun 2022 dengan turunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 10 kasus, mengalami penurunan 2 kasus dibandingkan tahun sebelumnya dan kembali ke level tahun 2020. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dan 2024, di mana angka kematian ibu melahirkan berhasil ditekan menjadi 9 kasus pada kedua tahun tersebut, menunjukkan penurunan masing-masing 1 kasus dari tahun 2022. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun (2020-2024), Kabupaten Bima berhasil menurunkan angka kematian ibu melahirkan dari 10 kasus menjadi 9 kasus, atau mengalami penurunan sebesar 1 kasus. Pencapaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, perbaikan akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, serta kemungkinan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin.



Gambar 2.54.

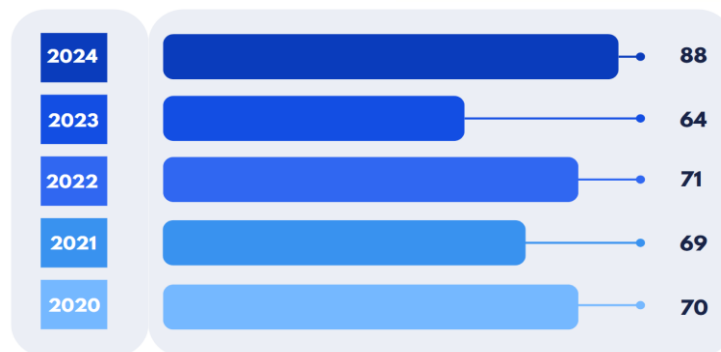
Angka kematian ibu melahirkan (kasus) Kabupaten Bima tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bima tahun 2025, diolah



2.2.2.4. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Berdasarkan Angka kematian ibu melahirkan Kabupaten Bima tahun 2020-2024, angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Bima mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, tercatat 70 kasus kematian ibu melahirkan, kemudian mengalami penurunan menjadi 69 kasus pada tahun 2021. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dengan 71 kasus, diikuti dengan penurunan drastis pada tahun 2023 menjadi 64 kasus. Namun, tren ini berbalik pada tahun 2024 dengan peningkatan signifikan mencapai 88 kasus, yang merupakan angka tertinggi dalam rentang waktu lima tahun tersebut. Fluktuasi angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Bima dapat disebabkan oleh beberapa faktor kompleks. Peningkatan drastis pada tahun 2024 kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, kekurangan tenaga medis spesialis, serta kondisi geografis kabupaten yang mungkin menyulitkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil di daerah terpencil. Faktor lain yang berpotensi berkontribusi meliputi rendahnya cakupan pemeriksaan kehamilan rutin, keterlambatan rujukan kasus komplikasi, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi nutrisi dan perawatan kehamilan, serta kemungkinan dampak dari perubahan kebijakan atau program kesehatan maternal yang belum optimal implementasinya.



Gambar 2.55.

Angka kematian ibu melahirkan (kasus) Kabupaten Bima tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bima tahun 2025, diolah

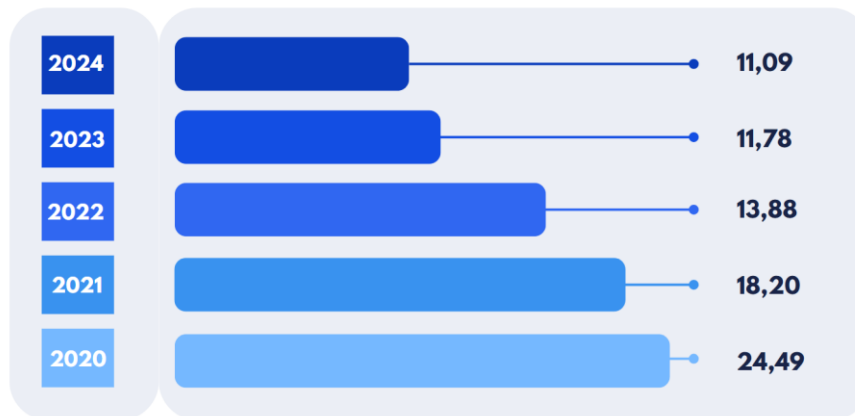
2.2.2.5. Prevalensi Stunting

Berdasarkan Prevalensi Stunting Kabupaten Bima tahun 2020-2024, prevalensi stunting di Kabupaten Bima menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan signifikan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, prevalensi stunting mencapai angka tertinggi yaitu 24,49 persen, kemudian mengalami penurunan bertahap menjadi 18,20 persen pada tahun 2021. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan prevalensi turun menjadi 13,88 persen, diikuti penurunan lebih lanjut pada tahun 2023 menjadi 11,78 persen. Pada tahun 2024, prevalensi stunting mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir yaitu 11,09 persen, menunjukkan perbaikan yang substansial dengan total penurunan sebesar 13,4 poin persentase dari tahun 2020.

Penurunan prevalensi stunting yang konsisten di Kabupaten Bima dapat dikaitkan dengan beberapa faktor intervensi yang efektif dan berkelanjutan. Faktor utama yang berkontribusi terhadap pencapaian ini kemungkinan meliputi peningkatan program gizi terintegrasi yang mencakup pemberian makanan tambahan untuk balita, edukasi gizi kepada



ibu hamil dan menyusui, serta perbaikan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Implementasi program sanitasi dan akses air bersih yang lebih baik juga berperan penting dalam mengurangi risiko infeksi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi pertumbuhan balita melalui posyandu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, serta koordinasi lintas sektor antara dinas kesehatan, pertanian, dan pendidikan dalam mendukung program pencegahan stunting turut berkontribusi pada keberhasilan penurunan prevalensi stunting yang berkelanjutan.



Gambar 2.56.

Prevelensi Stunting Kabupaten Bima tahun 2020-2024

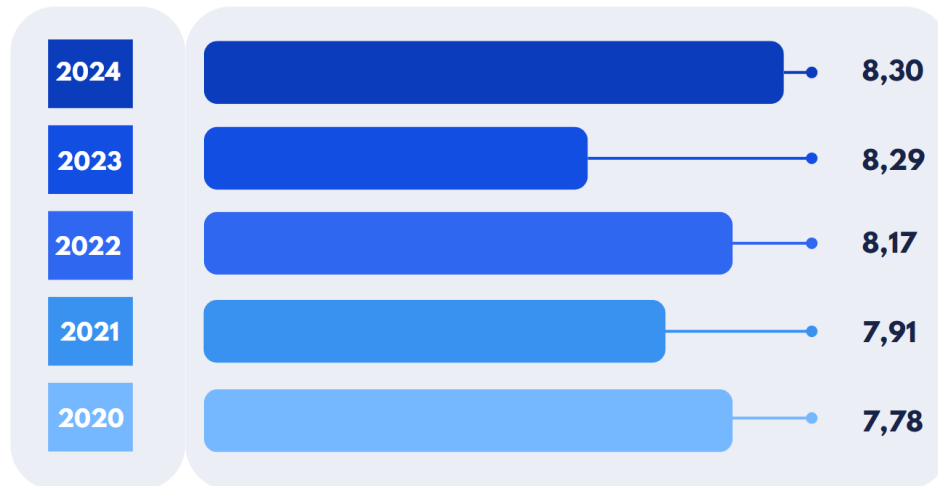
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bima tahun 2025, diolah

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah

BPS mengukur RLS sebagai indikator kualitas pendidikan. RLS adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia tertentu (biasanya 15 tahun ke atas) untuk menyelesaikan pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bima mengalami tren peningkatan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah tercatat 7,78 tahun, kemudian mengalami peningkatan menjadi 7,91 tahun pada tahun 2021. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan kenaikan menjadi 8,17 tahun, diikuti dengan peningkatan yang relatif stabil pada tahun 2023 menjadi 8,29 tahun. Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah mencapai 8,30 tahun, menunjukkan peningkatan total sebesar 0,52 tahun dari tahun 2020, yang mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sektor pendidikan di kabupaten tersebut.

Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bima dapat dikaitkan dengan berbagai faktor yang mendukung aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Faktor utama yang berkontribusi terhadap pencapaian ini meliputi peningkatan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan sekolah-sekolah baru dan perbaikan fasilitas pendidikan yang ada, program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah yang membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, perbaikan kondisi sosial ekonomi yang memungkinkan lebih banyak anak melanjutkan sekolah, serta kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan terintegrasi turut mendorong partisipasi pendidikan yang lebih tinggi.



Gambar 2.57.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Bima tahun 2020-2024

Sumber data: BPS NTB. 2021 dan Data Olahan 2025

Berdasarkan perbandingan rata-rata lama sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2024, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar kabupaten/ kota dengan pola peningkatan yang berbeda-beda. Kota Mataram menunjukkan angka tertinggi dengan rata-rata lama sekolah 9,46 tahun 2020 dan mengalami peningkatan menjadi 15,68 tahun pada 2024. Kota Bima menempati posisi kedua dengan nilai tinggi, mulai dari 10,49 tahun pada 2020 meningkat menjadi 10,96 tahun pada 2024. Kabupaten Dompu dan Sumbawa Barat juga menunjukkan performa yang baik dengan rata-rata di atas 8 tahun, sementara kabupaten lainnya seperti Lombok Utara, Lombok Barat, dan Lombok Tengah masih berada di bawah 7 tahun. Kabupaten Bima sendiri menunjukkan peningkatan cukup baik dari 7,78 tahun pada 2020 menjadi 8,30 tahun pada 2024, menempatkannya di posisi tengah dalam provinsi Nusa Tenggara Barat.

Disparitas rata-rata lama sekolah antar kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dijelaskan melalui beberapa faktor struktural dan geografis. Kota Mataram dan Kota Bima sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi memiliki keunggulan dalam hal infrastruktur pendidikan, aksesibilitas fasilitas pendidikan tinggi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik, sehingga memungkinkan penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kabupaten-kabupaten dengan angka rendah seperti Lombok Utara dan Lombok Tengah kemungkinan menghadapi tantangan geografis berupa daerah kepulauan yang menyulitkan akses pendidikan, keterbatasan infrastruktur transportasi, serta kondisi ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.

Tabel 2.41.

Perbandingan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024

Tingkat	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bima	7,78	7,91	8,17	8,29	8,30
Kabupaten Lombok Barat	6.41	6.42	6.60	6.87	6,88
Kabupaten Lombok Tengah	6.28	6.29	6.44	6.61	Belum Tersedia
Kabupaten Lombok Timur	6.70	6.71	7.04	7.12	7,36
Kabupaten Sumbawa	7.92	8.15	8.21	8.52	8,59



Tingkat	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Dompu	8.44	8.72	8.73	8.97	9,04
Kabupaten Sumbawa Barat	8.53	8.72	8.90	8.98	8,90
Kabupaten Lombok Utara	5.91	6.04	6.30	6.39	6,40
Kota Mataram	9.46	9.54	9.55	9.56	15,68
Kota Bima	10.49	10.65	10.94	10.95	10,96
Nusa Tenggara Barat	7.31	7.38	7.61	7.74	7,87

Sumber data: BPS NTB. 2021 dan Data Olahan 2025

2.2.3.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah rata-rata lama waktu yang diharapkan dapat ditempuh oleh seseorang dalam jenjang pendidikan formal dari mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Dengan kata lain, HLS mengukur jumlah tahun pendidikan yang diantisipasi dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia masuk sekolah, berdasarkan pola pendidikan saat ini. Indikator ini menjadi salah satu komponen penting dalam mengukur kualitas pendidikan dan tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah. Harapan lama sekolah di Kabupaten Bima menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, harapan lama sekolah tercatat 13,29 tahun, kemudian mengalami peningkatan menjadi 13,39 tahun pada tahun 2021. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan kenaikan menjadi 13,58 tahun, diikuti dengan peningkatan yang relatif stabil pada tahun 2023 menjadi 13,65 tahun. Pada tahun 2024, harapan lama sekolah mencapai 13,66 tahun, menunjukkan peningkatan total sebesar 0,37 tahun atau sekitar 4,4 bulan dari tahun 2020, yang mengindikasikan adanya perbaikan ekspektasi pendidikan dan aksesibilitas sistem pendidikan di kabupaten tersebut.

Peningkatan harapan lama sekolah di Kabupaten Bima dapat dikaitkan dengan berbagai faktor yang mendukung pengembangan sistem pendidikan dan perubahan persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Faktor utama yang berkontribusi meliputi ekspansi infrastruktur pendidikan dan bantuan pendidikan yang memungkinkan lebih banyak anak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, serta implementasi kebijakan pendidikan nasional yang mendorong partisipasi pendidikan hingga jenjang menengah atas. Selain itu, peningkatan kesadaran orang tua tentang nilai investasi pendidikan jangka panjang, perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memungkinkan keluarga untuk merencanakan pendidikan anak lebih lama, serta ketersediaan teknologi informasi yang membuka akses terhadap berbagai program pendidikan turut mendorong optimisme masyarakat terhadap pencapaian pendidikan yang lebih tinggi.



Gambar 2.58.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bima tahun 2020-2024

Sumber data: BPS NTB. 2021 dan data olahan 2025



Berdasarkan perbandingan harapan lama sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2024, terdapat perbedaan relatif kecil namun konsisten antar kabupaten/kota dengan rata-rata provinsi yang meningkat dari 13,70 tahun pada 2020 menjadi 13,98 tahun pada 2024. Kota Mataram dan Kota Bima menunjukkan harapan lama sekolah tertinggi dengan angka di atas 15 tahun sepanjang periode tersebut, Kota Mataram mencapai 15,68 tahun dan Kota Bima 15,08 tahun pada 2024. Kabupaten Lombok Timur menempati posisi ketiga dengan peningkatan dari 13,69 tahun pada 2020 menjadi 14,07 tahun pada 2024. Sementara itu, Kabupaten Bima berada di posisi tengah dengan harapan lama sekolah 13,66 tahun pada 2024, sedikit di bawah rata-rata provinsi. Kabupaten Lombok Utara menunjukkan angka terendah meskipun mengalami peningkatan dari 12,72 tahun pada 2020 menjadi 13,02 tahun pada 2024, sedangkan Kabupaten Sumbawa mengalami penurunan yang mencurigakan dari 13,24 tahun pada 2023 menjadi 11,7 tahun pada 2024.

Disparitas harapan lama sekolah antar kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dijelaskan melalui faktor-faktor struktural dan kondisi geografis yang berbeda. Kota Mataram dan Kota Bima sebagai pusat perkotaan memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan institusi pendidikan lengkap hingga perguruan tinggi, infrastruktur yang lebih baik, serta akses informasi dan teknologi yang mempengaruhi aspirasi pendidikan masyarakat. Kabupaten-kabupaten dengan harapan lama sekolah yang lebih rendah seperti Lombok Utara kemungkinan menghadapi tantangan geografis berupa topografi yang sulit, keterbatasan akses transportasi menuju sekolah-sekolah lanjutan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada sektor tradisional. Faktor budaya dan persepsi masyarakat terhadap nilai pendidikan formal, ketersediaan lapangan kerja yang membutuhkan pendidikan tinggi di daerah, serta program-program khusus pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi pendidikan juga berperan dalam membentuk ekspektasi masyarakat terhadap pencapaian pendidikan anak-anak mereka.

Tabel 2.42.

Perbandingan Harapan Lama Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Menurut Kabupaten Tahun 2020 - 2024

Tingkat	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bima	13,29	13,39	13,58	13,65	13,66
Kabupaten Lombok Barat	13.71	13.95	13.96	13,98	13,99
Kabupaten Lombok Tengah	13.67	13.85	13,86	13,87	Belum Tersedia
Kabupaten Lombok Timur	13.69	13.90	14.05	14,06	14,07
Kabupaten Sumbawa	13.06	13.07	13.23	13,24	11,7
Kabupaten Dompu	13.32	13.53	13.69	13,83	13,84
Kabupaten Sumbawa Barat	13.62	13.64	13.65	13,66	13,65
Kabupaten Lombok Utara	12.72	12.76	12.77	13,01	13,02
Kota Mataram	15.59	15.64	15.65	15,67	15,68
Kota Bima	15.00	15.04	15.05	15,06	15,08
Nsa Tenggara Barat	13.70	13.90	13.96	13,97	13,98

Sumber data: BPS NTB. 2021 dan data olahan 2025

2.2.3.3. Literasi dan Numerasi

Skor Literasi SD dan SMP masing-masing berada di angka 56,77 dan 55,40 yang menunjukkan *kemampuan membaca dan memahami teks pada tingkat dasar dan menengah* berada di kisaran rata-rata. Skor ini menunjukkan ada ruang untuk perbaikan terutama dalam mendorong kemampuan literasi yang lebih tinggi baik di SD maupun di SMP. Skor numerasi



untuk SD sedikit lebih rendah (52,06) dibandingkan SMP (54,09), yang artinya kemampuan dasar angka dan konsep matematika pada tingkat SD perlu perhatian lebih. Meskipun demikian, peningkatan di SMP cukup positif, yang mengindikasikan bahwa proses pembelajaran numerasi di SMP berjalan baik tetapi harus tetap ditingkatkan.

Tabel 2.43.
Capaian Literasi dan Numerasi Kabupaten Bima Tahun 2024

	Indikator ▲	Jenjang	Capaian 2024
1	A,1 Skor Kemampuan Literasi	SD	56,77
2	A,1 Skor Kemampuan Literasi	SMP	55,40
3	A,2 Skor Kemampuan Numerasi	SD	52,06
4	A,2 Skor Kemampuan Numerasi	SMP	54,09
5	B,10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	PAUD	90,70
6	B,13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	SD/SMP	99,62
7	B,15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Kesetaraan	31,57
8	B,8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	PAUD	32,99
9	C,1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	PAUD	62,90
10	D,10 Iklim Inklusivitas	SD	60,55
11	D,10 Iklim Inklusivitas	SMP	54,98
12	D,4 Iklim Keamanan	SD	75,19
13	D,4 Iklim Keamanan	SMP	65,10
14	D,8 Iklim Kebinekaan	SD	70,88
15	D,8 Iklim Kebinekaan	SMP	67,78

2.2.3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024, terdapat kesenjangan yang signifikan antar kabupaten/kota dengan rata-rata provinsi sebesar 60,42 poin dalam kategori sedang. Kota Bima menunjukkan capaian tertinggi dengan skor 69,03 poin (kategori sedang), diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan dengan 60,42 poin, Kota Mataram 59,71 poin, dan Kabupaten Sumbawa Barat 59,20 poin. Kabupaten Sumbawa menempati posisi tengah dengan 57,04 poin, sementara beberapa kabupaten lainnya masih berada dalam kategori rendah seperti Kabupaten Lombok Utara (66,13 poin), Kabupaten Lombok Timur (45,24 poin), Kabupaten Lombok Barat (43,60 poin), Kabupaten Dompu (38,88 poin), dan Kabupaten Lombok Tengah (38,01 poin). Kabupaten Bima menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan dengan skor terendah yaitu 29,46 poin dalam kategori sangat rendah, yang kontras dengan pencapaian Kota Bima yang berada di peringkat teratas.

Disparitas IPLM yang tajam antar kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dijelaskan melalui berbagai faktor infrastruktur, geografis, dan sosial ekonomi. Kota Bima dan Kota Mataram sebagai pusat perkotaan memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan perpustakaan, toko buku, akses internet, fasilitas pendidikan, dan program literasi yang lebih komprehensif, serta tingkat pendidikan masyarakat yang relatif lebih tinggi. Sebaliknya, Kabupaten Bima dan kabupaten-kabupaten dengan skor rendah kemungkinan menghadapi tantangan geografis berupa daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap bahan bacaan, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih fokus pada kebutuhan dasar. Faktor budaya dan tradisi lisan yang masih kuat, rendahnya program literasi di tingkat desa, keterbatasan tenaga pendidik yang berkualitas, serta kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam



pengembangan program literasi masyarakat turut berkontribusi terhadap rendahnya indeks literasi.

Tabel 2.44.

Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Bima Tahun 2024

No	Nama Provinsi Kabupaten Kota	IPLM (Poin)	Kategori
1	Kabupaten Lombok Barat	43,60	Rendah
2	Kabupaten Lombok Tengah	38,01	Rendah
3	Kabupaten Lombok Timur	45,24	Rendah
4	Kabupaten Sumbawa	57,04	Sedang
5	Kabupaten Dompu	38,88	Rendah
6	Kabupaten Bima	29,46	Sangat Rendah
7	Kabupaten Sumbawa Barat	58,20	Sedang
8	Kabupaten Lombok Utara	66,13	Sedang
9	Kota Mataram	59,71	Sedang
10	Kota Bima	69,03	Sedang
Provinsi Nusa Tenggara Barat		60,42	Sedang

Sumber: Satu Data NTB

2.2.3.5. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital merupakan suatu ukuran komprehensif yang menggambarkan tingkat kemampuan individu atau masyarakat dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis (seperti penggunaan perangkat dan aplikasi), tetapi juga aspek kognitif (pemahaman informasi digital), sosial (etika berinteraksi di ruang digital), serta keamanan (proteksi data dan privasi). Indeks ini sering diukur melalui berbagai dimensi, seperti keterampilan digital, pengetahuan informasi, kesadaran keamanan siber, dan etika bermedia digital.

Tabel 33. Nilai IMDI Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gambar 2.59.

Indeks Masyarakat Digital Daerah (IMDI) Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital



Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaan. Nilai IMDI Kabupaten Bima masih relatif lebih rendah di dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Nilai ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya IMDI yaitu ketersediaan jaringan internet yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan.

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja mengacu pada proporsi pekerja yang terdaftar dan aktif dalam program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara atau lembaga terkait. Jaminan sosial tenaga kerja mencakup berbagai skema perlindungan, seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya dalam menghadapi risiko sosial-ekonomi. Berikut ini capaian *Universal Coverage Jamsostek* (UCJ) Kabupaten Bima dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

Tabel 2.45.

Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kabupaten/Kota di NTB (Per 30 April 2025)

No	Kab/Kota	Jumlah Pekerja			Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan			% UCJ			Belum Terlindungi BPJS TK		
		PU	BPU	Total	PU	BPU	Total	PU	BPU	Total	PU	BPU	Total
a	b	c	d	e	f	g	h	i=t/c	j=g/d	k=j/f	o=c-g	p=d-h	r=f-j
1	Bima	44,986	110,133	155,119	29,324	9,318	38,642	65.2%	8.5%	24.91%	15,662	100,815	116,477
2	Dompu	25,232	52,539	77,771	11,589	4,434	16,023	45.9%	8.4%	20.60%	13,643	48,105	61,748
3	Kota Bima	31,294	30,779	62,073	14,098	4,064	18,162	45.1%	13.2%	29.26%	17,196	26,715	43,911
4	Kota Mataram	123,876	75,032	198,908	46,674	19,007	65,681	37.7%	25.3%	33.02%	77,202	56,025	133,227
5	Lombok Barat	115,928	140,427	256,355	47,309	18,654	65,963	40.8%	13.3%	25.73%	68,619	121,773	190,392
6	Lombok Tengah	92,123	263,578	355,701	75,662	80,567	156,229	82.1%	30.6%	43.92%	16,461	183,011	199,472
7	Lombok Timur	101,856	315,949	417,805	88,498	52,052	140,550	86.9%	16.5%	33.64%	13,358	263,897	277,255
8	Lombok Utara	21,387	51,389	72,776	16,533	13,698	30,231	77.3%	26.7%	41.54%	4,854	37,691	42,545
9	Sumbawa	49,649	109,095	158,744	32,996	10,116	43,112	66.5%	9.3%	27.16%	16,653	98,979	115,632
10	Sumbawa Barat	25,221	27,958	53,179	14,525	3,143	17,668	57.6%	11.2%	33.22%	10,696	24,815	35,511
Total		631,552	1,176,879	1,808,431	377,208	215,053	592,261	59.7%	18.3%	32.75%	254,344	961,826	1,216,170

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Keterangan UCJ:

- Coverage NIK Tunggal dan Segmen Tunggal
- Data dikecualikan dari ASN, TNI/Polri, Pekerja Keluarga Tidak Diupah, Pekerja Usia Dibawah 16 Tahun dan Pengangguran Terbuka
- Satuan Target % tetap meskipun data potensi update
- UCJ : Universal Coverage Jamsostek
- PU : Penerima Upah (Pekerja Formal)
- BPU : Bukan Penerima Upah (Pekerja informal)

2.2.4.2. Rasio Penduduk yang bekerja

Pada periode tahun 2020 hingga 2024, kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Bima menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk usia kerja serta jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah penduduk usia kerja meningkat dari 378.109 jiwa pada tahun 2020 menjadi 404.713 jiwa pada tahun 2024. Selaras dengan itu, jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan signifikan dari 248.447 jiwa pada tahun 2020 menjadi 308.752 jiwa pada tahun 2024. Rasio Penduduk yang Bekerja (dapat dipahami sebagai persentase penduduk usia kerja yang bekerja) mengalami perubahan selama periode tersebut, dengan angka TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) yang tinggi pada awal periode mencapai 97,11% di tahun 2020, namun menurun secara bertahap menjadi 78,00% pada tahun 2024.



Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan fluktuasi dengan nilai rendah pada tahun 2021 sebesar 1,58%, kemudian naik lagi menjadi 2,19% pada tahun 2024.

Jumlah penduduk yang tercatat sebagai pengangguran sempat menurun drastis dari 7.395 jiwa di tahun 2020 menjadi 4.079 jiwa pada 2021, tetapi kemudian meningkat kembali hingga mencapai 6.928 jiwa pada tahun 2024. Sedangkan total angkatan kerja yang merupakan gabungan antara penduduk yang bekerja dan pengangguran, juga mengalami pertumbuhan dari 255.842 jiwa pada 2020 menjadi 315.680 jiwa pada 2024. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa sambil jumlah penduduk usia kerja dan yang bekerja semakin bertambah, terdapat penurunan partisipasi angkatan kerja yang kemungkinan mengindikasikan adanya perubahan pola atau kondisi di pasar tenaga kerja Kabupaten Bima. Namun tingkat pengangguran tetap relatif rendah sepanjang periode, yang dapat dipandang sebagai sinyal positif meskipun ada sedikit kenaikan di tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat pengangguran Kabupaten Bima tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bima Tahun 2020 - 2024

Tahun	Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	Bekerja (Jiwa)	Pengangguran (Jiwa)	Total Angkatan Kerja (Jiwa)	Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	TPAK (%)	TPT (%)
2020	378.109	248.447	7.395	255.842	98.178	97,11	2,89
2021	359.948	253.817	4.079	257.896	102.052	98,42	1,58
2022	365.449	261.761	6.099	267.860	97.589	97,72	2,28
2023	398.268	293.494	6.439	299.933	98.335	75,31	2,15
2024	404.713	308.752	6.928	315.680	89.033	78,00	2,19

Sumber data : Kabupaten Bima dalam Angka 2025

Pada periode tahun 2021 hingga 2024, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Bima yang aktif dalam angkatan kerja terus mengalami peningkatan, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk secara keseluruhan. Total angkatan kerja meningkat dari 257.896 jiwa pada tahun 2021 menjadi 315.680 jiwa pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, penduduk yang bekerja juga bertambah signifikan, meningkat dari 253.817 jiwa pada 2021 menjadi 308.752 jiwa pada 2024, menandakan peningkatan partisipasi kerja di pasar tenaga kerja lokal.

Dari segi pengangguran, jumlahnya mengalami fluktuasi dengan kenaikan dari 4.079 jiwa di tahun 2021 menjadi 6.928 jiwa pada 2024, menunjukkan adanya tantangan di pasar tenaga kerja yang perlu diwaspadai. Sementara itu, kelompok yang bukan angkatan kerja justru menurun dari 102.052 jiwa pada 2021 menjadi 89.003 jiwa pada 2024. Dari kelompok bukan angkatan kerja ini, sebagian besar didominasi oleh penduduk yang mengurus rumah tangga, yang jumlahnya menurun dari 67.203 jiwa pada 2021 menjadi 51.732 jiwa pada 2024. Kelompok yang sedang menempuh pendidikan juga berfluktuasi, dengan jumlah turun dari 15.188 jiwa pada 2021 menjadi 20.638 jiwa pada 2024. Terakhir, kategori lainnya (yang tidak bekerja dan tidak sekolah atau mengurus rumah tangga) juga menurun dari 19.661 jiwa menjadi 16.663 jiwa dalam periode yang sama.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Bima menunjukkan kecenderungan meningkat, namun dinamika pengangguran dan perubahan status bukan angkatan kerja perlu menjadi perhatian dalam upaya



peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut tabel rincian nya.

Tabel 2.47.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bima tahun 2021-2024

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin Laki-laki dan Perempuan			
	2021	2022	2023	2024
I. Angkatan Kerja	257.896	267.860	299.933	315.680
1. Bekerja	253.817	261.761	293.494	308.752
2. Pengangguran	4.079	6.099	6.439	6.928
II. Bukan Angkatan Kerja	102.052	97.589	98.335	89.003
1. Sekolah	15.188	22.830	21.921	20.638
2. Mengurus Rumah Tangga	67.203	55.266	57.384	51.732
3. Lainnya	19.661	19.493	19.030	16.663
Total	359.948	365.449	398.268	404.713

Sumber: BPS Kabupaten Bima Tahun 2025

Pada periode 2020 hingga 2024, jumlah sarana sosial di Kabupaten Bima mengalami peningkatan yang cukup signifikan, menunjukkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat jaringan sosial dan fasilitas kesejahteraan. Secara keseluruhan, total unit sarana sosial meningkat dari 58 unit pada tahun 2020 menjadi 71 unit pada tahun 2024. Detailnya, sarana Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) bertambah dari 6 unit pada tahun 2020 menjadi 11 unit pada tahun 2022 dan mempertahankan jumlah tersebut hingga tahun 2024. Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) juga mengalami pertumbuhan dari 32 unit pada tahun 2020 menjadi 39 unit pada tahun 2024. Sementara itu, Panti Rehabilitasi tetap stabil dengan jumlah 2 unit sepanjang periode tersebut. Sayangnya, sarana Rumah Singgah masih belum tersedia selama lima tahun berturut-turut sejak 2020 hingga 2024. Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKS PD) mengalami peningkatan sedikit dari 18 unit pada tahun 2020 menjadi 19 unit pada tahun 2023 dan tetap di angka tersebut pada tahun 2024. Meningkatnya jumlah sarana sosial ini, Kabupaten Bima menunjukkan komitmen untuk memberikan layanan sosial yang lebih baik dan meningkat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Tabel 2.48.

Jumlah Prasarana Sosial Kabupaten Bima Tahun 2020 - 2024

No	Sarana Sosial	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU)	6	8	11	11	11
2	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	32	32	35	36	39
3	Panti Rehabilitasi	2	2	2	2	2
4	Rumah Singgah	0	0	0	0	0
5	Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKS PD)	18	18	18	19	19
Jumlah (unit)		58	60	66	68	71

Sumber: Dinas Sosial Kab. Bima 2025



2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

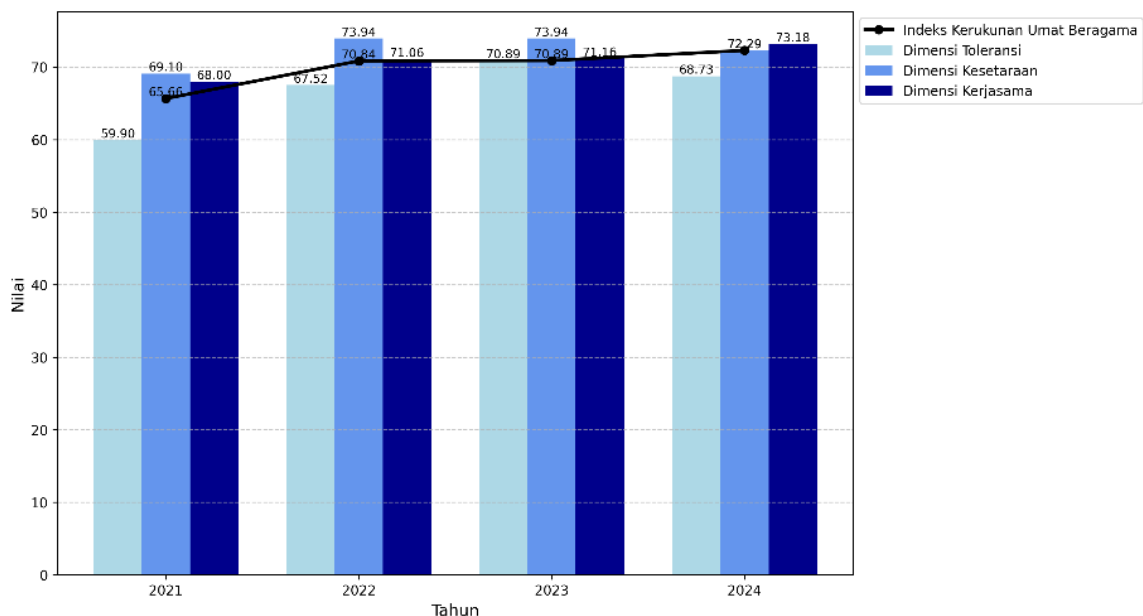
2.2.5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah pengukuran terhadap kondisi kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Survei ini menilai kerukunan berdasarkan tiga dimensi utama: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Kondisi daerah yang memiliki keberagaman dalam kepercayaan dengan beragama maslahat dan berkebudayaan maju menjadi modal sosial dalam pembangunan daerah. Penguatan peran agama menjadi krusial sebagai landasan spiritual, etika, moral. Sejalan dengan peran agama, peran kebudayaan adalah memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa melalui pemajuan dan pelestarian kebudayaan daerah. Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan, dan indikator terkait lainnya memberikan gambaran kondisi eksistenng beragama maslahat dan berkebudayaan maju. Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan suatu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir dan masuk dalam kategori TINGGI, walaupun masih berada di bawah angka nasional. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kerukunan umat beragama di NTB. Upaya seperti deklarasi kerukunan dan peningkatan toleransi terus digalakkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Sebagai bagian dari Provinsi NTB, Kabupaten Bima turut mengambil peran penting dalam membangun kerukunan umat beragama yang ditandai dengan nilai KUB yang meningkat di tingkat provinsi. Kabupaten Bima yang memiliki keberagaman agama dan kultural, menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam memperkuat nilai toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar umat beragama. Keberagaman ini dapat menjadi modal sosial yang sangat berharga apabila dikelola dengan baik melalui penguatan nilai-nilai agama yang etis dan moral serta pengembangan budaya sebagai sumber karakter dan jati diri daerah. Karena Kabupaten Bima adalah bagian integral dari NTB, keberhasilan peningkatan Indeks KUB provinsi juga dapat dijadikan gambaran optimism dan arah kebijakan yang dapat diadaptasi di Kabupaten Bima. Dengan mengacu pada praktik-praktik baik yang diterapkan di NTB secara keseluruhan, Kabupaten Bima berpotensi untuk turut meningkatkan kerukunan umat beragama melalui pendekatan partisipatif antara agama dan budaya, yang sekaligus memperkuat identitas sosial dan kebangsaan.



Perbandingan Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Dimensi Pendukungnya (2021-2024)



Gambar 2.60.

Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021-2024

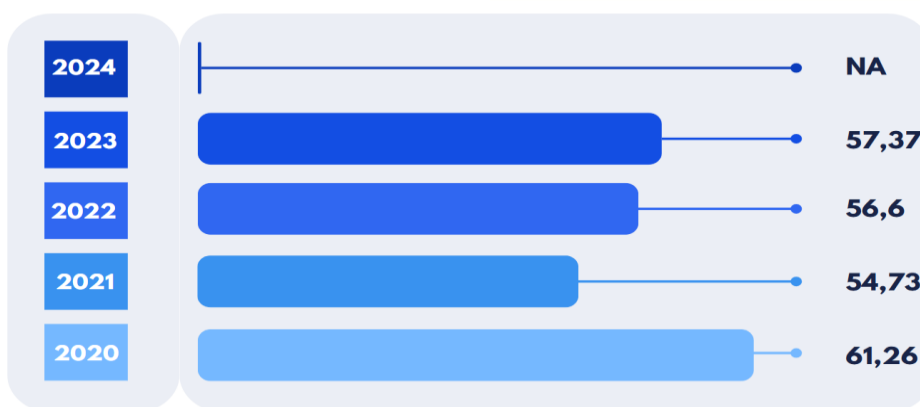
Sumber: Ranwal RPJMD NTB, diolah

2.2.5.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bima belum dilakukan perhitungan. Saat ini perhitungan indeks hanya pada level Provinsi. Berdasarkan Indeks Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, terdapat penurunan sebesar 3,89 poin dari tahun 2020 hingga 2023, menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan dan mengembangkan aspek kebudayaan di provinsi tersebut. Fluktuasi Indeks Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dikaitkan dengan berbagai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi dinamika kebudayaan masyarakat. Penurunan signifikan pada tahun 2021 kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas kebudayaan, penutupan tempat-tempat seni dan budaya, pembatalan festival dan acara kebudayaan, serta berkurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya tradisional. Faktor lain yang berkontribusi meliputi modernisasi dan globalisasi yang menggeser preferensi generasi muda dari budaya tradisional ke budaya populer, keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk program pengembangan kebudayaan, serta kurangnya regenerasi pelaku seni dan budaya tradisional. Peningkatan pada 2023 menunjukkan adanya upaya pemulihan melalui revitalisasi program kebudayaan, digitalisasi warisan budaya, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya lokal.



Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi NTB, Kabupaten Bima ikut merasakan dampak dari tren penurunan IPK di tingkat provinsi. Kabupaten Bima sebagai daerah dengan kekayaan budaya lokal yang beragam dan kuat perlu menyesuaikan dengan berbagai dinamika eksternal dan internal yang sama dialami provinsi. Karena Kabupaten Bima merupakan bagian integral dari NTB, maka fluktuasi IPK provinsi menjadi refleksi sekaligus gambaran tantangan yang dihadapi Kabupaten Bima. Upaya pemulihan IPK di NTB melalui revitalisasi budaya dan penerapan teknologi digital dapat menjadi referensi strategi bagi Kabupaten Bima dalam meningkatkan aspek kebudayaan. Peran aktif pemerintah daerah, pelaku budaya, dan masyarakat sebagai pilar utama dalam pengembangan kebudayaan lokal sangat menentukan keberhasilan peningkatan IPK di Kabupaten Bima ke depan.



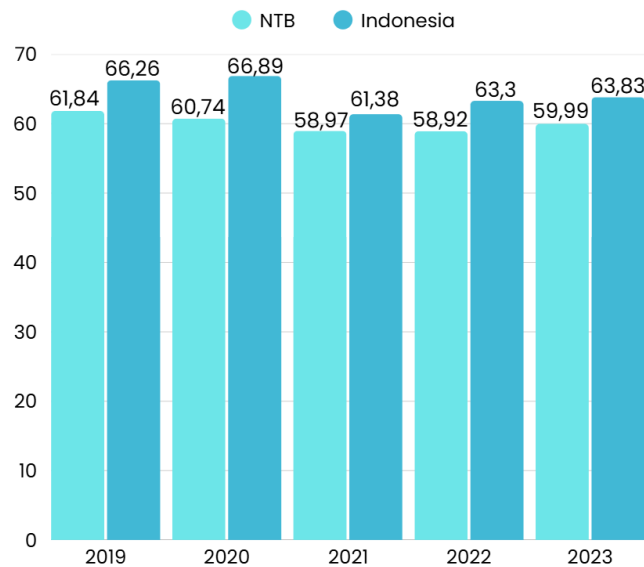
Gambar 2.61.
Indeks Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2024
Sumber: Satu Data Nusa Tenggara Barat

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.2.6.1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan perlindungan anak, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 2019 hingga 2023 menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung stabil dengan nilai yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2019, nilai IPA NTB tercatat sebesar sekitar 61,84 dan mengalami penurunan tipis pada tahun 2020 menjadi 60,74. Pada tahun 2021, indeks ini kembali turun menjadi 58,97, kemudian hampir stagnan pada tahun 2022 dengan nilai 58,92, dan menunjukkan kenaikan sedikit pada tahun 2023 menjadi 59,99.

Jika dibandingkan dengan nilai nasional Indonesia yang berada di kisaran 66,26 sampai 63,83 selama lima tahun tersebut, nilai IPA NTB secara umum masih berada di bawah rata-rata nasional, walaupun perbedaan nilainya relatif tidak terlalu besar dan menunjukkan tren kenaikan yang mengarah ke perbaikan. Hal ini menggambarkan bahwa perlindungan anak di NTB sudah cukup diperhatikan dengan adanya usaha peningkatan, namun masih perlu penguatan agar dapat mencapai atau melebihi standar nasional. Perubahan nilai IPA ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah daerah, program-program sosial, kesadaran masyarakat, dan kondisi sosial ekonomi yang mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak di NTB.



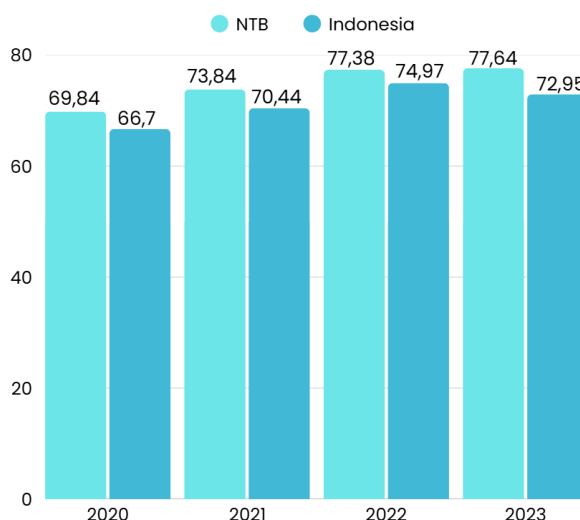
Gambar 2.62.

Perbandingan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Ranwal RPJMD NTB 2025-2029

2.2.6.2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPK-Keluarga) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga telah tercapai di suatu wilayah. Secara umum, indeks kualitas keluarga di Provinsi NTB menunjukkan tren positif yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, Nilai IKK NTB mencapai 69,84, lebih tinggi dibandingkan nilai nasional yang hanya mencapai 66,7. Tahun berikutnya, NTB terus mengalami peningkatan signifikan, dengan nilai IKK sebesar 73,84 di 2021, unggul dari nasional yang berada di angka 70,44. Pada 2022, nilai IKK NTB meningkat menjadi 77,38, sementara nasional mengalami sedikit penurunan ke 74,97. Pada tahun terakhir yang tersedia, 2023, NTB mempertahankan performa tinggi dengan nilai 77,64, lebih tinggi dibandingkan indeks nasional yang turun ke 72,95. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa Provinsi NTB memiliki kualitas keluarga yang lebih baik dan pertumbuhan yang lebih stabil dibandingkan rata-rata nasional selama periode 2020-2023. Hal ini menunjukkan efektivitas program dan kebijakan lokal di NTB yang berhasil mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga lebih baik dari kondisi nasional secara umum.



Gambar 2.63.

Perbandingan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2020-2023

Sumber: Ranwal RPJMD NTB 2025-2029

2.2.6.3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang mengukur ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan keterwakilan politik), serta partisipasi dalam pasar kerja. Berdasarkan data grafik, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bima mengalami tren penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. IKG Kabupaten Bima menunjukkan nilai tertinggi pada tahun 2020 sebesar 0,601, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 0,479 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender di kabupaten tersebut, di mana semakin rendah nilai IKG menunjukkan semakin baik kondisi kesetaraan gender.

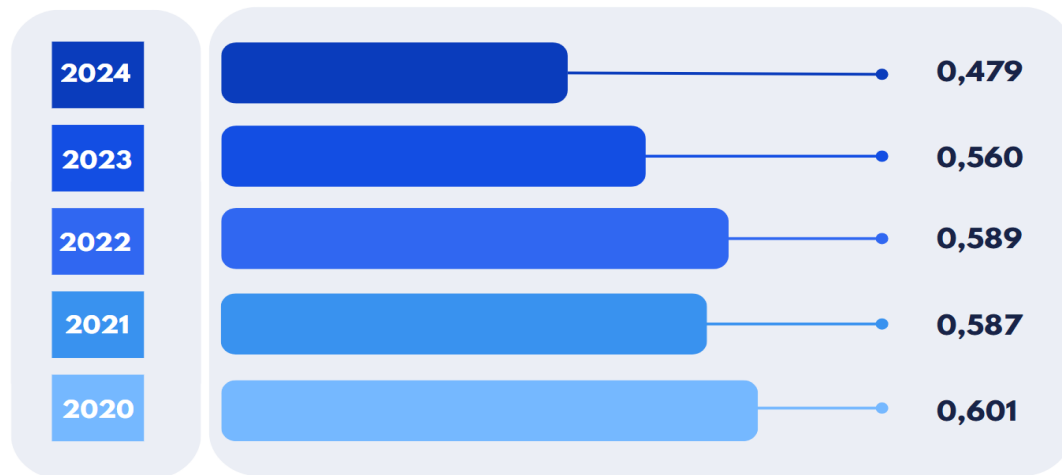
Pola penurunan IKG Kabupaten Bima dapat dibagi menjadi beberapa periode yang berbeda. Pada periode 2020-2021, terjadi penurunan yang relatif kecil dari 0,601 menjadi 0,587, dengan selisih 0,014 poin. Tahun 2021-2022 menunjukkan penurunan yang sangat minimal, hanya 0,002 poin menjadi 0,589, bahkan terjadi sedikit peningkatan. Periode 2022-2023 kembali menunjukkan penurunan sebesar 0,029 poin menjadi 0,560. Penurunan paling signifikan terjadi pada periode 2023-2024 dengan selisih 0,081 poin, dari 0,560 menjadi 0,479.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan IKG Kabupaten Bima dapat dikaitkan dengan beberapa dimensi pembentuk indeks ini. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan indikator perempuan 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun, yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan akses terhadap kesehatan reproduksi. Selain itu, dimensi pemberdayaan juga mengalami perbaikan yang dapat dilihat dari peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Faktor pendidikan juga berperan penting, di mana semakin baiknya akses dan kualitas pendidikan untuk perempuan dapat mengurangi kesenjangan gender dalam bidang pendidikan.

Penurunan tajam pada tahun 2024 kemungkinan disebabkan oleh implementasi program-program kesetaraan gender yang lebih intensif, peningkatan partisipasi ekonomi perempuan, serta kebijakan-kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan di tingkat



daerah. Kondisi ini sejalan dengan tren nasional Indonesia yang juga mengalami penurunan IKG, menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kesetaraan gender mulai menunjukkan hasil yang positif di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bima.



Gambar 2.64.
Indeks Ketimpangan Gender (skala) Kabupaten Bima tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

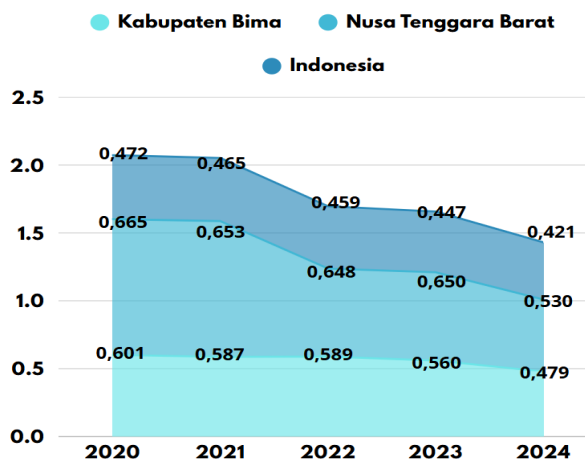
Berdasarkan data perbandingan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) periode 2020-2024, ketiga wilayah menunjukkan tren penurunan yang konsisten dengan pola dan tingkat pencapaian yang berbeda. Indonesia sebagai agregat nasional memiliki IKG terendah di antara ketiga wilayah, dimulai dari 0,472 pada tahun 2020 dan mencapai 0,421 pada tahun 2024. Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati posisi tengah dengan IKG awal 0,665 pada tahun 2020 dan berhasil turun menjadi 0,530 pada tahun 2024. Kabupaten Bima memiliki IKG yang berada di antara tingkat nasional dan provinsi, dengan nilai awal 0,601 pada tahun 2020 dan mencapai 0,479 pada tahun 2024.

Pola penurunan IKG menunjukkan karakteristik yang menarik di masing-masing wilayah. Indonesia mengalami penurunan yang relatif stabil dan gradual sepanjang periode pengamatan, dengan penurunan rata-rata sekitar 0,013 poin per tahun. Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan yang lebih bervariasi, dengan penurunan signifikan pada periode 2020-2021 sebesar 0,012 poin, kemudian mengalami penurunan minimal pada 2021-2022, diikuti penurunan yang kembali menguat pada periode berikutnya. Kabupaten Bima menunjukkan pola yang unik dengan penurunan bertahap pada tahun-tahun awal, namun mengalami akselerasi penurunan yang sangat signifikan pada periode 2023-2024 dengan selisih 0,081 poin.

Perbandingan posisi relatif menunjukkan dinamika yang menarik dalam pencapaian kesetaraan gender. Pada awal periode 2020, kesenjangan antara Kabupaten Bima dan tingkat nasional mencapai 0,129 poin, sementara dengan Provinsi NTB terpaut 0,064 poin. Namun, pada akhir periode 2024, kesenjangan Kabupaten Bima dengan tingkat nasional berkurang menjadi 0,058 poin, bahkan berhasil mencapai posisi yang lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi dengan selisih 0,051 poin. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bima mengalami percepatan perbaikan kesetaraan gender yang lebih cepat dibandingkan rata-rata provinsi dan mendekati capaian nasional.



Kinerja Kabupaten Bima dalam menurunkan IKG patut diapresiasi karena berhasil mencapai penurunan total sebesar 0,122 poin atau sekitar 20,3% dari nilai awal. Angka ini lebih tinggi dibandingkan penurunan Provinsi NTB yang mencapai 0,135 poin (20,3%) dan Indonesia yang mencapai 0,051 poin (10,8%). Percepatan penurunan IKG Kabupaten Bima, terutama pada tahun 2024, mengindikasikan adanya implementasi kebijakan dan program kesetaraan gender yang efektif di tingkat kabupaten, sehingga mampu mengejar ketertinggalan dan bahkan melampaui rata-rata pencapaian tingkat provinsi dalam hal kesetaraan gender.



Gambar 2.65.
Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender (skala) Kabupaten Bima,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

2.2.6.4. Indeks Pembangunan Gender

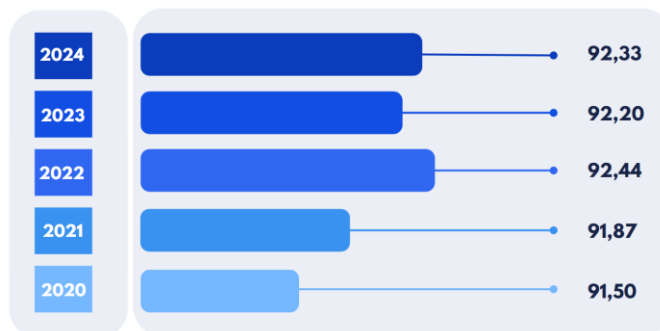
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah atau negara. Berdasarkan data grafik yang ditampilkan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bima menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020-2024, meskipun dengan fluktuasi kecil pada tahun-tahun tertentu. IPG Kabupaten Bima dimulai dari nilai 91,50 pada tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 92,33 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pencapaian pembangunan manusia yang lebih berkesetaraan gender, di mana semakin tinggi nilai IPG menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Pola perkembangan IPG Kabupaten Bima dapat dibagi menjadi beberapa fase yang menunjukkan dinamika pembangunan gender di wilayah tersebut. Pada periode 2020-2021, terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 0,37 poin dari 91,50 menjadi 91,87. Tahun 2021-2022 menunjukkan akselerasi peningkatan yang lebih tinggi dengan kenaikan 0,57 poin menjadi 92,44, yang merupakan lompatan terbesar dalam periode pengamatan. Namun, pada periode 2022-2023 terjadi sedikit penurunan sebesar 0,24 poin menjadi 92,20, sebelum kembali mengalami peningkatan kecil pada tahun 2024 menjadi 92,33 dengan kenaikan 0,13 poin.



Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan IPG Kabupaten Bima dapat dikaitkan dengan perbaikan dalam komponen-komponen pembentuk indeks ini. IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki dengan pengukuran yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah serta pengeluaran per kapita yang berfokus pada sisi gender. Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, baik dalam hal rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah, menjadi faktor kunci dalam mendorong naiknya IPG. Selain itu, perbaikan dalam bidang kesehatan yang tercermin dari peningkatan angka harapan hidup perempuan, serta peningkatan partisipasi ekonomi perempuan yang berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita, turut berkontribusi pada tren positif IPG.

Fluktuasi yang terjadi pada tahun 2023 kemungkinan disebabkan oleh dampak pemulihan pasca-pandemi yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan, atau adanya perubahan metodologi pengukuran tertentu. Namun, pemulihan dan peningkatan kembali pada tahun 2024 menunjukkan bahwa program-program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Kabupaten Bima mulai menunjukkan hasil yang positif. Pertumbuhan indeks pembangunan manusia pada tahun 2024 terutama didorong oleh pemulihan dalam dimensi standar hidup yang diwakili oleh pengeluaran riil per kapita, juga berkontribusi pada peningkatan IPG. Secara keseluruhan, pencapaian IPG Kabupaten Bima yang mencapai 92,33 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin mengecil, dengan perempuan mencapai sekitar 92,33% dari capaian pembangunan manusia laki-laki.



Gambar 2.66.

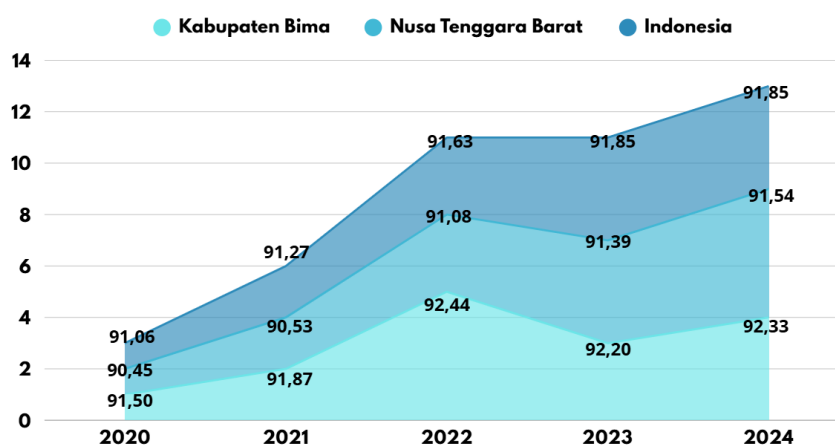
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bima tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, diolah

Berdasarkan perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) antara Kabupaten Bima, NTB, dan Nasional, Kabupaten Bima memulai tahun 2020 dengan IPG sekitar 90,45, sedikit di bawah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sekitar 91,06 dan Indonesia sebesar 91,50. Kesenjangan ini tetap terlihat hingga 2024 di mana Kabupaten Bima mencapai 92,33, Provinsi NTB 91,54, dan Nasional 91,85. Menariknya, meskipun NTB umumnya berada di bawah nasional, pada 2024 Provinsi NTB sedikit naik melewati nasional, sedangkan Kabupaten Bima tetap yang terendah di antara ketiganya. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Kabupaten Bima yang merupakan daerah dengan karakteristik ekonomi dan sosial yang lebih tradisional dan rural mungkin menghadapi tantangan lebih besar dalam mencapai kesetaraan gender, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan yang belum merata. Sementara itu, Provinsi NTB sebagai wilayah yang lebih maju secara infrastruktur dan administratif cenderung memiliki



program yang lebih efektif dalam pembangunan gender, sehingga IPG-nya lebih membaik dan bisa mendekati atau melampaui nasional. Di tingkat nasional, faktor kebijakan pemerintah pusat dan implementasi program pemberdayaan perempuan serta perlindungan hak-hak gender yang lebih masif menjadi pendorong utama stabilitas dan peningkatan IPG. Dengan kata lain, Kabupaten Bima masih memerlukan dorongan dan fokus yang lebih besar dalam pengentasan kesenjangan gender agar bisa menyaingi pencapaian tingkat Provinsi dan Nasional. Hal ini meliputi penguatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta peningkatan layanan kesehatan yang komprehensif. Sementara itu, Provinsi NTB dan Nasional sudah menunjukkan tren positif yang relatif stabil dalam pembangunan gender sejak 2020 hingga 2024.



Gambar 2.67.
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bima,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Indonesia tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

2.2.6.5. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap anggotanya, sehingga keluarga tersebut hanya fokus pada upaya untuk memulihkan keadaan perekonomian saja, tanpa mementingkan sosialisasi antar keluarga. Data untuk jumlah keluarga pra sejahtera di Kabupaten Bima pada tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia. Namun, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 29.081 keluarga pra sejahtera, mengalami peningkatan sebanyak 7.032 keluarga dibandingkan tahun sebelumnya (meskipun data tahun sebelumnya tidak tersedia untuk perbandingan persentase). Pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah keluarga pra sejahtera menjadi 22.066, berkurang sebanyak 7.015 keluarga atau turun sekitar 31,79% dari tahun 2022. Tren penurunan ini terus berlanjut pada tahun 2024 dengan jumlah keluarga pra sejahtera yang semakin menurun drastis menjadi 10.098 keluarga, berkurang sebanyak 11.968 keluarga atau turun sangat signifikan sebesar 118,51% dibandingkan tahun 2023. Penurunan jumlah keluarga pra sejahtera ini mencerminkan perbaikan kesejahteraan di Kabupaten Bima selama periode tersebut.



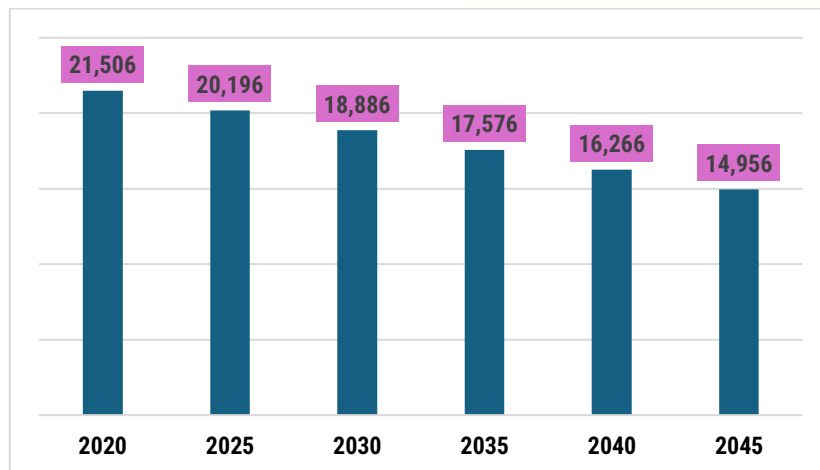
Tabel 2.49.

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Bima Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	Perubahan	
		Naik/Turun	Persen
2020	Tidak tersedia	-	-
2021	Tidak tersedia	-	-
2022	29.081	7.032	(24,18)
2023	22.066	-7.015	(31,79)
2024	10.098	-11.968	(118,51)

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Bima, 2025 (sumber data: New SIGA BKKBN)

Keluarga pra sejahtera mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap anggota keluarganya. Sehingga dari bentuk keluarga tersebut akan fokus untuk memulihkan keadaan perekonomian saja, tanpa mementingkan sosialisasi antar keluarga. Proyeksi jumlah keluarga pra sejahtera di Kabupaten Bima menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2045. Pada tahun 2020, diperkirakan terdapat sebanyak 21.506 keluarga yang tergolong pra sejahtera. Proyeksi ini kemudian sedikit menurun menjadi 20.196 keluarga pada tahun 2025. Penurunan berlanjut secara bertahap pada tahun 2030 jumlahnya diperkirakan menurun menjadi 18.886 keluarga. Pada tahun 2035, jumlah keluarga pra sejahtera diproyeksikan menjadi 17.576, kemudian turun lagi menjadi 16.266 pada tahun 2040. Pada proyeksi terakhir tahun 2045, jumlah keluarga pra sejahtera diperkirakan mencapai angka terendah yaitu 14.956 keluarga. Tren ini menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bima selama lebih dari dua dekade ke depan, dengan jumlah keluarga pra sejahtera yang berkurang secara bertahap seiring dengan upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan sosial.



Gambar 2.68.

Proyeksi Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Bima Tahun 2020 – 2045

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Bima 2025

2.2.6.6. Rasio Ibu Anak (*Child-Women Ratio*)

Rasio Ibu-Anak adalah ukuran demografi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah balita (usia 0-4 tahun) dengan jumlah wanita usia reproduktif (usia 15-49 tahun) di suatu wilayah. Dengan kata lain, CWR menunjukkan beban ibu mengurus anak. Angka yang



dihasilkan CWR dapat digunakan sebagai indikator fertilitas jika tidak terdapat data mengenai kelahiran. Semakin tinggi nilai CWR maka semakin banyak jumlah balita yang diurus oleh seorang ibu. Batasan angka yang ideal untuk CWR adalah 710 bagi negara kurang berkembang dan 225 bagi negara berkembang. Untuk lebih jelasnya *Child-Woman Ratio* Kabupaten Bima dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.50.
Child-Woman Ratio Kabupaten Bima Tahun 2020 – 2024

Tahun	Kelompok Umur (Tahun)		CWR
	0-4	15-49	
2020	43.614	373.482	117
2021	43.134	376.454	115
2022	42.920	379.961	113
2023	48.885	379.662	129
2024	33.473	392.460	85

Sumber: BPS Kabupaten Bima, 2025

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa, perbandingan Ibu-Anak di Kabupaten Bima dalam rentang waktu lima tahun mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan dari 188 naik menjadi 198 balita (0-4 tahun) per 1000 perempuan (15-49 tahun). Sedangkan tahun 2019 menunjukkan ada penurunan menjadi 197 balita per 1000 perempuan (15-49 tahun). Dengan menurunnya angka perbandingan Ibu dan Anak berarti menurun pula jumlah anak yang diurus oleh seorang ibu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hubungan antara ibu dan anak. Perkiraan rasio Ibu-Anak untuk 25 tahun mendatang yaitu periode tahun 2020 sampai dengan 2045 dengan menampilkan indikator kelompok umur anak yaitu 0-4 tahun dan umur ibu 15-49 tahun. Angka Child Woman Ratio dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.51.
Proyeksi Child-Woman Rasio Tahun 2020 – 2045

Tahun	Kelompok Umur		CWR
	0-4	15-49	
2020	48.554	249.796	19,44
2025	48.628	257.694	18,87
2030	48.702	265.592	18,34
2035	48.776	273.490	17,83
2040	48.850	281.388	17,36
2045	48.924	289.286	16,91

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Bima 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa, proyeksi *Child-Woman Rasio* (CWR) menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten selama periode 2020 hingga 2045. Pada tahun 2020, jumlah CWR tercatat sebesar 19,44. Selanjutnya, angka ini diproyeksikan menurun secara bertahap menjadi 18,87 pada tahun 2025 dan terus menurun menjadi 18,34 pada tahun 2030. Tren penurunan ini juga berlanjut ke tahun-tahun berikutnya dengan CWR sebesar 17,83 pada 2035, kemudian 17,36 pada 2040, dan mencapai angka 16,91 pada proyeksi tahun 2045. Penurunan CWR ini mencerminkan perubahan demografis yang signifikan, di mana jumlah anak usia 0-4 tahun relatif berkurang dibandingkan jumlah wanita usia subur (15-49 tahun). Proyeksi ini bisa mengindikasikan penurunan angka kelahiran per



wanita dimasa depan, yang berdampak pada dinamika kependudukan dan kebutuhan perencanaan pendidikan serta kesehatan masyarakat.

2.2.6.7. Cakupan Bina Keluarga Balita

Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten Bima menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah peserta BKB tercatat sebanyak 58.899 keluarga. Angka ini kemudian meningkat secara bertahap menjadi 60.179 keluarga pada tahun 2021, meskipun kenaikannya relatif kecil sebesar 1.280 keluarga. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan yang cukup signifikan dengan tambahan 10.354 keluarga, sehingga total mencapai 70.533 keluarga. Kemudian pada tahun 2023, cakupan BKB kembali naik sebanyak 8.039 keluarga menjadi 78.572 keluarga. Selanjutnya, pada tahun 2024 cakupan BKB semakin meningkat dengan penambahan 12.789 keluarga, mencapai angka tertinggi selama periode pengamatan yakni 91.361 keluarga. Data ini menggambarkan perkembangan yang positif dalam upaya pembinaan keluarga balita di Kabupaten Bima, yang menunjukkan peningkatan partisipasi dan jangkauan program BKB dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.52.
Cakupan Bina Keluarga Balita Kabupaten Bima Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah BKB	Kenaikan/Penurunan Absolut	Kenaikan/Penurunan (%)
2020	58.899	15.034	Naik
2021	60.179	1.280	Naik
2022	70.533	10.354	Naik
2023	78.572	8.039	Naik
2024	91.361	12.789	Naik

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Bima 2025

Proyeksi Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten Bima menunjukkan stabilitas yang sangat tinggi sepanjang periode 2020 hingga 2045. Data proyeksi memperlihatkan bahwa cakupan BKB diperkirakan akan tetap konstan pada angka 191 tanpa mengalami kenaikan maupun penurunan selama kurun waktu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan dan partisipasi keluarga dalam program BKB diperkirakan tidak berubah secara signifikan dalam jangka panjang. Stabilitas ini dapat mengindikasikan bahwa program BKB telah mencapai titik jenuh dalam hal cakupan atau terdapat batas maksimal yang dapat dicapai dalam konteks sumber daya dan kebutuhan daerah. Upaya untuk meningkatkan cakupan BKB di masa mendatang mungkin memerlukan strategi dan intervensi baru agar dapat mengakomodasi kebutuhan pertumbuhan dan perubahan demografis di Kabupaten Bima.

Tabel 2.53.
Proyeksi Cakupan Bina Keluarga Balita Kabupaten Bima Tahun 2020 -2045.

Tahun	Cakupan BKB	Kenaikan/penurunan Absolut)	Kenaikan / penurunan(%)
2020	191	0	0,00
2025	191	0	0,00
2030	191	0	0,00
2035	191	0	0,00
2040	191	0	0,00
2045	191	0	0,00

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Bima 2025



Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kabupaten Bima menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah peserta BKR tercatat sebanyak 134 keluarga, dengan kenaikan absolut sebesar 19 keluarga dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2021, jumlah peserta tetap stabil di angka 134 keluarga tanpa perubahan jumlah, menunjukkan periode stagnasi sementara. Namun, mulai tahun 2022, cakupan BKR mengalami peningkatan kembali dengan tambahan 13 keluarga, sehingga mencapai 147 keluarga. Tren peningkatan ini berlanjut signifikan pada tahun 2023 dengan tambahan 36 keluarga, menjadikan total peserta 183 keluarga. Pada tahun 2024, cakupan BKR masih menunjukkan pertumbuhan meskipun lebih kecil, yaitu naik 2 keluarga sehingga mencapai 185 keluarga. Data ini mengindikasikan adanya peningkatan partisipasi keluarga dalam program BKR secara bertahap, yang memberikan sinyal positif terhadap pengembangan pembinaan keluarga remaja di Kabupaten Bima.

Tabel 2.54.

Cakupan Bina Keluarga Remaja Kabupaten Bima Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah BKR	Kenaikan/Penurunan Absolut	Trend
2020	134	19	Naik
2021	134	0	Tetap
2022	147	13	Naik
2023	183	36	Naik
2024	185	2	Naik

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Bima, 2025

Proyeksi cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kabupaten Bima menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan sepanjang periode 2020 hingga 2045. Pada tahun 2020, cakupan BKR tercatat sebanyak 3.218 keluarga. Proyeksi menunjukkan peningkatan yang konsisten dengan jumlah cakupan mencapai 3.933 pada tahun 2025, meningkat sebesar 715 keluarga atau 18,17%. Tren pertumbuhan ini diperkirakan berlanjut secara tajam, dengan cakupan mencapai 5.494 pada tahun 2030, meningkat 1.561 keluarga (28,41%). Pada tahun-tahun berikutnya, cakupan BKR semakin bertambah signifikan, yaitu 7.674 (2035), 10.720 (2040), dan mencapai 14.974 keluarga pada tahun 2045. Kenaikan tahunan secara absolut berkisar antara 1.561 hingga 4.254 keluarga, dengan persentase kenaikan tahunan sekitar 28,4% setelah tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan partisipasi dan dorongan kuat dalam pembinaan keluarga remaja di Kabupaten Bima, yang sangat baik untuk pengembangan kualitas hidup remaja dan generasi muda ke depan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.55.

Proyeksi Cakupan Bina Keluarga Remaja di Kabupaten Bima Tahun 2020 - 2045

Tahun	Cakupan BKR	Kenaikan/penurunan(absolut)	Kenaikan/penurunan(%)
2020	3.218	402	12,49
2025	3.933	715	18,17
2030	5.494	1.561	28,41
2035	7.674	2.180	28,40
2040	10.720	3.046	28,41
2045	14.974	4.254	28,40

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Bima 2025



Cakupan Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kabupaten Bima menunjukkan tren yang umumnya meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah keluarga yang tercakup dalam program BKL tercatat sebanyak 128 keluarga dengan peningkatan absolut sebesar 105 keluarga dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, angka ini tetap stabil pada 128 keluarga tanpa perubahan jumlah, menunjukkan periode stagnasi. Namun, sejak tahun 2022, terjadi peningkatan kembali dengan tambahan 20 keluarga sehingga jumlahnya naik menjadi 145 keluarga. Peningkatan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2023, dengan penambahan 38 keluarga, membawa total cakupan menjadi 183 keluarga. Pada tahun 2024, pertumbuhan masih berlanjut meskipun lebih kecil, yaitu naik 1 keluarga menjadi 184 keluarga. Data ini menggambarkan adanya upaya yang terus-menerus dalam memperluas cakupan pembinaan keluarga lansia di Kabupaten Bima, dengan tren positif yang menunjukkan kesadaran dan partisipasi yang meningkat dari masyarakat.

Tabel 2.56.
Cakupan Bina Keluarga Lansia Kabupaten Bima Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah BKL	Kenaikan/Penurunan Absolut	Kenaikan/Penurunan (%)
2020	128	105	Naik
2021	128	0	Tetap
2022	145	20	Naik
2023	183	38	Naik
2024	184	1	Naik

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Bima 2025

Proyeksi cakupan Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kabupaten Bima menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2020 hingga 2045. Pada tahun 2020, cakupan BKL tercatat sebanyak 5.764 keluarga dengan peningkatan absolut sebanyak 1.080 keluarga (18,73%) dibandingkan periode sebelumnya. Proyeksi untuk tahun 2025 memperkirakan angka ini naik menjadi 7.871 keluarga, meningkat 2.107 keluarga atau 26,76%. Peningkatan yang semakin pesat diperkirakan terjadi antara tahun 2025 hingga 2040, cakupan BKL meningkat drastis menjadi 13.228 (2030), 22.230 (2035), dan mencapai 37.359 keluarga pada tahun 2040 dengan tingkat kenaikan tahunan antara 26,76% hingga sekitar 40,49%. Pada tahun 2045, cakupan BKL diproyeksikan mencapai puncak sebesar 62.784 keluarga, dengan kenaikan absolut sebesar 23.425 keluarga, meskipun persentase kenaikan turun menjadi 37,31%. Data ini mengindikasikan perlunya kesiapan dan penguatan program pembinaan keluarga lansia yang semakin penting seiring dengan pertumbuhan jumlah keluarga lansia, guna menjamin kualitas hidup lansia dan memberikan dukungan yang memadai dalam jangka panjang di Kabupaten Bima.

Tabel 2.57.
Proyeksi Cakupan Bina Keluarga Lansia Kabupaten Bima Tahun 2020 – 2045

Tahun	Cakupan BKL	Kenaikan/penurunan (absolut)	Kenaikan/penurunan(%)
2020	5,764	1.080	18,73
2025	7.871	2.107	26,76
2030	13.228	5.357	40,49
2035	22.230	9.002	40,49
2040	37.359	15.129	40,49
2045	62.784	23.425	37,31

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Bima 2025



2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

2.3.1.1. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ini mengindikasikan beban yang ditanggung oleh kelompok usia produktif untuk mendukung kelompok usia tidak produktif dalam suatu wilayah. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan, menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.

Secara umum, jumlah penduduk usia tidak produktif dan penduduk produktif (usia 15-64 tahun) menunjukkan trend peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Jumlah penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lansia) meningkat dari 167.154 jiwa pada tahun 2020 menjadi 175.073 jiwa pada tahun 2024, atau tumbuh rata-rata sebesar 1,17% per tahun. Penduduk usia produktif meningkat dari 346.951 jiwa pada tahun 2020 menjadi 368.554 jiwa pada tahun 2024 dengan pertumbuhan rata-rata 1,52% per tahun. Berdasarkan perkembangan struktur penduduk tersebut, rasio ketergantungan di Kabupaten Bima mengalami fluktuasi yang relatif stabil, dengan kecenderungan menurun dari 48,18% pada tahun 2020 menjadi 47,50% pada tahun 2024. Rasio ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 48,42%. Pada tahun 2024, rasio ketergantungan menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kabupaten Bima, menanggung sekitar 47 orang usia non-produktif.

Penurunan rasio ketergantungan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2020 mencerminkan berkurangnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif semakin besar dibandingkan penduduk usia non-produktif. Dengan demikian, penurunan rasio ketergantungan pada tahun 2024 dapat mendorong potensi peningkatan produktivitas dan peluang untuk pembangunan ekonomi di Kabupaten Bima. Rasio ketergantungan di Kabupaten Bima tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58.
Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk usia <15 Tahun	135.996	136.865	138.098	138.439	135.164
Jumlah penduduk usia >64 Tahun	31.158	32.590	34.144	35.989	39.909
Jumlah penduduk usia tidak produktif	167.154	169.455	172.242	174.428	175.073
Jumlah penduduk Usia 15-64 Tahun	346.951	350.989	355.710	361.102	368.554
Rasio ketergantungan (%)	48,18	48,28	48,42	48,30	47,50

Sumber data: Kabupaten Bima dalam Angka 2025

2.3.2. IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB industri pengolahan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dalam periode tertentu. Rasio PDRB industri pengolahan di Kabupaten



Bima menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari 2,07% pada tahun 2020 menjadi 2,04% pada tahun 2024. Pada tahun 2020, merupakan capaian rasio PDRB industri pengolahan tertinggi selama periode tersebut, sementara rasio terendah tercatat terjadi pada tahun 2020 dan 2023 sebesar 1,98%. Secara keseluruhan, terdapat penurunan sebesar 0,03 poin persentase dari tahun 2020 hingga 2024.

Rasio PDRB industri pengolahan di Kabupaten Bima yang mengalami fluktuasi dapat dikaitkan dengan berbagai faktor struktural dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi perkembangan sektor manufaktur. Penurunan yang terjadi pada periode 2021-2023 dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu rantai pasok, mengurangi permintaan domestik dan ekspor, serta menyebabkan ketidakpastian investasi di sektor industri pengolahan. Faktor lain yang turut memengaruhi kinerja sektor industri diantaranya keterbatasan infrastruktur pendukung industri, tingginya biaya logistik dan transportasi, kurangnya investasi dalam teknologi dan modernisasi peralatan industri, persaingan dengan produk impor yang lebih murah, keterbatasan akses pembiayaan bagi industri kecil dan menengah, serta kurangnya tenaga kerja terampil di bidang industri pengolahan.



Gambar 2.69.

Rasio PDRB Industri Pengolahan (persen) tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

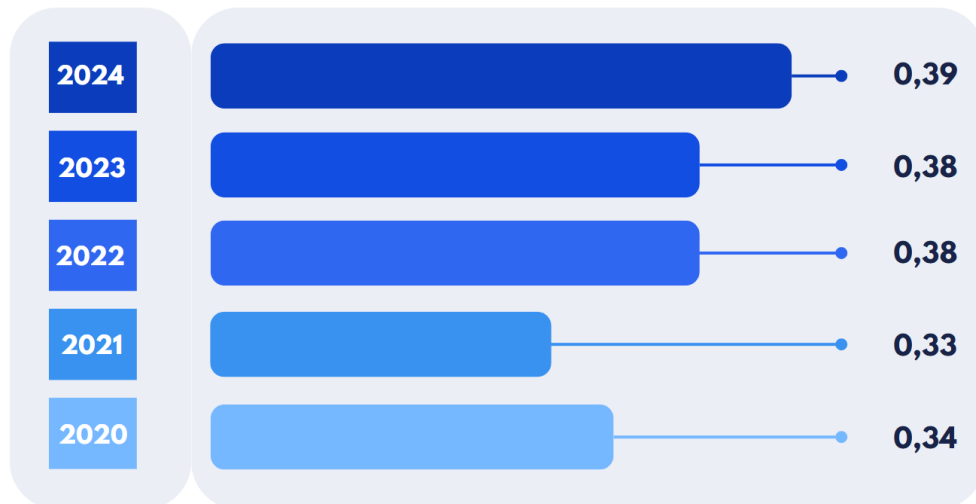
2.3.2.2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rasio PDRB akomodasi makan dan minum mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari 0,34% pada tahun 2020 menjadi 0,39% pada tahun 2024. Capaian pada tahun 2024 merupakan yang tertinggi selama periode tersebut, dengan peningkatan 0,05 poin persentase atau tumbuh 14,7 persen dari tahun 2020. Pada tahun 2021, tercatat merupakan capaian terendah rasio PDRB akomodasi makan dan minum, yaitu sebesar 0,33%.

Rasio PDRB sektor akomodasi makan dan minum yang mengalami fluktuasi dapat dikaitkan dengan dinamika industri pariwisata dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Dampak pandemi COVID-19 selama periode 2020 hingga 2021 menurunkan permintaan terhadap layanan akomodasi dan kuliner. Hal ini disebabkan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat membatasi mobilitas masyarakat, penutupan sementara restoran dan hotel sehingga menurunkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Pemulihan yang terjadi pada periode 2022-2024 menunjukkan adaptasi sektor ini terhadap kondisi normal baru melalui implementasi protokol kesehatan, pengembangan layanan *delivery* dan *takeaway*, serta inovasi dalam model bisnis seperti *outdoor* dining dan



digitalisasi layanan. Faktor lain yang mendukung peningkatan meliputi pertumbuhan ekonomi lokal yang mendorong daya beli masyarakat, perkembangan sektor pariwisata daerah, peningkatan investasi di bidang kuliner dan perhotelan, serta perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengutamakan pengalaman dining dan *hospitality*.



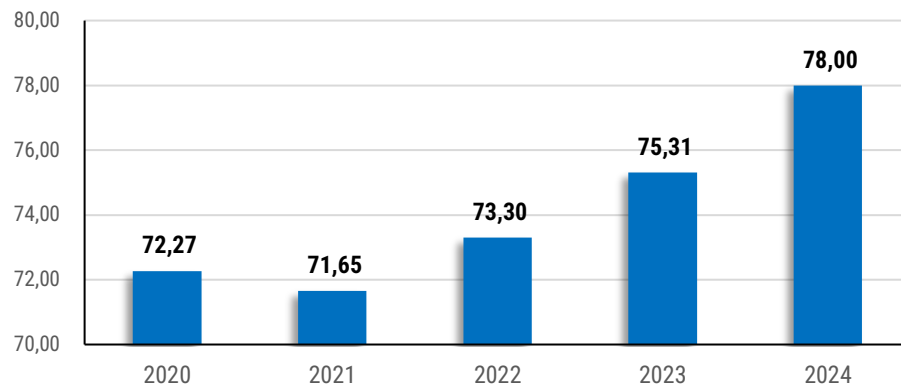
Gambar 2.70.

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (persen) tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

2.3.2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK ini merupakan indikator yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK, menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa suatu perekonomian di suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bima mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari 72,27% pada tahun 2020 menjadi 78% pada tahun 2024. Capaian pada tahun 2024 merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1,94% per tahun. Peningkatan angka TPAK Kabupaten Bima selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Artinya, proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi semakin besar, sehingga potensi tenaga kerja yang tersedia untuk pembangunan di Kabupaten Bima juga meningkat.

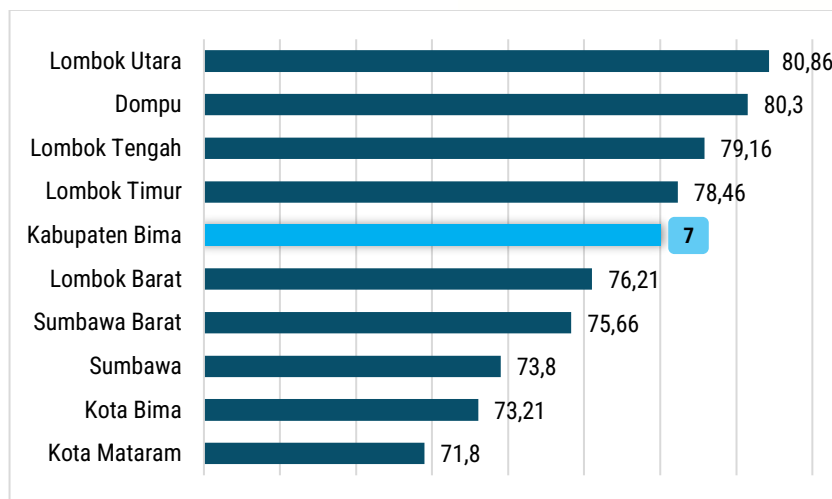


Gambar 2.71.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bima (%), 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, diolah

Peningkatan TPAK di atas, menempatkan Kabupaten Bima di peringkat kelima di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024. Di atas Kabupaten Bima, terdapat Kabupaten Lombok Utara, Dompu, Lombok Tengah, dan Lombok Timur dengan TPAK tertinggi.



Gambar 2.72.

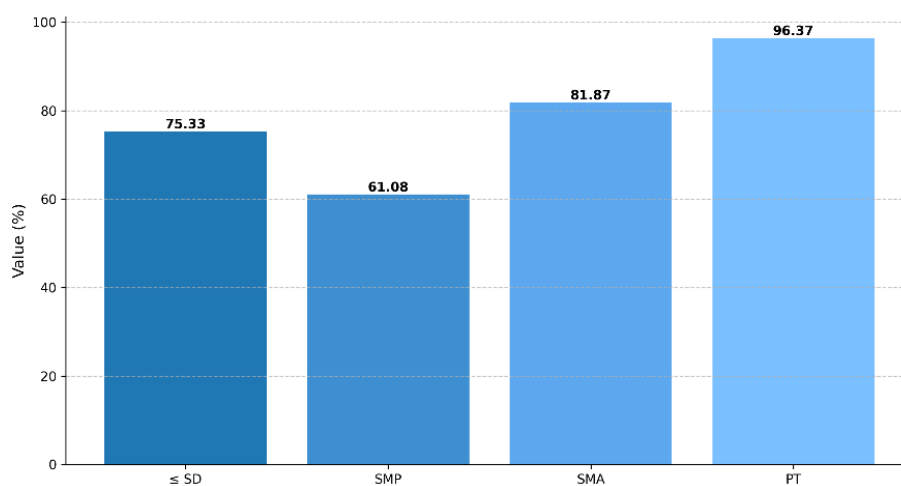
TPAK Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (%) Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, diolah

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bima pada tahun 2024 menunjukkan korelasi positif dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Data menunjukkan bahwa kelompok dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah memiliki TPAK sebesar 75,33%. Angka ini cukup tinggi, mengindikasikan bahwa meskipun dengan pendidikan dasar, sebagian besar masih aktif dalam pasar kerja. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), TPAK sedikit menurun menjadi 61,08%. Penurunan ini bisa jadi menunjukkan adanya transisi atau pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bukan langsung masuk ke pasar kerja. Namun, di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), TPAK kembali meningkat signifikan mencapai 81,87%, menunjukkan bahwa lulusan SMA memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam



mencari atau memiliki pekerjaan. TPAK menurut penduduk yang menamatkan Pendidikan Tinggi (PT) merupakan yang tertinggi yaitu 96,37%. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi memiliki kecenderungan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja, kemungkinan besar karena peluang kerja yang lebih baik dan relevansi kualifikasi mereka dengan kebutuhan pasar kerja. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan pentingnya pendidikan dalam mendorong partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bima.



Gambar 2.73.

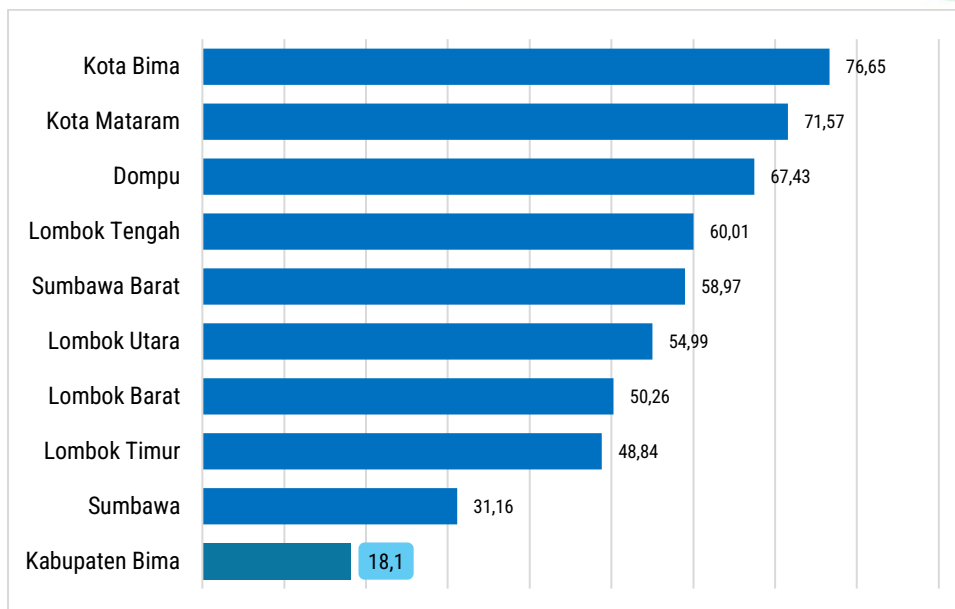
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bima, 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

2.3.2.4. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indeks Inovasi Daerah diatur dalam Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Setiap tahun, kepala daerah wajib melaporkan inovasi yang telah dilaksanakan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dinilai dan diperingkat.

Capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Bima pada tahun 2024 mendapatkan skor indeks 18,10 atau berpredikat “kurang inovatif”. Capaian angka tersebut menempatkan Kabupaten Bima di peringkat 354 kategori kabupaten seluruh Indonesia. Peringkat tersebut turun signifikan dari tahun 2023 yaitu di peringkat 309 dengan skor indeks 29,80 atau berpredikat “kurang inovatif”. Di level Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2024 Kabupaten Bima menempati peringkat terbawah dengan skor IID terendah. Peringkat pertama ditempati Kota Bima dengan skor indeks tertinggi yaitu sebesar 76,65. Kondisi ini harus terus didorong dan dikoordinasikan secara menyeluruh, agar target-target capaian pada tahun 2025 hingga 2030 dapat terwujud secara optimal. Masih rendahnya capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Bima dibandingkan wilayah lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi catatan bagi berbagai upaya pembangunan ke depan. Pemerintah Kabupaten Bima perlu meningkatkan berbagai upaya untuk melakukan inovasi dalam penyediaan layanan publik berkualitas serta berbagai kebijakan pembangunan daerah ke depan.



Gambar 2.74.

Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2024

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 – 4898 Tahun 2024

2.3.3. Transformasi Digital

Transformasi digital di tingkat pemerintahan adalah proses adopsi dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara menyeluruh dalam operasi dan layanan pemerintah. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, responsivitas, dan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Transformasi digital bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan inklusif. Rendahnya implementasi transformasi digital di pemerintahan dapat mengurangi kualitas pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan dapat mempersulit pemerintah menghadapi berbagai tantangan modern.

2.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Misi kemandirian ekonomi di Kabupaten Bima selaras dalam mewujudkan arah kebijakan transformasi Ekonomi Nusa Tenggara Barat yang berfokus pada lptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global dan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

1. Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim, kemudahan investasi, serta pertumbuhan industri pariwisata dan industri kreatif lainnya.
2. Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah (*added value*) tinggi yang berorientasi ekspor.
3. Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.



5. Penyiapan sentra produksi di kawasan perdesaan dan sentra pengolahan dan pasar di Kawasan perkotaan, serta perkuatan keterkaitan desa-kota.
6. Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai kawasan penyangga di kawasan pariwisata yang akan dikembangkan.
7. Revitalisasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja.
8. Penguatan konektivitas antara sentra produksi, pengolahan, dan pasar baik dalam dan luar negeri.
9. Penerapan transportasi ramah lingkungan *Electric Vehicle* (EV).
10. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
11. Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi.
12. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
13. Fasilitas akses pada riset dan inovasi untuk pengembangan produk dan proses bisnis.
14. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.
15. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.
16. Peningkatan produktivitas BUMD yang meningkat dan dapat terukur
17. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.

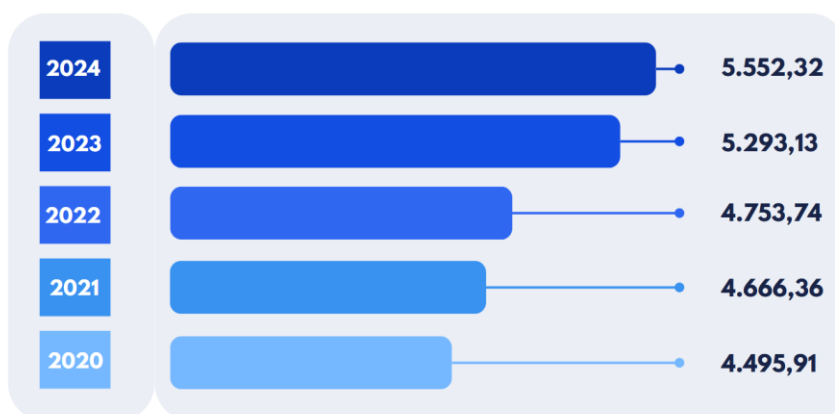
2.3.4.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen utama dalam penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pendekatan pengeluaran. PMTB didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran untuk barang modal yang digunakan dalam proses produksi dan memiliki masa pakai lebih dari satu tahun. Barang modal ini mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, infrastruktur seperti jalan dan bandara, mesin, peralatan, kendaraan, serta aset tetap lain yang digunakan dalam kegiatan produksi. PMTB digunakan untuk mengukur besarnya investasi fisik yang dilakukan dalam suatu wilayah. Peningkatan PMTB menunjukkan adanya penambahan kapasitas produksi dan potensi pertumbuhan ekonomi di masa depan. PMTB juga merupakan salah satu penopang utama PDRB setelah konsumsi rumah tangga, sehingga perubahan nilai PMTB sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

PMTB di Kabupaten Bima mengalami tren peningkatan yang signifikan dari Rp4.495,91 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp5.552,32 miliar pada tahun 2024. Peningkatan yang terjadi selama periode tersebut, memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 5,48% per tahun. Tren peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan investasi dalam aset tetap seperti infrastruktur, peralatan, dan bangunan yang mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Bima.



Faktor yang mendorong peningkatan PMTB di Kabupaten Bima antara lain kebijakan pemerintah daerah yang fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan alokasi anggaran untuk proyek-proyek strategis, serta partisipasi sektor swasta dalam investasi. Pertumbuhan ekonomi regional dan stabilnya kondisi makroekonomi juga turut memengaruhi peningkatan investasi. Program-program pembangunan seperti perbaikan jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan dapat berkontribusi pada meningkatnya nilai PMTB. Peningkatan PMTB ini mencerminkan upaya Kabupaten Bima dalam memperkuat basis ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan.



Gambar 2.75.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (miliar rupiah) Kabupaten Bima tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

2.3.4.2. Ekspor Barang dan Jasa

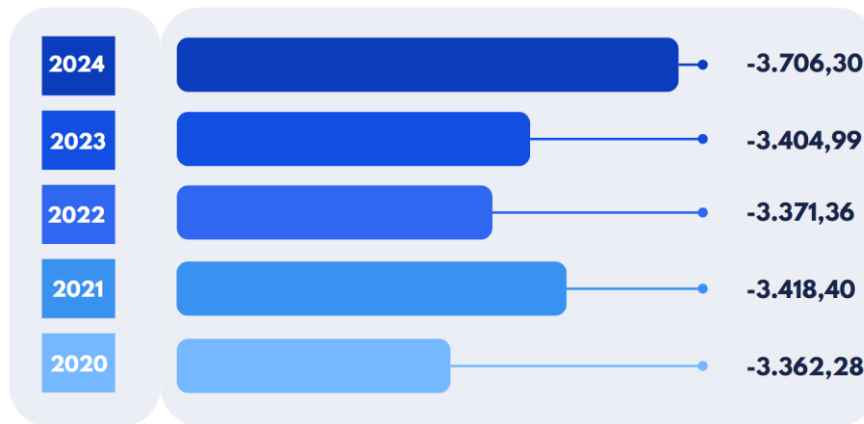
Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (*residen*) ke bukan penduduk (*nonresiden*). Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut).

Net ekspor barang dan jasa di Kabupaten Bima mengalami defisit perdagangan selama periode 2020-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai impor lebih besar dibandingkan nilai ekspor. Pada tahun 2020, defisit net ekspor tercatat sebesar -3.362,28, kemudian mengalami penurunan lebih dalam menjadi -3.418,40 pada tahun 2021. Tren defisit ini sedikit membaik pada tahun 2022 dengan angka -3.371,36, diikuti dengan perbaikan lebih lanjut pada tahun 2023 menjadi -3.404,99. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan dengan defisit yang mencapai -3.706,30, merupakan angka terburuk dalam rentang waktu lima tahun tersebut. Secara keseluruhan, defisit net ekspor mengalami peningkatan sebesar 344,02 poin atau sekitar 10,2 persen dari tahun 2020 hingga 2024.

Defisit net ekspor yang terjadi di Kabupaten Bima dapat dikaitkan dengan berbagai faktor ekonomi dan keterbatasan kapasitas produksi lokal. Faktor utama yang berkontribusi terhadap kondisi ini meliputi ketergantungan yang tinggi terhadap barang-barang impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan input produksi, sementara kapasitas ekspor lokal masih terbatas baik dari segi volume maupun diversifikasi produk. Struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian dan perikanan dengan



nilai tambah rendah menyebabkan daya saing produk lokal di pasar ekspor masih lemah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur logistik dan transportasi, kurangnya akses terhadap teknologi pengolahan dan packaging yang modern, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang perdagangan internasional turut menghambat pengembangan sektor ekspor.



Gambar 2.76.

Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Bima tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

2.3.5. Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

2.3.5.1. Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur adalah suatu ukuran komprehensif yang menilai kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas jaringan infrastruktur suatu wilayah dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Indeks ini mencakup penilaian terhadap berbagai sektor infrastruktur dasar, termasuk transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara), energi (listrik, jaringan gas), air bersih dan sanitasi, telekomunikasi (jaringan internet, seluler), serta fasilitas publik (sekolah, rumah sakit). Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana perkembangan infrastruktur suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

2.3.5.2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Rumah tangga dengan akses hunian layak mengacu pada proporsi populasi yang tinggal dalam unit perumahan yang memenuhi standar kelayakan dasar. Persentase rumah tangga di Kabupaten Bima menunjukkan variasi penggunaan sumber air utama untuk minum berdasarkan karakteristik kepala rumah tangga (KRT). Secara umum, sebagian besar rumah tangga menggunakan sumber air sumur bor, pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan, dengan persentase sebesar 83,28%. Sumber air kemasan bermerk, air isi ulang, atau ledeng digunakan oleh 14,29% rumah tangga, sedangkan kategori lain-lain mencapai 2,43%.

Dari segi jenis kelamin KRT, rumah tangga dengan KRT laki-laki menggunakan sumber air terlindung sebesar 83,62%, lebih tinggi dibandingkan rumah tangga dengan KRT perempuan sebesar 80,5%. Sumber air kemasan di rumah tangga dengan KRT perempuan sedikit lebih tinggi (15,3%) dibanding laki-laki (14,17%). Analisis berdasarkan kelompok pengeluaran memperlihatkan bahwa rumah tangga di 20 persen teratas memanfaatkan



sumber air kemasan atau leding dalam persentase tertinggi, yakni 33,42%, sementara penggunaan air terlindung menurun menjadi 65,52%. Sebaliknya, kelompok 40 persen terbawah dan menengah mayoritas menggunakan sumber air terlindung dengan persentase di atas 87%, sedangkan penggunaan air kemasan untuk kelompok ini masih terbatas di bawah 10%. Dari sisi pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, rumah tangga dengan pendidikan SMP ke atas menunjukkan kecenderungan lebih tinggi dalam menggunakan air kemasan (17,99%) dibanding rumah tangga dengan pendidikan SD ke bawah (9,33%). Penggunaan sumber air terlindung pada kelompok pendidikan rendah masih dominan di angka 87,62%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa akses rumah tangga terhadap sumber air minum yang dianggap layak dan terlindung cukup tinggi di Kabupaten Bima, dengan preferensi yang meningkat pada sumber air kemasan seiring dengan tingkat pengeluaran dan pendidikan kepala rumah tangga.

Tabel 2.59.

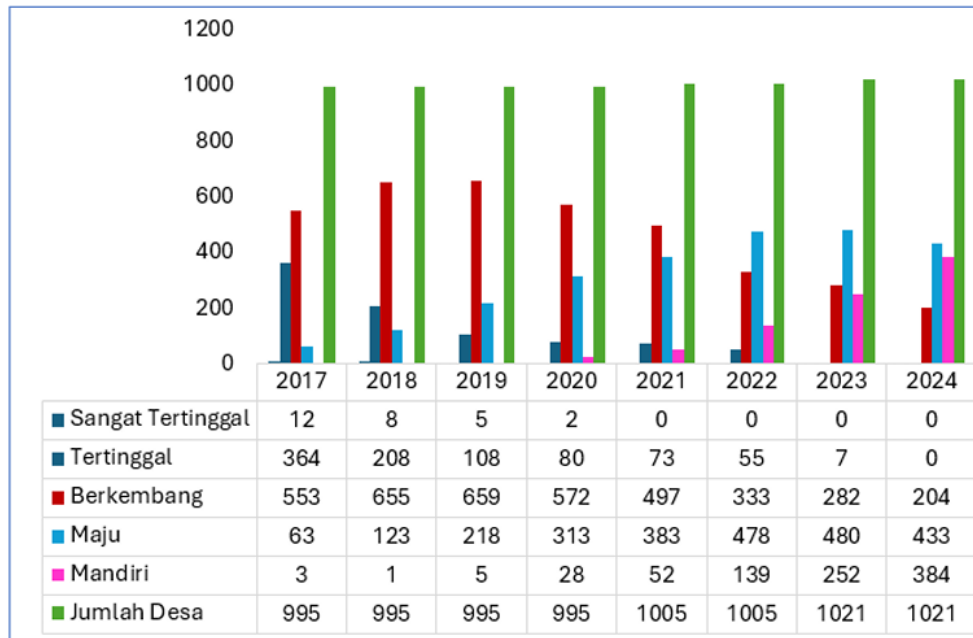
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum di Kabupaten Bima, 2024

Kategori	Karakteristik	Air Kemasan Bermerk / Air Isi Ulang / Leding (%)	Sumur Bor / Pompa / Sumur Terlindung / Mata Air Terlindung / Air Hujan (%)	Lainnya (%)	Jumlah (%)
Jenis Kelamin KRT	Laki-laki	14,17	83,62	2,21	100
Jenis Kelamin KRT	Perempuan	15,3	80,5	NA	100
Kelompok Pengeluaran	40 Persen Terbawah	7,03	89,74	3,23	100
Kelompok Pengeluaran	40 Persen Menengah	9,88	87,65	2,48	100
Kelompok Pengeluaran	20 Persen Teratas	33,42	65,52	NA	100
Pendidikan Tertinggi KRT	SD ke bawah	9,33	87,62	3,04	100
Pendidikan Tertinggi KRT	SMP ke atas	17,99	80,05	1,97	100
Kabupaten Bima	Kabupaten Bima	14,29	83,28	2,43	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima

2.3.5.3. Persentase Desa Mandiri

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai status perkembangan desa di Indonesia. Dalam kurun waktu lima tahun, NTB menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2024, 80% desa di NTB telah mencapai status maju dan mandiri. Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya meningkatkan status desa-desa tersebut melalui berbagai program pemberdayaan dan pembangunan. Salah satu langkah strategis yang direncanakan adalah penggabungan data Potensi Desa (Podes) dan IDM menjadi Indeks Desa pada tahun 2025. Indeks baru ini akan mencakup lima status desa: sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri, serta didukung oleh enam dimensi, yaitu aksesibilitas, layanan dasar, ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan desa. Gambaran Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi NTB Tahun 2017-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.77.

Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi NTB Tahun 2017-2024

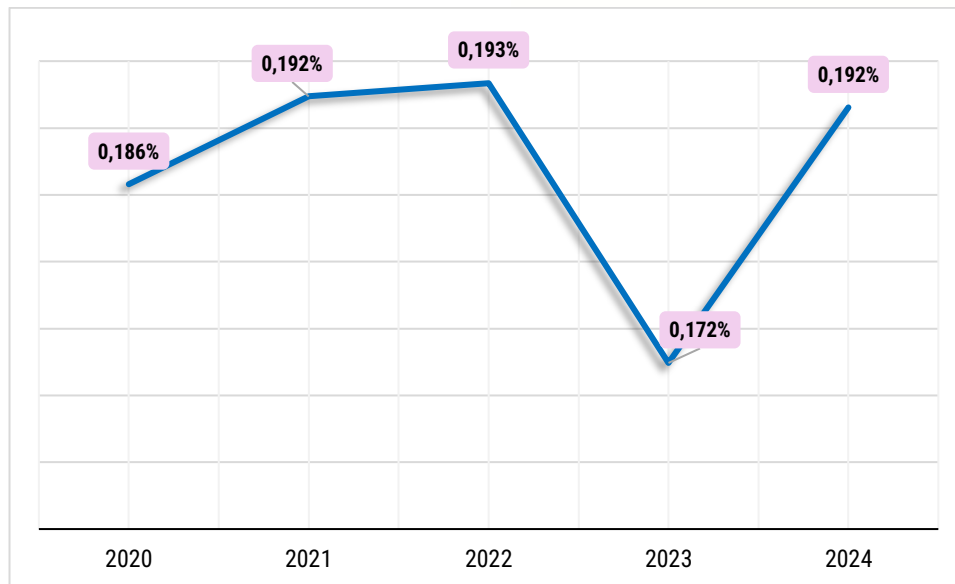
Sumber: Dokumen Ranwal RPJMD NTB 2025-2029

2.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro

2.3.6.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan indikator yang mengukur tingkat kontribusi penerimaan pajak terhadap total perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total pendapatan pajak (baik pajak pusat maupun daerah) dengan nilai PDRB, yang menggambarkan seberapa besar beban pajak dalam perekonomian regional serta efektivitas sistem perpajakan dalam mengoptimalkan potensi fiskal.

Rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Bima masih relatif rendah dengan rata-rata selama periode 2020 hingga 2024 hanya sebesar 0,186 persen. Secara absolut penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 7,41 persen per tahun, sementara nilai PDRB meningkat dengan rata-rata sebesar 6,69 persen per tahun. Namun, rasio di bawah 1 persen menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap ekonomi lokal masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan potensi ruang pengembangan kebijakan fiskal dan peningkatan basis pajak untuk memperbesar penerimaan asli daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal.



Gambar 2.78.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Bima (%), 2020 – 2024.

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025

2.3.6.2. Tingkat Inflasi

Inflasi menggambarkan laju kenaikan harga-harga secara umum dalam suatu ekonomi sehingga menimbulkan penurunan nilai riil uang atau daya beli masyarakat. Tingkat inflasi dihitung sebagai persentase perubahan indeks harga konsumen (IHK) atau indeks harga lainnya selama periode tertentu. Inflasi diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencerminkan rata-rata perubahan harga dari keranjang barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Pada Bulan Maret 2023, inflasi *year on year* (y-on-y) gabungan dua kota (Kota Mataram dan Kota Bima) sebesar 5,23 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,68 pada Bulan Maret 2022 menjadi 113,30 pada Bulan Maret 2023. Angka inflasi ini lebih tinggi dibanding angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,97 persen.

Dilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 5,14 persen dan Kota Bima mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 5,52 persen. Kelompok pengeluaran yang memiliki inflasi tertinggi adalah kelompok transportasi sebesar 19,77 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,47 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,75 persen; serta kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,30 persen. Kelompok pengeluaran lainnya masih terjaga tingkat inflasinya di bawah 3 persen. Penurunan inflasi terjadi pada Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,00 persen. Inflasi *month to month* (m-to-m) Gabungan Dua Kota di Bulan Maret 2023 sebesar -0,05 persen. Inflasi *year to date* (y-to-d) di Bulan Maret 2023 sebesar 0,65 persen, lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi *year to date* (y-to-d) di Bulan Maret 2022 sebesar 1,61 persen. Secara umum, capaian IHK Gabungan antara Kota Bima dan Kabupaten Bima menunjukkan peran kelompok pengeluaran kesehatan dan transportasi yang cukup signifikan. Dua kelompok pengeluaran tersebut juga memberikan andil terhadap inflasi yang cukup tinggi di Kabupaten Bima.



Tabel 2.60.
IHK dan Inflasi month to month (mtm), year to dated (ytd), dan year on year (yoy) Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) Maret 2023

Kelompok Pengeluaran	IHK Maret 2022	IHK Des 2022	IHK Feb 2022	IHK Maret 2023	Inflasi mtm Maret 2023 ¹⁾ (%)	Inflasi ytd Maret 2023 ²⁾ (%)	Inflasi yoy Maret 2023 ³⁾ (%)	Andil Inflasi mtm Maret 2023 (%)	Andil Inflasi yoy Maret 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Umum (Headline)	107,68	112,57	113,36	113,30	-0,05	0,65	5,23	-0,0505	5,2252
Makanan, Minuman dan Tembakau	111,97	116,43	118,63	118,09	-0,46	1,43	5,47	-0,1495	1,7778
Pakaian dan Alas Kaki	108,84	111,28	111,68	111,63	-0,04	0,31	2,56	-0,0024	0,1494
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,48	106,01	106,55	106,53	-0,02	0,49	1,96	-0,0035	0,3701
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	108,41	111,20	111,81	111,99	0,16	0,71	3,30	0,0077	0,1631
Kesehatan	106,85	107,88	107,86	108,11	0,23	0,21	1,17	0,0062	0,0327
Transportasi	106,77	128,14	127,22	127,87	0,51	-0,21	19,77	0,0664	2,2603
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	97,09	96,32	96,20	96,12	-0,08	-0,22	-1,00	-0,0039	-0,0499
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	107,36	108,54	108,83	109,13	0,28	0,55	1,65	0,0044	0,0272
Pendidikan	97,65	99,03	99,03	99,03	0,00	0,00	1,41	0,0000	0,0500
Penyediaan Makanan dan Minuman Restoran	104,64	108,18	108,57	108,57	0,00	0,36	3,75	0,0000	0,2659
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	116,25	118,64	119,04	119,51	0,39	0,73	2,80	0,0241	0,1788

Sumber: BPS Kabupaten Bima, 2024

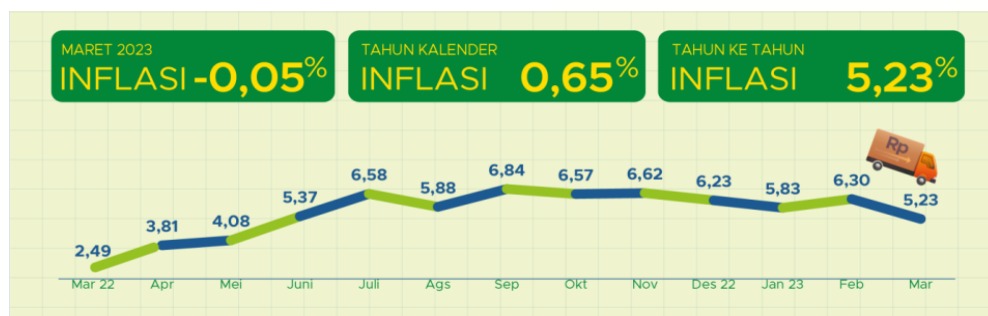
Keterangan:

(1) Persentase perubahan IHK Maret 2023 terhadap bulan sebelumnya.

(2) Persentase perubahan IHK Maret 2023 terhadap IHK Desember 2022

(3) Persentase perubahan IHK Maret 2023 terhadap IHK Maret 2022

Pada Maret 2023, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* tertinggi adalah kelompok transportasi sebesar 2,26 persen dan Kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,7 persen. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y* adalah Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,05 persen.



Gambar 2.79.
Inflasi year on year (yoy) Gabungan
Sumber: BPS NTB, 2023



Gambar 2.80.

Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Maret 2023

Sumber: BPS NTB

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum oleh pemerintah daerah adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek pelayanan. Aspek pelayanan umum meliputi urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) perumahan rakyat dan permukiman; 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan 6) sosial. Urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (penunjang) meliputi: 1) tenaga kerja; 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3) pangan; 4) pertanahan; 5) lingkungan hidup; 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa; 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9) perhubungan; 10) komunikasi dan informatika; 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12) penanaman modal; 13) kepemudaan dan olah raga; 14) statistik; 15) persandian; 16) kebudayaan; 17) perpustakaan; dan 18) kearsipan.

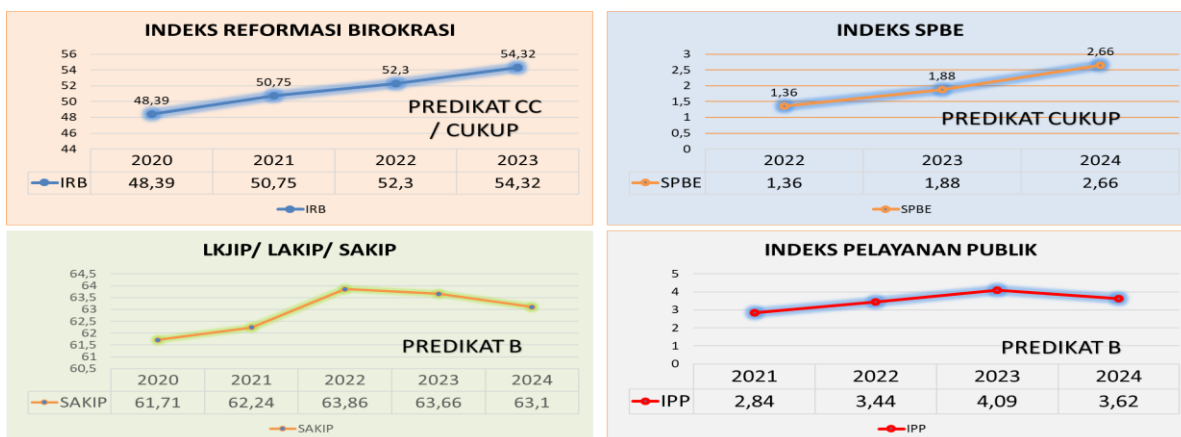
2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi & Adaptif

Pemerintah Kabupaten Bima telah menunjukkan perbaikan dalam kinerja tata kelola pemerintahan, tetapi kinerja tersebut masih perlu dioptimalkan. Kinerja Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 masih berada pada predikat CC. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bima menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024, meskipun masih berada pada predikat "Cukup." Pada tahun 2023, indeks SPBE Kabupaten Bima berada pada angka 1,88 dengan kategori "Cukup," kemudian meningkat menjadi 2,66 pada tahun 2024, meskipun tetap dalam kategori yang sama. Kenaikan sebesar 0,64 poin ini mencerminkan adanya kemajuan dalam penerapan sistem pemerintahan digital di Kabupaten Bima.

Faktor yang mendorong peningkatan Indeks SPBE ini antara lain percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan, peningkatan kualitas layanan publik berbasis elektronik, serta perluasan infrastruktur teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Bima telah melakukan berbagai inisiatif, namun kategori "Cukup" yang masih bertahan menunjukkan bahwa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kesenjangan digital, atau adaptasi pengguna layanan masih perlu diatasi. Peningkatan ini menandakan komitmen



Kabupaten Bima dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan, meskipun diperlukan upaya lebih besar untuk mencapai kategori yang lebih tinggi.



Gambar 2.81.
Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Bima
Sumber: Diolah dari berbagai sumber

2.4.2. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.4.2.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD mencakup 4 (empat) komponen utama yang terdiri dari 12 pilar: **Komponen Pertama**, lingkungan pendukung. Komponen ini memiliki empat pilar diantaranya: 1) institusi; 2) infrastruktur; 3) teknologi informasi; dan 4) stabilitas ekonomi makro. **Komponen Kedua**, Sumber Daya Manusia. Komponen ini memiliki dua pilar diantaranya: 5) kesehatan; dan 6) keterampilan. **Komponen Ketiga**, Pasar. Komponen ini memiliki empat pilar diantaranya: 7) pasar produk; 8) pasar tenaga kerja; 9) sistem keuangan; dan 10) ukuran pasar. **Komponen Keempat**, Ekosistem Inovasi. Komponen ini memiliki dua pilar diantaranya: 11) dinamika bisnis; dan 12) kapabilitas inovasi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024 memiliki capaian skor IDSD sebesar 3,50, skor tersebut merupakan nilai akumulatif dari 12 pilar. Pilar 10 dalam komponen pasar, pilar 1 dalam komponen lingkungan pendukung, dan pilar 6 dalam komponen Sumber Daya Manusia, tiga pilar tersebut menjadi penyumbang nilai tertinggi untuk skor IDSD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Berdasarkan Laporan Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024 terdapat skor IDSD menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Mataram menempati posisi tertinggi dengan skor IDSD sebesar 4,29, didorong oleh nilai di Pilar 7 (Pasar) sebesar 5,00 dan Pilar 11 (Ekosistem Inovasi) yang mencapai nilai 4,22. Sementara itu, Kabupaten Sumbawa Barat memiliki skor IDSD terendah (3,26) akibat rendahnya nilai Pilar 7 (0,76), yang mencerminkan tantangan dalam aspek pasar digital.

Kabupaten Bima mencatat skor IDSD sebesar 3,45 pada tahun 2024, dan menjadi peringkat kelima setelah Kabupaten Lombok timur dengan skor IDSD sebesar 3,65. Skor IDSD Kabupaten Bima unggul dalam Pilar 11 (Ekosistem Inovasi) dengan nilai 4,34 hal ini menunjukkan potensi inovasi digital yang kuat, meski masih terkendala oleh kelemahan di Pilar 2 (Lingkungan Pendukung) dengan nilai 3,02 dan Pilar 8 (Pasar) sebesar 2,37.



Rendahnya nilai Pilar 9 (Pasar) di Bima (2,14) juga mengindikasikan perlunya peningkatan akses dan pemanfaatan teknologi pasar digital.

Tabel 2.61.

Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2024

NAMA KAB/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
PROV. NTB	4,23	3,1	3,36	3,72	3,54	4,12	3,66	2,72	2,78	4,25	3,2	3,27	3,50
RATA-RATA KAB/KOTA	4,44	3,55	4,25	3,95	3,64	4	3,69	3,28	2,65	4,06	3,68	2,35	3,63
LOMBOK BARAT	4,64	4	4,29	3,84	3,59	3,74	4,36	3,79	3,85	4,16	3,56	2,23	3,84
LOMBOK TENGAH	4,58	3,75	4,3	4,02	3,51	3,75	3,82	3,64	2,04	4,23	4,23	2,34	3,68
LOMBOK TIMUR	4,77	3,81	4,32	4,03	3,5	3,93	3,7	3,24	1,91	4,3	4,07	2,24	3,65
SUMBAWA	4,33	3,49	4,03	4,13	3,63	4,02	3,33	3,02	2,15	4,14	3,15	2,29	3,48
DOMPU	4,26	2,64	3,89	4,17	3,57	4,14	3,66	2,64	2,2	3,82	3,23	2	3,35
BIMA	4,47	3,02	3,94	3,93	3,53	4,1	3,44	2,37	2,14	4,04	4,34	2,11	3,45
SUMBAWA BARAT	4,6	3,56	4,19	3,39	3,69	4,17	0,76	3,26	2,44	4,37	2,93	1,81	3,26
LOMBOK UTARA	4,49	4,04	3,87	3,9	3,6	3,76	3,8	3,46	1,6	3,64	3,97	1,41	3,46
KOTA MATARAM	4,2	4,08	4,86	4,26	3,97	4,16	5	4,2	4,13	4,27	4,22	4,09	4,29
KOTA BIMA	4,03	3,13	4,79	3,85	3,85	4,24	5	3,14	4	3,59	3,07	2,97	3,81

Sumber: Laporan IDSD 2024, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

2.4.3. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

2.4.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota antara lain: 1) Sub urusan manajemen pendidikan meliputi kewenangan pengelolaan Pendidikan dasar dan pengelolaan Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal; 2) Sub urusan kurikulum meliputi kewenangan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini, dan Pendidikan nonformal; 3) Sub urusan pendidik dan tenaga pendidik meliputi kewenangan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kabupaten/ Kota; 4) Sub urusan perizinan Pendidikan meliputi kewenangan penerbitan izin Pendidikan dasar, penerbitan izin Pendidikan anak usia dini dan nonformal; 5) Sub urusan Bahasa dan sastra meliputi kewenangan pembinaan Bahasa dan sastra.

Pemerintah Kabupten Bima dalam menjalankan kewenangan urusan pemerintahan bidang Pendidikan wajib memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib memenuhi SPM urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang meliputi: 1) Pendidikan anak usia dini; 2) Pendidikan dasar; dan 3) Pendidikan kesetaraan. Pelaksanaan SPM urusan pemerintahan bidang Pendidikan juga harus memperhatikan mutu pelayanan dasar antara lain: 1) standar jumlah dan kualitas barang



dan/ atau jasa; 2) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan 3) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Indikator utama dalam mengukur kinerja urusan wajib pendidikan antara lain: Jumlah Guru Jumlah TK/RA, Jumlah SD/MI, Jumlah SMP/MTS, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Pendidikan yang Ditamatkan.

a) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan (tanpa memandang usia) dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan yang sama, yang dinyatakan dalam persen. APK digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK jenjang TK/RA di Kabupaten Bima pada tahun 2023 meupakan capaian tertinggi yaitu sebesar 86,46%. APK jenjang SD/MI/Paket A sepanjang tahun 2020-2024 mencapai angka di atas 100% dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 110,87%. APK jenjang SMP/MTs/Paket B mengalami capaian yang beragam, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 106,58%. Penurunan capaian APK terjadi pada tahun 2023 menjadi 98,45% dan tahun 2024 menjadi 86,25. APK jenjang SMA/MA/SMK memiliki capaian tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 109,97%.

APK di setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Bima menunjukkan tren naik turun yang mencerminkan dinamika yang kompleks. Beberapa faktor yang melatarbelakangi seperti ekonomi keluarga, di mana kondisi finansial yang sulit dapat membatasi kemampuan orang tua untuk mengakses pendidikan formal bagi anak-anak mereka. Faktor lainnya yaitu sarana dan prasarana sekolah yang belum optimal mempengaruhi kualitas pendidikan, sehingga orang tua mungkin ragu untuk mendaftarkan anak. Faktor aksesibilitas menjadi isu penting, seperti kurangnya infrastruktur dan transportasi yang memadai dapat menghambat anak-anak untuk mencapai sekolah. Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa pendidikan tetap dapat diakses oleh semua anak di daerah tersebut.

Tabel 2.62.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bima Tahun 2020 - 2024

No	Jenjang Pendidikan	% Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	TK/RA	68,00	77,06	81,55	86,46	86,31
2	SD/MI/Paket A	105,30	112,65	109,65	105,74	110,87
3	SMP/MTs/Paket B	98,91	94,1	106,58	98,45	86,25
4	SMA/MA/SMK	-	96,62	95,3	96,21	109,97

Sumber data: Kabupaten Bima dalam Angka 2025

b) Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APD) adalah jumlah murid/siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang tertentu dalam periode waktu tertentu. Indikator ini menunjukkan seberapa banyak siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan mereka hingga tuntas dari jumlah yang terdaftar. Merujuk Badan Pusat Statistik, bahwa Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada



kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Pada jenjang SD sederajat jumlah murid yang tamat di Kabupaten Bima mencapai jumlah terbanyak pada tahun 2023 yaitu sebesar 8.936. Pada jenjang SMP sederajat jumlah murid yang tamat di Kabupaten Bima mencapai jumlah terbanyak pada tahun 2023 dengan jumlah 7.902.

Perbedaan jumlah murid yang menamatkan pendidikan disetiap jenjang dapat disebabkan oleh berraaam faktor, seperti ketidakpastian ekonomi yang membatasi akses pendidikan. Selain itu, faktor seperti kelebihan kapasitas di sekolah dan kesiapan infrastruktur yang belum optimal, yang dapat mempengaruhi jumlah siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan. Oleh karena itu, pencapaian tahun 2023 dapat dilihat sebagai langkah positif, tetapi tetap memerlukan perhatian untuk mempertahankan dan meningkatkan angka tersebut di masa depan.

Tabel 2.63.

Jumlah Siswa yang Tamat Sekolah Jenjang SD dan SMP Kabupaten Bima Tahun 2020 - 2024

NO	Klasifikasi Sekolah	Jumlah Siswa yang Tamat (Orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD Sederajat	8.317	8.345	7.650	8.936	7.582
2	SMP Sederajat	7.210	7.259	7.132	7.902	6.157
Total		15.527	15.604	14.782	16.838	13.739

Sumber data: Dikbudpora Kab. Bima. 2025

c) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah murid/siswa yang terdaftar di suatu jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah anak usia yang seharusnya bersekolah di jenjang tersebut. APM mencerminkan sejauh mana akses pendidikan dapat diakses oleh anak-anak di kelompok usia yang relevan, dan merupakan indikator penting untuk menilai inklusivitas dan efektivitas sistem pendidikan di suatu wilayah. Sepanjang tahun 2020-2024 APM jenjang SD/MI/Paket A tertinggi terdapat pada tahun 2020 yaitu sebesar 99,96%. APM jenjang SMP/MTs/Paket B tertinggi terdapat pada tahun 2024 sebesar 98,75%. Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A Kabupaten Bima lebih tinggi dibandingkan dengan SMP/MTs/Paket B. Hal ini menunjukkan sebagian besar penduduk usia sekolah SD/MI Kabupaten Bima telah terdaftar dan bersekolah di jenjang pendidikan dasar. Namun, saat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah sebagian besar penduduk Kabupaten Bima memilih untuk bersekolah di wilayah lain seperti Kota Bima. Hal ini berdampak pada capaian angka partisipasi murni jenjang SMP/MTS yang cenderung menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pemerintah Kabupaten Bima perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan menengah ke depan.

Tabel 2.64.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bima Tahun 2018 - 2024

No	Jenjang Pendidikan	% Angka Partisipasi Murni (APM)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI/Paket A	99,96	99,47	97,76	97,53	97,66
2	SMP/MTs/Paket B	98,75	95,86	84,66	82,95	80,73

Sumber data: Kabupaten Bima dalam Angka 2025



2) Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota meliputi: 1) Upaya Kesehatan; 2) Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan; 3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; 4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Bima dalam sub urusan kesehatan memiliki kewenangan antara lain: 1) Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota; 2) Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota; 3) Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan bidang kesehatan mencakup SPM kesehatan daerah provinsi dan SPM kesehatan daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah kabupaten/ kota meliputi: 1) pelayanan kesehatan ibu hamil; 2) pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4) pelayanan kesehatan balita; 5) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6) pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7) pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 10) pelayanan kesehatan orang dalam gangguan jiwa berat; 11) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan 12) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia. Kinerja bidang Kesehatan di Kabupaten Bima tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan 13 indikator diantaranya: 1) Jumlah Kematian Bayi; 2) Jumlah Kematian Ibu; 3) Penanganan HIV dan AIDS; 4) Prevalensi Gizi Buruk Klinis; 5) Cakupan Jamban Keluarga (%); 6) Persentase balita gizi buruk yang dirawat (%); 7) Jumlah posyandu/Jumlah Puskesmas; 8) Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk; 9) Rasio rumah sakit persatuan penduduk; 10) Angka kelangsungan hidup bayi (lahir hidup); 11) Jumlah Pustu; 12) Jumlah Poskesdes.

Indikator kematian bayi atau Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup, dalam satu tahun tertentu. Ini adalah indikator penting untuk mengukur tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal kesehatan ibu dan anak. Kasus kematian bayi di Kabupaten Bima sepanjang tahun 2020-2024 masih terbilang tinggi, jumlah kematian bayi terbanyak terjadi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 76 bayi, hal ini terjadi karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang ditandai dengan masih rendahnya kegiatan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan; Pengaruh pandemi covid -19 berpengaruh terhadap menurunnya kualitas layanan terhadap maternal neonatal; serta prosedur pelayanan Kasus rujukan maternal dan neonatal sesuai prosedur penanganan kasus covid 19 menyebabkan keterlambatan penanganan kasus kegawatdaruratan maternal neonatal. Kompetensi bidan di desa sebagai ujung tombak pelayanan KIA di desa masih kurang dalam mengenal dan melakukan penanganan awal kasus kegawatdaruratan maternal neonatal.

Indikator lainnya yaitu cakupan jamban keluarga yang merupakan persentase rumah tangga yang memiliki dan menggunakan jamban atau fasilitas sanitasi yang sesuai untuk buang air besar. Ini adalah indikator penting dalam kesehatan masyarakat, karena kepemilikan dan penggunaan jamban yang sehat dapat mengurangi penyebaran penyakit



yang ditularkan melalui feses. Cakupan jamban keluarga tertinggi di Kabupaten Bima terjadi pada tahun 2023 dan tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa seluruh keluarga di Kabupaten Bima memiliki fasilitas jamban atau sanitasi yang layak dan sehat. Indikator kesehatan lainnya yaitu jumlah puskesmas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, bahwa Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya. Jumlah puskesmas di Kabupaten Bima sepanjang tahun 2020-2024 yaitu sebanyak 21 Puskesmas.

Tabel 2.65.

Indikator kesehatan di Kabupaten Bima Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kematian Bayi	52	76	71	64	8
2	Jumlah Kematian Ibu	5	10	10	9	92
3	Penanganan HIV dan AIDS	100	100	100	100	100
4	Prevalensi Gizi Buruk Klinis	-	-	-	-	0.03
5	Cakupan Jamban Keluarga (%)	88	90	100	100	92.76
6	Persentase balita gizi buruk yang dirawat (%)	100	100	100	100	100
7	Jumlah posyandu	658	665	678	680	682
8	Jumlah Puskesmas	21	21	21	21	21
9	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	1,79	1,78	5,28	8,41	9.17
10	Rasio rumah sakit persatuan penduduk	0,0039	0,0041	0,0041	0,0041	0.0041
11	Angka kelangsungan hidup bayi (lahir hidup)	10.200	10.382	9.611	9.010	7738
12	Jumlah Pustu	88	88	90	89	94
13	Jumlah Poskesdes	166	166	166	166	155

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Bima. 2025

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri dari 11 (sebelas) sub urusan antara lain: 1) Sumber Daya Air (SDA); 2) Air Minum; 3) Persampahan; 4) Air Limbah; 5) Drainase; 6) Permukiman; 7) Bangunan Gedung; 8) Penataan Bangunan dan Lingkungannya; 9) Jalan; 10) Jasa Konstruksi; dan 11) Penataan Ruang. Pemerintah Kabupaten Bima dalam menjalankan kewenangan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang wajib memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib memenuhi SPM urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi: 1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari; dan 2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Kinerja penataan perhubungan darat di Kabupaten Bima dilaksanakan melalui pembangunan sarana jalan untuk menjangkau luas wilayah 4.389.40 km² Sepanjang tahun 2020-2024, indikator persentase jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Bima dengan capaian tertinggi terdapat pada tahun 2023 yaitu 57,23%. Indikator persentase jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Bima menunjukkan capaian kinerja tertinggi terdapat pada tahun 2020 yaitu sebesar 53,81%. Indikator lainnya yaitu persentase jaringan irigasi



berfungsi baik di Kabupaten Bima menunjukkan capaian kinerja tertinggi terdapat pada tahun 2022 yaitu sebesar 57,83%.

Tabel 2.66.

Pencapaian Indikator Kinerja dalam Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	51,58	55,60	57,23	54,15	53,11
2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	53,81	49,70	49,70	41,03	49
3	Persentase jaringan irigasi berfungsi baik	%	43,47	45,50	57,83	57,35	50

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jalan didefinisikan sebagai seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah. Pemerintah Kabupaten Bima memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan dan perawatan jalan Kabupaten yang berada di wilayah admistratifnya. Jalan di Kabupaten Bima menurut kondisi permukaan terdiri dari jalan aspal, jalan kerikil, dan jalan tanah/puru. Kondisi jalan beraspal terpanjang di Kabupaten Bima terdapat pada tahun 2022 dengan panjang 490,68 km. jalan dengan permukaan aspal lebih di Kabupaten Bima lebih panjang dibandingkan jalan kerikil dan tanah. Panjang jalan menurut kondisi di Kabupaten Bima terdiri dari kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak, kondisi rusak berat dan kondisi tidak terperinci. Jalan dengan kondisi baik terpanjang di Kabupaten Bima terdapat pada tahun 2021 dengan panjang 349,75 Km. Jalan dengan kondisi baik lebih dominan di Kabupaten Bima dibandingkan jalan dengan kondisi sedang, rusak, dan rusak berat.

Tabel 2.67.

Kondisi jalan Kabupaten Bima Tahun 2020 -2024

No	KEADAAN JALAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jenis Permukaan					
	Aspal	469.56	449,38	490,63	409,68	482,67
	Kerikil	73.59	149,30	130,92	315,09	301,51
	Tanah/Puru	288.44	215,11	210,06	106,84	34,15
	Lainnya		17,82		-	-
	Jumlah	831.61	831.61	831,61	861,61	831,61
2	Kondisi Jalan					
	Baik	349.75	428,62	413,84	409,68	348,53
	Sedang	79.17	33,72	43,47	40,67	93,15
	Rusak	72.92	340,35	294,21	274,42	24,25
	Rusak Berat	329.75	28,92	80,09	106,84	365,68
	Tidak Dirinci	-	-	-	-	-
	Jumlah	831.61	831.61	831,61	831,61	831,61
3	Kelas Jalan					
	Kelas I	-	-	-	-	-
	Kelas II	-	-	-	-	-
	Kelas III	-	-	-	-	-



No	KEADAAN JALAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Kelas IIIa	831.61	831.61	831,61	831,61	831,61
	Kelas IIIb	-	-	-	-	-
	Kelas IIIc	-	-	-	-	-
	Kelas Tdk Dirinci	-	-	-	-	-
	Jumlah	831.61	831.61	831,61	831,61	831,61

Sumber data: Kabupaten Bima dalam Angka 2025

Pemerintah Kabupaten Bima memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembangunan dan perawatan jembatan. Jembatan adalah sebuah struktur bangunan yang dibangun untuk menghubungkan dua area yang terpisah oleh suatu rintangan, seperti sungai, jurang, atau jalan lain, sehingga memungkinkan orang atau kendaraan untuk melewatinya. Jembatan berperan penting dalam sistem transportasi dan infrastruktur. Jumlah jembatan terbanyak terdapat pada tahun 2024 yaitu sebanyak 168 jembatan dengan total panjang 2138,20 meter. Panjang jembatan Kabupaten Bima menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Namun, dari jumlah unit jembatan terus menunjukkan peningkatan. Hal ini menjadi catatan positif kinerja penyediaan layanan dan aksesibilitas jembatan di Kabupaten Bima. Wilayah Kabupaten Bima memiliki jumlah sungai yang banyak, sehingga kebutuhan jembatan dalam mendukung berbagai aktivitas penduduk sangat diperlukan. Jumlah jembatan yang terus meningkat setiap tahunnya menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam menyediakan layanan jalan dan jembatan dalam mendukung berbagai aktivitas penduduk.

Tabel 2.68.
Jembatan di Kabupaten Bima Tahun 2020-2024

No	Tahun	Panjang (meter)	Jumlah (unit)
1	2020	2.037,50	156
2	2021	1.890,30	145
3	2022	1.890,30	158
4	2023	2.070	156
5	2024	2.138,20	168

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima. 2025

Pemerintah Kabupaten Bima dalam melaksanakan kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang telah memenuhi asas ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang diukur melalui rasio ketaatan terhadap RTRW. rasio ketaatan RTRW (rencana tata ruang wilayah) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa pengaturan penataan ruang atau RTRW diselenggarakan untuk: 1) mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang; 2) memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan 3) mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Rasio ketaatan terhadap RTRW memiliki 2 indikator yaitu realisasi RTRW dan rencana peruntukan



RTRW. Pemerintah Kabupaten Bima dalam melaksanakan realisasi pada tahun 2020 mencapai rasio 89, capaian atas kinerja rasio realisasi RTRW meningkat menjadi 90 pada tahun 2021 hingga 2024. Pada sisi lain, indikator kinerja rencana peruntukan RTRW memiliki capaian tertinggi pada tahun 2020 yaitu 90. Pemerintah Kabupaten Bima dalam melaksanakan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih cukup baik, rasio ketaatan terhadap RTRW sampai tahun 2024 masih 0,99%. Capaian rasio ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Bima menunjukkan kinerja yang cukup baik sejak tahun 2018 sampai tahun 2024. Capaian rasio di atas 0,90 menjadi bukti wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam mentaati arah pembangunan ruang Kabupaten Bima serta merealisasikan peruntukan ruang Kabupaten Bima sebagaimana yang tertuang dalam RTRW.

Tabel 2.69.

Rasio Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Bima

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Realisasi RTRW	90	90	89	90	90	90	90
2.	Rencana Peruntukan RTRW	91	91	92	91	91	91	91
3.	Rasio (1./2.)	0.99	0.99	0,97	0,99	0,99	0,99	0.99

Sumber data : Dinas PUPR Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum yang memiliki dua jenis pelayanan yaitu: Pertama, Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari dengan indikator capaian Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari, jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan. Kedua, Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah dengan indikator capaian Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah. Kinerja pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2024 mencapai realisasi 100%. Jumlah total yang harus dilayani untuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2024 sebanyak 3.908. kinerja pelayanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah mencapai realisasi 100%. Jumlah total yang harus dilayani untuk Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah pada tahun 2024 sebanyak 5.640. Hal ini menunjukkan capaian pelayanan pengelolaan air limbah di Kabupaten Bima telah dilaksanakan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Bima telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah secara maksimal. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bima juga memiliki capaian maksimal dalam penyediaan kebutuhan pokok air minum penduduk. Hal ini ditunjukkan dengan capaian sebesar 100 persen yang menandakan bahwa kebutuhan air minum penduduk telah terpenuhi dan sesuai dengan standar baku serta mutu air siap minum.



Tabel 2.70.
Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

Jenis pelayanan Dasar	Indikator capaian	Target	Jumlah total Yang harus dilayani	Jumlah total Yang terlayani	Realisasi
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari, jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	100%	3.908	3.908	100%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah	100%	5.640	5.640	100%

Sumber data : e - SPM Tahun 2025

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota antara lain: 1) Sub urusan Perumahan meliputi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha; 2) Sub urusan Kawasan Permukiman terdiri dari 2 (dua) kewenangan yaitu Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha; 3) Sub urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yaitu pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota; 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yaitu penyelenggaraan PSU perumahan; dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kewenangan yaitu Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Pemerintah Kabupaten Bima dalam menjalankan kewenangan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman wajib memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib memenuhi SPM urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat yang meliputi: 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan 2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota. Dalam rangka melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasa permukiman, Pemerintah Kabupaten bima telah melakukan

Masyarakat Kabupaten Bima masih membutuhkan rumah cukup banyak. Kebutuhan rumah dari Tahun ke Tahun semakin meningkat. Dari sisi kualitas perumahan, Kabupaten Bima masih dihadapkan pada banyaknya perumahan yang tidak sesuai dengan standar perumahan yang sehat. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni tersebut



dipenuhi baik melalui bantuan perumahan dari Kemeterian PUPR/KL lainnya, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, pengembang swasta, maupun perorangan. Sebaran permukiman kumuh di Kabupaten Bima terdiri dari 67 kawasan kumuh yang tersebar di 18 kecamatan dan 73 desa dengan luas 907,40Ha.

Tabel 2.71.
Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bima

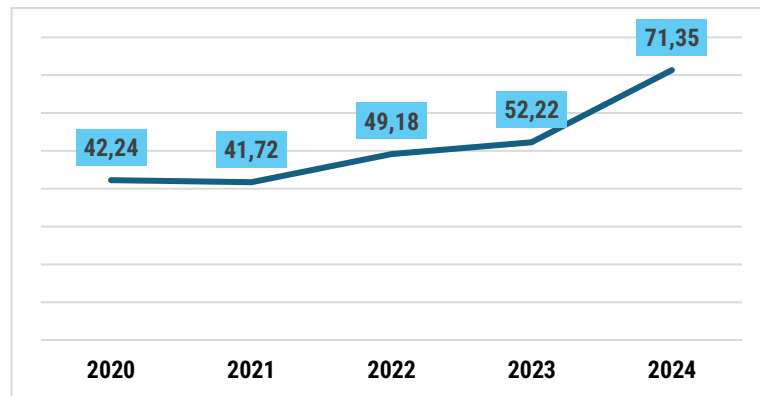
No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Kel/Desa	Kec	Tingkat
1	Kawasan Pusat Pemerintahan Woha (Penapali-Dadibou)	11,38	Penapali	Woha	Sedang
2	Kawasan Pusat Pemerintahan Woha (Penapali-Dadibou) Kawasan Tente-Nisa	15,54	Dadibou	Woha	Sedang
		10,37	Tente	Woha	Sedang
3	Kawasan Naru	18,33	Naru	Woha	Sedang
4	Kawasan Samili Indah	23	Samili	Woha	Sedang
5	Kawasan Kalampa	22,69	Kalampa	Woha	Sedang
6	Kawasan Talabiu	16,38	Talabiu	Woha	Sedang
7	Kawasan Rabakodo	8,23	Rabakodo	Woha	Sedang
8	Kawasan Donggobolo	37,46	Donggobolo	Woha	Ringan
9	Sondosia	8,65	Sondosia	Bolo	Berat
10	Nggembe	4,56	Nggembe	Bolo	Berat
11	Darussalam	13,92	Darussalam	Bolo	Berat
12	Tembe & Rasabou	42,9	Tembe & Rasabou	Bolo	Berat
13	Sanolo	25,75	Sanolo	Bolo	Berat
14	Rato, Timu, Leu & Kananga	81,02	Rato, Timu, Leu & Kananga	Bolo	Sedang
15	Tumpu	4,41	Tumpu	Bolo	Berat
16	Belo	9,71	Belo	Palibelo	Sedang
17	Teke	25,61	Teke	Palibelo	Berat
18	Bre	8,39	Bre	Palibelo	Berat
19	Tonggondoa	8,17	Tonggondoa	Palibelo	Berat
20	Tonggorisa	9,4	Tonggorisa	Palibelo	Berat
21	Ragi	6,69	Ragi	Palibelo	Berat
22	Nata	23,6	Nata	Palibelo	Berat
23	Panda	12	Panda	Palibelo	Sedang
24	Cenggu	16,77	Cenggu	Belo	Berat
25	Ngali	32,21	Ngali	Belo	Berat
26	Renda	29,44	Renda	Belo	Berat
27	Bugis	55,01	Bugis	Sape	Berat
28	Rasabou	15,54	Rasabou	Sape	Sedang
29	Naru & Naru Barat	21,6	Naru Barat & Naru	Sape	Sedang
30	Na'e	14,36	Na'e	Sape	Berat
31	Oi Maci	20,97	Oi Maci	Sape	Berat
32	Sangia	11,29	Sangia	Sape	Berat
33	Rai Oi	17,33	Rai Oi	Sape	Berat
34	Parangina	19,17	Parangina	Sape	Berat
35	Dena	7,21	Dena	MPangga	Sedang
36	Rade	7,21	Rade	MPangga	Sedang
37	Bolo	6,41	Bolo	MPangga	Sedang
38	Soro/melayu	24,32	Soro/melayu	Lambu	Sedang



No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Kel/Desa	Kec	Tingkat
39	Lanta	6,53	Lanta	Lambu	Sedang
40	Lanta Barat	2,17	Lanta Barat	Lambu	Sedang
41	Kaleo	6,64	Kaleo	Lambu	Sedang
42	Sumi	6,8	Sumi	Lambu	Sedang
43	Simpasai	1,52	Simpasai	Lambu	Sedang
44	Maria Utara	3,65	Maria Utara	Wawo	Sedang
45	Raba	1,28	Raba	Wawo	Sedang
46	Karumbu	2,13	Karumbu	Langgudu	Sedang
47	Rompo	1,85	Rompo	Langgudu	Sedang
48	Sambori	6,59	Sambori	Lambitu	Sedang
49	Tawali	17,46	Tawali	Wera	Sedang
50	Sangiang	6,7	Sangiang	Wera	Sedang
51	Nipa	6,51	Nipa	Ambalawi	Sedang
52	Rite	7,05	Rite	Ambalawi	Sedang
53	Mbawa	20,41	Mbawa	Donggo	Sedang
54	O'o	6,48	O'o	Donggo	Sedang
55	Kala	6,58	Kala	Donggo	Sedang
56	Punti	6,47	Punti	Soromandi	Sedang
57	Sai	7,7	Sai	Soromandi	Sedang
58	Bajo	7,3	Bajo	Soromandi	Sedang
59	Kore	7,03	Kore	Sanggar	Sedang
60	Sandue	6,42	Sandue	Sanggar	Sedang
61	Oi Saro	6,44	Oi Saro	Sanggar	Sedang
62	Labuan Kenanga	1,74	Labuan Kenanga	Tambora	Sedang
63	Tangga	1,89	Tangga	Monta	Sedang
64	Sie	1,03	Sie	Monta	Sedang
65	Simpasai	1,17	Simpasai	Monta	Sedang
66	Parado Rato	1,79	Parado Rato	Parado	Sedang
67	Parado Wane	1,07	Parado Wane	Parado	Sedang
Luas Kawasan Kumuh (Ha)		907,40			

Sumber Data : Dokumen RP2KPKPK Tahun 2025

Capaian kinerja pembangunan daerah Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bima Tahun 2020-2024 diukur dengan indikator kinerja luas kawasan kumuh. Kawasan kumuh adalah area permukiman dengan kondisi hunian dan lingkungan yang tidak layak huni, ditandai dengan kepadatan bangunan tinggi, minimnya akses terhadap infrastruktur dasar (seperti air bersih, sanitasi, dan drainase), serta kondisi lingkungan yang buruk. Semakin kecil luas Kawasan kumuh di satu wilayah menandakan semakin baik kondisi permukiman di wilayah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Luas kawasan kumuh di Kabupaten Bima terdapat pada tahun 2021 yaitu 41,72%, luasan Kawasan kumuh meningkat menjadi 49,18% pada tahun 2022, 52,22% pada tahun 2023, dan 71,35% pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Bima telah menunjukkan kinerja positif dalam pengurangan luas kawasan kumuh. Hal ini terlihat dari capaian kinerja penurunan luas kawasan kumuh yang terus meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Peningkatan tersebut merupakan wujud kinerja Pemerintah Kabupaten Bima untuk berkomitmen dalam penurunan luasan kawasan kumuh serta memastikan tertanganinya kawasan kumuh dengan baik.



Gambar 2.82.

Capaian Indikator Kinerja Luas Kawasan Kumuh Tahun 2020-2024

Sumber data: Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Bima. 2025

Kebutuhan perumahan berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat perkotaan. Bangunan rumah di Kabupaten Bima dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis yaitu rumah permanen, rumah semi permanen dan rumah panggung. Rumah permanen penyediaannya selain dilakukan secara individual, juga dilaksanakan oleh pengembang. Rumah semi permanen penyediaannya dilakukan secara individual dan juga disediakan melalui program bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Rumah panggung hanya dilakukan secara individu. Permasalahan perumahan dan kawasan permukiman adalah *backlog* rumah dan munculnya kawasan kumuh permukiman. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap *backlog* yaitu urbanisasi khususnya di perkotaan, terbatasnya lahan, serta terbatasnya kemampuan pengembang dan pemerintah sebagai penyedia rumah.

Masyarakat Kabupaten Bima masih membutuhkan rumah cukup banyak. Kebutuhan rumah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dari sisi kualitas perumahan, Kabupaten Bima masih dihadapkan pada masih banyaknya perumahan yang tidak sesuai dengan standar perumahan yang sehat. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni tersebut dipenuhi baik melalui bantuan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pengembang swasta, maupun perorangan. Intervensi program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah dilakukan mulai tahun 2016 dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta didukung oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari swasta. RTLH merujuk pada rumah yang kondisi bangunannya tidak memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kecukupan luas minimum untuk dihuni. Perkembangan penanganan RTLH beserta Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 di Kabupaten Bima didukung dari 5 (lima) sumber pembiayaan yaitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, *Corporate Social Responsibility* (SCR), dan Swadaya. Penanganan terhadap RTLH terbanyak terdapat pada tahun 2022 yaitu sebanyak 950 unit.

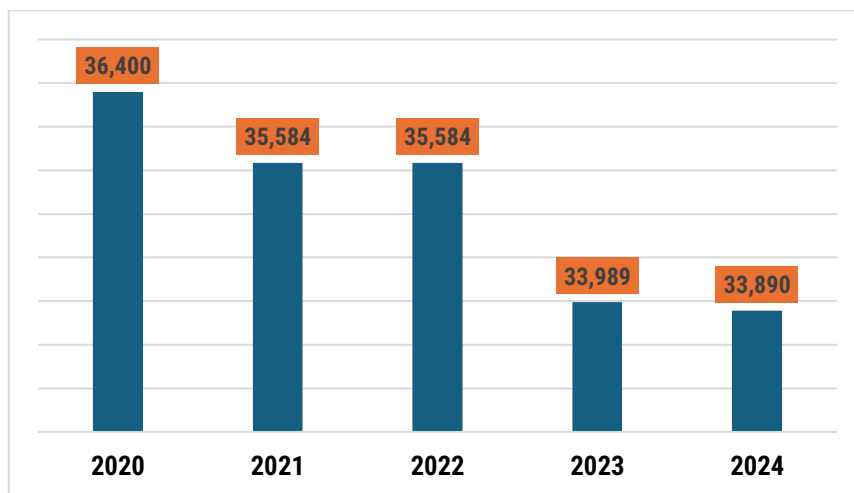


Tabel 2.72.
Perkembangan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Bima
Tahun 2020-2024

Tahun	Sumber Pembiayaan					Jumlah (Unit)
	APBN	APBD Prov.	APBD Kab/Kota	CSR	Swadaya/ lainnya	
2020	✓	✓	✓	-	-	466
2021	✓	-	✓	-	-	20
2022	✓	✓	✓	✓	-	1950
2023	✓	-	✓	✓	-	64
2024	✓	-	✓	-	✓	99

Sumber: Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bima, 2025

Pertumbuhan jumlah rumah di Kabupaten Bima tidak sebanding dengan kebutuhan rumah, sehingga menimbulkan ketimpangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan kebutuhan rumah (*Backlog*). Merujuk data Badan Pusat Statistik *backlog* kepemilikan sejumlah 27.166 unit dan backlog kepemilikan sejumlah 33.567 unit. Sepanjang tahun 2020-2024 RTLH terbanyak terdapat pada tahun 2020 yaitu sebanyak 36,400 unit. Jumlah RTLH terus berkurang menjadi 33,890 unit pada tahun 2024. Penurunan jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bima dari tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan adanya kinerja positif dalam rangka penanganan rumah tidak layak huni. Hal ini berkorelasi positif dengan capaian penurunan luasan kawasan kumuh di Kabupaten Bima yang terus menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



Gambar 2.83.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bima Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bima Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Bima telah melaksanakan realisasi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat. Jenis pelayanan dasar urusan perumahan rakyat terdiri dari: 1) Penyediaan & Rehabilitasi; 2) Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; dan 3) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan Penyediaan & Rehabilitasi memiliki indikator kinerja jumlah unit rumah korban dengan target 100% pada tahun 2024, realisasi pelayanan penyediaan & rehabilitasi telah mencapai 100% dengan



jumlah rumah tangga yang berhak mendapatkan layanan dan terlayani sebanyak 15. Pemerintah Kabupaten Bima memiliki kinerja positif dalam upaya penyediaan rumah korban bencana untuk rehabilitasi. Hal ini tergambar dari capaian target yang telah terpenuhi serta realisasi kinerja sebesar 100 persen.

Tabel 2.73.
Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET (%)	JUMLAH RUMAH TANGGA YANG BERHAQ MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA YANG TERLAYANI	REALISASI
Penyediaan Penyediaan & Rehabilitasi	Jumlah unit Rumah korban	100%	15	15	100%
Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	bencana yang ditangani pada tahun n/Jumlah Total rencana unit rumah yang akan ditangani pada tahun n	0%	0	0	0
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni/jumlah total rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria pelayanan	0%	0	0	0

Sumber Data: e-SPM Tahun 2025

5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan sosial terdiri dari 3 (tiga) sub urusan diantaranya: 1) Ketentraman dan Ketertiban Umum; 2) Bencana; dan 3) Kebakaran. Pemerintah Kabupaten Bima telah melaksanakan kewenangan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah administratif Kabupaten Bima. Pelaksanaan tugas penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Pemerintah Kabupaten Bima memiliki jumlah SATPOL PP pada tahun 2024 sebanyak 897. Kebutuhan jumlah SATPOL PP memperhatikan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Bima. Pada tahun 2024 jumlah penduduk di Kabupaten Bima sebanyak 543,460 jiwa. Rasio jumlah SATPOL PP per 10,000 penduduk pada tahun 2024 adalah 16,5. Pemerintah Kabupaten Bima perlu menyesuaikan rasio kebutuhan antara jumlah polisi pamong praja dan penduduk ke depan. Hal ini karena jumlah polisi pamong praja memiliki tren yang menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tetapi jumlah penduduk terus bertambah. Namun, selain penambahan jumlah. Pemerintah Kabupaten Bima juga dapat mengoptimalkan kinerja polisi pamong praja yang tersedia saat ini dalam menegakkan peraturan daerah serta pencapaian ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Bima.



Tabel 2.74.
Perkembangan Rasio Polisi Pamong Praja terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	954	976	982	909	897
2.	Jumlah penduduk	514.110	520.440	527.952	535.530	543.460
3.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	18,56	18,75	18,60	17,0	16,5

Sumber: Dinas Satpol PP Kab. Bima 2025

Pelaksanaan tugas penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum juga dilaksanakan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). LINMAS adalah satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah desa atau kelurahan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan ketahanan lingkungan masyarakat, serta berperan dalam penanganan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jumlah LINMAS sepanjang tahun 2020-2024 sebanyak 1.976. Rasio jumlah LINMAS per 10,000 penduduk pada tahun 2024 adalah 36,4. Jumlah petugas linmas Kabupaten Bima tidak mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Hal ini berbanding terbalik dengan penduduk Kabupaten Bima yang terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bima perlu mengoptimalkan kinerja petugas linmas melalui penguatan serta pengembangan kapasitas dalam deteksi dini serta meningkatkan peran aktif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di tingkat *grassroot*.

Tabel 2.75.
Rasio Jumlah Linmas Kabupaten Bima Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Linmas	1.972	1.976	1.976	1.976	1.976
2.	Jumlah penduduk	514.110	520.440	527.952	535.530	543.460
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	38,36	37,97	37,43	36,9	36,4

Sumber: Dinas Satpol PP Kab. Bima 2025

Pemerintah Kabupaten Bima telah melaksanakan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdiri dari 4 (empat) jenis diantaranya: 1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator capaian Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum perda dan perkara ; 2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan indikator capaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan Bencana; 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan indikator capaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana; dan 4) Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan indikator capaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.



Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum mencapai kinerja 100% dengan jumlah warga berhak mendapatkan pelayanan dan terlayani pada tahun 2024 sebanyak 310. Pelayanan Informasi Rawan Bencana mencapai kinerja 100% dengan jumlah warga berhak mendapatkan pelayanan dan terlayani sebanyak 131,282. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana mencapai kinerja 100% dengan jumlah warga berhak mendapatkan pelayanan dan terlayani sebanyak 25,566. Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencapai kinerja 100% dengan jumlah warga berhak mendapatkan pelayanan dan terlayani sebanyak 404.

Tabel 2.76.

Indikator kinerja bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET (%)	JUMLAH WARGA NEGERA BERHAK MENDAPAT PELAYANAN	JUMLAH WARGA NEGERA TERLAYANI	REALISASI
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum perda dan perkara	100%	310	310	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan Bencana	100%	132,282	132,282	100%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	100%	25,556	25,556	100%
4.	Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	404	404	100%

Sumber Data: e-SPM Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Bima dalam rangka menunjang kinerja perlindungan masyarakat dan pelaksanaan tugas Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran didukung dengan aset berupa armada pemadam kebakaran. Penanggulangan kebakaran di Kabupaten Bima masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius. Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah ketersediaan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK), yang berperan sebagai pedoman utama dalam mitigasi dan penanganan kebakaran secara lebih sistematis. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar informasi mengenai prosedur darurat kebakaran lebih mudah diakses. Sinergi antar instansi juga menjadi perhatian, mengingat belum adanya SOP koordinasi yang jelas dalam penanggulangan kebakaran, yang menyebabkan respons antar dinas belum berjalan optimal. Selain itu, ketersediaan tenaga ahli inspeksi serta investigasi kebakaran masih perlu diperkuat, agar pola dan penyebab kebakaran dapat diidentifikasi dengan lebih baik untuk peningkatan langkah pencegahan.



Dari sisi operasional, data lokasi strategis sumber air perlu dipetakan dengan baik guna memastikan akses yang cepat dan efisien bagi tim pemadam kebakaran. Kebutuhan atas pengisian air, juga menjadi perhatian untuk dapat ditingkatkan dalam upaya mempercepat operasional pemadam dan memastikan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat. Peningkatan kesejahteraan tenaga pemadam kebakaran juga perlu diperhatikan, terutama dalam standarisasi sertifikasi serta keseimbangan kompensasi dengan tingkat risiko pekerjaan, agar tenaga pemadam memiliki perlindungan yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, peningkatan kapasitas teknis dalam pemeliharaan kendaraan pemadam sangat penting untuk memastikan kesiapan operasional kendaraan di setiap situasi. Pemerintah Kabupaten Bima memiliki 15 armada pemadam kebakaran, jumlah armada pemadam kebakaran yang dapat dioperasikan sebanyak 13 armada. Ketersediaan armada pemadam kebakaran di Kabupaten Bima menunjukkan variasi dalam kondisi operasional. Sebagian besar kendaraan masih berfungsi, meskipun beberapa mengalami kerusakan sedang, terutama unit yang ditempatkan di Kecamatan Belo, Monta, Parado, Langgudu, Bolo, Madapangga, Wera, Ambalawi, dan Sape. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemeliharaan agar performa kendaraan tetap optimal dalam menangani keadaan darurat. Markas Komando (MAKO) memiliki dua unit fire truck yang tidak beroperasi, sementara unit lainnya, termasuk water supply, masih berfungsi dengan baik. Di beberapa lokasi seperti Palibelo dan Lambu, armada pemadam kebakaran beroperasi dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk respons kebakaran.

Tabel 2.77.
Jumlah Unit Armada Pemadam Kebakaran

No	Tempat Stanby	Jenis	NOPOL	Sumber Dana	Keterangan	Kondisi
1	Markas Komando (MAKO)	Fire Truck	B 9048 X1Z	HIBAH	Tahun 2022	Beroperasi
		Water Suplay	EA 9078 YY	APBD II	Tahun 2023	Beroperasi
		Fire Truck	EA 8106 X	APBD II		Tidak Beroperasi
		Fire Truck	EA 8131 X	APBD II		Tidak Beroperasi
2	Palibelo	Fire Truck	EA 9017 YY	APBD II	Tahun 2020	Beroperasi
3	Belo	Fire Truck	EA 9017 YY	APBD II	Tahun 2023	Beroperasi (Rusak Sedang)
4	Monta	Fire Truck	EA 8142 X	APBD II	Tahun 2007	Beroperasi (Rusak Sedang)
5	Parado	Fire Truck	EA 8130 X	APBD II	Tahun 2007	Beroperasi (Rusak Sedang)
6	Langgudu	Fire Truck	EA 9017 X	APBD II	Tahun 2007	Beroperasi (Rusak Sedang)
7	Bolo	Fire Truck	EA 8013 X	APBD II	Tahun 2007	Beroperasi (Rusak Sedang)
8	Madapangga	Fire Truck	EA 8132 X	APBD II	Tahun 2006	Beroperasi (Rusak Sedang)
9	Wera	Fire Truck	EA 8155 X	APBD II	Tahun 2007	Beroperasi (Rusak Sedang)
10	Ambalawi	Fire Truck	EA 8105 X	APBD II	Tahun 2007	Beroperasi (Rusak Sedang)
11	Sape	Fire Truck	EA 8126 X	APBD II	Tahun 2013	Beroperasi (Rusak Sedang)
12	Lambu	Fire Truck		APBD II	Tahun 2024	Beroperasi

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran, 2025



Pemerintah Kabupaten Bima dalam rangka menunjang kinerja perlindungan masyarakat dan pelaksanaan tugas Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran memiliki personil pemadam kebakaran. Secara keseluruhan, kebutuhan tenaga pemadam kebakaran di Kabupaten Bima masih perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran dan penyelamatan. Pada tahun 2024, jumlah tenaga Pemadam 1 yang tersedia masih belum mencapai kebutuhan minimal, dengan personil tersebar di Markas Komando (MAKO) serta beberapa pos kecamatan. Sumber Daya tenaga khusus seperti investigator lapangan, penyuluh kebakaran, dan inspektur kebakaran belum tersedia, kebutuhan atas tenaga khusus peran penting dalam investigasi insiden, edukasi masyarakat, dan evaluasi operasional pemadam kebakaran. Sementara itu, operator mobil pemadam sudah hampir memenuhi kebutuhan minimal, namun tenaga montir kendaraan pemadam, caraka mobil kebakaran, dan operator komunikasi kebakaran masih belum ada, padahal mereka berperan krusial dalam pemeliharaan kendaraan serta koordinasi informasi saat kejadian darurat. Secara keseluruhan, perbaikan sistem perlindungan kebakaran di Kabupaten Bima membutuhkan langkah-langkah strategis yang mencakup perencanaan yang lebih terstruktur, peningkatan koordinasi lintas instansi, optimalisasi fasilitas pendukung, serta penguatan tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi.

Tabel 2.78.
Data Kebutuhan Kualifikasi dan Jumlah Personil Pemadam Kebakaran

No	Kualifikasi	Jumlah			Tugas
		Keb. Minimal	Eksiting	Keterangan	
1	Pemadam 1	105	13	- 45 Orang di MAKO - 60 orang tersebar di 10 pos kecamatan - Berdasarkan data terdapat 21 orang yang telah mengikuti pelatihan, hanya saja tersisa 13 orang yang masih menjadi Tenaga Pemadam (8 org terangkat P3K di formasi lain)	Melaksanakan kegiatan operasional pemadaman kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi
	Pemadam 2	-	-	Belum prioritas	
	Pemadam 3	-	-	Belum prioritas	
2	Investigator Lapangan (Muda, Madya)	2	-		Melakukan investigasi penyebab kebakaran
3	Penyuluh Kebakaran (Muda, Madya)	2	-		Melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat
4	Inspektur Kebakaran (Muda, Madya, Utama)	1	-		Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan operasional pemadam kebakaran
5	Operator Mobil Pemadam	14	11	- Personil di MAKO	Mengoperasikan kendaraan pemadam dan memastikan kesiapan teknisnya



No	Kualifikasi	Jumlah			Tugas
		Keb. Minimal	Eksiting	Keterangan	
6	Montir Kebakaran Mobil	1	-		memeriksa dan memperbaiki seluruh peralatan dan kendaraan operasional kebakaran secara berkala maupun insidental, menguji mesin dan hasil perbaikannya, menyiapkan sarana perbaikan dan pengujian, serta menyusun laporan tugas secara rinci
7	Caraka Kebakaran Mobil	2	-		mengoperasikan dan memelihara sarana prasarana kontrol dan data, melaksanakan rencana operasi pemadaman, menyiapkan kebutuhan perbaikan dan pengujian, serta menyusun laporan tugas secara rinci
8	Operator Komunikasi Kebakaran	2	-		menyampaikan informasi kebakaran atau bencana kepada pimpinan dan unit terkait, mengoperasikan sistem komunikasi dan alarm kebakaran, serta menyusun laporan tugas secara rinci

Sumber data: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2025

Upaya penanggulangan bencana adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bima telah menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2024-2029. Penyusunan dokumen ini memiliki tujuan antara lain: 1) Sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Kebijakan ini nantinya merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan mekanisme untuk mengutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan; 2) Dokumen KRB digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan maupun intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana. Pendampingan dan intervensi para mitra harus dilaksanakan dengan berkoordinasi dan tersinkronisasi terlebih dahulu dengan program pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan 3) Dokumen KRB digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusun rencana dan jalur evakuasi, pengambilan keputusan daerah, tempat tinggal dan sebagainya. Sebagai upaya mitigasi atau penanggulangan bencana di Kabupaten Bima, dokumen KRB Kabupaten Bima Tahun 2024-2029 memuat



sasaran seperti peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas, peta kapasitas, peta risiko bencana, dan peta risiko multi bahaya.

Kabupaten Bima memiliki risiko bencana tinggi salah satunya banjir bandang, dalam rangka mitigasi bencana banjir bandang, Pemerintah Kabupaten Bima telah Menyusun dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Bandang. Tujuan penyusunan rencana kontinjensi ini juga untuk mewujudkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan aksi antisipatif dan menangani situasi kedaruratan akibat Banjir Bandang secara cepat dan efektif dengan upaya mengatur peran unsur pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi antisipatif serta penanganan kedaruratan Banjir Bandang dan Banjir Bandang yang terpadu.

Dokumen lainnya yang disusun dalam rangka mitigasi bencana adalah *Masterplan Integrated Area Development* Mitigasi Bencana Kabupaten Bima Tahun 2024-2030. Penyusunan Masterplan IAD Perhutanan Sosial Dalam Rangka Mitigasi Bencana ini dimaksudkan untuk mengikat komitmen para pihak dalam mengintegrasikan program dalam rangka meminimalkan bencana banjir, kekeringan, erosi di Kabupaten Bima dengan melibatkan masyarakat khususnya Kelompok Perhutanan Sosial dan kelompok masyarakat lainnya di DAS Palaparado sebagai epicentrum. Tujuan penyusunan Masterplan ini adalah sebagai pedoman bagi para pihak dalam mengintegrasikan program untuk mitigasi bencana di DAS Palaparado melalui peningkatan produktivitas lahan, pemulihan tutupan lahan, pelestarian sumber daya hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meminimalkan terjadinya resiko bencana banjir, longsor, kekeringan dan degradasi kesuburan lahan.

6) Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang sosial terdiri dari: 1) Pemberdayaan Sosial, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam sub urusan pemberdayaan sosial adalah Pemberdayaan sosial adalah: penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten/Kota, dan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah Kabupaten/Kota. 2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam sub urusan ini adalah pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal; 3) Rehabilitasi Sosial, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam sub urusan ini adalah rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum; 4) Perlindungan dan Jaminan Sosial, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam sub urusan ini adalah pemeliharaan anak-anak terlantar dan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota; 5) Penanganan Bencana, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam sub urusan ini adalah penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota, dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota; dan 6) Taman Pahlawan, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam sub urusan ini adalah pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten Bima telah melaksanakan Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam rangka mencegah, mengurangi timbulnya permasalahan sosial.



keadaan di Kabupaten Bima menunjukkan masih banyak penduduk yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak. Selain itu juga menangani dan melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan melibatkan masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan bidang sosial yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bima merupakan upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial agar hidup layak sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pembangunan PMKS ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

7) Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal terdiri dari 6 (enam) urusan sebagai berikut:

- Urusan Wajib Pendidikan
- Urusan Wajib Kesehatan
- Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Ketentraman Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Urusan Wajib Sosial

Untuk mencapai Penerapan Standar Minimal, maka dapat diukur dari capaian indikator SPM sebagai berikut:

Tabel 2.79.
Target capaian SPM Kabupaten Bima Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	2021	2022	2023	2024
Bidang Pendidikan							
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,16	95,74	95,19	98,98
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	88,89	89,44	93,19	92,30
3..	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	99,90	90,07	78,41	96,22
Bidang Kesehatan							
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat kan layanan kesehatan	%	100	90,72	98,10	89,80
2	Pelayanan KesehatanIbu	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97,74	94,60	90,60	80,21



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	2021	2022	2023	2024
	bersalin sesuai standar di fasilitas Kesehatan						
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	99,81	94,80	93,85	82,70
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapat kan layanan Kesehatan	%	97,74	91,98	90,22	91,75
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia PendidikanDasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	87,08	80,43	96,97
6	Pelayana Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	98,61	93,94	83,42	99,77
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanankesehatan	%	99,56	83,91	93,92	98,59
8	PelayanKesehata n pada Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	97,04	97,40	100	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	97,72	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	99,93	100	100	97,35
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	80,22	26,08	87,69	83,31
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia HIV (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) mendapatkan layanan keseha tan	%	90,34	78,41	84,69	65,59
Pekerjaan Umum							
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air Minum sehari-hari	Jumlah Warga negara yang Memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	82,62	100	100	100



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	2021	2022	2023	2024
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	99,44	100	100	100
Bidang Perumahan							
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	99,66	100	100	100
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten kota	jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100
Bidang Ketentraman							
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	%	94,30	95,83	97,20	95,33
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	%	83,09	100	100	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	75,62	100	100	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	68,76	100	100	100
5	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	%	76,84	89,12	96,30	100
Bidang Sosial							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	18,07	94,18	99,58	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh sosial diluar panti	%	24,00	95,11	97,24	99,84



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	2021	2022	2023	2024
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	2,14	94,34	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	44,08	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	%	100	100	100	86,74

Sumber: Laporan Realisasi SPM Kab. Bima Tahun 2025

2.4.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan salah satu indikator yang tertuang dalam 31 indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bima terkait dengan penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang menunjukkan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Pada tahun 2020 TPT di Kabupaten Bima sebesar 2,89% dan menjadi yang tertinggi pada periode lima tahun terakhir. TPT terendah di Kabupaten Bima terdapat pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,58%. TPT di Kabupaten Bima pada tahun 2024 sebesar 2,19%. TPT di Kabupaten Bima menunjukkan tren fluktuatif, hal ini mencerminkan kondisi ekonomi dan lapangan kerja yang dinamis. Tingginya TPT pada tahun 2020 dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan melemahnya sektor ekonomi yang berdampak sektor lapangan kerja melakukan efisiensi tenaga kerja melalui kebijakan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Sementara itu, penurunan TPT pada tahun 2021 menunjukkan pemulihan ekonomi yang mulai terjadi yang ditandai dengan mulai terbukanya kesempatan kerja di Kabupaten Bima. Kenaikan TPT pada tahun 2024 menjadi 2,19% menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam penyediaan lapangan kerja. Hal ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang lebih efektif dalam menciptakan kesempatan kerja, seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan sektor-sektor yang berpotensi menyerap tenaga kerja.



Tabel 2.80.
Tingkat Pengangguran Terbuka pada 2020 - 2024

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tingkat Pengangguran Terbuka				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Menurunnya angka Pengangguran Terbuka	%	2,89	1,58	2,28	2,15	2,19

Sumber : BPS Kabupaten Bima 2019-2025

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota. Partisipasi perempuan yang masuk di Lembaga Pemerintah menjadi salah satu wujud PUG. Partisipasi perempuan dengan jumlah tertinggi yang masuk di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Bima terdapat pada tahun 2020 dan tahun 2021 dengan jumlah 3,584 pegawai eksekutif yang terbagi dalam golongan eselon tingkat II hingga V, staf atau fungsional umum, dan guru. Partisipasi perempuan dengan jumlah tertinggi yang masuk di lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Bima terdapat pada tahun 2024 dengan jumlah 8 orang. Partisipasi perempuan yang masuk di lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 2 orang dalam periode 2020-2023. Kondisi partisipasi perempuan yang masuk di lembaga pemerintah di Kabupaten Bima menunjukan hal yang positif, hal ini menandakan adanya kesetaraan gender di lembaga pemerintah, sehingga jauh dari ketimpangan jumlah partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam hal aktualisasi di lembaga pemerintah.

Tabel 2.81.
Jumlah Perempuan pada Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bima Tahun 2020 - 2024

No	Jumlah Perempuan pada Lembaga pemerintahan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Eksekutif					
	a. Eselon II	2	2	1	1	-
	b. Eselon III	21	36	21	25	27
	c. Eselon IV	187	167	156	150	89
	d. Eselon V	-	-	3	3	-
	e. Staf/Fungsional Umum	1.204	1.493	1.199	934	1.446
	f. Guru	2.250	2.250	1.484	1.463	2.795
	g.Total jumlah pegawai	3.584	3.584	3.505	3.392	6.484
2	Legislatif/Total Anggota DPRD Kab. Bima	3	3	3	3	8
3	KPU Kab. Bima	2	2	2	2	-

Sumber data: BPS Kab. Bima 2025

Pemerintah Kabupaten Bima dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan memiliki kewenangan dan tugas Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota dan penyediaan



layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. Kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kasus di Kabupaten Bima tahun 2024 adalah sebanyak 64 kasus yang didominasi oleh pelecehan sebanyak 41 kasus, kekerasan fisik 10 kasus, sementara penganiayaan sebanyak 7 kasus dan penelantaran sebanyak 2 kasus. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bima pada tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu adanya optimalisasi pencegahan kasus kekerasan anak. Merujuk Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu melakukan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan.

Tabel 2.82.

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kasus Di Kabupaten Bima tahun 2024

No	Kecamatan	TAHUN 2022	TAHUN 2023	JENIS KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK TAHUN 2024									JUMLAH
				KDRT	Perebutan Hak Asuh	Penganiayaan	Pengancaman	Penelantaran Anak	Penculikan Anak	Kekerasan Fisik	TTPO	Pelecehan Seksual	
1	Madapangga	2	1									5	5
2	Bolo	4	8			1				1		5	7
3	Donggo	2	3										0
4	Sanggar		4									1	1
5	Tambora		-									3	3
6	Monta	4	5					1		1		3	5
7	Parado		-									3	3
8	Woha	3	6						1	2		3	6
9	Palibelo	3	7			2						5	7
10	Belo	5	3		2	1						4	7
11	Wera	4	5			1				1		1	3
12	Ambalawi	5	2										0
13	Sape	6	8			1				2		3	6
14	Lambu	4	6									2	2
15	Langgudu	9	4			1		1		1			3
16	Wawo	5	2							1		1	2
17	Soromandi		4				1			1		2	4
18	Lambitu	2	-										0
Jumlah		58	68	0	2	7	1	2	1	10	0	41	64

Sumber data: Dinas DP3AP2KB Kab. Bima. 2025

3) Ketahanan Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang pangan merupakan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dan tugas penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota. Tingkat pemenuhan konsumsi pangan masyarakat merupakan perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten Bima yang diukur berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). Upaya penganekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan oleh masing-masing sektor, namun masih ditemui berbagai masalah. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan adalah: 1) belum tercapainya skor mutu beragam dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan; 2) cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota; 3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; 4) lambatnya perkembangan, penyebaran, penyerapan teknologi pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, dan sosial; dan 5) kurangnya fasilitas pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Hal ini ditandai dengan



masih adanya kasus keracunan yang terjadi di masyarakat karena kurangnya pengetahuan tentang mutu dan keamanan pangan, sehingga perlu adanya peningkatan mutu pangan baik segar maupun olahan yang beredar di masyarakat. Hal tersebut dapat dikurangi melalui pengembangan jejaring keamanan pangan, meningkatkan pengetahuan petani, kelompok tani dan pedagang dalam penanganan mutu pangan di masyarakat, adanya hasil pertanian yang bersertifikat dan berlabel, diketahuinya kandungan residu produk pangan segar, sayuran dan buah-buahan serta meningkatnya kewaspadaan keamanan pangan.

4) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan. Pemerintah Kabupaten Bima dalam kinerja urusan pencatatan sipil atau pendaftaran penduduk dapat dilihat dari KTP yang diterbitkan. Sepanjang tahun 2020-2024 pendaftaran penduduk dengan penerbitan KTP sebanyak 369,640. Penerbitan akta kelahiran pada tahun 2024 sebanyak 154,583 yang lebih kecil dibanding tahun 2023. Pencatatan kasus perceraian di Kabupaten Bima pada tahun 2024 sebanyak 4.230. pencatatan atas jumlah dokumen Kartu Keluarga di Kabupaten Bima pada tahun 2024 sebanyak 174.974. Kinerja pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil saat ini dirasakan belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbatasnya sumberdaya manusia aparatur pelaksana adminduk capil. serta terbatasnya infrastruktur pendukung/fasilitas IT sehingga data kependudukan dan pencatatan sipil yang tersedia belum terintegrasi dalam suatu sistem data base yang mudah diakses untuk berbagai kepentingan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bima terus berupaya dan komitmen meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Pada tahun 2017 telah melaksanakan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu terhadap aparatur pengelola SIAK dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan sosialisasi tentang penerapan elektronik KTP (E-KTP). Dengan adanya perubahan kewenangan pencetakan E-KTP yang semula dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan sekarang telah dialihkan ke Pemerintah Daerah, maka diharapkan pada Tahun 2020 semua penduduk di Kabupaten Bima wajib KTP menggunakan E-KTP. Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Untuk jumlah kepemilikan dokumen kependudukan Kabupaten Bima tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83.
Kepemilikan Dokumen Kependudukan Kabupaten Bima Tahun 2020 - 2024

No	Dokumen Kependudukan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	KTP	344.749	310.117	347.973	363.035	369.640
2	Akta kelahiran	168.004	298.782	156.552	160.404	154.583
3	Akta Perkawinan	487	121.427	302.009	159.045	168.289
4	Akta Perceraian	1	1	0	3.481	4.230
5	Akta Pengakuan dan Pengesahan anak	-	-	1	1	1
6	Akta Kematian	205	3.067	1.894	7.873	10.476
7	Kartu Keluarga	163.354	176.523	169.037	171.519	174.974



No	Dokumen Kependudukan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
8	Jumlah penduduk wajib KTP	379.200	403.384	388.206	380.555	393.403
9	(Jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah wajib KTP) x 100%	90,88	76,87	89,63	95,40	93,96
10	Akte Kelahiran Gratis (usia 0 s/d 60 hr)	94,35	97,14	99,24	98,25	97,89

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2025

Pemerintah Kabupaten Bima dalam rangka optimalisasi kinerja urusan pemerintahan bidang administrasi dan kependudukan telah melakukan internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025-2029 ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029, dan Renstra Perangkat Daerah.

Identifikasi Indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ke Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra)
Provinsi: Nusa Tenggara Barat
Kab/Kota: Kabupaten Bima

No	Indikator	RPJPD	RPJMD	Renstra	Status Integrasi Indikator PJPK dalam Dokrenda (tidak perlu diisi, sudah otomatis terisi)	TARGET 2025-2029					RENCANA AKSI
						2025	2026	2027	2028	2029	
1	Total Fertility Rate (TFR)	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	ADA	2,47	2,44	2,4	2,38	2,35	
2	Age Spesific Fertlity Rate (ASFR) 15-19 Tahun	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	ADA	26,4	26,3	26,2	26,1	26	
3	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	ADA	83,9	84,2	84,85	85,5	86	
4	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas	Ada	Ada	Ada	ADA	8,55	8,69	8,83	8,97	9,11	
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TIDAK ADA	-	-	-	-	-	
6	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TIDAK ADA	-	-	-	-	-	
7	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	Ada	Ada	Ada	ADA	30,7	29,2	27,2	26,2	24,7	
8	Angka Kematian Bayi (AKB)	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TIDAK ADA	-	-	-	-	-	
9	Angka Kematian Ibu (AKI)	Ada	Ada	Ada	ADA	8 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	6 Kasus	6 Kasus	
10	Tingkat Kemiskinan	Ada	Ada	Ada	ADA	12,18	11,39	10,6	9,81	9,02	
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita	Ada	Ada	Ada	ADA	0,6661	0,6741	0,6821	0,69	0,698	
12	Persentase Pekerja Informal	Tidak Ada	Ada	Ada	ADA	62,37	62,91	63,46	64	64,54	
13	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor	Ada	Ada	Ada	ADA	0,066	0,0865	0,1069	0,1274	0,1478	
14	Gini Ratio	Ada	Ada	Ada	ADA	0,344 (Indeks)	0,337 (Indeks)	0,329 (Indeks)	0,322 (Indeks)	0,314 (Indeks)	
15	PDRB Perkapita	Ada	Ada	Ada	ADA	32,75 (Rp Juta)	42,64 (Rp Juta)	52,54 (Rp Juta)	62,43 (Rp Juta)	72,33 (Rp Juta)	
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	Ada	Ada	Ada	ADA	0,0204	0,0202	0,02	0,0197	0,0195	
17	Persentase Kepemilikan NPWP/Buku Tabungan	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	ADA	0,35	0,38	0,41	0,44	0,48	
18	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	Tidak Ada	Ada	Ada	ADA	63,88	64,01	64,05	64,1	64,5	
19	Indeks Perlindungan Anak	Tidak Ada	Ada	Ada	ADA	56,1	56,15	56,2	56,25	56,3	
20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan(%)	Ada	Ada	Ada	ADA	0,7878	0,8009	0,8139	0,827	0,8375	
21	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman(%)	Ada	Ada	Ada	ADA	7,23	9,93	12,63	15,33	18,03	
22	Indeks Lansia Berdaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TIDAK ADA	-	-	-	-	-	
23	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TIDAK ADA	-	-	-	-	-	
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	Ada	Ada	Ada	ADA	100%	100%	100%	100%	100%	
25	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Tidak Ada	Ada	Ada	ADA	4	10,5	15,2	20	25	
26	Rate <i>Nett Recent Migrasi</i>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TIDAK ADA	-	-	-	-	-	
27	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	ADA	100%	100%	100%	100%	100%	
28	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	ADA	100%	100%	100%	100%	100%	
29	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	ADA	100%	100%	100%	100%	100%	
30	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	ADA	70%	75%	80%	85%	90%	
JUMLAH INDIKATOR MASUK						30	30	30	30	30	0
JUMLAH INDIKATOR BELUM MASUK						0	0	0	0	0	30

Gambar 2.84.
Indikator PJPK Tahun 2025-2029

5) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Bima melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melakukan Review Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). SPKD Kabupaten Bima disusun pertama kali oleh TKPKD pada Tahun 2006. Strategi penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan,



maupun masyarakat miskin sendiri agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan, dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, maka dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. Adapun jumlah PKK Kabupaten Bima tahun 2020 adalah 210 unit terdiri dari PKK tingkat kabupaten sebanyak 1 unit, PKK tingkat kecamatan 18 unit dan PKK tingkat desa sebanyak 191 desa.

Posyandu Aktif Posyandu adalah suatu wadah pelayanan kesehatan masyarakat dari keluarga berencana dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tujuan penyelenggaraan posyandu, yaitu: 1). Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) hamil, melahirkan, dan nifas, 2). Membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), 3). Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. 4). Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga, dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera. Adapun jumlah posyandu Kabupaten Bima Tahun 2023 adalah 661 unit yang tersebar diseluruh desa di Kabupaten Bima.

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa untuk menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya. Selain itu, posisi penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes juga merupakan aspek penting lainnya. BUMDes yang ideal mampu menjadi poros kehidupan masyarakat desa, karena ia berdiri atau ada untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat Desa dari berbagai elemen. Jumlah BUMDes yang sudah terbentuk di Kabupaten Bima sampai Tahun 2023 adalah sebanyak 191 unit. BUMDes yang terdaftar memiliki sertifikat pendaftaran Badan Hukum di Kemenkumham sebanyak 18 unit, yang mengelola Bank Sampah sebanyak 5 unit, sementara 13 dari 191 BUMDES tidak aktif.

6) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota dan Pelaksanaan advokasi,



komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Peserta KB aktif merupakan salah satu indikator kinerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pada tahun 2023 jumlah peserta KB aktif sebanyak 114,01. Indikator lainnya adalah pasangan usia subur, pada tahun 2023 jumlah pasangan usia subur di Kabupaten Bima sebanyak 55.286. Pengendalian penduduk dan program keluarga berencana sangat penting dilakukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Dengan mengatur pertumbuhan penduduk, kita dapat mengurangi tekanan pada infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, yang sering kali tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan populasi. Selain itu, keluarga berencana membantu pasangan untuk merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak, sehingga meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.

Tabel 2.84.
Pencapaian peserta KB baru Kabupaten Bima Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Peserta KB Baru	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) pada peserta KB baru	7.815	7.815	8.213	8.663
2	Peserta KB baru atau realisasi PPM	6.374	6.522	7.256	7.868
3	% Peserta KB Baru terhadap PPM	81,56	83,45	88,35	90,82
	Peserta KB Aktif			55.684	48.493
4	Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) pada peserta KB Aktif	79,96	79,96	70.586	76.666
5	Pasangan Usia Subur	99.859	97.740	47.456	55.286
6	Peserta KB Aktif	81.381	77.785	85,22	114,01
7	% Peserta KB Aktif terhadap PPM	101,78	97,28	67,23	72,11
8	% Peserta KB Aktif terhadap PUS	81,50	79,58	199	347
9	Peserta Program KB Pria	1.518	1.461	8.213	8.663
10	Jenis Kontrasepsi yang digunakan				
	- IUD	561	367	2.241	1.983
	- MOP/MOW	21	13	630	558
	- Implant	1.579	1.975	9.594	10.759
	- Suntikan	3.857	3.832	34.155	40.804
	- Pil	255	284	466	761
	- Kondom / OVG	101	51	144	307

Sumber data: BP3AP2KB Kab. Bima. 2024

7) Perhubungan

Indikator untuk mengukur kinerja atas urusan wajib perhubungan meliputi sarana dan prasarana perhubungan. Kondisi sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Bima hingga Tahun 2023 terdiri dari terminal angkutan darat sebanyak 6 unit, pelabuhan laut sebanyak 2 unit, pelabuhan penumpang lokal sebanyak 10 unit dan bandar udara sebanyak 1 unit, kendaraan angkutan umum 894 Unit dan angkutan penyeberangan rakyat sebanyak 84 unit. Kabupaten Bima memiliki berbagai sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi. Kabupaten Bima terdapat 6 terminal angkutan darat, yang berfungsi sebagai titik utama bagi transportasi darat, baik untuk perjalanan antarkota maupun dalam wilayah setempat. Sektor transportasi laut juga cukup beragam, dengan 2 pelabuhan pengumpan regional dan 4 pelabuhan pengumpan lokal, yang berperan dalam distribusi barang dan penumpang di kawasan pesisir. Selain itu, terdapat 1 pelabuhan penyeberangan kelas I, yang kemungkinan menjadi titik vital bagi lalu



lintas antarwilayah, khususnya dalam konektivitas antar pulau. Disamping itu, terdapat 31 terminal khusus (laut), menunjukkan adanya aktivitas maritim yang cukup tinggi, baik untuk keperluan industri, perikanan, maupun distribusi logistik. Sementara itu, konektivitas udara difasilitasi oleh 1 bandar udara pengumpul skala tersier, yang mungkin berfungsi sebagai hub bagi penerbangan komersial maupun logistik dalam skala terbatas.

Secara keseluruhan, sektor perhubungan di Kabupaten Bima menghadapi beberapa tantangan strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Beberapa isu utama berkaitan dengan infrastruktur jalan, transportasi publik, regulasi, dan sistem pengelolaan fasilitas yang belum optimal. Salah satu perhatian utama adalah optimalisasi perlengkapan jalan, yang masih perlu ditingkatkan agar lebih mendukung keselamatan pengguna. Marka dan rambu jalan belum tersedia secara memadai di lokasi strategis, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan memperlambat arus lalu lintas. Sektor transportasi laut, beberapa pelabuhan strategis mengalami kondisi buruk akibat minimnya pemeliharaan dan investasi. Hal ini menghambat konektivitas maritim serta distribusi barang. Selain itu, belum tersedianya dermaga wisata yang memadai di Sape dan Lambu menyebabkan transportasi wisata kurang terfasilitasi, menghambat pengembangan ekonomi lokal. Dari sisi regulasi, belum adanya dokumen Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) untuk perencanaan transportasi mengakibatkan sistem transportasi berkembang tanpa arahan yang sistematis. Regulasi kendaraan umum perkotaan juga masih belum jelas, sehingga berpotensi menghambat pengoperasian transportasi umum yang terstruktur.

Tantangan lain yang cukup mendesak adalah kurangnya integrasi sistem transportasi publik, dengan penumpang lebih memilih akses di luar terminal karena kemudahan transportasi yang mengakibatkan kemacetan di beberapa titik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem masih belum sepenuhnya terpusat di terminal resmi serta integrasi antar moda belum sepenuhnya dapat dioptimalkan. Selain itu, minimnya fasilitas komunikasi publik menyebabkan informasi terkait kebijakan transportasi kurang tersampaikan dengan baik, menghambat partisipasi masyarakat. Salah satu isu yang membutuhkan perhatian paling tinggi adalah minimnya peralatan Uji KIR, yang berdampak pada akurasi uji kendaraan. Terbatasnya anggaran untuk pengadaan alat uji mengakibatkan kendaraan beroperasi tanpa standar keselamatan yang jelas, meningkatkan risiko kecelakaan serta penurunan kualitas layanan transportasi. Selain dari gambaran tentang kebutuhan sarana prasarana transportasi, dalam rangka peningkatan PAD, urusan perhubungan merupakan salah satu penambah PAD, salah satunya Retribusi parkir. Saat ini, sejumlah titik lokasi parkir telah beroperasi, namun optimalisasi penerimaan masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu kendala utama adalah pendataan yang belum akurat, di mana penghitungan retribusi masih berbasis asumsi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara jumlah kendaraan yang parkir dengan jumlah pendapatan yang seharusnya diterima, sehingga berdampak pada ketidakefisienan dan potensi kehilangan pendapatan daerah. Selain itu, dari aspek perizinan, sistem tenaga kerja dalam pengelolaan parkir masih didominasi oleh tenaga lepas yang tidak bernaung di bawah pihak ketiga berbadan hukum. Situasi ini dapat berimplikasi pada kurangnya kontrol serta standarisasi operasional, yang berdampak pada efisiensi pengelolaan parkir dan kepatuhan terhadap regulasi. Terakhir, transparansi penyetoran retribusi ke kas daerah masih perlu ditingkatkan. Minimnya mekanisme pencatatan dan pengawasan yang ketat berisiko menyebabkan



ketidaktepatan dalam pelaporan serta penggunaan dana retribusi. Tanpa sistem pelaporan yang jelas, potensi kebocoran pendapatan daerah menjadi lebih tinggi.

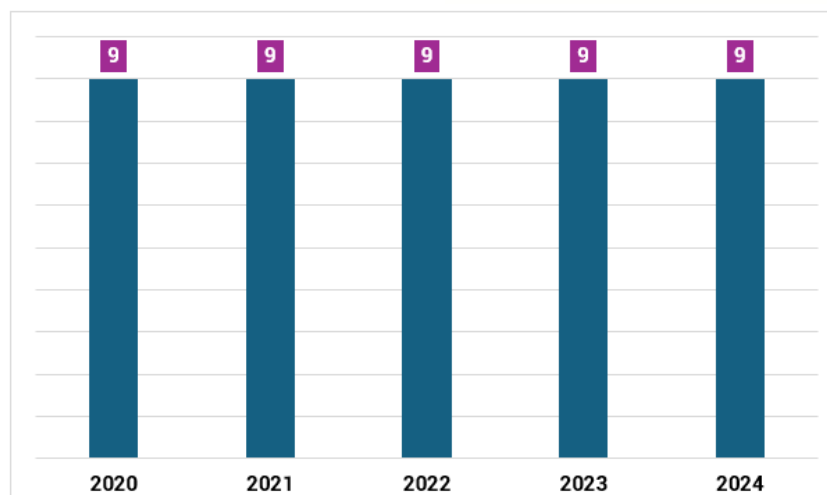
Tabel 2.85.
Jenis Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Bima Tahun 2020-2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Terminal angkutan darat	6	6	6	6
2	Pelabuhan laut	2	2	2	2
3	Bandar Udara	1	1	1	1
4	Kendaraan angkutan umum				
	a. Bis trayek dalam kabupaten	10	10	39	43
	b. Bis AKAP	10	10	10	19
	c. Truk	1.200	1.250	936	821
	d. Bemo	5	5	5	11
	e. Kendaraan Roda 2	-	-	-	-
5	Angkutan penyeberangan rakyat	84	84	84	84
6	Pelabuhan Penumpang Lokal	10	10	10	10

Sumber data: Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kab. Bima. 2024

8) Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kabupaten Bima memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. Kewenangan tersebut diantaranya: 1) Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika; 2) Informasi dan Komunikasi Publik; dan 3) Aplikasi Informatika. Penyelenggaraan layanan Kantor Pos di Kabupaten Bima dapat dilihat dari jumlah Kantor Pos yang beroperasi. Pada tahun 2020-2024 jumlah Kantor Pos di Kabupaten Bima sebanyak 9 yang tersebar di 9 Kecamatan. Terdapat 9 Kecamatan di Kabupaten Bima yang belum tersedia Kantor Pos.



Gambar 2.85.
Jumlah Kantor Pos di Kabupaten Bima Tahun 2020-2024

Kondisi informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Bima dapat diketahui dari jumlah media komunikasi masyarakat yang ada di Kabupaten Bima adalah media cetak lokal sebanyak 17 media, media elektronik sebanyak 2 lokal, Institusi pers sebanyak 1 dan



wartawan sebanyak 109 orang. Upaya pembangunan informasi yang dilakukan oleh Pemkab Bima pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai hal-hal berikut:

- a. Tercapainya transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- b. Membangun kesadaran demokrasi dalam pemerintahan;
- c. Meningkatkan respon dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan berbagai program pembangunan daerah.
- d. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima adalah:
- e. Radio Wireless Acces Point 1 berfungsi baik untuk mengirim frekuensi layanan internet dan Komunikasi Data ke Dinas Dikpora dan BKD;
- f. Radio Wireless Acces Point 2 berfungsi baik untuk mengirim frekuensi layanan internet dan Komunikasi Data ke Setda (Bagian Humas Protokol dan Bagian Umum);
- g. Radio Wireless Station pada Dinas Dikpora, BKD dan Setda berfungsi baik menerima frekuensi layanan internet dan komunikasi data;
- h. Radio Wireless Hotspot berfungsi baik untuk melayani internet gratis di Dinas Perhubungan Kominfo, Dinas Dikpora dan SETDA;
- i. Jaringan Kabel UTP berfungsi baik sebagai media layanan internet dan komunikasi data secara internal pada Dinas Perhubungan Kominfo, Dinas Dikpora, BKD dan Setda (Bagian Humas Protokol, dan Bagian Umum);
- j. Tower sebagai tempat pemasangan Radio Wireless di Dinas Perhubungan Kominfo, Dinas Dikpora dan SETDA dalam kondisi baik;
- k. Komputer 12 unit pada Media Center berfungsi baik untuk akses internet gratis bagi seluruh pegawai dan masyarakat;

Infrastruktur JARKOMDA (Jaringan Komunikasi Daerah) sebagai cikal bakal jaringan komunikasi data sampai ke tingkat kecamatan dan desa telah mengintegrasikan 5 SKPD pada Tahun 2016 dan pada Tahun 2019 akan bertambah 20 SKPD serta bisa menghubungkan seluruh SKPD sampai ke tingkat kecamatan.

9) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemerintah Kabupaten Bima memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain: 1) penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota; 2) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. Pengembangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Bima Tahun 2023 diarahkan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat secara nyata sehingga dapat memperkuat ketahanan daerah Kabupaten Bima disegala bidang. Pembangunan di sektor Koperasi dan UKM pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan dengan perkembangan jumlah koperasi dan jumlah anggota. Koperasi aktif di Kabupaten Bima dengan jumlah terbanyak terdapat pada tahun 2024 yaitu sebanyak 240. Jumlah pengelola koperasi di Kabupaten Bima dengan jumlah pengelola terbanyak terdapat pada tahun 2021 yaitu 2.085.

Koperasi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memberdayakan anggota komunitas. Dengan



adanya koperasi, masyarakat dapat mengakses layanan keuangan, seperti simpan pinjam, yang dapat mendukung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memulai usaha kecil. Koperasi juga mendorong kolaborasi antar anggota, sehingga menciptakan solidaritas dan saling mendukung dalam pengembangan usaha. Selain itu, dengan meningkatnya jumlah koperasi dan anggota di Kabupaten Bima, terlihat bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya model ekonomi yang berbasis pada kebersamaan dan partisipasi. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan taraf hidup individu, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah, sehingga koperasi menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bima.

Tabel 2.86.
Jumlah Koperasi Tahun 2020 - 2024

No	Jumlah koperasi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi	300	302	305	311	320
	a. Koperasi Aktif	214	218	221	227	240
	b. Koperasi tidak aktif	86	84	84	84	80
2	Jumlah anggota	49.137	48.949	49.230	48.532	48.217
3	RAT dengan jumlah	111	115	139	141	142
4	Jumlah pengelola	2.010	2.085	2.124	2.601	2.029

Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima. 2025

Untuk terwujudnya Koperasi dan UKM yang aktif dan berkualitas telah dilakukan upaya:

- Melakukan bimbingan teknis terhadap berbagai aspek; baik aspek organisasi, manajemen/tatalaksana dan usaha UKM
- Fasilitas bagi perkuatan modal KUKM
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan organisasi dan usaha koperasi melalui kegiatan monitoring serta penilaian klasifikasi dan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi.
- Melakukan koordinasi dengan berbagai dinas instansi teknis yang sangat terkait dalam upaya pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Struktur permodalan koperasi dan UKM terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu modal sendiri dan modal luar. Nilai modal koperasi sendiri lebih besar nilainya dari modal luar. Total nilai asset Koperasi Kabupaten Bima tahun 2018 sebesar Rp.139.891.221.000,- mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi Rp. 506.630.635.000,-, namun pada tahun 2023 turun menjadi Rp. 181.567.828.000,-. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur permodalan koperasi dan PKM Kabupaten Bima tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87.
Struktur Permodalan Koperasi dan PKM Tahun 2020-2024

No	Jenis Modal	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Modal sendiri (dalam ribu)	149.918.297	163.249.871	506.630.635	181.567.828	173.165.854
2	Modal Luar (dalam ribu)	31.440.966	28.627.802	28.941.074	25.938.763	25.927.890
	Asset (dalam ribu)	220.406.570	210.813.139	233.880.557	245.686.025	236.551.125

Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima. 2025



10) Penanaman Modal

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Bima Tahun 2020 - 2024 salah satunya adalah peranan investasi. Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan iklim usaha yang kondusif merupakan elemen utama dalam peningkatan investasi. Minat investasi di Kabupaten Bima masih rendah. Dalam pengertian makro ekonomi, investasi secara fisik adalah akumulasi modal yang besarnya dapat dicerminkan dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Investasi atau PMTB berasal dari berbagai instansi baik pemerintah, swasta (PMA dan PMDN) maupun rumah tangga (masyarakat). Pemerintah Kabupaten Bima perlu menggiatkan berbagai inovasi serta upaya alternatif dalam menghadirkan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bima. Hal ini karena investasi memiliki peran penting dalam upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan. Hal ini berdampak pada penurunan angka pengangguran dan persentase kemiskinan pada jangka panjang. Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di Kabupaten Bima dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.88.
Perkembangan Rencana Investasi Kabupaten Bima Tahun 2024

NO	PROYEK	RENCANA	REALISASI INVESTASI TRIWULAN	Ket
	(KBLI)	INVESTASI (Rp)	JUMLAH	
1	03111(Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip dilaut/Penangkapan dan Budidaya)	78.000.000.000	-	Perizinan yang telah diterbitkan: NIB, Surat Izin Usaha Perikanan dan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil. (Sumber Data: LKPMonline;OSS)
	03211 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip dilaut/Penangkapan dan Budidaya)	78.000.000.000	-	
	03212 (Budidaya Pembenihan Ikan dilaut/Penangkapan dan Budidaya)	78.000.000.000	-	
	30111(industry kapal dan perahu/pembuatan dan perbaikan)	1.550.500.000.000	-	
2	03254 (Pembesaran Crustacea Air Payau)	600.000.000	18.533.336.426	Sumber data LKPMonline
3	03254 (Pembesaran Crustacea Air Payau)	6,000,000,000	9.609.520.178,00	Perusahaan ini telah memiliki NIB; Izin Lokasi yang efektif terbit tgl 18 sept 2019; Pemenuhan Standard IMB (sumber data: OSS)
	36002 (Penampungan dan Penyaluran Air Baku)	600.000.000	-	
4	Mutiara	31.859.629.304	13.535.593.257	Sumber data LKPMonline
5	35103 (Distribusi Tenaga Listrik/SUTM 20 kv Bima – Bajo Pu	5.303.685.285	256.590.000	Sumbe data LKPMonline dan OSS
6	03254(Pembesaran Crustacea Air Payau)	1,160,000,000	6.980.791.272	Sumbe data LKPMonline dan OSS
	03211(Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip laut)		-	-
	03212 (Pembenihan Ikan Laut)		-	-
	03216 (Pembesaran Crustacea Laut)		-	-
	03221 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam)		-	-
	03222 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung)		-	-



NO	PROYEK	RENCANA	REALISASI INVESTASI TRIWULAN	Ket
	(KBLI)	INVESTASI (Rp)	JUMLAH	
	03251 (Pembesaran Pisces / Ikap Bersirip Air Payau)		-	-
	03252 (Pembenihan Ikan Air Payau)		-	-
	03259 (Budidaya Biota Payau Lainnya)		-	-
	46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan)		-	-
	36002 (Penampungan dan Penyaluran Air Bakau)	600.000.000	-	
7	10632 (Industri Pengeringan dan Pembersihan Jagung/Pabrik Pengeringan Jagung)	62.483.725.598	79.307.214.522	Sumbe data LKPMonline dan OSS
8	52101 (Pergudangan dan Penyimpanan)	183.835.3412.614	101.052.164.831	
	01640 (Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan)	15.155.000.000	-	
9	10213 (Industri Pembekuan Ikan)	740.000.000	595.000.000	
	47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan/Perdagangan Hasil Perikanan)	250.000.000	150.000.000	
10	20294 (Industri Minyak Atsiri/Mencakup Usaha Pembuatan)	58.299.125.000	55.563.467.705	Sumber Data LKPM Monline dan OSS
	01284 (Perkebunan Tanaman Aromatik)	49.597.153.775	-	
	03219 (Budidaya Biota Air Laut Lainnya / Pembangunan Keramba Udang)	16.000.000.000	-	
11	36002 (Penampungan dan Penyaluran Air Baku)	600	-	
	3254 (Pembesaran Crustacea Air Payau)	16.000.000.000	5.732.500.000	
	03259 (Budidaya Biota Air Payau Lainnya)	16.000.000.000	-	
12	68110 (Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa)	2.723.680.233	4.746.100.000	
13	47111 (Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, minuman, Atau Tembakau di Supermarket/Minimarket)	500.000.000	750.000.000	
	47712 (Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya)		250.000.000	
	47713 (Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian)		250.000.000	
	47712 (Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya)	500.000.000	250.000.000	
	47111 (Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, minuman, Atau Tembakau di Supermarket/Minimarket)		500.000.000	
	47713 (Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian)		250.000.000	



NO	PROYEK	RENCANA	REALISASI INVESTASI TRIWULAN	Ket
	(KBLI)	INVESTASI (Rp)	JUMLAH	
14	46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan)	5.038.993.435	114.352.591	
	03214 (Budidaya Karang(coral))	48.993.435	-	
15	01411 (pembibitan dan Budidaya Sapi Potong)	315.000.000	100.000.000	
16	47772 (Perdagangan Eceran Gas Elpiji) dan	2.000.000.000	6.273.180.000	
	47301 (Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara)			
		467.751.165.187	263.069.902.481	43.099

Sumber: DMPTSP Kabupaten Bima Tahun 2025

11) Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya: 1) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota; 2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota; 3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota; 4) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. Pembangunan olahraga di Kabupaten Bima, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang penting antara lain belum adanya kesinambungan dan sinergitas pola pembibitan. Pembinaan dan pemanduan atlit olahraga, lemahnya kapasitas kelembagaan organisasi olahraga daerah dan sarana prasarana yang kurang memadai. Terkait dengan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima telah melaksanakan pembinaan terhadap klub olahraga pelajar serta pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan Nasional.

Pembinaan olah raga selama ini diarahkan pada upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan, pengelolaan keolahragaan, penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga, pendidikan dan pelatihan keolahragaan, pendanaan keolahragaan, pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga, peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat, peningkatan kemampuan atlit, pelatih. dan pembina olahraga, dan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. Meskipun hasilnya belum cukup menggembirakan baik di tingkat regional maupun nasional. tetapi progres kearah peningkatan prestasi olah raga dapat diwujudkan. Kondisi ini didukung dengan terus berkembangnya klub olah raga serta sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten Bima. meskipun belum memiliki sarana dan prasana yang belum ideal sesuai dengan standar nasional bahkan internasional, tetapi sarana dan prasarana olah raga yang ada sudah cukup membantu dalam upaya kemampuan atlit, pelatih. dan pembina olahraga. Hingga Tahun 2023 jumlah fasilitas olah raga baik untuk Bola Voli, Sepak Bola, Renang. Bola Basket, Bulu



Tangkis, dan lapangan lainnya sebanyak 239 unit yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Bima.

12) Kebudayaan

Keberagaman budaya di Kabupaten Bima baik yang bergerak maupun tidak bergerak merupakan modal dasar pembangunan dan jati diri bangsa. Selanjutnya potensi tersebut diharapkan mampu menjadi pendukung pada pengembangan di bidang kebudayaan dan sekaligus mampu sebagai pendongkrak (daya ungkit) dan ikon wisata di Kabupaten Bima. Kinerja di bidang kebudayaan yang telah dicapai antara lain: pelestarian benda-benda cagar budaya, festival kesenian rakyat di tingkat Kabupaten, mengirimkan duta seni pelajar dan parade seni budaya di tingkat nasional di anjungan NTB TMII Jakarta serta penyelenggaraan Pekan Seni Pelajar di tingkat SD, SLTP dan SLTA maupun penanaman nilai-nilai budaya daerah di tingkat pelajar.

Pelestarian benda cagar budaya dan bangunan bersejarah di Kabupaten Bima telah dilaksanakan melalui kegiatan konservasi dan penataan terhadap benda-benda cagar budaya dan bangunan bersejarah. Sampai dengan Tahun 2023 jumlah cagar budaya dan bangunan bersejarah baik yang bergerak maupun tidak bergerak terdokumentasi di Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bima seperti Kawasan cagar budaya di Kabupaten Bima terdapat pada:

- a. Kecamatan Wawo (Megalitik Lesung Batu, Wadu Sigi, Kompleks rumah adat (Lengge), Pesanggrahan Oi Wobo);
- b. Kecamatan Lambitu (Perkampungan Tradisional Sambori).
- c. Kecamatan Langgudu (Bekas tapak kaki);
- d. Kecamatan Lambu (sumur tembaga);
- e. Kecamatan Wera (Nakara Perunggu, Makam Rato Wara Bewi, Wadu Nocu, Gua Sangiang);
- f. Kecamatan Donggo (perkampungan tradisional Mbawa, Makam kuno, Wadu Tunti, Uma Leme, Makam La Ncahu, Makam La Hil, Kompleks Dana Mbojo, Wadu Ntori, Pesanggrahan, Situs Wadu Kopa);
- g. Kecamatan Soromandi (Kompleks Wadu Pa'a);
- h. Kecamatan Sape (Wadu Tunti, Temba Romba, bekas tapak kaki, Wadu Sura, Makam kuno);
- i. Kecamatan Sanggar (Situs Bukit Kaniki, Situs Bukit Henca, Makam Kuno, Situs Lawangkuning, bekas tapak kaki, Situs Gua La Hami, Rasa Mantoi, Wadu Nocu, Makam Raja Sanggar, Gua Abarahi, Sarkopagus);
- j. Kecamatan Madapangga (Bekas candi);
- k. Kecamatan Bolo (Wadu Genda);
- l. Kecamatan Monta (Gua Doro Parewa, Makam Kuno);
- m. Kecamatan Parado (Arca Gajah);
- n. Kecamatan Belo (Nekara Batu, Sarkofagus, Tapak Kaki);
- o. Kecamatan Woha (Wadu Bara Sila, Temba Ndori).

Disamping itu, Kabupaten Bima juga memiliki kelompok-kelompok kesenian rakyat yang tersebar di Kecamatan-kecamatan.



13) Perpustakaan

Urusan pemerintahan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain: 1) Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota; 2) dan Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota. Pengembangan budaya baca masyarakat serta memotivasi pendirian perpustakaan desa, dilakukan dengan memberikan pembinaan dan menyalurkan buku bantuan kepada perpustakaan desa dan Kecamatan. Perpustakaan memiliki peranan yang strategis sebagai pusat ilmu pengetahuan, Informasi, studi. Teknologi, seni, rekreasi dan juga berfungsi sebagai bagian dari pemberdayaan potensi masyarakat desa/kelurahan. Sarana dan prasarana perpustakaan dan arsip yang telah tersedia di Kabupaten Bima hingga Tahun 2023 terdiri dari: Perpustakaan Daerah sebanyak 1 unit, Pelayanan Perpustakaan Masyarakat (UPPM) 3 unit, Perpustakaan Sekolah 185 unit dan Perpustakaan Keliling sejumlah 2 unit. sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 191 unit. Dari angka tersebut rasio jumlah perpustakaan dengan jumlah penduduk adalah 4.415 orang/perpustakaan. Jumlah UPPM dan perpustakaan daerah diperkirakan akan terus bertambah pada Tahun 2023 karena masih ada 15 kecamatan yang belum memiliki UPPM serta masih banyaknya sekolah baik tingkat SD maupun SMP yang belum memiliki perpustakaan sekolah.

14) Kearsipan

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan bidang kearsipan, kewenangan tersebut diantaranya: 1) Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah kabupaten/kota Daerah dan BUMD kabupaten/kota; 2) Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota; 3) Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip. Penyelenggaraan pengelolaan arsip dilaksanakan mulai dari penciptaan sampai dengan penyusutan dan pelestarian. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, peningkatan sarana prasarana kerja dan peningkatan manajemen kearsipan menjadi suatu hal yang penting. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur bidang kearsipan dilaksanakan melalui bimbingan teknis, meliputi bintek pengelolaan arsip dinamis bagi pengelolaan arsip di SKPD pada setiap tahun. Dengan semakin banyaknya arsip yang telah dikelola oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dan beberapa SKPD yang akan menyerahkan arsip inaktifnya. maka diperlukan penambahan sarana prasarana kearsipan. Jumlah pengunjung perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Bima pada Tahun 2023 adalah sejumlah 9.155 dan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 5.604 judul sedangkan jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan sebanyak 20.784 exp.

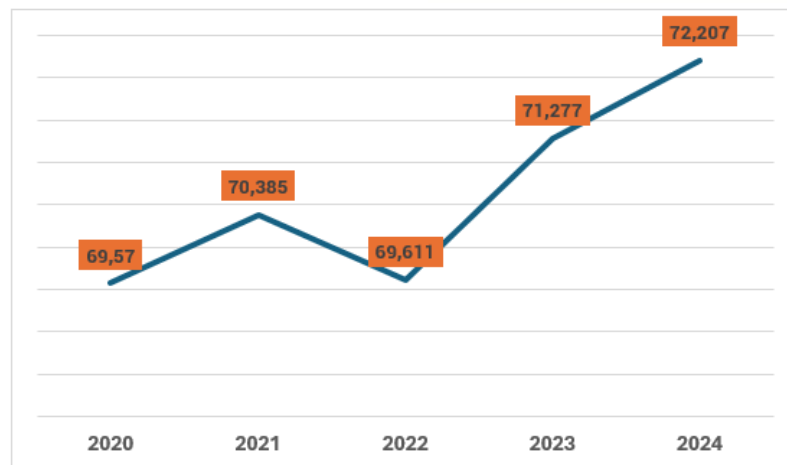
2.4.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Kabupaten Bima memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan bidang perikanan, kewenangan tersebut meliputi pemberdayaan nelayan dan pengelolaan, penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. Kabupaten Bima memiliki lahan budidaya seluas 6.814.9 Ha, terdiri dari budidaya perairan umum seluas 1.008 Ha (baru dimanfaatkan 0.01 Ha atau 0.001%) dan perairan payau/tambak seluas 5.748 Ha (baru dimanfaatkan 1.824 Ha atau 31,7%). perairan tawar seluas 58.90 Ha (baru dimanfaatkan 11.16 Ha atau 18.95%. dan serta perairan laut untuk perikanan tangkap seluas 322.904 Ha (baru dimanfaatkan 284.704



Ha atau 88.17%) Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2022 sebesar 69.611 ton dengan rincian untuk jenis ikan sebesar 61.861,14 ton dan sargasum (tumbuhan laut) 8.421,76 sedangkan untuk tahun 2023 produksi perikanan tangkap sebesar 71.277,12 ton dengan rincian 60.013,71 ton dan sargasum (tumbuhan laut) sebesar 11.263,41 ton, dan tahun 2024 sebesar 72.267 ton. Jumlah produksi ikan tangkap Kabupaten Bima terus meningkat pada tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya potensi perikanan tangkap yang tinggi di Kabupaten Bima. Pemerintah Kabupaten Bima perlu mengoptimalkan potensi ini melalui berbagai pengembangan produk turunan atau penciptaan pusat pasar baru di luar wilayah dengan harga jual yang tinggi.

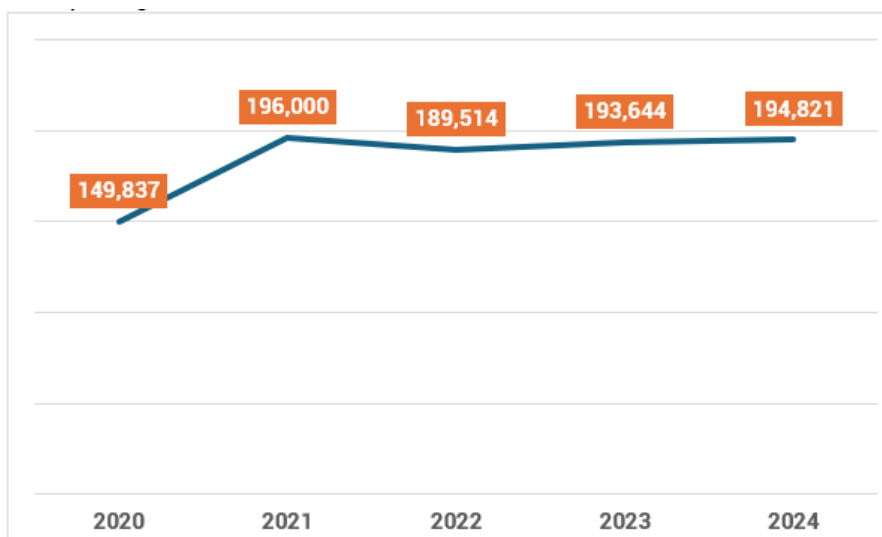


Gambar 2.86.

Jumlah Produksi Ikan Tangkap di Kabupaten Bima Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Bima dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang cenderung stabil dengan beberapa fluktuasi. Pada tahun 2020, produksi tercatat sebesar 149.837, kemudian meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 196.000. Setelah itu terjadi penurunan sedikit pada tahun 2022 menjadi 189.514, sebelum naik kembali pada tahun 2023 dan 2024 dengan produksi masing-masing sebesar 193.644 dan 194.821. Secara keseluruhan, produksi perikanan budidaya cenderung stabil dan menunjukkan peningkatan yang menggembirakan dibandingkan awal periode, menandakan pengelolaan produksi yang cukup baik di Kabupaten Bima. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.87.

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Bima Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

2) Pariwisata

Perkembangan kondisi pariwisata di Kabupaten Bima untuk kunjungan Wisatawan Domestik pada tren awal Naik (2017–2019) yakni kunjungan meningkat dari 87.301 (2017) menjadi 90.735 (2019), pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis ke 45.075, kemungkinan besar karena pandemi COVID-19. Sedangkan tahun 2021 sementara mengalami lonjakan signifikan ke 94.939, angka tertinggi sepanjang periode, lalu tahun 2022 kembali menurun drastis ke 29.251, dan tahun 2023 – 2024 mengalami pemulihan secara bertahap meningkat ke 90.767, lalu sedikit turun ke 78.070. Untuk Wisatawan Mancanegara tahun 2017–2019 mengalami peningkatan awal dari 490 ke 1600 kunjungan, tahun 2020 – 2021 mengalami penurunan drastis dari 74 dan hanya meningkat 77, dan terjadi pemulihan secara bertahap yakni dari 125 tahun 2022, 909 tahun 2023, dan 930 tahun 2024.

Total Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara Tertinggi di Tahun 2021 dengan 95.016 kunjungan, terendah di tahun 2022 hanya 29.376 kunjungan serta pemulihan terlihat di tahun 2023 dan 2024 yaitu 91.676 dan 79.000 menunjukkan tren positif meski belum stabil sepenuhnya. Sehingga dapat disimpulkan secara umum terjadi peningkatan kunjungan wisatawan hingga 2019, Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan drastis di tahun 2020–2022, baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara, Sejak tahun 2023, tampak adanya pemulihan, terutama dari wisatawan mancanegara yang mulai kembali ke Kabupaten Bima, namun, angka tahun 2024 menunjukkan sedikit penurunan dibanding 2023, yang mengindikasikan pemulihan belum sepenuhnya stabil.

Tabel 2.89.

Perkembangan Kunjungan Wisatawan di Kab. Bima

Wisatawan:	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Domestik	45.075	94.939	29.251	90.767	78.070
M mancanegara	74	77	125	909	930
Jumlah	45.149	95.016	29.376	91.676	79.000

Sumber data: Dinas Pariwisata Kab. Bima. 2025



3) Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bima, sebagian besar mata pencaharian masyarakat Bima adalah petani. Selain itu sektor ini merupakan sektor yang memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bima, karena merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Urusan pilihan pertanian terbagi dalam pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Pertanian tanaman pangan Kabupaten Bima terdiri dari Padi dan Palawija. Produksi dan produktivitas komoditas padi dan palawija di Kabupaten Bima dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang beragam antar jenis tanaman. Untuk komoditas padi, produksi tercatat sebesar 315.498 ton pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan berturut-turut hingga mencapai 235.391 ton pada tahun 2023, sebelum kembali naik sedikit menjadi 248.063 ton pada tahun 2024. Produktivitas padi dalam kw/ha pada periode yang sama menunjukkan peningkatan, dari 46,73 kw/ha di tahun 2020 dan 2021 menjadi 50,07 kw/ha pada tahun 2024, menandakan efisiensi produksi makin membaik meski volume produksi sempat turun.

Untuk jagung, produksi menunjukkan tren kenaikan dari 403.399 ton tahun 2020 menjadi puncaknya 608.911 ton pada tahun 2022, sebelum mengalami penurunan menjadi 542.024 ton di tahun 2024. Produktivitas jagung mengalami fluktuasi dengan angka tertinggi 75,23 kw/ha pada 2021 dan 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 65,26 kw/ha di 2024. Komoditas kedelai menunjukkan peningkatan produksi dari 3.007 ton di tahun 2020 ke angka tertinggi 8.787 ton pada 2023, sebelum kembali menurun menjadi 3.878 ton di tahun 2024. Produktivitas kedelai secara umum naik dari 9,80 kw/ha menjadi 16,82 kw/ha selama lima tahun ini.

Kemudian, kacang tanah dan kacang hijau juga mengalami produksi yang bervariasi, dengan kacang tanah mencapai produksi tertinggi 10.324 ton pada tahun 2021. Produktivitas kacang tanah naik dari 10,89 kw/ha (2020) ke 13,66 kw/ha (2024). Produktivitas kacang hijau relatif stabil di kisaran 6,13-6,07 kw/ha. Untuk ubi kayu, produksi tinggi pada tahun 2021 dengan 9.484 ton, namun menurun signifikan hingga 2.048 ton pada tahun 2024, meskipun produktivitas tetap stabil di angka 184,53 kw/ha sepanjang periode ini. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa meski terjadi fluktuasi dalam volume produksi berbagai komoditas padi dan palawija, produktivitas di beberapa komoditas menunjukkan peningkatan, mencerminkan upaya peningkatan efisiensi dan pemanfaatan lahan yang lebih optimal di Kabupaten Bima selama periode 2020 hingga 2024.

Tabel 2.90.

Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Bima Tahun 2020 - 2024

No	Komoditi	Tahun									
		Produksi (Ton)					Produktivitas (kw/ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	315.498	280.384	245.325	235.391	248.063	46,73	46,73	49,84	50,07	
2	Jagung	403.399	475.037	608.911	575.830	542.024	65,41	75,23	75,23	65,26	
3	Kedelai	3.007	5.030	3.818	8.787	3.878	9,80	16,71	16,71	16,82	
4	Kacang tanah	12.016	-	10.324	9.831	10.529	10,89	-	12,66	13,66	
5	Kacang hijau	815	-	291	279	81	6,13	-	6,07	6,13	
6	Ubi kayu	3.340	-	9.484	3.967	2.048	184,53	-	184,51	184,53	
7	Ubi jalar	1.767	-	93	26	65	132,74	-	132,86	132,74	

Sumber data: Dinas Pertanian dan Perkebunan 2021 dan Kabupaten Bima dalam Angka 2025



Komoditi perkebunan Kabupaten Bima adalah jambu mete, kelapa, kopi dan kemiri. Komoditi perkebunan Kabupaten Bima dari tahun 2020 – 2023 mengalami tren penurunan kemudian sedikit meningkat pada tahun 2024. Tahun 2020 jumlah komoditi Jambu Mete Kabupaten Bima adalah sebesar 1.768,84 ton, turun menjadi 1.239,85 ton di tahun 2024. Produksi komoditi kelapa tahun 2020 sebesar 866,73 ton dan turun menjadi 817,32 ton pada tahun 2024. Kemudian komoditi kopi mengalami tren kenaikan dari 287,30 ton pada tahun 2020 naik produksinya menjadi 353,76 ton di tahun 2024. Berdasarkan produksi komoditi perkebunan Kabupaten Bima, komoditi jambu mete menjadi potensi komoditas yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bima ke depan. Upaya pengembangan komoditas ini dapat dilakukan melalui pengembangan berbagi produk turunan melalui pemberdayaan masyarakat lokal.

Tabel 2.91.
Produksi komoditi perkebunan Kabupaten Bima Tahun 2020 - 2024

No.	Jenis Komoditi	Tahun (ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jambu Mete	1.768,84	1.269,40	1.477,27	1.209,55	1.239,85
2.	Kelapa	866,73	823,20	823,20	816,96	817,32
3.	Kopi	287,30	343,50	346,30	352,86	353,76
4.	Kemiri	-	-	-	336,39	
Jumlah		2.922,87	2.436,1	2.646,77	2.715,76	

Sumber data: Kabupaten Bima dalam Angka 2025

Luas wilayah Kabupaten Bima yang berpotensi untuk pemanfaatan peternakan sekitar 411.748 Ha, dengan daya tampung sebanyak 244.896 unit hewan. Akan tetapi jumlah ternak yang ada pada saat ini baru mencapai 219.001 unit hewan atau sebesar 53% dari daya tampung lahan. Untuk itu masih memungkinkan untuk meningkatkan produksi peternakan. Populasi ternak di Kabupaten Bima tahun 2020 – 2024 menunjukkan peningkatan baik dari populasi ternak besar maupun ternak unggas. Untuk ternak besar di dominasi oleh sapi dengan populasi di tahun 2024 sebesar 239.714 ekor diikuti oleh ternak kambing dengan jumlah populasi sebesar 112.816 ekor di tahun 2024, kerbau dengan populasi 19.142 ekor, sedangkan populasi hewan ternak terbesar ternak unggas di dominasi oleh ayam Ras dengan populasi sebesar 4.265.566 ekor di tahun 2024. Perkembangan populasi ternak besar dan unggas di Kabupaten Bima tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92.
Perkembangan Populasi Ternak Besar dan Unggas Kabupaten Bima Tahun 2020 - 2024

No.	Jenis Ternak (ekor)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Ternak Besar					
1	Sapi	213.873	215.765	219.001	236.917	239.714
2	Kerbau	10.597	10.700	10.854	18.978	19.142
3	Kuda	3.447	4.167	4.221	2.756	3.338
4	Kambing	238.131	242.212	245.847	118.350	112.816
5	Domba	8.724	8.859	8.987	3.745	2.818
B.	UNGGAS					



No.	Jenis Ternak (ekor)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ayam Kampung	2.383.241	2.400.250	2.436.550	346.799	333.861
2	Ayam Ras	613.332	723.238	734.088	4.173.328	4.265.566
3	Itik	36.410	36.855	37.363	27.512	25.477

Sumber data : Dinas Peternakan Kabupaten Bima. 2025

Produksi daging ternak besar Kabupaten Bima tahun 2020 sebanyak 583 ton dan pada tahun 2024 sebanyak 1.147 ton, secara keseluruhan mengalami peningkatan baik ternak besar maupun ternak kecil. Sementara produksi telur di Kabupaten Bima tahun 2020 – 2024 mengalami fluktuasi. Tahun 2020 jumlah produksi telur Kabupaten Bima sebesar 385 ton, tahun 2021 meningkat sebesar 441 ton, tahun 2022 sebesar 589 ton yang merupakan nilai tertinggi selama periode 2020-2024. Kemudian tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 262 ton dan tahun 2024 menjadi 245 ton. Untuk perkembangan produksi daging dan telur Kabupaten Bima tahun 2020 – 2024 lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93.
Perkembangan produksi daging dan telur Tajun 2020-2024

No.	Produksi	Tahun (ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Daging					
1	Sapi	474	723	726	834	999
2	Kerbau	32	58	60	63	63
3	Kambing	44	58	58	41	41
4	Domba	1	2	3	3	3
5	Kuda	32	40	41	41	41
	Sub Jumlah	583	881	888	981	1.147
1	Ayam Ras	1.742	1.754	762	2.614	2.672
2	Ayam Bukan Ras	636	750	1.761	360	334
3	Itik	33	33	63	25	23
	Sub Jumlah	2.411	2.537	2.550	2.999	
1	Jeroan Semua jenis	598	713	727	824	881
	Total Prod Daging	3.592	4.131	4.165	4.804	
B	Telur					
1	Telur Ayam Ras	0	15	15	15	15
2	Telur Ayam Kampung	232	273	277	131	122
3	Telur Itik	153	153	297	116	108
	Total prod Telur	385	441	589	262	245

Sumber data : Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima 2025

Adapun penyebaran hewan per-kecamatan di Kabupaten Bima tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.94.
Populasi Ternak per Kecamatan di Kabupaten Bima Tahun 2023

No	Kecamatan	Unggas			Ternak besar				
		Ayam pedaging	Ayam buras	Itik	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba
1	Monta	1.454.400	24.800	4.340	14.102	90	136	3.985	359
2	Parado	649	8.936	490	10.016	741	-	2.118	21
3	Bolo	1.146.600	6.578	782	14.145	50	169	7.875	45
4	Madapangga	105.600	19.731	1.391	12.041	2.188	192	8.827	19
5	Woha	168.101	45.162	4.889	11.463	235	273	27.043	904
6	Belo	-	11.919	820	7.534	256	195	10.130	755
7	Palibelo	33.100	15.252	1.511	6.833	113	163	5.006	642
8	Wawo	636.000	26.399	446	7.963	2.067	196	1.570	-
9	Langgudu	4.670	18.052	6.443	14.981	925	218	4.026	174
10	Lambitu	-	7.041	-	4.889	1.421	25	1.727	82
11	Sape	180.920	34.761	2.018	9.964	931	185	4.502	95
12	Lambu	-	7.141	-	16.705	509	227	4.892	50
13	Wera	33.500	38.000	1.221	22.688	4.531	223	7.781	67
14	Ambalawi	12.500	11.603	1.404	12.866	1.855	20	6.600	-
15	Donggo	106.400	30.005	1.110	10.244	120	197	1.513	332
16	Soromandi	288.800	26.543	174	13.296	844	153	14.293	40
17	Sanggar	2.088	2.655	473	28.837	1.480	106	1.384	160
18	Tambora	-	12.221	-	18.350	622	78	5.078	-
Jumlah		4.173.328	346.799	27.512	236.917	18.978	2.756	118.350	3.745

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima 2025

4) Perdagangan

Jumlah usaha dalam skala besar memang masih sangat kecil. tetapi sangat potensial untuk terus berkembang karena didukung oleh ketersediaan potensi wilayah dan potensi-potensi lainnya. Jenis komoditi yang umumnya diperdagangkan di sejumlah pasar lokal, regional maupun nasional meliputi komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan bahan kebutuhan pokok lainnya. Adapun pembangunan sektor industri di Kabupaten Bima diarahkan pada Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Program Penataan Struktur Industri, Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial dan Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Industri. Adapun perkembangan jumlah unit usaha, tenaga kerja, dan nilai investasi sektor industri Kabupaten Bima tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95.
Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, dan Nilai Investasi Sektor Industri Kabupaten Bima Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Jumlah/Nilai pada				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perusahaan	9.477	6.498	7.322	8.190	17.646
2	Jumlah Tenaga Kerja	20.848	13.857	17.037	18.945	36.315
3	Nilai Investasi (Ribu)	751.378.200	65.727.498	90.897.969	120.935.311	1.633.204.478

Sumber: Disperindag Kab. Bima 2025



5) Perkembangan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan di Kabupaten Bima

Perkembangan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dari Tahun 2020-2024 terus mengalami kenaikan. Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan tahun 2020 adalah sebanyak 9.477, menjadi 17.646 di tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Bima perlu menggiatkan berbagai sosialisasi kepada masyarakat terkait urgensi NIB. Hal ini karena NIB ini menjadi salah satu indikator capaian pelayanan perizinan penanaman modal serta menjadi salah satu syarat penting bagi pelaku usaha untuk memperoleh berbagai fasilitas insentif dan kemudahan berusaha. Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara kumulatif Pemerintah Daerah Kabupaten Bima tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.96.
Jumlah NIB yang diterbitkan secara kumulatif di Kabupaten Bima Tahun 2020-2024.

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pedagang Kecil	8.881	9.231	11.272	13.8775	16.882
2	Pedagang Menengah	488	510	544	544	545
3	Pedagang Besar	108	109	209	209	219
Jumlah		9.477	9.850	2786.272	14.528	17.646

Sumber : Disperindag Kab. Bima 2025

6) Urusan Pilihan Perindustrian

Perkembangan jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Bima tahun 2020 -2024 mengalami peningkatan, dari 1.345 unit tahun 2020 menjadi 3.796 unit tahun 2024. Peningkatan yang signifikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam berwirausaha. Kenaikan jumlah IKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga berkontribusi pada diversifikasi ekonomi daerah, yang mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Upaya peningkatan IKM sangat penting untuk memperkuat daya saing lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung ketahanan ekonomi daerah. Selain itu, dengan semakin banyaknya IKM, diharapkan akan muncul inovasi dan kreasi produk lokal yang dapat dipasarkan, baik di pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan pihak terkait dalam bentuk pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan.

Tabel 2.97.
Jumlah ijin usaha yang diterbitkan Kabupaten Bima Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Kecil	1.363	1.363	2.112	2.880	3.787
2	Industri Menengah	3	3	3	3	7
3	Industri Besar	0	0	2	2	2
Jumlah		1.345	1.366	2.117	2.885	3.796

Sumber: Disperindag Kab. Bima 2025

Pemerintah Kabupaten Bima telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bima Tahun 2022-2042. Sasaran penyusunan dokumen tersebut



diantaranya: 1) Teridentifikasinya kondisi eksisting dan karakteristik kawasan perencanaan baik dari aspek jenis kegiatan, luasan lahan, distribusi spasial, dan pola penggunaan lahan eksisting; 2) teridentifikasinya Potensi dan permasalahan ketersediaan lahan dan daya dukung lahan serta daya dukung infrastruktur penunjang kegiatan; dan 3) Daya dukung lingkungan dan daya tampung lahan berdasarkan jenis kegiatan. Visi pembangunan industri Kabupaten Bima telah termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bima Tahun 2022-2042. Visi tersebut adalah **“Mewujudkan Industri Kabupaten Bima yang Tangguh dan Berdaya Saing berbasis Sumber Daya Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah”**. Visi pembangunan industry tersebut diterjemahkan dalam 5 misi antara lain: 1) Meningkatkan kemandirian dan ketangguhan daerah serta mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi sektor Industri di Kabupaten Bima; 2) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam unggulan daerah secara efektif dan efisien melalui pengolahan komoditas unggulan Kabupaten Bima; 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) Meningkatkan ketersediaan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur sebagai pendukung aktivitas dan pemenuhan kebutuhan industri Kabupaten Bima.

7) Transmigrasi

Kondisi transmigrasi di Kabupaten Bima dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mencakup tujuh daerah tujuan transmigrasi, yaitu Waworada, Laju, Doro'o, Oi Tui, Mpuri, daerah transmigrasi Baku buka menjadi wilayah binaan transmigrasi, dan Sori Panihi 1 sudah menjadi desa definitif dan (SP2 sampai SP6) menjadi lokus transmigrasi berbasis kawasan. Pada tahun 2024, jumlah kepala keluarga yang mengikuti program transmigrasi ke daerah-daerah tersebut dari 2.679 KK menjadi 1.275 KK. Wilayah Kabupaten Bima menjadi salah satu lokasi pengembangan kawasan transmigrasi. Pemerintah Kabupaten Bima perlu melakukan pengkajian penataan kawasan transmigrasi agar tidak teraglomerasi di wilayah tertentu. Hal ini penting agar sebaran penduduk dapat proposional dan merata di Kabupaten Bima. Untuk lebih jelasnya, perkembangan unit pemukiman transmigrasi di Kabupaten Bima tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98.
Unit Pemukiman Transmigrasi di Kabupaten Bima Tahun 2020-2024

No	Nama UPT	Jumlah KK				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Waworada	158	158	158	158	-
2	Laju	268	268	268	268	-
3	Doro O'o	116	116	116	116	-
4	OiTui	250	250	250	250	-
5	Madapangga/Mpuri	200	200	200	200	-
6	Baku	230	230	230	230	-
7	SP. 1 SoriPanihi	200	200	200	200	-
8	SP. 2 SoriPanihi	250	250	250	250	250
9	SP. 3 SoriPanihi	250	250	250	250	250
10	SP. 4 SoriPanihi	200	200	200	200	200
11	SP. 5 SoriPanihi	200	200	200	200	200
12	Kimtrans SP. 6	375	375	375	375	375
Jumlah		2.697	2.697	2.697	2.679	1.275

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima Tahun 2024



2.4.3.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Program perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bima mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Disamping itu penjabaran terhadap UU Nomor 25 Tahun 2004 juga telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dalam Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tindaklanjut dari keberadaan Peraturan perundang-undangan tersebut di atas Kabupaten Bima telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dijabarkan setiap Tahunnya melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Program perencanaan daerah juga diimplementasikan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2023 program perencanaan daerah yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Kinerja pelaksanaan pembangunan urusan wajib perencanaan pembangunan sampai dengan Tahun 2023 adalah:

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bima, antara lain: RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- b. Tersedianya data dan informasi sebagai bahan referensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan;
- c. Teridentifikasinya dan Terkoordinasinya program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bima baik dari sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.

2) Keuangan

Pembangunan daerah memerlukan dukungan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber antara lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain – lain PAD yang sah. Selain itu juga dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran Pendapatan Daerah disusun sebagai kesatuan sistem secara komprehensif dan tersusun atas dasar Potensi.



Tabel 2.99.
Kontribusi PAD Terhadap APBD Kabupaten Bima Tahun 2020 - 2024

TAHUN	PAD	Pertumbuhan (%)	Pendapatan (Rp.)	Proporsi PAD Thd Pendapatan
1	2	3	4	5
2020	131.585.549.042,49	-14,33	1.743.933.453.901,49	7,54
2021	140.022.138.769,90	8,73	1.774.136.625.383,90	7,89
2022	139.735.558.572,54	-0,20	1.775.593.701.273,54	7,87
2023	168.152.757.946,00	20,33	1,861,517,625,179	9,26
2024	-	-	-	-

Sumber data : BPPKAD Kabupaten Bima. Tahun 2025

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bima dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah antara lain;

- Belum optimalnya pemanfaatan potensi dan penggalian sumber-sumber pendapatan baru;
- Perlunya peningkatan standar sarana dan prasarana pelayanan;
- Belum optimalnya BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah;
- Belum optimalnya potensi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah;

Sejalan dengan kemampuan keuangan daerah dan dalam rangka mengantisipasi kekurangan penerimaan pendapatan daerah. maka Pemerintah Kabupaten Bima mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan melalui pembiayaan dari potensi daerah. Upaya yang dilakukan adalah pembenahan administrasi seperti perbaikan data base, perluasan basis, intensifikasi, ekstensifikasi wajib pajak/ wajib retribusi, serta meningkatkan kualitas aparat melalui. Peningkatan Pendapatan Daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi Sumber Pendapatan yang saat ini telah dipetakan secara utuh dengan cara perbaikan pelayanan publik, peningkatan sarana dan sarana pelayanan, serta transparansi pengelolaan pendapatan; Ekstensifikasi terhadap potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan; Koordinasi secara intensif dengan OPD pengelola PAD.

Secara Spesifik Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bima diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bima. Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan Rancangan APBD. Pelaksanaan APBD. Perubahan APBD. Pengelolaan Kas Penatausahaan keuangan daerah. akuntansi keuangan daerah. pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan keuangan daerah, serta sistem informasi keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir belum seperti yang diharapkan. Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang ada, sehingga kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah masih belum seperti yang diharapkan. Struktur Pendapatan Kabupaten Bima terdiri dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sampai saat ini PAD Kabupaten Bima hanya memberikan kontribusi sebesar 9,26% dalam struktur Pendapatan Daerah.



3) Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bima didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah PNS di Kabupaten Bima berdasarkan tingkat pendidikan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren perubahan yang signifikan pada beberapa jenjang pendidikan. Pada jenjang SD dan SMP, jumlah PNS tampak menurun secara bertahap dari 11 dan 28 pada tahun 2020 menjadi 6 dan 17 pada tahun 2024. Pada jenjang SMA, jumlah PNS juga menurun dari 1.387 pada 2020 menjadi 942 pada 2024. Sebaliknya, terdapat peningkatan signifikan pada jenjang Diploma dan S1. Jumlah PNS berpendidikan Diploma naik dari 1.282 pada tahun 2020 menjadi 1.501 pada tahun 2024, sedangkan PNS berpendidikan S1 meningkat drastis dari 4.889 pada tahun 2020 menjadi 7.553 pada tahun 2024. Untuk jenjang S2/S3, jumlah PNS relatif stabil dengan sedikit kenaikan dari 285 pada 2020 menjadi 343 pada 2024. Secara keseluruhan, total PNS meningkat dari 7.882 pada tahun 2020 menjadi 10.362 pada tahun 2024, yang mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kerja PNS di Kabupaten Bima selama periode tersebut.

Tabel 2.100.
Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Bima Tahun 2020- 2024

No	Tingkat Pendidikan PNS	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD	11	8	7	5	6
2	SMP	28	20	19	18	17
3	SMA	1387	1.226	1.104	998	942
4	Diploma	1.282	1.155	1.198	1.134	1.501
5	S1	4.889	5.121	4.674	4.485	7.553
6	S2/S3	285	187	240	232	343
Total		7.882	7.747	7.242	6.872	10.362

Sumber: Kabupaten Bima dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel diatas, jumlah PNS dengan tingkat pendidikan SD–SMA di Kabupaten Bima dari tahun 2020 – 2024 mengalami penurunan, sedangkan untuk jenjang pendidikan S1 dan S2/S3 mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat. Adanya penurunan jumlah PNS pada tingkat SD, SMP, SMA dan Diploma, disamping ada yang memasuki masa pensiun tetapi juga ada beberapa PNS yang telah selesai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 2.101.
Jumlah PNS Kabupaten Bima Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2020-2024

Golongan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
I	23	14	12	10	10
II	1.107	1.014	969	770	615
III	4.271	4.474	4.001	3.999	3.958
IV	2.481	2.245	2.260	2.093	1.901
P3K					3.878
Jumlah	7.882	7.747	7.242	6.872	10.362

Sumber: Badan Kepegawaian Negara dalam Kabupaten Bima dalam Angka 2025



Berdasarkan tabel diatas jumlah PNS berdasarkan golongan kepangkatan pada Tahun 2024 terbanyak adalah golongan III yaitu sebesar 3.958 orang, selanjutnya PNS golongan IV pada Tahun 2020 sebanyak 2.481 orang menurun menjadi 1.901 orang pada Tahun 2024. PNS Golongan II pada Tahun 2020 sebanyak 1.107 orang menurun dibandingkan Tahun 2024 yaitu sebanyak 615 orang. PNS Golongan I pada Tahun 2024 sebanyak 10 orang jumlahnya menurun dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebanyak 23 orang. Melihat kondisi tersebut pegawai golongan III dan IV yang kebanyakan berada pada level *manager/middle management* masih sangat dominan jumlahnya dibandingkan dengan pegawai golongan I dan II selaku unsur staf pelaksana. Secara teoritis idealnya komposisi urutan kekuatan pegawai yang baik pada lembaga instansi pemerintah adalah berbentuk piramida. artinya semakin keatas posisi golongan pangkat pegawai komposisinya semakin mengerucut atau mengecil bukan sebaliknya.

Kondisi demikian pada akhirnya akan menyulitkan dalam pembinaan dan pengelolaan manajemen kepegawaian dan pengembangan pola karier pegawai. karena susunan kekuatan pegawai yang ada tidak lagi berbentuk seperti piramida. namun komposisinya berbentuk piramida terbalik bahkan seperti berbentuk kubah. menggelembung ditengah. Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur telah diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan. baik teknis maupun fungsional dan bimbingan teknis (bimtek). maupun pendidikan formal melalui program tugas belajar dan ijin belajar. Upaya peningkatan tersebut secara nyata diwujudkan dengan penyediaan anggaran peningkatan SDM aparatur baik pada instansi pengelola kepegawaian maupun yang tersebar pada masing-masing OPD. Dalam kesempatan apel diberikan pembinaan-pembinaan kepegawaian. antara lain masalah kedisiplinan jam dinas maupun dalam berpakaian dinas. Selain itu juga dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan melekat (WASKAT) pada semua OPD se-Kabupaten Bima sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan pengawasan Melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di bidang kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bima telah membentuk 4 (empat) perangkat daerah sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan. Susunan. Kedudukan. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima dibentuklah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kantor Pelayanan Terpadu, serta Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bima.

4) Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan didalam upaya meningkatkan pemerintahan yang bai (good Governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi,kolusi,dan nepotisme.Pengaturan terhadap pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok,pola pikir,sikap,perilaku,budaya dan pola tindakan administrasi yang demiokratis,objektif,dan profesional. Undang-undang ini dimaksud tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sbagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepda masyarakat sehingga kberadaan



undang-undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerinah. Tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dan fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan dalam urusan Administrasi Pemerintahan. Strategi dalam Pelaksanaan Urusan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bima melalui Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik. Untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Bima dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102.
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024

No	Administrasi Pemerintahan	Unit
1	Sekretariat Daerah	
	Sekretaris Daerah	1
	Asisten Sekda	3
	Staf Ahli Bupati	3
	Bagian Setda	11
2	Sekretariat DPRD	1
3	Inspektorat	1
4	Dinas	23
5	Badan	6
6	Kecamatan	18

Sumber : Bagian OPA Setda Kab. Bima Tahun 2025

5) Pengawasan

Dalam Melaksanakan setiap kegiatan di Instansi Pemerintahan memerlukan data serta informasi. Salah satu informasi yang diperlukan melalui kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi sebagai aspek penunjang dalam hal pelayanan, baik buruknya kinerja pelayanan dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan Administrasi yang berjalan. Dalam menjalankan setiap kegiatan tata kelola administrasi seringkali adanya pelanggaran. Pelanggaran dapat dicegah melalui pengawasan sebelum pelaporan tata kelola administrasi sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran tata kelola administrasi. Hal ini tidak terlepas dari adanya dukungan dari sistem informasi elektronik yang membantu mengakselerasi dan mempermudah proses pengawasan dan pemeriksaan. Selain itu, unsur pengawasan internal juga diperlukan untuk mendisiplinkan aparatur. Banyaknya pelanggaran disiplin aparatur. Karna itu diperlukan optimalisasi pengawasan internal agar mengurangi jumlah pelanggaran.

6) Penelitian dan Pengembangan

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bima. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan disetiap Tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi



terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

7) Keuangan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Untuk mengetahui gambaran kondisi keuangan suatu daerah maka dapat dilihat dari postur APBD yang terdiri dari pos pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBD merupakan rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD yang terdiri dari target pendapatan yang harus dicapai, belanja program dan non program yang dilaksanakan dan pos pembiayaan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penyusunan APBD berbasis kinerja yang berorientasi pada prinsip *money follows program* yang intinya bahwa besaran alokasi anggaran ditentukan oleh target kinerja yang hendak dicapai pada suatu program.

Keuangan daerah yang terbatas dalam APBD haruslah dikelola dengan optimal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan visi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pengelolaan keuangan yang baik adalah akan tercermin dalam pencapaian prestasi yang dikeluarkan oleh BPK RI. Pemerintah Kabupaten Bima secara berturut-turut sejak 2020-2024 mendapatkan predikat pengelolaan keuangan tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pengelolaan keuangan tersebut meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah Kabupaten Bima telah mengeloa keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan, asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Tentunya ke depan kualitas pengelolaan keuangan harus terus diperbaiki dalam mewujudkan tujuan inti dari pembangunan yakni kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada indikator hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Secara umum dari postur APBD selama 5 tahun terakhir, 2020-2024 kapasitas fiskal Kabupaten Bima masih belum mampu memenuhi kebutuhan fiskal yang disebabkan terbatasnya sumber pendanaan dari dalam daerah dan masih bergantung pada sumber dana transfer. Upaya penguatan sumber pendanaan dari dalam daerah melalui peningkatan PAD dan menggenjot dana transfer yang berbasis program/kinerja yang menjadi perhatian utama ke depan. Untuk itu, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang krusial dalam mengawali dan melaksanakan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk meningkatkan capaian pembangunan yang berkualitas juga perlu didukung fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang komprehensif.

2.5. Kondisi Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017, terdapat 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2029. Secara umum, kondisi TPB Kabupaten Bima adalah sudah mencapai target tetapi ada beberapa indikator yang belum ada data.



Keterangan:

SS	: Sudah Dilaksanakan Sudah Mencapai Target
SB	: Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target
BB	: Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target/Tidak Ada Data
TD	: Bukan Kewenangan Kabupaten Bima

Penjelasan pada kategori BB:

1. Tidak Ada Data : data target dan data capaian tidak tersedia (0); dan
2. Belum dilaksanakan : data target tersedia dan data capaian tidak tersedia (0)

2.5.1. TPB 1 Tanpa Kemiskinan

Pada TPB 1, terdapat 24 indikator. Capaian TPB 1 Kabupaten Bima sebagian besar sudah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 58 persen. Pemerintah Kabupaten Bima perlu meningkatkan upaya ke depan untuk mengoptimalkan capaian indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target atau belum dilaksanakan. Secara umum pada TPB Tanpa Kemiskinan ini, kondisinya adalah sebagaimana Tabel berikut.

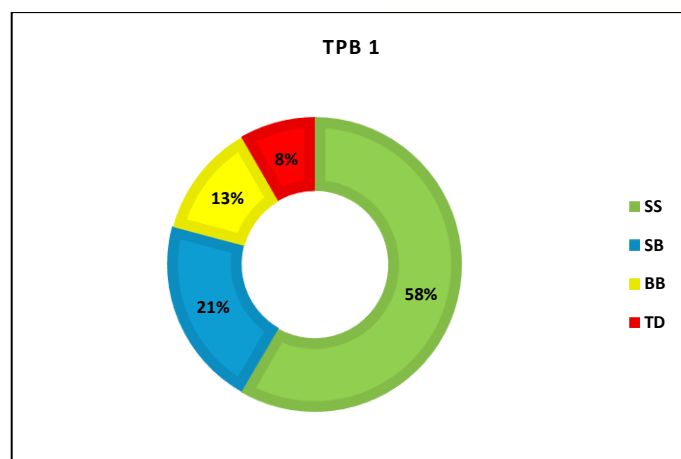
Tabel 2.103.
Kondisi Umum TPB 1 Kabupaten Bima

No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	12,10	14,12	SB
	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	100	69,44	SB
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	1.249	1.249	SS
	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	40,00	48,32	SS
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	28158,00	28158	SS
	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	73,00	80,00	SS
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%	69,00	69,20	SS
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	100	100	SS
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	87	91,51	SS
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	88,50	88,67	SS
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	97,90	95,80	SB



No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	100	91,03	SB
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	98,21	98,25	SS
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	100	97,37	SB
	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0,00	0,00	SS
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	7	54	SS
	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	97,83	97,83	SS
	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	99	99	SS
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	-	-	TD
	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	30	0	BB
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	400.000.000.000	0	BB
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	2	0	BB
	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	99	99	SS
	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	-	-	TD

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029



Gambar 2.88.

Grafik Capaian TPB 1 Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



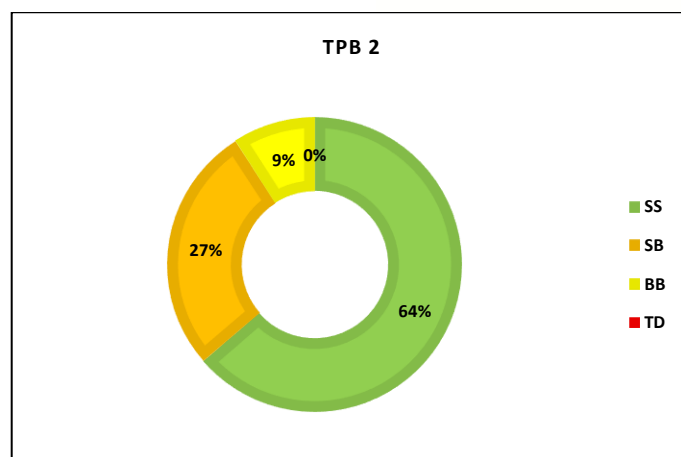
2.5.2. TPB 2 Tanpa Kelaparan

Pada TPB 2, terdapat 11 indikator. Capaian TPB 2 Kabupaten Bima sebagian besar sudah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 64 persen. Pemerintah Kabupaten Bima perlu meningkatkan upaya ke depan untuk mengoptimalkan capaian indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target atau belum dilaksanakan. Secara umum pada TPB Tanpa Kelaparan ini, kondisinya adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.104.
Kondisi Umum TPB 2 Kabupaten Bima

No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
2	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	6,5	2,17	SS
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	13	8,58	SS
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	20,5	8,34	SS
	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	6,5	2	SS
	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	20,5	13,23	SS
	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	20,5	16,28	SS
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	7,3	8,58	SB
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	5	15,07	SB
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	60	98,43	SS
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	83,56	80,30	SB
	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	0,00	0,00	BB

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



Gambar 2.89.
Grafik Capaian TPB 2 Kabupaten Bima
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



2.5.3. TPB 3 Kehidupan Sehat Dan Sejahtera

Pada TPB 3, terdapat 34 indikator. Capaian TPB 3 Kabupaten Bima sebagian besar sudah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 65 persen. Pemerintah Kabupaten Bima perlu meningkatkan upaya ke depan untuk mengoptimalkan capaian indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target atau belum dilaksanakan. Secara umum pada TPB Kehidupan Sehat dan Sejahtera ini, kondisinya adalah sebagaimana Tabel berikut.

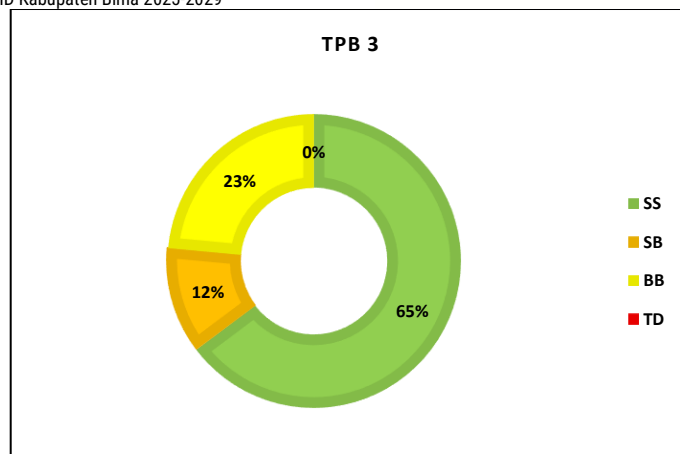
Tabel 2.105.
Kondisi Umum TPB 3 Kabupaten Bima

No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
3	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun	20,36	21,47	SB
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	90	100	SS
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	85	95,74	SS
	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	85	2,28	SS
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	6,7	5,50	SS
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	85	2,28	SS
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	95	100	SS
	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun	12295	10338	SB
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	1771	542,50	SS
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	10	10	SS
	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300	1	1	SS
	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	100	100	SS
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	89	89	SS
	3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Kusta.	Meningkat	100	100	SS
	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis	Meningkat menjadi 35.	100	100	SS
	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	570	570	SS
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	3,27	3,76	SB
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	0,57	0,57	SS
	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun	0,00	0,00	BB
	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280	21	21	SS
	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi	1,70	0	BB



No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
			angka 0,02%			
	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	63	63	SS
	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	0,00	0,00	BB
	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	0,00	0,00	BB
	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	0,00	0,00	BB
	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38	0,00	0,00	BB
	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	2,028333333	2	SS
	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	0,00	0,00	BB
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	345989	345989	SS
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	100	93	SB
	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	0,00	0,00	BB
	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	0,00	570	SS
	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	100	100	SS
	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	8,41	8,41	SS

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



Gambar 2.90.
Grafik Capaian TPB 3 Kabupaten Bima
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



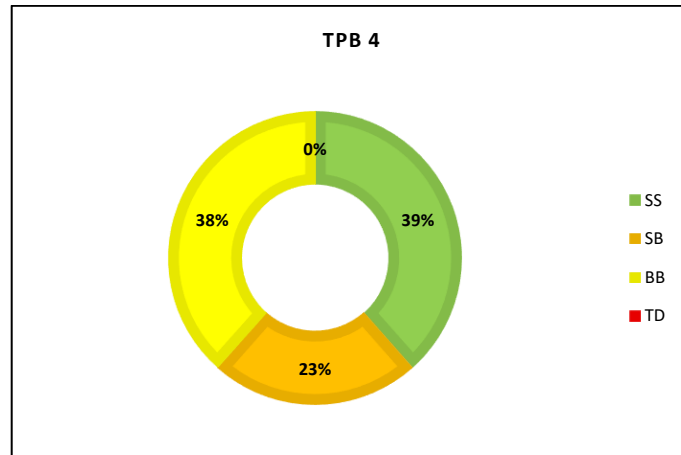
2.5.4. TPB 4 Pendidikan Berkualitas

Pada TPB 4, terdapat 13 indikator. Capaian TPB 4 Kabupaten Bima sebagian besar sudah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 39 persen. Pemerintah Kabupaten Bima perlu meningkatkan upaya ke depan untuk mengoptimalkan capaian indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target atau belum dilaksanakan. Secara umum pada TPB Pendidikan Berkualitas ini, kondisinya adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.106.
Kondisi Umum TPB 4 Kabupaten Bima

No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
4	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	100	0,00	BB
	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	100	0,00	BB
	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	100	0,00	BB
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	100	100	SS
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	100	96,77	SB
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	7,81	7,81	SS
	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	80,00	86,16	SS
	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	30	0	BB
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	100	98,45	SB
	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	99,00	100	SS
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	98,07	100	SS
	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat	0,00	0,00	BB
	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	74,21	65,31	SB

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



Gambar 2.91.

Grafik Capaian TPB 4 Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029

2.5.5. TPB 5 Kesetaraan Gender

Pada TPB 5, terdapat 14 indikator. Capaian TPB 5 Kabupaten Bima sebagian besar belum berhasil yaitu sebesar 50 persen. Pemerintah Kabupaten Bima perlu mengoptimalkan capaian tersebut agar sesuai target dan menjaga 36 persen indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target. Secara umum pada TPB Kesetaraan Gender ini, kondisinya adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.107.

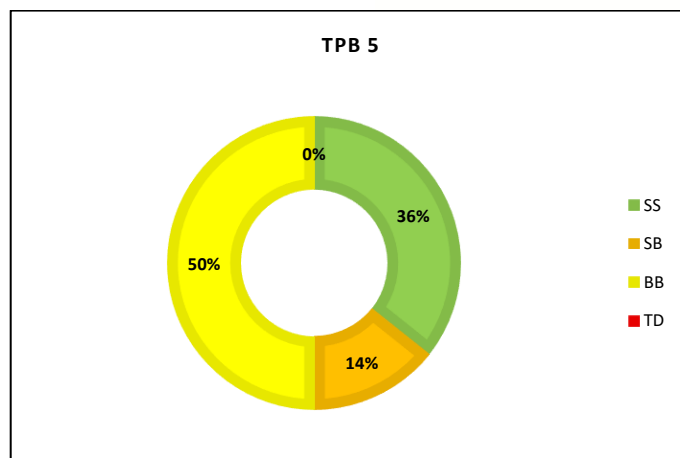
Kondisi Umum TPB 5 Kabupaten Bima

No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
5	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	2	2	SS
	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	32	58	SB
	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	20	0,00	BB
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	47	57	SB
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	75	0	BB
	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	20	0	BB
	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	21	22,72	SS



No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	0,00	0,00	BB
	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	0,00	0,00	BB
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	0,01	0,00	BB
	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat	0,00	0,00	BB
	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	7	0,01	SS
	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	0,08	0,08	SS
	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	52,08	52,08	SS

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



Gambar 2.92.
Grafik Capaian TPB 5 Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029

2.5.6. TPB 6 Air Bersih Dan Sanitasi Layak

Pada TPB 6, terdapat 18 indikator. Capaian TPB 6 Kabupaten Bima sebagian besar belum berhasil yaitu sebesar 39 persen. Pemerintah Kabupaten Bima perlu mengoptimalkan capaian tersebut agar sesuai target dan menjaga 22 persen indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target. Secara umum pada TPB Air Bersih dan Sanitasi Layak ini, kondisinya adalah sebagaimana Tabel berikut.

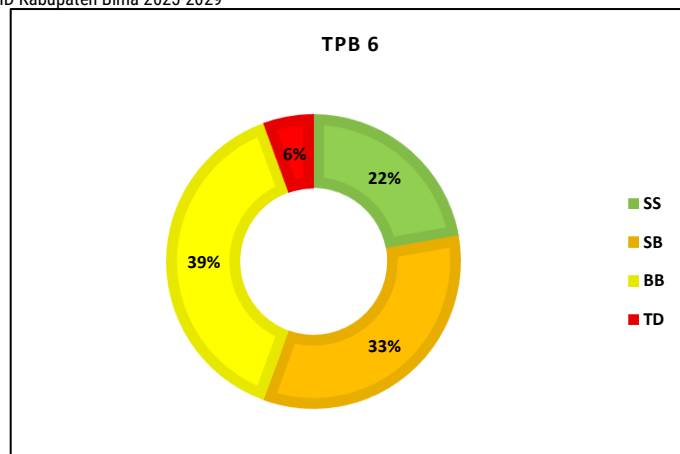
Tabel 2.108.
Kondisi Umum TPB 6 Kabupaten Bima

No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
6	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	88	88	SS



No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	82	0,00	BB
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	80	80	SB
	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	0,00	0,00	BB
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	88,5	88	SB
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	88,67	88,67	SS
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	88,5	86,74	SB
	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	0,00	0,00	BB
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	100	41,78	SB
	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	100	40	SB
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	88,5	88	SB
	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Meningkat	0,00	0,00	BB
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	5	5	SS
	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada	0,00	0,00	BB
	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	0,00	0,00	BB
	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS	-	-	TD
	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	0,00	0,00	BB
	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada	10	2	SS

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



Gambar 2.93.

Grafik Capaian TPB 6 Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



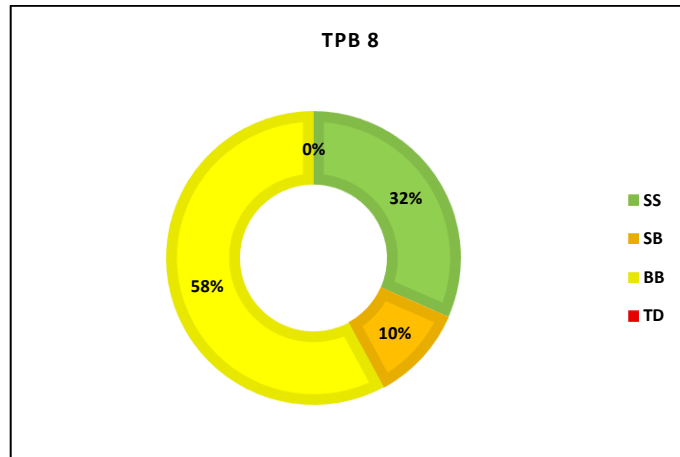
2.5.7. TPB 8 Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi

Pada TPB 8, terdapat 19 indikator. Capaian TPB 8 belum berhasil yaitu sebesar 58 persen. Pemerintah Kabupaten Bima perlu mengoptimalkan capaian tersebut agar sesuai target dan menjaga 32 persen indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target. Secara umum pada TPB Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi ini, kondisinya adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.109.
Kondisi Umum TPB 8 Kabupaten Bima

No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
8	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	5,03	0,02	SB
	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	19.156.363	16.135.268	SB
	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	37.956.375	0,00	BB
	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	54,11	0,00	BB
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51,00%	54,11	0,00	BB
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	45,89	0,00	BB
	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25,00%	2,7	11,35	SS
	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	15.000	15.274	SS
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	1,28	2	SS
	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	12,62	0,00	BB
	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	0,00	0,00	BB
	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	0,00	0,00	BB
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	900	1.600	SS
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	10.000	90.735	SS
	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	0,00	0,00	BB
	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	0,00	0,00	BB
	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	0,00	0,00	BB
	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)	0,00	0,00	BB
	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	100	100	SS

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



Gambar 2.94.

Grafik Capaian TPB 8 Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029

2.5.8. TPB 9 Industri, Inovasi Dan Infrastruktur

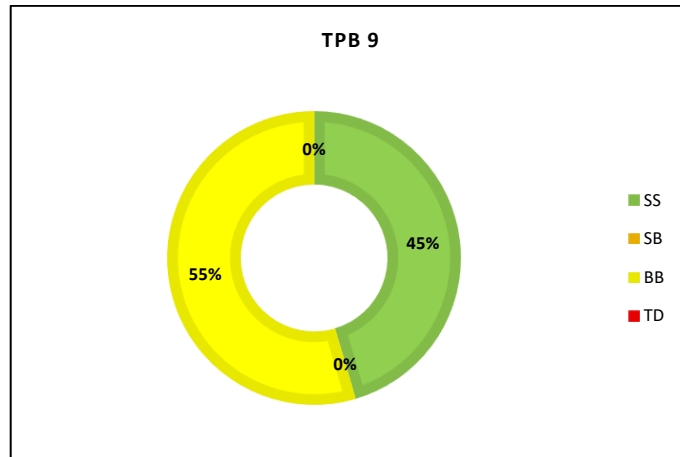
Pada TPB 9, terdapat 13 indikator. Capaian TPB 9 belum berhasil yaitu sebesar 55 persen. Pemerintah Kabupaten Bima perlu mengoptimalkan capaian tersebut agar sesuai target dan menjaga 45 persen indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target. Secara umum pada TPB Industri, Inovasi dan Infrastruktur ini, kondisinya adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.110.

Kondisi Umum TPB 9 Kabupaten Bima

No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
9	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	1	1	SS
	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	24 pelabuhan (skala nasional)	1	1	SS
	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	0,00	0,00	BB
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	0,00	0,00	BB
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	0,07	0,07	SS
	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	0,00	0,00	BB
	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	0,00	0,00	BB
	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat	0,00	0,00	BB
	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	77,22	0,00	BB
	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	66,63	66,63	SS
	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	27,85	65,06	SS

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



Gambar 2.95.

Grafik Capaian TPB 9 Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029

2.5.9. TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan

Pada TPB 10, terdapat 11 indikator. Capaian TPB 10 Kabupaten Bima sebagian besar sudah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 46 persen. Pemerintah Kabupaten Bima perlu meningkatkan upaya ke depan untuk mengoptimalkan capaian indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target atau belum dilaksanakan. Secara umum pada TPB Berkurangnya Kesenjangan ini, kondisinya adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.111.

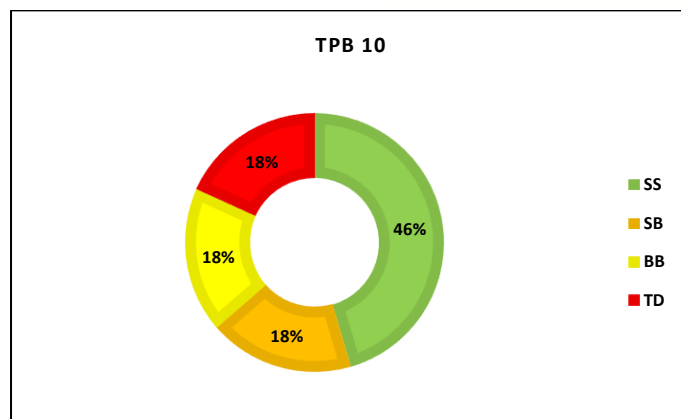
Kondisi Umum TPB 10 Kabupaten Bima

No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
10	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,36	0,36	SS
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	10,2	13,68	SB
	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten (skala nasional)	22	22	SS
	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	30	57	SB
	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	3	3	SS
	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Meningkat	0,00	0,00	BB
	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Menurun menjadi 14%	5,00	0,00	BB



No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Menurun	0,63	0,63	SS
	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87	-	-	TD
	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	-	-	TD
	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	1249	1249	SS

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



Gambar 2.96.
Grafik Capaian TPB 10 Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029

2.5.10. TPB 11 Kota Dan Komunitas Berkelanjutan

Pada TPB 11, terdapat 13 indikator. Capaian TPB 11 belum berhasil yaitu sebesar 46 persen. Pemerintah Kabupaten Bima perlu mengoptimalkan capaian tersebut agar sesuai target dan menjaga 31 persen indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target. Secara umum pada TPB Kota dan Komunitas Berkelanjutan ini, kondisinya adalah sebagaimana Tabel berikut.

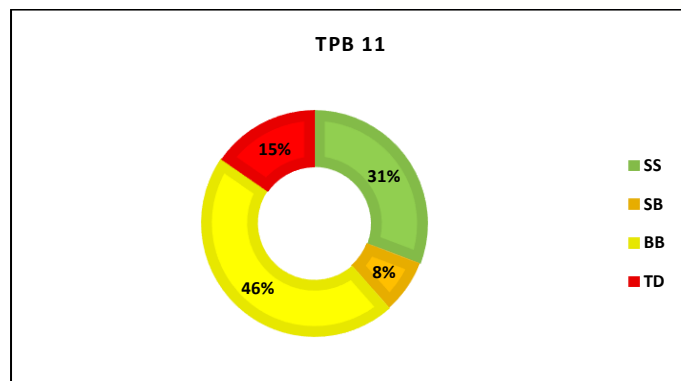
Tabel 2.112.
Kondisi Umum TPB 11 Kabupaten Bima

No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
11	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	95,02	0,00	BB
	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)	0,00	0,00	BB



No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	5 metropolitan (skala nasional)	-	-	TD
	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	0,00	0,00	BB
	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	ada	-	-	TD
	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	404	0,00	SS
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	131,80	130,80	SS
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	1	1	SS
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	400.000.000.000	0,00	BB
	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	100	20,44	SB
	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Meningkat/ada	1	0,00	BB
	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ada	1	0,00	BB
	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	1	1	SS

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



Gambar 2.97.

Grafik Capaian TPB 11 Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029

2.5.11. TPB 12 Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggungjawab

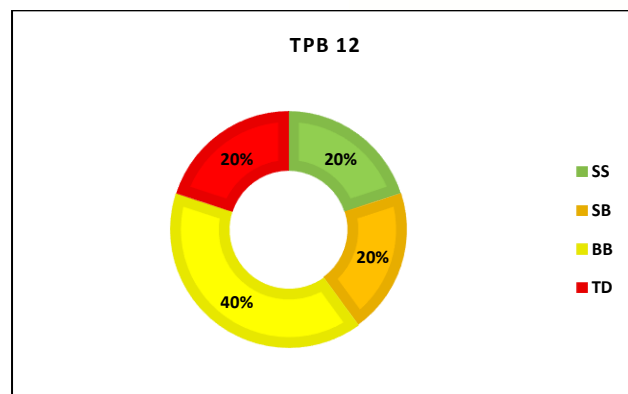
Pada TPB 12, terdapat 5 indikator. Capaian TPB 12 belum berhasil yaitu sebesar 40 persen. Pemerintah Kabupaten Bima perlu mengoptimalkan capaian tersebut agar sesuai target dan menjaga 20 persen indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target. Secara umum pada TPB Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab ini, kondisinya adalah sebagaimana Tabel berikut.



Tabel 2.113.
Kondisi Umum TPB 12 Kabupaten Bima

No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
12	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	1	0,00	BB
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	0,37	0,38	SS
	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	1	0,00	BB
	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat	-	-	TD
	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat	66,67	6,00	SB

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



Gambar 2.98.

Grafik Capaian TPB 12 Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029

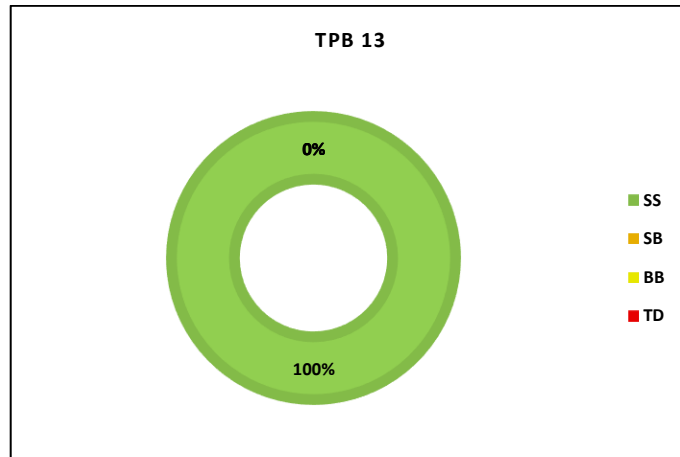
2.5.12. TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim

Pada TPB 13, terdapat 2 indikator. Capaian TPB 13 Kabupaten Bima sebagian besar sudah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 100 persen. Secara umum pada TPB Penanganan Perubahan Iklim ini, kondisinya adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.114.
Kondisi Umum TPB 13 Kabupaten Bima

No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
13	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	1	1	SS
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	404	0	SS

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



Gambar 2.99.

Grafik Capaian TPB 13 Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029

2.5.13. TPB 14 Ekosistem Laut

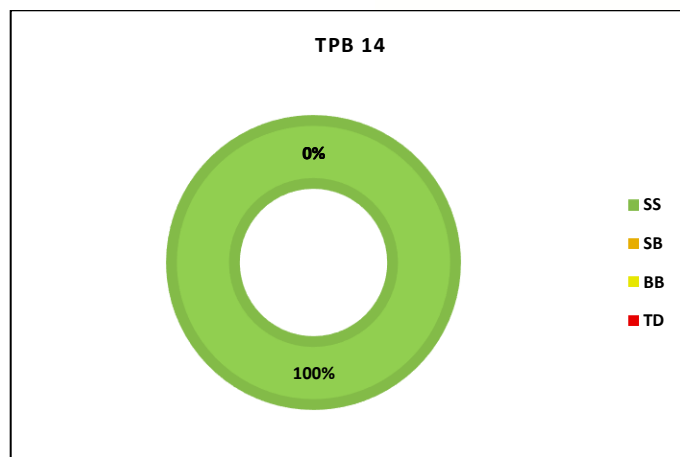
Pada TPB 14, terdapat 1 indikator. Capaian TPB 14 Kabupaten Bima sebagian besar sudah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 100 persen. Secara umum pada TPB Ekosistem Laut ini, kondisinya adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.115.

Kondisi Umum TPB 14 Kabupaten Bima

No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
14	14.b.1(b)	Jumlah Nelayan Yang Terlindungi	Meningkat	120	120	SS

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



Gambar 2.100.

Grafik Capaian TPB 14 Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029

2.5.14. TPB 15 Ekosistem Daratan

Pada TPB 15, terdapat 4 indikator. Capaian TPB 15 Kabupaten Bima sebagian besar sudah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 50 persen. Pemerintah Kabupaten

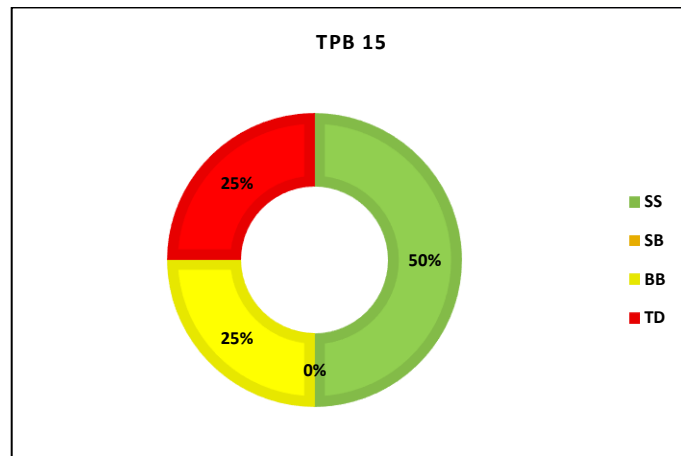


Bima perlu meningkatkan upaya ke depan untuk mengoptimalkan capaian indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target atau belum dilaksanakan. Secara umum pada TPB Ekosistem Daratan ini, kondisinya adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.116.
Kondisi Umum TPB 15 Kabupaten Bima

No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
15	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	50	0,00	BB
	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	0,23	0,23	SS
	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	ada	-	-	TD
	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	1	1	SS

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



Gambar 2.101.
Grafik Capaian TPB 15 Kabupaten Bima
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029

2.5.15. TPB 16 Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh

Pada TPB 16, terdapat 21 indikator. Capaian TPB 16 belum berhasil yaitu sebesar 62 persen. Pemerintah Kabupaten Bima perlu mengoptimalkan capaian tersebut agar sesuai target dan menjaga 24 persen indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target. Secara umum pada TPB Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh ini, kondisinya adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.117.
Kondisi Umum TPB 16 Kabupaten Bima

No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
16	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	0,00	0,00	BB
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	0,00	0,00	BB

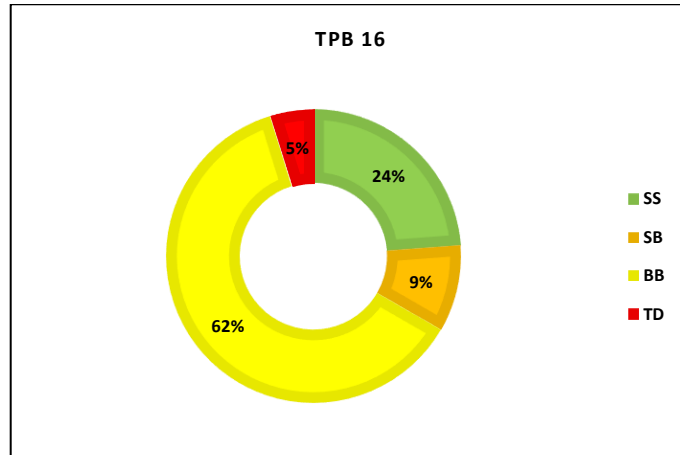


No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	0,00	0,00	BB
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	0,00	0,00	BB
	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	0,00	0,00	BB
	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	25	0,00	BB
	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	25	0,00	BB
	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	3,02	0,00	BB
	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	0,00	0,00	BB
	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	100	100	SS
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	73	77,28	SS
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi menjadi 80%	23,14	0,00	BB
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	0,012	0,00	BB
	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	0,00	0,00	BB
	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	6,83	6,67	SS
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	0,012	3	SS
	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	100	98	SB
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	98,25	98,25	SS
	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	90,91	62,83	SB
	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	0,00	0,00	BB
	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan	ada	-	-	TD



No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
		pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.				

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



Gambar 2.102.

Grafik Capaian TPB 16 Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029

2.5.16. TPB 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Pada TPB 17, terdapat 16 indikator. Capaian TPB 17 Kabupaten Bima sebagian besar sudah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 44 persen. Pemerintah Kabupaten Bima perlu meningkatkan upaya ke depan untuk mengoptimalkan capaian indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target atau belum dilaksanakan. Secara umum pada TPB Kemitraan untuk Mencapai Tujuan ini, kondisinya adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.118.

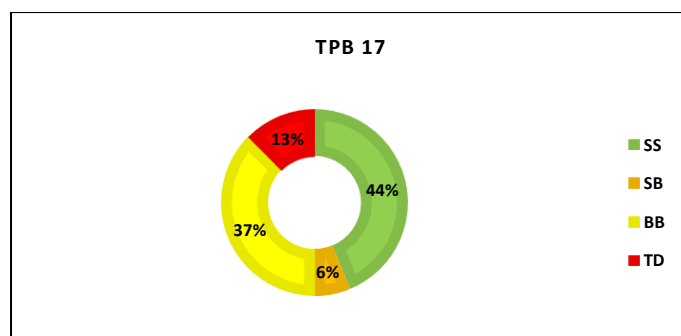
Kondisi Umum TPB 17 Kabupaten Bima

No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
17	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	14,8	14,80	SS
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	0,2	0,20	SS
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	0,00	0,00	BB
	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah	-	-	TD



No. TPB	Nomor Indikator	Indikator	Target Nasional (2030) Perpres 59/2017	Target 2023	Capaian 2023	Status Capaian 2023
			tangga dan 6% populasi			
	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	97,26	0,00	BB
	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	67,9	65,06	SB
	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	100,00%	0,00	0,00	BB
	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	4	0,00	BB
	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	4	0,00	BB
	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	90	90	SS
	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat	100	100	SS
	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	30251	30251	SS
	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	-	-	TD
	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	100	0,00	BB
	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	120000	120000	SS
	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	96,67	96,67	SS

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



Gambar 2.103.

Grafik Capaian TPB 17 Kabupaten Bima

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029

2.5.17. Kondisi Umum Capaian TPB Kabupaten Bima

Pada tahun 2023, capaian Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Bima menunjukkan kondisi yang bervariasi antar tujuan. Dari total 217 target TPB yang dipantau, sebanyak 95 target (sekitar 44%) telah sudah dilaksanakan dan mencapai target (SS). Selain itu, 32 target (sekitar 15%) sudah dilaksanakan namun belum mencapai target



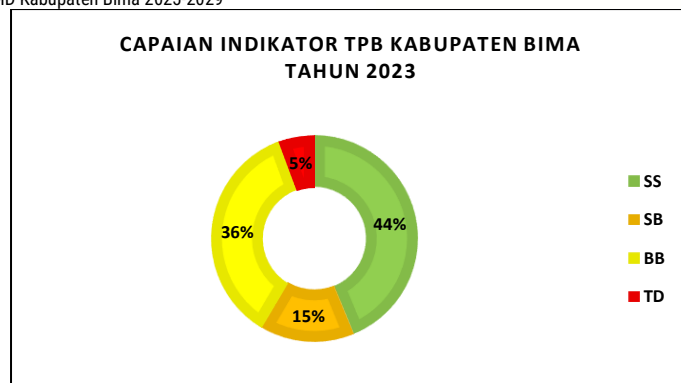
(SB), menunjukkan adanya upaya yang masih perlu ditingkatkan. Sebanyak 78 target (sekitar 36%) belum dilaksanakan atau belum mencapai target serta terdapat kekurangan data (BB), sehingga perlu perhatian khusus untuk memperbaiki pemantauan dan pelaksanaan. Terdapat juga 12 target (sekitar 5,5%) yang dikategorikan sebagai bukan kewenangan Kabupaten Bima (TD), sehingga implementasi di luar lingkup pengelolaan di tingkat kabupaten.

Beberapa TPB yang sudah menunjukkan pencapaian baik antara lain: kategori Tanpa Kemiskinan (14 SS), Kehidupan Sehat dan Sejahtera (22 SS), dan Kesetaraan Gender (5 SS). Namun, beberapa TPB lain memerlukan perhatian lebih, misalnya Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi yang memiliki 11 BB dan 1 TD, serta Perdamaian dan Keadilan yang Tangguh dengan 13 BB dan 1 TD, yang mengindikasikan tantangan dalam pencapaian target-target penting tersebut. Secara keseluruhan, hasil capaian TPB Kabupaten Bima tahun 2023 ini memperlihatkan progres yang positif namun juga masih terdapat sejumlah bidang yang perlu mendapat peningkatan perhatian agar target pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal ke depan. Untuk mengetahui kondisi umum capaian TPB Kabupaten Bima secara keseluruhan dan pendetailan untuk setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 2.119.
Kondisi Capaian TPB Kabupaten Bima Tahun 2023

No TPB	TPB	Status Capaian 2023				Jumlah
		SS	SB	BB	TD	
1	Tanpa Kemiskinan	14	5	3	2	24
2	Tanpa Kelaparan	7	3	1	0	11
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	22	4	8	0	34
4	Pendidikan Berkualitas	5	3	5	0	13
5	Kesetaraan Gender	5	2	7	0	14
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	6	7	1	18
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	6	2	11	0	19
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	5	0	6	0	11
10	Berkurangnya Kesenjangan	5	2	2	2	11
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	4	1	6	2	13
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	1	1	2	1	5
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	0	0	0	2
14	Ekosistem Lautan	1	0	0	0	1
15	Ekosistem Daratan	2	0	1	1	4
16	Perdamaian, Keadilan Kelembagaan yang Tangguh	5	2	13	1	21
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	7	1	6	2	16
Jumlah		95	32	78	12	217

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



Gambar 2.104.
Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Bima Tahun 2023

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029



2.6. Gambaran Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian dari Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/ pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami dua kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terjadi perubahan mendasar dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini mencakup pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sehingga menjadi lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai UU No. 1 Tahun 2022, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan 40% APBD pada belanja infrastruktur pelayanan publik. Pengertian belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur Daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar-Daerah.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, hingga 2024 Kabupaten Bima berhasil memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 9 tahun berturut-turut. Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bima transparan dan akuntabel.

2.6.1. Realisasi APBD

2.6.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Bima selama 2020-2024 menunjukkan peningkatan setiap tahun. Di tahun 2020 realisasi pendapatan adalah 1,74 trilyun dan di tahun 2024 naik menjadi 2,09 trilyun. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan atau kenaikan pendapatan per tahun selama 2020-2024 mencapai 4,64%. Komponen pendapatan terdiri dari tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga komponen tersebut struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer. Di tahun 2020 pendapatan transfer mencapai 1,25 trilyun atau 71,94% dari pendapatan dan pada tahun 2024 pendapatan transfer mencapai 1,83 trilyun atau 87,63%. Selama 2020-2024 pendapatan transfer bukan saja menunjukkan kenaikan secara nominal namun juga secara proporsi. Rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer bahkan melebihi rata-rata pertumbuhan pendapatan, yaitu 9,93% per tahun. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, selama 2020-2024



terlihat menunjukkan tren penurunan dari 357,85 milyar di tahun 2020 menjadi 88,79 milyar di tahun 2024 atau memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -29,42%.

Dalam struktur PAD komponen lain-lain PAD yang sah memiliki kontribusi terbesar selama 2020-2024. Tahun 2020 lain-lain PAD yang sah memiliki kontribusi 70,74% dari PAD dan di tahun 2024 naik menjadi 74,97%. Nilai lain-lain PAD yang sah tahun 2020 sebesar 93,08 milyar dan di tahun 2024 naik menjadi 127,39 milyar; dengan demikian rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 8,16%. Lain-lain PAD yang sah terdiri dari: (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Penerimaan pajak dalam struktur PAD dan pendapatan masih kecil dan cenderung tumbuh lambat selama 2020-2024. Tahun 2020 penerimaan pajak hanya 13,86 milyar dan tahun 2024 sebesar 16,68 milyar atau rata-rata setiap tahun tumbuh 4,74%. Struktur pajak dalam PAD hanya 10,53% di tahun 2020 dan tahun 2024 turun menjadi 9,82%. Hal ini merupakan indikasi bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak perlu mendapatkan perhatian dengan tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian daerah. Kecilnya penerimaan pajak akan berdampak pada kecilnya tax ratio, yang berarti peran pajak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih sangat kecil.

2.6.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Untuk komponen belanja daerah di tahun 2020 total belanja daerah mencapai 1,75 trilyun dan di tahun 2024 naik menjadi sekitar 2,08 trilyun atau setiap tahun rata-rata naik sebesar 4,35%. Rata-rata pertumbuhan belanja lebih kecil dibandingkan rata-rata pertumbuhan pendapatan. Selama 2020-2024 APBD Kabupaten Bima hanya deficit di tahun 2022 dan itupun sangat kecil. Dalam struktur belanja, komponen belanja operasi memiliki proporsi terbesar yaitu 67,90% di tahun 2020 dan naik menjadi 75,39%. Belanja operasi tahun 2020 adalah 1,19 trilyun dan di tahun 2024 naik menjadi sekitar 1,57 trilyun atau rata-rata setiap tahun naik sebesar 7,12%; lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kenaikan total belanja. Di dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 belanja pegawai yang merupakan salah satu komponen belanja operasi dibatasi paling tinggi 30% dari total belanja daerah.

Untuk belanja modal selama 2020-2024 terlihat menunjukkan penurunan dari 256,02 milyar di tahun 2020 menjadi sekitar 212,99 milyar di tahun 2024; atau rata-rata setiap tahun mengalami penurunan sebesar -4,50%. Dari sisi proporsinya, di tahun 2020 proporsi belanja modal hanya 14,60% dan di tahun 2024 turun cukup besar menjadi 10,24%. Proporsi belanja modal yang relative kecil perlu mendapatkan perhatian, menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 proporsi belanja modal yang harus dialokasikan adalah sekurang-kurangnya 40% dari total belanja. Proporsi yang besar tersebut difokuskan pada belanja yang berkaitan dengan belanja infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan public. Alokasi belanja infrastruktur pendukung pelayanan public yang cukup besar tersebut perlu diantisipasi melalui peningkatan pendapatan, mengingat proporsi minimal 40% tersebut hampir setengah dari APBD. Beberapa komponen pada belanja operasi perlu ada penyesuaian untuk dialokasikan pada belanja infrastruktur pelayanan public. Belanja barang dan jasa misalnya, perlu dipetakan kembali dan didasarkan kepada kebutuhan atau skala prioritas.



2.6.1.3. Realisasi Pembiayaan Daerah

Untuk komponen pembiayaan, selama 2020-2024 Kabupaten Bima memiliki pembiayaan neto yang positif meski setiap tahun menunjukkan penurunan. Pembiayaan neto tahun 2020 mencapai 49,01 milyar dan di tahun 2024 turun menjadi hanya 29,08 milyar atau setiap tahun rata-rata turun sebesar -12,24%. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan pinjaman daerah. Pengeluaran pembiayaan sendiri terdiri dari pembayaran cicilan utang, penyertaan modal, pembentukan dana cadangan, serta pemberian pinjaman.

Tabel 2.120.
Realisasi APBD Kabupaten Bima 2020-2024 (Rp)

KOMPONEN	2020	2021	2022	2023	2024	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
PENDAPATAN						
Pendapatan Asli Daerah	131.585.549.042,49	141.708.257.766,00	121.151.305.296,69	159.537.988.348,40	169.925.922.940,43	6,60
Pajak	13.861.845.567,00	13.778.957.369,00	16.013.801.499,00	16.632.338.954,55	16.684.150.219,55	4,74
Retribusi	18.640.585.262,00	18.134.336.488,00	18.663.813.599,00	12.242.854.070,00	17.699.305.005,00	-1,29
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.002.248.597,07	5.049.293.416,00	5.552.260.418,00	7.334.427.022,00	8.152.466.371,00	7,96
Lain-lain PAD yang sah	93.080.869.616,42	104.745.670.493,00	80.921.429.780,69	123.328.368.301,85	127.390.001.344,88	8,16
Pendapatan Transfer	1.254.603.995.069,00	1.552.209.854.985,00	1.617.563.205.623,00	1.689.838.979.157,00	1.832.006.301.746,00	9,93
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	357.853.249.790,00	81.907.013.633,00	37.141.980.078,00	3.275.652.125,00	88.792.606.124,00	-29,42
JUMLAH PENDAPATAN	1.744.042.793.901,49	1.775.825.126.384,00	1.775.856.490.997,69	1.852.652.619.630,40	2.090.724.830.810,43	4,64
BELANJA						
Belanja Operasi	1.191.004.295.018,15	1.178.724.818.835,00	1.256.753.332.586,56	1.322.473.927.755,00	1.567.972.000.927,92	7,12
Belanja Modal	256.022.945.964,00	261.575.868.883,00	246.039.191.263,00	240.396.940.817,00	212.987.711.149,00	-4,50
Belanja Tak Terduga	17.933.337.626,00	27.864.429.306,00	11.946.886.392,00	1.772.366.000,00	1.621.640.000,00	-45,16
Belanja Transfer	288.988.972.401,04	288.871.544.698,00	285.345.706.455,00	287.423.772.641,00	297.295.188.555,00	0,71
JUMLAH BELANJA	1.753.949.551.009,19	1.757.036.661.722,00	1.800.085.116.696,56	1.852.067.007.213,00	2.079.876.540.631,92	4,35
PEMBIAYAAN						
Penerimaan Pembiayaan	57.739.165.787,72	39.561.428.761,00	58.394.893.416,52	30.042.905.692,00	30.078.203.358,45	-15,04
Pengeluaran Pembiayaan	8.728.146.600,00	-	4.200.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-41,82
PEMBIAYAAN NETO	49.011.019.187,72	39.561.428.761,00	54.194.893.416,52	29.042.905.692,00	29.078.203.358,45	-12,24

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Bima berbagai tahun

Tabel 2.121.
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan dan Belanja 2020-2024 (%)

KOMPONEN	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN					
PAD Terhadap Pendapatan	7,54	7,98	6,82	8,61	8,13
Pajak Terhadap PAD	10,53	9,72	13,22	10,43	9,82
Retribusi Terhadap PAD	14,17	12,80	15,41	7,67	10,42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,56	3,56	4,58	4,60	4,80
Lain-lain PAD yang sah Terhadap PAD	70,74	73,92	66,79	77,30	74,97
Pendapatan Transfer Terhadap Pendapatan	71,94	87,41	91,09	91,21	87,63
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan	20,52	4,61	2,09	0,18	4,25
BELANJA					
Belanja Operasi	67,90	67,09	69,82	71,41	75,39
Belanja Modal	14,60	14,89	13,67	12,98	10,24



KOMPONEN	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Tak Terduga	1,02	1,59	0,66	0,10	0,08
Belanja Transfer	16,48	16,44	15,85	15,52	14,29

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Bima berbagai tahun, diolah

2.6.2. Neraca Daerah

Neraca daerah memiliki tiga komponen utama yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas, di dalam neraca daerah aset memiliki nilai yang sama dengan penjumlahan kewajiban dan ekuitas. Pada tahun 2020 Kabupaten Bima memiliki aset sebesar 2,71 trilyun dan tahun 2024 aset naik menjadi 2,99 trilyun sehingga selama 2020-2024 tersebut aset Kabupaten Bima naik sebesar 7,43%. Kenaikan tersebut disebabkan karena masih banyaknya piutang daerah. Dalam aset, komponen aset tetap memiliki proporsi yang terbesar yaitu 92,85% di tahun 2020 dan 89,68% di tahun 2024.

Komponen kewajiban Kabupaten Bima selama 2020-2024 mengalami kenaikan yang sangat besar, dari sekitar 1,58 milyar di tahun 2020 menjadi 31,13 milyar atau selama 2020-2024 naik sebesar 1873,14%. Kenaikan utang tersebut disebabkan karena besarnya utang belanja daerah. Untuk ekuitas selama 2020-2024 mengalami kenaikan yang relatif lambat, cenderung stagnan. Ekuitas tahun 2020 sebesar 2,70 trilyun dan di tahun 2024 naik menjadi 2,96 trilyun atau selama periode 2020-2024 naik sebesar 9,34%.

Berdasarkan informasi yang ada di dalam neraca, dapat dihitung beberapa rasio penting yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.

Rasio likuiditas dalam hal ini terdiri dari dua rasio yaitu current ratio dan quick ratio. Current ratio merupakan rasio aktiva lancar terhadap kewajiban jangka pendek. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya. Quick ratio merupakan rasio aktiva lancar setelah dikurangi persediaan terhadap kewajiban jangka pendek. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Rasio solvabilitas dalam hal ini diukur dari dua rasio yaitu hutang terhadap aset serta rasio hutang terhadap ekuitas.

Berdasarkan rasio-rasio tersebut nilai rasio likuiditas menunjukkan tren penurunan selama 2020-2024, baik current ratio maupun quick ratio. Hal ini merupakan indikasi semakin menurunnya likuiditas Kabupaten Bima dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, meski masih di atas ambang batas 1 (lebih besar dari 1). Nilai 3,1242 menunjukkan bahwa 1 rupiah hutang mampu dijamin oleh aset sebesar 3,1242. Untuk rasio solvabilitas pada tahun 2020-2021 untuk rasio hutang terhadap aset menunjukkan penurunan yang cukup tajam dari 0,0197 menjadi 0,0014; namun di periode 2021-2024 menunjukkan kenaikan; angka 0,0104 menunjukkan bahwa 1 rupiah aset mampu menjamin 0,0104 hutang. Angka yang semakin besar menunjukkan semakin turunnya kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.



Tabel 2.122.
Neraca Daerah Kabupaten Bima 2020-2024 (Rp)

NO	AKUN	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
	A. Aset Lancar	80.041.053.081	119.346.381.064	73.397.994.042	165.853.231.459	97.266.298.954
	B. Investasi Jangka Panjang	89.635.402.502	87.892.269.204	87.301.153.966	85.390.603.562	84.628.796.866
	C. Aset Tetap	2.511.600.524.603	2.655.683.321.610	2.657.870.681.058	2.704.515.863.835	2.678.998.403.648
	D. Aset Lainnya	23.756.593.652	51.229.404.904	124.041.139.105	73.469.538.579	45.010.919.618
	JUMLAH ASET	2.705.033.573.838	2.914.151.376.783	2.942.610.968.171	3.029.229.237.435	2.905.904.419.085
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	1.577.830.489	4.130.954.730	12.533.155.517	18.079.111.006	31.132.811.732
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.577.830.489	4.130.954.730	12.533.155.517	18.079.111.006	31.132.811.732
3	EKUITAS					
	Ekuitas	2.703.455.743.349	2.910.020.422.053	2.930.077.812.655	3.046.908.306.074	2.956.074.627.449
	JUMLAH EKUITAS	2.703.455.743.349	2.910.020.422.053	2.930.077.812.655	3.046.908.306.074	2.956.074.627.449
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.705.033.573.838	2.914.151.376.783	2.942.610.968.172	3.064.987.417.079	2.987.207.439.181

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Bima berbagai tahun

Tabel 2.123.
Rasio Neraca Daerah Kabupaten Bima 2020-2024

Rasio Neraca	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Likuiditas					
Current Ratio	50,7286	28,8908	5,8563	9,1737	3,1242
Quick Ratio	38,9187	19,5916	4,2745	6,3902	2,3591
Rasio Solvabilitas					
Rasio Hutang Terhadap Aset	0,0197	0,0014	0,0043	0,0059	0,0104
Rasio Hutang Terhadap Modal	0,0006	0,0014	0,0043	0,0059	0,0105

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Bima berbagai tahun, diolah

2.6.3. Proyeksi Keuangan Daerah 2026-2030

Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada pola fluktuasi data realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya. Proyeksi didasarkan pada asumsi bahwa perekonomian nasional, regional, dan daerah dalam kondisi stabil. Kestabilan ini diharapkan berdampak pada pendapatan daerah sehingga mampu mendorong peningkatan penerimaan komponen-komponen pendapatan daerah terutama PAD dan Transfer.

Selain itu pemerintah daerah diasumsikan mampu meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi secara proporsional sesuai dinamika perekonomian yang terjadi. Stabilitas yang terjadi diharapkan dapat mendorong perekonomian yang dinamis dan kondusif. Dalam proyeksi diasumsikan tidak terjadi surplus/defisit sehingga semua pendapatan yang diterima mampu untuk dialokasikan pada semua komponen belanja daerah. Belanja daerah diharapkan dapat dialokasikan pada sektor produktif yang mampu menstimulus berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Proyeksi dilakukan dengan mempertimbangkan fluktuasi data historis, isu ditahun mendatang, serta proporsi masing-masing komponen pendapatan dan belanja. Proyeksi pendapatan daerah juga telah mempertimbangkan potensi kawasan pertumbuhan sesuai dengan arahan pengembangan wilayah dalam RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu 1) Kawasan peternakan; 2) Kawasan sentra garam; 3) Kawasan perikanan dan sentra rumput laut; serta 4) Sentra akuakultur komoditas udang. Kawasan swasembada pangan, air, dan energi mengarahkan Kabupaten Bima sebagai kawasan pangan lokal. Dengan mempertimbangkan



fluktuasi data historis, isu kedepan, potensi kawasan pertumbuhan dan proporsi komponen pendapatan dan belanja diharapkan mampu menghasilkan proyeksi yang realistis namun optimis.

Tabel 2.124.

Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Bima 2026-2030 (Rp)

KOMPONEN	Baseline 2024	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN						
Pendapatan Asli Daerah	169.925.922.940	215.921.625.000	219.333.893.000	221.954.579.000	224.998.130.000	227.876.779.000
Pajak	16.684.150.220	42.554.335.000	42.954.335.000	43.354.335.000	44.672.509.000	45.506.134.000
Retribusi	17.699.305.005	149.892.549.000	151.965.827.000	152.965.827.000	153.665.827.000	154.644.460.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.152.466.371	7.578.209.000	7.697.969.000	7.789.947.000	7.896.767.000	7.997.799.000
Lain-lain PAD yang sah	127.390.001.345	15.630.686.000	15.877.702.000	16.067.415.000	16.287.739.000	16.496.126.000
Pendapatan Transfer	1.832.006.301.746	1.975.485.668.000	2.045.901.505.000	2.116.317.341.000	2.186.733.177.000	2.257.149.013.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	88.792.606.124	49.101.758.000	50.851.982.000	52.602.205.000	54.352.429.000	56.102.652.000
JUMLAH PENDAPATAN	2.090.724.830.810	2.240.509.052.000	2.316.087.380.000	2.390.874.126.000	2.466.083.736.000	2.541.128.445.000
BELANJA						
Belanja Operasi	1.567.972.000.928	1.620.201.926.000	1.675.983.312.000	1.731.368.907.000	1.786.965.934.000	1.842.480.510.000
Belanja Modal	212.987.711.149	358.696.923.000	369.078.976.000	379.065.239.000	389.262.934.000	399.378.178.000
Belanja Tak Terduga	1.621.640.000	4.431.439.000	4.590.918.000	4.750.398.000	4.909.878.000	5.069.357.000
Belanja Transfer	297.295.188.555	257.178.765.000	266.434.173.000	275.689.582.000	284.944.990.000	294.200.399.000
JUMLAH BELANJA	2.079.876.540.632	2.240.509.052.000	2.316.087.380.000	2.390.874.126.000	2.466.083.736.000	2.541.128.445.000
PEMBIAYAAN						
Penerimaan Pembiayaan	30.078.203.358	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO	29.078.203.358	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan proyeksi keuangan, dapat dihitung kapasitas riil APBD selama 2026-2030. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, kapasitas riil diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas Pembangunan. Kapasitas riil keuangan Daerah dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. Kapasitas riil keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah, dan prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Prioritas pertama direncanakan sebesar 55% dari pendapatan sedangkan prioritas kedua dan ketiga masing-masing sebesar 35% dan 10%.

Tabel 2.125.

Perhitungan Proyeksi Kapasitas Riil Kabupaten Bima (Rp)

KOMPONEN	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	2.240.509.052.000	2.316.087.380.000	2.390.874.126.000	2.466.083.736.000	2.541.128.445.000
Pencairan Dana Cadangan Sesuai Perda	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	-	-	-	-	-
Dikurangi:					
Pengeluaran wajib dan mengikat	772.402.245.844	798.457.427.470	824.239.715.883	850.167.784.159	876.039.003.790
Kapasitas Riil	1.468.106.806.156	1.517.629.952.530	1.566.634.410.117	1.615.915.951.841	1.665.089.441.210



KOMPONEN	2026	2027	2028	2029	2030
Penggunaan Kapasitas Riil (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 158)					
Prioritas I Belanja wajib dan menginkat dan pelayanan dasar	807.458.743.386	834.696.473.891	861.648.925.564	888.753.773.513	915.799.192.665
Prioritas II Pemenuhan visi-misi Kepala Daerah	513.837.382.154	531.170.483.385	548.322.043.541	565.570.583.144	582.781.304.423
Prioritas III Penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya	146.810.680.616	151.762.995.253	156.663.441.012	161.591.595.184	166.508.944.121

Sumber: Hasil Pengolahan Data

2.7. Permasalahan dan Isu Strategis

2.7.1. Permasalahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima

Identifikasi permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah daerah menjelaskan terkait apa yang menjadi masalah di masa lalu serta gambaran solusi di masa mendatang tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap perangkat Daerah. Adapun permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1) Permasalahan pada Aspek Geografi dan Demografi

a) Tingginya Risiko dan Potensi Bencana Banjir

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bima, bahwa nilai IRB Kabupaten Bima pada tahun 2024 sebesar 136,02 atau termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan data Inarisk, bahwa sebanyak 42% jiwa terpapar banjir dan sebanyak 21% jiwa terpapar bencana banjir bandang pada tahun 2024. Tingginya potensi bencana banjir di Kabupaten Bima juga disebabkan oleh posisi geografis berupa perbukitan dan dataran rendah dengan jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 20 sungai. Selain itu, kondisi drainase yang kurang baik juga menjadi penyebab tingginya risiko dan potensi bencana banjir di Kabupaten Bima.

b) Sebaran Penduduk yang Belum Merata

Jumlah penduduk Kabupaten Bima sebanyak 543.582 jiwa pada tahun 2024. Kabupaten Bima memiliki 18 kecamatan dan 191 desa. Kepadatan pendudukan tertinggi berada di Kecamatan Bolo dengan 787 jiwa/km². Jumlah kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Tamboro dengan 14 jiwa/km². Tingginya disparitas kepadatan penduduk antar wilayah kecamatan di Kabupaten Bima ini menunjukkan bahwa sebaran potensi ekonomi dan fasilitas pelayanan umum masih teraglomerasi pada wilayah kecamatan tertentu dan belum menyeluruh di semua wilayah kecamatan Kabupaten Bima.

2) Permasalahan pada aspek kesejahteraan Masyarakat

a) Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bima pada tahun 2024 sebesar 13,88%. Persentase ini menjadikan Kabupaten Bima menjadi wilayah ketiga tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tingginya jumlah penduduk miskin tersebut disebabkan oleh daya beli masyarakat yang rendah atau belum berada di atas garis kemiskinan. Rendahnya daya beli tersebut karena tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Bima yang masih rendah dan terjadinya ketimpangan. Nilai gini ratio Kabupaten Bima pada tahun 2023 sebesar 0,356. Artinya, masih terjadi ketimpangan pendapatan antar penduduk di wilayah Kabupaten Bima

**b) Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima sebesar 2,82 % pada tahun 2024. Pertumbuhan tersebut menjadikan Kabupaten Bima menjadi wilayah terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah serta rendahnya produktivitas penduduk.

c) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bima sebesar 70,99 pada tahun 2024. Nilai tersebut menempatkan Kabupaten Bima sebagai wilayah kedua terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan komponen komposit pembentuknya, angka rata-rata lama sekolah 8,30 tahun dan harapan lama sekolah sebesar 13,66 tahun. Usia harapan hidup penduduk Kabupaten Bima sebesar 71,88 tahun. Pembangunan kualitas sumber daya manusia ini ke depan akan menggunakan pengukuran Indeks Modal Manusia, yang memiliki logika dasar pembangunan investasi pada aspek pengetahuan dan kesehatan akan berdampak pada tingkat pendapatan penduduk. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini disebabkan oleh sebaran layanan kesehatan dan pendidikan yang belum merata, serta kualitas sumber daya kesehatan dan pendidik yang masih belum sesuai dengan standar pelayanan minimal.

d) Tingginya Angka Pengangguran dan Kurangnya Partisipasi Angkatan Kerja

Jumlah pengangguran Kabupaten Bima sebesar 6.928 jiwa pada tahun 2024. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,19 %. Hal ini menempatkan Kabupaten Bima sebagai wilayah ketiga tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah angkatan kerja Kabupaten Bima sebanyak 315.680 jiwa pada tahun 2024

3) Permasalahan Aspek Daya Saing**a) Rendahnya daya saing infrastruktur daerah**

Kondisi infrastruktur di Kabupaten Bima masih dalam kondisi kurang baik. Panjang jalan dengan kategori mantap sebanyak 53,11% dan kategori rusak sedang sepanjang 93,15 km atau kategori rusak berat sepanjang 365,68 km. Persentase jembatan berkategori baik sebesar 49% dari total 168 jembatan pada tahun 2024. Jaringan irigasi berfungsi baik sebanyak 50%.

b) Rendahnya promosi investasi dalam meningkatkan minat calon investor

Nilai PMA sebesar Rp 25,729,244,493 dan PMDN sebesar Rp 2,601,040,068 pada triwulan II tahun 2024. Nilai realisasi penanaman modal Kabupaten Bima ke depan masih perlu ditingkatkan terutama pada aspek promosi penanaman modal melalui kegiatan promosi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan minat calon investor. Hal ini penting karena investasi memiliki peran strategis sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja. Dalam jangka panjang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pengurangan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

c) Rendahnya Daya Saing Daerah

Nilai indeks daya saing daerah Kabupaten Bima sebesar 3,45 pada tahun 2024. Nilai ini menempatkan Kabupaten Bima sebagai empat terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan komponen Indeks Daya Saing Daerah yang terdiri dari lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi di



Kabupaten Bima masih perlu ditingkatkan ke depan, terutama pada komponen pasar serta ekosistem inovasi.

4) **Permasalahan pada Aspek Pelayanan Umum**

a) **Rendahnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah**

Nilai indeks reformasi birokrasi Kabupaten Bima sebesar 54,32 atau kategori CC pada tahun 2023. Nilai SAKIP Kabupaten Bima sebesar 63,01 atau kategori B. Hal ini masih perlu dioptimalkan ke depan karena tata kelola pemerintahan merupakan kunci dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang optimal. Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan ini disebabkan oleh masih minimnya kapasitas serta kapabilitas sumber daya aparatur. Nilai indeks pelayanan publik sebesar 3,62 dengan predikat B pada tahun 2024. Nilai indeks SPBE sebesar 2,66 atau berpredikat cukup pada tahun 2024.

b) **Rendahnya Kemandirian Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah Jumlah PAD Kabupaten Bima pada tahun 2024 sebesar Rp 178,758,349,858.00. Jumlah pendapatan transfer sebesar Rp 1,786,219,420,438.00. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bima masih rendah. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian ke depan untuk mengoptimalkan berbagai potensi dan sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

c) **Rendahnya Kualitas Pembangunan Lingkungan Hidup**

Pembangunan Lingkungan Hidup Nilai indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bima sebesar 66,48 pada tahun 2023. Capaian ini berada di bawah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 71,92 dan Nasional 72,54. Rendahnya kualitas pembangunan lingkungan hidup ini perlu menjadi perhatian dalam rangka adaptasi terhadap mitigasi perubahan iklim serta keselarasan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kabupaten Bima.



Gambar 2.105.

Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima



2.7.2. Isu Strategis Kabupaten Bima

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis Kabupaten Bima tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan permasalahan; isu lingkungan dinamis terdiri dari isu global, nasional, dan regional; isu KLHS RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029; serta potensi daerah yang dapat dikembangkan ke depan.

2.7.2.1. Isu Global

Perubahan yang cepat di seluruh dunia membuat tantangan global di masa depan semakin kompleks. Kemajuan dalam teknologi digital dan kecerdasan buatan yang juga dikenal sebagai AI adalah teknologi digital yang paling menonjol dari perubahan global tersebut yang akan membawa transformasi besar dalam jangka panjang. Beberapa komponen menyebabkan transformasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, yang menghasilkan pembentukan tatanan kehidupan baru.

Berbagai tantangan yang harus dihadapi terangkum dalam sepuluh megatrend global yang akan muncul pada tahun 2045. Di satu sisi, megatren dunia ini menawarkan peluang kemajuan bagi sosial ekonomi dunia, tetapi di sisi lain, memiliki efek disrupsi. Beberapa perubahan tersebut meliputi:

- Urbanisasi dunia;
- Perdagangan internasional;
- Disrupsi teknologi;
- Demografi global;
- Geopolitik dan geoekonomi;
- Penduduk kelas menengah
- Persaingan sumber daya manusia
- Perubahan iklim
- Tata kelola keuangan global
- Pemanfaatan luar angkasa



Gambar 2.106.

Isu Strategis Internasional

Sumber: RPJPN 2025-2045, 2024



1) **Demografi Global**

Peningkatan penduduk menyebabkan tantangan penyesuaian, tingginya kebutuhan hidup masyarakat, dan keterbatasan sumber daya alam dan lahan. Pada data World Population Prospects (2022), terdapat 7 miliar orang di seluruh dunia saat ini yang diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar pada tahun 2050. Penetrasi global, perubahan bentuk dan struktur rumah tangga, serta kemajuan teknologi digital mempengaruhi pemenuhan kualitas keluarga. Perubahan ideologi dan perpindahan penduduk dapat menyebabkan perubahan struktur dan bentuk keluarga. Perilaku sesama jenis, penundaan pernikahan, dan infertilitas semakin umum, mengakibatkan penurunan angka kelahiran. Setiap negara, termasuk Indonesia akan menghadapi tantangan dari dinamika geopolitik global yang akan datang. Meningkatnya persaingan antar negara adidaya yang akan berdampak pada tatanan global adalah konsekuensi dari perkembangan geopolitik yang semakin meluas terhadap masyarakat dan tatanan global. Hal ini meningkatkan kekhawatiran terhadap konflik di seluruh dunia, seperti Perang Rusia-Ukraina yang berpotensi menyebabkan konflik geopolitik di masa depan. Sementara itu di wilayah lain seperti Semenanjung Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut Cina Selatan. Kerugian bagi negara lain yang disebabkan oleh perang, antara lain seperti peningkatan tekanan inflasi global, krisis energi dan pangan, Selain itu, perang mendorong negara untuk menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Ini dapat meningkatkan ketegangan antar negara, yang dapat menyebabkan konflik atau perang lagi di kemudian hari.

2) **Geopolitik dan Geoekonomi**

Kawasan Indo-Pasifik muncul sebagai hasil dari perubahan geopolitik yang melibatkan wilayah maritim Samudera Hindia dan Pasifik. Pasifik telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, menimbulkan persaingan antar negara. Sebagai upaya penanganan konflik geopolitik di wilayah Indo-Pasifik, Indonesia berupaya meningkatkan keterlibatan dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk meningkatkan kerjasama dan mengurangi ketidaksepakatan di wilayah tersebut. Secara strategis Indo-Pasifik berfungsi sebagai ekosistem yang membawa perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Upaya perluasan dan peningkatan kerjasama antarnegara, peluang ekonomi baru yang inklusif dapat diciptakan di wilayah tersebut. Negara-negara berkembang semakin mendominasi output dunia. Pada tahun 2015, negara-negara berkembang menyumbang 55% dari total output dunia, meningkat dari 34% pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang akan mencapai 71% dari total nilai output dunia, dengan negara-negara Asia sebagai pendorong utama menyumbang 54% dari total nilai output global. Secara keseluruhan, pendapatan per kapita di negara maju masih lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Sektor komoditas tidak lagi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Selama 60 tahun terakhir, sebagian besar negara berkembang mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. 54% ekspor nasional Amerika Latin berbasis komoditas, 81% di Afrika, dan 75% di negara-negara Timur Tengah. Perubahan struktur perekonomian, terutama di negara-negara pengimpor komoditas, telah menurunkan permintaan terhadap komoditas. Tingkat kesiapan menghadapi perubahan komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara-negara



berkembang di masa depan. Ekonomi negara berkembang yang didorong oleh kebijakan makroekonomi yang dapat diandalkan yang berbasis pada prinsip kehati-hatian telah mendukung pertumbuhan selama bertahun-tahun dan akan menjadi salah satu pilar penting di masa depan. Peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam jangka panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk membangun struktur perekonomian yang kompetitif, perbaikan dan reformasi lingkungan usaha akan membantu.

3) Perkembangan Teknologi

Teknologi digital seperti Internet of Things (IoT), blockchain, artificial intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), manajemen kehidupan siklus produksi, otomatisasi proses robotik (RPA), komputasi tepi, sistem robot mobil, 3D, dan teknologi masa depan adalah beberapa contoh teknologi digital yang telah menguntungkan masyarakat. Proses perubahan teknologi memungkinkan sebagian besar aktivitas industri menjadi lebih otomatis, seperti nanoteknologi, blockchain, robotika pintar, Internet of Things, kecerdasan buatan, dan teknologi imersif; digitalisasi yang memungkinkan konektivitas, seperti material canggih; rekayasa genetika dan bioteknologi; dan teknologi. Proses belajar mengajar berbasis kecerdasan buatan (AI) membutuhkan inovasi untuk memastikan bahwa transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kemampuan dapat dilakukan tanpa batas waktu dan tempat. Kecerdasan buatan akan membuat pendidikan lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis. Teknologi telah menggantikan banyak pekerjaan. Saat ini, kecerdasan buatan bahkan dapat menyelesaikan tugas yang lebih sulit daripada sebelumnya. Dengan kemajuan teknologi, proses pengambilan kebijakan, termasuk pembuatan peraturan, dapat ditingkatkan. Teknologi membantu proses membuat undang-undang dan peraturan dan membangun lembaga nasional yang lebih terencana, lengkap, dan sistematis. Teknologi informasi dan komunikasi yang cepat mendorong perkembangan perkotaan, terutama dalam menangani masalah sehari-hari. Di sisi lain, dampak pandemi COVID-19 di samping teknologi pintar dan pengelolaan data berbasis mahadata akan sangat penting bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan.

4) Urbanisasi Dunia

Berdasarkan data UN DESA diperkirakan bahwa dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, dengan 95% dari peningkatan ini terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Jumlah orang yang tinggal di kota-kota di Asia sendiri akan meningkat 1,7 kali lipat dalam empat puluh tahun mendatang. Pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi yang tidak optimal menjadi dampak tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik. Sekitar 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan permukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai di banyak kota di Asia dan Afrika.

5) Konstelasi Perdagangan Global

Sebagai pengganti negara maju yang tergabung dalam G7, ekonomi negara berkembang, terutama negara E7, diperkirakan akan meningkat pesat dan akan mengambil alih dominasi perekonomian global. Skema GPN dan GVC menjadi pilihan utama untuk produksi. Selain mengurangi biaya produksi, GPN dan GVC



meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional suatu negara. Adanya infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang signifikan, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam produksi barang manufaktur berorientasi ekspor, Asia Timur dan ASEAN akan berkembang menjadi pusat GVC global. Negara anggota Kawasan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Kawasan (RCEP) Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis. Kerja sama ini meningkatkan peluang perdagangan di wilayah Asia-Pasifik, yang meningkatkan akses ke investasi global.

6) Tata Kelola Keuangan Global

Perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk akan sangat mempengaruhi pendapatan negara ke depan. Hal ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Ada kecenderungan untuk menggunakan Central Bank Digital Currency (CBDC), yang merupakan jenis mata uang fiat digital yang dimiliki oleh suatu negara. Upaya mengatasi risiko stabilitas aset kripto melalui CBDC menjadi terobosan pencegahan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas moneter, ekonomi makro, dan sistem keuangan di masa depan. Industri jasa keuangan telah berubah karena kemajuan teknologi informasi. Industri jasa keuangan telah mengalami transformasi besar sebagai akibat dari kemajuan teknologi seperti Internet of Things (IoT), komputasi, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin.

7) Pertumbuhan Kelas Menengah

Fleksibilitas jam kerja menunjukkan perubahan di dunia kerja. Banyak bisnis akhirnya mengadopsi metode kerja dari rumah yang baru. Ternyata pandangan dan wawasan baru ini menunjukkan seberapa besar kebutuhan tenaga kerja perusahaan dan seberapa sempit lapangan kerja yang tersedia. Di masa sekarang, fokus utama adalah efisiensi dan efektivitas SDM. Oleh karena itu, untuk tetap bertahan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan bisnis, kualitas kerja harus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan sistem kerja yang lebih efisien tentunya hanya akan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi dan berkinerja tinggi.

8) Persaingan Memperebutkan Sumber Daya Alam

Proyeksi kelangkaan dan persaingan sumber daya alam (SDA), termasuk energi, air, dan pangan, akan meningkat di seluruh dunia di masa depan. Meningkatnya populasi dan aktivitas ekonomi menyebabkan peningkatan permintaan terhadap sumber daya alam seperti air, makanan, dan energi. Akibatnya, persaingan untuk sumber daya alam meningkat.

9) Perubahan iklim

Perubahan iklim global, kerusakan dan polusi lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman (tiga krisis global, tiga krisis planet) diperkirakan akan terus berlanjut dan tidak dapat dihindari. Triple Planet Crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan model pembangunan seperti biasa (BaU) yang lama dan beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan. Kebijakan dan strategi utama dalam upaya meningkatkan tren pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan rendah karbon telah diterapkan oleh berbagai sektor di seluruh dunia. Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca adalah komitmen yang dibuat oleh berbagai negara maju dan



berkembang. Hal ini menjadi kebijakan global di masa depan yang akan bergantung pada upaya Indonesia untuk mendorong ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon.

10) Pemanfaatan luar angkasa

Ruang angkasa memiliki ciri-ciri khusus yang menunjukkan pengetahuan manusia yang terbatas. Fakta bahwa ruang angkasa berada di luar yurisdiksi negara mana pun di dunia tidak menghalangi negara untuk bergantung padanya dalam hal ekonomi, perbankan, agrikultur, pariwisata, navigasi, dan kesehatan. Antariksa dianggap sebagai warisan bersama, artinya ruang strategis yang digunakan untuk kepentingan bersama. Banyak negara telah mengembangkan industri ruang angkasa karena aturan bahwa ruang angkasa bukan milik negara tertentu. Pada kurun waktu yang panjang, ekonomi antariksa dunia akan tumbuh secara signifikan. Hal ini diproyeksikan mencapai \$469 miliar pada tahun 2021 dan diperkirakan akan terus tumbuh hingga mencapai \$1 triliun pada tahun 2040. Antariksa menjadi bidang yang paling menarik dan berkembang pesat di dunia. Gambaran yang menarik tentang masa depan manusia di luar angkasa mencakup eksplorasi, komersialisasi, dan potensi sumber daya luar angkasa. Namun demikian, saat kita menjadi lebih jauh ke luar angkasa, kita juga dihadapkan pada banyak masalah dan pertimbangan etika yang harus diatasi. Industri ruang angkasa akan terus berkembang dan memberikan dampak besar bagi dunia jika pemerintah dan perusahaan swasta bekerja sama dan mempertimbangkan masa depan ini dengan cermat.



Gambar 2.107.
Isu Global yang Berpengaruh

2.7.2.2. Isu Nasional

Indonesia telah membuat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi di masa depan akan menghadapi banyak perubahan strategis yang sangat cepat. Pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan, diplomasi, ketahanan sosial,



budaya, dan ekologi, kewilayahan, dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan, menimbulkan tantangan. Beberapa masalah dan kendala yang akan muncul selama pembangunan ke depan.

1) Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat

Pada rentang tahun 2005 dan 2019, rata-rata produktivitas Indonesia meningkat secara negatif sebesar 0,66 dibandingkan dengan Korea Selatan, yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada di posisi menuju negara maju dari 1971 hingga 1995, dan juga Tiongkok, yang mampu mencapai 1,60 dari 2005 hingga 2019. Capaian ini menunjukkan adanya ketertinggalan dalam perkembangan produktivitas masyarakat. Kondisi produktivitas yang rendah ini di antaranya disebabkan oleh produktivitas sektor ekonomi yang rendah; kualitas sumber daya manusia yang buruk, terutama perempuan; ketertinggalan dalam inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta sistem insentif; regulasi dan kepastian hukum yang lemah. Selanjutnya produktivitas yang rendah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan. Antara tahun 2005 dan 2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,7%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan rata-rata 4,7% antara tahun 2010 dan 2015. Berikutnya, kemampuan ekonomi untuk tumbuh lebih jauh semakin terbatas, seperti yang ditunjukkan oleh pertumbuhan rata-rata hanya 4,0 persen antara tahun 2015 dan 2022. Pertumbuhan ekonomi yang rendah menjadi dampak dari produktivitas yang rendah, dan pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Hal ini mempercepat penurunan pertumbuhan ekonomi potensial di bawah 5%. Pertumbuhan ekonomi yang menurun berdampak pada penurunan produksi di berbagai sektor sehingga menciptakan kerugian.

2) Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)

Untuk meningkatkan daya saing negara melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas tinggi dan berteknologi tinggi, IPTEKIN harus memiliki kapasitas untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Komitmen pemerintah yang masih lemah, terutama dari sisi anggaran yang hanya mencapai 0,28 persen dari PDB berdampak pada kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hal ini menyebabkan ketertinggalan dari negara-negara lain seperti Negara Korea Selatan (4,81), sedangkan pada tahun 2005, Thailand memiliki nilai 1,31, sementara Negara Malaysia memiliki nilai 1,04. Kapasitas bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi berpengaruh pada pengembangan pembangunan maupun dalam upaya meningkatkan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Berbagai inovasi dari pengembangan pengetahuan, dan teknologi tersebut menjadi cerminan sejauh mana negara mampu berkembang.

3) Kuantitas dan Kualitas SDM peneliti belum memadai

Rasio jumlah peneliti per satu juta penduduk hanya berjumlah 388, jauh lebih rendah dari Thailand (1.790), Singapura (7.287), dan Korea Selatan (8.408). Ekosistem penelitian dan inovasi yang masih lemah menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digunakan karena kurangnya kerjasama antara lembaga penelitian dan industri, serta kerjasama domestik dan internasional yang terbatas. Jumlah paten yang diajukan Indonesia pada tahun 2021 hanya 1.445, jauh di belakang Malaysia (1.863), Singapura (9.766), dan Korea Selatan (267.527). Indonesia baru mencapai 284 pada H-Indeks, jauh di belakang Malaysia (415), Singapura (697), dan Korea Selatan (810).



Selain itu, Indonesia masih menghadapi beberapa masalah lain, seperti kurangnya kesadaran ilmiah (*scientific temper*). Beberapa negara di kawasan ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura melakukan lebih banyak riset dibandingkan dengan Indonesia. Dari 234 negara di dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-64 untuk jumlah publikasi penelitian, menurut data SCImago on Research. Ini menunjukkan bahwa hanya 1 dari setiap 10 dosen di Indonesia yang melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Penggunaan anggaran, seperti kwitansi pembayaran, dan ketersediaan anggaran karena menggunakan sistem tahunan atau tahunan jamak, adalah kendala bagi peneliti untuk meningkatkan produktivitasnya. Hal ini dikarenakan anggaran hanya turun pada tahun pertama, penelitian yang harus berlangsung bertahun-tahun tidak dapat dilakukan.

4) Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah

Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB secara konsisten menurun dari 27,41% pada tahun 2005 menjadi 18,34% pada tahun 2022 karena berbagai faktor. Sementara produktivitas pertanian juga mengalami penurunan signifikan sejumlah 41,5 juta rupiah per pekerja pada tahun 2010 menjadi hanya 22,9 juta rupiah per pekerja pada tahun 2022. Pemanfaatan potensi pariwisata yang masih belum optimal disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah tingkat atraksi, kemudahan, dan aksesibilitas yang masih terbatas, serta kemungkinan pengelolaan dan implementasi pariwisata berkelanjutan yang masih rendah, kinerja pariwisata masih jauh dibawah potensinya. Selain itu, terjadi pergeseran preferensi pasar dan disrupsi yang berkaitan dengan digitalisasi, teknologi, dan bencana. Sementara itu, transformasi digital yang tidak merata dan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai menyebabkan pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal. Selain itu, kurangnya inovasi dan pengembangan produk, kurangnya ekosistem yang mendukung komersialisasi, dan terbatasnya akses ke pasar global.

5) Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata

Pariwisata menjadi potensi yang terus dikembangkan di berbagai daerah. Kondisi geografi, kemampuan pengelolaan, dan potensi usaha lokal yang dijadikan *branding* sekaligus sumber pendapatan bagi masyarakat menjadi faktor keberhasilan pemanfaatan potensi pariwisata. Aksesibilitas yang masih terbatas serta kemungkinan pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan yang rendah, menjadi faktor atas pencapaian kinerja pariwisata yang masih dibawah potensi. Selain itu, dampak lainnya yaitu terjadinya preferensi pasar dan disrupsi yang berkaitan dengan digitalisasi, teknologi, dan kebencanaan. Sementara itu, karena tidak ada kebijakan yang memadai tentang transformasi digital berdampak pada potensi ekonomi kreatif masih kurang.

6) Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut

Berbagai potensi ekonomi laut di Indonesia seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tambah jika dimanfaatkan potensinya secara optimal. Pemanfaatan sumber daya laut yang rendah serta pemanfaatan Sea Lines of Communication (SLOC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang lamban menghalangi optimalisasi ekonomi biru untuk mempertahankan PDB Kemaritiman pada kisaran 7,60 persen. Pengembangan budidaya perikanan dan pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang belum optimal, kurangnya diversifikasi industri dan sektor lain yang



berkembang yang memanfaatkan kekayaan laut dan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, dan kurangnya kemajuan dalam riset dan teknologi kelautan semuanya menyebabkan kontribusi yang kurang. Sebaliknya, masih ada masalah yang belum diselesaikan, seperti tingkat penanganan sampah plastik yang rendah, tingkat kegiatan perahu ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUUF) yang terus meningkat, dan tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut yang belum optimal. Namun, dengan potensi ekonomi kelautan yang besar, peran kemaritiman dalam perekonomian nasional masih dapat ditingkatkan.

- 7) Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi**
Kontribusi UMKM dan Koperasi pada peningkatan tenaga kerja secara signifikan, berdampak pada rendahnya perekonomian negara. Rasio jumlah UMKM dan total pelaku usaha yaitu sejumlah 99,99 persen, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 96,92 persen pada tahun 2019. Kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2019 mencapai 60,51 persen, sementara proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar 1,07 persen. Beberapa masalah yang harus dihadapi oleh UMKM dan koperasi termasuk kapasitas pengelolaan yang rendah, partisipasi rantai nilai produksi yang rendah, pekerja berkeahlian rendah dan banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah; kurangnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.
- 8) Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan**
Untuk memastikan berkelanjutan dari kapasitas ekosistem dan kemampuan mereka untuk menahan dampak lingkungan, pembangunan harus secara komprehensif menerapkan konsep ekonomi berkelanjutan. Salah satu tantangan dalam menerapkan ekonomi berkelanjutan adalah ketergantungan yang masih tinggi pada energi fosil, yang tercermin dalam fakta bahwa sebanyak 87,1 persen dari produksi listrik pada tahun 2021 berasal dari sumber energi fosil, dan sekitar 1.317 unit emisi gas rumah kaca berasal dari sektor pembangkit listrik dan transportasi.
- 9) Pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi**
Andil energi baru terbarukan (EBT) dalam portofolio energi nasional terus meningkat, meningkat dari 4,24 persen pada tahun 2005 menjadi 12,30 persen pada tahun 2022. Namun, peningkatan ini mencerminkan fakta bahwa penggunaan energi berbasis bahan bakar fosil masih tinggi. Selain itu, tingkat elektrifikasi di pedesaan Indonesia pada akhir tahun 2020 mencapai sekitar 98,67 persen. Meskipun demikian, kualitas akses listrik secara keseluruhan masih memerlukan peningkatan. Selain itu, masih ada beberapa wilayah yang belum tersentuh oleh listrik dan memerlukan kebijakan afirmatif untuk memastikan mereka juga mendapatkan akses listrik.
- 10) Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau**
Pencemaran air, udara, dan tanah terus terjadi sebagai dampak dari aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan (ekonomi "*brown*"). Akibat dari hal ini, jumlah limbah berbahaya dan beracun (B3) tercatat terus meningkat, mencapai sekitar 74 juta ton pada tahun 2022. Dalam hal limbah domestik, hanya sekitar satu persen rumah tangga di Indonesia yang dilayani oleh Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)



terpusat. Selain itu, ada tantangan lain seperti pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung merusak ekosistem, seperti pertambangan eksploitatif, serta peningkatan penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang berkontribusi pada degradasi hutan, deforestasi, dan penurunan keanekaragaman hayati. Selanjutnya, penegakan hukum dan regulasi, termasuk sistem insentif dan disinsentif untuk ekonomi berkelanjutan, masih perlu diperkuat.

11) Perkembangan teknologi digital, infrastuktur dan literasi digital masih terbatas

Indonesia saat ini belum memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai, baik dari segi penawaran maupun permintaan, untuk mengakselerasi pemanfaatan sumber daya digital secara optimal guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan digital, termasuk kesiapan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang mencakup kapabilitas dan kapasitas jaringan, manajemen spektrum, serta kurangnya implementasi kebijakan TIK yang efektif.

12) Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas

Penyebab utama dari situasi ini adalah konsentrasi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di Pulau Jawa, yang menyumbang sekitar 57,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022. Infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum sepenuhnya terintegrasi mengakibatkan biaya logistik yang tinggi. Selain itu, masih banyak regulasi yang menghambat perkembangan ekonomi, dan ada disparitas dalam jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama di luar Pulau Jawa.

13) Tantangan yang masih harus dihadapi antara lain adalah rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi

Perbedaan tersebut tergambar melalui elastisitas pertumbuhan penduduk perkotaan terhadap pertumbuhan PDB per kapita perkotaan di Indonesia yang hanya sekitar 14 (artinya, pertumbuhan penduduk sebesar 1 persen hanya meningkatkan pertumbuhan PDB per kapita perkotaan sebesar 14 persen), sementara di Tiongkok, angka elastisitasnya mencapai 3,00. Selama 10 tahun terakhir, tingkat urbanisasi di Indonesia hanya tumbuh sekitar 0,67 persen per tahun, sedangkan di Tiongkok, tingkat urbanisasinya mencapai 1,21 persen per tahun. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk keterbatasan koneksi antara pusat pertumbuhan perkotaan dan wilayah sekitarnya, ketimpangan dalam pembangunan di berbagai wilayah perkotaan dan antara perkotaan dan pedesaan, keterbatasan kapasitas pengelolaan perkotaan, serta penurunan kualitas lingkungan perkotaan.

14) Kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial

Pembangunan sektor kesehatan dihadapi oleh berbagai tantangan sebagai dampak dari transisi demografi, yang diiringi dengan peningkatan mobilitas penduduk, urbanisasi, perubahan pola epidemiologi, dan perilaku hidup yang tidak sehat. Tantangan ini meningkatkan beban penyakit, termasuk penyakit menular dan tidak menular, serta masalah kesehatan yang berkaitan dengan penduduk lanjut usia dan kesehatan mental. Selain itu, akses yang terbatas ke pangan yang sehat dan pola konsumsi yang tidak baik dapat menyebabkan masalah gizi, baik kekurangan



maupun kelebihan. Sistem kesehatan harus memiliki kemampuan untuk merespons berbagai perubahan, mengadopsi kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan, menghadapi risiko kesehatan global, seperti potensi terjadinya pandemi, serta harus mampu mengatasi ketimpangan dalam akses terhadap pangan, lingkungan yang sehat, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Pembiayaan kesehatan juga harus ditingkatkan dengan mengadopsi inovasi dalam pembiayaan kesehatan. Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapi oleh tantangan dalam memaksimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas guna mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor. Untuk mencapai pembangunan optimal di sektor pendidikan, Indonesia harus mengatasi beberapa masalah, termasuk ketidakmerataan dalam layanan pendidikan karena disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi yang masih tinggi. Selain itu, masih ada 302 kecamatan yang tidak memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta 727 kecamatan yang tidak memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau Madrasah Aliyah (MA).

15) Kualitas pendidikan yang masih rendah

Kualitas pendidikan yang masih rendah disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang masih kurang memadai. Selain itu, jumlah guru yang memiliki kompetensi tinggi dan status profesional masih terbatas, dan mereka belum tersebar merata di seluruh daerah dan unit pendidikan. Masih terdapat keterbatasan dalam jumlah, kualitas, dan distribusi guru, seperti kurang dari 50 persen guru yang memiliki sertifikat pendidik di semua jenjang pendidikan. Pendidikan nonformal yang berkualitas juga masih belum memadai, dengan 42 persen lembaga pendidikan nonformal yang belum terakreditasi atau hanya memiliki akreditasi C. Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global juga masih rendah. Hanya sedikit perguruan tinggi Indonesia yang berhasil masuk dalam peringkat 500 terbaik dunia, yaitu hanya lima perguruan tinggi. Tantangan besar terkait produktivitas riset dan inovasi di perguruan tinggi juga masih ada. Meskipun ada peningkatan dalam jumlah publikasi ilmiah selama periode 2011-2021, kualitas publikasi masih rendah, yang ditunjukkan oleh rasio sitasi per publikasi yang hanya mencapai 0,39 pada tahun 2021.

16) Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah

Tantangan dalam penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi mencakup beberapa aspek, antara lain pelaksanaan bantuan sosial yang terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Faktor ini, antara lain, dipengaruhi oleh penggunaan data yang masih terfragmentasi dan belum diperbaharui secara sistematis, yang berdampak pada tingginya tingkat kesalahan dalam menentukan sasaran bantuan. Selain itu, pelaksanaan bantuan sosial juga belum adaptif dan belum mampu membangun ketahanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Tingkat efektivitas bantuan sosial juga masih rendah, dan lingkungan sosial masih belum inklusif bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan integrasi antara program bantuan sosial dan pemberdayaan



ekonomi, memperbarui dan menyatukan data dengan lebih baik, meningkatkan adaptabilitas dalam bantuan sosial, dan memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar memberikan dampak positif pada kelompok rentan, sambil memperhitungkan perubahan lingkungan dan tantangan terkait dengan bencana dan perubahan iklim.

17) Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah

Dampak dari situasi ini adalah munculnya banyak uji materi dalam hukum, yang menghasilkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis dan masyarakat secara umum. Kondisi tersebut berasal dari berbagai faktor, termasuk masih adanya kecenderungan kuat pada sudut pandang sektor, penyebaran kewenangan pengaturan yang tidak terkoordinasi, kurangnya pengawasan terhadap dampak pelaksanaan regulasi, kekurangan dalam jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sektor regulasi, dan kurangnya partisipasi yang efektif dalam proses perumusan regulasi.

18) Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif.

Penguraian birokrasi mengakibatkan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berbagai organisasi di berbagai sektor, serta mendorong terjadinya ego sektoral yang terus berlanjut. Fragmentasi dalam lembaga-lembaga pemerintah juga berhubungan dengan pembagian kewenangan di dalam kerangka hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

19) Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.

Meskipun setiap kementerian/lembaga memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundangan, namun pada kenyataannya, pelaksanaan program-program pembangunan masih sering mengalami tumpang tindih yang berpotensi menyebabkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan.

20) Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D.

Situasi ini menghambat suksesi pengisian jabatan strategis di instansi pemerintah, mengakibatkan ketidakmampuan memaksimalkan potensi individu yang paling berbakat, menurunkan kinerja dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), mempertahankan mentalitas yang memisahkan antar unit kerja, dan mengurangi budaya dan semangat kerja. Sistem penghargaan yang berbasis pada kinerja ASN juga belum terwujud, dan ini tercermin dalam disparitas atau kesenjangan dalam penghasilan ASN antar berbagai instansi, yang menjadikan sulitnya mempertahankan ASN berbakat yang terbaik.

21) ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik

Dalam konteks birokrasi, terutama di tingkat pemerintah daerah, masalah ini disebabkan oleh peran Kepala Daerah sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, dan pemberhentian aparatur sipil negara (ASN). Selama periode 2020-2022, tercatat ada 1.703 pengaduan terkait pelanggaran netralitas ASN. Terkait dengan kasus korupsi, aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat dari lingkungan eksekutif terlibat dalam 371 kasus korupsi, atau sekitar 38,1 persen dari total 1.165 kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2003-2022.

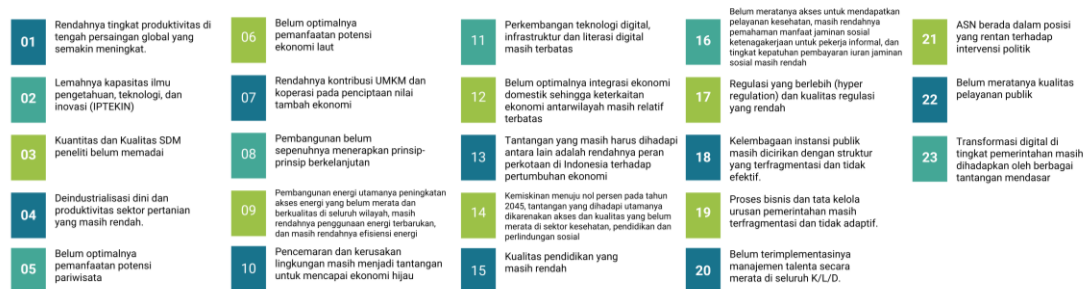


22) Belum meratanya kualitas pelayanan publik

Standar pelayanan publik belum diterapkan secara konsisten, sehingga masih ada kerumitan dalam prosedur pelayanan, ketidakpastian dalam waktu pelayanan, serta praktik pungutan ilegal yang masih terjadi. Selain itu, proses digitalisasi pelayanan publik terhambat karena pembangunan infrastruktur digital yang belum merata, keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan kurangnya interoperabilitas data dan layanan yang masih belum terwujud.

23) Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar

Disparitas dalam infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi antar wilayah, terutama kesenjangan antara kota dan desa yang signifikan, serta rendahnya tingkat literasi digital, menjadi permasalahan yang masih ada. Tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara instansi pusat dan pemerintah daerah masih belum merata. Digitalisasi pemerintahan juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk tata kelola yang baik, keamanan siber, integrasi data dan informasi yang masih terbatas, serta tingkat literasi digital yang rendah



Gambar 2.108.
Isu Nasional yang Berpengaruh

2.7.2.3. Isu Regional

1) RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029

- Penurunan Tingkat Kemiskinan
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Produktivitas dan Perkuatan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan
- Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
- Penguatan Tata kelola Pemerintahan Daerah

2) RPJPD Kabupaten Bima Tahun 2024-2045

- Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Prestasi Pemuda
- Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas antar wilayah
- Penurunan Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial
- Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan potensi lokal
- Perbaikan Tata Kelola Pemerintah secara masif, bersinergi, harmonis, berkelanjutan, dan berbasis digital
- Penguatan Ideologi Pancasila Dan Penghapusan Konflik Sosial



g. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

3) KLHS RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029

- Masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat;
- Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan air limbah;
- Belum optimalnya upaya mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim; serta
- Menurunnya kualitas lingkungan hidup

2.7.2.4. Perumusan Isu Strategis Kabupaten Bima Tahun 2025-2029

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Bahwa, perumusan isu strategis akan menggunakan kertas kerja yang disimpulkan dari 1) Permasalahan; 2) Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan 3) Potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Berikut ini merupakan kertas kerja perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029.

Tabel 2.126.

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1) Sumber daya alam; 2) Sumber daya manusia	1) Rendahnya pertumbuhan ekonomi; 2) Tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan; 3) Tingginya angka pengangguran dan kurangnya partisipasi angkatan kerja; 4) Rendahnya kemandirian keuangan daerah	1) Masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk	1) Perdagangan internasional; 2) Geopolitik dan geoekonomi; 3) Disrupsi teknologi; 4) Tata kelola keuangan global; 5) Penduduk kelas menengah	1) Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat; 2) Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah; 3) Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata; 4) Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut; 5) Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi; 6) Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau; 7) Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas; 8) Tantangan yang masih harus dihadapi antara lain adalah rendahnya peran perkotaan di	1) Produktivitas dan Pengembangan Wilayah Kepulauan Masih Rendah; 2) Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Masih Rendah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan potensi lokal



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
				Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi.		
1) Sumber daya alam; 2) Sumber daya manusia	1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia; 2) Rendahnya daya saing daerah	1) Masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk	1) Penduduk kelas menengah; 2) Persaingan sumber daya manusia; 3) Geopolitik dan geoekonomi; 4) Demografi global; 5) Urbanisasi dunia	1) Kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial; 2) Kualitas pendidikan yang masih rendah; 3) Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.	1) Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Masih Rendah; 2) Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
1) Sumber daya alam; 2) Sumber daya manusia; 3) Pariwisata	1) Rendahnya daya saing infrastruktur daerah; 2) Sebaran penduduk belum merata	1) Masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk; 2) Menurunnya kualitas lingkungan hidup	1) Demografi global; 2) Urbanisasi dunia; 3) Penduduk kelas menengah; 4) Persaingan sumber daya manusia	1) Perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas; 2) Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas; 3) Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah; 4) Belum meratanya kualitas pelayanan publik	1) Produktivitas dan Pengembangan Wilayah Kepulauan Masih Rendah; 2) Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Masih Rendah	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas antar wilayah
1) Sumber daya alam; 2) Pariwisata; 3) Kualitas penduduk; 4) Modal sosial; 5) Modal budaya	1) Tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan; 2) Tingginya angka pengangguran dan kurangnya partisipasi angkatan	1) Masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk	1) Penduduk kelas menengah; 2) Persaingan sumber daya manusia; 3) Geopolitik dan geoekonomi; 4) Demografi global; 5)	1) Kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial; 2) Kualitas pendidikan yang masih rendah; 3)	1) Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Masih Rendah; 2) Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah	Penurunan Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
			Urbanisasi dunia	Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.		
1) Sumber daya aparatur	1) Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan; 2) Rendahnya kemandirian keuangan daerah;	1) Masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk; 2) Belum optimalnya upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	1) Tata kelola keuangan global; 2) Pemanfaatan luar angkasa	1) Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif; 2) Regulasi yang berlebihan (hyper regulation) dan kualitas regulasi yang rendah; 3) Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif; 4) Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif; 5) Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D; 6) Belum meratanya kualitas pelayanan publik; 7) Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar.	1) Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal.	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah secara masif, bersinergi, harmonis, berkelanjutan, dan berbasis digital
1) Sumber daya manusia; 2) Modal sosial; 3) Modal budaya.	1) Tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan; 2) Tingginya angka pengangguran dan kurangnya partisipasi angkatan; 3) Sebaran penduduk belum merata	1) Masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk;	1) Geopolitik dan geoekonomi; 2) Persaingan sumber daya manusia; 3) Penduduk kelas menengah	1) ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik; 2) Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN); 3) Kuantitas dan Kualitas SDM peneliti belum memadai	1) Kondisi Lingkungan Sosial Budaya Dan Ekologi Belum Aman Berkelanjutan Mendukung Transformasi Daerah.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Penghapusan Konflik Sosial
1) Sumber daya alam; 2) Pariwisata; 3) Sumber daya manusia	1) Tingginya risiko dan potensi bencana banjir; 2) Rendahnya kualitas lingkungan hidup	1) Belum optimalnya pengelolaan sampah dan air limbah; 2) Belum optimalnya	1) Perubahan iklim; 2) Persaingan sumber daya manusia; 3) Perdagangan internasional	1) Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan; 2) Pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum	1) Kondisi Lingkungan Sosial Budaya Dan Ekologi Belum Aman Berkelanjutan Mendukung	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
		upaya mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim; 3) Menurunnya kualitas lingkungan hidup		merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi; 3) Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau.	Transformasi Daerah	



RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bima Tahun 2025-2029

Bab 3

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH





Visi dan misi adalah gambaran keadaan atau yang ingin dicapai Kabupaten Bima selama kepemimpinan kepala daerah terpilih dalam pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2024. Selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disepakati. Visi dan misi akan menjadi pedoman dalam penetapan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan.

Sesuai dengan amanat pasal 263 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi, dan program kepala daerah yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan program perangkat daerah dan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Merujuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, bab III RPJMD tahun 2025-2029 adalah visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah. Bab ini berisikan dua subbab yaitu **pertama**, subbab visi, misi, tujuan, dan sasaran yang berisikan uraian terkait visi dan misi serta tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029. **Kedua** yaitu subbab strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah yang berisikan uraian terkait strategi dan arah kebijakan daerah serta program-program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029.

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

3.1.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah di dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan Kepala Daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban.

Visi pembangunan Kabupaten Bima untuk periode RPJMD 2025-2029 merupakan visi kepala daerah terpilih pasangan **Bupati Bima** dan **Wakil Bupati Bima**. Visi Kepala Daerah terpilih tersebut sebagai berikut

“Bima Bermartabat yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh dan Berkelanjutan”

Perumusan dan penjelasan lebih lanjut terhadap Visi dimaksud dijabarkan dalam pokok-pokok visi sebagai berikut:

1. **Bermartabat:** Makna “Bermartabat” memiliki arti bahwa Kabupaten Bima memiliki karakter dan kualitas sehingga dihargai, dihormati dan memiliki masyarakat Yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh dan Berkelanjutan.
2. **Berkemajuan:** Makna “Berkemajuan” memiliki arti bahwa Kabupaten Bima memiliki sumberdaya manusia yang berdaya saing, inovatif, adil, dan modern dengan berlandaskan pendidikan berkualitas tinggi. Kondisi Kabupaten Bima pada tahun



2029 diharapkan memiliki kualitas sumber daya manusia yang berada pada posisi lebih tinggi secara nasional dan memiliki kompetensi dan daya saing pada skala global dengan didukung kapasitas penguasaan teknologi, sehingga menjadi *role model* pembangunan untuk daerah lain. Kondisi maju ini diwujudkan dengan tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan dan budaya yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata;

3. **Makmur:** Makna "Makmur" adalah upaya untuk mewujudkan kondisi yang memperlihatkan masyarakat hidup dengan berkecukupan dan merata. Untuk mewujudkan kondisi makmur dan sejahtera, diperlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang berpihak pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sehingga perlu tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Hal ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, serta akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Selain itu, masyarakat sejahtera juga mencakup aspek-aspek seperti keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam masyarakat makmur dan sejahtera, tercipta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu, yang setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi pada kemajuan bersama.
4. **Tangguh:** Makna "Tangguh" adalah upaya Kabupaten Bima dalam mewujudkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta infrastruktur yang merata dan berkeadilan.
5. **Berkelanjutan:** Makna "Berkelanjutan" merupakan upaya Kabupaten Bima dalam meningkatkan pembangunan dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan. Hal ini meliputi peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam pembangunan berkelanjutan, tercipta lingkungan yang ramah, ekonomi yang inklusif, serta masyarakat yang sejahtera dan berbudaya. Kabupaten Bima bertekad menjadi sebuah wilayah yang mengutamakan keunggulan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam segala aspek kehidupan. Untuk mewujudkan kondisi berkelanjutan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang berpihak pada lingkungan. Sehingga perlu pembangunan berkelanjutan diterapkan.

3.1.2.2 Misi

Visi pembangunan Kabupaten Bima Tahun 2025-2029 tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) Misi pembangunan, yakni:

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil

Aparatur merupakan aktor utama dalam pembangunan maka aparatur pemerintah harus berkualitas dengan didukung oleh sistem tata kelola yang berkualitas sehingga berdampak terhadap pembangunan daerah. Prinsip tata kelola yang telah diakui mampu memberikan pengaruh positif adalah prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance* yaitu *participation*; *rule of law*; *transparency*; *responsiveness*; *consensus oriented*; *equity*; *effectiveness* dan *efficiency*; dan *accountability*.



2. Membangun Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan, Tangguh dan Berdaya Saing

Membangun manusia yang sehat dan cerdas menjadi modal utama dalam mewujudkan kemajuan Kabupaten Bima. Sumber daya manusia yang unggul, memiliki karakter, dan daya saing tinggi menjadi representasi dari potensi manusia di Kabupaten Bima yang sehat, cerdas, dan dididik sesuai dengan nilai-nilai keagamaan serta luhur kebudayaan setempat. Sukses dalam mencapai misi ini dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan perkembangan manusia di Kabupaten Bima. Dalam konteks ini, fokus misi melibatkan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dengan mengutamakan pembangunan manusia Kabupaten Bima menempatkan pendidikan sebagai salah satu fokus utama dalam upaya mencapai visi pembangunan yang lebih maju. Pendidikan yang berkarakter, sejalan dengan nilai-nilai agama dan kebudayaan lokal, menjadi fondasi yang kuat untuk mencetak generasi muda yang berdaya saing. Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi prioritas, memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Bima dapat menikmati kesejahteraan fisik dan mental yang optimal. Dengan demikian, fokus pada Indeks Pembangunan Manusia yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mencerminkan komitmen Kabupaten Bima untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan melalui pengembangan sumber daya manusianya.

3. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, energi, air melalui Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan

Sarana prasarana atau infrastruktur merupakan salah satu komponen penting untuk menunjang perekonomian maupun pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Bima. Sarana dan prasarana berkualitas dan adaptif adalah infrastruktur yang dirancang dan dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang, serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan yang muncul seiring waktu. Infrastruktur dalam kondisi mantap mengacu pada keadaan di mana fasilitas atau sarana publik yang termasuk dalam kategori infrastruktur berada dalam keadaan baik, terawat dengan baik, dan berfungsi sesuai dengan tujuannya. Namun dalam pemanfaatan infrastruktur, infrastruktur yang berkualitas dan adaptif juga memperhitungkan dampak lingkungan dari pembangunan dan operasinya. Pemerintah perlu memperhatikan daya dukung lingkungan yang ada serta fungsi ruang sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan penyalahgunaan pemanfaatan ruang agar pembangunan infrastruktur dapat mendorong aspek keberlanjutan. Adapun urusan yang menjadi fokus dalam misi ini yaitu pekerjaan umum dan penataan ruang; perhubungan; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Ekosistem Industri Komoditas Unggulan

Kemandirian Ekonomi merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri tanpa tergantung dengan pihak lain. Kemandirian ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Keberhasilan dalam mencapai misi ini dapat diukur melalui indikator-indikator seperti penurunan tingkat kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima. Fokus utama, yaitu Misi 4, mencakup sektor-sektor kunci seperti tenaga kerja; pariwisata; penanaman modal; koperasi, usaha kecil, dan menengah (UKM), perdagangan; perindustrian; pangan; pertanian; serta kelautan dan perikanan. Potensi ekonomi dan sumber daya lokal menjadi pusat perhatian dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Misi 4 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja melalui pengembangan keterampilan, memajukan sektor pariwisata untuk mengoptimalkan daya tarik wisata lokal, serta memberikan dorongan kepada penanaman modal dan perkembangan usaha kecil dan menengah. Pemerintah berupaya memanfaatkan potensi ekonomi lokal dengan peningkatan produksi daerah dan mendukung pertumbuhan UKM. Perdagangan, perindustrian, pertanian, serta sektor kelautan dan perikanan menjadi elemen-elemen penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Bima. Fokus pada peningkatan produksi dan nilai tambah pada produk lokal merupakan strategi untuk memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. Dengan demikian, melalui penekanan pada potensi ekonomi dan sumber daya lokal, misi ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

5. Membangun Kapasitas Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak, Aman, Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya

Untuk membangun kapasitas pemahaman dan pengamalan keagamaan untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak adalah sebuah langkah penting dalam membangun dasar pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif. Melalui misi ini, Kabupaten Bima berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang setiap individu diperlakukan dengan menghargai dan melindungi hak-hak dasarnya, sehingga dapat berkontribusi secara positif terhadap kemajuan dan keberlanjutan daerah. Fokus utama misi ini meliputi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kebudayaan, dan lingkungan hidup dengan upaya akan difokuskan pada aspek-aspek keagamaan, kebudayaan dan elemen-elemen pemerintahan umum, serta lingkungan hidup. Dalam konteks misi ini, Kabupaten Bima mengusung prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai fondasi utama untuk membangun masyarakat yang berakhlak. Langkah-langkah akan diarahkan pada memastikan bahwa setiap warga mendapat perlakuan yang adil dan setara di bawah hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak dasarnya. Melalui penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Kabupaten Bima berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan sejahtera bagi semua warganya. Fokus misi ini juga memperhatikan aspek sosial dan pemerintahan umum sebagai bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang aman, harmonis dan berakhlak. Dengan meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi dan keadilan, Kabupaten Bima berharap dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang inklusif serta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu,



dampak lingkungan seperti kebencanaan menjadi perlu perhatian khusus dengan upaya pengendalian dan penanggulangan bencana. Diperlukan pula kolaborasi antar pihak seperti pemerintah, masyarakat, organisasi lain, dan swasta dalam aspek adaptasi dan ketahanan bencana.

Keselarasan misi antara tingkat nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kabupaten Bima memiliki peran yang krusial dalam mencapai pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Pada tingkat nasional, misi pembangunan seringkali mencakup arah strategis dan visi bersama untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan adanya keselarasan ini, pemerintah pusat dapat memberikan panduan dan dukungan yang konsisten dalam menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di provinsi dan kabupaten.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tingkat *intermediate* antara nasional dan Kabupaten Bima memiliki peran penting dalam mengimplementasikan misi pembangunan nasional dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal. Keselarasan antara misi provinsi dengan nasional menciptakan sinergi yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan yang merata di seluruh NTB. Dengan mengintegrasikan prioritas pembangunan nasional ke dalam konteks regional, Provinsi NTB dapat memastikan bahwa setiap kabupaten, termasuk Kabupaten Bima, memiliki arah yang sejalan dengan misi nasional dan mendukung visi keseluruhan pembangunan regional.

Pentingnya keselarasan misi juga sangat terasa di tingkat Kabupaten Bima. Dengan memahami dan merangkum misi nasional dan Provinsi NTB, pemerintah kabupaten dapat merancang kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan visi nasional dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Keselarasan ini membuka peluang untuk pemanfaatan sumber daya secara optimal, menghindari tumpang tindih kebijakan, dan menciptakan ekosistem pembangunan yang terintegrasi di tingkat lokal, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bima. Berikut merupakan keselarasan antara misi dari RPJMN, RPJM Provinsi NTB, dan RPJMD Kabupaten Bima:

Tabel 3.1.
Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bima
dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

No	RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029	RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi NTB 2025-2029
VISI			
	Bima Bermartabat yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Nusa Tenggara Barat Bangkit Bersama Menuju Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia
MISI/ASTA CITA			
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil (MISI 1)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (ASTA CITA 7)	Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Fondasi Percepatan Pembangunan Daerah (MISI 7)



No	RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029	RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi NTB 2025-2029
2	Membangun Sumber Daya Manusia Bima Yang Berkemajuan, Tangguh dan berdaya saing (MISI 2)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender; serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas (ASTA CITA 4)	Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif (MISI 1)
3	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, energi, air melalui Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan (MISI 3)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi (ASTA CITA 3)	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah yang Berwawasan Lingkungan serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan (MISI 6)
4	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Ekosistem Industri Komoditas Unggulan (MISI 4)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air; Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru (ASTA CITA 2) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (ASTA CITA 5) Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan (ASTA CITA 6)	Memperkuat Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Per Kapita Masyarakat sebagai Fondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan (MISI 2) Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan Menuju Terwujudnya Industri Agromaritim yang Berkelanjutan (MISI 3) Membangun Sektor Pariwisata Berkualitas, Industri Kreatif serta Mengembangkan Seni Budaya Daerah dan Prestasi Olahraga (MISI 4)
5	Membangun Kapasitas Pemahaman Dan Pengamalan Keagamaan Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak, Aman, Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya (MISI 5)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) (ASTA CITA 1) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur (ASTA CITA 8)	Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan (MISI 5)



3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2025-2029 melalui misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran masing-masing misi dirumuskan sebagai berikut:

Misi 1: mewujudkan reformasi birokrasi yang berorientasi hasil, dengan **tujuan** yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, serta berdaya saing untuk mencapai pelayanan publik prima. Tujuan tersebut memiliki 3 (tiga) **sasaran**, yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Meningkatnya profesionalitas dan integritas ASN
3. Meningkatnya pelayanan publik yang prima

Misi 2: membangun sumber daya manusia bima yang berkemajuan, tangguh dan berdaya saing, dengan **tujuan** yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Tujuan tersebut memiliki 5 (lima) **sasaran**, yaitu:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata
3. Meningkatnya literasi masyarakat
4. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta kualitas keluarga
5. Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif

Misi 3: memantapkan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, energi, air melalui penegakan tata ruang yang berkelanjutan, dengan **tujuan** yaitu meningkatnya Infrastruktur yang merata dan berkeadilan. Tujuan tersebut memiliki 1 (satu) **sasaran**, yaitu:

1. Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur wilayah

Misi 4: mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, daya saing dan ekosistem industri komoditas unggulan, dengan **tujuan** yaitu terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif. Tujuan tersebut memiliki 13 (tiga belas) **sasaran**, yaitu:

1. Meningkatkan peran sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan
2. Meningkatnya peran industri pengolahan pada perekonomian daerah
3. Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian
4. Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi pada perekonomian daerah
5. Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
6. Meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan merata
7. Terkendalinya inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif
8. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
9. Meningkatnya nilai investasi daerah
10. Meningkatnya kesempatan kerja
11. Terwujudnya ketahanan pangan
12. Meningkatnya kemandirian desa
13. Meningkatnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah



Misi 5: membangun kapasitas pemahaman dan pengamalan keagamaan untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak, aman, harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, dengan 2 (dua) tujuan. **Tujuan pertama** yaitu terwujudnya masyarakat yang harmonis. Tujuan pertama ini memiliki 2 (dua) sasaran, yaitu (1) Terwujudnya kemaslahatan beragama dan pemajuan kebudayaan; dan (2) Terwujudnya keamanan daerah. **Tujuan kedua** yaitu terwujudnya lingkungan hidup berkualitas. Tujuan kedua ini memiliki 2 (dua) sasaran, yaitu (1) Meningkatkan kualitas Air, udara, dan lahan; dan (2) Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Perumusan tujuan dan sasaran tersebut dilakukan melalui pendekatan kerangka logis. Pendekatan ini akan memberikan uraian terkait keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran beserta indikator tujuan dan sasaran. Hal ini penting untuk memberikan gambaran keselarasan mulai dari visi sampai sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2025-2029.



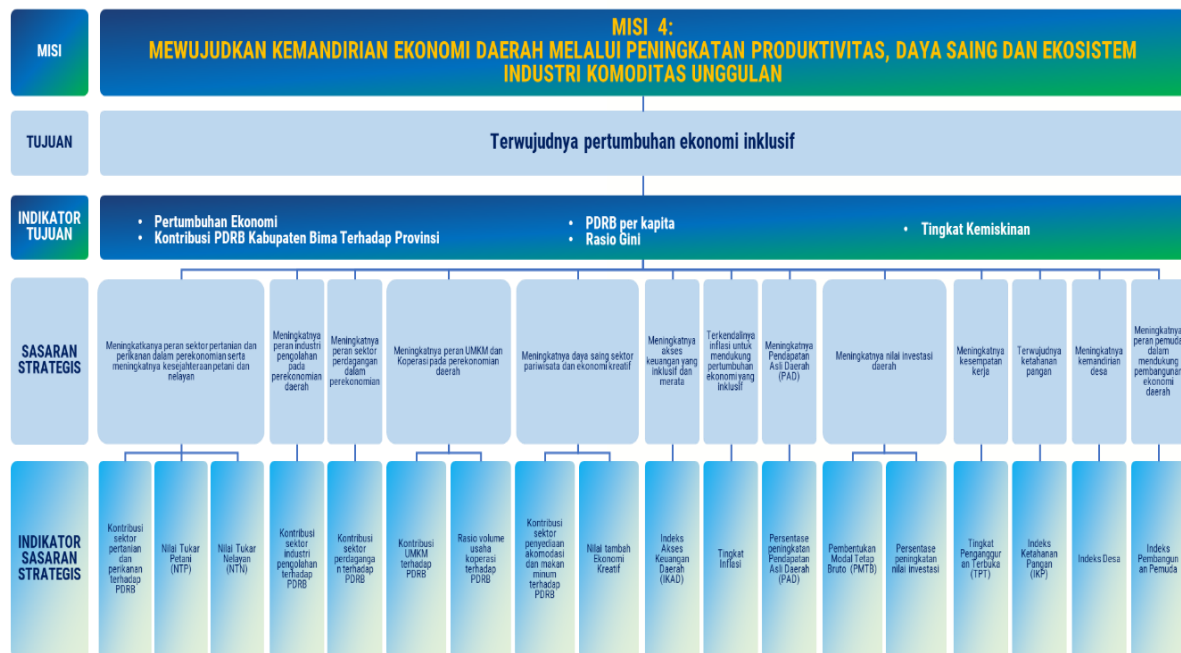
Gambar 3.1.
Kerangka Logis Sasaran dan Tujuan pada Misi 1



Gambar 3.2.
Kerangka Logis Sasaran dan Tujuan pada Misi 2



Gambar 3.3.
Kerangka Logis Sasaran dan Tujuan pada Misi 3



Gambar 3.4.
Kerangka Logis Sasaran dan Tujuan pada Misi 4



Gambar 3.5.
Kerangka Logis Sasaran dan Tujuan pada Misi 5

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan memiliki ukuran keberhasilan yang terdapat pada indikator tujuan dan indikator sasaran. Masing-masing indikator tersebut dilengkapi target setiap tahun yaitu mulai tahun 2025 s.d 2029. Target ini akan menjadi ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.



Tabel 3.2.
Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran, serta Target Kinerja

VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030
V1	Bima Bermartabat yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh dan Berkelanjutan	M1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil	T1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, serta berdaya saing untuk mencapai pelayanan publik prima			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		70	70	89	89	89	89	90
						S1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai/ Predikat		63,10	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
								Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks		76,57 (2023)	78,00	79,00	81,00	82,00	83,00	85,00
						S2	Meningkatnya profesionalitas dan integritas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	Indeks		75,98	76,50	77,25	78,45	79,30	80,50	81,07
						S3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks		3,62	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00
		M2	Membangun Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan, Tangguh dan Berdaya Saing	T2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia			Indeks Pembangunan Manusia	Indeks		70,99	71,00	73,38	75,75	78,13	80,50	81,25
						S4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun		71,88	72,25	73,75	75,25	76,75	78,25	79,75
								Prevalensi Stunting	%		23,80	17,33	15,69	14,05	12,41	10,77	9,13
						S5	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun		8,30	8,56	8,70	8,84	8,98	9,12	9,22
								Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun		13,66	14,12	14,19	14,26	14,32	14,39	14,46
								Persentase Peserta Didik Kabupaten Bima yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:									
								a) Literasi Membaca	%		52,32	53,96	55,60	57,24	58,88	60,52	62,16
								b) Numerasi	%		29,97	31,74	33,51	35,28	37,05	38,82	40,59
						S6	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks		29,46	32,50	33,01	35,69	37,51	38,88	45,24





VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN									
											2025	2026	2027	2028	2029	2030				
								Indeks Masyarakat Digital Daerah (IMDI)	Indeks	42,54	43,11	45,73	48,35	50,96	53,58	55,68				
						S7	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta kualitas keluarga	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,479	0,439	0,414	0,389	0,364	0,339	0,319				
								Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	44.46 (2022)	55,00	61,00	65,00	71,00	75,00	81,00				
								Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	60,70	62,23	63,77	65,3	66,84	68,37	70,52				
								S8	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	Indeks	55,73	56,73	57,23	57,73	58,23	58,73	59,23		
						M3	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, energi, air melalui penegakan tata ruang yang berkelanjutan	T3	Meningkatnya Infrastruktur yang merata dan berkeadilan			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	NA	2,49	2,69	2,89	3,09	3,29	3,49
										S9	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur wilayah	Rasio Konektivitas	Nilai	NA	0,49	0,51	0,53	0,56	0,58	0,61
												Tingkat Kemantapan Jalan	%	53,11	54,71	56,11	57,41	59,01	60,51	61,91
												Rasio Permukiman Layak Huni	Nilai	0,732	0,735	0,741	0,748	0,755	0,764	0,773
	M4	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Ekosistem Industri Komoditas Unggulan	T4	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif			Pertumbuhan Ekonomi	%	2,82	5,63	5,67	5,72	5,76	5,81	6,48					
							Kontribusi PDRB Kabupaten Bima Terhadap Provinsi	%	8,10	9,47	9,72	9,97	10,21	10,46	10,66					
							PDRB per kapita	Rp Juta	27,15	32,75	42,64	52,54	62,43	72,32	80,24					
							Rasio Gini	Nilai	0,358	0,344	0,337	0,329	0,322	0,314	0,308					
							Tingkat Kemiskinan	%	13,88	12,18	11,39	10,60	9,81	9,02	8,66					
					S10	Meningkatnya peran sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	%	45,16	40,00	39,00	38,00	37,00	36,00	35,00					
							Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	117,00	117,00	117,00	118,00	119,00	119,00	119,00					
							Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	119,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00					





VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
						S11	Meningkatnya peran industri pengolahan pada perekonomian daerah	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	2,76	3,06	3,49	3,91	4,32	4,73	5,06
						S12	Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	0,09	7,54	8,01	8,84	8,94	9,41	9,78
						S13	Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi pada perekonomian daerah	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	0,14	0,57	0,72	0,87	1,02	1,18	1,30
								Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,14	0,57	0,72	0,87	1,02	1,18	1,30
						S14	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	%	0,38	0,45	0,48	0,52	0,55	0,58	0,61
								Nilai tambah Ekonomi Kreatif	Rp Milyar	420,982	511,90	845.476	1.179,057	1.512,638	1.846,219	2.113,084
						S15	Meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan merata	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,85	3,90	3,93	3,96	3,98	4,01	4,02
						S16	Terkendalnya inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Tingkat Inflasi	%	2,30	2,80	2,68	2,57	2,45	2,33	2,23
						S17	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	8,13	9,10	9,74	9,77	9,91	9,96	10,03
						S18	Meningkatnya nilai investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	% PDRB	37,95	38,02	38,07	38,13	38,18	38,23	38,27
								Persentase peningkatan nilai investasi	%	49,87	55,50	60,50	70,50	80,50	80,50	90,50
						S19	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,15	2,04	2,02	2,00	1,97	1,95	1,93
						S20	Terwujudnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	78,26	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	85,00





VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
						S21	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa	Indeks	63,56	66,56	71,56	76,56	81,56	86,56	91,56
						S22	Meningkatnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	53,67	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	60,00
								Indeks Harmoni	Indeks	NA	5,50	5,50	5,50	6,50	6,50	7,00
		M5	Membangun Kapasitas Pemahaman Dan Pengamalan Keagamaan Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak, Aman, Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya	T5	Terwujudnya masyarakat yang Harmonis	S23	Terwujudnya kemaslahatan beragama dan pemajuan kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	76,47	84,00	84,25	84,5	84,75	85,00	85,25
								Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
						S24	Terwujudnya keamanan daerah	Indeks Kriminalitas	Indeks	75,43 (2023)	75,00	73,00	70,00	65,00	60,00	50,00
								Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	69,73	74,68	74,89	75,11	75,32	75,53	75,74
						T6	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	S25	Meningkatnya kualitas Air, udara, dan lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	47,78	75,34	75,54	75,70	75,94
				Indeks Kualitas Udara	Indeks					93,69	95,10	95,40	95,70	96,00	96,30	96,45
				Indeks Kualitas Lahan	Indeks					63,11	72,78	72,86	73,93	72,99	73,06	73,18
				S26	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim			Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	135,17	132,86	130,56	128,25	125,95	123,64	121,34
								Persentase Penurunan Emisi GRK:								
						(a) Kumulatif	%	NA	2,15	2,51	2,86	3,22	3,57	3,86		
						(b) Tahunan	%	NA	19,83	23,33	26,83	30,32	33,82	36,62		





3.1.3 Keselarasan Sasaran Utama Pembangunan Kabupaten Bima dengan Provinsi NTB Tahun 2025–2029

Keselaran pembangunan antara Kabupaten Bima dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan langkah strategis untuk memastikan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah. Melalui penyelarasan indikator makro, target pembangunan daerah dapat bergerak harmonis dengan arah kebijakan provinsi, sehingga kontribusi Kabupaten Bima terhadap pencapaian indikator regional dapat terukur, terpadu, dan selaras dalam satu kerangka pembangunan nasional–provinsi–kabupaten. Dokumen ini menggambarkan hubungan antara sasaran utama RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029 dengan RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025–2029 melalui perbandingan indikator, *baseline* 2025, serta target pencapaian hingga tahun 2029. Keselarasan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Bima tidak berjalan sendiri, tetapi memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB secara keseluruhan.

Secara umum, terdapat beberapa poin strategis keselarasan:

1. Kabupaten Bima menetapkan target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2029 sebesar 5,63–6,05%, selaras dengan target Provinsi NTB 9,3%. Meskipun skala kontribusinya berbeda, Kabupaten Bima mengambil peran melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan perdagangan sebagai sektor dominan di wilayahnya.
2. Target PDRB per Kapita Kabupaten Bima meningkat signifikan dari *baseline* 32,75 juta menjadi 72,32 juta di tahun 2029, selaras dengan target provinsi 53,9 juta. Hal ini menunjukkan upaya percepatan peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat kabupaten.
3. Kabupaten Bima menargetkan kontribusi PDRB sebesar 10,46%, menguat dari *baseline* 9,47%, sebagai bagian dari upaya memperbesar peran ekonomi daerah dalam struktur ekonomi NTB.
4. Target penurunan kemiskinan Kabupaten Bima menuju 9,02–8,92% selaras dengan target provinsi 8,12–9,12%. Upaya ini diperkuat dengan target penurunan Rasio Gini menuju 0,314, mempertegas komitmen daerah dalam mengurangi kesenjangan.
5. Kabupaten Bima memperkuat pembangunan manusia dengan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 80,5, mendukung target provinsi 0,60 pada Indeks Modal Manusia (IMH). Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi fokus utama.
6. Kabupaten Bima menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi 33,82%, mendukung target provinsi 41,91%. Sementara itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah ditargetkan naik dari 70,59 menjadi 71,01, sebagai komitmen menjaga kelestarian sumber daya alam.
7. Kabupaten Bima menargetkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 2,04–1,99% menjadi 1,95–1,90%, mendukung target provinsi 1,81–2,59%, sekaligus menguatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Melalui keselarasan indikator-indikator tersebut, RPJMD Kabupaten Bima memastikan bahwa arah pembangunan daerah sejalan dengan prioritas Provinsi NTB dan kebijakan nasional. Penyelarasan ini menjadi dasar penting dalam integrasi program, sinkronisasi anggaran, dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan



masyarakat Bima yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera dalam kerangka pembangunan NTB 2025–2029.

Tabel 3.3.
Keselarasn Sasaran Utama Pembangunan Kabupaten Bima dengan Provinsi NTB

No	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029		
	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	6,00	9,3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,63-6,05	5,63-6,05
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	35,8	53,9	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	32,75	72,32
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,83	0,9	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	9,47	10,46
4	Tingkat Kemiskinan (%)	11,68-12,18	8,12-9,12	Tingkat Kemiskinan (%)	12,18 - 12,08	9,02 - 8,92
5	Rasio Gini	0,369 - 0,373	0,324 - 0,328	Rasio Gini	0,344	0,314
6	Indeks Modal Manusia	0,56	0,60	Indeks Pembangunan Manusia	71	80,5
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	15,31	41,91	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	19,83	33,82
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,13	77,03	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70,59	71,01
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,19-2,79	1,81-2,59	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.04-1.99	1.95-1.90

3.1.4 Manajemen Risiko Pencapaian Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029

Manajemen risiko pembangunan daerah merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis RPJMD. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi ketidakpastian, sehingga keputusan yang diambil lebih akuntabel, terukur, dan adaptif. Manajemen risiko yang disusun untuk memastikan pengendalian pembangunan daerah berlangsung secara terarah, konsisten, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis. Penerapan manajemen risiko dalam RPJMD bertujuan untuk: (1) Menjamin pencapaian sasaran strategis secara akuntabel dan terukur melalui identifikasi risiko dan mitigasi yang terintegrasi dalam perencanaan; (2) Mengurangi ketidakpastian pelaksanaan pembangunan, terutama yang berasal dari perubahan lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan alam; (3) Meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya dengan mengarahkan intervensi pada area prioritas yang memiliki tingkat risiko tinggi; (4) Menyediakan dasar pengambilan keputusan berbasis risiko guna memperkuat akuntabilitas dan kualitas kebijakan; dan (5) Membangun budaya sadar risiko di perangkat daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap potensi gangguan pembangunan.

Dalam rangka memudahkan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko pada sasaran strategis RPJMD, digunakan parameter penilaian risiko sebagai berikut:

1. Risiko Utama

Ancaman atau kondisi yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis RPJMD, baik yang berasal dari faktor internal organisasi pemerintah daerah maupun



faktor eksternal seperti lingkungan ekonomi, sosial, politik, infrastruktur, dan perubahan iklim.

2. Probabilitas (P)

Menggambarkan tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko, dengan kategori:

- **Rendah (1):** kecil kemungkinan terjadi
- **Sedang (2):** kemungkinan terjadi cukup moderat
- **Tinggi (3):** sangat mungkin terjadi

3. Dampak (D)

Menggambarkan tingkat pengaruh yang ditimbulkan apabila risiko terjadi, dengan kategori:

- **Rendah (1):** dampak minimal, tidak mempengaruhi pencapaian sasaran secara signifikan
- **Sedang (2):** berdampak cukup signifikan, memerlukan tindakan korektif
- **Tinggi (3):** dampak strategis, menghambat pencapaian sasaran secara serius

4. Level Risiko

Merupakan hasil perkalian antara **Probabilitas × Dampak**, dengan kriteria:

- **1–2:** Risiko Rendah
- **3–4:** Risiko Sedang
- **6–9:** Risiko Tinggi

Level risiko ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan risiko pada RPJMD.

5. Mitigasi Risiko

Merupakan langkah pencegahan, pengurangan, pengendalian, atau penanganan risiko untuk menurunkan kemungkinan maupun dampaknya

Manajemen risiko pencapaian sasaran strategis RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029 ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.4.
Manajemen Risiko Pencapaian Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029

Kode Sasaran Strategis	Risiko Utama	Penyebab	Dampak	P	D	Level	Mitigasi
S1	Kualitas perencanaan & pelaporan kinerja rendah	SDM perencanaan terbatas, aplikasi tidak optimal	Nilai SAKIP turun	4	4	Tinggi	Penguatan SDM, integrasi aplikasi, asistensi SAKIP
S2	Rekrutmen & penempatan ASN tidak berbasis merit	Merit system lemah	Profesionalitas & integritas ASN menurun	3	5	Tinggi	Assesment center, pengawasan etik, penegakan disiplin
S3	Kualitas layanan publik tidak standar	SOP tidak update, minimnya sarana prasana	Kepuasan publik menurun	3	4	Sedang	Reform SOP, digitalisasi layanan, survei kepuasan
S4	Akses & kualitas layanan kesehatan rendah	Sarpras & tenaga kurang	Stunting, AKI/AKB naik	4	5	Tinggi	Penguatan puskesmas, pemenuhan nakes, promotif-preventif



Kode Sasaran Strategis	Risiko Utama	Penyebab	Dampak	P	D	Level	Mitigasi
S5	Ketimpangan mutu & akses pendidikan	Sarpras kurang, distribusi guru tidak merata	Capaian pendidikan menurun	3	4	Sedang	Redistribusi guru, revitalisasi sekolah, beasiswa
S6	Rendahnya minat & budaya literasi	Akses perpustakaan terbatas	Literasi masyarakat stagnan	3	3	Sedang	Transformasi perpustakaan inklusif
S7	Kasus kekerasan perempuan & anak tinggi	Pelaporan rendah, budaya patriarki	Penurunan IPG & IKG	3	4	Sedang	Penguatan UPTD PPA, layanan psikososial
S8	Bantuan sosial tidak tepat sasaran	Minimnya pengawasan penyaluran di tingkat desa/kelurahan.	Bansos salah sasaran	3	3	Tinggi	Audit rutin penyaluran bantuan dan spot check lapangan, serta pengawasan berjenjang melalui Satgas pengendalian bansos.
S9	Pembangunan infrastruktur tidak tercapai	Anggaran terbatas	Konektivitas wilayah terhambat	4	4	Tinggi	Skema KPBU, DAK, prioritas infrastruktur dasar
S10	Fluktuasi harga & gagal panen	Cuaca ekstrem	Pendapatan petani/nelayan turun	4	5	Tinggi	Modernisasi pertanian, dan diversifikasi
S11	Pertumbuhan industri pengolahan lambat	Logistik & energi mahal	Serapan tenaga kerja turun	3	4	Sedang	Kawasan industri, insentif investasi
S12	Aktivitas perdagangan menurun	Inflasi, gangguan distribusi	Daya beli melambat	3	4	Sedang	Stabilisasi harga, revitalisasi pasar rakyat
S13	UMKM sulit akses modal & pasar	Literasi digital rendah	UMKM stagnan	4	4	Tinggi	KUR, pelatihan digital, inkubator UMKM
S14	Daya saing pariwisata rendah	Sarpras destinasi lemah	Kunjungan wisata rendah	3	4	Sedang	Perbaikan akses, event pariwisata, CHSE
S15	Literasi keuangan rendah	Edukasi kurang	Rentan pinjaman ilegal	4	4	Tinggi	Edukasi keuangan, perluasan layanan agen bank
S16	Inflasi volatile	Cuaca & distribusi pangan terganggu	Inflasi meningkat	4	4	Tinggi	TPID aktif, operasi pasar, stabilisasi pasokan
S17	PAD tidak mencapai target	Kepatuhan pajak dan retribusi rendah	Ruang fiskal tertekan	4	5	Tinggi	Digitalisasi pajak, intensifikasi & ekstensifikasi
S18	Investasi tidak masuk	Perizinan lambat, layanan belum terintegrasi	Penurunan realisasi investasi	3	5	Tinggi	Fast-track perizinan, OSS,



Kode Sasaran Strategis	Risiko Utama	Penyebab	Dampak	P	D	Level	Mitigasi
							promosi investasi
S19	Pengangguran meningkat	Mismatch skill	Kesempatan kerja rendah	4	4	Tinggi	BLK modern, pelatihan vokasi, link & match
S20	Kerawanan pangan meningkat	Krisis pasokan, lahan menurun	Ketahanan pangan terganggu	4	5	Tinggi	Cadangan pangan daerah, peningkatan produksi
S21	Desa tidak mandiri	Kapasitas aparat desa rendah	Kemandirian desa lambat	3	4	Sedang	Pendampingan desa, SID, pelatihan perangkat
S22	Partisipasi pemuda rendah	Minimnya program kewirausahaan	Peran pemuda dalam ekonomi lemah	3	3	Sedang	Inkubator pemuda, pelatihan digital & wirausaha
S23	Konflik sosial keagamaan & budaya	Intoleransi, komunikasi lemah	Ketidakharmonisan sosial	3	4	Sedang	FKUB, dialog sosial, pelestarian budaya
S24	Keamanan wilayah tidak stabil	Kriminalitas meningkat	Rasa aman masyarakat turun	3	4	Sedang	CCTV daerah, patroli terpadu, FKPM
S25	Penurunan kualitas air, udara, lahan	Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang lemah, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap perilaku ramah lingkungan rendah	Kesehatan & lingkungan terancam	4	4	Tinggi	Penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan; Edukasi publik dan kampanye perubahan perilaku
S26	Bencana & dampak perubahan iklim meningkat	Perubahan iklim dan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat rendah.	Kerugian ekonomi & korban jiwa	5	5	Tinggi	Peringatan dini, mitigasi kebencanaan

Manajemen risiko pencapaian sasaran strategis RPJMD Kabupaten Bima merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah berjalan secara terukur, terencana, dan mampu beradaptasi terhadap berbagai ketidakpastian. Dengan mengidentifikasi risiko utama, menganalisis tingkat probabilitas dan dampaknya, serta merumuskan langkah mitigasi yang realistis dan terukur, Pemerintah Kabupaten Bima memiliki fondasi yang lebih kuat dalam mengamankan pencapaian target pembangunan tahun 2025–2029.

Penerapan manajemen risiko ini tidak hanya menjadi alat kendali, tetapi juga mendorong terciptanya budaya kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah. Implementasi yang konsisten, pengawasan berkelanjutan, serta koordinasi lintas sektor yang solid menjadi kunci agar seluruh program dan kegiatan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.



Dengan komitmen bersama, dukungan data yang berkualitas, serta kapasitas kelembagaan yang memadai, Pemerintah Kabupaten Bima diharapkan mampu mengelola tantangan pembangunan secara proaktif dan responsif. Pada akhirnya, manajemen risiko ini menjadi landasan strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bima.

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan bagian penting dari kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Perumusan strategis dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi dalam rangka perbaikan kinerja perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi, misi RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pemikiran-pemikiran konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sementara visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah merupakan gambaran harapan dan keinginan kehidupan masyarakat di masa yang akan datang yang lebih baik dari saat sekarang. Harapan dan keinginan dapat dicapai apabila visi dan misi tersebut lebih realistis sesuai dengan kondisi dan situasi daerah yang sudah dan sedang terjadi serta kecenderungan ataupun kemungkinan perkembangan di masa depan.

3.2.1.1. Strategi

Strategi umum merupakan langkah dan kebijakan Kabupaten Bima dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan. Sesuai hal tersebut perlu dilakukan analisis terhadap kondisi obyektif eksternal dan internal yang mempengaruhi periode pelaksanaan RPJMD. Sesuai hasil analisis SWOT dalam penentuan alternatif strategi maka dapat diperoleh rumusan 27 (dua puluh tujuh) strategi pembangunan Kabupaten Bima yang akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan sinergi antara sistem perencanaan-penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Penguatan kompetensi serta integritas dan kode etik ASN secara berkelanjutan
3. Digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan *service quality management*
4. Pemenuhan, pemerataan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan
5. Pemenuhan, pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan
6. Pembangunan ekosistem digital dan taman literasi
7. Penguatan pemberdayaan perempuan dan keluarga serta perlindungan anak
8. Peningkatan cakupan dan kualitas perlindungan sosial
9. Pelaksanaan pembangunan daerah yang tertata, berkelanjutan dan sesuai fungsi ruang
10. Peningkatan kualitas tata kelola dan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan



11. Peningkatan produksi, dan produktivitas, serta diversifikasi pengolahan hasil dan perluasan pemasaran
12. Penguatan ekosistem perindustrian untuk mendorong hilirisasi dan nilai tambah
13. Penguatan ekosistem perdagangan dalam dan luar negeri
14. Penguatan kapasitas UMKM dan Koperasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi
15. Pengembangan destinasi dan produk unggulan, penguatan SDM serta pemasaran dan branding yang kuat
16. Peningkatan literasi dan edukasi keuangan serta jangkauan layanan
17. Penguatan pengendalian inflasi daerah.
18. Peningkatan PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan perbaikan manajemen
19. Penguatan iklim investasi yang menarik berbasis kearifan lokal
20. Peningkatan kualitas calon tenaga kerja dan perluasan informasi pasar kerja
21. Penguatan dimensi produksi, distribusi, konsumsi, dan cadangan pangan secara holistik, terintegrasi antarsektor dan berkelanjutan
22. Penguatan pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan potensi lokal dan penguatan kelembagaan desa
23. Peningkatan animo dan kapasitas kewirausahaan pemuda
24. Penguatan moderasi beragama dan toleransi serta penguatan budaya sebagai kekuatan sosial dan ekonomi
25. Penguatan aspek preventif, deteksi, responsifitas dan partisipatif melalui kolaborasi multipihak
26. Penguatan tata kelola lingkungan hidup yang baik
27. Peningkatan ketangguhan Daerah dan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim

Berdasarkan rumusan strategi pencapaian masing-masing sasaran perlu penetapan penahapan tema pembangunan sebagai prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Hal ini untuk memberikan arah pembangunan dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah pada akhir periode perencanaan.

Tabel 3.5.
Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan Kemandirian Perekonomian Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan sebagai Fondasi Penguatan Pembangunan Manusia Bima dan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Manusia dan Infrastruktur Dasar menuju Masyarakat Bima yang Sejahtera, Aman, dan Harmonis.	Pemantapan Daya Saing Manusia Bima yang Sejahtera, Unggul dan Berkarakter selaras dengan Nilai Budaya dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	Perwujudan Bima Bermartabat Yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh dan Berkelanjutan



Tahap I (2026)

Tahap awal berfokus pada memperbaiki sistem dan kinerja pemerintahan. Tahapan ini merupakan fondasi dari seluruh proses pembangunan. Tata kelola pemerintahan yang baik meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Tanpa tata kelola pemerintahan yang baik, upaya untuk mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan akan mengalami banyak hambatan.

Fokus utama pada tahapan ini adalah penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi seiring dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, digitalisasi layanan publik serta peningkatan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Dengan demikian, dapat terbentuk dan memperkuat pemerintahan yang melayani, bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil, yang akan mendukung iklim usaha yang sehat dan inklusif bagi masyarakat.

Penciptaan ekosistem ekonomi lokal yang kondusif untuk pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat semakin diperkuat, melalui penyusunan kebijakan pro-rakyat, kolaborasi lintas sektor, pengembangan kewirausahaan lokal, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas: pemanfaatan teknologi dan inovasi serta penguatan jejaring pasar dan distribusi. Evaluasi secara komprehensif menjadi suatu keniscayaan untuk memastikan usaha yang dirintis masyarakat tetap berjalan, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja. Hal tersebut sangat penting untuk membentuk masyarakat yang produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi yang dapat menggerakkan roda ekonomi secara mandiri dengan kemampuan yang tinggi untuk mengelola potensi lokal secara berkelanjutan.

Tahap II (2027)

Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kuat sebagai prasyarat utama. Dalam konteks Kabupaten Bima, dengan tantangan geografis, sosial, dan ekonomi cukup kompleks, pemantapan tata kelola pemerintahan bukan sekadar reformasi birokrasi, tetapi merupakan landasan strategis untuk mencapai kualitas hidup manusia yang lebih baik dan memastikan infrastruktur dasar terdistribusi secara adil.

Kabupaten Bima menghadapi sejumlah isu krusial dalam pembangunan manusia, yaitu tingkat pendidikan yang masih relatif rendah di beberapa kecamatan karena akses dan kualitas layanan pendidikan belum merata; masih relatif tingginya angka kemiskinan dan *stunting* yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia jangka panjang; serta keterbatasan layanan kesehatan dan fasilitas sosial di wilayah-wilayah terpencil.

Oleh karenanya, keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang semakin mantap mutlak diperlukan sehingga manajemen pendidikan semakin terpadu dan transparan dengan distribusi dan peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan, serta program beasiswa yang semakin komprehensif berbasis data dengan diiringi pemantauan kinerja satuan pendidikan secara digital dan partisipatif yang mendorong akuntabilitas. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik akan dapat memperkuat layanan kesehatan karena tata kelola memegang peran dalam pengadaan obat, pemerataan tenaga medis, dan peningkatan pelayanan Puskesmas, serta sistem pemantauan dan evaluasi berbasis elektronik memperkuat transparansi dan efektivitas intervensi. Demikian pula, tata kelola yang baik dapat memperkuat integrasi data agar program perlindungan dan intervensi sosial dapat tepat sasaran.



Realitas di Kabupaten Bima menunjukkan ketimpangan akses dan kualitas infrastruktur dasar, misalnya banyak desa belum memiliki akses jalan yang memadai, khususnya di daerah perbukitan dan pulau kecil, distribusi air bersih dan sanitasi belum optimal, serta akses terhadap listrik, internet, dan transportasi umum yang belum merata. Oleh karenanya, tata kelola yang baik menuntut agar perencanaan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat dengan prioritas pembangunan difokuskan pada wilayah dengan keterisolasian relatif tinggi. Tata kelola yang efektif memastikan tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga perawatan berkala dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur.

Tahap III (2028)

Kabupaten Bima sebagai bagian dari wilayah strategis di Nusa Tenggara Barat memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan budaya. Namun, potensi ini belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal karena masih adanya tantangan dalam aspek pembangunan manusia dan ketersediaan infrastruktur dasar. Dalam konteks inilah, akselerasi pembangunan manusia dan infrastruktur dasar menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan masyarakat Bima yang sejahtera, aman, dan harmonis. Pembangunan harus semakin terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pembangunan manusia menempati posisi sentral dalam kerangka pembangunan daerah. Ini mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang semuanya harus ditingkatkan secara cepat, merata, dan berkelanjutan. Pemantapan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif, merata dan bermutu serta perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi bagi masyarakat miskin ekstrem dan kelompok rentan mutlak terus dilakukan.

Akselerasi pembangunan infrastruktur dasar harus dapat meningkatkan akses dan daya dukung kehidupan. Pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi antarwilayah meningkatkan konektivitas antar-desa, antar-kecamatan, serta akses ke pusat ekonomi. Akselerasi akses terhadap listrik, air bersih dan sanitasi layak diperkuat melalui ekspansi jaringan listrik PLN dan pemanfaatan energi terbarukan (tenaga surya, mikrohidro), serta revitalisasi sistem air bersih dan sanitasi terpadu. Optimalisasi dana desa dan *Corporate Social Responsibility* perusahaan untuk program pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi maka pemantapan terhadap infrastruktur digital guna memperluas akses internet yang menjadi prasyarat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, ekonomi digital, dan pelayanan publik. Literasi digital harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur TIK.

Akselerasi pembangunan manusia dan infrastruktur sejatinya merupakan sebuah proses transformasi sosial. Pendekatan pembangunan yang terencana, terintegrasi, dan terarah untuk memastikan setiap individu dapat menikmati haknya sebagai warga negara: hidup layak, sehat, aman, dan sejahtera. Bima yang sejahtera, aman, dan harmonis hanya bisa terwujud melalui kerja kolektif, pemerintahan yang tanggap, dan masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

Tahap IV (2029)

Di tengah arus globalisasi, disrupsi teknologi, perubahan iklim, serta dinamika sosial yang terus berkembang, daya saing sumber daya manusia menjadi kunci utama untuk bertahan, tumbuh, dan bersaing. Kabupaten Bima, dengan kekayaan budaya, sejarah, dan



sumber daya alamnya, memiliki modal sosial dan ekologis yang kuat, namun perlu pemantapan daya saing sumber daya manusia agar mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berkarakter. Pemantapan ini tidak hanya bertumpu pada aspek pendidikan formal atau ekonomi semata, tetapi juga harus memperkuat nilai-nilai budaya lokal dan menjaga keseimbangan ekologis, karena daya saing yang tidak selaras dengan budaya dan keberlanjutan akan rentan dan tidak berjangka panjang.

Karakter merupakan elemen tak terpisahkan dalam pembangunan manusia. Kualitas kepribadian menentukan bagaimana seseorang menggunakan ilmunya dan menyumbang untuk kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, mutlak dilakukan pendidikan berbasis nilai-nilai lokal melalui integrasi nilai budaya lokal dalam kurikulum pendidikan dan kegiatan sosial, pelestarian bahasa daerah, sastra lisan, tarian, dan kesenian lokal sebagai medium pendidikan karakter, serta revitalisasi peran tokoh adat dan agama sebagai penjaga moral dan pembimbing generasi muda. Daya saing manusia Kabupaten Bima tidak boleh tercerabut dari akar budayanya. Pembangunan sumber daya manusia yang melupakan budaya lokal akan kehilangan arah moral dan daya kohesi sosial.

Pelestarian warisan budaya sebagai basis identitas dan modal sosial. Festival budaya tahunan untuk menjaga semangat kebhinekaan lokal dan mengenalkan budaya Bima ke dunia luar. Nilai gotong royong, musyawarah, dan penghargaan terhadap leluhur diperkuat sebagai landasan pembangunan komunitas. Nilai budaya juga mewujudkan sebagai pendekatan penyelesaian konflik sosial, mencegah kekerasan, dan menjaga keharmonisan masyarakat multikultur.

Daya saing manusia yang sejati harus berorientasi jangka panjang, dan tidak akan bermakna tanpa lingkungan yang sehat dan lestari. Pendidikan dan peningkatan kesadaran lingkungan perlu dilakukan dengan integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah dan pelatihan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kolektif guna menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kabupaten Bima sebagai daerah yang rentan terhadap bencana alam menghadapi dampak serius dari perubahan iklim, yang tidak hanya mengganggu lingkungan hidup tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan ketahanan pangan masyarakat. Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sudah dirasakan saat ini.

Penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah langkah strategis yang harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh, melibatkan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas lokal. Mitigasi sebagai langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat laju pemanasan global, dapat dilakukan antara lain melalui rehabilitasi dan pelestarian ekosistem, transisi energi bersih dan efisien, pengelolaan pertanian dan peternakan ramah lingkungan, serta pengelolaan sampah berbasis sirkuler. Dalam rangka memperkuat adaptasi sebagai strategi untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim yang tidak bisa dihindari; maka penguatan sistem peringatan dini dan edukasi risiko serta pembangunan infrastruktur tangguh iklim dilakukan seiring dengan pelibatan komunitas dan pendayagunaan kearifan lokal.

Perubahan iklim adalah tantangan global, tetapi solusinya dimulai dari lokal. Kabupaten Bima memiliki potensi besar untuk menjadi model daerah tangguh iklim melalui pendekatan berbasis komunitas, nilai budaya lokal, inovasi teknologi, dan komitmen politik yang kuat. Dengan memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara



terpadu, Kabupaten Bima tidak hanya menjaga ekosistemnya, tetapi juga melindungi kehidupan, mata pencaharian, dan martabat generasi mendatang.

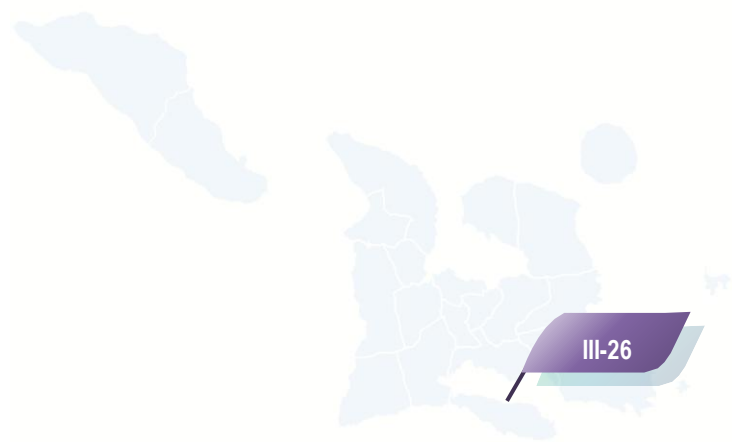
Tahap V (2030)

Kabupaten Bima, sebagai wilayah yang kaya nilai budaya dan potensi sumber daya alam, menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks di era modern. Di tengah tantangan ini, harapan kolektif untuk membangun Bima Bermartabat yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh, dan Berkelanjutan; harus dipahami sebagai sebuah visi yang tidak hanya menekankan aspek ekonomi semata, tapi juga menegaskan nilai-nilai keadaban, ketahanan, dan keadilan lintas generasi.

Perwujudan Bima Bermartabat yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh, dan Berkelanjutan menuntut kerja kolektif yang konsisten, berbasis pada nilai-nilai lokal dan prinsip pembangunan berkeadilan. Dengan menggabungkan kekuatan budaya, kearifan lokal, energi generasi muda, inovasi teknologi, dan tata kelola yang baik, Kabupaten Bima mewujudkan menjadi model daerah yang tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga kuat secara sosial dan lestari secara ekologis.

3.2.1.2. Arah Kebijakan

Strategi dan penahapan pembangunan diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka pencapaian target dan tujuan RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029. Berikut ini merupakan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029. Arah kebijakan ini selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rumusan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bima seperti pada tabel berikut:





Tabel 3.6.
Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi I: Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, serta berdaya saing untuk mencapai pelayanan publik prima	S1	Penguatan sinergi antara sistem perencanaan-penganggaran, pelaksanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi, serta partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi
			Pengembangan <i>dash board monitoring</i> kinerja perangkat daerah secara <i>realtime</i> serta publikasi hasil evaluasi untuk mendorong transparansi dan perbaikan berkelanjutan
			Penguatan sistem pelaporan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk publikasi laporan sekaligus sebagai wahana sosialisasi hasil kinerja kepada masyarakat
			Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat struktur sehingga lebih <i>agile</i> dan sinergis dalam mempercepat pembangunan Daerah
			Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai sehingga tercipta regulasi yang harmonis, sinkron, dan mudah diakses oleh publik melalui JDIIH yang selalu dilakukan pembaruan secara berkala
			Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
	S2	Penguatan kompetensi serta integritas dan kode etik ASN secara berkelanjutan	Penguatan kualitas Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas ASN agar dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih sinergis menjadi <i>learning governance</i> ; penerapan sistem merit dalam manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang tertentu; serta penekanan pada nilai-nilai Ber-AKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)
			Pengawasan dan penegakan disiplin ASN untuk menegakkan hukum dan menjaga integritas birokrasi
			Pengembangan sistem penempatan ASN yang memperhatikan kepentingan daerah, terutama pelayanan pemerintahan perdesaan yang masih terisolir
			Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani





Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	S3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan <i>service Quality Management</i>	Pembangunan budaya kerja yang kolaboratif, terbuka terhadap kritik dan fokus pada hasil
				Penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengedepankan interoperabilitas (<i>interoperability</i>) guna mempercepat penyatuan data seluruh perangkat daerah, digitalisasi tata kelola pemerintahan, dan pengembangan <i>smart office</i> guna meningkatkan kualitas layanan publik
				Pembangunan mal pelayanan publik (MPP) untuk menghadirkan berbagai layanan dalam satu tempat yang terintegrasi
				Peningkatan efisiensi dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat melalui penyederhanaan prosedur, penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) bagi semua jenis layanan
				Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) secara berkala dan wajib ditindaklanjuti guna menyesuaikan layanan dengan harapan dan pengalaman pengguna
				Fasilitasi pengaduan layanan melalui berbagai kanal (<i>loket, call center, aplikasi</i>)
				Penguatan inovasi dengan mendorong setiap perangkat daerah untuk menciptakan minimal satu inovasi setiap tahunnya (<i>One Agency, One Innovation</i>)
				Penguatan implementasi Pelaksanaan Program Selasa Menyapa guna memberikan layanan publik langsung berbasis desa melalui integrasi lintas instansi, revitalisasi budaya gotong royong, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penyelesaian masalah secara langsung
Misi II: Membangun Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan, Tangguh dan Berdaya Saing				
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	S4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pemenuhan, pemerataan dan peningkatan kualitas layanan Kesehatan	Perluasan dan penguatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat; disertai perbaikan sanitasi lingkungan, seperti peningkatan akses terhadap air bersih dan perbaikan fasilitas air bersih, serta kepemilikan jamban tiap rumah tangga/wilayah untuk meningkatkan kualitas hidup sehat. Penguatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal di daerah terpencil serta optimalisasi fungsi





Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
				puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan primer dan rujukan pertama bagi masyarakat.
				Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana kesehatan secara merata dan bermutu
				Penuntasan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan pendekatan lintas sektor
				Peningkatan akses pelayanan kesehatan dengan memperluas jaringan pelayanan kesehatan melalui program-program inovatif seperti pelayanan kesehatan berbasis komunitas dan <i>mobile clinic</i> ; serta mengembangkan sistem rujukan yang efektif dan efisien untuk mencegah penumpukan pasien di fasilitas kesehatan tertentu.
				Peningkatan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan angka kematian bayi
				Peningkatan koordinasi <i>multistakeholders</i> untuk memastikan kelancaran kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) serta melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan makan yang dibagikan layak dan bergizi.
				Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga; terutama olahraga rekreasi yang fokus pada kegiatan fisik untuk menjaga kesehatan, dan meningkatkan kebugaran.
				Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); serta meningkatkan kualitas dan kepesertaan pendidikan kesetaraan untuk memberikan kesempatan belajar kepada warga yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena berbagai alasan, seperti keterbatasan ekonomi, geografis, atau sosial.
				Fasilitasi pendirian Sekolah Rakyat di Kecamatan Wohu, rekrutmen calon siswa dari keluarga miskin serta penyiapan tenaga pendidik dan kependidikan.
				Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan di seluruh wilayah, melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara merata dan bermutu serta penguatan pengelolaan pendidik (guru) untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
	S5	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Pemenuhan, pemerataan dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan	Peningkatan animo pendidik (guru) untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) guna memecahkan masalah pembelajaran yang ada di kelasnya agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, keprofesionalan guru,





Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				motivasi dan hasil belajar siswa serta mengembangkan sikap proaktif terhadap perbaikan mutu pembelajaran secara berkelanjutan sehingga membantu sekolah dalam pengembangan mutu pendidikan secara keseluruhan. Pembangunan <i>role model</i> sekolah ramah anak dan perempuan serta lab school untuk siswa, guru, dan kepala sekolah berprestasi hebat Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi dan kebutuhan daerah. Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, yatim piatu dan tahfidz; Beasiswa Bidik Misi Daerah; serta peningkatan kualitas dan kapasitas asrama mahasiswa di berbagai kota studi
	S6	Meningkatnya literasi masyarakat	Pembangunan ekosistem digital dan taman literasi	Pembangunan ekosistem digital (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis Daerah, dan (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. Pembangunan pusat taman literasi sebagai ruang publik yang dirancang untuk menumbuhkan budaya membaca dan kegiatan literasi bagi masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan, area baca, ruang komunitas dan area bermain anak.
	S7	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta kualitas keluarga	Penguatan pemberdayaan perempuan dan keluarga serta perlindungan anak	Penguatan akses yang sama bagi perempuan terhadap pendidikan, pelatihan, sumber daya, dan peluang ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan potensi mereka. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif, baik di dalam maupun di luar rumah.





Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	S8	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Peningkatan cakupan dan kualitas perlindungan sosial	Peningkatan pelibatan perempuan/ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga
				Perlindungan sosial yang komprehensif bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mencegah dan menangani risiko sosial, serta memberikan jaminan kebutuhan dasar minimal bagi mereka yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi; yang mencakup jaminan sosial, bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.
				Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan bagi lansia miskin dan tidak mampu.
				Integrasi perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi untuk mendorong transisi dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha produktif
				Perlindungan sosial adaptif bagi kelompok masyarakat miskin ekstrem melalui Integrasi lintas sektor secara tepat sasaran dan pemberdayaan ekonomi terintegrasi sebagai percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem
Misi III: Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan, Energi, Air melalui Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan				
Meningkatnya Infrastruktur yang merata dan berkeadilan	S9	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur wilayah	Pelaksanaan pembangunan daerah yang tertata, berkelanjutan dan sesuai fungsi ruang	Penguatan regulasi dan kelembagaan penataan ruang
				Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
				Sinergi dan integrasi antarsektor dan wilayah
				Peningkatan literasi dan partisipasi publik dalam pengelolaan ruang
				Penataan ruang Kota Woha sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis untuk wilayah sekitarnya
			Peningkatan kualitas tata kelola dan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur dasar untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat dan menunjang kegiatan usaha masyarakat.
				Pembangunan Kota Woha sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis untuk wilayah sekitarnya
				Pembukaan keterisolasian Desa dan Zero Blankspot dengan target semua Desa Berdering (komunikasi) dan Terang (kelistrikan)
				Penyusunan konektivitas antara sentra produksi, pengolahan, dan pasar





Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
				Pembaruan data dan penanggulangan perumahan tidak layak huni (rumah swadaya, dan rumah khusus) serta penataan kawasan kumuh menjadi kawasan bersih dan sehat Penguatan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi dan konservasi air
Misi IV: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Ekosistem Industri Komoditas Unggulan				
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif	S10	Meningkatkannya peran sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Peningkatan produksi, dan produktivitas, serta diversifikasi pengolahan hasil dan perluasan pemasaran	Pembangunan kawasan strategis berbasis komoditas unggulan bidang pertanian dan perikanan
				Fasilitasi pengembangan agrobisnis dan agroindustri dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk yang kuat
				Peningkatan hasil produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan) dengan memastikan ketersediaan saprodi sesuai kebutuhan, memfasilitasi percepatan adopsi inovasi teknologi budi daya dan industrialisasi pengolahan hasil pascapanen
				Pengembangan kawasan peternakan, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak
				Perkuatan kelembagaan Keanggotaan Usaha Warga (Poktan/Gapoktan/Korporasi/ <i>Corporate Farming</i>) dalam percepatan adopsi modernisasi pertanian oleh petani (<i>smart farming and digital farming</i>)
				Pengembangan akuakultur dan hilirisasi komoditas udang, terutama udang Vaname yang dibudidayakan oleh masyarakat
				Pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana produksi perikanan tangkap serta kampung/sentra nelayan
				Pengembangan kelembagaan, sumberdaya manusia dan sarana prasarana produksi perikanan budidaya serta diversifikasi komoditas dan pengembangan industri hilir
				Pengembangan sentra budidaya dan hilirisasi rumput laut
				Pengembangan kawasan sentra garam rakyat melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam serta peningkatan produktivitas garam rakyat
	S11	Meningkatnya peran industri pengolahan dalam perekonomian daerah	Penguatan ekosistem perindustrian untuk mendorong hilirisasi dan nilai tambah	Perluasan jaringan distribusi dan pemasaran melalui kemitraan, kerja sama dengan pihak terkait, serta pameran dan promosi yang terintegrasi
				Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah (<i>added value</i>) tinggi yang berorientasi ekspor.





Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	S12	Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah	Penguatan ekosistem perdagangan dalam dan luar negeri	Pelatihan dan pendampingan teknologi produksi, efisiensi energi dan digitalisasi proses industri
				Fasilitasi sertifikasi, standardisasi dan hak kekayaan intelektual produk industri
				Revitalisasi pasar tradisional dan pembangunan pusat distribusi regional dan logistik terpadu
				Pengembangan <i>platform</i> perdagangan <i>online</i> , baik regional maupun internasional
				Standarisasi dan sertifikasi produk serta <i>branding</i> produk lokal
				Ekspansi akses pasar domestik dan global melalui <i>export coaching</i> dan fasilitasi perizinan ekspor
				Penguatan promosi <i>trade mission</i> , <i>business matching</i> , serta kerja sama antardaerah dan pihak terkait
	S13	Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi dalam perekonomian daerah	Penguatan kapasitas UMKM dan Koperasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi	Pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia pengurus Koperasi Desa Merah Putih.
				Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
				Fasilitasi pengembangan <i>market place</i> yang berorientasi pemasaran produk, baik yang bersifat <i>business to business</i> maupun <i>business to consumers</i>
				Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi.
	S14	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan destinasi dan produk unggulan, penguatan SDM serta pemasaran dan <i>branding</i> yang kuat	Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim, kemudahan investasi, serta pertumbuhan industri pariwisata dan industri kreatif lainnya.
				Peningkatan kualitas destinasi, atraksi wisata, dan standar pelayanan (CHSE: <i>Cleanliness, Health, Safety, Environment</i>)
				Pengembangan produk ekonomi kreatif unggulan berbasis kearifan lokal
				Pelaksanaan afirmasi <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
				Digitalisasi dan inovasi teknologi untuk memperluas jangkauan pasar dan efisiensi bisnis





Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	S15	Meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan merata	Peningkatan literasi dan edukasi keuangan serta jangkauan layanan	Perluasan jangkauan layanan keuangan formal
				Penguatan produk keuangan yang inklusif dan adaptif
				Peningkatan kolaborasi multipihak: Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, perbankan, <i>fintech</i> , koperasi, dan sebagainya.
				Penguatan perlindungan konsumen keuangan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan
	S16	Terkendalinya inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Sinergisitas dan konsistensi TPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
				Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah guna menunjang intervensi yang menyasar ke tingkat pasar dan konsumen
				Penguatan dan pelaksanaan strategi 4K secara integral dan konsisten, yakni: Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif
	S17	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan perbaikan manajemen	Pembaruan data wajib pajak dan peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi
				Perluasan sumber-sumber PAD baru berupa pengembangan potensi daerah, misalnya pariwisata dan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah
				Peningkatan tata kelola pendapatan dan kualitas sumber daya manusia
				Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan, termasuk sistem pembayaran elektronik dan pelaporan <i>online</i> .
	S18	Meningkatnya nilai investasi daerah	Penguatan iklim investasi yang menarik berbasis kearifan lokal	Penyusunan profil investasi (Peta Potensi Investasi, <i>Investment Project ready to Offer/IPRO</i>) yang menarik dan mudah diakses oleh calon investor
				Promosi investasi yang terintegrasi dan efektif
				Pemberian insentif dan fasilitas kemudahan berusaha
				Peningkatan kualitas layanan penanaman modal berbasis OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	S19	Meningkatnya kesempatan kerja	Peningkatan kualitas calon tenaga kerja dan perluasan informasi pasar kerja	Peningkatan investasi berbasis BUMD, BUMDes, koperasi, dan korporasi warga
				Peningkatan kesempatan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka melalui: (i) pelatihan kerja yang terarah dan terfokus pada bidang-bidang yang memiliki potensi serapan tenaga kerja tinggi, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif; (ii) fasilitasi program magang di perusahaan-perusahaan untuk memberikan pengalaman kerja nyata bagi





Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
				para pencari kerja, dan (iii) pelatihan peningkatan kompetensi bagi angkatan kerja yang sudah ada untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.
				Penyediaan dan penyebarluasan informasi pasar kerja akurat mengenai lowongan pekerjaan dan kebutuhan pasar
				Pemberian informasi dan pelatihan kepada calon TKI, serta pendampingan kepada TKI yang bermasalah di negara penempatan
	S20	Terwujudnya ketahanan pangan	Penguatan dimensi produksi, distribusi, konsumsi, dan cadangan pangan secara holistik, terintegrasi antarsektor dan berkelanjutan	Penguatan ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan di tingkat daerah. Hal tersebut melibatkan optimalisasi lahan, diversifikasi pangan, pengembangan teknologi pertanian, penguatan kelembagaan petani, dan pelestarian kearifan lokal.
	S21	Meningkatnya kemandirian desa	Penguatan pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan potensi lokal dan penguatan kelembagaan desa	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) serta memastikan aksesibilitas fisik dan ekonomi terhadap pangan
				Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan guna mencapai pola konsumsi pangan yang lebih baik dan beragam
				Penguatan kolaborasi segenap pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa
				Peningkatan kompetensi kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa
	S22	Meningkatnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah	Peningkatan animo dan kapasitas kewirausahaan pemuda	Peningkatan tata kelola pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa
				Penerapan program desa tuntas sebagai gerakan mengentaskan kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor dan mengoptimalkan potensi dan keunggulan lokal/desa
				Percepatan tumbuhnya wirausahawan muda dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi serta melibatkan komunitas pendidikan dan sektor ekonomi kreatif





Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Misi V: Membangun Kapasitas Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak, Aman, Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya				
Terwujudnya masyarakat yang Harmonis	S23	Terwujudnya kemaslahatan beragama dan pemajuan kebudayaan	Penguatan moderasi beragama dan toleransi serta penguatan budaya sebagai kekuatan sosial dan ekonomi	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antaretnis dan agama; serta peningkatan kapasitas pemahaman dan pengamalan agama
				Penguatan upaya untuk menumbuhkan rasa toleransi yang kuat di kalangan masyarakat sejak dini, melalui revitalisasi kegiatan kebersamaan lintas budaya, lintas suku, dan lintas agama
				Peningkatan program pertukaran pemuda lintas budaya, lintas segmen sosio-ekonomi, dan lintas etnis.
				Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat Nusa Tenggara Barat.
				Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra Wilayah Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal.
	S24	Terwujudnya keamanan daerah	Penguatan aspek preventif, deteksi, responsifitas dan partisipatif melalui kolaborasi multipihak	Penguatan sistem deteksi dini dan pencegahan konflik untuk mencegah munculnya potensi gangguan keamanan sebelum terjadi eskalasi
				Peningkatan koordinasi dan sinergi antarlembaga keamanan dan pemerintah daerah
				Pembentukan lembaga mediasi berbasis kearifan lokal sebagai salah satu upaya optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan (Siskamling), melakukan patroli rutin, meningkatkan kewaspadaan, menegakkan peraturan secara tegas dan konsisten, serta membangun toleransi antarwarga.
				Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan untuk menumbuhkan rasa aman melalui keadilan hukum dan ketertiban sosial
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	S25	Meningkatnya kualitas Air, udara, dan lahan	Penguatan tata kelola lingkungan hidup yang baik	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta konsistensi penegakan hukum lingkungan hidup
				Fasilitasi keterlibatan anak muda dalam bidang pelestarian lingkungan hidup, seperti komunitas pencinta alam, komunitas peduli sampah, komunitas pencinta hewan, dan sebagainya
				Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.





Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	S26	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketangguhan Daerah dan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim	Integrasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan sehingga adaptasi dan mitigasi iklim bagian dari kebijakan pembangunan yang disertai dukungan pada praktik pembangunan rendah karbon dan ramah lingkungan Pengelolaan risiko bencana melibatkan multiaktor pentahelix dalam pembangunan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi bahaya dan pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi. Pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana dan iklim untuk mengurangi dampak bencana dan meningkatkan perlindungan infrastruktur vital Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.





3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bima, serta memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan berdasarkan janji politik Bupati Bima dan wakil Bupati Bima periode tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Bima yang: **Maju, Makmur, Tangguh, dan Berkelanjutan** maka disusun 5 (lima) **agenda pokok** yang merupakan implementasi janji politik yang selanjutnya akan diturunkan sebagai program prioritas perangkat daerah. Agenda pokok pembangunan sebagaimana maksud diatas dapat digambarkan sebagai berikut

1. Bima Bermartabat
2. Bima yang Maju
3. Bima yang Makmur
4. Bima yang Tangguh
5. Pembangunan Berkelanjutan

Keterkaitan antara 5 (lima) agenda pokok pembangunan tersebut dengan program perangkat daerah sangatlah penting. Hal ini bertujuan agar seluruh janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat diwujudkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Program Unggulan daerah dalam dimensi politik berisi program-program politik yang menjadi kesatuan dalam rumusan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program tersebut merupakan janji politik yang harus diwujudkan dan dimulai dengan pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan. Program unggulan Kabupaten Bima merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Bima dalam lima tahun kedepan yakni tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Program Unggulan Kabupaten Bima Tahun 2025-2029

Agenda Pokok Pembangunan (APP)		Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)		Nomenklatur Program/Program Prioritas (Nomenklatur Program sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
1	Bima yang Bermartabat "Birokrasi Profesional, Adaptif dan Melayani"	1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil	1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima	1	Penataan Organisasi Perangkat Daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam fungsi dan kewenangan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Sekretariat Daerah
						2	Penerapan pemerintahan berbasis elektronik, seperti <i>e-Planning, e-budgeting, e-procurement</i> , dan <i>e-reporting</i>	Program pengelolaan aplikasi informatika	Komunikasi dan Informatika
						3	Percepatan penyatuan data (satu data) seluruh instansi perangkat daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	Penelitian dan Pengembangan
								Program pengelolaan aplikasi informatika	Komunikasi dan Informatika
						4	Pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Perencanaan
								Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1	Bima yang Bermartabat "Birokrasi Profesional, Adaptif dan Melayani"	1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil	1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima	5	Pengembangan sistem penempatan ASN yang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan daerah, khususnya dalam	Program kepegawaian daerah	Kepegawaian



Agenda Pokok Pembangunan (APP)		Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)		Nomenklatur Program/Program Prioritas (Nomenklatur Program sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)		Urusan Pengampu	
							mendukung pelayanan pemerintahan di wilayah perdesaan yang masih terisolir.				
						6	Reformasi pendidikan dan pelatihan ASN agar lebih sinergis dan bertransformasi menjadi <i>learning governance</i> guna mendorong tercapainya ASN yang profesional serta terciptanya organisasi yang berkelanjutan.	Program pengembangan sumber daya manusia	Pendidikan dan Pelatihan		
						7	Pengembangan <i>smart office</i> di perangkat daerah	Program pengelolaan aplikasi informatika	Komunikasi dan Informatika		
						8	Lelang jabatan kepala sekolah, penilik, dan pengawas sekolah melalui uji kompetensi yang ketat	Program pengembangan sumber daya manusia	Pendidikan dan Pelatihan		
						9	Optimalisasi penerapan <i>Money Follow Program</i> , guna memastikan anggaran dialokasikan pada program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Perencanaan		
								Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan		
								Program pengelolaan keuangan daerah	Keuangan		
						10	Penghematan anggaran dengan mengurangi belanja yang tidak produktif	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan		
								Program pengelolaan keuangan daerah	Keuangan		
						11	Optimalisasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Program penyelenggaraan pengawasan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
								Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
								Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Semua Urusan Pemerintahan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD		
						12	Penatakelolaan aset daerah berupa peningkatan kualitas dan kapasitas asrama mahasiswa di berbagai kota studi	Program pengelolaan barang milik daerah	Keuangan		



Agenda Pokok Pembangunan (APP)		Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)		Nomenklatur Program/Program Prioritas (Nomenklatur Program sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
						13	Penataan, sinkronisasi dan evaluasi regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Sekretariat Daerah
2	Bima yang Maju	2	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan dan Berdaya Saing	2	Kesehatan bermutu	14	Penyediaan rumah sakit rujukan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	Kesehatan
						15	Penyediaan Rumah Singgah Pasien Mataram - Bali sebelum adanya Rumah Sakit Rujukan di Bima	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	Kesehatan
						16	Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana kesehatan secara merata dan bermutu	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	Kesehatan
						17	Penyediaan tenaga - tenaga dokter spesialis, perawat dan bidan secara merata dan proporsional	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Kesehatan
						18	Pelayanan prima kesehatan berbiaya murah dan gratis bagi masyarakat prasejahtera	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	Kesehatan
						19	Pemberdayaan kader posyandu setiap Desa	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Kesehatan
								Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Kesehatan
						20	Gerakan bebas <i>stunting</i> melalui pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan anak	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	Kesehatan
						21	Peningkatan kesejahteraan tenaga medis secara profesional dan proporsional melalui penghasilan tambahan (tamsil)	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kesehatan
						22	Penguatan program promotif dan preventif dengan pembudayaan gerakan hidup sehat dalam masyarakat serta makanan yang dikonsumsi masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	Kesehatan
								Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Kesehatan
						23	Perbaikan sanitasi seperti tiap rumah tangga/wilayah memiliki jamban untuk meningkatkan kualitas hidup sehat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	Kesehatan
						24	Peningkatan peran aktif masyarakat pedesaan dalam	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan	Kesehatan



Agenda Pokok Pembangunan (APP)		Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)		Nomenklatur Program/Program Prioritas (Nomenklatur Program sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
							memperoleh bantuan kesehatan (PBI JKN-KIS)	upaya kesehatan Masyarakat	
						25	Percepatan peningkatan kepesertaan JKN-KIS dan peningkatan kualitas layanan Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	Kesehatan
								Program pemberdayaan sosial	Sosial
						26	Peningkatan fungsi fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di setiap kecamatan dengan "Bima Menjenguk"	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	Kesehatan
						27	Perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak "Bima Menjenguk"	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	Kesehatan
				3	Pendidikan Unggul Berkualitas	28	Pembangunan <i>role model</i> sekolah ramah anak dan perempuan	Program pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
						29	Penyediaan dan pengembangan sarpras pendidikan secara merata dan bermutu	Program pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
						30	<i>Lab school</i> untuk siswa, guru, dan kepala sekolah berprestasi hebat	Program pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
						31	Pembangunan pusat taman literasi masyarakat	Program pembinaan perpustakaan	Perpustakaan
						32	Penerapan jam wajib belajar di rumah bagi anak dan orangtua	Program pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
						33	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru/PTK	Program pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
						34	Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, yatim piatu dan tahfidz	Program pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
						35	Pendayagunaan Dewan Pendidikan	Program pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
						36	Penguatan kemitraan dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi/LPTK	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah
				4	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	37	Peningkatan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan angka kematian bayi	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan
						38	Peningkatan akses anak-anak perempuan	Program peningkatan kualitas keluarga	Pemberdayaan Perempuan dan



Agenda Pokok Pembangunan (APP)		Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)		Nomenklatur Program/Program Prioritas (Nomenklatur Program sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
							untuk memperoleh pendidikan	Program pemenuhan hak anak	Perlindungan Anak
						39	Fasilitasi peran perempuan/ibu dalam penguatan ekonomi keluarga	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						40	Fasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi wirausahawan	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						41	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif	Program perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						42	Peningkatan pelibatan perempuan ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga	Program peningkatan kualitas keluarga	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						43	Pengembangan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Kepemudaan dan Olahraga
						44	Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga
						45	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Kepemudaan dan Olahraga
3	Bima yang Berkelanjutan	3	Infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung kawasan strategis	5	Pembangunan Kota Woha sebagai Pusat Pemerintah dan Pusat Bisnis untuk wilayah sekitarnya	46	Penataan Ruang Kota Woha yang baru terintegrasi sebagai pusat pemerintah dan pusat bisnis bagi wilayah disekitarnya	Program penyelenggaraan jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						47	Pembangunan Sarana Perkantoran dipusatkan di Godo Kecamatan Woha	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				6	Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk menjamin pelayanan dasar warga	48	Pembangunan IPAL KOMUNAL di pusat Perkotaan	Program penataan bangunan gedung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						49	Pemberian jaminan kemudahan berusaha bagi pihak swasta yang akan berinvestasi di wilayah pusat ibukota baru	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								Program pengembangan perumahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman



Agenda Pokok Pembangunan (APP)		Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)		Nomenklatur Program/Program Prioritas (Nomenklatur Program sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
				7	Pemenuhan Kebutuhan perumahan layak huni dan air bersih bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah	50	Penataan kawasan kumuh menjadi kawasan bersih dan sehat	Program kawasan permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
						51	Pembaruan data perumahan tidak layak huni (rumah swadaya, dan rumah khusus)	Program kawasan permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
								Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman
						52	Penyediaan air bersih melalui perluasan jaringan dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sumberdaya air	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						53	Penyediaan sumber air komunal bagi wilayah Kecamatan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						54	Pengelolaan PDAM Bima secara proporsional	Program perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
						55	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum bagi Warga	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				8	Peningkatan Infrastruktur yang menunjang Kegiatan Usaha Warga dan dapat diakses untuk semua	56	Keberlanjutan usulan Jalan dua Jalur dan Pembangunan Jembatan Lewamori	Program penyelenggaraan jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						57	Pembangunan, peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan agar kondisi jalan dan jembatan Kabupaten mantap 100 persen	Program penyelenggaraan jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						58	Pembukaan akses jalan strategis kabupaten menuju pusat produksi	Program penyelenggaraan jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						59	Peningkatan sarana prasarana transportasi dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa	Program penyelenggaraan jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Perhubungan
						60	Pembangunan check dam, Embung dan Irigasi yang Terintegrasi.	Program pengelolaan sumber daya air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						61	Pembukaan keterisolasian Desa dan Zero Blank spot dengan target semua Desa Berdering (komunikasi) dan Terang (kelistrikan)	Program pengelolaan aplikasi informatika	Komunikasi dan Informatika
4	Bima Yang Makmur	4	Kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan	9	Peningkatan Kemandirian Daerah Berbasis Potensi Unggulan		<i>Modernisasi Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam berbasis Teknologi Tepat Guna:</i>		



Agenda Pokok Pembangunan (APP)		Prioritas Daerah (PD)	Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)		Nomenklatur Program/Program Prioritas (Nomenklatur Program sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
		komoditas unggulan			62	Pemetaan dan penataan potensi-potensi SDA	Program pengembangan iklim penanaman modal	Penanaman Modal
					63	Pemanfaatan potensi SDA berbasis partisipatif dan berkelanjutan.	Program pelayanan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal
					64	Peningkatan Iklim investasi berbasis kearifan lokal	Program pengembangan iklim penanaman modal Program promosi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal
					65	Penyediaan Balai Benih sebagai penjamin ketersediaan benih unggul untuk Masyarakat	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pertanian
							Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pertanian
						<i>Industrialisasi berbasis Produk Pertanian, Peternakan dan Kelautan:</i>		
					66	Pembangunan Gudang Penampungan dan Industri	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertanian
					67	Pengolahan Hasil Pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pertanian
					68	Pembangunan RPH warga, Pabrik Pakan Ternak dan Industri	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertanian
					69	Pengolahan Hasil Peternakan.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pertanian
					70	Pembangunan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap (Kelautan)	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kelautan dan Perikanan
						<i>Pembangunan Kawasan Strategis sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Komuditi Unggulan:</i>		
					71	Kawasan Tambora yang mencakup wilayah Sanggar Soromandi dan Donggo sebagai Kawasan Pariwisata Regional, Transmigrasi, Peternakan dan Perikanan (KSPN Tambora)	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertanian
							Program pengelolaan perikanan budidaya	Kelautan dan Perikanan
							Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pariwisata
							Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Pariwisata
					72	Kawasan Strategis Lewamori yang mencakup Kecamatan Bolo, Woha dan Palibelo sebagai Pusat Ibukota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Agenda Pokok Pembangunan (APP)		Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)		Nomenklatur Program/Program Prioritas (Nomenklatur Program sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
						73	Kawasan Strategis Perniagaan mencakup wilayah Kecamatan Woha, Bolo dan Sape	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Perdagangan
						74	Kawasan Industri Garam dan Budidaya Ikan yang mencakup Kecamatan Bolo, Woha dan Palibelo.	Program pengelolaan perikanan budidaya	Kelautan dan Perikanan
								Program pengelolaan perikanan budidaya	Kelautan dan Perikanan
								Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Kelautan dan Perikanan
						75	Kawasan Ekosistem Hutan yang mencakup wilayah Parado, Langgudu, Wawo, Donggo, Tambora dan Lambitu sebagai Kawasan Industri Pariwisata Lokal	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pariwisata
						76	Kawasan SABUA"RAWI mencakup wilayah Sape, Lambu, Wera dan Ambalawi sebagai wilayah Industri Pariwisata (Perpres 32 tahun 2018 tentang badan otoritas pengelolaan Pariwisata Labuan Bajo)	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pariwisata
						77	Kawasan "Dou Sila" mencakup Bolo, Madapangga, Soromandi sebagai Kawasan Pertanian Produktif sebagai Wilayah Perdesaan Baru dengan Pengelolaan sektor Industri unggulan Pertanian, peternakan, Perkebunan dan Perikanan	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertanian
								Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertanian
								Program pengelolaan perikanan budidaya	Kelautan dan Perikanan
						78	Kawasan Cagar Budaya mencakup kecamatan Wawo, Lambitu, Donggo dan Soromandi	Program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Kebudayaan
79	Kawasan Agrobisnis Bawang Merah mencakup wilayah kecamatan Belo, Lambu, Sape, Wera, Woha dan Monta	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertanian						
80	Kawasan Pergudangan dan Industri Pengolahan Agrobisnis Jagung mencakup wilayah Kecamatan Wawo, Parado, Monta, Ambalawi, Soromandi dan Donggo	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertanian						



Agenda Pokok Pembangunan (APP)		Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)		Nomenklatur Program/Program Prioritas (Nomenklatur Program sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
						81	Kawasan Sentra Peternakan Rakyat pada wilayah kawasan pelepasan budidaya sapi dan kerbau yang mencakup Kecamatan Wera, Lambu, Monta, Sanggar dan Tambora	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertanian
								Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pertanian
						82	Kawasan Minapolitan pada wilayah sentra perikanan laut mencakup Kecamatan Sape, Langgudu dan Sanggar	Program pengelolaan perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan
							<i>Membangun Investasi Berbasis Pada BUMD, BUMDes dan Korporasi Warga:</i>		
						83	Menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai Pusat investasi Pengembangan Ekonomi Daerah	Program perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
						84	Menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi Desa	Program administrasi pemerintahan desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						85	Pembangunan Korporasi Usaha Warga (Pertanian, Peternakan dan Kelautan) sebagai Lokomotif menggerakkan usaha warga	Program penyuluhan pertanian	Pertanian
						86	Pelaksanaan Program Desa Tuntas sebagai gerakan mengentaskan Kemiskinan	Program administrasi pemerintahan desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			10	Peningkatan Ekonomi Masyarakat		87	Penguatan Kelembagaan Keanggotaan Usaha Warga (Poktan/ Gapoktan/ Korporasi/ Corporate farming) dalam percepatan Adopsi Modernisasi Pertanian oleh Petani (<i>Smart Farming and Digital Farming</i>)	Program penyuluhan pertanian	Pertanian
						88	Pembentukan Usaha (Bisnis) Berskala Ekonomi yang berorientasi Pasar pada setiap Kawasan Desa (Sinergi Manajemen dan Sistem Hulu-hilir)	Program perencanaan dan pembangunan industri	Perindustrian



Agenda Pokok Pembangunan (APP)		Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)		Nomenklatur Program/Program Prioritas (Nomenklatur Program sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
						89	Fasilitasi Pengembangan Agro-industri dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk yang kuat (Dukungan Teknologi Tepat Guna, Pendampingan Sistem Budidaya dan Pembangunan Pergudangan dan Industri Pengolahan)	Program perencanaan dan pembangunan industri	Perindustrian
						90	Penyediaan pupuk bagi petani sehingga tidak terjadi kelangkaan pupuk di musim tanam dengan melakukan revitalisasi terhadap seluruh RDKK kelompok tani yang ada	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pertanian
						91	Penyediaan modal bagi masyarakat untuk meningkatkan peluang usahanya dengan meningkatkan Akses Dana Bergulir bagi pelaku usaha mikro dan ultramikro	Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						92	Peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan hasil produksi dengan memfasilitasi percepatan adopsi inovasi teknologi budi daya dan industrialisasi pengolahan hasil pascapanen	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pertanian
						93	Pengembangan komoditi agrobisnis dan agroindustri yang dapat meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong agar terjadi konsolidasi kelompok tani menjadi besar sehingga memiliki daya saing yang kuat	Program penyuluhan pertanian	Pertanian
						94	Pengembangan <i>market place</i> yang berorientasi pemasaran produk, baik yang bersifat <i>business to business</i> ataupun <i>business to consumers</i>	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Perdagangan
			11	Pengembangan sistem pelatihan kewirausahaan		95	Peningkatan pelatihan kewirausahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil & usaha mikro	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Agenda Pokok Pembangunan (APP)		Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)		Nomenklatur Program/Program Prioritas (Nomenklatur Program sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
							industri dan perkembangan teknologi		
						96	Pemberian akses kepada anak-anak yang putus sekolah dan tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan studinya dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga	Tenaga Kerja
						97	Peningkatan akses permodalan bagi wirausahawan baru dengan menggunakan model pembiayaan non-konvensional sehingga memudahkan wirausahawan baru yang tidak memiliki asset	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil & usaha mikro	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						98	Percepatan tumbuhnya wirausahawan muda dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang melibatkan komunitas pendidikan dan sektor ekonomi kreatif	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil & usaha mikro	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Bima Yang Tangguh	5	Penguatan Kapasitas Pemahaman Keagamaan dan nilai sosial budaya berbasis lingkungan.	12	Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Pengamalan Kegamaan	99	Penguatan Masjid Agung terpadu sebagai pusat kajian dan pengembangan keagamaan, rumah tahfiz dan Gemas	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah
								Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Pemerintahan Umum
				13	Penguatan nilai-nilai kearifan lokal	100	Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								Program pemenuhan hak anak (PHA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						101	Pembangunan Rumah Adat dan Rumah budaya	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						102	Pembangunan Desa Adat dan kesenian daerah Melaksanakan Gebyar adat dan budaya Tahunan	Program pengembangan kebudayaan	Kebudayaan
						103	Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata budaya dan industri kreatif	Program pengembangan kebudayaan	Kebudayaan
						104	Revitalisasi budaya daerah Bima melalui pendataan potensi budaya masing-masing	Program pengembangan kebudayaan	Kebudayaan
								Program pemasaran pariwisata	Pariwisata



Agenda Pokok Pembangunan (APP)		Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)		Nomenklatur Program/Program Prioritas (Nomenklatur Program sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
				14	Pembinaan terhadap Kader-kader muda pembangunan bidang lingkungan hidup dan budaya	105	wilayah, peningkatan apresiasi dan literasi musik dalam pendidikan, maupun penyiapan infrastruktur pendukung	Program pengembangan kebudayaan	Kebudayaan
						106	Peningkatan program pertukaran pemuda lintas budaya, lintas segmen sosio-ekonomi, dan lintas etnis	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Lingkungan Hidup
						107	Fasilitasi keterlibatan anak muda dalam bidang pelestarian lingkungan hidup, seperti komunitas pencinta alam, komunitas peduli sampah, komunitas pencinta hewan, dan sebagainya	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Pemerintahan Umum
						108	Penguatan rasa toleransi yang kuat di kalangan muda sejak dini, melalui revitalisasi kegiatan kebersamaan lintas budaya, lintas suku, dan lintas agama	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
				15	Penegakan Hukum, Ketertiban dan Keamanan	109	Penguatan Gerakan Sadar Hukum Pemuda Pelopor Desa	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
						110	Pembentukan Satgas Penegakan Peraturan Daerah	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Pemerintahan Umum
						111	Pembentukan Lembaga Mediasi Berbasis Kearifan Lokal	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Pemerintahan Umum
						112	Pembinaan dan Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Pemerintahan Umum
						113	Penyuluhan kepada masyarakat dan remaja akan bahaya narkoba dan miras.	Program penanggulangan bencana	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Suburusan bencana
						114	Peningkatan Peningkatan sosialisasi/Pelatihan Pencegahan dan	Program penanggulangan bencana	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan



Agenda Pokok Pembangunan (APP)		Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)		Nomenklatur Program/Program Prioritas (Nomenklatur Program sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
				16	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat		Pelindungan Masyarakat Suburusan bencana
						115	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
						116	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
						117	Pengendalian keamanan lingkungan	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Perumusan nomenklatur program prioritas Kabupaten Bima disusun dengan mengacu pada nomenklatur program yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025. Selain berpedoman pada program unggulan serta intervensi program unggulan (kegiatan strategis) yang merupakan penjabaran dari janji politik Bupati dan Wakil Bupati, perumusan prioritas daerah juga memerlukan identifikasi mendalam terhadap arah pembangunan kewilayahan Kabupaten Bima sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2025-2029. Pendekatan ini memastikan bahwa program prioritas daerah tidak hanya selaras dengan visi kepemimpinan daerah, tetapi juga terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, sehingga mampu memperkuat sinergi, efektivitas, serta dampak pembangunan di tingkat lokal.

Keselarasan prioritas pembangunan kewilayahan Kabupaten Bima merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah berjalan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. RPJMN 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan nasional menjadi rujukan utama bagi daerah dalam menetapkan sasaran pembangunan, terutama yang terkait dengan pengembangan wilayah, peningkatan daya saing, transformasi ekonomi, dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan kerangka pembangunan regional yang lebih spesifik sesuai karakteristik, potensi, dan peran kewilayahan Kabupaten Bima sebagai bagian penting kawasan timur NTB.

Dalam konteks tersebut, RPJMD Kabupaten Bima perlu menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kedua dokumen perencanaan tersebut agar tercipta konsistensi kebijakan, efektivitas program, dan sinergi pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Bima dalam RPJMN 2025-2029, fokus pengembangan kewilayahan diarahkan pada dua klaster utama, yaitu: (1) **Kawasan Komoditas Unggulan**, meliputi Kawasan Peternakan, Kawasan Sentra Garam, Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut, serta Sentra Produksi Berbasis Komoditas Udang; dan



(2) **Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi**, khususnya melalui penguatan Pengembangan Pangan Lokal.

Arah pembangunan tersebut sejalan dengan Program Unggulan Provinsi NTB, sehingga Pemerintah Kabupaten Bima telah mengintegrasikan program dan kegiatan strategis daerah untuk memperkuat pengembangan kawasan secara lebih terarah dan berdampak.

1. Kawasan Peternakan

Sejalan dengan klaster komoditas unggulan dalam RPJMN, pengembangan Kawasan Peternakan di Kabupaten Bima diintegrasikan melalui Program Unggulan (PU-9) **Peningkatan Kemandirian Daerah Berbasis Potensi Unggulan**, dengan kegiatan strategis sebagai berikut:

- 1) **Pembangunan Kawasan Strategis Tambora** yang mencakup Kecamatan Sanggar, Soromandi, dan Donggo sebagai kawasan terpadu pariwisata regional, transmigrasi, peternakan, dan perikanan (KSPN Tambora).
- 2) **Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Rakyat**, yaitu kawasan pelepasan dan budidaya sapi dan kerbau di Kecamatan Wera, Lambu, Monta, Sanggar, dan Tambora.
- 3) **Penguatan Hilirisasi Peternakan** melalui pembangunan RPH Warga, Pabrik Pakan Ternak, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan.

2. Kawasan Sentra Garam

Kawasan Sentra Garam merupakan sektor strategis dalam mendukung industri garam nasional. Penyelarasan dilakukan melalui PU-9 dengan kegiatan strategis: **Pembangunan Kawasan Industri Garam dan Budidaya Ikan**, yang meliputi Kecamatan Bolo, Wohu, dan Palibelo sebagai pusat produksi, hilirisasi, dan distribusi garam industri serta pengembangan perikanan budidaya.

3. Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut

Kawasan ini menjadi pilar utama ekonomi maritim Kabupaten Bima. Penyelarasan dilakukan melalui PU-9 dengan kegiatan strategis: **Pengembangan Sentra Budidaya dan Hilirisasi Rumput Laut**, termasuk penguatan sarana produksi, fasilitas pascapanen, pengeringan, dan industri olahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekspor.

4. Sentra Produksi Berbasis Komoditas Udang

Pengembangan akuakultur, khususnya udang Vaname, diprioritaskan secara nasional dan diperkuat di Kabupaten Bima melalui PU-9, dengan kegiatan strategis:

- 1) **Pengembangan Tambak Udang Modern**, mencakup peningkatan kualitas benih, penerapan biosekuriti, dan pengelolaan lingkungan budidaya yang berkelanjutan.
- 2) **Penguatan Hilirisasi Komoditas Udang** melalui penyediaan fasilitas pascapanen, cold storage, dan kemitraan industri untuk memperluas pasar.

5. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Fokus utama kawasan ini adalah **Pengembangan Pangan Lokal** yang didukung oleh pembangunan kawasan strategis pertanian dan agrobisnis melalui PU-9. Kegiatan strategis meliputi:

1. **Pembangunan Kawasan Strategis "Dou Sila"** (Kecamatan Bolo, Madapangga, dan Soromandi) sebagai kawasan pertanian produktif dan wilayah perdesaan baru dengan integrasi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan.



2. **Pembangunan Kawasan Agrobisnis Bawang Merah** yang mencakup Kecamatan Belo, Lambu, Sape, Wera, Woha, dan Monta sebagai pusat produksi, distribusi, dan pengolahan hortikultura unggulan.
3. **Pembangunan Kawasan Pergudangan dan Industri Pengolahan Agrobisnis Jagung** meliputi Kecamatan Wawo, Parado, Monta, Ambalawi, Soromandi, dan Donggo, sebagai pusat produksi, penanganan pascapanen, dan hilirisasi jagung.

Pengembangan pangan lokal ini diperkuat melalui peningkatan infrastruktur irigasi, pemanfaatan sumber daya air, dan energi terbarukan untuk mendukung produksi pangan secara berkelanjutan.

Penyelarasan antara RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi NTB 2025-2029, dan RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029 menghasilkan arah pembangunan kewilayahan yang komprehensif, terstruktur, dan saling mendukung. Kawasan komoditas unggulan serta kawasan swasembada pangan menjadi fondasi utama penguatan ekonomi daerah dan peningkatan peran Kabupaten Bima dalam pembangunan regional dan nasional. Program unggulan provinsi dan kegiatan strategis kabupaten menjadi instrumen kunci untuk memastikan pengembangan kawasan berjalan efektif, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.8.
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Bima pada RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi NTB dengan RPJMD Kabupaten Bima

No	NASIONAL			PROVINSI NTB			KABUPATEN BIMA	
	Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Bima dalam RPJMN 2025-2029	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) di Provinsi NTB	Deskripsi Singkat	Nama Program Unggulan	Deskripsi Singkat	Lokasi	Nama Program Unggulan	Kegiatan Strategis Daerah
1	Kawasan Komoditas Unggulan							
1.1	Kawasan Peternakan	Pengembangan Pangan Hewani	Kebutuhan pangan hewani cenderung meningkat namun daging ruminansia dan susu yang masih mengandalkan impor sehingga diperlukan pengembangan pangan hewani sebagai bentuk swasembada pangan yang berkualitas	(PU 4) - NTB AGRO MARITIM	Penguatan ketahanan pangan di daerah	Kawasan Peternakan: - Kab. Lombok Tengah - Kab. Lombok Timur - Kab. Sumbawa - Kab. Dompu Kab. Bima	(PU-9) Peningkatan Kemandirian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	Pembangunan RPH warga, Pabrik Pakan Ternak dan Industri Pembangunan Kawasan Strategis: Kawasan Tambora yang mencakup wilayah Sanggar Soromandi dan Donggo sebagai Kawasan Pariwisata Regional, Transmigrasi, Peternakan dan Perikanan (KSPN Tambora) Pembangunan Kawasan Strategis: Kawasan Sentra



No	NASIONAL			PROVINSI NTB			KABUPATEN BIMA	
	Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Bima dalam RPJMN 2025-2029	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) di Provinsi NTB	Deskripsi Singkat	Nama Program Unggulan	Deskripsi Singkat	Lokasi	Nama Program Unggulan	Kegiatan Strategis Daerah
								Peternakan Rakyat pada wilayah kawasan pelepasan budidaya sapi dan kerbau yang mencakup Kecamatan Wera, Lambu, Monta, Sanggar dan Tambora Pengolahan Hasil Peternakan
1.2	Kawasan Sentra Garam	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	Pengembangan ekonomi baru sebagai sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut	(PU 4) - NTB AGRO MARITIM	Pembangunan kawasan industri Agromaritim yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan	Kawasan Sentra Garam: • Kab. Bima • Kab. Lombok • Timur • Kab. Sumbawa • Kab. Lombok • Barat	(PU-9) Peningkatan Kemandirian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	Pembangunan kawasan strategis: Kawasan Industri Garam dan Budidaya Ikan yang mencakup Kecamatan Bolo, Woha dan Palibelo.
1.3	Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput laut	(PU 4) - NTB AGRO MARITIM	• Pengembangan Ekonomi Biru, Peningkatan nilai ekspor komoditas unggulan daerah sektor nontambang • Pendekatan kawasan strategis • Pusat pertumbuhan wilayah dan sentra produksi komoditas unggulan daerah	Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut: • Kab. Sumbawa • Kab. Lombok • Timur • Kab. Bima • Kab. Lombok • Tengah • Kab. Lombok • Barat	(PU-9) Peningkatan Kemandirian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	Pengembangan sentra budidaya dan hilirisasi rumput laut
1.4	Sentra Produksi Berbasis Komoditas Udang	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Peningkatan ketersediaan pangan secara berkelanjutan melalui produksi pangan lokal dan nabati	(PU 4) - NTB AGRO MARITIM (PU 2) – DESA BERDAYA	Penguatan ketahanan pangan di daerah	Sentra Akuakultur-Komoditas Udang: • Kab. Sumbawa • Kab. Bima • Kab. Lombok • Timur • Kab. Sumbawa • Barat • Kab. Lombok • Utara	(PU-9) Peningkatan Kemandirian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	Pengembangan akuakultur dan hilirisasi komoditas udang , terutama udang Vaname yang dibudidayakan oleh masyarakat



No	NASIONAL			PROVINSI NTB			KABUPATEN BIMA	
	Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Bima dalam RPJMN 2025-2029	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) di Provinsi NTB	Deskripsi Singkat	Nama Program Unggulan	Deskripsi Singkat	Lokasi	Nama Program Unggulan	Kegiatan Strategis Daerah
		Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>)	Penyediaan kebutuhan ikan/udang untuk konsumsi/pangan masyarakat, dan peningkatan nilai tambah serta produktivitas pangan akuatik dalam swasembada pangan	(PU 4) - NTB AGRO MARITIM	Penguatan ketahanan pangan di daerah	Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: • Kawasan • Pangan Lokal • Kab. Sumbawa • Kab. Lombok • Timur • Kab. Dompu • Kab. Bima	(PU-9) Peningkatan Kemandirian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	Pengembangan akuakultur dan hilirisasi komoditas udang, terutama udang Vaname yang dibudidayakan oleh masyarakat Pembangunan Kawasan Strategis: Kawasan Tambora yang mencakup wilayah Sanggar Soromandi dan Donggo sebagai Kawasan Pariwisata Regional, Transmigrasi, Peternakan dan Perikanan (KSPN Tambora) Pembangunan kawasan strategis: Kawasan Industri Garam dan Budidaya Ikan yang mencakup Kecamatan Bolo, Woha dan Palibelo.
2	Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi: Pengembangan Pangan Lokal	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Peningkatan ketersediaan pangan secara berkelanjutan melalui produksi pangan lokal dan nabati	(PU 4) - NTB AGRO MARITIM (PU 2) – DESA BERDAYA	Penguatan ketahanan pangan di daerah	Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: • Kawasan • Pangan Lokal • Kab. Sumbawa • Kab. Lombok • Timur • Kab. Dompu • Kab. Bima	(PU-9) Peningkatan Kemandirian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	Pembangunan Kawasan Strategis: Kawasan "Dou Sila" mencakup Bolo, Madapangga, Soromandi sebagai Kawasan Pertanian Produktif sebagai Wilayah Perdesaan Baru dengan Pengelolaan sektor Industri unggulan Pertanian, peternakan, Perkebunan dan Perikanan



No	NASIONAL			PROVINSI NTB			KABUPATEN BIMA	
	Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Bima dalam RPJMN 2025-2029	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) di Provinsi NTB	Deskripsi Singkat	Nama Program Unggulan	Deskripsi Singkat	Lokasi	Nama Program Unggulan	Kegiatan Strategis Daerah
								Pembangunan Kawasan Strategis: Kawasan Agrobisnis Bawang Merah mencakup wilayah kecamatan Belo, Lambu, Sape, Wera, Woha dan Monta Pembangunan Kawasan Strategis: Kawasan Pergudangan dan Industri Pengolahan Agrobisnis Jagung mencakup wilayah Kecamatan Wawo, Parado, Monta, Ambalawi, Soromandi dan Donggo

Sumber: RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 (diolah)

Lokus Pengembangan Komoditas Unggulan

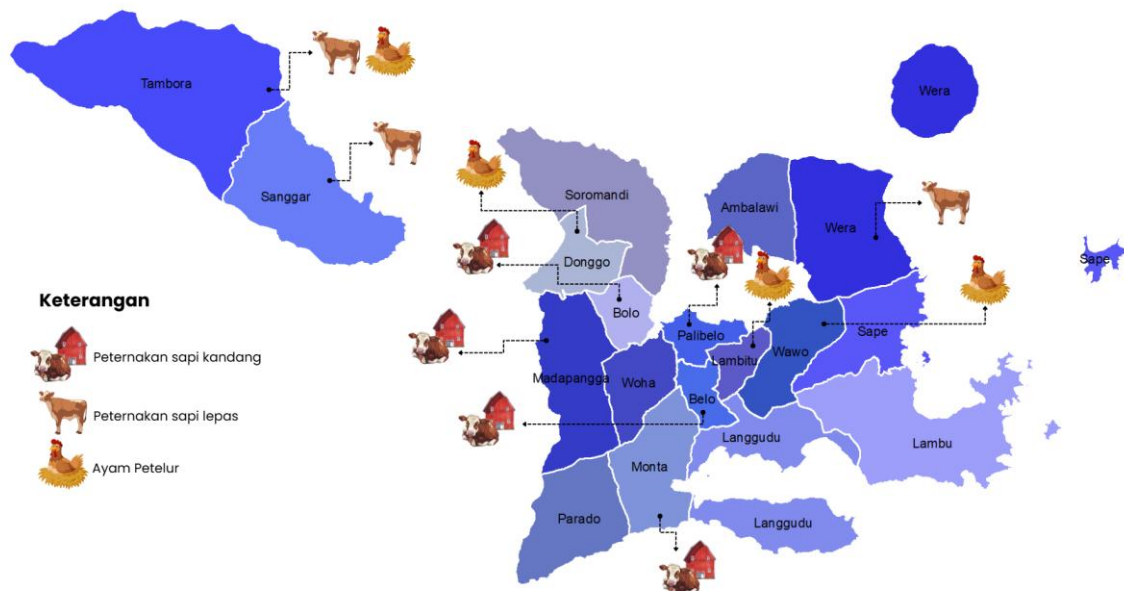
Dokumen RPJMN tahun 2025-2025 mengarahkan Kabupaten Bima sebagai kawasan komoditas unggulan dan kawasan swasembada pangan, air, dan energi. Terdapat empat kawasan komoditas unggulan berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029 yaitu: 1) Kawasan peternakan; 2) Kawasan sentra garam; 3) Kawasan perikanan dan sentra rumput laut; serta 4) Sentra akuakultur komoditas udang. Kawasan swasembada pangan, air, dan energi mengarahkan Kabupaten Bima sebagai kawasan pangan lokal.

Potensi sektor peternakan di Kabupaten Bima sangat dominan dengan komoditas unggulan sapi yang tersebar di sejumlah lokasi prioritas. Pola peternakan sapi kandang terkonsentrasi di Kecamatan Monta, Belo, Palibelo, Madapangga, dan Bolo, sementara pola peternakan sapi lepas lebih banyak terdapat di Kecamatan Wera, Sanggar, dan Tambora. Kendala utama yang dihadapi adalah ketersediaan pakan yang masih terbatas, sehingga kebutuhan strategis untuk mendukung pengembangan peternakan meliputi sarana dan prasarana produksi pakan skala lokal serta mesin chopper untuk pengolahan pakan yang efisien. Selain itu, pembangunan *holding ground* di Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, menjadi prioritas sebagai pusat pengelolaan ternak yang dapat meningkatkan produktivitas dan manajemen peternakan secara terintegrasi. Kabupaten Bima juga memiliki ladang penggembalaan Oi Tui di Kecamatan Wera yang telah difasilitasi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak berdasarkan Peraturan Bupati



Nomor 32 Tahun 2024, meskipun operasionalnya masih perlu ditingkatkan. Kebutuhan khusus untuk ladang penggembalaan ini meliputi fasilitas pembibitan sapi, sumber energi tenaga surya untuk operasional, sarana pengairan atau irigasi, serta sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan.

Di samping sapi, komoditas ayam pedaging dan ayam petelur juga menjadi komoditas penting dengan sebaran produksi ayam pedaging yang cukup luas di berbagai kecamatan, meskipun masih banyak difasilitasi oleh perusahaan besar. Lokasi potensial untuk pengembangan ayam petelur terdapat di Kecamatan Tambora, Donggo, Lambitu, dan Wawo dengan kebutuhan utama berupa penyediaan pakan mandiri dan fasilitas penyediaan bibit ayam untuk mendukung kemandirian dan peningkatan produksi. Dengan adanya peta sebaran lokasi prioritas sektor peternakan ini, diharapkan perencanaan dan intervensi program pembangunan peternakan dapat dilakukan secara tepat sasaran, mengatasi kendala yang ada, dan mendukung peningkatan produktivitas peternakan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bima secara berkelanjutan.



Gambar 3.6.

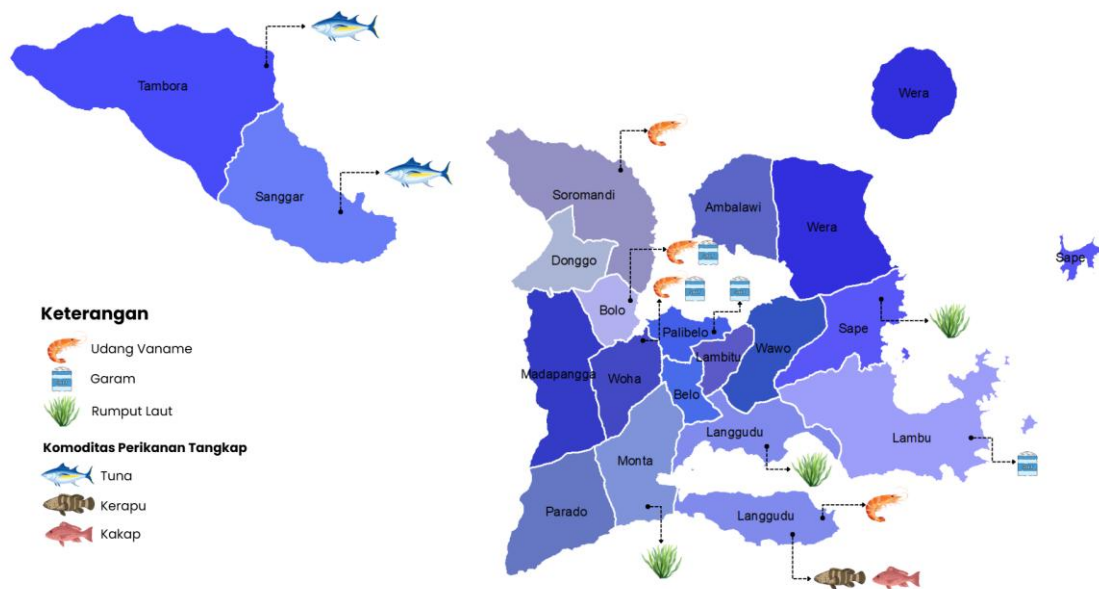
Peta Sebaran Lokasi Prioritas Sektor Peternakan

Sumber: Forum Koordinasi Data dan Arah Kewilayahan Berbasis Komoditas Unggulan Kabupaten Bima, 2025 (Diolah)

Komoditas unggulan di sektor perikanan Kabupaten Bima meliputi Udang Vaname Rakyat, Rumput Laut, Garam, serta berbagai jenis ikan tangkap seperti Tuna, Kerapu, dan Kakap. Prioritas lokasi untuk pengembangan Udang Vaname Rakyat berada di Kecamatan Langgudu, Woha, Bolo, dan Soromandi, dengan kebutuhan utama seperti penyediaan alat berat, kincir air, hatchery untuk pembenihan bibit, serta pengembangan kultur spirulina sebagai pakan. Untuk Udang Vaname perusahaan, lokasi prioritas terletak di Kecamatan Sape, Langgudu, Lambu, Wera, Soromandi, Parado, Tambora, dan Sanggar. Rumput Laut menjadi komoditas penting dengan lokasi prioritas di Kecamatan Langgudu, Sape, dan Monta, yang memerlukan peremajaan benih serta sarana prasarana dan jukung. Garam diutamakan di Kecamatan Bolo, Woha, Lambu, dan Palibelo, dengan kebutuhan gudang garam, karuku, pabrik garam, intensifikasi dan ekstensifikasi produksi, serta saluran irigasi



tambak dan brine tank. Untuk komoditas ikan tangkap seperti Tuna, Kerapu, dan Kakap, prioritas berada di Kecamatan Sanggar dan Tambora untuk Tuna, serta Langgudu untuk Kerapu dan Kakap, dengan kebutuhan kapal tangkap, pabrik es, *cold storage*, dan penyediaan pakan alternatif skala lokal. Selain itu, verifikasi spasial terhadap lahan tambak dan LP2B menjadi hal penting guna mencegah overlapping dan potensi konflik antara sektor pertanian dan perikanan budidaya, sehingga pengelolaan potensi laut dan perikanan dapat berlangsung secara terintegrasi dan berkelanjutan.



Gambar 3.7.

Peta Sebaran Lokasi Prioritas Sektor Kelautan dan Perikanan

Sumber: Forum Koordinasi Data dan Arah Kewilayahan Berbasis Komoditas Unggulan Kabupaten Bima, 2025 (Diolah)

Potensi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bima menunjukkan keberagaman komoditas yang menjadi andalan di berbagai kecamatan dengan lokasi prioritas yang spesifik. Untuk komoditas padi, prioritas utama berada di Kecamatan Monta dengan desa-desa seperti Pela, Sie, dan Simpasai, Kecamatan Ambalawi (Rite, Kole, Tolowata, Talapiti), Kecamatan Madapangga (Ndano, Bolo, Dena, Tonda), serta Kecamatan Bolo yang mencakup Darusalam, Tambe, Sondosia, dan Bontokape. Namun, pengembangan padi menghadapi kendala seperti mahalnya sarana produksi (saprodi), keterbatasan sarana prasarana, serta infrastruktur sumber daya air, khususnya irigasi. Oleh karena itu, kebutuhan yang mendesak adalah pembangunan gudang skala besar dan lumbung pangan masyarakat yang dilengkapi fasilitas seperti *dryer*, *Rice Milling Unit* (RMU), lantai jemur, gudang, dan silo, beserta alat-alat modern seperti transplanter dan combine harvester untuk meningkatkan efisiensi produksi. Komoditas jagung tersebar merata di seluruh kecamatan dengan sentra produksi di Sanggar, Tambora, Donggo, Madapangga, dan Soromandi, dan memerlukan fasilitas penyimpanan seperti gudang, silo, *vertical dryer*, dan lantai jemur untuk mendukung rantai pasca panen yang lebih baik. Sementara itu, kedelai memiliki lokasi prioritas di Kecamatan Palibelo dan Kecamatan Bolo dengan kebutuhan utama berupa peningkatan kualitas komoditas kedelai melalui bantuan benih kedelai hitam serta alat pengolahan pasca panen.



Komoditas bawang merah menjadi komoditas unggulan di beberapa kecamatan seperti Lambu, Sape, Wera, Belo, Monta, Woha, Soromandi, dan Sanggar, walaupun menghadapi kendala fluktuasi harga, rantai pemasaran yang kurang baik, dan biaya produksi yang tinggi akibat mahalnya saprodi. Untuk itu, dukungan fasilitas *cold storage* dan gudang sangat diperlukan guna menjaga kualitas dan stabilitas pasokan di pasar. Tembakau menjadi komoditas yang dikembangkan di Kecamatan Woha, Madapangga, Tambora yang sudah bermitra dengan perusahaan, serta Kecamatan Sape yang masih mandiri, dengan kebutuhan utama sarana prasarana produksi serta irigasi tanah dalam (bor dalam).

Komoditas kopi diprioritaskan di Kecamatan Wawo, Tambora, Langgudu, dan Donggo, dan membutuhkan alat pasca panen serta pengolahan kopi untuk meningkatkan nilai tambah produk. Sedangkan komoditas kemiri yang tersebar di Parado, Wawo, Tambora, dan Donggo mengalami kendala alih fungsi lahan menjadi jagung, sehingga memerlukan alat pasca panen kemiri, freezer, alat pemecah, pengadaan bibit, irigasi pendukung, serta bantuan media tanam untuk mendukung pengembangan komoditas ini secara optimal. Selain itu, tebu yang menjadi komoditas unggulan di wilayah Sanggar, yang sudah bermitra dengan PT. SMS, menghadapi kendala ketersediaan bibit tebu yang perlu segera diatasi.

Peta sebaran lokasi prioritas sektor pertanian dan perkebunan ini menggambarkan jelas distribusi wilayah-wilayah yang menjadi fokus pengembangan setiap komoditas, sekaligus menampilkan kendala utama serta kebutuhan strategis yang harus dipenuhi. Dengan pemetaan ini, perencanaan dan pengelolaan sumber daya pertanian dapat dilakukan secara terarah dan efektif, serta mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bima secara berkelanjutan.



Gambar 3.8.

Peta Sebaran Lokasi Prioritas Sektor Pertanian dan Perkebunan

Sumber: Forum Koordinasi Data dan Arah Kewilayahan Berbasis Komoditas Unggulan Kabupaten Bima, 2025 (Diolah)



Berdasarkan **Surat Edaran bersama Nomor 100.2.4/3207/SJ Nomor 3 Tahun 2025** tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional tahun 2025-2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa tujuan dan pembinaan dan pengawasan kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan Program Strategis Nasional pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah untuk (1) Memastikan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menjadikan Program Strategis Nasional sebagai program kerja/kegiatan pemerintah daerah guna meningkatkan pertumbuhan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat; (2) Mengidentifikasi capaian dan hambatan dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional; (3) Memberikan saran perbaikan yang harus dilakukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan capaian dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 100.2.4/3207/SJ Nomor 3 Tahun 2025, **Program Strategis Nasional**, meliputi:

1. **Penanggulangan Kemiskinan** dengan proyek/kegiatan:
 - 1) Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
 - 2) Sekolah Rakyat
 - 3) Pembangunan 3 juta rumah
2. **Ketahanan pangan** dengan proyek/kegiatan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah
3. **Kesehatan** untuk semua dengan proyek/kegiatan
 - 1) Jaminan kesehatan nasional
 - 2) Makan bergizi gratis
 - 3) Perluasan akses pendidikan dengan proyek/kegiatan pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah
4. **Pertumbuhan ekonomi** dengan proyek/kegiatan
 - 1) Pengendalian inflasi
 - 2) Percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
 - 3) Kemudahan perizinan dai daerah
5. **Program strategis Nasional** dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

Program Strategis Nasional tersebut juga menjadi rujukan utama dalam perumusan Program Prioritas Daerah Kabupaten Bima, sehingga sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah dapat terwujud. Pemerintah Kabupaten Bima akan mengalokasikan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana untuk melaksanakan Program Strategis Nasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, upaya koordinasi akan diperkuat untuk memastikan implementasi yang efektif, serta melakukan evaluasi berkala untuk mengukur pencapaian dan dampak dari program-program yang dijalankan.

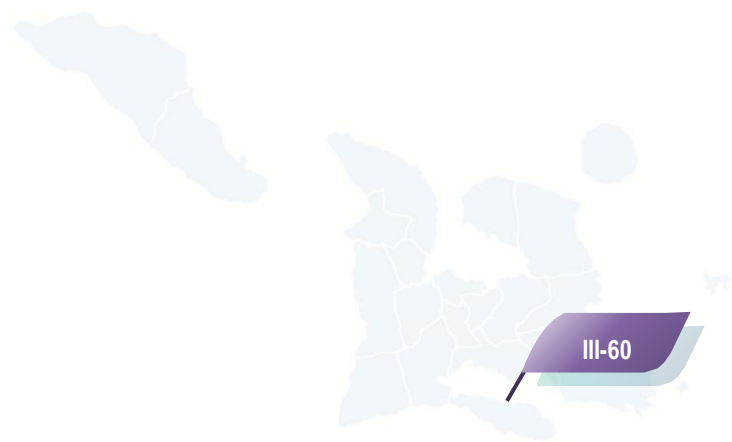
Berdasarkan program unggulan dan intervensi program unggulan (kegiatan strategis) sesuai janji politik Bupati dan Wakil Bupati, indikasi proyek strategis yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2029, dan arah pembangunan kewilayahan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029



khususnya yang berlokasi di Kabupaten Bima, serta **Surat Edaran bersama Nomor 100.2.4/3207/SJ Nomor 3 Tahun 2025**, maka selanjutnya dilakukan perumusan program prioritas Kabupaten Bima sebagaimana terdapat pada Tabel 3.9. Perumusan program prioritas dihasilkan dari *cascading* kinerja. *Cascading* kinerja tersebut dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Kategorisasi program pada RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok program, yaitu:

1. Program Prioritas (PP) 1: Kelompok Program yang selaras dengan kegiatan strategis Daerah dan/atau nasional dan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis daerah
2. Program Prioritas (PP) 2: Kelompok Program yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis daerah
3. Program Dukungan (PDu): Kelompok Program yang secara tidak langsung mendukung terhadap pencapaian sasaran strategis daerah

Adanya kategorisasi program menjadi pertimbangan dalam menetapkan alokasi pendanaan masing-masing program. Ini diharapkan agar alokasi anggaran lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD.





Tabel 3.9.
Program Prioritas Kabupaten Bima Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
Bima Bermartabat yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh dan Berkelanjutan	Misi I: Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, serta berdaya saing untuk mencapai pelayanan publik yang inovatif dan prima			Indeks Reformasi Birokrasi							
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)							
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)							
				Terwujudnya kelembagaan yang agile dan responsif	Indeks kematangan organisasi	PD 1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil	PU 1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima	Penataan Organisasi Perangkat Daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam fungsi dan kewenangan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Sekretariat Daerah
				Ketersediaan regulasi dan kebijakan publik yang adaptif dan berkualitas	Indeks reformasi hukum Indeks kualitas kebijakan	PD 1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil	PU 1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima	Penataan, sinkronisasi dan evaluasi regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Sekretariat Daerah
											Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah
				Terwujudnya proses pengadaan yang transparan dan akuntabel	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	PD 1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil	PU 1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
				Meningkatnya kualitas kerjasama daerah	Persentase kerjasama daerah yang direalisasikan	PD 1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil	PU 1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima	Penguatan kemitraan dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi/LPTK	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah
				Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	PD 1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil	PU 1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
				Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	PD 1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil	PU 1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
				Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	PD 1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil	PU 1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima	Optimalisasi penerapan <i>Money Follow Program</i> , guna memastikan anggaran dialokasikan pada program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan
				Meningkatnya kualitas tata kelola arsip	Nilai hasil pengawasan kearsipan	PD 1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil	PU 1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima	Penghematan anggaran dengan mengurangi belanja yang tidak produktif	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan
				Meningkatnya kualitas tata kelola arsip	Nilai hasil pengawasan kearsipan	PD 1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil	PU 1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima		Program Pengelolaan Arsip	Kearsipan
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PD 1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil	PU 1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima	Optimalisasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Program penyelenggaraan pengawasan Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Semua Bidang Urusan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
				Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	PD 1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil	PU 1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima	Optimalisasi penerapan <i>Money Follow Program</i> , guna memastikan anggaran dialokasikan pada program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.	Program pengelolaan keuangan daerah	Keuangan





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
										Penghematan anggaran dengan mengurangi belanja yang tidak produktif	Program pengelolaan keuangan daerah	Keuangan
										Penatakelolaan aset daerah berupa peningkatan kualitas dan kapasitas asrama mahasiswa di berbagai kota studi	Program pengelolaan barang milik daerah	Keuangan
											Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Bidang Urusan
				Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	PD 1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil	PU 1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
											Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Asistensi	
			Meningkatnya profesionalitas dan integritas ASN		Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)							
				Terwujudnya penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)	Indeks sistem merit	PD 1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil	PU 1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima	Pengembangan sistem penempatan ASN yang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan daerah, khususnya dalam mendukung pelayanan pemerintahan di wilayah perdesaan yang masih terisolir.	Program kepegawaian daerah	Kepegawaian
										Reformasi pendidikan dan pelatihan ASN agar lebih sinergis dan bertransformasi menjadi <i>learning governance</i> guna mendorong tercapainya ASN yang profesional serta terciptanya organisasi yang berkelanjutan.	Program pengembangan sumber daya manusia	Pendidikan dan Pelatihan
										Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah kecamatan dan pemerintahan desa	Program pengembangan sumber daya manusia	Pendidikan dan Pelatihan
										Lelang jabatan kepala sekolah, penilik, dan pengawas sekolah melalui uji kompetensi yang ketat	Program pengembangan sumber daya manusia	Pendidikan dan Pelatihan
				Meningkatnya integritas birokrasi	Nilai Survei Penilaian Integritas	PD 1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang	PU 1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif,	Pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Pengawas Penyelenggaraan





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
							Berorientasi Hasil		efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima			Pemerintahan Daerah
			Meningkatnya pelayanan publik yang prima		Indeks Pelayanan Publik (IPP)							
				Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	PD 1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil	PU 1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima	Penerapan pemerintahan berbasis elektronik, seperti e-Planning, e-budgeting, e-procurement, dan e-reporting	Program pengelolaan aplikasi informatika	Komunikasi dan Informatika
										Percepatan penyatuan data (satu data) seluruh instansi perangkat daerah	Program pengelolaan aplikasi informatika	Komunikasi dan Informatika
										Pengembangan smart office di perangkat daerah	Program pengelolaan aplikasi informatika	Komunikasi dan Informatika
											Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persandian
				Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	PD 1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasi	PU 1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Komunikasi dan Informatika
				Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks pembangunan statistik (IPS)	PD 1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasi	PU 1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Statistik
				Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik oleh perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik oleh perangkat daerah	PD 1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasi	PU 1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima		Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
											Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
											Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
				Meningkatkannya kualitas kebijakan dan kapasitas inovasi berbasis IPTEK yang kompetitif	Persentase kebijakan berbasis bukti Indeks Inovasi Daerah	PD 1	Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasi	PU 1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan
	Misi 2: Membangun Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan, Tangguh dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)							
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)							
					Prevalensi Stunting							
				Meningkatnya kesehatan keluarga	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	PD 2	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan dan Berdaya Saing	PU 2	Kesehatan Bermutu	Penyediaan rumah sakit rujukan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan
					Angka Kematian Ibu (AKI)					Penyediaan Rumah Singgah Pasien Mataram - Bali sebelum adanya Rumah Sakit Rujukan di Bima		
										Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana kesehatan secara merata dan bermutu		
										Penyediaan tenaga - tenaga dokter spesialis, perawat dan bidan secara merata dan proporsional	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	
										Pelayanan prima kesehatan berbiaya murah dan gratis bagi masyarakat prasejahtera	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	
										Pemberdayaan kader posyandu setiap Desa	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	
										Gerakan bebas <i>stunting</i> melalui pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan anak	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	
										Peningkatan kesejahteraan tenaga medis secara profesional dan proporsional melalui penghasilan tambahan (tamsil)	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)	Program Unggulan (PU)	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
								Penguatan program prornotif dan preventif dengan pembudayaan gerakan hidup sehat dalam masyarakat serta makanan yang dikonsumsi masyarakat Perbaikan sanitasi seperti tiap rumah tangga/wilayah memiliki jamban untuk meningkatkan kualitas hidup sehat Peningkatan peran aktif masyarakat pedesaan dalam memperoleh bantuan kesehatan (PBI JKN-KIS) Percepatan peningkatan kepesertaan JKN-KIS dan peningkatan kualitas layanan Kesehatan Peningkatan fungsi fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di setiap kecamatan dengan "Bima Menjenguk" Perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak "Bima Menjenguk"	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	
							PU 4 Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	Peningkatan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan angka kematian bayi	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga	PD 2 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan dan Berdaya Saing	PU 4 Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	Pengembangan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kepemudaan dan Olahraga





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
			Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)							
					Harapan Lama Sekolah (HLS)							
					Persentase Peserta Didik kabupaten Bima yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: (a) Literasi Membaca; dan (b) Numerasi							
			Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk bersekolah pada jenjang yang lebih tinggi, serta meningkatnya kualitas satuan pendidikan		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	PD 2	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan dan Berdaya Saing	PU 3	Pendidikan Unggul Berkualitas	Pembangunan <i>role model</i> sekolah ramah anak dan perempuan	Program pengelolaan pendidikan	Pendidikan
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat					Penyediaan dan pengembangan sarpras pendidikan secara merata dan bermutu		
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat					<i>Lab school</i> untuk siswa, guru, dan kepala sekolah berprestasi hebat		
										Penghasilan tambahan bagi guru/PTK berprestasi		
										Penerapan jam wajib belajar di rumah bagi anak dan orangtua		
										Penyediaan guru/PTK bermutu, merata dan proporsional		
										Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru/PTK		
										Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, yatim piatu dan tahfidz		
										Pendayagunaan Dewan Pendidikan		
										Penguatan kemitraan dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi/LPTK	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah
										Pemberian beasiswa bidik misi daerah	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	
											Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
			Meningkatnya literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)							
					Indeks Masyarakat Digital Daerah (IMDI)							
				Meningkatnya minat baca	Indeks Kegemaran Membaca (TGM)	PD 2	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan dan Berdaya Saing	PU 3	Pendidikan Unggul Berkualitas	Pembangunan pusat taman literasi masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan
			Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta kualitas keluarga		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika
					Indeks Perlindungan Anak (IPA)							
					Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)							
				Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	PD 2	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan dan Berdaya Saing	PU 4	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	Peningkatan akses anak-anak perempuan untuk memperoleh pendidikan	Program peningkatan kualitas keluarga	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Meningkatnya pemenuhan hak anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)						Program pemenuhan hak anak (PHA)	
				Meningkatnya status pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)					Fasilitasi peran perempuan/ibu dalam penguatan ekonomi keluarga	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	
										Fasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi wirausahawan		
										Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif	Program perlindungan perempuan	
										Peningkatan pelibatan perempuan ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga	Program peningkatan kualitas keluarga	





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
											Program Perlindungan Khusus Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
											Program Pengendalian Penduduk	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
											Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
											Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
						PD 5	Penguatan Kapasitas Pemahaman Keagamaan dan nilai sosial budaya berbasis lingkungan.	PU 13	Penguatan nilai-nilai kearifan lokal	Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif		Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)							
				Tertanganinya PPKS secara optimal	Persentase PPKS yang tertangani	PD 2	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan dan Berdaya Saing	PU 2	Kesehatan Bermutu	Percepatan peningkatan kepesertaan JKN-KIS dan peningkatan kualitas layanan Kesehatan	Program pemberdayaan sosial	Bidang Sosial
					Persentase penyandang disabilitas bekerja						Program Perlindungan dan jaminan sosial	Bidang Sosial
											Program Rehabilitasi Sosial	Bidang Sosial
	Misi III: Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan, Energi, Air melalui Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkeadilan			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)							
			Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur wilayah		Rasio Konektivitas							
					Tingkat Kemantapan Jalan							
					Rasio Permukiman Layak Huni							
				Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	Indeks Kepuasan Layanan Transportasi	PD 3	Infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung kawasan strategis	PU 8	Peningkatan Infrastruktur yang menunjang Kegiatan Usaha Warga dan dapat diakses untuk semua	Peningkatan sarana prasarana transportasi dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan
											Program Pengelolaan Pelayaran	Perhubungan





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu	
				Meningkatnya ketersediaan dan akses masyarakat terhadap infrastruktur bidang pekerjaan umum	Tingkat pemenuhan jalan kabupaten	PD 3	Infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung kawasan strategis	PU 5	Pembangunan Kota Woha sebagai Pusat Pemerintah dan Pusat Bisnis untuk wilayah sekitarnya	Penataan Ruang Kota Woha yang baru terintegrasi sebagai pusat pemerintah dan pusat bisnis bagi wilayah disekitarnya	Program penyelenggaraan jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh wilayah		Program penataan bangunan dan lingkungannya								
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)		Program penataan bangunan gedung								
			Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik		Pembangunan Sarana Perkantoran dipusatkan di Godo Kecamatan Woha			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah					
			Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik						PU 6	Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk menjamin pelayanan dasar warga	Pembangunan IPAL KOMUNAL di pusat Perkotaan		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
			Persentase penataan bangunan dan gedung						PU 7	Pemenuhan Kebutuhan perumahan layak huni dan air bersih bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah	Penyediaan air bersih melalui perluasan jaringan dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sumberdaya air		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
			Persentase luas layanan irigasi multikomoditas								Penyediaan sumber air komunal bagi wilayah Kecamatan		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
					Pemenuhan Kebutuhan Air Minum bagi Warga			Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum					
					PU 8			Peningkatan Infrastruktur yang menunjang Kegiatan Usaha Warga dan dapat diakses untuk semua	Keberlanjutan usulan Jalan dua Jalur dan Pembangunan Jembatan Lewamori	Program penyelenggaraan jalan			
									Pembangunan, peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan agar kondisi jalan dan jembatan Kabupaten mantap 100 persen	Program penyelenggaraan jalan			
				Pembukaan akses jalan strategis kabupaten menuju pusat produksi		Program penyelenggaraan jalan							





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
										Peningkatan sarana prasarana transportasi dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa	Program penyelenggaraan jalan	
										Pembangunan check dam, Embung dan Irigasi yang Terintegrasi.	Program pengelolaan sumber daya air	
										Pembangunan Rumah Adat dan Rumah budaya	Program penataan bangunan dan lingkungannya	
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	PD 3	Infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung kawasan strategis	PU 5	Pembangunan Kota Woha sebagai Pusat Pemerintah dan Pusat Bisnis untuk wilayah sekitarnya	Penataan Ruang Kota Woha yang baru terintegrasi sebagai pusat pemerintah dan pusat bisnis bagi wilayah disekitarnya	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
										Pembangunan Sarana Perkantoran dipusatkan di Godo Kecamatan Woha		
				Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indek tertib administrasi pertanahan	PD 3	Infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung kawasan strategis	PU 5	Pembangunan Kota Woha sebagai Pusat Pemerintah dan Pusat Bisnis untuk wilayah sekitarnya		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Pertanahan
											Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	
				Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan serta tertanganinya kawasan kumuh	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Persentase kawasan kumuh yang ditangani	PD 3	Infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung kawasan strategis	PU 6	Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk menjamin pelayanan dasar warga	Pemberian jaminan kemudahan berusaha bagi pihak swasta yang akan berinvestasi di wilayah pusat ibukota baru	Program pengembangan perumahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman
										Penataan kawasan kumuh menjadi kawasan bersih dan sehat	Program kawasan permukiman	
											Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
									PU 7	Pemenuhan Kebutuhan perumahan layak huni	Program kawasan permukiman	





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu	
								dan air bersih bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah	Pembaruan data perumahan tidak layak huni (rumah swadaya, dan rumah khusus)	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh		
	Misi IV: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Ekosistem Industri Komoditas Unggulan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif			Pertumbuhan Ekonomi							
					Kontribusi PDRB Kabupaten Bima Terhadap Provinsi							
					PDRB per kapita							
					Rasio Gini							
					Tingkat Kemiskinan							
			Meningkatkannya peran sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan		Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB							
					Nilai Tukar Petani (NTP)							
					Nilai Tukar Nelayan (NTN)							
			Meningkatnya kontribusi subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan perkebunan pada perekonomian, serta meningkatnya kesejahteraan petani	Kontribusi subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan terhadap PDRB	Nilai tukar petani subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan rakyat	PD 4	Kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan	PU 9	Peningkatan Kemandirian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	Penyediaan Balai Benih sebagai penjamin ketersediaan benih unggul untuk Masyarakat	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pertanian
										Pembangunan Gudang Penampungan dan Industri	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	
	Pengolahan Hasil Pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian										
	Kawasan Agrobisnis Bawang Merah mencakup wilayah kecamatan Belo, Lambu, Sape, Wera, Woha dan Monta	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian										
	Kawasan Pergudangan dan Industri Pengolahan Agrobisnis Jagung mencakup wilayah Kecamatan Wawo, Parado, Monta, Ambalawi, Soromandi dan Donggo	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian										
							Pembangunan Korporasi Usaha Warga (Pertanian, Peternakan dan Kelautan) sebagai Lokomotif menggerakkan usaha warga	Program penyuluhan pertanian				





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)	Program Unggulan (PU)	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
							PU 10 Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Penguatan Kelembagaan Keanggotaan Usaha Warga (Poktan/ Gapoktan/ Korporasi/ Corporate farming) dalam percepatan Adopsi Modernisasi Pertanian oleh Petani (Smart Farming and Digital Farming) Penyediaan pupuk bagi petani sehingga tidak terjadi kelangkaan pupuk di musim tanam dengan melakukan revitalisasi terhadap seluruh RDKK kelompok tani yang ada Peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan hasil produksi dengan memfasilitasi percepatan adopsi inovasi teknologi budi daya dan industrialisasi pengolahan hasil pascapanen Pengembangan komoditi agrobisnis dan agroindustri yang dapat meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong agar terjadi konsolidasi kelompok tani menjadi besar sehingga memiliki daya saing yang kuat	Program penyuluhan pertanian Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Program penyuluhan pertanian Program penyuluhan pertanian	Pertanian
				Meningkatnya kontribusi subsektor perikanan pada perekonomian dan meningkatnya kesejahteraan nelayan	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Nilai tukar petani subsektor perikanan tangkap Nilai tukar petani subsektor perikanan budidaya	PD 4 Kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan	PU 9 Peningkatan Kemandirian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	Pembangunan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap (Kelautan) Kawasan Tambora yang mencakup wilayah Sanggar Soromandi dan Donggo sebagai Kawasan Pariwisata Regional, Transmigrasi, Peternakan dan Perikanan (KSPN Tambora) Kawasan Industri Garam dan Budidaya Ikan yang mencakup Kecamatan Bolo, Woha dan Palibelo.	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Program pengelolaan perikanan budidaya Program pengelolaan perikanan budidaya Program pengelolaan perikanan budidaya	Kelautan dan Perikanan





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)	Program Unggulan (PU)	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
									Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	
								Kawasan "Dou Sila" mencakup Bolo, Madapangga, Soromandi sebagai Kawasan Pertanian Produktif sebagai Wilayah Perdesaan Baru dengan Pengelolaan sektor Industri unggulan Pertanian, peternakan, Perkebunan dan Perikanan	Program pengelolaan perikanan budidaya	
								Kawasan Minapolitan pada wilayah sentra perikanan laut mencakup Kecamatan Sape, Langgudu dan Sanggar	Program pengelolaan perikanan tangkap	
				Meningkatnya kontribusi subsektor peternakan pada perekonomian dan meningkatnya kesejahteraan peternak	Kontribusi PDRB subsektor peternakan	PD 4	Kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan	PU 9	Peningkatan Kemandirian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	Pertanian
					Nilai tukar petani subsektor peternakan				Penyediaan Balai Benih sebagai penjamin ketersediaan benih unggul untuk Masyarakat	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
									Pembangunan RPH warga, Pabrik Pakan Ternak dan Industri	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
									Pengolahan Hasil Peternakan.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
									Kawasan Tambora yang mencakup wilayah Sanggar Soromandi dan Donggo sebagai Kawasan Pariwisata Regional, Transmigrasi, Peternakan dan Perikanan (KSPN Tambora)	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
									Kawasan Sentra Peternakan Rakyat pada wilayah kawasan pelepasan budidaya sapi dan kerbau yang mencakup Kecamatan Wera, Lambu, Monta, Sanggar dan Tambora	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
									Pembangunan Korporasi Usaha Warga (Pertanian, Peternakan dan Kelautan) sebagai Lokomotif menggerakkan usaha warga	Program penyuluhan pertanian
										Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu									
								PU 10	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Penguatan Kelembagaan Keanggotan Usaha Warga (Poktan/ Gapoktan/ Korporasi/ Corporate farming) dalam percepatan Adopsi Modernisasi Pertanian oleh Petani (Smart Farming and Digital Farming)	Program penyuluhan pertanian	Pertanian									
										Pengembangan komoditi agrobisnis dan agroindustri yang dapat meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong agar terjadi konsolidasi kelompok tani menjadi besar sehingga memiliki daya saing yang kuat	Program penyuluhan pertanian										
			Meningkatnya peran industri pengolahan pada perekonomian daerah		Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB																
												Meningkatnya daya saing sektor industri pengolahan	Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada PDRB		PD 4	Kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan	PU 10	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pembentukan Usaha (Bisnis) Berskala Ekonomi yang berorientasi Pasar pada setiap Kawasan Desa (Sinergi Manajemen dan Sistem Hulu-hilir)	Program perencanaan dan pembangunan industri	Perindustrian
																			Fasilitasi Pengembangan Agro-industri dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk yang kuat (Dukungan Teknologi Tepat Guna, Pendampingan Sistem Budidaya dan Pembangunan Pergudangan dan Industri Pengolahan)	Program perencanaan dan pembangunan industri	
																				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
			Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB																
												Meningkatnya daya saing ekspor dan kelancaran	Net ekspor barang dan jasa		PD 4	Kemandirian ekonomi berbasis	PU 9	Peningkatan Kemandirian Daerah	Kawasan Strategis Perniagaan mencakup wilayah Kecamatan Woha, Bolo dan Sape	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Perdagangan





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
				distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok		kawasan strategis dan komoditas unggulan		Berbasis Potensi Unggulan	Pengembangan <i>market place</i> yang berorientasi pemasaran produk, baik yang bersifat <i>business to business</i> ataupun <i>business to consumers</i>	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	
											Program Pengembangan Ekspor	
											Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
			Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi pada perekonomian daerah		Kontribusi UMKM terhadap PDRB							
					Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB							
				Meningkatnya kapasitas koperasi dan usaha mikro	Persentase usaha mikro naik kelas	PD 4	Kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan	PU 10	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Penyediaan modal bagi masyarakat untuk meningkatkan peluang usahanya dengan meningkatkan Akses Dana Bergulir bagi pelaku usaha mikro dan ultramikro	Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
					Persentase koperasi sehat			PU 11	Pengembangan sistem pelatihan kewirausahaan	Peningkatan pelatihan kewirausahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil & usaha mikro	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
										Peningkatan akses permodalan bagi wirausahawan baru dengan menggunakan model pembiayaan non-konvensional sehingga memudahkan wirausahawan baru yang tidak memiliki aset		
										Percepatan tumbuhnya wirausahawan muda dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang melibatkan komunitas pendidikan dan sektor ekonomi kreatif		
											Program Pengembangan UMKM	





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu	
			Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif		Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB								
					Nilai tambah Ekonomi Kreatif								
				Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual	PD 4	Kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan	PU 9	Peningkatan Kemandirian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	Pembangunan Kawasan Strategis sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Komuditi Unggulan: Kawasan Tambora yang mencakup wilayah Sanggar Soromandi dan Donggo sebagai Kawasan Pariwisata Regional, Transmigrasi, Peternakan dan Perikanan (KSD N Tambora)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata	
											Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		
										Kawasan Ekosistem Hutan yang mencakup wilayah Parado, Langgudu, Wawo, Donggo, Tambora dan Lambitu sebagai Kawasan Industri Pariwisata Lokal	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
										Kawasan SABUA*RAWI mencakup wilayah Sape, Lambu, Wera dan Ambalawi sebagai wilayah Industri Pariwisata (Perpres 32 tahun 2018 tentang badan otoritas pengelolaan Pariwisata Labuan Bajo)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
				Program Pemasaran Pariwisata									
			Meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan merata		Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)								
				Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai produk dan layanan keuangan	Persentase peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan	PD 4	Kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan	PU 10 PU 11	Peningkatan Ekonomi Masyarakat		Program perekonomian dan pembangunan	Sekretariat Daerah	
			Pengembangan sistem pelatihan kewirausahaan						Peningkatan akses permodalan bagi wirausahawan baru dengan menggunakan model pembiayaan non-konvensional sehingga memudahkan wirausahawan baru yang tidak memiliki asset	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil & usaha mikro	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
			Terkendalinya inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Stabilnya harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Tingkat Inflasi Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok antar Waktu	PD 4	Kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan				Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)							
				Optimalnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah Persentase peningkatan realisasi Retribusi daerah	PD 4	Kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan	PU 9	Peningkatan Kemandirian Daerah Berbasis Potensi Unggulan		Program Pengelolaan pendapatan daerah	Keuangan
				Meningkatnya kinerja BUMD	Return on Asset (ROA) BUMD	PD 3	Infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung kawasan strategis	PU 7	Pemenuhan Kebutuhan perumahan layak huni dan air bersih bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah	Pengelolaan PDAM Bima secara proporsional	Program perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
						PD 4	Kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan	PU 9	Peningkatan Kemandirian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	Menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai Pusat investasi Pengembangan Ekonomi Daerah	Program perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya nilai investasi daerah		Persentase peningkatan nilai investasi							
				Meningkatnya minat investasi	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi Nilai realisasi investasi	PD 4	Kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan	PU 9	Peningkatan Kemandirian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	a. Pemetaan dan penataan potensi-potensi SDA b. Pemanfaatan potensi SDA berbasis partisipatif dan berkelanjutan. Peningkatan Iklim investasi berbasis kearifan lokal	Program pengembangan iklim penanaman modal Program pelayanan penanaman modal Program pengembangan iklim penanaman modal Program promosi penanaman modal	Penanaman Modal





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
			Meningkatnya kesempatan kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)							
				Meningkatnya daya saing ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	PD 4	Kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan	PU 11	Pengembangan Sistem Pelatihan Kewirausahaan	Pemberian akses kepada anak-anak yang putus sekolah dan tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan studinya dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga	Tenaga Kerja
					Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja						Program Penempatan tenaga kerja	
			Terwujudnya ketahanan pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)							
				Menurunnya ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen)	PD 4	Kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan	PU 9	Peningkatan Kemandirian Daerah Berbasis Potensi Unggulan		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pangan
			Meningkatnya kemandirian desa		Indeks Desa							
				Meningkatnya pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Persentase desa mandiri	PD 4	Kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan	PU 9	Peningkatan Kemandirian Daerah Berbasis Potensi Unggulan	Menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi Desa	Program administrasi pemerintahan desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
											Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
						PD 3	Infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung	PU 8	Peningkatan Infrastruktur yang menunjang Kegiatan Usaha Warga dan dapat diakses untuk semua	Pembukaan keterisolasian Desa dan Zero Blank spot dengan target semua Desa Berdering (komunikasi) dan Terang (kelistrikan)	Program pengelolaan aplikasi informatika	Komunikasi Dan Informatika





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
							kawasan strategis					
				Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Persentase Satuan Pemukiman (SP) transmigrasi yang berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	PD 3	Kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan	PU 8	Peningkatan Kemandirian Daerah Berbasis Potensi Unggulan		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Transmigrasi
			Meningkatnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah		Indeks Pembangunan Pemuda							
				Meningkatnya pemuda yang berwirausaha dan berprestasi	Rasio wirausaha pemuda Persentase peningkatan pemuda berprestasi	PD 2	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan dan Berdaya Saing	PU 4	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga
					Indeks Harmoni							
					Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)							
					Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)							
				Tertanganinya konflik Suku Agama, Ras dan Antargolongan (SARA)	Persentase konflik Suku Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang dapat terselesaikan	PD 5	Penguatan Kapasitas Pemahaman Keagamaan dan nilai sosial budaya berbasis lingkungan	PU 14	Pembinaan terhadap kader-kader muda pembangunan bidang lingkungan hidup dan budaya	Penguatan rasa toleransi yang kuat di kalangan muda sejak dini, melalui revitalisasi kegiatan kebersamaan lintas budaya, lintas suku, dan lintas agama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Pemerintahan Umum
								PU 15	Penegakan Hukum, Ketertiban dan Keamanan	Pembentukan Lembaga Mediasi Berbasis Kearifan Lokal	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
										Pembinaan dan Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	
										Penyuluhan kepada masyarakat dan remaja akan bahaya narkoba dan miras.	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	
	Misi V: Membangun Kapasitas Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak, Aman, Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya	Terwujudnya masyarakat yang Harmonis	Terwujudnya kemaslahatan beragama dan pemajuan kebudayaan									





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)	Program Unggulan (PU)	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
									Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
							PU 12	Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Pengamalan Kegamaan	Penguatan Masjid Agung terpadu sebagai pusat kajian dan pengembangan keagamaan, rumah tahfiz dan Gemas	Sekretariat Daerah
									Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pemerintahan Umum
									Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	
				Meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	PD 5	Penguatan Kapasitas Pemahaman Keagamaan dan nilai sosial budaya berbasis lingkungan	PU 3	Penguatan nilai-nilai kearifan lokal	Kebudayaan
									Pembangunan Desa Adat dan kesenian daerah Melaksanakan Gebyar adat dan budaya Tahunan	
									Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata budaya dan industri kreatif	
									Revitalisasi budaya daerah bima melalui pendataan potensi budaya masing-masing wilayah, peningkatan apresiasi dan literasi musik dalam pendidikan, maupun penyiapan infrastruktur pendukung	
							PU 14	Pembinaan terhadap Kader-kader muda pembangunan bidang lingkungan hidup dan budaya	Peningkatan program pertukaran pemuda lintas budaya, lintas segmen sosio- ekonomi, dan lintas etnis	Program Pengembangan Kebudayaan
							PU 9	Peningkatan Kemandirian Daerah Berkas Potensi Unggulan	Kawasan Cagar Budaya mencakup kecamatan Wawo, Lambitu, Donggo dan Soromandi	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
									Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Terwujudnya keamanan daerah		Indeks Kriminalitas					
				Meningkatnya kinerja penyelenggaraan trantibum yang	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Suburusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PD 5	Penguatan Kapasitas Pemahaman Keagamaan	PU 15	Penegakan Hukum, Ketertiban dan Keamanan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta
									Penguatan Gerakan Sadar Hukum Pemuda Pelopor Desa Pembentukan Satgas Penegakan Peraturan Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu	
				efektif, efisien, transparan dan akuntabel			dan nilai sosial budaya berbasis lingkungan			Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Pengendalian keamanan lingkungan		Pelindungan Masyarakat	
		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)						Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)	
			Meningkatnya kualitas Air, udara, dan lahan serta menurunnya GRK		Indeks Kualitas Air								
					Indeks Kualitas Udara								
					Indeks Kualitas Lahan								
					Persentase Penurunan Emisi GRK:								
					(a) Kumulatif								
					(b) Tahunan								
				Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan pencemaran air	PD 5	Penguatan Kapasitas Pemahaman Keagamaan dan nilai sosial budaya berbasis lingkungan	PU 15	Pembinaan terhadap Kader-kader muda pembangunan bidang lingkungan hidup dan budaya	Fasilitasi keterlibatan anak muda dalam bidang pelestarian lingkungan hidup, seperti komunitas pencinta alam, komunitas peduli sampah, komunitas pencinta hewan, dan sebagainya	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Lingkungan Hidup	
					Persentase penurunan pencemaran udara								
					Indeks kinerja pengelolaan sampah								
					Persentase RTH terhadap Luas Wilayah Daratan								
			Meningkatnya resiliensi terhadap		Indeks Risiko Bencana (IRB)								





Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Prioritas Daerah (PD)		Program Unggulan (PU)		Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025)	Urusan Pengampu
			bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya kemampuan daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana	Indeks ketahanan daerah	PD 5	Penguatan Kapasitas Pemahaman Keagamaan dan nilai sosial budaya berbasis lingkungan	PU 15	Penegakan hukum, ketertiban dan keamanan	Peningkatan kesetiakawanan sosial antar warga dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama, serta dalam penanganan bencana.	Program Penanggulangan Bencana	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Suburusan Bencana
				Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas suburusan kebakaran					Peningkatan sosialisasi/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat		
											Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan nonkebakaran	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Suburusan Kebakaran





RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bima Tahun 2025-2029

Bab 4

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH





4.1. Program Perangkat Daerah

Subbab Program Perangkat Daerah memuat dua bagian utama. **Pertama**, daftar program perangkat daerah tahun 2025–2029 yang menjadi instrumen dalam mencapai sasaran dan target kinerja pembangunan daerah. **Kedua**, indikator program, target capaian, serta pagu indikatif program perangkat daerah tahun 2025–2029, yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan perangkat daerah. Penyusunan program perangkat daerah Kabupaten Bima periode 2025–2029 dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada klasifikasi urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan, program-program tersebut mencakup: 6 urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 urusan pilihan, 2 unsur pendukung urusan pemerintahan, 4 unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 unsur Kewilayahan, dan 1 unsur pemerintahan umum. Nomenklatur program perangkat daerah yang digunakan dalam dokumen ini merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1–2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan acuan tersebut, program perangkat daerah Kabupaten Bima periode 2025–2029 disusun dan diuraikan pada bagian berikut secara terstruktur sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4.1.1. Daftar Program Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan

1. Pendidikan

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar, termasuk pembangunan sekolah dasar unggul yang dikembangkan berdasarkan kekhasan potensi ekonomi, sosial, dan budaya setempat. Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan pendidikan unggul berkualitas. Intervensi program unggulan ini melalui: (1) Pembangunan *role model* sekolah ramah anak dan perempuan; (2) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan secara merata dan bermutu; (3) *Lab school* untuk siswa, guru, dan kepala sekolah berprestasi hebat; (4) Penghasilan tambahan bagi guru/PTK berprestasi; (5) Pusat taman literasi masyarakat; (6) Program jam wajib belajar di rumah bagi anak dan orangtua; (7) Penyediaan guru/PTK bermutu, merata dan proporsional; (8) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru/PTK; (9) Program beasiswa bagi siswa berprestasi, yatim piatu dan tahfidz; dan (10) Pendayagunaan Dewan Pendidikan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, dan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan nonformal/kesetaraan.



d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada penerbitan izin pendidikan dasar, PAUD, dan nonformal (kejar paket) yang diselenggarakan oleh masyarakat.

e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini diarahkan pada pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah lokal Bima.

2. Kesehatan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kabupaten serta jaminan kesehatan masyarakat. Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan pelayanan dasar dan jaminan kesehatan bermutu. intervensi program unggulan ini melalui:

- 1) Penyediaan rumah sakit rujukan;
- 2) Penyediaan rumah singgah pasien Mataram-Bali sebelum adanya rumah sakit rujukan di Bima;
- 3) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana kesehatan secara merata dan bermutu;
- 4) Pelayanan prima kesehatan berbiaya murah dan gratis bagi masyarakat prasejahtera;
- 5) Gerakan bebas *stunting* melalui pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan anak;
- 6) Memperkuat program prornotif dan preventif dengan pembudayaan gerakan hidup sehat dalam masyarakat serta makanan yang di konsumsi masyarakat;
- 7) Pembangunan infrastruktur dasar, terutama SPAM dan perbaikan sanitasi, seperti tiap rumah tangga/wilayah memiliki jamban, untuk meningkatkan kualitas hidup sehat;
- 8) Mendorong agar masyarakat yang berada di wilayah pedesaan untuk mendapatkan bantuan kesehatan (PBI JKN-KIS);
- 9) Memastikan program JKN-KIS melalui percepatan peningkatan kepesertaan JKN-KIS serta peningkatan kualitas layanan kesehatan;
- 10) Memfungsikan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di setiap kecamatan dengan "Bima Menjenguk";
- 11) Memperbaiki fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak "Bima Menjenguk".

Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga dengan satu intervensi program unggulan melalui peningkatan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan angka kematian bayi.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan pelayanan dasar dan jaminan kesehatan bermutu. Intervensi program unggulan ini melalui: (1) Penyediaan tenaga-tenaga dokter spesialis, perawat dan bidan secara merata dan proporsional; dan (2) Pemberdayaan kader posyandu setiap Desa.



c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada upaya penyediaan alat kesehatan dan makanan dan minuman yang sesuai dengan standar serta alat farmasi yang terstandirisasi.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada upaya pemenuhan derajat kesehatan masyarakat secara inklusi termasuk pada kelompok masyarakat rentan. Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan pelayanan dasar dan jaminan kesehatan bermutu. Intervensi program unggulan ini melalui pemberdayaan kader posyandu setiap desa.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pengelolaan dan penjaminan kualitas sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Program ini mendukung pencapaian program unggulan meningkatkan infrastruktur yang menunjang kegiatan usaha warga dan dapat di akses untuk semua. Intervensi program melalui pembangunan cak dam, embung dan irigasi yang terintegrasi.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada capaian pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan. Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan terpenuhinya kebutuhan perumahan layak huni dan air bersih bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Intervensi program melalui penyediaan air bersih melalui perluasan jaringan dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sumberdaya air.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah rumah tangga komunal. Program ini mendukung pencapaian program unggulan membangun Kota Woha sebagai pusat pemerintah dan pusat bisnis untuk wilayah sekitarnya. Intervensi program melalui pembangunan IPAL Komunal di pusat perkotaan.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pengembangan dan pengelolaan sistem pembangunan drainase dan trotoar meliputi jalan kabupaten dan jalan lingkungan.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada penataan bangunan gedung perkantoran dan bangunan gedung publik lainnya.

f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan bangunan gedung agar selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten. Program ini mendukung pencapaian program unggulan membangun Kota Woha sebagai pusat pemerintah dan pusat bisnis untuk wilayah sekitarnya. Intervensi program melalui: (1) Penataan ruang Kota Woha yang baru terintegrasi sebagai pusat pemerintah dan pusat bisnis bagi wilayah disekitarnya; dan (2) Pembangunan sarana perkantoran dipusatkan di Godo Kecamatan Woha. Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal.



Intervensi program tersebut melalui: (1) Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA); dan (2) Pembangunan rumah adat dan rumah budaya

g. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan penyelenggaraan layanan jalan dalam kondisi baik dan mantap. Program ini mendukung pencapaian program unggulan membangun Kota Woha sebagai pusat pemerintah dan pusat bisnis untuk wilayah sekitarnya. Intervensi program unggulan melalui penataan ruang Kota Woha yang baru terintegrasi sebagai pusat pemerintah dan pusat bisnis bagi wilayah disekitarnya. Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan meningkatkan infrastruktur yang menunjang kegiatan usaha warga dan dapat di akses untuk semua. Intervensi program melalui: (1) Keberlanjutan usulan jalan 2 Jalur dan pembangunan jembatan Lewamori; (2) Pembangunan dan memastikan kondisi jalan dan jembatan Kabupaten mantap 100 persen; (3) Pembukaan akses jalan strategis kabupaten menuju pusat produksi; dan (4) Peningkatan sarana prasarana transportasi dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan peningkatan kualitas pengerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi.

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi serta pendistribusian dan serah terima rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten. Program ini mendukung pencapaian program unggulan membangun Kota Woha sebagai pusat pemerintah dan pusat bisnis untuk wilayah sekitarnya. Intervensi program melalui pemberian jaminan kelonggaran bagi pihak swasta yang mau berinvestasi di wilayah pusat ibukota baru.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pengembangan kawasan permukiman yang layak dan penataan permukiman. Program ini mendukung pencapaian program unggulan membangun Kota Woha sebagai pusat pemerintah dan pusat bisnis untuk wilayah sekitarnya. Intervensi program melalui penataan terhadap kawasan kumuh menjadi kawasan bersih dan sehat. Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan terpenuhinya kebutuhan perumahan layak huni dan air bersih bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Intervensi program melalui revitalisasi data perumahan tidak layak huni (rumah swadaya, dan rumah khusus).

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan terpenuhinya kebutuhan perumahan layak huni dan air bersih bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Intervensi program melalui Revitalisasi data perumahan tidak layak huni (rumah swadaya, dan rumah khusus).

**d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

Program ini diarahkan peningkatan perumahan yang terlayani PSU.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelesaian gangguan ketertiban umum serta penerbitan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Program ini mendukung pencapaian program unggulan penegakan hukum, ketertiban dan keamanan. intervensi program tersebut melalui: (1) gerakan sadar hukum pemuda pelopor desa; dan (2) Satgas penegakan peraturan daerah. Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Intervensi program tersebut melalui penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada pelayanan informasi, dan pencegahan daerah rawan bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini mendukung pencapaian program unggulan penegakan hukum, ketertiban dan keamanan. intervensi program tersebut melalui: (1) peningkatan kesetiakawanan sosial antarwarga dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama, serta dalam penanganan bencana; dan (2) sosialisasi/pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana di tingkat masyarakat.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Nonkebakaran

Program ini diarahkan pada pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah.

6. Sosial**a. Program Pemberdayaan Sosial**

Program ini diarahkan pada upaya penurunan angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan peningkatan potensi kesejahteraan sosial bagi kelompok-kelompok rentan.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, serta Penerima Layanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada pemeliharaan anak-anak terlantar serta pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten. Program ini juga berkontribusi dalam upaya penurunan prevalensi stunting, karena apabila masyarakat miskin mendapat jaminan sosial maka kebutuhan dasar mereka yang meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi akan terpenuhi sehingga berpengaruh pada meningkatnya derajat kesehatan keluarganya.

**d. Program Penanganan Bencana**

Program ini diarahkan pada perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada pemeliharaan taman makam pahlawan nasional

7. Tenaga Kerja**a. Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada peningkatan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja swasta. Program ini mendukung pencapaian program unggulan mengembangkan sistem pelatihan kewirausahaan. intervensi program melalui pemberian akses kepada anak-anak yang putus sekolah dan tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan studinya dengan/meningkatkan pendidikan dan keterampilan.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten serta peningkatan informasi penempatan kerja.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. Program ini mendukung pencapaian program unggulan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga. intervensi program unggulan ini melalui fasilitasi peran perempuan/ibu dalam penguatan ekonomi keluarga.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. Program ini mendukung pencapaian program unggulan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga. Intervensi program ini melalui: (1) Fasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi



wirausahawan; dan (2) Fasilitasi perempuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan untuk membangun keluarga yang berdaya, sejahtera, dan inklusif melalui penguatan kapasitas, layanan, serta pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak. Program ini menitikberatkan pada upaya sistematis untuk memperkuat peran keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang memiliki fungsi perlindungan, pendidikan, kesejahteraan, dan pengasuhan yang adil serta setara.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait pengarusutamaan gender (PUG) serta pemenuhan hak anak di tingkat daerah. Program ini menjadi fondasi penting bagi pemerintah Kabupaten Bima dalam memperkuat tata kelola data lintas sektor sehingga setiap kebijakan, perencanaan, hingga evaluasi pembangunan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada Pelembagaan program pemenuhan hak anak, serta Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Program ini mendukung pencapaian program unggulan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga. intervensi program melalui peningkatan akses anak-anak perempuan untuk memperoleh pendidikan. Program ini mendukung pencapaian program unggulan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal. Intervensi program tersebut melalui membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

9. Pangan

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada peningkatan penangaan kawasan rawan pangan dan pembuatan peta keretakan serta ketahanan pangan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan



Program ini diarahkan pada pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten.

10. Pertanian

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada upaya penyelesaian konflik tanah garapan. Tanah garapan merupakan sebidang tanah yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh seseorang atau pihak lain, meskipun status hukumnya belum jelas atau diakui.

b. Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program ini diarahkan pada penyelesaian ganti untung terhadap tanah terdampak pelaksanaan pembangunan.

c. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Rugi Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Program ini diarahkan pada penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

d. Program Penatagunaan Tanah

Program Penatagunaan Tanah diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan tanah yang tertib, terencana, dan terintegrasi antarwilayah. Program ini meliputi penataan dan perencanaan penggunaan tanah pada hamparan yang berada dalam satu daerah kabupaten/kota, serta pada hamparan yang melintasi beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi guna memastikan konsistensi dan keterpaduan pemanfaatan ruang. Selain itu, program ini mencakup koordinasi perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah pasca reklamasi, agar pemanfaatannya sesuai ketentuan, memperhatikan aspek keberlanjutan, dan mendukung kepentingan pembangunan wilayah.

11. Lingkungan Hidup

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten serta penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten.

c. Program Pengelolaan Keanekaagaman Hayati

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten.

e. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Program ini diarahkan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), termasuk kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak-hak mereka yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan



Lingkungan Hidup (PPLH). Upaya ini mencakup identifikasi, verifikasi, dan penetapan MHA serta pendokumentasian sistem pengetahuan tradisional yang relevan bagi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu, program ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan MHA agar mampu mempertahankan dan mengembangkan peran mereka dalam pengelolaan lingkungan. Penguatan kapasitas meliputi aspek tata kelola adat, pemahaman terhadap hak lingkungan, serta kemampuan berpartisipasi dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan lingkungan hidup.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami, menjaga, dan mengelola lingkungan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup. Melalui penguatan lembaga kemasyarakatan, program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu-isu lingkungan seperti pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim, dan perilaku ramah lingkungan. Arah program mencakup penyediaan materi edukasi yang relevan, peningkatan kompetensi kader lingkungan, serta pengembangan model pembelajaran dan penyuluhan yang partisipatif. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup daerah secara berkelanjutan.

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

i. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten maupun swasta dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah.

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada peningkatan layanan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pendaftaran penduduk.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada peningkatan layanan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan catatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada penyusunan dan peningkatan publikasi profil kependudukan.



13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan penataan desa melalui kegiatan fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada Peningkatan fasilitasi fasilitasi kerja sama antar desa.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Program ini mendukung pencapaian program unggulan membangun kemandirian daerah. Intervensi program tersebut melalui upaya menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lokomotif pembangunan ekonomi desa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh KB, pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu angka kesertaan KB MKJP. Program ini juga berkontribusi terhadap peurunan prevalensi *stunting*. Dengan adanya pemakaian kontrasepsi, maka kehamilan akan lebih terencana dan pada akhirnya akan mengurangi resiko bayi lahir dengan kecacatan.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten. Program ini mendukung pencapaian program unggulan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga. Intervensi program melalui (1) Peningkatan akses anak-anak



perempuan untuk memperoleh pendidikan; dan (2) Peningkatan pelibatan perempuan ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga

15. Perhubungan

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada penetapan rencana induk jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan serta sarana dan prasarana jalan meliputi penyediaan bus sekolah tambahan. Program ini mendukung pencapaian program unggulan peningkatan infrastruktur yang menunjang kegiatan usaha warga dan dapat di akses untuk semua. Intervensi program melalui peningkatan sarpras transportasi dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program pengelolaan pelayaran diarahkan untuk memperkuat tata kelola perizinan, keselamatan, dan pelayanan transportasi laut, sungai, dan danau di tingkat kabupaten/kota. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh kegiatan pelayaran memiliki legalitas, standar operasional, dan pengelolaan pelabuhan yang memenuhi ketentuan teknis serta mendukung konektivitas wilayah. Melalui penerbitan izin usaha angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan, program ini memastikan bahwa badan usaha maupun perorangan yang beroperasi memiliki kompetensi dan kepastian hukum. Selain itu, penetapan lintas penyeberangan, persetujuan pengoperasian kapal, serta penetapan tarif angkutan penumpang dan kendaraan dilakukan untuk menjamin keamanan, keterjangkauan, dan keteraturan layanan transportasi antarwilayah.

16. Komunikasi dan Informatika

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada pengelolaan *e-government* meliputi melalui kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah kabupaten, dan pengelolaan *e government* di lingkup pemerintah daerah kabupaten. Program ini mendukung pencapaian program unggulan penerapan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan melayani melalui *merit sistem* berbasis elektronik dan pelayanan publik. Program unggulan ini memiliki intervensi program melalui: (1) Penerapan pemerintahan berbasis elektronik, seperti *e-planning*, *e-budgeting*, *e-procurement*, dan *e-reporting*; dan (2) Percepatan penyatuan data (satu data) seluruh instansi perangkat daerah. Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan mengembangkan aparatur sipil negara yang profesional dengan intervensi program unggulan melalui pengembangan tempat kerja yang berbasis teknologi informasi (*smart office*). Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan meningkatkan Infrastruktur yang menunjang kegiatan usaha warga dan dapat di akses untuk semua dengan intervensi program unggulan melalui



pembukaan keterisolasian desa dan *zero blank spot* dengan target semua desa berdering (komunikasi) dan terang (kelistrikan).

17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum, tata kelola, dan pengawasan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam di tingkat kabupaten/kota. Fokus program ini adalah memastikan bahwa setiap koperasi yang beroperasi memiliki legalitas usaha yang jelas dan memenuhi standar kelembagaan sesuai ketentuan. Arah program meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya berada dalam daerah kabupaten/kota, serta penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi. Langkah ini dilakukan untuk mendukung perluasan pelayanan koperasi kepada anggota, meningkatkan akses layanan keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kelembagaan koperasi yang sehat dan terpercaya. Program ini secara keseluruhan memastikan terselenggaranya layanan perizinan simpan pinjam yang tertib, cepat, dan akuntabel guna mendukung keberlanjutan operasional koperasi di daerah.

b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota.

c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.

e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten.

f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Program ini mendukung pencapaian program unggulan mengembangkan sistem pelatihan kewirausahaan. Intervensi program unggulan melalui: (1) Peningkatan pelatihan kewirausahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi; (2) Peningkatan akses permodalan bagi wirausahawan baru dengan menggunakan model pembiayaan non-konvensional sehingga memudahkan wirausahawan baru yang tidak memiliki asset; dan (3) Percepatan tumbuhnya wirausahawan muda dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang melibatkan komunitas pendidikan dan sektor ekonomi kreatif. Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat. Intervensi program tersebut melalui: (1)



Peningkatan akses permodalan bagi wirausahawan baru dengan menggunakan model pembiayaan non-konvensional sehingga memudahkan wirausahawan baru yang tidak memiliki asset; dan (2) Percepatan tumbuhnya wirausahawan muda dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang melibatkan komunitas pendidikan dan sektor ekonomi kreatif.

g. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

18. Penanaman Modal

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota serta pembuatan peta potensi investasi. Program ini mendukung pencapaian program unggulan membangun kemandirian daerah. Intervensi program tersebut melalui Pemetaan dan penataan potensi SDA.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Program ini mendukung pencapaian program unggulan membangun kemandirian daerah. Intervensi program tersebut melalui Iklim investasi berbasis kearifan lokal.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Program ini mendukung pencapaian program unggulan membangun kemandirian daerah. Intervensi program tersebut melalui pemanfaatan potensi SDA berbasis partisipatif dan berkelanjutan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.

19. Kepemudaan dan Olahraga

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda, kepemudaan, serta organisasi pemuda terhadap pemuda pelopor di tingkat kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader di kabupaten. Program ini mendukung pencapaian program unggulan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga. Intervensi program melalui peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan organisasi olahraga, serta



penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat daerah. Program ini merupakan upaya dalam mengoptimalkan pembinaan cabang olahraga. program ini mendukung pencapaian program unggulan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga. Intervensi program melalui: (1) Pengembangan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan; dan (2) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

20. Statistik

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan data statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten.

21. Persandian

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antarperangkat daerah kabupaten.

22. Kebudayaan

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada pengelolaan kebudayaan dan pelestarian kesenian yang pelakunya adalah masyarakat daerah, serta pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah. Program ini mendukung pencapaian program unggulan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal. Intervensi program tersebut melalui: (1) Pengembangan desa adat dan kesenian daerah melaksanakan gebyar adat dan budaya tahunan; (2) Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata budaya dan industri kreatif; dan (3) Menghidupkan kembali budaya daerah bima melalui pendataan potensi budaya masing-masing wilayah, peningkatan apresiasi dan literasi musik dalam pendidikan, maupun penyiapan infrastruktur pendukung. Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan pembinaan terhadap kader-kader muda pembangunan bidang lingkungan hidup dan budaya. Intervensi program tersebut melalui optimalisasi program pertukaran pemuda lintas budaya, lintas segmen sosio-ekonomi, dan lintas etnis.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada pengenalan kesenian daerah. Dengan kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota mampu meningkatkan perlindungan Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK).

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada Pembinaan, pengkajian, dan pendokumentasian sejarah lokal.

**d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

Program ini diarahkan pada Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten, penerbitan izin membawah cagar budaya ke luar daerah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada Pengembangan dan peningkatan koleksi, serta sarana dan prasarana permuseuman.

23. Perpustakaan**a. Program Pembinaan Perpustakaan**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembinaan perpustakaan program ini diarahkan pada pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten. Program ini mendukung pencapaian program unggulan pelayanan dan pengembangan pendidikan unggul berkualitas. Intervensi program unggulan melalui pusat taman literasi masyarakat.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan untuk menjaga, merawat, dan mengembangkan warisan budaya daerah melalui pelestarian naskah kuno serta koleksi budaya etnis Nusantara yang dimiliki atau ditemukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa peninggalan sejarah dan kekayaan pengetahuan lokal terlindungi dari kerusakan, kehilangan, dan kepunahan. Arah program mencakup kegiatan inventarisasi, konservasi, digitalisasi, dan penyimpanan naskah kuno milik daerah, serta pengembangan koleksi budaya yang merepresentasikan kekayaan etnis dan sejarah lokal. Upaya ini bertujuan memperkuat identitas budaya, memperkaya sumber penelitian, serta menyediakan akses bagi masyarakat dan generasi muda untuk mengenal warisan sejarah daerahnya. Secara keseluruhan, program ini mendukung pelestarian nilai budaya lokal sekaligus memperkuat peran daerah dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya nasional.

24. Kearsipan**a. Program Pengelolaan Arsip**

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan arsip dinamis dan statis daerah serta pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten.

25. Kelautan dan Perikanan**a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. Program ini mendukung pencapaian program unggulan membangun kemandirian daerah. Intervensi program tersebut melalui Kawasan Minapolitan pada wilayah sentra perikanan laut mencakup Kecamatan Sape, Lenggudu dan Sanggar.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dan peningkatan penggunaan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta



tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. Program ini mendukung pencapaian program unggulan membangun kemandirian daerah. intervensi program tersebut melalui: (1) Kawasan Terpadu Mandiri Tambora dan sekitarnya yang mencakup wilayah Sanggar Soromandi dan Donggo sebagai Kawasan Pariwisata Regional, Transmigrasi, Peternakan dan Perikanan (KSPN Tambora); (2) Kawasan Industri Garam dan Budidaya Ikan yang mencakup Kecamatan Bolo, Woha dan Palibelo; dan (3) Kawasan Sentra Pertanian dan Perikanan Dou Sila mencakup Bolo, Madapangga, Soromandi sebagai Kawasan Pertanian Produktif sebagai Wilayah Perdesaan Baru dengan Pengelolaan sektor Industri unggulan Pertanian, peternakan, Perkebunan dan Perikanan.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan untuk memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan melalui pengawasan yang efektif di wilayah perairan darat seperti sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang berada dalam kewenangan kabupaten/kota. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak, memastikan kepatuhan terhadap perizinan, serta menjaga kualitas ekosistem perairan. Selain itu, program ini mencakup penanganan perkara dan penerapan sanksi administratif terkait pelanggaran perizinan di sektor perikanan pada tingkat daerah. Melalui penegakan aturan yang tegas dan terukur, pemerintah daerah bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta melindungi keberlanjutan sumber daya ikan bagi masyarakat. Secara keseluruhan, program ini mendukung terciptanya pengawasan perikanan yang tertib, berkelanjutan, dan mampu menjaga keseimbangan ekologi serta kesejahteraan nelayan lokal.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten. Program ini mendukung pencapaian program unggulan membangun kemandirian daerah. intervensi program tersebut melalui membangun industri pengolahan hasil perikanan tangkap (kelautan).

26. Pariwisata

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata serta optimalisasi pengelolaan destinasi wisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten. Program ini mendukung pencapaian program unggulan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal. Intervensi program tersebut melalui Menghidupkan kembali budaya daerah bima melalui pendataan potensi budaya masing-masing wilayah, peningkatan apresiasi dan literasi musik dalam pendidikan, maupun penyiapan infrastruktur pendukung.



c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Program ini mendukung pencapaian program unggulan. Intervensi program tersebut melalui Kawasan La Sakosa mencakup wilayah Sape, Lambu, Wera dan Ambalawi sebagai wilayah Industri Pariwisata (Perpres 32 tahun 2018 tentang Badan Otoritas Pengelolaan Pariwisata Labuan Bajo).

27. Pertanian

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota. Program ini mendukung pencapaian program unggulan membangun kemandirian daerah. intervensi program tersebut melalui:

- 1) Penyediaan balai benih sebagai penjamin ketersediaan benih unggul untuk masyarakat.
- 2) Pembangunan gudang penampungan dan industri pengolahan hasil pertanian
- 3) Pembangunan RPH warga, pabrik pakan ternak dan industri pengolahan hasil peternakan.
- 4) Pengembangan kawasan terpadu mandiri Tambora dan sekitarnya yang mencakup wilayah Sanggar Soromandi dan Donggo sebagai Kawasan Pariwisata Regional, Transmigrasi, Peternakan dan Perikanan (KSPN Tambora)
- 5) Pengembangan Kkawasan sentra pertanian dan perikanan Dou Sila mencakup Bolo, Madapangga, Soromandi sebagai kawasan pertanian produktif sebagai wilayah perdesaan baru dengan pengelolaan sektor Industri unggulan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan meningkatkan ekonomi daerah. intervensi program tersebut melalui:

- 1) Pemantapan ketersediaan pupuk bagi petani sehingga tidak terjadi kelangkaan pupuk di musim tanam dengan melakukan revitalisasi terhadap seluruh RDKK kelompok tani yang ada (Budidaya Hortikultura, Palawija dan peternakan).
- 2) Peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan hasil produksi dengan memfasilitasi percepatan adopsi inovasi teknologi budidaya dan industrialisasi pengolahan hasil pascapanen

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada Pengembangan dan peningkatan prasarana pertanian. Program ini mendukung pencapaian program unggulan membangun kemandirian daerah. Intervensi program tersebut melalui:

- 1) Pengembangan kawasan agrobisnis bawang merah mencakup wilayah kecamatan Belo, Lambu, Sape, Wera, Wohu dan Monta



- 2) Pengembangan kawasan pergudangan dan industri pengolahan agrobisnis jagung mencakup wilayah Kecamatan Wawo, Parado, Monta, Ambalawi, Soromandi dan Donggo
- 3) Pengembangan kawasan sentra peternakan rakyat pada wilayah kawasan pelepasan budidaya sapi dan kerbau yang mencakup Kecamatan Wera, Lambu, Monta, Sanggar dan Tambora

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada penjaminan dan pengawasan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertanian melalui penerbitan izin usaha yang beroperasi dalam wilayah kabupaten/kota. Fokus utama program adalah memastikan bahwa setiap kegiatan usaha pertanian—mulai dari budidaya, produksi, hingga pelayanan kesehatan hewan—memenuhi standar teknis, kesehatan, dan keamanan pangan sesuai ketentuan. Arah program mencakup penerbitan izin usaha pertanian, izin produksi benih/bibit ternak dan pakan, serta perizinan bagi fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan atau pasar hewan, dan rumah potong hewan. Melalui mekanisme perizinan yang tertib, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah bertujuan mendukung pengembangan usaha pertanian yang produktif, aman, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, program ini memastikan kegiatan usaha pertanian di daerah berlangsung sesuai standar, mendukung peningkatan nilai tambah, dan menjaga kesehatan hewan serta keamanan pangan bagi masyarakat.

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan kemandirian pangan daerah. Program ini mendukung pencapaian program unggulan membangun kemandirian daerah. Intervensi program tersebut melalui membangun korporasi usaha warga (pertanian, peternakan dan kelauatan) sebagai lokomotif menggerakkan usaha warga. Program ini juga mendukung pencapaian program prioritas meningkatkan ekonomi masyarakat. Intervensi program tersebut melalui memperkuat kelembagaan keanggotaan usaha warga (Poktan/Gapoktan/Korporasi/*Corporate farming*) dalam percepatan adopsi modernisasi pertanian oleh petani (*Smart Farming and Digital Farming*). Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan meningkatnya ekonomi masyarakat. Intervensi program unggulan tersebut melalui:

- 1) Peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan hasil produksi dengan memfasilitasi percepatan adopsi inovasi teknologi budidaya dan industrialisasi pengolahan hasil pascapanen
- 2) Pengembangan komoditi agrobisnis dan agroindustri yang dapat meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong agar terjadi konsolidasi kelompok tani menjadi besar sehingga memiliki daya saing yang kuat.



28. Perdagangan

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada peningkatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada pembangunan, pengelolaan, serta pembinaan sarana distribusi perdagangan. Program ini mendukung pencapaian program unggulan meningkatnya kemandirian keuangan. Intervensi program tersebut melalui pengembangan *market place* yang berorientasi pemasaran produk, baik yang bersifat *business to business* ataupun *business to consumers*.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada pengendalian dan penjaminan harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan.

e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada pelaksanaan survey barang dan harga.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

29. Perindustrian

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota. Program ini mendukung pencapaian program unggulan meningkatkan ekonomi masyarakat. intervensi program tersebut melalui:

- 1) Optimalisasi terbentuknya usaha (bisnis) berskala ekonomi yang berorientasi pasar pada setiap kawasan desa (sinergi manajemen dan sistem hulu-hilir)
- 2) Fasilitasi pengembangan agro-industri dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk yang kuat (dukungan teknologi tepat guna, pendampingan sistem budidaya dan pembangunan pergudangan dan industri pengolahan).

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten.

**30. Transmigrasi****a. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**

Program ini diarahkan pada koordinasi penempatan transmigran ke kawasan transmigrasi.

31. Sekretariat Daerah**a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Program ini diarahkan pada peningkatan fasilitasi kerjasama hukum dan koordinasi daerah, serta pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat. Program ini mendukung pencapaian program unggulan pelayanan dan pengembangan pendidikan unggul berkualitas. Intervensi program unggulan ini melalui: (1) Peningkatan kemitraan dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi/LPTK; dan (2) Pemberian beasiswa bidik misi daerah. Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan meningkatkan kapasitas pemahaman dan pengamalan kegamaan. Intervensi program tersebut melalui Masjid Agung Terpadu sebagai pusat kajian dan pengembangan keagamaan, rumah tahfiz dan Gemas.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada peningkatan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan, serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen pemerintahan menjadi bagian reformasi birokrasi. Program ini mendukung pencapaian unggulan Penerapan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan melayani melalui *merit system* berbasis elektronik dan pelayanan publik. Program unggulan ini memiliki intervensi program melalui melakukan penataan organisasi perangkat daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam fungsi dan kewenangan. Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan pelayanan dasar dan jaminan kesehatan bermutu. Program unggulan ini memiliki intervensi program melalui peningkatan kesejahteraan tenaga medis secara profesional dan proporsional melalui penghasilan tambahan (tamsil).

32. Sekretariat DPRD**a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Program ini diarahkan pada pembuatan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran, peningkatan kapasitas DPRD, serta penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat.

33. Perencanaan**a. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini diarahkan pada analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah. Program ini mendukung pencapaian program unggulan penerapan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan melayani melalui *merit system* berbasis elektronik dan pelayanan publik. Program ini memiliki intervensi program unggulan melalui mempercepat penyatuan data (satu data) seluruh instansi perangkat daerah. Program ini juga



mendukung pencapaian program unggulan sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas birokrasi. Program ini memiliki intervensi program unggulan melalui optimalisasi penerapan *Money follow program*, agar anggaran digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), serta perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Program ini mendukung pencapaian program unggulan sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas birokrasi. Program ini memiliki intervensi melalui: (1) Optimalisasi penerapan money follow program, agar anggaran digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; dan (2) Penghematan anggaran dari belanja yang tidak produktif

34. Keuangan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan koordinasi pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah. Program ini mendukung pencapaian program unggulan sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas birokrasi. Program ini memiliki intervensi melalui: (1) Optimalisasi penerapan *Money follow program*, agar anggaran digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat; dan (2) Penghematan anggaran dari belanja yang tidak produktif

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah. Program ini mendukung pencapaian program unggulan sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas birokrasi. Intervensi program unggulan ini melalui peningkatan kualitas dan kapasitas asrama mahasiswa di berbagai kota studi.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

35. Kepegawaian

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan pada pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN serta peningkatan kompetensi ASN. Program ini mendukung pencapaian program unggulan mengembangkan aparatur sipil negara yang profesional. Program ini memiliki intervensi melalui:

- 1) Pengembangan sistem penempatan ASN yang memperhatikan kepentingan daerah, terutama pelayanan pemerintahan perdesaan yang masih terisolir;
- 2) Pemberian TKD bagi ASN; dan
- 3) Pemberian Penghasilan tambahan bagi Non PNS.



36. Pendidikan dan Pelatihan

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis, serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Program ini mendukung pencapaian program unggulan penerapan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan melayani melalui *merit system* berbasis elektronik dan pelayanan publik. Program ini memiliki intervensi melalui lelang jabatan kepala sekolah, penilik, dan pengawas sekolah melalui uji kompetensi yang ketat. Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan mengembangkan aparatur sipil negara yang profesional. Program ini memiliki intervensi melalui reformasi pendidikan dan pelatihan asn agar lebih sinergis, menjadi *learning governance* agar tercapai kinerja organisasi yang berkelanjutan.

37. Penelitian dan pengembangan

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi.

b. Program Riset dan Inovasi Daerah

Program Riset dan Inovasi diarahkan untuk memperkuat ekosistem ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi melalui kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Litbangjirap) serta Inovasi dan Inovasi yang berorientasi pada pemecahan masalah pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Program ini menekankan penguatan kapasitas riset, peningkatan kolaborasi multipihak, serta percepatan hilirisasi hasil riset agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.

38. Inspektorat

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu. Program ini mendukung pencapaian program unggulan Penerapan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan melayani melalui *merit system* berbasis elektronik dan pelayanan publik. Program unggulan ini memiliki intervensi melalui Pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani.

b. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta pendampingan dan asistensi. Program ini mendukung pencapaian program unggulan sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas birokrasi. Program ini memiliki intervensi program melalui penerapan reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akuntabilitas.

39. Kecamatan

a. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada peningkatan layanan dan koordinasi pelayanan urusan publik.

**b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program ini diarahkan pada peningkatan koordinasi dan kegiatan pemberdayaan.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada Peningkatan koordinasi dan pencegahan tindak kriminalitas.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Program ini diarahkan peningkatan pada pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

40. Kesatuan Bangsa dan Politik**a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Program ini mendukung pencapaian program unggulan penegakan hukum, ketertiban dan keamanan. Intervensi program tersebut melalui pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat.

b. Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan penghayat kepercayaan. Program ini mendukung pencapaian program unggulan meningkatkan kapasitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Intervensi program tersebut melalui Masjid Agung Terpadu sebagai pusat kajian dan pengembangan keagamaan, rumah tahfiz dan Gemas. Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan pembinaan terhadap kader-kader muda pembangunan bidang lingkungan hidup dan budaya. Intervensi program tersebut melalui upaya untuk menumbuhkan rasa toleransi yang kuat di kalangan muda sejak dini, revitalisasi kegiatan kebersamaan lintas budaya, lintas suku, dan lintas agama. Program ini juga mendukung pencapaian program unggulan penegakan hukum, ketertiban dan keamanan. Intervensi program tersebut melalui: (1) Penataan, sinkronisasi dan evaluasi regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (2) Penyuluhan terhadap masyarakat dan remaja akan bahaya narkoba dan minuman keras.



e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Program ini mendukung pencapaian program unggulan penegakan hukum, ketertiban dan keamanan. Intervensi program tersebut melalui pembentukan lembaga mediasi berbasis kearifan lokal.

Tabel 4.1.
Daftar Program Berdasarkan Urusan Pengampu

Urusan	Program		Keterangan (PP1/PP2/PDu)
PENDIDIKAN	1	Program Pengelolaan Pendidikan	PP1
	2	Program Pengembangan Kurikulum	PDu
	3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	PP2
	4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	PDu
	5	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	PDu
	6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
KESEHATAN	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PP1
	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	PP1
	3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	PDu
	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	PP1
	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PP1
	2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PP1
	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PP1
	4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	PP1
	5	Program Penataan Bangunan Gedung	PP1
	6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	PP1
	7	Program Penyelenggaraan Jalan	PP1
	8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	PDu
	9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PP1
	10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PPu
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	Program Pengembangan Perumahan	PP1
	2	Program Kawasan Permukiman	PP1
	3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	PP1
	4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	PP1
	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN	1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	PP1
	2	Program Penanggulangan Bencana	PP1
	3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	PP1



Urusan	Program		Keterangan (PP1/PP2/PDu)
MASYARAKAT		Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
	4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
SOSIAL	1	Program Pemberdayaan Sosial	PP1
	2	Program Rehabilitasi Sosial	PP1
	3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	PP1
	4	Program Penanganan Bencana	PP2
	5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	PDu
	6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
TENAGA KERJA	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	PDu
	2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	PP1
	3	Program Penempatan Tenaga Kerja	PP1
	4	Program Hubungan Industrial	PDu
	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	PP1
	2	Program Perlindungan Perempuan	PP1
	3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	PP1
	4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	PDu
	5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	PP1
	6	Program Perlindungan Khusus Anak	PP1
	7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
KETAHANAN PANGAN	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	PP1
	2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	PP1
	3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	PP1
	4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	PP1
	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
PERTANAHAN	1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	PP2
	2	Penyelesaian Ganti Rugi Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	PP1
	3	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Rugi Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	PDu
	4	Program Penatagunaan Tanah	PDu
LINGKUNGAN HIDUP	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	PDu
	2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	PP1
	3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	PP1
	4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	PP1
	5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	PDu
	6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	PP1
	7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	PDu
	8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	PP1
	9	Program Pengelolaan Persampahan	PP1



Urusan	Program		Keterangan (PP1/PP2/PDu)
	10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Program Pendaftaran Penduduk	PP1
	2	Program Pencatatan Sipil	PP1
	3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	PDu
	4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	PDu
	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Program Penataan Desa	PP1
	2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	PP1
	3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	PP1
	4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	PP2
	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Program Pengendalian Penduduk	PP1
	2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	PP1
	3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	PP1
PERHUBUNGAN	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	PP1
	2	Program Pengelolaan Pelayaran	PP1
	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	PP1
	2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PP1
	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	PP2
	2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	PP1
	3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	PP1
	4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	PP2
	5	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	PP1
	6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	PP1
	7	Program Pengembangan UMKM	PP1
	8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	PP1
	2	Program Promosi Penanaman Modal	PP1
	3	Program Pelayanan Penanaman Modal	PP1
	4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	PP1
	5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	PP2
	6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	PP1
	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	PP1
	3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	PDu
STATISTIK	1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	PP1
PERSANDIAN	1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	PP1
KEBUDAYAAN	1	Program Pengembangan Kebudayaan	PP1



Urusan	Program		Keterangan (PP1/PP2/PDu)
	2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	PP2
	3	Program Pembinaan Sejarah	PDu
	4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	PP1
	5	Program Pengelolaan Permuseuman	PDu
PERPUSTAKAAN	1	Program Pembinaan Perpustakaan	PP1
	2	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	PP2
	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
KEARSIPAN	1	Program Pengelolaan Arsip	PP1
KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	PP1
	2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	PP1
	3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	PP2
	4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	PP1
	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
PARIWISATA	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PP1
	2	Program Pemasaran Pariwisata	PP1
	3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	PP1
	4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PP2
	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
PERTANIAN	1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	PP1
	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	PP1
	3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	PP1
	4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	PDu
	5	Program Perizinan Usaha Pertanian	PDu
	6	Program Penyuluhan Pertanian	PP1
	7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
PERDAGANGAN	1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	PDu
	2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	PP1
	3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	PP1
	4	Program Pengembangan Ekspor	PP1
	5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	PDu
	6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	PP2
	7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
PERINDUSTRIAN	1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	PDu
	2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	PDu
	3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	PDu
TRANSMIGRASI	1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	PP2
SEKRETARIAT DAERAH	1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	PP1
	2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	PP1
	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PP1
SEKRETARIAT DPRD	1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	PP1
	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu



Urusan	Program		Keterangan (PP1/PP2/PDu)
PERENCANAAN	1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PP1
	2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	PP1
	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
KEUANGAN	1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	PP1
	2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	PP1
	3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	PP1
	4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
KEPEGAWAIAN	1	Program Kepegawaian Daerah	PP1
	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	PP1
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	PP1
	2	Program Riset Dan Inovasi Daerah	PP1
	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN (INSPEKTORAT DAERAH)	1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	PP1
	2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	PP1
	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	PP1
	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	PP1
	3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	PP1
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PP1
	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PP2
	6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	PP1
	2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	PDu
	3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	PP1
	4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	PP1
	5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	PP1
	6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PDu

Keterangan:

- Program Prioritas (PP) 1:** Kelompok Program yang selaras dengan kegiatan strategis Daerah dan/atau nasional dan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis daerah
- Program Prioritas (PP) 2:** Kelompok Program yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis daerah



3. **Program Dukungan (PDu):** Kelompok Program yang secara tidak langsung mendukung terhadap pencapaian sasaran strategis daerah

4.1.2. Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah

Indikator program, target, dan pagu indikatif program perangkat daerah tahun 2025–2029 merupakan elemen kunci dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Indikator program berperan sebagai alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan setiap program, sedangkan target menetapkan capaian spesifik yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun. Sementara itu, pagu indikatif menggambarkan kebutuhan anggaran yang dialokasikan sebagai batas pendanaan untuk mencapai target program yang telah ditetapkan.

Perumusan program, indikator program, target, dan pagu indikatif pada masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Bima diharapkan mampu memberikan arah yang jelas, terukur, serta mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, keseluruhan program yang dirancang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis daerah.

Selanjutnya, pada Tabel 4.2 disajikan daftar Program, Indikator Program, Target Lima Tahunan, serta Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode perencanaan.





Tabel 4.2
Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					788.136.329.000,000		795.840.089.000,000		812.790.801.000,000		830.840.898.000,000		848.991.620.000,000
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					631.537.563.000,000		637.861.323.000,000		645.812.035.000,000		653.862.132.000,000		662.012.854.000,000
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olaharaga	Persentase kinerja pelayanan internal Dinas Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olaharaga (%)	74,27	80,67	85,37	631.537.563.000,000	90,12	637.861.323.000,000	93,76	645.812.035.000,000	95,23	653.862.132.000,000	98,56	662.012.854.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olaharaga (%)	98,51	98,60	98,65		98,78		98,85		98,90		98,95	
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olaharaga (%)	98,77	98,82	98,92		98,98		99,00		99,00		99,05	
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					155.066.383.000,000		156.309.687.000,000		165.194.202.000,000		175.041.566.000,000		184.896.566.000,000
Meningkatnya kualitas dan terciptanya iklim satuan pendidikan yang kondusif	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	60,55	63,05	65,55	155.066.383.000,000	68,05	156.309.687.000,000	70,55	165.194.202.000,000	73,05	175.041.566.000,000	75,55	184.896.566.000,000
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	54,98	57,38	59,76		62,18		64,58		66,98		69,38	
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	75,19	76,09	76,99		77,89		78,79		79,69		80,59	
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	65,10	66,60	68,10		69,60		71,10		72,60		74,10	
	Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	70,88	71,88	72,88		73,88		74,88		75,88		76,88	
	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	67,78	68,78	69,78		70,78		71,78		72,78		73,78	
	Persentase guru pada Satuan Pendidikan PAUD Formal yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/DIV (%)	62,29	64,21	64,96		65,71		66,46		67,21		67,96	
	Persentase guru pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/DIV (%)	94,47	95,34	98,69		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase guru pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki kualifikasi	94,98	96,51	99,32		100,00		100,00		100,00		100,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	akademik minimal S1/DIV (%)												
	Persentase jamban dalam kondisi baik (%)	40,12	45,74	48,39		50,63		55,76		60,24		65,76	
	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik (%)	64,30	68,79	73,53		77,35		80,64		88,49		89,26	
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang terakreditasi Minimal B (%)	32,99	33,99	35,36		39,14		44,34		50,58		56,82	
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang terakreditasi Minimal B (%)	76,76	81,46	83,80		88,50		90,85		93,19		95,27	
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi Minimal B (%)	75,21	78,51	82,64		83,47		85,95		88,43		90,08	
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000
Meningkatnya penerapan kurikulum muatan lokal	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan muatan lokal daerah (%)	-	20,00	30,00	100.000.000,000	40,00	100.000.000,000	50,00	100.000.000,000	60,00	100.000.000,000	70,00	100.000.000,000
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					182.200.000,000		182.200.000,000		182.200.000,000		182.200.000,000		182.200.000,000
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan secara merata	Persentase guru pada Satuan Pendidikan PAUD yang memiliki sertifikat pendidik (%)	31,04	36,39	40,65	182.200.000,000	45,47	182.200.000,000	50,37	182.200.000,000	55,76	182.200.000,000	60,59	182.200.000,000
	Persentase guru pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki sertifikat pendidik (%)	69,92	74,35	79,48		84,57		89,64		94,23		95,70	
	Persentase guru pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sertifikat pendidik (%)	58,11	63,48	68,94		73,63		78,94		85,67		90,79	
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (%)	75,00	80,00	85,00		89,00		90,00		94,00		97,00	
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (%)	84,00	89,00	91,00		95,00		98,00		100,00		100,00	
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang	79,00	83,00	85,00		89,00		92,00		95,00		100,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (%)												
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					250.183.000,000		286.879.000,000		302.364.000,000		355.000.000,000		400.000.000,000
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	17,02	20,89	22,30	250.183.000,000	25,21	286.879.000,000	27,81	302.364.000,000	29,54	355.000.000,000	30,02	400.000.000,000
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					1.000.000.000,000		1.100.000.000,000		1.200.000.000,000		1.300.000.000,000		1.400.000.000,000
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	0	20	30	1.000.000.000,000	40	1.100.000.000,000	50	1.200.000.000,000	60	1.300.000.000,000	70	1.400.000.000,000
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					465.920.283.000,000		468.566.023.000,000		484.159.982.000,000		496.617.191.000,000		510.695.472.000,000
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					329.734.354.000,000		332.230.091.000,000		339.474.044.000,000		346.931.253.000,000		354.609.534.000,000
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60	65	70	126.791.059.000,000	75	127.275.583.000,000	80	129.879.874.000,000	90	132.544.353.000,000	95	135.270.456.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90	92	95		96,5		97		98		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80	82,5	85		87,5		90		92,5		95	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60,00	65,00	70,00	142.677.932.000,000	75,00	144.689.145.000,000	80,00	146.730.527.000,000	85,00	148.802.529.000,000	90,00	150.905.611.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90,00	92,00	95,00		96,50		97,00		98,00		100,00	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80,00	82,50	85,00		87,50		90,00		92,50		95,00	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60	65	70	14.277.494.000,000	75	14.277.494.000,000	80	14.576.381.000,000	90	14.882.740.000,000	95	15.196.759.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90	92	95		96,5		97		98		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80	82,5	85		87,5		90		92,5		95	
Meningkatnya kualitas kinerja	Persentase Pencapaian	60	65,00	70,00	1.664.533.000,000	75,00	1.664.533.000,000	80,00	1.747.760.000,000	85,00	1.835.148.000,000	90,00	1.926.905.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Dinas Kesehatan	Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)												
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90,00	92,00	95,00		96,50		97,00		98,00		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80	82,50	85,00		87,50		90,00		92,50		95,00	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60,00	65,00	70,00	1.559.725.000,000	75,00	1.559.725.000,000	80,00	1.637.711.000,000	90,00	1.719.596.000,000	95,00	1.805.576.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90,00	92,00	95,00		96,50		97,00		98,00		100,00	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80,00	82,50	85,00		87,50		90,00		92,50		95,00	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60,00	65,00	70,00	4.525.286.000,000	75,00	4.525.286.000,000	80,00	4.751.551.000,000	90,00	4.989.128.000,000	95,00	5.238.585.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90,00	92,00	95,00		96,50		97,00		98,00		100,00	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80,00	82,50	85,00		87,50		90,00		92,50		95,00	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60,00	65,00	70,00	1.483.255.000,000	75,00	1.483.255.000,000	80,00	1.557.420.000,000	90,00	1.635.290.000,000	95,00	1.717.055.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90,00	92,00	95,00		96,50		97,00		98,00		100,00	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80,00	82,50	85,00		87,50		90,00		92,50		95,00	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60,00	65,00	70,00	882.392.000,000	75,00	882.392.000,000	80,00	926.510.000,000	90,00	972.836.000,000	95,00	1.021.478.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90,00	92,00	95,00		96,50		97,00		98,00		100,00	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80,00	82,50	85,00		87,50		90,00		92,50		95,00	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan	60	65	70	2.667.243.000,000	75	2.667.243.000,000	80	2.800.603.000,000	90	2.940.640.000,000	95	3.087.669.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(%)	90	92	95		96,5		97		98		100	
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	80	82,5	85		87,5		90		92,5		95	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)												
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60,00	65,00	70,00	2.464.999.000,000	75,00	2.464.999.000,000	80,00	2.588.249.000,000	90,00	2.717.662.000,000	95,00	2.853.545.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90,00	92,00	95,00		96,50		97,00		98,00		100,00	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80,00	82,50	85,00		87,50		90,00		92,50		95,00	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60	65	70	3.437.732.000,000	75	3.437.732.000,000	80	3.609.619.000,000	90	3.790.099.000,000	95	3.979.604.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90	92	95		96,5		97		98		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80	82,5	85		87,5		90		92,5		95	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90,00	92,00	95,00	3.238.686.000,000	96,50	3.238.686.000,000	97,00	3.400.621.000,000	98,00	3.570.652.000,000	100,00	3.749.184.000,000
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60,00	65,00	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80,00	82,50	85,00		87,50		90,00		92,50		95,00	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60	65	70	1.323.698.000,000	75	1.323.698.000,000	80	1.389.883.000,000	90	1.459.378.000,000	95	1.532.346.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90	92	95		96,5		97		98		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80	82,5	85		87,5		90		92,5		95	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan	60,00	65,00	70,00	649.754.000,000	75,00	649.754.000,000	80,00	682.242.000,000	85,00	716.354.000,000	90,00	752.172.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(%)												
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90,00	92,00	95,00		96,50		97,00		98,00		100,00	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80,00	82,50	85,00		87,50		90,00		92,50		95,00	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60,00	65,00	70,00	2.486.520.000,000	75,00	2.486.520.000,000	80,00	2.610.846.000,000	90,00	2.741.388.000,000	95,00	2.878.457.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90,00	92,00	95,00		96,50		97,00		98,00		100,00	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80,00	82,50	85,00		87,50		90,00		92,50		95,00	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60,00	65,00	70,00	1.124.155.000,000	75,00	1.124.155.000,000	80,00	1.180.362.000,000	90,00	1.239.380.000,000	95,00	1.301.349.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90,00	92,00	95,00		96,50		97,00		98,00		100,00	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80,00	82,50	85,00		87,50		90,00		92,50		95,00	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60,00	65,00	70,00	1.635.485.000,000	75,00	1.635.485.000,000	80,00	1.717.259.000,000	85,00	1.803.122.000,000	90,00	1.893.278.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90,00	92,00	95,00		96,50		97,00		98,00		100,00	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80,00	82,50	85,00		87,50		90,00		92,50		95,00	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60,00	65,00	70,00	4.682.735.000,000	75,00	4.682.735.000,000	80,00	4.916.871.000,000	90,00	5.162.715.000,000	95,00	5.420.851.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90,00	92,00	95,00		96,50		97,00		98,00		100,00	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80,00	82,50	85,00		87,50		90,00		92,50		95,00	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60	65	70	1.827.920.000,000	75	1.827.920.000,000	80	1.919.316.000,000	90	2.015.282.000,000	95	2.116.046.000,000
	Persentase pencapaian	90	92	95		96,5		97		98		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)												
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80	82,5	85		87,5		90		92,5		95	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	98	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	70	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60	65	70	955.371.000,000	75	955.371.000,000	80	1.003.140.000,000	90	1.053.297.000,000	95	1.105.962.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90	92	95		96,5		97		98		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80	82,5	85		87,5		90		92,5		95	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60	65	70	1.741.936.000,000	75	1.741.936.000,000	80	1.829.033.000,000	90	1.920.484.000,000	95	2.016.508.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90	92	95		96,5		97		98		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80	82,5	85		87,5		90		92,5		95	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60	65	70	2.773.788.000,000	75	2.773.788.000,000	80	2.912.477.000,000	90	3.058.101.000,000	95	3.211.006.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90	92	95		96,5		97		98		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80	82,5	85		87,5		90		92,5		95	
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60	65	70	4.041.537.000,000	75	4.041.537.000,000	80	4.243.614.000,000	90	4.455.795.000,000	95	4.678.584.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90	92	95		96,5		97		98		100	
	Persentase pencapaian	80	82,5	85		87,5		90		92,5		95	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)												
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kesehatan (%)	60	65	70	821.119.000,000	75	821.119.000,000	80	862.175.000,000	90	905.284.000,000	95	950.548.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan (%)	90	92	95		96,5		97		98		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kesehatan (%)	80	82,5	85		87,5		90		92,5		95	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					132.980.934.000,000		133.080.937.000,000		141.280.943.000,000		146.280.943.000,000		152.680.943.000,000
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,8	100	100	9.500.000.000,000	100	9.500.000.000,000	100	9.500.000.000,000	100	9.500.000.000,000	100	9.500.000.000,000
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100	100		100		100		100		100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100	100		100		100		100		100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100	100		100		100		100		100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	96,7	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase penderita hipertensi yang	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)												
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,5	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85	90	90		90		90		90		90	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	95	98,60	98,70		98,80		98,90		99,00		99,10	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80,00	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	5,32	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15,00	20,00		25,00		35,00		50,00		60,00	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50	60	73		89		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas	79,75	83,00	86,00		89,00		92,00		95,00		96,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)												
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91,00	92,00		93,00		94,00		95,00		96,00	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,80	100	100	4.233.920.000,000	100	4.233.920.000,000	100	4.233.920.000,000	100	4.233.920.000,000	100	4.233.920.000,000
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100	100		100		100		100		100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100	100		100		100		100		100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100	100		100		100		100		100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	96,70	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100	100		100		100		100		100	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,50	100	100		100		100		100		100	
	Persentase orang terduga	83,10	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)												
	Penemuan Kasus TBC (%)	85	90	90		90		90		90		90	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0,00	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0,00	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	95	98,60	98,70		98,80		98,90		99,00		99,10	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	82		84		86		88		90	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100	100		100		100		100		100	
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	5,32	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15	20		25		35		50		65	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30	40		50		60		70		80	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50	60	73		89		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83	86		89		92		95		96	
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91	92		93		94		95		96	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	30	30	30		30		30		30		30	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	(Persentase)	89,80	100	100	96.382.466.000,000	100	96.482.468.000,000	100	104.682.468.000,000	100	109.682.468.000,000	100	116.082.468.000,000
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)												
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100	100		100		100		100		100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100	100		100		100		100		100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100	100		100		100		100		100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	96,7	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,5	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85	90	90		90		90		90		90	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Persentase Cakupan	0	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)												
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	95	98,60	98,70		98,80		98,90		99,00		99,10	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80,00	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	5,32	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15,00	20,00		25,00		35,00		50,00		65,00	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50	60	73		89		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83,00	86,00		89,00		92,00		95,00		96,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91,00	92,00		93,00		94,00		95,00		96,00	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	30,00	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,80	100	100	823.457.000,000	100	823.457.000,000	100	823.457.000,000	100	823.457.000,000	100	823.457.000,000
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	80,21	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	persalinan (%)												
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100	100		100		100		100		100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100	100		100		100		100		100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	96,70	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100	100		100		100		100		100	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,50	100	100		100		100		100		100	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100	100		100		100		100		100	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85	90	90		90		90		90		90	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	95	98,60	98,70		98,80		98,90		99,00		99,10	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80,00	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV	68,59	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)												
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	0	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15,00	20,00		25,00		35,00		50,00		65,00	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,4		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50,00	60,00	73,00		89,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83,00	86,00		89,00		92,00		95,00		96,00	
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91,00	92,00		93,00		94,00		95,00		96,00	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	0	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,80	100	100	890.864.000,000	100	890.864.000,000	100	890.864.000,000	100	890.864.000,000	100	890.864.000,000
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100,00	100		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase anak usia	96,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)												
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,50	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	95	98,60	98,70		98,80		98,90		99,00		99,10	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80,00	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	5,32	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase	7,98	15,00	20,00		25,00		35,00		50,00		65,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)												
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50,00	60,00	73,00		89,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83,00	86,00		89,00		92,00		95,00		96,00	
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91,00	92,00		93,00		94,00		95,00		96,00	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	30,00	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,8	100,00	100,00	1.642.034.000,000	100,00	1.642.034.000,000	100,00	1.642.034.000,000	100,00	1.642.034.000,000	100,00	1.642.034.000,000
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	96,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,5	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	95	98,60	98,70		98,80		98,90		99,00		99,10	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80,00	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	0	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15,00	20,00		25,00		35,00		50,00		65,00	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	0	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(%)												
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50,00	60,00	73,00		89,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83,00	86,00		89,00		92,00		95,00		96,00	
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91,00	92,00		93,00		94,00		95,00		96,00	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	30,00	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,80	100,00	100,00	1.033.572.000,000	100,00	1.033.573.000,000	100,00	1.033.579.000,000	100,00	1.033.579.000,000	100,00	1.033.579.000,000
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	96,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,50	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	73,60	80,00	80,00		81,50		82,50		83,50		85,00	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80,00	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	0	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15,00	20,00		25,00		35,00		50,00		65,00	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50,00	60,00	73,00		89,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(Persentase)												
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83,00	86,00		89,00		92,00		95,00		96,00	
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91,00	92,00		93,00		94,00		95,00		96,00	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	30,00	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,80	100,00	100,00	746.234.000,000	100,00	746.234.000,000	100,00	746.234.000,000	100,00	746.234.000,000	100,00	746.234.000,000
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,7	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	96,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatn pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,50	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80,00	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	73,60	80,00	80,00		81,50		82,50		83,50		85,00	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	0	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15,00	20,00		25,00		35,00		50,00		65,00	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50,00	60,00	73,00		89,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83,00	86,00		89,00		92,00		95,00		96,00	
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91,00	92,00		93,00		94,00		95,00		96,00	
	Prevalensi Merokok pada	30,00	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)												
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,80	100	100	1.381.987.000,000	100	1.381.987.000,000	100	1.381.987.000,000	100	1.381.987.000,000	100	1.381.987.000,000
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100	100		100		100		100		100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100	100		100		100		100		100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100	100		100		100		100		100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	96,70	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100	100		100		100		100		100	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,50	100	100		100		100		100		100	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100	100		100		100		100		100	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85	90	90		90		90		90		90	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0,00	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0,00	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	73,60	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	82		84		86		88		90	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100	100		100		100		100		100	
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	5,32	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15	20		25		35		50		65	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30	40		50		60		70		80	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83	86		89		92		95		96	
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91	92		93		94		95		96	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30	
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	8	8	7	1.145.475.000,000	7	1.145.475.000,000	6	1.145.475.000,000	6	1.145.475.000,000	4	1.145.475.000,000
	Persentase ibu hamil	89,80	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)												
	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	71,88	72,25	72,92		73,19		73,45		73,72		73,98	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	96,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,50	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	73,60	80,00	80,00		81,50		82,50		83,50		85,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	nasional (JKN) ((%))												
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80,00	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	0	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15,00	20,00		25,00		35,00		50,00		65,00	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50,00	60,00	73,00		89,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83,00	86,00		89,00		92,00		95,00		96,00	
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91,00	92,00		93,00		94,00		95,00		96,00	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	30,00	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,80	100	100	1.304.403.000,000	100	1.304.403.000,000	100	1.304.403.000,000	100	1.304.403.000,000	100	1.304.403.000,000
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100	100		100		100		100		100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	82,70	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(%)												
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100	100		100		100		100		100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	96,70	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100	100		100		100		100		100	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,50	100	100		100		100		100		100	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100	100		100		100		100		100	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85	90	90		90		90		90		90	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0	77	78		79		79,50		80		81	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36	46		55		61		70		80	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	95	98,60	98,70		98,80		98,90		99,00		99,10	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	82		84		86		88		90	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	5,32	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15	20		25		35		50		65	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30	40		50		60		70		80	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50	60	73		89		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83	86		89		92		95		96	
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91	92		93		94		95		96	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,80	100,00	100,00	1.532.925.000,000	100,00	1.532.925.000,000	100,00	1.532.925.000,000	100,00	1.532.925.000,000	100,00	1.532.925.000,000
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	96,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,50	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	73,60	80,00	80,00		81,50		82,50		83,50		85,00	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80,00	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	5,32	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15,00	20,00		25,00		35,00		50,00		65,00	
	Persentase tempat pengelolaan pangan	0	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	memenuhi syarat (%)	0	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)												
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50,00	60,00	73,00		89,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83,00	86,00		89,00		92,00		95,00		96,00	
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91,00	92,00		93,00		94,00		95,00		96,00	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	30,00	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,80	100	100	893.100.000,000	100	893.100.000,000	100	893.100.000,000	100	893.100.000,000	100	893.100.000,000
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100	100		100		100		100		100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100	100		100		100		100		100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100	100		100		100		100		100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	96,70	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100	100		100		100		100		100	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,50	100	100		100		100		100		100	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100	100		100		100		100		100	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85	90	90		90		90		90		90	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0,00	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0,00	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	73,60	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	82		84		86		88		90	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100	100		100		100		100		100	
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	5,32	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15	20		25		35		50		65	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30	40		50		60		70		80	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	50	60	73		89		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	79,75	83	86		89		92		95		96	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	89,96	91	92		93		94		95		96	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,80	100,00	100,00	644.489.000,000	100,00	644.489.000,000	100,00	644.489.000,000	100,00	644.489.000,000	100,00	644.489.000,000
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	71,88	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	71,88	100	100		100		100		100		100	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	71,88	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	71,88	100	100		100		100		100		100	
	Persentase ODGJ berat	71,88	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)												
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	71,88	100	100		100		100		100		100	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	71,88	36	46		55		61		70		80	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	71,88	80	80		81,5		82,5		83,5		85	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	71,88	80	82		84		86		88		90	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	71,88	100	100		100		100		100		100	
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	71,88	5,326	5,326		5,326		5,326		5,326		5,326	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	71,88	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	71,88	15	20		25		35		50		65	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	71,88	30	40		50		60		70		80	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	71,88	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	71,88	60	73		89		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	71,88	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	71,88	83	86		89		92		95		96	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	71,88	91	92		93		94		95		96	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	71,88	30	30		30		30		30		30	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100,00	100,00	1.262.828.000,000	100,00	1.262.828.000,000	100,00	1.262.828.000,000	100,00	1.262.828.000,000	100,00	1.262.828.000,000
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,80	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	96,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,5	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan	0	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	kesehatan (Persentase)	0	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)												
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	73,60	80,00	80,00		81,50		82,50		83,50		85,00	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80,00	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	0	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15,00	20,00		25,00		35,00		50,00		65,00	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50,00	60,00	73,00		89,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83,00	86,00		89,00		92,00		95,00		96,00	
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91,00	92,00		93,00		94,00		95,00		96,00	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	30,00	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,80	100,00	100,00	759.990.000,000	100,00	759.990.000,000	100,00	759.990.000,000	100,00	759.990.000,000	100,00	759.990.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	96,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,50	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	73,60	80,00	80,00		81,50		82,50		83,50		85,00	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80,00	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Persentase orang dengan	68,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)												
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	5,32	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15,00	20,00		25,00		35,00		50,00		65,00	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50,00	60,00	73,00		89,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83,00	86,00		89,00		92,00		95,00		96,00	
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91,00	92,00		93,00		94,00		95,00		96,00	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	30,00	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,80	100,00	100,00	849.304.000,000	100,00	849.304.000,000	100,00	849.304.000,000	100,00	849.304.000,000	100,00	849.304.000,000
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	96,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,50	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	73,60	80,00	80,00		81,50		82,50		83,50		85,00	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80,00	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	5,32	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,40	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi	7,98	15,00	20,00		25,00		35,00		50,00		65,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	total berbasis masyarakat (Persentase)												
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50,00	60,00	73,00		89,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83,00	86,00		89,00		92,00		95,00		96,00	
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91,00	92,00		93,00		94,00		95,00		96,00	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	0	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,80	100,00	100,00	1.882.374.000,000	100,00	1.882.374.000,000	100,00	1.882.374.000,000	100,00	1.882.374.000,000	100,00	1.882.374.000,000
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	96,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas	98,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)												
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,50	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	73,60	80,00	80,00		81,50		82,50		83,50		85,00	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80,00	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	0	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15,00	20,00		25,00		35,00		50,00		65,00	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi	50,00	60,00	73,00		89,00		100,00		100,00		100,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)												
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83,00	86,00		89,00		92,00		9.500		96,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	9.100	92,00		93,00		94,00		95,00		96,00	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	0	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,80	100	100	985.503.000,000	100	985.503.000,000	100	985.503.000,000	100	985.503.000,000	100	985.503.000,000
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100	100		100		100		100		100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100	100		100		100		100		100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100	100		100		100		100		100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	96,70	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100	100		100		100		100		100	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penderita hipertensi yang	100	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)												
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,50	100	100		100		100		100		100	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100	100		100		100		100		100	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85	90	90		90		90		90		90	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0,00	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0,00	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	73,60	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	82		84		86		88		90	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100	100		100		100		100		100	
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	5,32	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15	20		25		35		50		65	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30	40		50		60		70		80	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50	60	73		89		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas	79,75	83	86		89		92		95		96	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)												
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91	92		93		94		95		96	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,80	100	100	850.365.000,000	100	850.365.000,000	100	850.365.000,000	100	850.365.000,000	100	850.365.000,000
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100	100		100		100		100		100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100	100		100		100		100		100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100	100		100		100		100		100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	96,70	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100	100		100		100		100		100	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,50	100	100		100		100		100		100	
	Persentase orang terduga	83,10	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)												
	Penemuan Kasus TBC (%)	85	90	90		90		90		90		90	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0,00	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0,00	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	73,60	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	82		84		86		88		90	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100	100		100		100		100		100	
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	5,32	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15	20		25		35		50		65	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30	40		50		60		70		80	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50	60	73		89		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83	86		89		92		95		96	
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91	92		93		94		95		96	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	30	30	30		30		30		30		30	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	(Persentase)	89,80	100	100	1.119.302.000,000	100	1.119.302.000,000	100	1.119.302.000,000	100	1.119.302.000,000	100	1.119.302.000,000
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)												
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100	100		100		100		100		100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100	100		100		100		100		100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100	100		100		100		100		100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	96,70	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100	100		100		100		100		100	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,50	100	100		100		100		100		100	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100	100		100		100		100		100	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85	90	90		90		90		90		90	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0,00	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Persentase Cakupan	0,00	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)												
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	73,60	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	82		84		86		88		90	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100	100		100		100		100		100	
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	0	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15	20		25		35		50		65	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30	40		50		60		70		80	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	1	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50	60	73		89		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83	86		89		92		95		96	
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91	92		93		94		95		96	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,80	100	100	940.413.000,000	100	940.413.000,000	100	940.413.000,000	100	940.413.000,000	100	940.413.000,000
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	80,21	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	persalinan (%)												
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100	100		100		100		100		100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100	100		100		100		100		100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	96,70	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100	100		100		100		100		100	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,50	100	100		100		100		100		100	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100	100		100		100		100		100	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85	90	90		90		90		90		90	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0,00	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0,00	36	46		55		61		70		80	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	73,60	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	82		84		86		88		90	
	Persentase orang dengan	68,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)												
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	5,32	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15	20		25		35		50		65	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30	40		50		60		70		80	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50	60	73		89		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83	86		89		92		95		96	
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91	92		93		94		95		96	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,80	100	100	1.465.387.000,000	100	1.465.387.000,000	100	1.465.387.000,000	100	1.465.387.000,000	100	1.465.387.000,000
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100	100		100		100		100		100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100	100		100		100		100		100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	96,70	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	99,77	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Penemuan Kasus TBC (%)	97,50	100	100		100		100		100		100	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0,00	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0,00	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	73,60	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	82		84		86		88		90	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100	100		100		100		100		100	
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	5,32	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15	20		25		35		50		65	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30	40		50		60		70		80	
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50	60	73		89		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83	86		89		92		95		96	
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91	92		93		94		95		96	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	89,80	100	100	710.542.000,000	100	710.542.000,000	100	710.542.000,000	100	710.542.000,000	100	710.542.000,000
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	80,21	100	100		100		100		100		100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	82,70	100	100		100		100		100		100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,75	100	100		100		100		100		100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	96,70	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	99,77	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(%)												
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,50	100	100		100		100		100		100	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	83,10	100	100		100		100		100		100	
	Penemuan Kasus TBC (%)	85	90	90		90		90		90		90	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	0,00	77,00	78,00		79,00		79,50		80,00		81,00	
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0,00	36,00	46,00		55,00		61,00		70,00		80,00	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	95	98,60	98,70		98,80		98,90		99,00		99,10	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	80	82		84		86		88		90	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	68,59	100	100		100		100		100		100	
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	5,32	5,32	5,32		5,32		5,32		5,32		5,32	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	23,40	23,40		23,40		23,40		23,40		23,40	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	7,98	15	20		25		35		50		65	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	30	40		50		60		70		80	
	Persentase Fasilitas	0	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kesehatan Sesuai Standar (%)												
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	50	60	73		89		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	79,75	83	86		89		92		95		96	
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	89,96	91	92		93		94		95		96	
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30	
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.535.197.000,000		1.585.197.000,000		1.735.197.000,000		1.735.197.000,000		1.735.197.000,000
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	0	30,00	40,00	1.535.197.000,000	50,00	1.585.197.000,000	65,00	1.735.197.000,000	80,00	1.735.197.000,000	90,00	1.735.197.000,000
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Orang)	4,20	5,50	5,50		5,50		5,50		5,50		5,50	
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	50,00	60,00	70,00		80,00		90,00		95,00		100,00	
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	50,00	50,00	50,00		50,00		100,00		100,00		100,00	
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					772.760.000,000		772.760.000,000		772.760.000,000		772.760.000,000		772.760.000,000
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	82,00	82,33	84,74	772.760.000,000	87,24	772.760.000,000	89,82	772.760.000,000	92,50	772.760.000,000	95	772.760.000,000
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	60	65	70		75		80		85		90	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	50	55	60		65		70		75		80	
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	20	30	40		50		60		70		80	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					897.038.000,000		897.038.000,000		897.038.000,000		897.038.000,000		897.038.000,000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,94	83,88	486.000.000,000	85,82	486.000.000,000	87,76	486.000.000,000	89,7	486.000.000,000	90	486.000.000,000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,94	83,88	840.000,000	85,82	840.000,000	87,76	840.000,000	89,7	840.000,000	90,00	840.000,000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,94	83,88	9.580.000,000	85,82	9.580.000,000	87,76	9.580.000,000	89,70	9.580.000,000	90,00	9.580.000,000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,94	83,88	60.000.000,000	85,82	60.000.000,000	87,76	60.000.000,000	89,70	60.000.000,000	90,00	60.000.000,000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,94	83,88	15.680.000,000	83,88	15.680.000,000	87,76	15.680.000,000	89,70	15.680.000,000	90,00	15.680.000,000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,94	83,88	7.744.000,000	85,82	7.744.000,000	87,76	7.744.000,000	89,70	7.744.000,000	90,00	7.744.000,000
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	96,70	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	98,59	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,94	83,88	43.140.000,000	85,82	43.140.000,000	87,76	43.140.000,000	89,7	43.140.000,000	90	43.140.000,000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,94	83,88	14.134.000,000	85,82	14.134.000,000	87,76	14.134.000,000	89,70	14.134.000,000	90,00	14.134.000,000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,94	83,88	5.040.000,000	85,82	5.040.000,000	87,76	5.040.000,000	89,70	5.040.000,000	90,00	5.040.000,000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,94	83,88	4.503.000,000	85,82	4.503.000,000	87,76	4.503.000,000	89,7	4.503.000,000	90	4.503.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,94	83,88	19.486.000.000	85,82	19.486.000.000	87,76	19.486.000.000	89,70	19.486.000.000	90,00	19.486.000.000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,94	83,88	23.040.000.000	85,82	23.040.000.000	87,76	23.040.000.000	89,70	23.040.000.000	90,00	23.040.000.000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,94	83,88	12.840.000.000	85,82	12.840.000.000	87,76	12.840.000.000	89,70	12.840.000.000	90,00	12.840.000.000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,94	83,88	10.045.000.000	85,82	10.045.000.000	87,76	10.045.000.000	89,70	10.045.000.000	90,00	10.045.000.000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,94	83,88	51.330.000.000	85,82	51.330.000.000	87,76	51.330.000.000	89,70	51.330.000.000	90,00	51.330.000.000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,9	83,9	50.860.000.000	85,8	50.860.000.000	87,8	50.860.000.000	89,7	50.860.000.000	90	50.860.000.000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,9	83,9	7.638.000.000	85,8	7.638.000.000	87,8	7.638.000.000	89,7	7.638.000.000	90	7.638.000.000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,9	83,9	15.932.000.000	85,8	15.932.000.000	87,8	15.932.000.000	89,7	15.932.000.000	90	15.932.000.000
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,9	83,9	16.439.000.000	85,8	16.439.000.000	87,8	16.439.000.000	89,7	16.439.000.000	90	16.439.000.000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,9	83,9	35.613.000.000	85,8	35.613.000.000	87,8	35.613.000.000	89,7	35.613.000.000	90	35.613.000.000
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	81,94	83,88	7.154.000.000	85,82	7.154.000.000	87,76	7.154.000.000	89,7	7.154.000.000	90	7.154.000.000
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					134.600.218.000.000		167.617.271.000.000		191.424.042.000.000		209.382.775.000.000		228.414.613.000.000
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.774.675.000.000		18.010.712.000.000		18.252.483.000.000		18.511.216.000.000		18.763.054.000.000
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%)	100	100	100	17.774.675.000.000	100	18.010.712.000.000	100	18.252.483.000.000	100	18.511.216.000.000	100	18.763.054.000.000
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%)	100	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					26.035.524.000,000		26.835.524.000,000		31.535.524.000,000		35.735.524.000,000		42.315.524.000,000
Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi dan sistem perlindungan kawasan permukiman dalam mendukung ketahanan lingkungan, pengendalian banjir, dan mitigasi abrasi di wilayah kabupaten	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota (%)	58,13	59,38	61,52	26.035.524.000,000	63,80	26.835.524.000,000	66,11	31.535.524.000,000	68,56	35.735.524.000,000	71,21	42.315.524.000,000
	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kabupaten (%)	0	100	100		100		100		100		100	
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100	
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					20.900.000.000,000		22.400.000.000,000		27.800.000.000,000		29.800.000.000,000		32.000.000.000,000
Meningkatnya jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non-perpipaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	43,47	47,57	51,69	20.900.000.000,000	56,21	22.400.000.000,000	60,86	27.800.000.000,000	65,72	29.800.000.000,000	70,71	32.000.000.000,000
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					3.631.038.000,000		3.707.054.000,000		6.477.054.000,000		6.977.054.000,000		6.977.054.000,000
Meningkatnya kapasitas layanan sistem pengelolaan air limbah domestik	Persentase peningkatan kapasitas layanan sistem pengelolaan air limbah domestik (%)	2,44	1,32	1,27	3.631.038.000,000	1,24	3.707.054.000,000	1,20	6.477.054.000,000	1,18	6.977.054.000,000	1,69	6.977.054.000,000
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					900.000.000,000		900.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000
Meningkatnya keandalan infrastruktur drainase di kawasan prioritas	Persentase peningkatan kapasitas saluran drainase di kawasan prioritas (%)	2	2	2	900.000.000,000	2	900.000.000,000	3	2.000.000.000,000	3	2.000.000.000,000	2	2.000.000.000,000
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					11.500.000.000,000		31.500.000.000,000		31.500.000.000,000		31.500.000.000,000		31.500.000.000,000
Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis, fungsional, dan laik fungsi.	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota (%)	58	60	63	11.500.000.000,000	66	31.500.000.000,000	69	31.500.000.000,000	73	31.500.000.000,000	78	31.500.000.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					1.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000
Meningkatnya kondisi dan kelaikan fungsi bangunan gedung pemerintah yang mendukung pelayanan publik.	Persentase Jumlah Bangunan Gedung pemerintah Dalam Kondisi Baik (%)	60	65	68	1.000.000.000,000	72	2.000.000.000,000	76	2.000.000.000,000	80	2.000.000.000,000	84	2.000.000.000,000
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					50.141.665.000,000		59.546.665.000,000		69.141.665.000,000		80.141.665.000,000		90.141.665.000,000
Meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten	Persentase Jalan Kondisi Mantap dan Jembatan Kondisi Baik (%)	53,39	54,03	56,07	50.141.665.000,000	58,05	59.546.665.000,000	60,21	69.141.665.000,000	62,31	80.141.665.000,000	64,35	90.141.665.000,000
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					382.733.000,000		382.733.000,000		382.733.000,000		382.733.000,000		382.733.000,000
Meningkatnya kualitas tenaga kerja konstruksi dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)	0	100	100	382.733.000,000	100	382.733.000,000	100	382.733.000,000	100	382.733.000,000	100	382.733.000,000
	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis (%)	58	60	62		64		67		70		72	
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.334.583.000,000		2.334.583.000,000		2.334.583.000,000		2.334.583.000,000		2.334.583.000,000
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase layanan penerbitan KKPR tepat waktu (%)	100	100	100	2.334.583.000,000	100	2.334.583.000,000	100	2.334.583.000,000	100	2.334.583.000,000	100	2.334.583.000,000
	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan ruang di Daerah Kabupaten (%)	0	62,51	67,51		72,51		77,51		82,51		87,51	
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					17.286.068.000,000		18.166.462.000,000		18.672.929.000,000		23.080.754.000,000		26.634.821.000,000
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.138.089.000,000		6.218.483.000,000		6.300.084.000,000		6.382.909.000,000		6.466.976.000,000
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	100	100	100	6.138.089.000,000	100	6.218.483.000,000	100	6.300.084.000,000	100	6.382.909.000,000	100	6.466.976.000,000
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	100	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	100	100	100		100		100		100		100	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					963.500.000,000		963.500.000,000		963.500.000,000		963.500.000,000		963.500.000,000
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100	100	100	963.500.000,000	100	963.500.000,000	100	963.500.000,000	100	963.500.000,000	100	963.500.000,000
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%)	100	100	100		100		100		100		100	
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2.662.370.000,000		2.662.370.000,000		2.862.370.000,000		5.412.370.000,000		7.412.370.000,000
Meningkatnya kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%)	71,69	75,30	76	2.662.370.000,000	79	2.662.370.000,000	82	2.862.370.000,000	85	5.412.370.000,000	88	7.412.370.000,000
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					724.600.000,000		1.524.600.000,000		1.724.600.000,000		1.924.600.000,000		1.924.600.000,000
Meningkatnya penanganan rumah tidak layak huni di kawasan permukiman kumuh	Persentase Rumah Layak Huni (RLH) yang di tangani (%)	18,31	19,04	19,78	724.600.000,000	20,54	1.524.600.000,000	21,55	1.724.600.000,000	22,58	1.924.600.000,000	23,64	1.924.600.000,000
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					6.797.509.000,000		6.797.509.000,000		6.822.375.000,000		8.397.375.000,000		9.867.375.000,000
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	75	80	83	6.797.509.000,000	86	6.797.509.000,000	89	6.822.375.000,000	92	8.397.375.000,000	95	9.867.375.000,000
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					44.627.877.000,000		45.979.037.000,000		47.166.964.000,000		47.831.760.000,000		48.737.528.000,000
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					39.441.430.000,000		39.892.590.000,000		40.350.517.000,000		40.815.313.000,000		41.287.081.000,000
Meningkatnya kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase pencapaian kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja (%)	100,00	100,00	100,00	25.785.503.000,000	100,00	26.076.701.000,000	100,00	26.372.267.000,000	100,00	26.672.266.000,000	100,00	26.976.765.000,000
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Satuan Polisi Pamong Praja (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Satuan Polisi Pamong Praja (%)												
Meningkatnya kualitas kinerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (%)	100	100	100	8.171.525.000,000	100	8.260.746.000,000	100	8.351.304.000,000	100	8.443.221.000,000	100	8.536.517.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase pencapaian kinerja keuangan BBadan Penanggulangan Bencana Daerah (%)	100	100	100	5.484.402.000,000	100	5.555.143.000,000	100	5.626.946.000,000	100	5.699.826.000,000	100	5.773.799.000,000
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100	
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.367.980.000,000		2.367.980.000,000		2.877.980.000,000		3.077.980.000,000		3.077.980.000,000
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP (%)	75,00	80,00	85,00	2.177.980.000,000	90,00	2.177.980.000,000	95,00	2.577.980.000,000	100,00	2.777.980.000,000	100,00	2.777.980.000,000
Terpenuhinya PPNS pada satpol PP	Jumlah PPNS pada Satpol PP (Orang)	0	1	2	90.000.000,000	2	90.000.000,000	2	90.000.000,000	0	0,000	0	0,000
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar (%)	0	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	22,50	90.000.000,000	35,00	90.000.000,000
Meningkatnya kualitas tatalaksana penegakan Perda dan perkara serta Penyelenggaraan	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkara serta Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100,00	100,00	100,00	10.000.000,000	100,00	10.000.000,000	100,00	10.000.000,000	100,00	10.000.000,000	100,00	10.000.000,000
Meningkatnya kualitas Sarana prasarana sesuai standar	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan	50,00	50,00	65,00	90.000.000,000	75,00	90.000.000,000	85,00	200.000.000,000	95,00	200.000.000,000	100,00	200.000.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat (%)												
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.090.759.000,000		2.190.759.000,000		2.410.759.000,000		2.410.759.000,000		2.844.759.000,000
Meningkatnya kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	100	2.090.759.000,000	100	2.190.759.000,000	100	2.410.759.000,000	100	2.410.759.000,000	100	2.844.759.000,000
	Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku (%)	28,57	42,86	71,43		85,71		100		100		100	
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	0	43,47	47,83		52,17		56,52		6,087		65,22	
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					727.708.000,000		1.527.708.000,000		1.527.708.000,000		1.527.708.000,000		1.527.708.000,000
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	70	73	76	149.533.000,000	79	260.000.000,000	82	260.000.000,000	85	260.000.000,000	88	260.000.000,000
Meningkatnya penanganan kebakaran yang cepat dan responsif	Persentase Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan standar (%)	25	29	33	291.307.000,000	37	625.500.000,000	41	425.500.000,000	45	425.500.000,000	49	425.500.000,000
Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran Sesuai Standar	Waktu rata-rata respon penanganan kebakaran (menit/jam) (%)	13,98	13,65	13,32	286.868.000,000	12,99	642.208.000,000	12,66	842.208.000,000	12,33	842.208.000,000	12	842.208.000,000
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					7.654.721.000,000		7.737.933.000,000		8.272.393.000,000		8.358.121.000,000		8.445.134.000,000
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.270.101.000,000		6.353.313.000,000		6.437.773.000,000		6.523.501.000,000		6.610.514.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Sosial (%)	96,92	100,00	100,00	6.270.101.000,000	100,00	6.353.313.000,000	100,00	6.437.773.000,000	100,00	6.523.501.000,000	100,00	6.610.514.000,000
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Sosial (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					227.850.000,000		227.850.000,000		427.850.000,000		427.850.000,000		427.850.000,000
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang melaksanakan pelayanan sosial (%)	78,82	85,50	89,00	227.850.000,000	94,50	227.850.000,000	96,00	427.850.000,000	98,00	427.850.000,000	98,00	427.850.000,000
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					440.180.000,000		440.180.000,000		440.180.000,000		440.180.000,000		440.180.000,000
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	23,15	37,00	41,00	440.180.000,000	47,00	440.180.000,000	53,00	440.180.000,000	58,00	440.180.000,000	58,00	440.180.000,000
	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	11,79	15,00	20,00		25,00		30,00		35,00		35,00	
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	28,32	23,00	30,00		37,00		45,00		55,00		55,00	
	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar (%)	88,07	89,00	93,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	34,88	38,00	39,00		40,00		41,00		42,00		42,00	
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	15,20	25,00	35,00		41,00		48,00		54,00		54,00	
	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar (%)	88,07	89,00	93,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase sarana	69,56	82,00	85,00		89,00		92,00		96,00		96,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti (%)												
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					175.240.000,000		175.240.000,000		375.240.000,000		375.240.000,000		375.240.000,000
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun (%)	100,00	100,00	100,00	175.240.000,000	100,00	175.240.000,000	100,00	375.240.000,000	100,00	375.240.000,000	100,00	375.240.000,000
	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi (%)	5,16	6,00	12,00		18,00		24,00		30,00		30,00	
	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	33,06	39,67	43,83		48,33		52,83		57,33		57,33	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					463.350.000,000		463.350.000,000		463.350.000,000		463.350.000,000		463.350.000,000
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota (%)	85,00	100,00	100,00	463.350.000,000	100,00	463.350.000,000	100,00	463.350.000,000	100,00	463.350.000,000	100,00	463.350.000,000
	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%)	85,94	86,00	86,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					78.000.000,000		78.000.000,000		128.000.000,000		128.000.000,000		128.000.000,000
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	78.000.000,000	100	78.000.000,000	100	128.000.000,000	100	128.000.000,000	100	128.000.000,000
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					9.302.971.000,000		10.498.304.000,000		10.695.068.000,000		10.993.283.000,000		11.092.971.000,000
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.345.629.000,000		7.440.962.000,000		7.537.726.000,000		7.635.941.000,000		7.735.629.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (%)	97,00	97,00	97,00	7.345.629.000,000	97,00	7.440.962.000,000	97,00	7.537.726.000,000	97,00	7.635.941.000,000	97,00	7.735.629.000,000
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (%)	70,00	72,00	75,00		80,00		82,00		85,00		97,00	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					51.590.000,000		51.590.000,000		51.590.000,000		51.590.000,000		51.590.000,000
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	70,00	75,00	80,00	51.590.000,000	85,00	51.590.000,000	90,00	51.590.000,000	95,00	51.590.000,000	100,00	51.590.000,000
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					922.018.000,000		1.122.018.000,000		1.222.018.000,000		1.422.018.000,000		1.422.018.000,000
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	40,00	45,00	50,00	922.018.000,000	55,00	1.122.018.000,000	60,00	1.222.018.000,000	65,00	1.422.018.000,000	70,00	1.422.018.000,000
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					720.977.000,000		720.977.000,000		720.977.000,000		720.977.000,000		720.977.000,000
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri (%)	70,00	80,00	81,00	720.977.000,000	82,00	720.977.000,000	83,00	720.977.000,000	85,00	720.977.000,000	85,00	720.977.000,000
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					262.757.000,000		1.162.757.000,000		1.162.757.000,000		1.162.757.000,000		1.162.757.000,000
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). (%)	10	11	20	262.757.000,000	30	1.162.757.000,000	40	1.162.757.000,000	50	1.162.757.000,000	50	1.162.757.000,000
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					12.975.502.000,000		13.399.362.000,000		13.615.079.000,000		13.742.682.000,000		13.872.199.000,000
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.514.799.000,000		9.638.659.000,000		9.764.376.000,000		9.891.979.000,000		10.021.496.000,000
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)	98,55	98,56	98,57	9.514.799.000,000	98,58	9.638.659.000,000	98,59	9.764.376.000,000	98,6	9.891.979.000,000	98,75	10.021.496.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)	75,00	84,00	89,00		90,00		95,00		99,00		100,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					1.247.000.000,000		1.347.000.000,000		1.347.000.000,000		1.347.000.000,000		1.347.000.000,000
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	30	32	34	1.247.000.000,000	36	1.347.000.000,000	38	1.347.000.000,000	40	1.347.000.000,000	42	1.347.000.000,000
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	75,50	75,60	75,70		75,80		75,90		76,00		76,10	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					1.563.103.000,000		1.563.103.000,000		1.563.103.000,000		1.563.103.000,000		1.563.103.000,000
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	87,00	90,00	92,00	1.563.103.000,000	94,00	1.563.103.000,000	96,00	1.563.103.000,000	98,00	1.563.103.000,000	100,00	1.563.103.000,000
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	1	1	1	40.000.000,000	2	40.000.000,000	2	40.000.000,000	2	40.000.000,000	2	40.000.000,000
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	40	45	50	40.000.000,000	55	40.000.000,000	60	40.000.000,000	65	40.000.000,000	70	40.000.000,000
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					195.000.000,000		195.000.000,000		195.000.000,000		195.000.000,000		195.000.000,000
Terjaminnya pemenuhan hak	Indeks Pemenuhan Hak	59,35	59,75	60,20	195.000.000,000	60,80	195.000.000,000	61,00	195.000.000,000	61,45	195.000.000,000	61,90	195.000.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
semua anak secara komprehensif	Anak (IPHA) (Indeks)				375.600.000,000		575.600.000,000		665.600.000,000		665.600.000,000		665.600.000,000
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					375.600.000,000		575.600.000,000		665.600.000,000		665.600.000,000		665.600.000,000
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	45,00	45,50	50,00	375.600.000,000	50,55	575.600.000,000	60,00	665.600.000,000	60,55	665.600.000,000	70,00	665.600.000,000
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	87	90	92		94		96		98		100	
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					5.756.177.000,000		6.519.049.000,000		8.042.863.000,000		8.407.635.000,000		8.873.379.000,000
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.705.741.000,000		4.768.613.000,000		4.832.427.000,000		4.897.199.000,000		4.962.943.000,000
Meningkatnya pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Ketahanan Pangan (%)	100	100	100	4.705.741.000,000	100	4.768.613.000,000	100	4.832.427.000,000	100	4.897.199.000,000	100	4.962.943.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Ketahanan Pangan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					30.400.000,000		30.400.000,000		30.400.000,000		30.400.000,000		30.400.000,000
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	30.400.000,000	100	30.400.000,000	100	30.400.000,000	100	30.400.000,000	100	30.400.000,000
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					734.600.000,000		1.034.600.000,000		2.494.600.000,000		2.794.600.000,000		3.194.600.000,000
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	79,60	85,24	85,67	734.600.000,000	86,09	1.034.600.000,000	86,53	2.494.600.000,000	89,96	2.794.600.000,000	87,39	3.194.600.000,000
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					225.436.000,000		625.436.000,000		625.436.000,000		625.436.000,000		625.436.000,000
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2	2	2	225.436.000,000	1	625.436.000,000	1	625.436.000,000	1	625.436.000,000	1	625.436.000,000
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					60.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi	25	25	25	60.000.000,000	50	60.000.000,000	75	60.000.000,000	100	60.000.000,000	100	60.000.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)												
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.575.439.000,000		1.875.439.000,000		1.875.439.000,000		2.075.439.000,000		2.075.439.000,000
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					150.439.000,000		150.439.000,000		150.439.000,000		150.439.000,000		150.439.000,000
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terseselaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	0	62,51	67,51	150.439.000,000	72,51	150.439.000,000	77,51	150.439.000,000	82,51	150.439.000,000	87,51	150.439.000,000
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					725.000.000,000		725.000.000,000		725.000.000,000		725.000.000,000		725.000.000,000
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	0	100	100	725.000.000,000	100	725.000.000,000	100	725.000.000,000	100	725.000.000,000	100	725.000.000,000
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					500.000.000,000		800.000.000,000		800.000.000,000		800.000.000,000		800.000.000,000
Meningkatnya redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah obejek reformasi agraria	Persentase Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) yang Tertangani (%)	0	63	67	500.000.000,000	72	800.000.000,000	77	800.000.000,000	83	800.000.000,000	88	800.000.000,000
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Aset Tanah Pemda yang telah di integrasikan kedalam Sistem Informasi Pertanahan (Digitalisasi Pertanahan) (%)	0	71,67	75	200.000.000,000	83,33	200.000.000,000	86,67	200.000.000,000	90	400.000.000,000	93,33	400.000.000,000
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					12.942.687.000,000		18.885.002.000,000		21.278.710.000,000		21.373.824.000,000		21.470.365.000,000
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.656.227.000,000		7.748.551.000,000		7.842.259.000,000		7.937.373.000,000		8.033.914.000,000
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	7.656.227.000,000	100	7.748.551.000,000	100	7.842.259.000,000	100	7.937.373.000,000	100	8.033.914.000,000
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Lingkungan Hidup (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian	100	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	kinerja pelayanan internal Dinas Lingkungan Hidup (%)				131.279.000,000		131.279.000,000		131.279.000,000		131.279.000,000		131.279.000,000
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	0	0	0	131.279.000,000	100	131.279.000,000	100	131.279.000,000	100	131.279.000,000	100	131.279.000,000
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					949.130.000,000		1.249.130.000,000		1.249.130.000,000		1.249.130.000,000		1.249.130.000,000
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase wilayah amatan yang tidak mengalami pencemaran air (%)	20	20	20	949.130.000,000	25	1.249.130.000,000	30	1.249.130.000,000	30	1.249.130.000,000	30	1.249.130.000,000
	Persentase titik pemantauan yang tidak mengalami polusi udara sedang dan berat (%)	100	100	100		100		100		100		100	
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					384.271.000,000		1.434.271.000,000		1.434.271.000,000		1.434.271.000,000		1.434.271.000,000
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2	2	2	384.271.000,000	3	1.434.271.000,000	3	1.434.271.000,000	3	1.434.271.000,000	3	1.434.271.000,000
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					17.500.000,000		17.500.000,000		17.500.000,000		17.500.000,000		17.500.000,000
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	80	82	84	17.500.000,000	86	17.500.000,000	88	17.500.000,000	90	17.500.000,000	92	17.500.000,000
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					12.960.000,000		12.960.000,000		12.960.000,000		12.960.000,000		12.960.000,000
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	10	12.960.000,000	20	12.960.000,000	20	12.960.000,000	30	12.960.000,000	30	12.960.000,000
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,					42.670.000,000		42.670.000,000		42.670.000,000		42.670.000,000		42.670.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT													
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	0	20	42.670.000,000	20	42.670.000,000	20	42.670.000,000	20	42.670.000,000	20	42.670.000,000
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					25.300.000,000		25.300.000,000		25.300.000,000		25.300.000,000		25.300.000,000
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	0	100	25.300.000,000	100	25.300.000,000	100	25.300.000,000	100	25.300.000,000	100	25.300.000,000
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					3.723.350.000,000		8.223.341.000,000		10.523.341.000,000		10.523.341.000,000		10.523.341.000,000
Meningkatnya sampah yang tertangani	Persentase sampah yang tertangani (%)	24,02	24,11	24,20	3.723.350.000,000	24,29	8.223.341.000,000	24,38	10.523.341.000,000	24,48	10.523.341.000,000	24,57	10.523.341.000,000
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					7.215.582.000,000		8.785.438.000,000		8.866.491.000,000		8.948.760.000,000		9.032.264.000,000
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.042.997.000,000		7.122.853.000,000		7.203.906.000,000		7.286.175.000,000		7.369.679.000,000
Meningkatnya kualitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	97,95	98,00	98,20	7.042.997.000,000	98,50	7.122.853.000,000	98,70	7.203.906.000,000	99,00	7.286.175.000,000	99,30	7.369.679.000,000
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	92,86	93,00	94,00		95,00		96,00		97,00		98,00	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	97,50	98,00	98,50		99,00		99,50		99,90		100,00	
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					40.954.000,000		40.954.000,000		40.954.000,000		40.954.000,000		40.954.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	1,34	10	20	40.954.000,000	30	40.954.000,000	40	40.954.000,000	50	40.954.000,000	60	40.954.000,000
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	54,83	60	65		70		75		80		85	
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					66.631.000,000		1.406.631.000,000		1.406.631.000,000		1.406.631.000,000		1.406.631.000,000
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan (%)	97,89	97	97,50	66.631.000,000	98	1.406.631.000,000	98,50	1.406.631.000,000	99	1.406.631.000,000	99,50	1.406.631.000,000
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	86,76	86,76	87		87,50		88		89		90	
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	70,00	75,00	80,00	50.000.000,000	85,00	50.000.000,000	90,00	50.000.000,000	95,00	50.000.000,000	99,00	50.000.000,000
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					15.000.000,000		165.000.000,000		165.000.000,000		165.000.000,000		165.000.000,000
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Data Profil Kependudukan yang disusun (%)	100,00	100,00	100,00	15.000.000,000	100,00	165.000.000,000	100,00	165.000.000,000	100,00	165.000.000,000	100,00	165.000.000,000
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					8.554.694.000,000		10.636.397.000,000		11.313.826.000,000		12.052.999.000,000		12.138.434.000,000
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.270.861.000,000		6.352.564.000,000		6.435.493.000,000		6.519.666.000,000		6.605.101.000,000
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (%)	0	100,00	100,00	6.270.861.000,000	100,00	6.352.564.000,000	100,00	6.435.493.000,000	100,00	6.519.666.000,000	100,00	6.605.101.000,000
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (%)	0	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					105.696.000,000		1.305.696.000,000		1.305.696.000,000		1.305.696.000,000		1.305.696.000,000
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	15	15	18	105.696.000,000	21	1.305.696.000,000	24	1.305.696.000,000	27	1.305.696.000,000	30	1.305.696.000,000
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	37	37	50	100.000.000,000	63	100.000.000,000	76	100.000.000,000	89	100.000.000,000	91	100.000.000,000
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1.326.258.000,000		2.026.258.000,000		2.620.758.000,000		3.175.758.000,000		3.175.758.000,000
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	25,00	25,00	27,00	1.326.258.000,000	30,00	2.026.258.000,000	33,00	2.620.758.000,000	35,00	3.175.758.000,000	40,00	3.175.758.000,000
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	0	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					751.879.000,000		851.879.000,000		851.879.000,000		951.879.000,000		951.879.000,000
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	26,00	26,00	29,00	751.879.000,000	33,00	851.879.000,000	37,00	851.879.000,000	41,00	951.879.000,000	43,00	951.879.000,000
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	17,00	17,00	28,00		40,00		47,00		51,00		56,00	
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					10.847.695.000,000		11.447.695.000,000		11.447.695.000,000		11.447.695.000,000		11.447.695.000,000
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					565.000.000,000		565.000.000,000		565.000.000,000		565.000.000,000		565.000.000,000
Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (%)	2,5	2,47	2,44	565.000.000,000	2,40	565.000.000,000	2,38	565.000.000,000	2,35	565.000.000,000	2,30	565.000.000,000
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	26,50	26,40-26,50	26,30-26,40		26,20-26,30		26,10-26,20		26,00-26,10		25,90-26,00	
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					6.686.095.000,000		6.986.095.000,000		6.986.095.000,000		6.986.095.000,000		6.986.095.000,000
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam	Angka Prevalensi Kontrasepsi	68,00	68,60	68,90	6.686.095.000,000	69,20	6.986.095.000,000	69,70	6.986.095.000,000	70,00	6.986.095.000,000	70,10	6.986.095.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	6,00	5,10	5,00		4,90		4,80		4,70		4,60	
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					3.596.600.000,000		3.896.600.000,000		3.896.600.000,000		3.896.600.000,000		3.896.600.000,000
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	40	45	50	3.596.600.000,000	55	3.896.600.000,000	60	3.896.600.000,000	65	3.896.600.000,000	75	3.896.600.000,000
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					16.212.659.000,000		17.723.599.000,000		17.836.203.000,000		17.950.495.000,000		18.066.503.000,000
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.292.760.000,000		8.403.700.000,000		8.516.304.000,000		8.630.596.000,000		8.746.604.000,000
Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Perhubungan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Perhubungan (%)	100	100	100	8.292.760.000,000	100	8.403.700.000,000	100	8.516.304.000,000	100	8.630.596.000,000	100	8.746.604.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Perhubungan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Perhubungan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					6.739.848.000,000		7.039.848.000,000		7.039.848.000,000		7.039.848.000,000		7.039.848.000,000
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota (%)	0	0	0	6.739.848.000,000	0	7.039.848.000,000	0	7.039.848.000,000	0	7.039.848.000,000	0	7.039.848.000,000
	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan (%)	0	0	0		0		0		0		0	
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					1.180.051.000,000		2.280.051.000,000		2.280.051.000,000		2.280.051.000,000		2.280.051.000,000
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Persentase penerbitan izin di bidang pelayaran (%)	0	0	0	1.180.051.000,000	0	2.280.051.000,000	0	2.280.051.000,000	0	2.280.051.000,000	0	2.280.051.000,000
	Persentase ketersediaan Rencana Induk dan DLKR/DLKP (%)	0	0	0		0		0		0		0	
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					6.595.825.000,000		8.384.344.000,000		9.053.890.000,000		9.724.479.000,000		9.996.127.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.219.592.000,000		5.288.111.000,000		5.357.657.000,000		5.428.246.000,000		5.499.894.000,000
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi dan Informatika (%)	100	100	100	5.219.592.000,000	100	5.288.111.000,000	100	5.357.657.000,000	100	5.428.246.000,000	100	5.499.894.000,000
	Persentase Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pencapaian Kinerja Pelayanan Internal Dinas Komunikasi dan Informatika (%)	100	100	100		100		100		100		100	
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					898.389.000,000		1.098.389.000,000		1.098.389.000,000		1.098.389.000,000		1.098.389.000,000
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%)	9	15	36	898.389.000,000	52	1.098.389.000,000	70	1.098.389.000,000	82	1.098.389.000,000	100	1.098.389.000,000
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					477.844.000,000		1.997.844.000,000		2.597.844.000,000		3.197.844.000,000		3.397.844.000,000
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) (%)	20	30	40	477.844.000,000	50	1.997.844.000,000	60	2.597.844.000,000	70	3.197.844.000,000	100	3.397.844.000,000
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					6.526.920.000,000		9.427.886.000,000		9.489.766.000,000		9.552.575.000,000		9.616.325.000,000
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.918.350.000,000		4.979.316.000,000		5.041.196.000,000		5.104.005.000,000		5.167.755.000,000
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (%)	100	100	100	4.918.350.000,000	100	4.979.316.000,000	100	5.041.196.000,000	100	5.104.005.000,000	100	5.167.755.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (%)	100	100	100		100		100		100		100	
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam (%)	10,6	12	14	15.000.000,000	15	15.000.000,000	17	15.000.000,000	19	15.000.000,000	22	15.000.000,000
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	25	30	34	50.000.000,000	37	50.000.000,000	40	50.000.000,000	42	50.000.000,000	45	50.000.000,000
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	75	75	78	40.000.000,000	80	40.000.000,000	82	40.000.000,000	85	40.000.000,000	88	40.000.000,000
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	31	34	39	100.000.000,000	42	100.000.000,000	48	100.000.000,000	55	100.000.000,000	58	100.000.000,000
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					955.000.000,000		1.295.000.000,000		1.295.000.000,000		1.295.000.000,000		1.295.000.000,000
Meningkatnya produktivitas koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	31,6	33,2	34,3	955.000.000,000	35,7	1.295.000.000,000	36,6	1.295.000.000,000	37,6	1.295.000.000,000	38,6	1.295.000.000,000
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					325.090.000,000		525.090.000,000		525.090.000,000		525.090.000,000		525.090.000,000
Meningkatnya wirausaha baru	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	4,9	6	7,1	325.090.000,000	8,2	525.090.000,000	9,9	525.090.000,000	10,6	525.090.000,000	11,2	525.090.000,000
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					123.480.000,000		2.423.480.000,000		2.423.480.000,000		2.423.480.000,000		2.423.480.000,000
Meningkatnya daya saing Usaha Kecil dan Menengah	Proporsi Usaha Kecil dan Menengah Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (%)	1,5	1,7	1,8	123.480.000,000	2	2.423.480.000,000	2,5	2.423.480.000,000	3	2.423.480.000,000	3,2	2.423.480.000,000
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					6.172.548.000,000		6.265.880.000,000		6.320.011.000,000		6.374.955.000,000		6.430.723.000,000
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.806.548.000,000		4.859.880.000,000		4.914.011.000,000		4.968.955.000,000		5.024.723.000,000
Meningkatnya pencapaian kinerja DPMTSP	Persentase kinerja pelayanan internal DPMTSP (%)	100	100	100	4.806.548.000,000	100	4.859.880.000,000	100	4.914.011.000,000	100	4.968.955.000,000	100	5.024.723.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan DPMTSP (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program DPMTSP (%)	100	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					210.000.000,000		210.000.000,000		210.000.000,000		210.000.000,000		210.000.000,000
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase peningkatan iklim penanaman modal (%)	100	100	100	210.000.000,000	100	210.000.000,000	100	210.000.000,000	100	210.000.000,000	100	210.000.000,000
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor/pelaku usaha yang berinvestasi (PMA-PMDN) (%)	100	100	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					594.875.000,000		594.875.000,000		594.875.000,000		594.875.000,000		594.875.000,000
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	594.875.000,000	100	594.875.000,000	100	594.875.000,000	100	594.875.000,000	100	594.875.000,000
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					272.125.000,000		312.125.000,000		312.125.000,000		312.125.000,000		312.125.000,000
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	16,6	18,6	20,6	272.125.000,000	22,6	312.125.000,000	24,6	312.125.000,000	26,6	312.125.000,000	28,6	312.125.000,000
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					89.000.000,000		89.000.000,000		89.000.000,000		89.000.000,000		89.000.000,000
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	89.000.000,000	100	89.000.000,000	100	89.000.000,000	100	89.000.000,000	100	89.000.000,000
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					1.469.984.000,000		1.599.984.000,000		1.639.984.000,000		1.639.984.000,000		1.639.984.000,000
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					500.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000
Meningkatnya Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat (%)	3,20	5,50	7,50	500.000.000,000	8,50	550.000.000,000	9,50	550.000.000,000	10,05	550.000.000,000	11,05	550.000.000,000
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					919.984.000,000		999.984.000,000		1.039.984.000,000		1.039.984.000,000		1.039.984.000,000
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet Yang Berasal dari Kab/Kota Yang Masuk Palatda Provinsi (Persentase)	20,21	22,53	24,86	919.984.000,000	26,57	999.984.000,000	28,92	1.039.984.000,000	29,31	1.039.984.000,000	30,09	1.039.984.000,000
2.19.04 - PROGRAM					50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN													
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	60	60	65	50.000.000,000	70	50.000.000,000	75	50.000.000,000	80	50.000.000,000	85	50.000.000,000
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					158.579.000,000		358.579.000,000		458.579.000,000		458.579.000,000		458.579.000,000
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					158.579.000,000		358.579.000,000		458.579.000,000		458.579.000,000		458.579.000,000
Meningkatnya kualitas data sektoral perangkat daerah yang aktual dan akurat	Persentase Data Sektoral Perangkat Daerah yang akurat dan aktual (%)	0	21,9	27,30	158.579.000,000	33,30	358.579.000,000	39,40	458.579.000,000	45,50	458.579.000,000	51,50	458.579.000,000
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					120.983.000,000		320.983.000,000		320.983.000,000		320.983.000,000		320.983.000,000
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					120.983.000,000		320.983.000,000		320.983.000,000		320.983.000,000		320.983.000,000
Meningkatnya kualitas penyelenggaran persandian dan pengamanan informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	20	20	20	120.983.000,000	20	320.983.000,000	20	320.983.000,000	20	320.983.000,000	20	320.983.000,000
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.175.000.000,000		2.325.000.000,000		2.425.000.000,000		2.425.000.000,000		2.425.000.000,000
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					425.000.000,000		425.000.000,000		525.000.000,000		525.000.000,000		525.000.000,000
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Indeks)	10,00	15,00	20,00	425.000.000,000	25,00	425.000.000,000	30,00	525.000.000,000	35,00	525.000.000,000	40,00	525.000.000,000
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	30	50	67	250.000.000,000	83	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	12,00	14,00	15,00	200.000.000,000	16,25	200.000.000,000	17,50	200.000.000,000	18,75	200.000.000,000	20,00	200.000.000,000
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					850.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Jumlah Cagar budaya yang dilestarikan (%)	53,00	60,00	65,00	850.000.000,000	70,00	1.000.000.000,000	72,00	1.000.000.000,000	78,00	1.000.000.000,000	80,00	1.000.000.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					450.000.000,000		450.000.000,000		450.000.000,000		450.000.000,000		450.000.000,000
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	10,00	11,11	15,56	450.000.000,000	16,67	450.000.000,000	17,78	450.000.000,000	18,89	450.000.000,000	20,00	450.000.000,000
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					5.494.711.000,000		5.860.259.000,000		5.926.789.000,000		5.994.318.000,000		6.062.859.000,000
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.256.125.000,000		5.321.673.000,000		5.388.203.000,000		5.455.732.000,000		5.524.273.000,000
Meningkatnya kualitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase kinerja pelayanan internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (%)	80,10	82,20	84,15	5.256.125.000,000	85,70	5.321.673.000,000	86,95	5.388.203.000,000	89,12	5.455.732.000,000	92,25	5.524.273.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (%)	95,68	95,86	96,15		97,10		97,86		98,45		99,10	
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (%)	89,12	90,23	92,15		93,75		94,80		95,90		97,10	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					208.586.000,000		458.586.000,000		458.586.000,000		458.586.000,000		458.586.000,000
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan (%)	20,00	22,00	29,00	208.586.000,000	37,00	458.586.000,000	49,00	458.586.000,000	55,00	458.586.000,000	88,00	458.586.000,000
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					30.000.000,000		80.000.000,000		80.000.000,000		80.000.000,000		80.000.000,000
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (%)	0	11,49	25,28	30.000.000,000	41,37	80.000.000,000	58,61	80.000.000,000	78,18	80.000.000,000	100	80.000.000,000
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					53.317.000,000		157.317.000,000		157.317.000,000		157.317.000,000		157.317.000,000
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					53.317.000,000		157.317.000,000		157.317.000,000		157.317.000,000		157.317.000,000
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase arsip yang tersimpan dan terdokumentasi sesuai standar (%)	9,68	11,22	12,75	53.317.000,000	14,29	157.317.000,000	15,82	157.317.000,000	17,35	157.317.000,000	18,89	157.317.000,000
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					13.091.273.000,000		13.858.646.000,000		13.977.778.000,000		15.398.698.000,000		16.521.432.000,000
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.399.762.000,000		9.517.135.000,000		9.636.267.000,000		9.757.187.000,000		9.879.921.000,000
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	100	100	100	9.399.762.000,000	100	9.517.135.000,000	100	9.636.267.000,000	100	9.757.187.000,000	100	9.879.921.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.177.227.000,000		1.777.227.000,000		1.777.227.000,000		2.877.227.000,000		3.877.227.000,000
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	72.267	76.125	77.260	1.177.227.000,000	78.400	1.777.227.000,000	79.000	1.777.227.000,000	80.500	2.877.227.000,000	80.500	3.877.227.000,000
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.332.554.000,000		1.332.554.000,000		1.332.554.000,000		1.532.554.000,000		1.532.554.000,000
MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	194.821	202.000	204.000	1.332.554.000,000	206.000	1.332.554.000,000	208.000	1.332.554.000,000	210.000	1.532.554.000,000	210.000	1.532.554.000,000
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					255.923.000,000		305.923.000,000		305.923.000,000		305.923.000,000		305.923.000,000
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan keberlanjutan sumber daya perikanan melalui pengawasan yang efektif dan terintegrasi	Persentase pelaku usaha perikanan yang mematuhi peraturan perikanan (%)	1	1,5	2	255.923.000,000	2,5	305.923.000,000	3	305.923.000,000	3,5	305.923.000,000	4	305.923.000,000
	Persentase penurunan kasus pelanggaran bidang perikanan (%)	1	1,5	2		2,5		3		3,5		4	
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					925.807.000,000		925.807.000,000		925.807.000,000		925.807.000,000		925.807.000,000
Meningkatnya nilai tambah produk perikanan	Persentase produk perikanan yang diproses atau ditingkatkan nilainya (%)	1	1,5	2	925.807.000,000	2,5	925.807.000,000	3	925.807.000,000	3,5	925.807.000,000	4	925.807.000,000
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					8.871.082.000,000		10.388.805.000,000		10.477.843.000,000		11.288.218.000,000		11.979.948.000,000
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.429.896.000,000		6.517.619.000,000		6.606.657.000,000		6.697.032.000,000		6.788.762.000,000
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Pariwisata (%)	100	100	100	6.429.896.000,000	100	6.517.619.000,000	100	6.606.657.000,000	100	6.697.032.000,000	100	6.788.762.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Pariwisata (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase kinerja pelayanan internal Dinas Pariwisata (%)	100	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.040.960.000,000		1.990.960.000,000		1.990.960.000,000		2.710.960.000,000		3.310.960.000,000
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	10	11	12	1.040.960.000,000	13	1.990.960.000,000	14	1.990.960.000,000	15	2.710.960.000,000	16	3.310.960.000,000
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					961.891.000,000		961.891.000,000		961.891.000,000		961.891.000,000		961.891.000,000
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	0	0	20	961.891.000,000	33,30	961.891.000,000	37,50	961.891.000,000	45,50	961.891.000,000	50	961.891.000,000
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					230.000.000,000		710.000.000,000		710.000.000,000		710.000.000,000		710.000.000,000
Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi pengurusan HAKI (%)	2	2	2	230.000.000,000	2	710.000.000,000	2	710.000.000,000	2	710.000.000,000	2	710.000.000,000
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					208.335.000,000		208.335.000,000		208.335.000,000		208.335.000,000		208.335.000,000
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	0	43,48	60	208.335.000,000	63,63	208.335.000,000	80,88	208.335.000,000	93,33	208.335.000,000	100,00	208.335.000,000
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					91.447.058.000,000		92.237.658.000,000		93.219.817.000,000		101.013.708.000,000		106.719.508.000,000
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					56.223.305.000,000		56.993.905.000,000		57.776.064.000,000		58.569.955.000,000		59.375.755.000,000
Meningkatnya pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan (%)	100	100	100	37.776.982.000,000	100	38.302.341.000,000	100	38.835.581.000,000	100	39.376.820.000,000	100	39.926.177.000,000
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Pertanian dan Perkebunan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Pertanian dan Perkebunan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persentase pencapaian kinerja keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (%)	100	100	100	18.446.323.000,000	100	18.691.564.000,000	100	18.940.483.000,000	100	19.193.135.000,000	100	19.449.578.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					9.222.450.000,000		9.222.450.000,000		9.322.450.000,000		13.422.450.000,000		17.822.450.000,000
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	538.298	543.123	549.647	7.722.398.000,000	556.171	7.722.398.000,000	569.219	7.822.398.000,000	582.267	11.622.398.000,000	594.950	15.622.398.000,000
	Jumlah Produksi Kedelai (Ton)	3.875	4.214	5.092		5.970		6.848		7.726		8.624	
	Jumlah Produksi Padi (Ton)	231.279	253.340	256.887		260.483		264.129		267.827		271.000	
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura - Bawang Putih (Ton)	1.421	3.422	3.490		3.560		3.631		3.704		3.778	
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah (Ton)	115.773	148.250	151.215		154.239		157.323		160.465		163.607	
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura - Tembakau (Ton)	145	155	165		175		190		205		215	
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (Ton)	349,5	349,57	349,64		349,71		349,78		349,85		349,95	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana peternakan	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan - Ayam Pedaging (Ekor)	4.265.566	4.286.893	4.308.328	1.500.052.000,000	4.329.869	1.500.052.000,000	4.351.519	1.500.052.000,000	4.373.276	1.800.052.000,000	4.395.143	2.200.052.000,000
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan - Ayam Petelur (Ekor)	17.951	18.131	18.312		18.495		18.680		18.867		19.055	
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan - Kambing (Ekor)	112.816	113.944	115.084		116.234		117.397		118.571		119.756	
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan - Kerbau (Ekor)	19.142	19.333	19.572		19.722		19.919		20.118		20.320	
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan - Sapi (Ekor)	239.714	242.111	244.532		246.978		249.447		251.942		254.461	
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					23.055.441.000,000		23.075.441.000,000		23.175.441.000,000		25.975.441.000,000		26.375.441.000,000
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	5.000	5.000	5.000	22.655.441.000,000	5.000	22.675.441.000,000	10.000	22.775.441.000,000	10.000	25.175.441.000,000	10.000	25.175.441.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya ketersediaan prasarana peternakan	Persentase penyediaan prasarana peternakan (%)	52	55	60	400.000.000,000	65	400.000.000,000	70	400.000.000,000	75	800.000.000,000	80	1.200.000.000,000
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.050.000.000,000		1.050.000.000,000		1.050.000.000,000		1.050.000.000,000		1.050.000.000,000
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveilance penyakit dari 5 PHMS) (%)	83	85	87	1.050.000.000,000	89	1.050.000.000,000	91	1.050.000.000,000	93	1.050.000.000,000	95	1.050.000.000,000
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					650.000.000,000		650.000.000,000		650.000.000,000		650.000.000,000		650.000.000,000
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana dampak perubahan iklim Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (%)	100	100	100	650.000.000,000	100	650.000.000,000	100	650.000.000,000	100	650.000.000,000	100	650.000.000,000
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase izin usaha pertanian di terbitkan (%)	100	100	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.045.862.000,000		1.045.862.000,000		1.045.862.000,000		1.145.862.000,000		1.245.862.000,000
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya (%)	5	5	5	1.000.000.000,000	5	1.000.000.000,000	5	1.000.000.000,000	5	1.000.000.000,000	5	1.000.000.000,000
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	5	5	5	45.862.000,000	5	45.862.000,000	5	45.862.000,000	5	145.862.000,000	5	245.862.000,000
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.885.066.000,000		1.940.066.000,000		2.060.066.000,000		2.060.066.000,000		2.060.066.000,000
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					57.654.000,000		57.654.000,000		57.654.000,000		57.654.000,000		57.654.000,000
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan (%)	100	100	100	57.654.000,000	100	57.654.000,000	100	57.654.000,000	100	57.654.000,000	100	57.654.000,000
	Persentase Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan (%)	100	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	20	20	20	35.000.000,000	20	35.000.000,000	30	35.000.000,000	30	35.000.000,000	30	35.000.000,000
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					1.098.229.000,000		1.098.229.000,000		1.098.229.000,000		1.098.229.000,000		1.098.229.000,000
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	28	40	52	1.098.229.000,000	64	1.098.229.000,000	76	1.098.229.000,000	88	1.098.229.000,000	100	1.098.229.000,000
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					335.227.000,000		335.227.000,000		335.227.000,000		335.227.000,000		335.227.000,000
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	25	25	25	335.227.000,000	25	335.227.000,000	25	335.227.000,000	25	335.227.000,000	100	335.227.000,000
	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	77	81	85		89		93		97		100	
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					0,000		55.000.000,000		175.000.000,000		175.000.000,000		175.000.000,000
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase pelaku usaha lokal yang mengekspor produk unggulan (%)	9	8	7	0,000	7	55.000.000,000	6	175.000.000,000	6	175.000.000,000	6	175.000.000,000
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					62.460.000,000		62.460.000,000		62.460.000,000		62.460.000,000		62.460.000,000
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Persentase)	26,67	27,78	28,89	62.460.000,000	30,00	62.460.000,000	31,11	62.460.000,000	31,11	62.460.000,000	31,11	62.460.000,000
	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	0	10	20		30		30		40		50	
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					296.496.000,000		296.496.000,000		296.496.000,000		296.496.000,000		296.496.000,000
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	2,5	2,5	2,5	296.496.000,000	2,5	296.496.000,000	2,5	296.496.000,000	2,5	296.496.000,000	5,2	296.496.000,000
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					7.732.200.000,000		7.966.902.000,000		8.059.979.000,000		8.134.452.000,000		8.230.344.000,000
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.554.115.000,000		6.645.817.000,000		6.738.894.000,000		6.833.367.000,000		6.929.259.000,000
Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Perindustrian dan	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan	100	100	100	6.554.115.000,000	100	6.645.817.000,000	100	6.738.894.000,000	100	6.833.367.000,000	100	6.929.259.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perdagangan	program Dinas Perindustrian dan Perdagangan (%)												
	Persentase Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.108.085.000,000		1.128.085.000,000		1.128.085.000,000		1.108.085.000,000		1.108.085.000,000
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri daerah (%)	0	2	3	1.108.085.000,000	5	1.128.085.000,000	8	1.128.085.000,000	10	1.108.085.000,000	15	1.108.085.000,000
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					35.000.000,000		158.000.000,000		158.000.000,000		158.000.000,000		158.000.000,000
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan. (%)	0	5	10	35.000.000,000	25	158.000.000,000	40	158.000.000,000	60	158.000.000,000	65	158.000.000,000
	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal "Baik" dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan. (%)	0	2	5		20		30		50		50	
	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor (%)	0	5	10		10		35		40		40	
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini (%)	40	50	75	35.000.000,000	90	35.000.000,000	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN					469.602.000,000		469.602.000,000		469.602.000,000		469.602.000,000		469.602.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BIDANG TRANSMIGRASI													
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					469.602.000,000		469.602.000,000		469.602.000,000		469.602.000,000		469.602.000,000
Meningkatnya pemberdayaan dan pembinaan kawasan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	50,00	55,00	60,00	469.602.000,000	65,00	469.602.000,000	70,00	469.602.000,000	75,00	469.602.000,000	80,00	469.602.000,000
	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	0	2,00	3,50		5,00		7,50		10,00		12,00	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					56.793.337.000,000		57.194.980.000,000		58.172.313.000,000		58.694.406.000,000		59.521.327.000,000
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					41.187.999.000,000		41.500.642.000,000		41.817.975.000,000		42.340.068.000,000		42.966.989.000,000
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	63,10	65	68	3.888.890.000,000	71	3.888.890.000,000	75	3.888.890.000,000	79	3.888.890.000,000	82	3.888.890.000,000
	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N (Nilai)	96,68	96,68	96,68		96,68		96,68		96,68		96,68	
	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Penguatan Kelembagaan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan penguatan Reformasi Birokrasi (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas keuangan dan pelayanan internal Sekretariat Daerah	Persentase kinerja pelayanan internal Setda (%)	100	100	100	31.379.599.000,000	100	31.692.242.000,000	100	32.009.575.000,000	100	32.331.668.000,000	100	32.658.589.000,000
	Persentase Pencapaian Kinerja Keuangan Setda (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persentase Capaian audiensi dan koordinasi antar perangkat daerah yang difasilitasi (%)	100	100	100	5.919.510.000,000	100	5.919.510.000,000	100	5.919.510.000,000	100	6.119.510.000,000	100	6.419.510.000,000
	Persentase Capaian Kegiatan Keprotokolan yang terlaksana Sesuai Standar (%)	100	100	100		100		100		100		100	
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					12.990.838.000,000		13.079.838.000,000		13.739.838.000,000		13.739.838.000,000		13.939.838.000,000
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Bidang Adminstrasi Tata Pemerintahan	Persentase kualitas kinerja pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi tata pemerintahan (%)	100	100	100	1.650.000.000,000	100	1.650.000.000,000	100	1.650.000.000,000	100	1.650.000.000,000	100	1.650.000.000,000
Meningkatnya kualitas produk	Persentase Produk Hukum	100	100	100	737.000.000,000	100	826.000.000,000	100	1.026.000.000,000	100	1.026.000.000,000	100	1.226.000.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
hukum yang dihasilkan	yang Dihasilkan (Persentase)												
Meningkatnya realisasi kerja sama yang telah disepakati	Persentase kerja sama yang direalisasikan (%)	100	100	100	467.500.000,000	100	467.500.000,000	100	467.500.000,000	100	467.500.000,000	100	467.500.000,000
Meningkatnya kualitas kinerja pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	10.136.338.000,000	100	10.136.338.000,000	100	10.596.338.000,000	100	10.596.338.000,000	100	10.596.338.000,000
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.614.500.000,000		2.614.500.000,000		2.614.500.000,000		2.614.500.000,000		2.614.500.000,000
Meningkatkan Efektifitas pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	80	80	83	664.500.000,000	85	664.500.000,000	90	664.500.000,000	95	664.500.000,000	100	664.500.000,000
Meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi kebijakan sumber daya alam	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	470.000.000,000	100	470.000.000,000	100	470.000.000,000	100	470.000.000,000	100	470.000.000,000
Meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan daerah	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Sekretariat Daerah (%)	90	100	100	800.000.000,000	100	800.000.000,000	100	800.000.000,000	100	800.000.000,000	100	800.000.000,000
	Persentase program pembangunan daerah yang dilakukan pengawasan dan evaluasi (%)	75	100	100		100		100		100		100	
Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (Poin)	6,43	8,8	11,02	680.000.000,000	18,36	680.000.000,000	23,51	680.000.000,000	31,22	680.000.000,000	36,73	680.000.000,000
	Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Poin)	12,96	28	30		45		50		75		80	
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					49.311.671.000,000		49.415.831.000,000		49.521.552.000,000		49.628.861.000,000		49.737.776.000,000
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.158.871.000,000		35.263.031.000,000		35.368.752.000,000		35.476.061.000,000		35.584.976.000,000
Meningkatnya pencapaian kinerja Sekretariat DPRD	Persentase kinerja pelayanan internal Sekretariat DPRD (%)	100,00	100,00	100,00	35.158.871.000,000	100,00	35.263.031.000,000	100,00	35.368.752.000,000	100,00	35.476.061.000,000	100,00	35.584.976.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Sekretariat DPRD (%)	96,64	96,70	96,80		96,90		97,00		97,10		97,25	
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Sekretariat DPRD (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					14.152.800.000,000		14.152.800.000,000		14.152.800.000,000		14.152.800.000,000		14.152.800.000,000
Meningkatnya tingkat fasilitasi Sekretariat DPRD dalam	Persentase fasilitasi kepada DPRD dalam	70	70	70	2.743.200.000,000	70	2.743.200.000,000	70	2.743.200.000,000	70	2.743.200.000,000	70	2.743.200.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan oleh DPRD secara	pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan (%)												
Meningkatnya tingkat fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan oleh DPRD secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tingkat fasilitasi kepada DPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran (%)	100,00	100,00	100,00	5.225.000.000,000	100,00	5.225.000.000,000	100,00	5.225.000.000,000	100,00	5.225.000.000,000	100,00	5.225.000.000,000
Meningkatnya tingkat fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan oleh DPRD secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tingkat fasilitasi kepada DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan (%)	100,00	100,00	100,00	6.184.600.000,000	100,00	6.184.600.000,000	100,00	6.184.600.000,000	100,00	6.184.600.000,000	100,00	6.184.600.000,000
5.01 - PERENCANAAN					12.534.210.000,000		12.835.574.000,000		12.938.459.000,000		13.042.885.000,000		14.348.879.000,000
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.307.209.000,000		8.408.573.000,000		8.511.458.000,000		8.615.884.000,000		8.721.878.000,000
Meningkatnya pencapaian kinerja Bappeda	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Bappeda (%)	100	100	100	8.307.209.000,000	100	8.408.573.000,000	100	8.511.458.000,000	100	8.615.884.000,000	100	8.721.878.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Bappeda (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase kinerja pelayanan internal Bappeda (%)	100	100	100		100		100		100		100	
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.296.001.000,000		1.496.001.000,000		1.496.001.000,000		1.496.001.000,000		2.696.001.000,000
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd (Persentase)	85	90	94	1.296.001.000,000	96	1.496.001.000,000	98	1.496.001.000,000	100	1.496.001.000,000	100	2.696.001.000,000
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	85	90	94		96		98		100		100	
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.931.000.000,000		2.931.000.000,000		2.931.000.000,000		2.931.000.000,000		2.931.000.000,000
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	85	90	95	945.000.000,000	96	945.000.000,000	98	945.000.000,000	100	945.000.000,000	100	945.000.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia"	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	85	90	94	1.010.000.000,000	96	1.010.000.000,000	98	1.010.000.000,000	100	1.010.000.000,000	100	1.010.000.000,000
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	85	90	95	976.000.000,000	96	976.000.000,000	98	976.000.000,000	100	976.000.000,000	100	976.000.000,000
5.02 - KEUANGAN					345.293.464.000,000		345.538.129.000,000		351.186.463.000,000		357.058.522.000,000		362.614.364.000,000
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.188.223.000,000		21.432.888.000,000		21.681.222.000,000		21.933.281.000,000		22.189.123.000,000
Meningkatnya pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (%)	100	100	100	6.800.022.000,000	100	6.878.852.000,000	100	6.958.864.000,000	100	7.040.076.000,000	100	7.122.508.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase kinerja pelayanan internal Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program BPKAD (%)	100	100	100	14.388.201.000,000	100	14.554.036.000,000	100	14.722.358.000,000	100	14.893.205.000,000	100	15.066.615.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan BPKAD (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase kinerja pelayanan internal BPKAD (%)	100	100	100		100		100		100		100	
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					318.921.654.000,000		318.921.654.000,000		321.901.654.000,000		326.921.654.000,000		331.921.654.000,000
Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran keuangan daerah	Persentase alokasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar terhadap Total belanja APBD Tahun N (%)	61,56	65	65	2.110.960.000,000	65	2.110.960.000,000	70	2.110.960.000,000	70	2.110.960.000,000	80	2.110.960.000,000
	Persentase Belanja pegawai Daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya	87,99	89,09	90,29		91,49		92,49		93,49		94,69	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(%)												
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	14,34	15,64	16,64		17,84		18,84		19,84		21,04	
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	61,01	62,31	63,51	315.144.922.000,000	64,71	315.144.922.000,000	65,91	318.124.922.000,000	67,11	323.144.922.000,000	68,31	328.144.922.000,000
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (%)	100	100	100	1.665.772.000,000	100	1.665.772.000,000	100	1.665.772.000,000	100	1.665.772.000,000	100	1.665.772.000,000
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.895.836.000,000		1.895.836.000,000		1.895.836.000,000		1.895.836.000,000		1.895.836.000,000
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Barang Milik Daerah secara baik (%)	90	100	100	1.895.836.000,000	100	1.895.836.000,000	100	1.895.836.000,000	100	1.895.836.000,000	100	1.895.836.000,000
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.287.751.000,000		3.287.751.000,000		5.707.751.000,000		6.307.751.000,000		6.607.751.000,000
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase peningkatan Pajak Daerah (%)	17,52	48,90	49	2.219.708.000,000	49,50	2.219.708.000,000	50	4.419.708.000,000	50	5.019.708.000,000	50	5.319.708.000,000
	Persentase peningkatan Retribusi Daerah (%)	13	798,5	5		5		5		5		5	
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	3	2,5	3	863.043.000,000	3,5	863.043.000,000	4	963.043.000,000	4,5	963.043.000,000	5	963.043.000,000
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	80	80	80	205.000.000,000	90	205.000.000,000	90	325.000.000,000	100	325.000.000,000	100	325.000.000,000
5.03 - KEPEGAWAIAN					7.819.450.000,000		7.902.322.000,000		8.396.436.000,000		8.611.814.000,000		8.698.470.000,000
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.260.803.000,000		6.343.675.000,000		6.427.789.000,000		6.513.167.000,000		6.599.823.000,000
Meningkatnya kualitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah	Persentase pencapaian kinerja keuangan Badan Kepegawaian Daerah (%)	98,20	100,00	100,00	6.260.803.000,000	100,00	6.343.675.000,000	100,00	6.427.789.000,000	100,00	6.513.167.000,000	100,00	6.599.823.000,000
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Badan Kepegawaian Daerah (%)	98,20	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Badan Kepegawaian Daerah (%)	98,20	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.558.647.000,000		1.558.647.000,000		1.968.647.000,000		2.098.647.000,000		2.098.647.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian (%)	100,00	100,00	100,00	700.000.000,000	100,00	700.000.000,000	100,00	1.050.000.000,000	100,00	1.100.000.000,000	100,00	1.100.000.000,000
	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (%)	80	80	85		85		90		95		100	
Meningkatnya ketersediaan ASN yang berkualifikasi pendidikan tinggi	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	70,00	72,00	74,00	60.000.000,000	76,00	60.000.000,000	80,00	120.000.000,000	85,00	200.000.000,000	85,50	200.000.000,000
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	60	60	65	716.647.000,000	70	716.647.000,000	75	716.647.000,000	80	716.647.000,000	90	716.647.000,000
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	60	60	65	82.000.000,000	70	82.000.000,000	75	82.000.000,000	80	82.000.000,000	90	82.000.000,000
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.144.346.000,000		1.144.346.000,000		1.144.346.000,000		1.144.346.000,000		1.144.346.000,000
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.144.346.000,000		1.144.346.000,000		1.144.346.000,000		1.144.346.000,000		1.144.346.000,000
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	15	15	35	319.346.000,000	60	319.346.000,000	85	319.346.000,000	100	319.346.000,000	100	319.346.000,000
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%)	15	15	35	600.000.000,000	60	600.000.000,000	85	600.000.000,000	100	600.000.000,000	100	600.000.000,000
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	15	15	35	225.000.000,000	60	225.000.000,000	85	225.000.000,000	100	225.000.000,000	100	225.000.000,000
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					3.367.048.000,000		3.385.884.000,000		3.405.003.000,000		3.424.408.000,000		3.444.104.000,000
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.997.503.000,000		2.016.339.000,000		2.035.458.000,000		2.054.863.000,000		2.074.559.000,000
Meningkatnya Pencapaian Kinerja BRIDA	Persentase pencapaian kinerja keuangan BRIDA (%)	-	100,00	100,00	1.997.503.000,000	100,00	2.016.339.000,000	100,00	2.035.458.000,000	100,00	2.054.863.000,000	100,00	2.074.559.000,000
	Persentase kinerja pelayanan internal BRIDA (%)	0	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program BRIDA (%)	0	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					40.340.000,000		40.340.000,000		40.340.000,000		40.340.000,000		40.340.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai landasan pengambilan keputusan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah (%)	60,00	60,00	70,00	40.340.000,000	80,00	40.340.000,000	90,00	40.340.000,000	100,00	40.340.000,000	100,00	40.340.000,000
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.329.205.000,000		1.329.205.000,000		1.329.205.000,000		1.329.205.000,000		1.329.205.000,000
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)	0	60	80	1.329.205.000,000	80	1.329.205.000,000	90	1.329.205.000,000	100	1.329.205.000,000	100	1.329.205.000,000
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					17.441.448.000,000		18.130.618.000,000		18.386.601.000,000		19.538.716.000,000		20.794.699.000,000
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.723.604.000,000		11.872.774.000,000		12.024.182.000,000		12.177.861.000,000		12.333.844.000,000
Meningkatnya pencapaian kinerja Inspektorat	Persentase kinerja pelayanan internal Inspektorat (%)	100,00	100,00	100,00	11.723.604.000,000	100,00	11.872.774.000,000	100,00	12.024.182.000,000	100,00	12.177.861.000,000	100,00	12.333.844.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Inspektorat (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Inspektorat (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					4.513.787.000,000		4.913.787.000,000		5.018.362.000,000		5.976.798.000,000		7.076.798.000,000
Menurunnya penyelewengan/ penyimpangan, baik yang bersifat anggaran, proses atau kewenangan	Tindakanjutan Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	84,00	84,00	85,00	3.671.417.000,000	87,00	4.071.417.000,000	90,00	4.175.992.000,000	94,00	5.134.428.000,000	98,00	6.234.428.000,000
Meningkatnya kualitas dan tingkat kematangan penerapan sistem manajemen risiko	Manajemen Risiko Indeks (Nilai)	3,00	3,11	3,15	842.370.000,000	3,18	842.370.000,000	3,20	842.370.000,000	3,22	842.370.000,000	3,25	842.370.000,000
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.204.057.000,000		1.344.057.000,000		1.344.057.000,000		1.384.057.000,000		1.384.057.000,000
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	1.204.057.000,000	Terintegrasi (Integrated)	1.344.057.000,000	Terintegrasi (Integrated)	1.344.057.000,000	Terintegrasi (Integrated)	1.384.057.000,000	Terintegrasi (Integrated)	1.384.057.000,000
7.01 - KECAMATAN					43.477.822.000,000		47.795.769.000,000		48.349.665.000,000		48.911.862.000,000		49.482.504.000,000
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					39.458.283.000,000		40.003.993.000,000		40.557.889.000,000		41.120.086.000,000		41.690.728.000,000
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Ambalawati	Persentase pencapaian kinerja keuangan Kecamatan (%)	100	100	100	2.031.541.000,000	100	2.059.361.000,000	100	2.087.599.000,000	100	2.116.259.000,000	100	2.145.351.000,000
	Persentase Pencapaian	100	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kinerja pelaksanaan program Kecamatan (%)												
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Belo	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Kecamatan (%)	100	100	100	1.554.927.000,000	100	1.576.050.000,000	100	1.597.490.000,000	100	1.619.251.000,000	100	1.641.339.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Bolo	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Kecamatan (%)	100	100	100	2.854.323.000,000	100	2.893.667.000,000	100	2.933.601.000,000	100	2.974.132.000,000	100	3.015.273.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Donggo	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Kecamatan (%)	100	100	100	1.837.759.000,000	100	1.863.559.000,000	100	1.889.746.000,000	100	1.916.326.000,000	100	1.943.306.000,000
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Lambitu	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Kecamatan (%)	100	100	100	1.874.612.000,000	100	1.900.728.000,000	100	1.927.234.000,000	100	1.954.140.000,000	100	1.981.448.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Lambu	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Kecamatan (%)	100	100	100	2.451.581.000,000	100	2.487.038.000,000	100	2.523.019.000,000	100	2.559.542.000,000	100	2.596.610.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Langgudu	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Kecamatan (%)	100	100	100	2.097.323.000,000	100	2.125.819.000,000	100	2.154.743.000,000	100	2.184.099.000,000	100	2.213.899.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Madapangga	Kecamatan (%)	100	100	100	2.922.926.000,000	100	2.963.707.000,000	100	3.005.099.000,000	100	3.047.113.000,000	100	3.089.757.000,000
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Monta	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Kecamatan (%)	100	100	100	2.199.811.000,000	100	2.230.537.000,000	100	2.261.726.000,000	100	2.293.381.000,000	100	2.325.512.000,000
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Palibelo	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Kecamatan (%)	100	100	100	1.953.965.000,000	100	1.981.217.000,000	100	2.008.879.000,000	100	2.036.956.000,000	100	2.065.453.000,000
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Parado	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Kecamatan (%)	100	100	100	1.653.566.000,000	100	1.676.844.000,000	100	1.700.470.000,000	100	1.724.451.000,000	100	1.748.793.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Sanggar	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Kecamatan (%)	100	100	100	2.386.396.000,000	100	2.419.614.000,000	100	2.453.332.000,000	100	2.487.554.000,000	100	2.522.292.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Sape	Persentase pencapaian kinerja keuangan Kecamatan (%)	100	100	100	2.226.644.000,000	100	2.257.601.000,000	100	2.289.024.000,000	100	2.320.916.000,000	100	2.353.288.000,000
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Soromandi	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Kecamatan (%)	100	100	100	1.825.307.000,000	100	1.849.982.000,000	100	1.875.029.000,000	100	1.900.450.000,000	100	1.926.253.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Tambora					2.064.168.000,000		2.092.728.000,000		2.121.718.000,000		2.151.142.000,000		2.181.008.000,000
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Wawo	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Kecamatan (%)	100	100	100	2.159.341.000,000	100	2.188.915.000,000	100	2.218.935.000,000	100	2.249.404.000,000	100	2.280.331.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Wera	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Kecamatan (%)	100	100	100	2.554.901.000,000	100	2.589.321.000,000	100	2.624.255.000,000	100	2.659.715.000,000	100	2.695.706.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Woha	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Kecamatan (%)	100	100	100	2.809.192.000,000	100	2.847.305.000,000	100	2.885.990.000,000	100	2.925.255.000,000	100	2.965.109.000,000
	Persentase pencapaian kinerja keuangan Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.282.399.000,000		2.854.860.000,000		2.854.860.000,000		2.854.860.000,000		2.854.860.000,000
Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelenggaraan layanan Kecamatan Ambalawi	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (%)	100	100	100	90.700.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000
Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelenggaraan layanan Kecamatan Belo	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (%)	100	100	100	64.550.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000
Meningkatnya ketepatan waktu	Persentase layanan	100	100	100	119.240.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
dalam penyelenggaraan layanan Kecamatan Bolo	kecamatan tepat waktu (%)												
Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelenggaraan layanan Kecamatan Donggo	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (%)	100	100	100	49.005.000,000	100	159.807.000,000	100	159.807.000,000	100	159.807.000,000	100	159.807.000,000
Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelenggaraan layanan Kecamatan Lambitu	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (%)	100	100	100	33.838.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000
Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelenggaraan layanan Kecamatan Lambu	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (%)	100	100	100	146.060.000,000	100	170.000.000,000	100	170.000.000,000	100	170.000.000,000	100	170.000.000,000
Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelenggaraan layanan Kecamatan Langgudu	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (%)	100	100	100	93.740.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000
Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelenggaraan layanan Kecamatan Madapangga	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (%)	100	100	100	93.181.000,000	100	182.500.000,000	100	182.500.000,000	100	182.500.000,000	100	182.500.000,000
Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelenggaraan layanan Kecamatan Monta	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (%)	100	100	100	78.857.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000
Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelenggaraan layanan Kecamatan Palibelo	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (%)	100	100	100	73.553.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000
Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelenggaraan layanan Kecamatan Parado	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (%)	100	100	100	68.690.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000
Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelenggaraan layanan Kecamatan Sanggar	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (%)	100	100	100	34.509.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000
Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelenggaraan layanan Kecamatan Sape	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (%)	100	100	100	97.850.000,000	100	196.250.000,000	100	196.250.000,000	100	196.250.000,000	100	196.250.000,000
Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelenggaraan layanan Kecamatan Soromandi	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (%)	100	100	100	45.851.000,000	100	187.891.000,000	100	187.891.000,000	100	187.891.000,000	100	187.891.000,000
Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelenggaraan layanan Kecamatan Tambora	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (%)	100	100	100	23.365.000,000	100	158.412.000,000	100	158.412.000,000	100	158.412.000,000	100	158.412.000,000
Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelenggaraan layanan Kecamatan Wawo	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (%)	100	100	100	30.900.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000
Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelenggaraan layanan Kecamatan Wera	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (%)	100	100	100	75.135.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000
Meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelenggaraan layanan Kecamatan Woha	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (%)	100	100	100	63.375.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					224.286.000,000		224.286.000,000		224.286.000,000		224.286.000,000		224.286.000,000
Meningkatnya partisipasi desa dan kelurahan dalam pemberdayaan	Persentase desa dan kelurahan yang	100	100	100	4.100.000,000	100	4.100.000,000	100	4.100.000,000	100	4.100.000,000	100	4.100.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ekonomi masyarakat Kecamatan Ambalawi	berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (%)												
Meningkatnya partisipasi desa dan kelurahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Belo	Persentase desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (%)	100	100	100	9.850.000,000	100	9.850.000,000	100	9.850.000,000	100	9.850.000,000	100	9.850.000,000
Meningkatnya partisipasi desa dan kelurahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Bolo	Persentase desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (%)	100	100	100	2.136.000,000	100	2.136.000,000	100	2.136.000,000	100	2.136.000,000	100	2.136.000,000
Meningkatnya partisipasi desa dan kelurahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Donggo	Persentase desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (%)	100	100	100	19.200.000,000	100	19.200.000,000	100	19.200.000,000	100	19.200.000,000	100	19.200.000,000
Meningkatnya partisipasi desa dan kelurahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Lambitu	Persentase desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (%)	100	100	100	12.366.000,000	100	12.366.000,000	100	12.366.000,000	100	12.366.000,000	100	12.366.000,000
Meningkatnya partisipasi desa dan kelurahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Lambu	Persentase desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (%)	100	100	100	6.000.000,000	100	6.000.000,000	100	6.000.000,000	100	6.000.000,000	100	6.000.000,000
Meningkatnya partisipasi desa dan kelurahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Langgudu	Persentase desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (%)	100	100	100	7.000.000,000	100	7.000.000,000	100	7.000.000,000	100	7.000.000,000	100	7.000.000,000
Meningkatnya partisipasi desa dan kelurahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Madapangga	Persentase desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (%)	100	100	100	7.000.000,000	100	7.000.000,000	100	7.000.000,000	100	7.000.000,000	100	7.000.000,000
Meningkatnya partisipasi desa dan kelurahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Monta					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
Meningkatnya partisipasi desa dan kelurahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Palibelo	Persentase desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (%)	80	85	85	13.321.000,000	90	13.321.000,000	95	13.321.000,000	95	13.321.000,000	100	13.321.000,000
Meningkatnya partisipasi desa dan kelurahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Parado	Persentase desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (%)	100	100	100	17.500.000,000	100	17.500.000,000	100	17.500.000,000	100	17.500.000,000	100	17.500.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya partisipasi desa dan kelurahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Sanggar	Persentase desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (%)	100	100	100	2.500.000,000	100	2.500.000,000	100	2.500.000,000	100	2.500.000,000	100	2.500.000,000
Meningkatnya partisipasi desa dan kelurahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Sape	Persentase desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (%)	100	100	100	33.950.000,000	100	33.950.000,000	100	33.950.000,000	100	33.950.000,000	100	33.950.000,000
Meningkatnya partisipasi desa dan kelurahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Soromandi	Persentase desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (%)	100	100	100	14.560.000,000	100	14.560.000,000	100	14.560.000,000	100	14.560.000,000	100	14.560.000,000
Meningkatnya partisipasi desa dan kelurahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Tambora	Persentase desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (%)	100	100	100	26.850.000,000	100	26.850.000,000	100	26.850.000,000	100	26.850.000,000	100	26.850.000,000
Meningkatnya partisipasi desa dan kelurahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Wawo	Persentase desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (%)	100	100	100	11.645.000,000	100	11.645.000,000	100	11.645.000,000	100	11.645.000,000	100	11.645.000,000
Meningkatnya partisipasi desa dan kelurahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Wera	Persentase desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (%)	100	100	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000
Meningkatnya partisipasi desa dan kelurahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Woha	Persentase desa dan kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (%)	100	100	100	28.808.000,000	100	28.808.000,000	100	28.808.000,000	100	28.808.000,000	100	28.808.000,000
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					705.016.000,000		705.016.000,000		705.016.000,000		705.016.000,000		705.016.000,000
Meningkatnya dukungan penanganan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Ambalawi	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000
Meningkatnya dukungan penanganan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Belo	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	67.150.000,000	100	67.150.000,000	100	67.150.000,000	100	67.150.000,000	100	67.150.000,000
Meningkatnya dukungan penanganan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Bolo	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000
Meningkatnya dukungan penanganan ketentraman dan	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	100	100	100	36.650.000,000	100	36.650.000,000	100	36.650.000,000	100	36.650.000,000	100	36.650.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ketertiban umum Kecamatan Donggo	umum yang ditindaklanjuti (%)												
Meningkatnya dukungan penanganan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Lambitu	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000
Meningkatnya dukungan penanganan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Lambu	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	60.140.000,000	100	60.140.000,000	100	60.140.000,000	100	60.140.000,000	100	60.140.000,000
Meningkatnya dukungan penanganan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Langgudu	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000
Meningkatnya dukungan penanganan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Madapangga	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000
Meningkatnya dukungan penanganan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Monta	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000	100	32.500.000,000
Meningkatnya dukungan penanganan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Palibelo	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	80	85	85	39.990.000,000	90	39.990.000,000	95	39.990.000,000	95	39.990.000,000	100	39.990.000,000
Meningkatnya dukungan penanganan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Parado	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	39.446.000,000	100	39.446.000,000	100	39.446.000,000	100	39.446.000,000	100	39.446.000,000
Meningkatnya dukungan penanganan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sanggar	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	63.500.000,000	100	63.500.000,000	100	63.500.000,000	100	63.500.000,000	100	63.500.000,000
Meningkatnya dukungan penanganan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sape	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	74.674.000,000	100	74.674.000,000	100	74.674.000,000	100	74.674.000,000	100	74.674.000,000
Meningkatnya dukungan penanganan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Soromandi	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	43.740.000,000	100	43.740.000,000	100	43.740.000,000	100	43.740.000,000	100	43.740.000,000
Meningkatnya dukungan penanganan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Tambora	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	38.060.000,000	100	38.060.000,000	100	38.060.000,000	100	38.060.000,000	100	38.060.000,000
Meningkatnya dukungan penanganan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Wawo	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	40.500.000,000	100	40.500.000,000	100	40.500.000,000	100	40.500.000,000	100	40.500.000,000
Meningkatnya dukungan penanganan ketentraman dan					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ketertiban umum Kecamatan Wera													
Meningkatnya dukungan penanganan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Wohu	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	38.666.000,000	100	38.666.000,000	100	38.666.000,000	100	38.666.000,000	100	38.666.000,000
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.155.558.000,000		1.155.558.000,000		1.155.558.000,000		1.155.558.000,000		1.155.558.000,000
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik sosial Kecamatan Ambalawi	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial (%)	100	100	100	45.520.000,000	100	45.520.000,000	100	45.520.000,000	100	45.520.000,000	100	45.520.000,000
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik sosial Kecamatan Belo	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial (%)	100	100	100	60.680.000,000	100	60.680.000,000	100	60.680.000,000	100	60.680.000,000	100	60.680.000,000
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik sosial Kecamatan Bolo	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial (%)	100	100	100	115.294.000,000	100	115.294.000,000	100	115.294.000,000	100	115.294.000,000	100	115.294.000,000
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik sosial Kecamatan Donggo	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial (%)	100	100	100	74.600.000,000	100	74.600.000,000	100	74.600.000,000	100	74.600.000,000	100	74.600.000,000
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik sosial Kecamatan Lambitu	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial (%)	100	100	100	18.186.000,000	100	18.186.000,000	100	18.186.000,000	100	18.186.000,000	100	18.186.000,000
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik sosial Kecamatan Lambu	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial (%)	100	100	100	69.050.000,000	100	69.050.000,000	100	69.050.000,000	100	69.050.000,000	100	69.050.000,000
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik sosial Kecamatan Langgudu	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial (%)	100	100	100	49.450.000,000	100	49.450.000,000	100	49.450.000,000	100	49.450.000,000	100	49.450.000,000
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik sosial Kecamatan Madapangga	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial (%)	100	100	100	45.250.000,000	100	45.250.000,000	100	45.250.000,000	100	45.250.000,000	100	45.250.000,000
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik sosial Kecamatan Monta	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial (%)	100	100	100	76.410.000,000	100	76.410.000,000	100	76.410.000,000	100	76.410.000,000	100	76.410.000,000
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik sosial Kecamatan Palibelo	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial (%)	100	100	100	58.008.000,000	100	58.008.000,000	100	58.008.000,000	100	58.008.000,000	100	58.008.000,000
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik sosial Kecamatan Parado	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial (%)	100	100	100	42.694.000,000	100	42.694.000,000	100	42.694.000,000	100	42.694.000,000	100	42.694.000,000
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik sosial Kecamatan Sanggar	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial (%)	100	100	100	53.219.000,000	100	53.219.000,000	100	53.219.000,000	100	53.219.000,000	100	53.219.000,000
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik sosial Kecamatan Sape	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial (%)	100	100	100	60.621.000,000	100	60.621.000,000	100	60.621.000,000	100	60.621.000,000	100	60.621.000,000
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik sosial Kecamatan soromandi	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial (%)	100	100	100	74.918.000,000	100	74.918.000,000	100	74.918.000,000	100	74.918.000,000	100	74.918.000,000
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik sosial	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial	100	100	100	109.400.000,000	100	109.400.000,000	100	109.400.000,000	100	109.400.000,000	100	109.400.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kecamatan Tambora	(%)	100	100	100	72.110.000,000	100	72.110.000,000	100	72.110.000,000	100	72.110.000,000	100	72.110.000,000
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik sosial Kecamatan Wawo	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial (%)	100	100	100	47.180.000,000	100	47.180.000,000	100	47.180.000,000	100	47.180.000,000	100	47.180.000,000
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik sosial Kecamatan Wera	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial (%)	100	100	100	82.968.000,000	100	82.968.000,000	100	82.968.000,000	100	82.968.000,000	100	82.968.000,000
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik sosial Kecamatan Woha	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial (%)	100	100	100	652.280.000,000	100	2.852.056.000,000	100	2.852.056.000,000	100	2.852.056.000,000	100	2.852.056.000,000
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
Meningkatnya cakupan Desa dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Ambalawi	Persentase desa dan kelurahan yang diberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (%)	100	100	100	36.350.000,000	100	162.870.000,000	100	162.870.000,000	100	162.870.000,000	100	162.870.000,000
Meningkatnya cakupan Desa dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Belo	Persentase desa dan kelurahan yang diberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (%)	100	100	100	51.442.000,000	100	176.265.000,000	100	176.265.000,000	100	176.265.000,000	100	176.265.000,000
Meningkatnya cakupan Desa dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Bolo	Persentase desa dan kelurahan yang diberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (%)	100	100	100	22.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000
Meningkatnya cakupan Desa dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Donggo	Persentase desa dan kelurahan yang diberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (%)	100	100	100	31.250.000,000	100	153.750.000,000	100	153.750.000,000	100	153.750.000,000	100	153.750.000,000
Meningkatnya cakupan Desa dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Lambitu	Persentase desa dan kelurahan yang diberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (%)	100	100	100	23.640.000,000	100	164.728.000,000	100	164.728.000,000	100	164.728.000,000	100	164.728.000,000
Meningkatnya cakupan Desa dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Lambu	Persentase desa dan kelurahan yang diberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (%)	100	100	100	15.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000
Meningkatnya cakupan Desa dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan dalam	Persentase desa dan kelurahan yang diberikan pembinaan dalam	100	100	100	50.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Langgudu	penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (%)												
Meningkatnya cakupan Desa dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Madapangga	Persentase desa dan kelurahan yang diberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (%)	100	100	100	26.250.000,000	100	151.250.000,000	100	151.250.000,000	100	151.250.000,000	100	151.250.000,000
Meningkatnya cakupan Desa dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Monta	Persentase desa dan kelurahan yang diberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (%)	100	100	100	54.830.000,000	100	159.510.000,000	100	159.510.000,000	100	159.510.000,000	100	159.510.000,000
Meningkatnya cakupan Desa dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Palibelo	Persentase desa dan kelurahan yang diberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (%)	80	85	85	47.070.000,000	90	181.920.000,000	95	181.920.000,000	95	181.920.000,000	100	181.920.000,000
Meningkatnya cakupan Desa dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Parado	Persentase desa dan kelurahan yang diberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (%)	100	100	100	52.848.000,000	100	163.848.000,000	100	163.848.000,000	100	163.848.000,000	100	163.848.000,000
Meningkatnya cakupan Desa dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sanggar	Persentase desa dan kelurahan yang diberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (%)	100	100	100	19.500.000,000	100	152.500.000,000	100	152.500.000,000	100	152.500.000,000	100	152.500.000,000
Meningkatnya cakupan Desa dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sape	Persentase desa dan kelurahan yang diberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (%)	100	100	100	12.105.000,000	100	152.105.000,000	100	152.105.000,000	100	152.105.000,000	100	152.105.000,000
Meningkatnya cakupan Desa dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Soromandi	Persentase desa dan kelurahan yang diberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (%)	100	100	100	32.185.000,000	100	156.560.000,000	100	156.560.000,000	100	156.560.000,000	100	156.560.000,000
Meningkatnya cakupan Desa dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tambora	Persentase desa dan kelurahan yang diberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (%)	100	100	100	44.510.000,000	100	160.750.000,000	100	160.750.000,000	100	160.750.000,000	100	160.750.000,000
Meningkatnya cakupan Desa dan Kelurahan yang dilakukan	Persentase desa dan kelurahan yang diberikan	100	100	100	49.500.000,000	100	159.500.000,000	100	159.500.000,000	100	159.500.000,000	100	159.500.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Wawo	pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (%)												
Meningkatnya cakupan Desa dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Wera	Persentase desa dan kelurahan yang diberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (%)	100	100	100	33.800.000,000	100	156.500.000,000	100	156.500.000,000	100	156.500.000,000	100	156.500.000,000
Meningkatnya cakupan Desa dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Woha	Persentase desa dan kelurahan yang diberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (%)	100	100	100	50.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					7.453.206.000,000		7.504.916.000,000		7.857.399.000,000		7.910.671.000,000		8.264.742.000,000
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.244.208.000,000		4.295.918.000,000		4.348.401.000,000		4.401.673.000,000		4.455.744.000,000
Meningkatnya kualitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase pencapaian kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (%)	100,00	100,00	100,00	4.244.208.000,000	100,00	4.295.918.000,000	100,00	4.348.401.000,000	100,00	4.401.673.000,000	100,00	4.455.744.000,000
	Persentase Pencapaian Kinerja pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase pencapaian kinerja pelayanan internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					601.000.000,000		601.000.000,000		601.000.000,000		601.000.000,000		601.000.000,000
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%)	85,00	85,00	90,00	601.000.000,000	90,00	601.000.000,000	95,00	601.000.000,000	95,00	601.000.000,000	100,00	601.000.000,000
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					860.000.000,000		860.000.000,000		860.000.000,000		860.000.000,000		860.000.000,000
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	85,00	85,00	90,00	860.000.000,000	90,00	860.000.000,000	95,00	860.000.000,000	95,00	860.000.000,000	100,00	860.000.000,000
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI					155.200.000,000		155.200.000,000		155.200.000,000		155.200.000,000		155.200.000,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KEMASYARAKATAN													
Meningkatnya Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan (%)	85,00	85,00	90,00	155.200.000,000	90,00	155.200.000,000	95,00	155.200.000,000	95,00	155.200.000,000	100,00	155.200.000,000
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					292.200.000,000		292.200.000,000		292.200.000,000		292.200.000,000		292.200.000,000
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan (%)	85,00	85,00	90,00	292.200.000,000	90,00	292.200.000,000	95,00	292.200.000,000	95,00	292.200.000,000	100,00	292.200.000,000
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.300.598.000,000		1.300.598.000,000		1.600.598.000,000		1.600.598.000,000		1.900.598.000,000
Meningkatnya cegah deteksi dini penanganan konflik sosial dalam masyarakat	Persentase kejadian konflik horizontal antarkelompok masyarakat dan pemerintah yang dimediasi (Kasus)	78,00	82,00	85,00	1.300.598.000,000	87,00	1.300.598.000,000	90,00	1.600.598.000,000	95,00	1.600.598.000,000	100,00	1.900.598.000,000



4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bima terdiri dari dua pembahasan. **Pertama**, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). **Kedua**, target penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut ini disajikan tabel IKU dari Kabupaten Bima.

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bima

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,63	5,67	5,72	5,76	5,81	6,48
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70	89	89	89	89	90
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,00	73,38	75,75	78,13	80,50	81,25
4.	Kontribusi PDRB Kab/kota Terhadap Provinsi	%	9,47	9,72	9,97	10,21	10,46	10,66
5.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	2,49	2,69	2,89	3,09	3,29	3,49
6.	PDRB per kapita	RpJuta	32,75	42,64	52,54	62,43	72,32	80,24
7.	Rasio Gini	Indeks	0,344	0,337	0,329	0,322	0,314	0,308
8.	Tingkat Kemiskinan	%	12,18	11,39	10,60	9,81	9,02	8,66
9.	Indeks Harmoni	Indeks	5,50	5,50	5,50	6,50	6,50	7,00
10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	74,68	74,89	75,11	75,32	75,53	75,74
11.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,56	8,70	8,84	8,98	9,12	9,22
12.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,12	14,19	14,26	14,32	14,39	14,46
13.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,25	73,75	75,25	76,75	78,25	79,75
14.	Prevalensi Stunting	%	17,33	15,69	14,05	12,41	10,77	9,13
15.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,439	0,414	0,389	0,364	0,339	0,319
16.	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	Indeks	56,73	57,23	57,73	58,23	58,73	59,23
17.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Indeks	2,04	2,02	2,00	1,97	1,95	1,93
18.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	85,00
19.	Indeks Desa	Indeks	66,56	71,56	76,56	81,56	86,56	91,56
20.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	84,00	84,25	84,5	84,75	85,00	85,25
21.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
22.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	132,86	130,56	128,25	125,95	123,64	121,34
23.	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	2,15	2,51	2,86	3,22	3,57	3,86
24.	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	19,83	23,33	26,83	30,32	33,82	36,62



Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bima merupakan indikator tujuan dan sasaran strategis terpilih yang telah dirumuskan pada Bab 3. Indikator Kinerja Utama telah selaras dengan indikator kinerja utama dan indikator makro Provinsi NTB. Indikator makro tersebut diantaranya pertumbuhan ekonomi, PDRB per Kapita, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, pengangguran terbuka, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan indeks kualitas lingkungan hidup. Melalui keselarasan indikator-indikator tersebut, RPJMD Kabupaten Bima memastikan bahwa arah pembangunan daerah sejalan dengan prioritas Provinsi NTB dan kebijakan nasional. Penyelarasan ini menjadi dasar penting dalam integrasi program, sinkronisasi anggaran, dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Bima yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera dalam kerangka pembangunan NTB 2025–2029.

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bima sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Indikator Kinerja Daerah memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik untuk pembangunan daerah Kabupaten Bima. Indikator Kinerja Daerah merupakan informasi yang menggambarkan keadaan riil atau nyata pada Kabupaten Bima yang disajikan ke dalam aspek dan bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	69,73	74,68	74,89	75,11	75,32	75,53	75,74	
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	78,26	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	85,00	
3	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	135,17	132,86	130,56	128,25	125,95	123,64	121,34	
4	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	-	2,15	2,51	2,86	3,22	3,57	3,86	
5	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	-	19,83	23,33	26,83	30,32	33,82	36,62	
6	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	-	2,34	2,45	2,56	2,66	2,77	2,86	
7	Persentase RTH	Persentase	4,24	4,59	4,95	5,30	5,65	5,98	6,24	
8	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	0	580	609,38	638,75	668,13	679,50	721,00	
9	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	38,46	42,53	46,75	51,38	56,18	61,25	66,51	
10	Kapasitas Air Baku	m3/detik	253	542	580,75	619,5	658,25	697,00	723,80	
11	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	31,76	45,82	47,33	48,84	50,35	51,86	53,07	
12	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	15,98	17,30	18,57	19,81	21,01	22,19	23,88	
13	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	20,46	31,76	35,51	39,26	43,01	46,76	49,26	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,99	71,00	73,38	75,75	78,13	80,50	81,25	
2	Kontribusi PDRB Kab/kota Terhadap Provinsi	%	8,10	9,47	9,72	9,97	10,21	10,46	10,66	
3	PDRB per kapita	Rp Juta/Orang/Bulan	27,15	32,75	42,64	52,54	62,43	72,32	80,24	
4	Rasio Gini	Indeks	0,358	0,344	0,337	0,329	0,322	0,314	0,308	
5	Tingkat Kemiskinan	Persentase	13,88	12,18	11,39	10,60	9,81	9,02	8,66	
6	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,30	8,56	8,70	8,84	8,98	9,12	9,22	
7	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	29,46	32,50	33,01	35,69	37,51	38,88	45,24	
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,66	14,12	14,19	14,26	14,32	14,39	14,46	
9	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	44,46	55,00	61,00	65,00	71,00	75,00	81,00	
10	Prevalensi Stunting	%	23,8	17,33	15,69	14,05	12,41	10,77	9,13	
11	Persentase Peserta Didik kabupaten Bima yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	29,97	31,74	33,51	35,28	37,05	38,82	40,59	
12	Persentase Peserta Didik kabupaten Bima yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	52,32	53,96	55,60	57,24	58,88	60,52	62,16	
13	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,479	0,439	0,414	0,389	0,364	0,339	0,319	
14	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	Indeks	55,73	56,73	57,23	57,73	58,23	58,73	59,23	





NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
15	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	117	117	117	118	119	119	119	
16	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	119	120	120	120	120	120	120	
17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Indeks	2,15	2,04	2,02	2,00	1,97	1,95	1,93	
18	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	53,67	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	60,00	
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	
20	Indeks Kualitas Air	Indeks	47,78	75,34	75,54	75,70	75,94	76,14	76,20	
21	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,69	95,10	95,40	95,70	96,00	96,30	96,45	
22	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	63,11	72,78	72,86	72,93	72,99	73,06	73,18	
23	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	24,27	26,27	28,77	31,27	33,77	36,27	38,27	
24	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	(%)	49,03	62,37	62,91	63,46	64,00	64,54	64,97	
25	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/kota	%	-	24,34	27,01	29,68	32,34	35,01	37,14	
26	Universal Coverage Jamsostek (UCJ)	%	-	54,64	57,03	59,43	61,82	64,21	66,60	
27	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	-	6,60	8,65	10,69	12,74	14,78	16,41	
28	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	11,50	11,86	11,95	12,04	12,13	12,22	12,29	
29	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,88	72,25	73,75	75,25	76,75	78,25	79,75	
30	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	60,70	62,23	63,77	65,30	66,84	68,37	70,52	
31	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,82	5,63	5,67	5,72	5,76	5,81	6,48	
32	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	25,86	35,87	37,87	39,87	41,87	43,87	45,50	
33	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	95	98,60	98,70	98,80	98,90	99,00	99,10	
34	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,33	92,42	92,48	92,5	92,53	92,64	92,7	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	-	2,49	2,69	2,89	3,09	3,29	3,49	
2	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persentase	2,76	3,06	3,49	3,91	4,32	4,73	5,06	
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	0,09	7,54	8,01	8,84	8,94	9,41	9,78	
4	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	0,14	0,57	0,72	0,87	1,02	1,18	1,30	
5	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,14	0,57	0,72	0,87	1,02	1,18	1,30	
6	Nilai tambah Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota	SBM/Milyar Rupiah	420,98	511,90	845,476	1.179,057	1.512,638	1.846,219	2.113,084	
7	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,85	3,90	3,93	3,96	3,98	4,01	4,02	
8	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase	8,13	9,10	9,74	9,77	9,91	9,96	10,03	
9	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persentase	37,95	38,02	38,07	38,13	38,18	38,23	38,27	
10	Indeks Desa	Indeks	63,56	66,56	71,56	76,56	81,56	86,56	91,56	
11	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok antar Waktu	%	-	1,00	0,95	0,89	0,84	0,78	0,73	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
12	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,45	3,50	3,70	3,90	4,10	4,30	4,50	
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	73,43	77,47	78,78	80,09	81,39	82,7	83,75	
14	Tingkat Inflasi	(%)	2,3	2,8	2,68	2,57	2,45	2,33	2,23	
15	Rasio pendapatan Per Kapita	%	11,19	12,31	13,44	14,57	15,70	16,83	17,74	
16	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,45	3,50	3,70	3,90	4,10	4,30	4,50	
17	Persentase Desa Mandiri	%	9,42	16,23	19,90	23,56	27,23	30,89	34,55	
18	Return on Asset (ROA) BUMD	%	-1,01	5,62	8,74	11,86	14,98	18,10375	20,30	
19	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	%	10,74	12,74	13,99	15,24	16,49	17,74	18,74	
20	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level Kabupaten/kota	%	23,62	23,74	23,92	23,89	23,97	24,04	24,10	
21	Persentase Penduduk yang memiliki rekening tabungan	%	28,85	34,62	37,87	41,11	44,36	47,60	50,20	
22	Indeks Kapabilitas Inovasi	Skor	1,92	2,06	2,18	2,31	2,43	2,5525	2,65	
23	Indeks Zakat Daerah	Indeks	0	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	
24	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Sektor pertanian	%	1,97	2,11	2,27	2,43	2,59	2,75	2,91	
25	Net Ekspor Barang dan Jasa	%	-24,41	-23,92	-23,49	-23,07	-22,64	-22,21	-21,87	
26	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel dan Berbintang)	Orang	909	1.091	1.146	1.200	1.255	1.309	136.120	
27	Rasio Permukiman Layak Huni	Nilai	0,732	0,735	0,741	0,748	0,755	0,764	0,773	
28	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,17	0,20	0,28	0,37	0,45	0,53	0,59	
29	Aset Dana Pensiun/PDRB	(%)	0,5	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	
30	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	%	45,16	40,00	39,00	38,00	37,00	36,00	35,00	
31	Rasio Kewirausahaan Kabupaten/kota	%	1,43	1,63	1,75	1,87	1,98	2,10	2,18	
32	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Persentase	0,38	0,45	0,48	0,52	0,55	0,58	0,61	
33	Total Dana BUMD/PDRB Kabupaten/Kota (Nilai tambah BUMD Kab/Kota terhadap PDRB Kab/Kota	%	3,94	4,49	4,68	4,88	5,07	5,26	5,42	
34	Nilai Realisasi investasi Per Kabupaten/kota berupa nilai rata-rata tahunan	Rp/Tahun	68,50995	75,36094	80,07100	84,78106	89,49112	94,20118	98.911.240	
35	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level Kabupaten/kota	%	0,09	7,54	8,01	8,84	8,94	9,41	9,78	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70	70	89	89	89	89	90	
2	Indeks Harmoni	Indeks	-	5,50	5,50	5,50	6,50	6,50	7,00	
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	76,57	78,00	79,00	81,00	82,00	83,00	85,00	
4	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	Indeks	75,98	76,50	77,25	78,45	79,30	80,50	81,07	
5	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,62	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	
6	Indeks Masyarakat Digital Daerah (IMDI)	Indeks	42,54	43,11	45,73	48,35	50,96	53,58	55,68	
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	76,47	84,00	84,25	84,5	84,75	85,00	85,25	
8	Indeks Kriminalitas	Indeks	75,43	75,00	73,00	70,00	65,00	60,00	50,00	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
9	Tingkat Partisipatif Pemilu	%	82,00	82,00	82,75	83,50	84,24	85,00	86,00	
10	Rasio Jumlah Petugas Keamanan dan sejenisnya terhadap jumlah penduduk per 10.000 orang	Rasio	29,70	34,09	34,35	34,61	34,87	35,13	35,30	
11	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	1,88	2,80	2,98	3,15	3,33	3,50	3,61	
12	Indeks Reformasi Hukum	Index	-	70	71,88	73,75	75,63	77,5	79,00	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	57,77	59,27	61,77	64,27	66,77	69,27	71,77	
2	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	52,06	54,06	57,86	60,76	63,66	66,56	69,46	
3	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55,40	56,60	57,60	58,70	59,80	60,90	62,00	
4	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	54,09	55,59	57,09	58,59	60,09	61,59	63,09	
5	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olaharaga	Nilai	70,90	72,56	74,82	76,28	78,78	80,00	80,00	
6	Persentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi	%	46,43	50,83	53,53	58,25	61,27	64,13	68,52	
7	Persentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	39,60	41,33	44,76	47,87	50,35	53,28	58,56	
8	Persentase warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan (APS)	%	86,31	86,76	87,23	90,15	92,31	93,75	94,58	
9	Persentase satuan pendidikan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi	%	15,59	17,42	20,64	23,76	25,35	28,52	32,21	
10	Persentase satuan pendidikan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	9,89	11,36	13,75	17,48	20,27	20,82	23,61	
11	Persentase Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	%	105,00	99,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Persentase Warga Negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesenjangan (APS)	%	15,63	30,07	40,86	45,65	50,35	55,65	60,98	
13	Persentase jamban dalam kondisi baik	%	40,12	45,74	48,39	50,63	55,76	60,24	65,76	
14	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	%	64,30	68,79	73,53	77,35	80,64	88,49	89,26	
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	%	80,85	82,00	83,00	85,00	86,00	87,00	90,00	
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	8	8	7	7	6	6	4	
3	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	91	87	83	79	75	71	67	
4	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	88,53	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
5	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	89,80	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	80,21	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru	%	82,70	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	lahir									
8	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	91,75	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96,7	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	99,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	97,5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	83,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	Penemuan Kasus TBC	%	85	90	90	90	90	90	90	
17	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	0	36,00	46,00	55,00	61,00	70,00	80,00	
18	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	
19	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	68,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Poin	-	51,73	54,15	56,72	59,44	62,26	65,12	
2	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	0	25	27	29	32	35	37	
3	Persentase peningkatan kualitas dan kepatuhan penyelenggaraan jasa konstruksi daerah terhadap standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan	%	0	100	100	100	100	100	100	
4	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase bangunan gedung yang memenuhi ketentuan penyelenggaraan, standar teknis, dan laik fungsi	%	0	62,50	65,50	69	72,50	76,50	81	
6	Persentase luas lahan yang terlayani irigasi teknis	%	34,19	38	42	46	50	54	58	
7	Ketaatan terhadap RTRW dan RDTR	%	70	71	72	73	74	75	76	
8	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	%	15,98	17,3	18,57	19,81	21,01	22,19	23,88	
9	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	53,11	54,71	56,11	57,41	59,01	60,51	61,91	
10	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	58,13	59,38	61,52	63,80	66,11	68,58	71,21	
11	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kabupaten	%	0	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
13	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	58	60	63	66	69	73	78	
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase kemandirian Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	%	75,03	76,83	78,30	79,89	81,51	83,12	84,74	
2	Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	72,85	74,25	75,5	77,65	79,2	80,5	81,75	
3	Rasio Rumah Layak Huni (RLH)	%	76,72	76,91	77,10	77,28	77,52	77,75	77,98	
4	Persentase kualitas kawasan perumahan dan permukiman	%	73,35	76,75	79,50	82,50	85,50	88,50	91,50	
5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	18,31	19,04	19,78	20,54	21,55	22,58	23,64	
6	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase	75	80	83	86	89	92	95	
8	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	71,69	75,30	76	79	82	85	88	
9	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	46	48	50	54	58	63	70	
2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Suburusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	0	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00	
3	Persentase peningkatan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.	%	82,14	77,27	83,85	87,58	91,30	92,17	93,04	
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	
6	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	70,60	72,75	73,95	75,09	77,85	80,10	81,25	
7	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai	71,90	71,95	72,50	72,60	72,75	73,80	74,90	
8	Nilai SAKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai	74,2	77	80	82	85	88	90,5	
9	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	%	28,57	42,86	71,43	85,71	100	100	100	
13	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	
14	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	25,81	33,33	42,86	52,38	61,90	71,43	80,95	
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Persentase PPKS yang tertangani	%	26,80	33	50	68	83	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai	75,75	77	78	79	80	81	82	
3	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	33,06	39,67	43,83	48,33	52,83	57,33	57,33	
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	%	70,00	80,00	81,00	82,00	83,00	85,00	85,00	
2	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai	69,95	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	93,00	
3	Tingkat Produktifitas tenaga kerja	%	8.291	7.204	7.500	8.000	8.500	9.000	10.000	
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	10	11	20	30	40	50	50	
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	550	570	580	601	620	640	660	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	53,89	54,12	54,82	55,34	56,57	57,61	58,60	
3	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	87	90	92	94	96	98	100	
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	87,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	%	72,85	73,85	74,85	76,5	77,5	78,75	80	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	0	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	
3	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	-	72,85	76,15	81,15	84,65	88,35	91,85	
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan Pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	-	63	77	72	77	83	88	
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Persentase penurunan pencemaran udara	%	35	35	35	35	35	35	35	
2	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	%	70,75	71,75	72,75	73,75	74,75	76	77	
3	Persentase penurunan pencemaran air	%	18	18	18	18	18	18	18	
4	Laju penurunan tutupan lahan (deforestasi)	%	14	14	14	14	14	14	14	
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	80	82	84	86	88	90	92	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6	Persentase sampah yang tertangani	%	24,02	24,11	24,20	24,29	24,38	24,48	24,57	
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	91,56	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	
2	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	93,95	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	
3	Nilai SAKIP Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	63,10	64,00	65,00	66,00	68,00	70,00	75,00	
4	Persentase Data Profil Kependudukan yang disusun	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai	80,05	80,05	80,07	80,09	80,1	80,15	80,2	
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	6,81	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	
4	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa		37	37	50	63	76	89	91	
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai	82,4	82,5	82,6	82,7	82,8	82,9	83	
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63.66:63.77	63.88:63.99	64.01:64.04	64.05:65.09	64.10:64.40	64.50:64.60	64.70:64.80	
3	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	2,50	2,47	2,44	2,40	2,38	2,35	2,30	
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,00	5,10	5,00	4,90	4,80	4,70	4,60	
5	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	68,00	68,60	68,90	69,20	69,70	70,00	70,10	
AO	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0,47	0,49	0,51	0,53	0,56	0,58	0,61	
2	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai	73,75	75	79	81	84	87	90	
3	Rasio Konektivitas Darat	Rasio	0,59	0,6	0,8	0,8	0,8	0,9	1	
4	Rasio Konektivitas Laut	Rasio	0,63	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	1	
5	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	0	5	8	20	28	36	44	
AP	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	0	68,12	70,43	72,60	73,12	74,02	74,90	
2	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai	76,15	76,50	77,00	77,50	78,40	79,50	80,15	
3	Indeks Domain Layanan SPBE	Indeks	3,30	3,58	3,86	4,15	4,43	4,73	5,00	
4	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	20	30	40	50	60	70	100	
5	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	9	15	36	52	70	82	100	
AQ	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	23,8	25,4	27,2	28,8	30,6	32,0	34,3	
2	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai	70,75	71,75	73	74,5	75,5	76,75	78	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	30	32	34	38	42	45	50	
4	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	31,6	33,2	34,3	35,7	36,6	37,6	38,6	
AR	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	70,53	55,50	60,50	70,50	80,50	80,50	90,50	
2	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai	68,25	69,25	70,5	71,75	73	74,75	76	
3	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	88,16	11,79	13,79	15,79	17,79	19,79	22,00	
AS	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,28	
2	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	0,52	0,56	1,02	1,05	2,02	2,05	2,55	
3	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	76,00	82,00	88,00	94,00	96,00	100,00	100,00	
4	Persentase peningkatan pemuda berprestasi	%	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	
5	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	3,20	5,50	7,50	8,50	9,50	10,05	11,05	
6	Persentase Atlet Yang Berasal dari Kab/Kota Yang Masuk Palatda Provinsi	Persentase	20.21`	22,53	24,86	26,57	28,92	29,31	30,09	
AT	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,68	2,69	2,7	2,71	2,72	2,73	2,73	
AU	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	0	20	25	30	40	45	45	
2	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		20	20	20	20	20	20	20	
AV	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
1	Persentase jumlah warisan budaya dilestarikan	%	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	
2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi Pusat seni dan pusat sejarah	%	10,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	
AW	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	%	70,66	72,32	75,04	76,98	78,21	80,00	81,05	
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	57,33	59,22	65,15	70,28	75,32	80,17	85,25	
AX	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps 40 dan 59 UU 43/2009)	%	89.38%	91.45%	93.68%	94.55%	95.95%	96.14%	97.12%	
2	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	-	32,00	37,00	42,00	47,00	52,00	57,00	
AY	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Nilai Tukar Nelayan Subsektor perikanan budidaya	%	119	120	120	120	120	120	120	
2	Nilai Tukar Nelayan Subsektor perikanan tangkap	%	119	120	120	120	120	120	120	
3	Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai	71	72	73	74	75,05	76,05	77,05	
4	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	%	0,915	1,22	1,23	1,23	1,25	1,86	2,98	
5	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	48,67	49,16	49,65	50,14	50,65	51,15	51,66	
AZ	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	0,38	0,45	0,48	0,52	0,55	0,58	0,61	
2	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	Nilai	72,25	73,7	75,17	76,67	78,21	79,77	81,37	
3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	%	1	1	2	3	4	5	6	
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	0	0	2	3	4	5	6	
5	Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	10	11	12	13	14	15	16	
BA	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Kontribusi subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan terhadap PDRB	%	35	35	35	35	35	35	35	
2	Kontribusi PDRB subsektor peternakan	%	6,23	6,5	6,75	7	7,25	7,5	7,75	
3	Nilai tukar petani subsektor peternakan	%	115	117	119	121	123	125	127	
4	Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Rakyat	Poin	148	148	148	148	148	148	148	
5	Nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	73,9	74,9	76	77,5	78,5	79,5	80	
6	Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Perkebunan	Nilai	73,45	74,45	75,45	76,45	77,45	78,45	79,45	
7	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	2	3	3	4	4	5	5	
8	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	0,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,5	1,5	
9	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	0,2	1	1	1,2	1,2	1,3	1,3	
10	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	0,1	1	1	1	1	1	1	
11	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveilance penyakit dari 5 PHMS)	%	83	85	87	89	91	93	95	
BB	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Persentase Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai	74,1	75	76	77	78	79	80	
3	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	26,67	27,78	28,89	30,00	31,11	31,11	31,11	
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	77	81	85	89	93	97	100	
BC	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	%	11,49	9,8	10	10	10	11	12	
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	40	50	75	90	100	100	100	
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri daerah	%	0	2	3	5	8	10	15	
4	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	0	5	10	10	35	40	40	
BD	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
1	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Persentase	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	
2	Persentase Satuan Pemukiman (SP) transmigrasi yang berkembang	%	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	
BE	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	63,10	65	68	71	75	79	82	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai	3,1153	3,221	3,311	3,421	3,577	3,611	3,722	
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	26,67	80	100	100	100	100	100	
4	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Indeks kematangan organisasi	Indeks	-	3	3	3	4	4	5	
7	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Indeks kualitas kebijakan	Indeks	-	65	70	72	77	79	80	
9	Persentase Instansi pemerintah (Perangkat Daerah) dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Persentase	96,68	96,68	96,68	96,68	96,68	96,68	96,68	
10	Persentase instansi pemerintah (Perangkat Daerah) dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal terkategori B	Persentase	63,10	65	68	71	75	79	82	
11	Persentase instansi pemerintah (Perangkat Daerah) dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) minimal terkategori B	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
12	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	96,68	96,68	96,68	96,68	96,68	96,68	96,68	
13	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	12,96	28	30	45	50	75	80	
14	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	6,43	8,8	11,02	18,36	23,51	31,22	36,73	
BF	4.02 - SEKRETARIAT DPRD									
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	
2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	-	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	85,00	85,20	85,30	85,40	85,50	85,60	85,70	
4	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	-	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
BG	5.01 - PERENCANAAN									
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	70	75	80	85	90	95	100	
2	Nilai SAKIP Bappeda	Nilai	82	84	86	88	90	92	95	
3	Persentase kualitas integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	%	85	90	95	96	98	100	100	
4	Kesesuaian antara RKPD dengan APBD	%	85	90	95	96	98	100	100	
BH	5.02 - KEUANGAN									
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	100	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
2	Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai	77,4	77,75	78,5	79	79,5	80	80,5	
3	Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	71,65	72,65	73,65	75	76	77	78	
4	Tingkat Pemenuhan Mandatory Spending sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku	%	82,87	85	85	90	90	90	100	
5	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	8,13	9,1	9,74	9,77	9,91	9,96	10,3	
6	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	91,50	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase aset pemerintah daerah yang terkelola dengan baik	%	80	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
8	Persentase alokasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar terhadap Total belanja APBD Tahun N	%	61,56	65	65	65	70	70	80	
9	Persentase Belanja pegawai Daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya	%	87,99	89,09	90,29	91,49	92,49	93,49	94,69	
10	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	14,34	15,64	16,64	17,84	18,84	19,84	21,04	
BI	5.03 - KEPEGAWAIAN									
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	73,00	74,15	75,25	76,35	78,45	80,10	80,25	
2	Nilai SAKIP Badan Kepegawaian Daerah	Nilai	50	60	65	70	70	70	75	
3	Indeks Sistem Merit/Sistem Manajemen Talenta (SIMATA)	Indeks	85,00	85,00	87,10	88,20	89,15	90,25	90,30	
BJ	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	70,00	72,00	74,00	76,00	80,00	85,00	85,50	
BK	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	18,10	40,80	44,47	48,14	51,81	55,47	55,47	
2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	%	0	14,7	20,6	26,5	35,3	41,2	41,18	
3	Nilai SAKIP BRIDA	Nilai	0	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	
4	Persentase Kebiasaan Berbasis Bukti	%	0	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	35,00	
BL	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
1	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai	87,00	89	89,56	90,13	90,69	91,25	71,70	
2	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	80	80	80	80	80	90	90	
3	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3,11	3,15	3,18	3,2	3,22	3,25	
4	Tindakanlanjutan Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		84,00	84,00	85,00	87,00	90,00	94,00	98,00	
5	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
6	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3,00	3,11	3,15	3,18	3,20	3,22	3,25	
BM	7.01 - KECAMATAN									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Wera	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Lambitu	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Madapangga	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sape	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Wawo	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Belo	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Woha	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Lambu	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
9	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Donggo	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tambora	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Monta	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Soromandi	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Parado	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Palibelo	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Ambalawi	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Langgudu	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sanggar	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bolo	%	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase Kualitas Kinerja Kecamatan Soromandi	%	100	100	100	100	100	100	100	
20	Persentase Kualitas Kinerja Kecamatan Parado	%	100	100	100	100	100	100	100	
21	Persentase Kualitas Kinerja Kecamatan Palibelo	%	100	100	100	100	100	100	100	
22	Persentase Kualitas Kinerja Kecamatan Monta	%	100	100	100	100	100	100	100	
23	Nilai SAKIP Kecamatan Palibelo	Nilai	70	74	76	80	84	86	89	
24	Nilai SAKIP Kecamatan Parado	Nilai	70	74	76	80	84	86	89	
25	Nilai SAKIP Kecamatan Soromandi	Nilai	70	74	76	80	84	86	89	
26	Nilai SAKIP Kecamatan Monta	Nilai	70	74	76	80	84	86	89	
27	Persentase Kualitas Kinerja Kecamatan Bolo	%	100	100	100	100	100	100	100	
28	Nilai SAKIP Kecamatan Lambitu	Nilai	70	74	76	80	84	86	89	
29	Persentase Kualitas Kinerja Kecamatan Woha	%	100	100	100	100	100	100	100	
30	Persentase Kualitas Kinerja Kecamatan Belo	%	100	100	100	100	100	100	100	
31	Persentase Kualitas Kinerja Kecamatan Wawo	%	100	100	100	100	100	100	100	
32	Persentase Kualitas Kinerja Kecamatan Lambitu	%	100	100	100	100	100	100	100	
33	Persentase Kualitas Kinerja Kecamatan Sape	%	100	100	100	100	100	100	100	
34	Persentase Kualitas Kinerja Kecamatan Wera	%	100	100	100	100	100	100	100	
35	Nilai SAKIP Kecamatan Sanggar	Nilai	70	74	76	80	84	86	89	
36	Persentase Kualitas Kinerja Kecamatan Sanggar	%	100	100	100	100	100	100	100	
37	Persentase Kualitas Kinerja Kecamatan Donggo	%	100	100	100	100	100	100	100	
38	Persentase Kualitas Kinerja Kecamatan Langgudu	%	100	100	100	100	100	100	100	
39	Nilai SAKIP Kecamatan Donggo	Nilai	70	74	76	80	84	86	89	
40	Persentase Kualitas Kinerja Kecamatan Lambu	%	70	75	80	85	90	95	100	
41	Persentase Kualitas Kinerja Kecamatan Madapangga	%	100	100	100	100	100	100	100	
42	Persentase Kualitas Kinerja Kecamatan Tambora	%	100	100	100	100	100	100	100	
43	Nilai SAKIP Kecamatan Woha	Nilai	70	74	76	80	84	86	89	
44	Nilai SAKIP Kecamatan Madapangga	Nilai	70	74	76	80	84	86	89	
45	Nilai SAKIP Kecamatan Langgudu	Nilai	70	74	76	80	84	86	89	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
46	Nilai SAKIP Kecamatan Belo	Nilai	70	74	76	80	84	86	89	
47	Nilai SAKIP Kecamatan Wawo	Nilai	70	74	76	80	84	86	89	
48	Nilai SAKIP Kecamatan Tambora	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	
49	Nilai SAKIP Kecamatan Lambu	Nilai	70	74	76	80	84	86	89	
50	Nilai SAKIP Kecamatan Bolo	Nilai	70	74	76	80	84	86	89	
51	Nilai SAKIP Kecamatan Wera	Nilai	70	74	76	80	84	86	89	
52	Nilai SAKIP Kecamatan Sape	Nilai	70	74	76	80	84	86	89	
53	Persentase Kualitas Kinerja Kecamatan Ambalawi	%	100	100	100	100	100	100	100	
54	Nilai SAKIP Kecamatan Ambalawi	Nilai	70	74	76	80	84	86	89	
BN	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Persentase konflik Suku Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang dapat terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	85,00	85,10	85,20	85,30	85,40	85,50	85,70	
3	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	%	85	85	85	85	85	85	85	
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	75	75	75	75	75	75	75	
5	Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	85	90	90,2	90,5	90,7	93,3	95,2	



RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bima Tahun 2025-2029

Bab 5

PENUTUP





Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2025-2029, merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah; dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui pendekatan teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif, serta pendekatan politis dengan melibatkan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di Kabupaten Bima. Untuk menjamin pencapaian visi, misi dan program yang telah disusun, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029 menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian, di dalam proses pembangunan di Kabupaten Bima akan tercipta kerjasama yang diistilahkan sebagai “kolaborasi” serta pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap Pemerintahan yang diistilahkan sebagai “desentralisasi” dengan harapan seluruh *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Bima akan bekerja penuh rasa tanggungjawab dan kelak meraih hasilnya bersama, mewujudkan **“Bima Bermartabat yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh dan Berkelanjutan”**

Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Bima periode Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

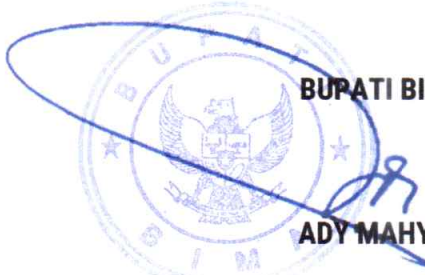
- a. RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Bima harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.
- b. RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kabupaten Bima yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- c. RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidaksesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidakpatuhan bahkan pelanggaran.
- d. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Bima, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari pemerintah



- pusat, pemerintah provinsi, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Corporate Social Responsibility* (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- e. Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara urusan pemerintahan yang diampunya dengan urusan pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat renstra baru.
 - f. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam renstra/renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - g. RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terjadi perubahan yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah dan/atau perubahan kebijakan nasional.
 - h. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kabupaten Bima tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bima, penyusunan RKPD Kabupaten Bima Tahun 2030 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Bima Tahun 2025-2045, penyelesaian target kinerja RPJMD 2021-2026 yang belum tercapai, dan menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bima dengan pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta mengantisipasi perkembangan pembangunan yang akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Kabupaten Bima. Selanjutnya RKPD Kabupaten Bima Tahun 2030 menjadi bagian dari RPJMD periode berikutnya.

Semoga dokumen RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bima


BUPATI BIMA,
ADY MAHYUDI